



Menguatkan Ketahanan Ekonomi, Mempercepat Transisi Berkelanjutan

Daftar Isi

Pengantar

4	Tentang Laporan Ini
6	Laporan Direksi dan Dewan Komisaris
12	Tanggung Jawab Pelaporan Keberlanjutan 2025
14	Sorotan Bisnis dan Keberlanjutan

Keberlanjutan di BRI

25	Strategi Keberlanjutan
----	------------------------

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

31	Keterlibatan Pemangku Kepentingan
31	Proses Identifikasi Pemangku Kepentingan
32	Saluran Pelibatan Pemangku Kepentingan
33	Penilaian Materialitas

Climate-Related Disclosure

40	Manajemen Risiko Iklim
----	------------------------

Sustainability-Related Disclosure

80	Keuangan Inklusif
112	Privasi dan Keamanan Data
126	Bisnis yang Beretika

General Sustainability Topic Disclosure

143	Tata Kelola
177	Manajemen Risiko
182	<i>Our People: Insan BRILiaN</i>
198	<i>Local Communities and Human Rights</i>
209	<i>Responsible Artificial Intelligence</i>

Lampiran

211	Tabel Data ESG
246	<i>Issued Securities Impact Reporting</i>
276	Indeks Standar Pelaporan
292	Indeks Pelaporan IDX
293	<i>Assurance</i>
297	Lembar Umpan Balik

Pengantar



Tentang Laporan Ini

Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) disusun untuk merefleksikan aspirasi dan kinerja keberlanjutan BRI dalam mendukung visi "BRIVOLUTION Reignite: *Deliver Sustainable Values and Integrated Solutions to Achieve Indonesia's Aspiration*".

Melalui laporan ini, kami menyajikan informasi dampak dari aktivitas operasional dan pembiayaan BRI terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus menguraikan risiko serta peluang keberlanjutan, termasuk risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang dilengkapi dengan metrik dan target. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemerintah, investor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan informasi keberlanjutan, sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap penerapan keuangan berkelanjutan.

Lingkup Laporan

Batas Cakupan Pelaporan

Laporan ini disusun oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sebagai entitas pelapor tunggal (*bank only*) dan tidak mencakup entitas perusahaan anak. Fokus pelaporan mencakup seluruh aktivitas operasional di bawah kendali langsung Perusahaan, mulai dari Kantor Pusat, *Regional Office*, Kantor Cabang, BRI Unit, hingga seluruh jaringan layanan di wilayah Indonesia, kecuali dinyatakan lain pada informasi spesifik. ^[GRI 2-2]

Untuk pelaporan periode tahun buku 2025, BRI melakukan audit laporan keuangan secara terkonsolidasi yang mencakup entitas anak seperti Bank Raya, BRI Global Financial Services Ltd, BRI Life, BRI Finance, BRI Manajemen Investasi, BRI Ventures, BRIDS, BRI Insurance, Pegadaian, dan PNM. Meskipun demikian, informasi terkait kinerja keberlanjutan entitas anak tersebut tidak diungkapkan dalam laporan ini (kecuali diinformasikan lain secara spesifik). ^[GRI 2-2]

Periode dan Frekuensi Pelaporan

Laporan ini menyajikan informasi mengenai aktivitas dan kinerja keberlanjutan BRI untuk periode tahun buku 2025, terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025, selaras dengan periode Laporan Keuangan yang telah diaudit. Laporan Keberlanjutan dipublikasikan setiap tahun, menyertakan data historis tiga tahun terakhir sebagai dasar keterbandingan kinerja untuk memberikan gambaran kemajuan yang terukur. Data historis pada laporan ini meliputi periode tahun 2023 hingga 2025. ^[GRI 2-3]

Informasi yang Disajikan Ulang

Penyajian kembali informasi atas laporan tahun sebelumnya dicantumkan secara eksplisit dengan catatan khusus pada bagian data terkait. Pencantuman ini untuk memastikan pembaca dapat melacak perubahan metodologi atau penyesuaian data secara akurat. ^[GRI 2-4]

Keterkaitan Informasi ^[H.4]

Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 disusun sebagai laporan tersendiri untuk melengkapi Laporan Tahunan BRI Tahun 2025. Jika Laporan Tahunan menyajikan gambaran kinerja keuangan, tata kelola, dan arah strategis Bank secara menyeluruh, maka Laporan Keberlanjutan ini berfokus pada bagaimana aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) diintegrasikan ke dalam strategi bisnis dan operasional BRI.

Secara khusus, Laporan Keberlanjutan ini juga menguraikan pengelolaan risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk risiko dan peluang terkait perubahan iklim, serta implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pengungkapan ini memberikan konteks yang lebih mendalam atas informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Tahunan, termasuk keterkaitan antara kebijakan dan inisiatif keberlanjutan dengan kinerja keuangan dan strategi investasi jangka panjang. Informasi tertentu dalam laporan ini merujuk secara eksplisit pada Laporan Tahunan BRI dan Laporan Keuangan Konsolidasi 2025 dengan indikasi nomor halaman atau bagian yang relevan. Seluruh dokumen yang dirujuk tersedia secara publik pada waktu bersamaan di website BRI (www.bri.co.id) dengan tingkat aksesibilitas yang setara.

Seluruh informasi keuangan dalam laporan ini disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR), konsisten dengan mata uang presentasi Laporan Keuangan Konsolidasian BRI. Apabila terdapat data dalam mata uang asing, konversi dilakukan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025, dengan penjelasan spesifik diberikan pada setiap data terkait.

Standar Pengungkapan

Pernyataan Kepatuhan

Publikasi Laporan Keberlanjutan BRI Tahun 2025 merupakan pemenuhan kewajiban pelaporan keberlanjutan sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Penyusunan laporan ini mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain memenuhi regulasi dalam negeri, penyusunan laporan ini juga mengacu pada sejumlah standar global, meliputi:

- Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 (*in accordance with GRI Standards*);
- Global Reporting Initiative (GRI) G4 Supplement Sector;
- Standard dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) untuk bank komersial;
- International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standard Board (ISSB) dan telah diadopsi di Indonesia menjadi Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2; dan
- Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Tentang Laporan Ini

Sumber Panduan

Dalam penyusunan laporan ini, BRI merujuk pada berbagai panduan teknis untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang dilaporkan. Khusus untuk data emisi gas rumah kaca, periode pelaporan diperluas hingga empat tahun (2022-2025) sesuai dengan tahun dasar perhitungan emisi BRI pada tahun 2022. Dalam pengukuran emisi, laporan ini menyajikan dua pendekatan metodologi berbeda. Emisi operasional diukur menggunakan standar *Greenhouse Gas* (GHG) Protocol, dengan cakupan seluruh kantor cabang BRI di Indonesia. Sementara emisi yang dibiayai (*financed emissions*) dihitung berdasarkan standar Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) dan cakupan Science Based Targets Initiative (SBTi). Pengukuran emisi yang dibiayai mencakup berbagai jenis aset pembiayaan, meliputi pinjaman korporasi, pembiayaan proyek pembangkit listrik, *real estate* komersial, ekuitas yang tercatat, dan obligasi. Pada sejumlah aspek yang relevan, laporan ini mencerminkan prioritas BRI dalam mengintegrasikan komitmen terhadap sepuluh prinsip UN Global Compact (UNGC) serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penjaminan Eksternal [OJK G.1] [GRI 2-5, 2-14]

Seluruh data keberlanjutan, pengungkapan, dan klaim dalam laporan ini telah ditinjau dan disetujui Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris [GRI 2-14] serta diverifikasi dan dijamin secara eksternal oleh PT Decar Verite Asia berdasarkan standar AA1000AS. Pernyataan dan laporan *assurance* secara detail dapat dilihat pada halaman [293-295](#) laporan ini. Adapun informasi emisi GRK dalam laporan ini telah diverifikasi oleh pihak ketiga independen *Sucofindo International Certification Services*, dengan lembar opini yang dapat dilihat pada halaman [296](#). [GRI 2-5]

BRI memilih penjamin eksternal sesuai kebijakan pengadaan perusahaan yang berlaku berdasarkan keahlian, reputasi, dan tidak adanya potensi konflik kepentingan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi sampel bukti dokumentasi dan konfirmasi kepada pihak narasumber di seluruh unit kerja terkait. [GRI 2-5]

Narahubung Laporan [GRI 2-3]

BRI sangat menghargai setiap masukan dan saran yang dapat menyempurnakan laporan ini di masa mendatang. Untuk itu, silakan menghubungi:

Narahubung

Dhanny, Sekretaris Perusahaan

 +6221 575 2452

 humas@bri.co.id

Untuk informasi lain mengenai Laporan Keberlanjutan BRI Tahun 2025, Anda dapat mengunjungi <https://bri.co.id/report>.





Hery Gunardi
Direktur Utama

Laporan Direktur Utama^{[OJK D.1] [GRI 2-22]}

Melalui transformasi berkelanjutan dan integrasi ESG dalam seluruh aktivitas bisnis, BRI terus memperkuat perannya sebagai penggerak inklusi keuangan dan katalisator pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Perekonomian global masih dihadapkan pada ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, tekanan inflasi, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya risiko perubahan iklim. Namun demikian, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan 5,11% (yoy) yang didukung kuatnya konsumsi domestik dan sektor industri pengolahan. Kondisi ini mencerminkan resiliensi ekonomi nasional serta membuka peluang bagi dunia usaha untuk terus berkembang. Dengan resiliensi organisasi dan strategi yang adaptif, BRI meyakini peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan tetap terbuka.

Menyikapi hal tersebut, BRI terus mendorong transformasi menuju praktik bisnis yang berkelanjutan dan penguatan fundamental bisnis melalui inisiatif transformasi BRIvolution Reignite. Untuk mendukung transformasi tersebut BRI juga telah merumuskan strategi keberlanjutan dengan aspirasi menjadi *World-class Sustainable Banking Group focusing on Environmental, Social, and Governance*, yang diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu *Stakeholder Empowerment*, *Adaptive Portfolio Management*, dan *Responsible Business and Operations*. Aspirasi ini menjadi arah strategis bagi BRI untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat serta lingkungan.

Laporan Direktur Utama

Implementasi strategi keberlanjutan BRI kami sajikan dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 bertema *"Menguatkan Ketahanan Ekonomi, Mempercepat Transisi Berkelanjutan."* Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen BRI terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

Laporan ini juga memuat topik-topik material utama, seperti etika bisnis, privasi dan keamanan data, serta layanan keuangan inklusif, yang ditetapkan berdasarkan masukan pemangku kepentingan dan tinjauan manajemen sepanjang tahun 2025.

Kebijakan dalam Pemenuhan Strategi Berkelanjutan dan Pencapaian 2025

Sebagai respons atas dinamika global yang semakin kompleks sekaligus bagian dari komitmen menjalankan strategi keberlanjutan, BRI terus memperkuat fundamental perusahaan melalui 2 pilar utama BRIVolution Reignite, yaitu *Transform the Funding Franchise* serta *Revamp Existing Core and Build New Core*, yang didukung oleh enam enablers yaitu *Human Capital, Risk Management, IT & Digital, Distribution, Operational Excellence*, dan *Rebranding*. Inisiatif ini difokuskan pada penguatan dana murah dan kapabilitas transaction banking, penguatan core business khususnya pada segmen mikro, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru di segmen konsumen yang didukung peningkatan kapabilitas digital, manajemen risiko yang disiplin, dan pengembangan sumber daya manusia. Transformasi ini juga diperkuat melalui penyempurnaan model distribusi, optimalisasi proses bisnis, serta internalisasi budaya kerja BRILiaN Way.

Sejalan dengan agenda transformasi, BRI mencatatkan kinerja yang solid pada tahun 2025 dengan aset konsolidasian mencapai Rp2.135 triliun atau tumbuh 7,2% YoY. Penyaluran kredit meningkat 12,3% YoY menjadi Rp1.521 triliun, dengan fokus pada segmen UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan penggerak inklusi keuangan. Pertumbuhan ini didukung oleh struktur pendanaan yang semakin kuat, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,4% YoY menjadi Rp1.466,8 triliun dan CASA Ratio meningkat menjadi 70,61%. Melalui pengelolaan bisnis yang prudent, BRI mencatat ROA 2,7%, ROE 17,4%, serta laba bersih Rp57,132 triliun, mencerminkan kinerja yang tetap solid dan berkelanjutan.

BRI juga terus memperkuat tata kelola dan strategi keberlanjutan guna menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Hal ini diwujudkan melalui penguatan kebijakan keberlanjutan serta peran Komite ESG dan *ESG Group* di bawah Direktur *Legal & Compliance* yang bertugas memastikan integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, serta implementasi strategi bisnis BRI.

Beberapa kebijakan yang diambil BRI di antaranya peningkatan efisiensi operasional melalui percepatan digitalisasi proses bisnis, implementasi *Climate Risk Stress Testing* (CRST) pada seluruh portofolio Bank, serta adopsi standar pelaporan keberlanjutan IFRS S1 dan IFRS S2. Pada saat yang sama, BRI juga memastikan bahwa penerapan prinsip keuangan berkelanjutan juga diiringi dengan

perlindungan hak dan kepentingan nasabah melalui penerapan prinsip perlindungan data dan privasi secara konsisten dalam pengembangan maupun penyediaan produk dan layanan perbankan, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik industri. Di tahun 2025, BRI mencatatkan raihan *zero data breach* dan 91,72% *customer satisfaction*.

Di sisi pembiayaan, portofolio untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) mencapai Rp93,2 triliun atau 6,9% dari total kredit, sementara pembiayaan kepada Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) mencapai Rp718,7 triliun atau 53,5% dari portofolio kredit, yang mencerminkan peran BRI dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif, khususnya melalui pemberdayaan UMKM. Selain itu, investasi berkelanjutan BRI tercatat sebesar Rp5,26 triliun, atau 45% dari total portofolio investasi, melalui investasi pada berbagai instrumen seperti *green bonds*, *social bonds*, dan *sustainability bonds*.

Tidak sebatas itu saja, pendanaan berkelanjutan BRI tahun 2025 mencapai Rp34,8 triliun, atau sekitar 76,4% dari total pendanaan *wholesale*, termasuk penerbitan *Social Bond* senilai Rp 5 triliun yang menjadikan BRI sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi sosial untuk mendukung pembiayaan UMKM, perluasan akses keuangan, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Di sisi operasional, berbagai inisiatif efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan operasional rendah karbon terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen menuju *Net Zero Emission* tahun 2050. Di tahun 2025, BRI mencatatkan emisi operasional sebesar 445.140 ton CO₂e, turun 9,59% dibandingkan baseline 2022, yang didukung oleh berbagai inisiatif seperti penggunaan 926 kendaraan operasional ramah lingkungan serta pemasangan panel surya di 152 unit kerja. Komitmen ini turut memperoleh pengakuan internasional, dengan *rating* ESG S&P Global sebesar 74, keanggotaan *Sustainability Yearbook Member* selama tiga tahun berturut-turut, serta berbagai penghargaan internasional atas kualitas pelaporan keberlanjutan, termasuk 2 penghargaan Platinum untuk kategori *Asia's Best Sustainability Report (Public Sector)* dan *Asia's Best Sustainability Report (CEO Letter)*, 1 penghargaan Gold untuk kategori *Asia's Best Materiality Reporting* di ajang *Asia Sustainability Reporting Award (ASRA)*.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai salah satu bank komersial terbesar di Indonesia sekaligus bank dengan fokus pembiayaan UMKM terbesar di Asia Tenggara, BRI menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis dengan mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam kebijakan pembiayaan, pengelolaan risiko, serta pengembangan produk dan layanan keuangan. BRI juga menerapkan proses screening pembiayaan berbasis aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola serta meningkatkan portofolio pembiayaan pada sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian berkelanjutan.

Laporan Direktur Utama

Salah satu fokus dalam strategi keberlanjutan BRI adalah perluasan inklusi keuangan yang diperkuat melalui sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Pegadaian dan PNM. Melalui sinergi ini, BRI memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen, khususnya pelaku usaha ultra mikro dan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal. PNM menghadirkan program PNM Mekaar, yang dirancang khusus untuk pemberdayaan perempuan pra-sejahtera melalui pembiayaan kelompok yang disertai dengan pendampingan usaha dan penguatan kapasitas ekonomi keluarga. Sementara itu, Pegadaian menyediakan layanan pembiayaan berbasis gadai yang mudah diakses dan cepat, sehingga memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan likuiditas jangka pendek. Melalui ekosistem Ultra Mikro ini, BRI berupaya memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

BRI juga terus meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program pengembangan seperti Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, dan platform LinkUMKM yang telah dimanfaatkan lebih dari 14,95 juta pelaku UMKM, serta memberikan relaksasi KUR senilai Rp43,95 triliun bagi lebih dari 1 juta debitur terdampak bencana. Di sisi lain, percepatan adopsi layanan digital turut mendorong peningkatan inklusi keuangan, tercermin dari peningkatan 18.9% pengguna BRImo dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 45.9 juta pengguna dan peningkatan 48.1% pengguna Qlola dibandingkan tahun 2024 mencapai 113 ribu pada tahun 2025.

Ke depan, BRI akan terus memperkuat perannya sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menempatkan UMKM sebagai pusat strategi pembiayaan serta mengintegrasikan prinsip ESG dalam seluruh aktivitas bisnis.

Strategi Pencapaian Target Berkelanjutan^[OJK D.1.c]

Di tengah dinamika lingkungan bisnis global yang semakin kompleks, khususnya dalam konteks transisi menuju ekonomi rendah karbon, BRI terus memperkuat fundamental bisnis baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Perkembangan seperti implementasi harga karbon, pengetatan regulasi emisi, serta perubahan teknologi berpotensi memengaruhi kinerja portofolio, kualitas aset, dan stabilitas sistem keuangan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BRI mengintegrasikan pengelolaan risiko transisi ke dalam kerangka manajemen risiko Bank melalui penguatan analisis risiko berbasis skenario, diversifikasi portofolio pembiayaan, serta pengembangan pembiayaan transisi yang mendukung nasabah beradaptasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Sejalan dengan posisi strategis BRI dalam sistem keuangan nasional, pengelolaan risiko ini juga selaras dengan standar global yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis BRI dalam jangka panjang.

Untuk memastikan efektivitas implementasi strategi serta pencapaian target keberlanjutan, BRI terus memperkuat kapabilitas internal organisasi. BRI menempatkan Insan BRILiaN sebagai elemen kunci dalam pengelolaan risiko dan peluang keberlanjutan melalui pengembangan kompetensi

pada bidang-bidang yang relevan. Dengan sumber daya manusia yang adaptif dan berwawasan berkelanjutan, proses pengambilan keputusan bisnis BRI semakin didukung oleh pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika risiko iklim serta implikasinya terhadap portofolio Bank. Dalam konteks tersebut, transformasi digital dan dinamika ekonomi masa depan juga dipandang sebagai peluang untuk terus meningkatkan kapabilitas, produktivitas, serta keterlibatan Insan BRILiaN dalam mendukung strategi jangka panjang Perusahaan.

Ke depan, *roadmap* keberlanjutan BRI periode 2026–2030 difokuskan pada penguatan implementasi ESG secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas bisnis, dimulai dari penguatan fondasi dan percepatan pembiayaan hijau dan inklusif, hingga menargetkan BRI sebagai pemimpin keuangan berkelanjutan di Asia Tenggara melalui peningkatan sustainable finance, penurunan emisi operasional, serta penguatan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

Penutup

Akhir kata, Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, seluruh Insan BRILiaN, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kontribusi yang telah mengantarkan berbagai capaian BRI sepanjang tahun 2025. Kepercayaan dan kolaborasi yang terjalin menjadi fondasi penting bagi BRI dalam memperkuat peran sebagai institusi keuangan yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan praktik bisnis berkelanjutan melalui integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam seluruh aktivitas bisnis dan operasional BRI. Komitmen ini didukung oleh penerapan tata kelola yang terintegrasi, pengelolaan risiko yang disiplin, serta strategi bisnis yang adaptif, sehingga BRI dapat terus menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 13 Maret 2026



Hery Gunardi
Direktur Utama



**Kartika
Wirjoatmodjo**
Komisaris Utama

Laporan Komisaris Utama^[GRI 2-22]

Dalam menghadapi dinamika ekonomi dan risiko iklim yang semakin kompleks, BRI memperkuat governance keberlanjutan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat, prudent, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk — untuk selanjutnya disebut “Perseroan” atau “BRI” — dapat terus menjalankan perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Selama 130 tahun perjalanannya, BRI telah membuktikan ketangguhan dalam menavigasi berbagai siklus ekonomi dan tantangan zaman, dan senantiasa memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian dunia dihadapkan pada berbagai tantangan yang saling terkait, mulai dari volatilitas pasar keuangan, dinamika tensi geopolitik, perubahan *behaviour* masyarakat, hingga meningkatnya dampak *climate change* yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan menjadi semakin relevan dan mendesak. Keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi aspirasi jangka panjang, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang menentukan ketahanan dan daya saing Perseroan.

Menanggapi dinamika tersebut, BRI telah menyusun strategi keberlanjutan dengan aspirasi menjadi *World-class Sustainable Banking Group focusing on Environmental, Social, and*

Laporan Komisaris Utama

Governance yang berfokus pada tiga pilar utama: *Stakeholder Empowerment*, *Adaptive Portfolio Management*, dan *Responsible Business and Operations*. Aspirasi ini menjadi peta jalan bagi BRI untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat dan lingkungan. Dewan Komisaris memandang bahwa kerangka ini merupakan langkah strategis yang tepat dalam memposisikan BRI sebagai institusi keuangan yang mampu menjadi katalis pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Strategi, Prioritas, dan Kinerja Berkelanjutan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi mengarahkan transformasi Perseroan melalui BRIVolution Reignite sebagai panduan strategis untuk memperkuat posisi BRI sebagai bank universal yang hadir bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap menjadikan ekosistem UMKM sebagai tulang punggung bisnis utama Perseroan. Melalui pendekatan ekosistem yang mengintegrasikan seluruh segmen dengan mikro dalam satu rantai pasok yang saling terhubung, BRI tidak hanya memperkuat daya saing UMKM dalam rantai pasok yang lebih besar, terintegrasi dan berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan produk serta layanan yang semakin *digital-friendly* dan aspiratif guna memenuhi kebutuhan seluruh nasabah di tengah perkembangan pasar dan era digital yang bergerak semakin dinamis.

Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap penguatan inklusi keuangan sebagai salah satu manifestasi nyata dari pilar *Stakeholder Empowerment*. Sinergi antara BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam kerangka Holding Ultra Mikro (UMi) telah membentuk ekosistem layanan keuangan yang terintegrasi, memungkinkan jutaan pelaku usaha mikro memperoleh akses terhadap pembiayaan, pendampingan usaha, serta layanan keuangan formal yang lebih sistemik. Ekosistem ini menjadi pilar utama dalam menjangkau pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sekaligus mendorong praktik pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi nasabah.

Pengawasan terhadap kualitas pertumbuhan dilakukan melalui pemanfaatan *data analytics* yang terintegrasi, sehingga perluasan inklusi keuangan dan penguatan ekosistem UMKM dapat berjalan seiring dengan pengelolaan risiko yang *prudent*. Pendekatan ini memastikan bahwa ekspansi bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola yang sehat serta mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Di tengah kompleksitas tantangan ekonomi global, BRI mampu mempertahankan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp57,13 triliun dengan *Return on Equity* (ROE) sebesar 17,4%, yang mencerminkan keberhasilan strategi pertumbuhan berbasis ekosistem UMKM yang efisien serta penguatan model bisnis yang terintegrasi. Struktur pendanaan juga semakin kuat melalui peningkatan dana murah (CASA), yang didukung oleh optimalisasi transaksi nasabah dan penguatan sinergi layanan dalam BRI Group. Kinerja finansial yang kokoh ini menjadi fondasi penting bagi BRI untuk terus memperluas dampak positifnya melalui berbagai inisiatif keberlanjutan.

Integrasi ESG dalam Strategi dan Operasional Bisnis

BRI terus memperkuat integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) ke dalam seluruh strategi dan aktivitas bisnis Perseroan. Hal ini tercermin melalui penguatan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam proses bisnis, implementasi strategi dekarbonisasi melalui pengelolaan emisi serta analisis risiko iklim, dan pengembangan portofolio pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang mendukung kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Perseroan memandang bahwa langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan bisnis menghadapi dinamika transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam mendorong penciptaan nilai jangka panjang melalui praktik tata kelola berkelanjutan, BRI melakukan identifikasi isu-isu material menggunakan metode *Double Materiality Analysis* (DMA) yang mengevaluasi isu-isu yang paling relevan dan berdampak signifikan terhadap kinerja finansial (*financial materiality*) maupun dampak sosial dan lingkungan (*impact materiality*) dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025, Perseroan memperoleh masukan dari beragam pemangku kepentingan meliputi manajemen dan pekerja, investor, nasabah, pemerintah, pemasok, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Pengungkapan terkait materialitas dilakukan dengan mengadopsi kerangka pelaporan IFRS S1 dan IFRS S2 dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025.

Dampak Nyata bagi Masyarakat, Lingkungan, dan Ekonomi

Dewan Komisaris memastikan bahwa berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan yang diterbitkan oleh BRI, termasuk *Sustainability Bond* dan *Social Loan*, dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional. Komitmen ini menegaskan upaya BRI untuk memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dan disalurkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penyaluran kredit, BRI secara konsisten menerapkan proses prescreening guna memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan senantiasa sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap penyelesaian *Climate Risk Stress Testing* (CRST) Fase 2 yang kini telah mencakup seluruh portofolio pembiayaan BRI. Hasil analisis tersebut, yang dipadukan dengan pemodelan skenario iklim dari *Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System* (NGFS), menjadi landasan penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan risiko iklim serta mengantisipasi risiko transisi maupun risiko fisik secara lebih proaktif. BRI memperkuat komitmen pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia 2060 dengan menetapkan target NZE BRI lebih awal, yaitu tahun 2050 sesuai metodologi *Science-Based Target Initiative* (SBTi), menegaskan posisi BRI sebagai lembaga keuangan di Indonesia yang telah memperoleh persetujuan penghitungan target emisi (NZE *near term target*) dari SBTi.

Portofolio Kategori Kegiatan Usaha Keuangan Berkelanjutan (KKUB) mencapai Rp811 triliun, yang terdiri dari portofolio Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebesar Rp93 triliun dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebesar Rp718 triliun. Komposisi ini mencerminkan konsistensi BRI dalam menyelaraskan pertumbuhan bisnis dengan penciptaan nilai sosial dan lingkungan, melalui penyaluran pembiayaan yang telah dikurasi sesuai kriteria keberlanjutan.

Laporan Komisaris Utama

Melalui pendekatan ekosistem yang terintegrasi, BRI terus mendorong penyaluran pembiayaan produktif, khususnya kepada segmen UMKM, guna mendukung aktivitas ekonomi nasabah serta memperkuat keterhubungan dalam rantai nilai yang lebih luas. Di sisi lain, peran Holding Ultra Mikro (UMi) dalam pemberdayaan nasabah turut memperluas dampak sosial BRI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Pada aspek operasional, Dewan Komisaris juga mendorong implementasi berbagai inisiatif operasional rendah karbon, antara lain melalui pengembangan *Green Network*, penggunaan kendaraan listrik, internalisasi budaya hemat energi, pengurangan penggunaan kertas dan plastik, pemasangan panel surya di sejumlah unit kerja, serta penerapan standar bangunan ramah lingkungan dengan sertifikasi *GreenShip Gold* pada infrastruktur strategis.

Perseroan mewujudkan komitmen sosial dan lingkungannya melalui program BRI Peduli yang dirancang untuk menciptakan nilai bersama secara berkelanjutan. Program ini beroperasi dalam empat kerangka strategis — Flagship Program, Inisiasi Unit Kerja, Tanggap Darurat Bencana, dan Stakeholders Program — dengan cakupan yang melintasi dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di sisi ekonomi, BRI Peduli mendorong pemberdayaan UMKM dan memperluas literasi keuangan hingga menjangkau wilayah 3T. Di sisi lingkungan, inisiatif seperti Jaga Sungai Jaga Kehidupan dan Grow & Green menjadi kontribusi nyata Perseroan dalam mendukung agenda NZE. Sementara itu, di dimensi sosial, program AURA hadir untuk memberdayakan kelompok perempuan pelaku usaha agar memiliki kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Di samping itu, upaya perluasan inklusi keuangan juga disertai dengan penguatan perlindungan nasabah melalui penerapan prinsip transparansi, keamanan data, serta mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, guna memastikan bahwa layanan perbankan yang diberikan tidak hanya inklusif, tetapi juga bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan nasabah.

Seluruh upaya tersebut diperkuat melalui internalisasi budaya kerja berkelanjutan di seluruh organisasi. Peluncuran Brilian Way sebagai pedoman budaya kerja baru mengintegrasikan nilai *Integrity, Collaborative, Accountability, Growth Mindset*, dan *Customer Focus* dalam perilaku keseharian Insan BRILiaN. Pengelolaan human capital yang berfokus pada pengembangan kompetensi, integritas, dan kesejahteraan pekerja menjadi fondasi penting dalam membangun talenta yang siap menghadapi masa depan (*future-ready talents*) sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja organisasi.

Tata Kelola Berkelanjutan dan Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis BRI dijalankan dengan berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Fungsi pengawasan terhadap implementasi keuangan berkelanjutan didukung oleh berbagai komite di bawah Dewan Komisaris yang secara aktif memantau aspek strategi, risiko, kepatuhan, serta keberlanjutan. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap penerapan *parenting style* dalam pengelolaan Perusahaan Anak guna memastikan standar etika, hak asasi manusia, serta praktik keberlanjutan diterapkan secara konsisten di seluruh entitas BRI Group.

Mendukung konsistensi Perseroan dalam penerapan *roadmap* keuangan berkelanjutan, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan melalui rapat bersama Direksi maupun kunjungan kerja lapangan, termasuk pemberian persetujuan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) jangka pendek tahun 2026 dan RAKB jangka panjang tahun 2026–2030, guna memastikan implementasi program telah dilaksanakan secara konsisten dan budaya keberlanjutan telah diadopsi di seluruh unit kerja BRI.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik keberlanjutan global, Dewan Komisaris juga mendukung konsistensi BRI dalam menerapkan Sepuluh Prinsip *United Nations Global Compact* (UNGC) serta penyampaian *Communication on Progress* (CoP) yang berisi rincian dampak BRI pada aspek tata kelola, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi. Dewan Komisaris mengapresiasi konsistensi Perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis inti dan mengarahkan agar seluruh inisiatif ini terus diperkuat sehingga memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat posisi BRI sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab di mata seluruh pemangku kepentingan.

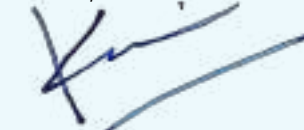
Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan kepada BRI. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Direksi, manajemen, dan seluruh Insan BRILiaN atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi terbaik yang diberikan dalam menjalankan transformasi Perseroan serta memperkuat komitmen keberlanjutan BRI.

Dengan fondasi tata kelola yang kuat, strategi yang adaptif, serta komitmen yang teguh terhadap pembangunan berkelanjutan, Dewan Komisaris meyakini bahwa BRI berada pada jalur yang tepat untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sejalan dengan semangat BRIVolution Reignite dan aspirasi sebagai *World-class Sustainable Banking Group focusing on Environmental, Social, and Governance*, BRI menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi dan berinovasi sebagai bank universal yang hadir bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap menjadikan ekosistem UMKM sebagai tulang punggung bisnis utama Perseroan. Melalui pendekatan ekosistem yang berkelanjutan, BRI akan terus menciptakan nilai bersama dan solusi terintegrasi yang memperkuat daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan mewujudkan aspirasi Indonesia yang lebih sejahtera.

Jakarta, 13 Maret 2026



Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

Tanggung Jawab Pelaporan Keberlanjutan 2025

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk [GRI 2-14]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2026

Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo

Komisaris Utama



Parman Nataatmadja

Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen



Awan Nurmawan Nuh

Komisaris



Edi Susianto

Komisaris Independen



Helvi Yuni Moraza

Komisaris



Lukmanul Khakim

Komisaris Independen

Tanggung Jawab Pelaporan Keberlanjutan 2025

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ^{[GRI}

2-14]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2026

Direksi


Viviana Dyah Ayu R. K.

Wakil Direktur Utama


Mahdi YusufDirektur *Legal & Compliance*
Hakim Pu'ratamaDirektur *Operations*
Aquarius RudiantoDirektur *Network dan Retail Funding*
Hery Gunardi

Direktur Utama


Saladin Dharma Nugraha EffendiDirektur *Information Technology*
Akhmad PurwakajayaDirektur *Micro*
Alexander Diplo Paris Y. S.Direktur *Commercial Banking*
Aris HartantoDirektur *Consumer Banking*
Achmad RoyadiDirektur *Finance & Strategy*
Riko AdythiaDirektur *Corporate Banking*
Farida ThamrinDirektur *Treasury and
International Banking*
Ety YuniartiDirektur *Manajemen Risiko*

Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

Sekilas BRI

BRI didirikan 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Selama lebih dari 130 tahun, BRI telah melayani masyarakat Indonesia sebagai mitra keuangan yang andal dan terpercaya melalui berbagai produk simpanan dan pinjaman serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan individu, korporasi, dan UMKM. Sebagai bank komersial yang fokus melayani nasabah di segmen UMKM, BRI juga menyediakan berbagai dukungan non-keuangan berupa program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Informasi lebih lengkap mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha BRI dapat dilihat di <https://bri.co.id>. ^{[OJK C.4] [GRI 2-6]}

Informasi Umum ^{[OJK C.2, C.3.a] [GRI 2-1]}



Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ^[GRI 2-1]



Visi

Deliver Sustainable Values and Integrated Solutions to Achieve Indonesia's Aspiration ^[OJK C.1]



Kantor Pusat

Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia ^{[OJK C.2] [GRI 2-1]}



Badan Hukum

Perseroan Terbatas ^[GRI 2-1]



Pekerja

84.949 orang ^[OJK C.3.b]



Total Asset

Rp1.931,54 triliun (Bank Only) ^[OJK C.3.a]



Laba Bersih

50.404 triliun (Bank Only)



Pemegang Saham

Negara RI Melalui
BP BUMN ^[OJK C.3.c] **0,00%**

PT Danantara Asset
Management (Persero) ^[OJK C.3.c] **53,19%**

Publik ^[OJK C.3.c] **46,81%**

Pemegang
Saham

Keterangan: Pada 31 Desember 2025, Negara RI memiliki 1 Saham Seri A Dwiwarna melalui Badan Pengaturan BUMN dan 80.610.976.875 Saham Seri B melalui PT Danantara Asset Management (Persero).



Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

BRI dan Perusahaan Anak ^[GRI 2-6]



Informasi lebih detail terkait Perusahaan Anak dan Konglomerasi PT BRI (Persero) Tbk mengacu kepada Annual Report 2025

Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

Perubahan yang Bersifat Signifikan ^[OJK C.6]

Selama periode pelaporan tahun 2025, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada bisnis dan operasional BRI. Namun demikian, BRI tetap melakukan optimalisasi pengelolaan jaringan kantor melalui pembukaan, penggabungan, dan perubahan status jaringan kantor sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas operasional dan pelayanan kepada nasabah sehingga mengubah jumlah unit kerja operasional BRI dari 7.568 di tahun 2024 menjadi 7.377 di tahun 2025. Keputusan ini telah mempertimbangkan dinamika berbagai faktor internal maupun eksternal yang relevan terhadap perkembangan bisnis perusahaan. ^{[OJK C.6] [GRI 2-6]}

Jaringan Usaha ^{[OJK C.3.d] [GRI 2-1, 2-6]}

Bersama dengan sepuluh perusahaan anak, BRI Group menyediakan layanan keuangan yang komprehensif kepada berbagai pemangku kepentingan melalui 7.377 kantor layanan perbankan yang didukung oleh 627.679 e-channel* dan 1.193.835 Agen BRILink, serta enam jaringan luar negeri di Cayman Island, New York, Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Timor Leste, memperkuat kehadirannya di tingkat global.



*terdiri dari ATM, CRM, EDC, e-Buzz (merchant, unit kerja operasional, dan BRILink)

Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

Ikhtisar Bisnis dan Kinerja Aspek Keberlanjutan

Sebagai perusahaan publik, BRI secara terbuka mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan perusahaan kepada publik dan regulator sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16 tahun 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Informasi tentang kondisi keuangan dan non-keuangan, termasuk perbandingan antara target dan pencapaian dalam portofolio, target pembiayaan, dan investasi perusahaan dapat diakses secara lengkap melalui Laporan Tahunan BRI 2025. [\[GRI 3-3, 201-2, 201-4\]](#) Pada tahun 2025, BRI masih mendapatkan insentif penurunan tarif pajak sebesar 3% dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. BRI juga tidak mencatat adanya pemasukan yang berasal dari peluang atau dampak finansial karena perubahan iklim. [\[GRI 3-3\] \[201-2\] \[201-4\]](#)

Kinerja Keuangan ^[OJK B.1]

Kinerja Finansial Bank (Bank Only) ^{[B.1.a] [B.1.b] [B.1.c]}

Pendapatan operasional Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
217,38 ▲	215,74	189,65

Laba sebelum pajak Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
62,20 ▼	69,11	67,07

Laba bersih bank Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
50,404 ▼	54,841	53,153

Manfaat Ekonomi

Pembayaran dividen Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
50,39 ▲	47,83	43,50

Pembayaran pajak

2025
7,33 Rupiah (Triliun)

Keuangan Berkelanjutan ^[OJK B.1.d, F.3]

Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (jenis/kategori)

2025	2024	2023
5 ▲	5	4

Pembiayaan kepada KUBS Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
718,67 ▲	698,66	690,43

Pembiayaan kepada KUBL Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
93,20 ▲	86,56	82,32

ESG-based Corporate Bond Investment Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
5,26 ▲	4,41	4,54

ESG-based Wholesale Funding Rupiah (Triliun)

2025	2024	2023
34,79 ▼	44,83	39,58

Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

Kinerja Lingkungan^[B.2]

Pembiayaan Kepada KUBL
(Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan)

Rp93,2 Triliun

6,94% dari total Kredit BRI

Penggunaan Energi^{[B.2.a] [F.6] [F.92]}

2.622.590 GJ

dibandingkan
2.848.795 GJ
di 2024

dibandingkan
2.919.628 GJ
di 2023

dibandingkan
3.074.958 GJ
di 2022

Emisi Cakupan 1

115.105 ton CO₂e

dibandingkan
124.155 ton
CO₂e di 2024

dibandingkan
355.742 ton
CO₂e di 2023

dibandingkan
360.135 ton
CO₂e di 2022

Emisi Cakupan 2

330.035 ton CO₂e

dibandingkan
346.353 ton
CO₂e di 2024

dibandingkan
355.742 ton
CO₂e di 2023

dibandingkan
360.135 ton
CO₂e di 2022

Emisi Cakupan 3

12.370.526 ton CO₂e

dibandingkan
12.854.676 ton
CO₂e di 2024

dibandingkan
10.434.550 ton
CO₂e di 2023

dibandingkan
11.222.829 ton
CO₂e di 2022

Penghindaran Emisi^[B.2.a]

1.276 tonCO₂e

16,35%
(179 tonCO₂e)
dari 2024

46,19%
(403 tonCO₂e)
dari 2023

6,18%
(74 tonCO₂e)
dari 2022

Total sampah yang didaur ulang adalah **740,01 ton**, yang setara dengan menghindari **746,40** emisi ton CO₂e.^{[F.13][B.2.c]}

BRI Menanam telah mendistribusikan **1.061.927 bibit pohon** yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi penyerapan karbon sebesar **3.427,53 ton CO₂e**.^[B.2.d]

Melalui *Green Network initiative framework*, BRI mengoperasikan **926 eco-friendly vehicles** (mobil dan motor) sampai dengan 2025.

Instalasi surya panel di **152 unit kerja** sampai dengan tahun 2025

Kinerja Sosial^{[B.3] [F.28] [F.30]}

Pemberdayaan Nasabah

Indikator Inklusi Keuangan

75,02%

63,6%

80,51%

64,5%

■ Inklusi Keuangan
Indonesia*
■ Kontribusi BRI

*) Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2025

2024

2025

Gender

72,3 juta

Perempuan

68,2 juta

Laki-laki

Usia

20,4 juta

Generasi Muda

33,5 juta

Lansia

Wilayah 3T

4,7 juta
(tertinggal, terdepan, terluar)

Pembiayaan Kepada KUBS
(Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial)



Rp718,7 Triliun

53,5% dari total kredit BRI

Jumlah Nasabah Kredit di Segmen Mikro dan Ultra Mikro (termasuk Pegadaian dan PNM)



34,50 Juta

2025
35,90 juta 36,90 juta

Tingkat Kepuasan Nasabah

91,72%

2025 87,06% 2024 84,66%

Net Promoter Score



2025 69,00 2024 64,00

Pemberdayaan Pekerja

Komposisi Pekerja BRI

Total 84,9 ribu



Perempuan
42,93%

Laki-laki
57,07%



Women in Leadership
(Junior, Middle & Top Management)

4.467 leaders



Perempuan
25,63%

Laki-laki
73,47%



Tingkat Perputaran Pekerja Sukarela



1,24%

2025 1,29% 2024 1,01%

Pemberdayaan Masyarakat

Nilai Social Return on Investment (SROI) Program TJSL^{[B.1.e] [B.3] [F.23] [F.25]}

Bantuan Sarana Pasar Gentan

18,22

Bantuan Pengembangan Potensi Hijau Kawasan Den Bukit, Buleleng

4,23

Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor

14,15

Bantuan Pembangunan Penataan Objek Wisata Taman Sari Waterfall, Kecamatan Gianyar

4,13

Bantuan Alat Pengolahan Kopi Kelompok Tani Ijen

7,35

Bantuan Pengadaan Mesin Pengolahan Hasil Panen Ubi Jalar KWT Sri Mandiri Sembawa, Kecamatan Jalaksana, Kuningan

3,98

Bantuan Pengembangan Daerah Wisata Kya-Kya

4,39

Bantuan Alat Membuat Gadisku 2 UPT PSBR Blitar

3,92

Bantuan Sarana dan Prasarana Ekosistem Urban Farming Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru

4,36

Apresiasi Dana Pendidikan Desa BRILiaN Sigumpar Julu, Kabupaten Toba

3,09

*) Nilai SROI merupakan return (dalam rupiah) yang dihasilkan dari setiap 1 rupiah dana yang diinvestasikan melalui program TJSL. Program-program BRI menghasilkan dampak di atas 1, yang berarti memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.

Kinerja Tata Kelola^[B.3]



3 dari 12
anggota (dari susunan Jajaran Direksi) adalah perempuan



United Nations
Global Compact

Publikasi laporan Communication on Progress untuk United Nations Global Compact (UNGC).



ASEAN
CORPORATE
GOVERNANCE

Top 5 perusahaan publik di Indonesia dan the ASEAN Asset Class dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Indeks Corporate Governance
Perception

95,38

2025

dengan kategori

**Most Trusted
Company**

Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

Keanggotaan Asosiasi [OJK C.5] [GRI 2-28]

BRI secara proaktif menjadi bagian dari berbagai organisasi dan asosiasi yang mendukung inti bisnis perusahaan, guna mengikuti perkembangan lingkungan bisnis, memperluas jaringan, serta memperkuat kontribusi, sinergi, dan peran BRI dalam menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan. Namun, BRI tidak memberikan kontribusi finansial selain iuran keanggotaan. Hingga akhir tahun 2025, BRI tercatat sebagai anggota beberapa asosiasi berikut:

Nama Asosiasi	Tujuan Bergabung	Posisi	Skala
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)	Berkontribusi mengembangkan sektor perbankan di Indonesia sebagai salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Ketua 2	Nasional
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Mengoptimalkan efisiensi, profesionalisme dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam industri sistem pembayaran.	Sekretaris	Nasional
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	Merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat sektor perbankan.	Ketua	Nasional
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Memfasilitasi pertukaran informasi tentang ketentuan/peraturan Bank Indonesia maupun standar internasional perbankan.	Anggota	Nasional
Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI)	Mendukung penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia sebagai bentuk mitigasi risiko perubahan iklim serta mengambil peluang bisnis dalam perekonomian yang tahan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi pada pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).	Anggota	Nasional
United Nations Global Compact (UNGC)	Mendorong keberlanjutan perusahaan dan praktik bisnis bertanggung jawab yang selaras dengan dengan sepuluh prinsip universal UNGC serta mendukung pencapaian SDGs.	Anggota	Internasional
Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)	Menjalin kerja sama global antar lembaga keuangan dalam mengembangkan metodologi standard dalam mengukur dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari pinjaman dan investasi.	Anggota	Internasional
Science-Based Target Initiatives (SBTi)	Menetapkan target iklim yang kredibel dan berbasis sains dan meningkatkan kredibilitas perusahaan.	Perusahaan dengan target emisi jangka pendek tervalidasi	Internasional

Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

BRI menyadari bahwa pertumbuhan bisnis perlu diiringi dengan penciptaan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada segmen UMKM, BRI berupaya memperluas akses layanan keuangan, memberdayakan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui berbagai produk, layanan, dan program keberlanjutan, BRI turut berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

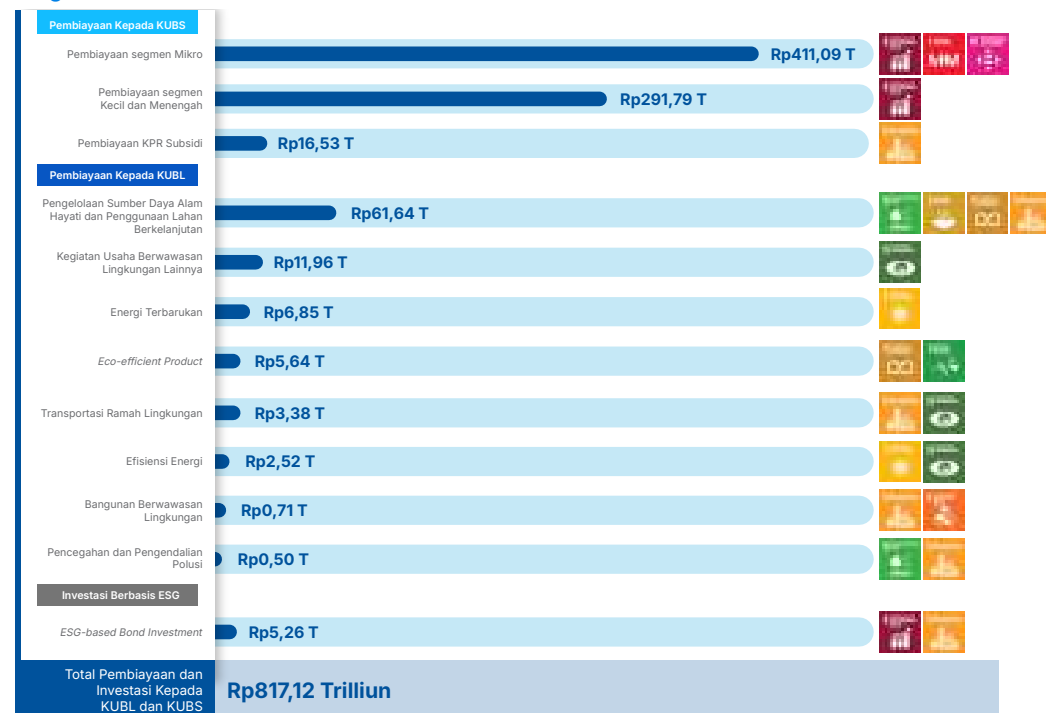
SDGs Nilai Ekonomi

Penciptaan Nilai Ekonomi: Mendukung Pertumbuhan Usaha

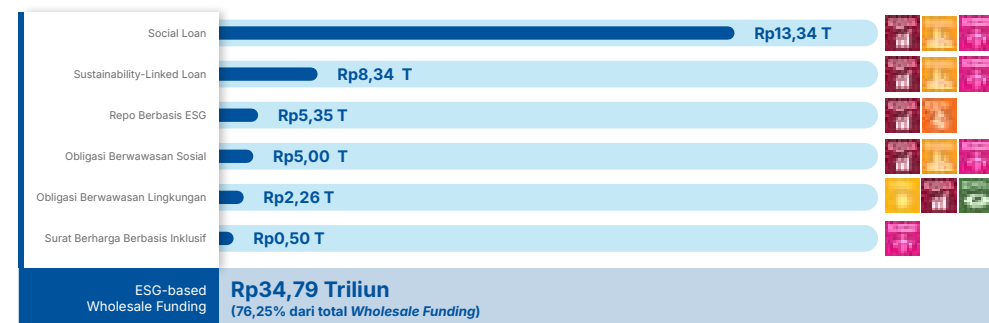
BRI menciptakan nilai ekonomi melalui penyediaan produk dan layanan perbankan yang mendukung pertumbuhan usaha serta memperluas akses keuangan masyarakat. Beberapa aktivitas yang mendukung penciptaan nilai ekonomi antara lain:

- penyaluran kredit yang berfokus pada Kegiatan Usaha Berwawasan sosial dan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL);
- penyediaan produk simpanan dan layanan perbankan sesuai kebutuhan nasabah;
- penguatan layanan digital melalui aplikasi BRIimo;
- perluasan akses layanan keuangan melalui jaringan AgenBRILink; dan
- diversifikasi sumber pendanaan yang mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi berkelanjutan.

Pembiayaan dan Investasi Kepada KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) dan KUBS (Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial)



ESG-based Wholesale Funding



SDGs Linked-revenue



Secara umum, kontribusi BRI dalam menciptakan nilai ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Kontribusi ini sejalan dengan salah satu indikator penting dalam pencapaian SDGs di Indonesia, yaitu peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Melalui berbagai produk dan layanan perbankan yang inklusif, hingga akhir tahun 2025 BRI telah menjangkau sekitar 140,5 juta nasabah individu. Capaian ini mencerminkan peran BRI dalam memperluas inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

SDGs Nilai Sosial

Penciptaan Nilai Sosial: Memberdayakan Masyarakat dan Memperluas Inklusi

Di samping penciptaan nilai ekonomi, BRI juga berkomitmen untuk menciptakan nilai sosial melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan nasabah, pengembangan dan perlindungan pekerja, serta pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut antara lain meliputi:

- Perluasan akses keuangan bagi nasabah, melalui penyaluran pembiayaan pada segmen ultra mikro dan mikro serta program inklusi dan literasi keuangan.
- Pengelolaan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan, guna mendukung kesejahteraan dan pengembangan pekerja.
- Program pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai inisiatif BRI Peduli TJSL.

Pilar Inklusi dan Literasi Keuangan



Program



Hasil



Kontribusi untuk SDGs

Aksesibilitas perbankan yang luas

- **7.377** Unit Kerja
- **627.679** E-Channels (ATM, CRM, EDC, dan E-Buzz)
- **1.193.835** Agen BRILink
- **28,29 Juta** Pengguna BRImo



Produk pinjaman, tabungan, dan asuransi yang terjangkau

- **34,50 juta** debitur UMKM
- **187,36 juta** nasabah simpanan di segmen mikro dan ultra mikro
- **13,95 juta** polis asuransi AMKKM



Program pemberdayaan masyarakat dan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan usaha

desa
brilian link
klasterku
hidupku



Perlindungan Kesehatan Finansial Nasabah

- Penyaluran kredit yang bertanggung jawab
- Kebijakan Pemasaran yang Bertanggung Jawab
- Penyuluh Digital



Pilar Hubungan dengan Masyarakat



Program



Hasil

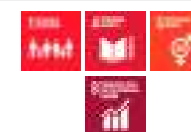


Kontribusi untuk SDGs

Program BRI Peduli TJSL Pilar Sosial:

- Program BRI Peduli "Ini Sekolahku"
- Cegah Stunting Itu Penting Dalam Rangka Hari Gizi Nasional 2025
- Program BRI Peduli Beasiswa Pelajar 2025

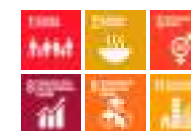
Kontribusi terhadap komunitas lokal senilai: **Rp236 miliar**



Program BRI Peduli TJSL Pilar Ekonomi:

- Pelatihan Ekspor bagi UMKM
- Bantuan Sarana Prasarana Pasar Gentan Yogyakarta
- Bantuan Alat Pengelolaan Kopi Kelompok Tani Ijen

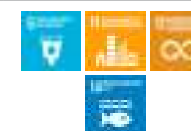
Kontribusi terhadap komunitas lokal senilai: **Rp25 miliar**



Program BRI Peduli TJSL Pilar Lingkungan:

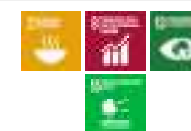
- Jaga Sungai Jaga Kehidupan dalam rangka Hari Sungai Sedunia Tahun 2025
- BRI Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Kelola Sampah) Waste Management Journey
- Program BRI Peduli Grow & Green Transplantasi Terumbu Karang

Kontribusi terhadap komunitas lokal senilai: **Rp66 miliar**



BRI Menanam

Penanaman **1.061.927** bibit pohon Berpotensi menyerap karbon sebesar **3.427,53 tonCO₂e**



Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

Pilar Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Hak Asasi Manusia



Program

- Keterwakilan perempuan
- Kesetaraan kesempatan dan hak bagi seluruh pekerja



Hasil

- Mendorong dan memwadahi potensi perempuan.
- Komposisi pemimpin perempuan mencapai **25,63%**, melampaui target Kementerian BUMN sebesar 25% pada posisi kepemimpinan.
- Jumlah pekerja disabilitas sebanyak **57 pekerja** di mana **22 pekerja di antaranya adalah perempuan**.



Kontribusi untuk SDGs



Penerbitan Kebijakan Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*)

Menyediakan lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan, pelecehan, perundungan, dan bentuk kekerasan lainnya serta menjunjung tinggi martabat dan harga diri untuk mempertahankan produktivitas pekerja.



Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dengan menjalankan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Hasil evaluasi SMK3 mendapatkan nilai **94,26%** atau kriteria "**memuaskan**" dari PT Multi Sertifikasi Indonesia.



Kebijakan dan Asesmen Hak Asasi Manusia:

- Pakta komitmen terhadap HAM
- Kebijakan umum HAM
- Asesmen HAM pada pekerja dan rantai pasok/mitra.

Cakupan Asesmen HAM:

- 44,77%** pekerja BRI mengikuti asesmen HAM (38.035 dari 84.949 pekerja)
- 100%** dari total rantai pasok/mitra BRI mengikuti asesmen HAM (416 dari 416 pemasok)



SDGs Nilai Lingkungan

Penciptaan Nilai Lingkungan: Mendukung Ketahanan Lingkungan dan Transisi Berkelanjutan

BRI turut menciptakan nilai lingkungan melalui berbagai kebijakan, pengelolaan risiko, serta program yang mendukung perlindungan lingkungan dan pengelolaan perubahan iklim. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pengelolaan risiko iklim dalam portofolio pembiayaan dan pengembangan produk dan pembiayaan yang mendukung kegiatan ramah lingkungan. Melalui langkah-langkah tersebut, BRI berupaya mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pilar Pengendalian Emisi dan Perubahan Iklim



Program

Penerbitan subsector *loan policy* untuk sektor dengan emisi tinggi.

Pelaksanaan *Climate Risk Stress Testing* (CRST)

Pengembangan produk keuangan berkelanjutan.

Green Network



Hasil

Penerbitan *Subsector Loan Policy* untuk sektor beremisi tinggi, termasuk sektor ketenagalistrikan dan kehutanan.

Pelaksanaan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) untuk mengevaluasi potensi dampak finansial dari risiko terkait perubahan iklim.

Penyaluran ***Sustainability-Linked Loan* sebesar USD 120,5 juta** serta peluncuran fitur Carbon Management pada Qlola Cash Management.

- 926 Eco-friendly Vehicle** (Termasuk Mobil dan Motor)
- 152 kantor** cabang menggunakan panel surya
- 746.404 kgCO₂e** dihindari melalui Program *Zero Waste to Landfill*



Kontribusi untuk SDGs



Ikhtisar Bisnis dan Keberlanjutan

Penghargaan dan Rating ESG

Selain penilaian kinerja keuangan, investor semakin mempertimbangkan parameter lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk itu, BRI senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan penerapan ESG serta secara berkelanjutan mengevaluasi kinerjanya melalui analisis dan pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkemuka.



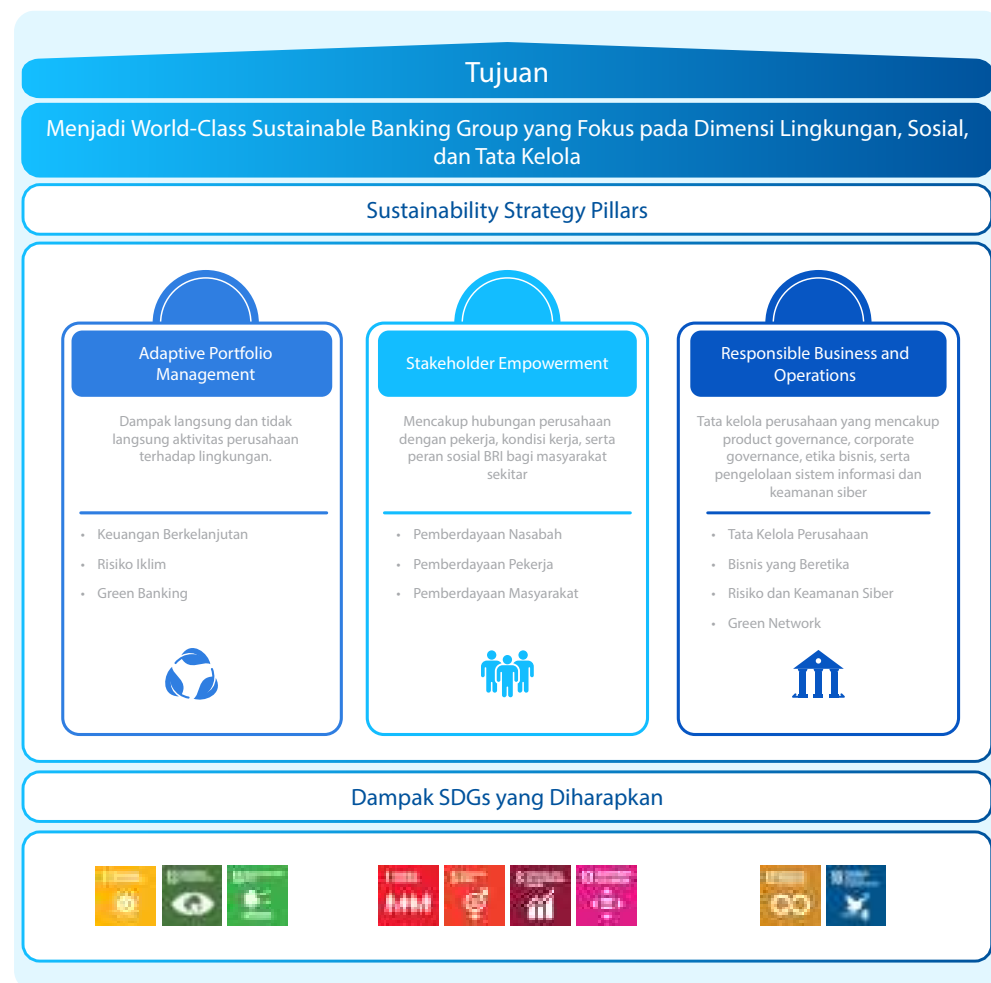
Keberlanjutan di BRI



Keberlanjutan di BRI

Strategi Keberlanjutan [OJK A.1 C.1] [GRI 2-24]

Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, BRI berpedoman pada Surat Edaran Direksi tentang Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan, yang menegaskan penerapan tiga pilar utama Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) sebagai fokus strategis dalam pelaksanaan agenda keberlanjutan Perusahaan, meliputi:



Berlanjutnya transformasi BRI melalui BRIVolution Reignite menandai komitmen Perusahaan untuk terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan usaha yang semakin kompleks. Dengan memperkenalkan positioning baru sebagai “Satu Bank untuk Semua”, BRI menegaskan perannya sebagai bank universal yang inklusif, relevan, dan berorientasi jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Transformasi ini mencerminkan kesadaran BRI bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kemampuan Perusahaan dalam menjawab ekspektasi nasabah, memperkuat kepercayaan publik, serta mengelola dampak ekonomi, sosial, dan tata kelola secara bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, visi dan misi keberlanjutan BRI menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan usaha selaras dengan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan [OJK E.1] [GRI 2-23] [GRI G4 FS1]

Strategi keberlanjutan BRI terdiri atas tiga pilar keberlanjutan, yaitu *Adaptive & Dynamic Portfolio Management*, *Stakeholder Empowerment*, serta *Responsible Business & Operations*. Sebagai bentuk implementasi strategi tersebut, BRI telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. RAKB BRI mencakup rencana jangka panjang lima tahunan periode 2025–2029 serta rencana jangka pendek tahunan, RAKB Tahun 2025 yang ditetapkan melalui SK No. S.2241-DIR/ESG/05/2025. Implementasi RAKB dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan terintegrasi secara menyeluruh dalam proses bisnis dan operasional. Hal ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, antara lain pembiayaan berwawasan lingkungan, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta penerapan praktik operasional yang ramah lingkungan.

Pengembangan RAKB berada di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan disusun oleh Komite ESG dengan melibatkan direktorat terkait. Proses penyusunan dilakukan secara lintas unit kerja guna memastikan keselarasan implementasi di seluruh organisasi. Dokumen RAKB, baik jangka pendek maupun jangka panjang, telah memperoleh persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris pada 28 November 2025. Dokumen tersebut terdiri atas RAKB Jangka Panjang (2025–2029) serta RAKB Jangka Pendek Tahunan 2025 yang memuat rincian inisiatif dan target. Realisasi RAKB secara tahunan dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberlanjutan di BRI

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 [GRI 2-23]

Kategori	Program	Deskripsi	Pencapaian
Adaptive & Dynamic Portfolio Management			
Sustainable Finance	Integrasi Taksonomi Indonesia ke dalam Sustainable Financing	Integrasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia ke dalam Sustainable Financing BRI guna memperkuat langkah-langkah strategis BRI untuk mencapai target <i>Net Zero Emission</i> (NZE) pada tahun 2050. Integrasi ini memungkinkan BRI untuk lebih fokus pada pembiayaan sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi sesuai dengan klasifikasi taksonomi tersebut.	Integrasi Taksonomi telah tersedia pada aplikasi BRISPOT Wholesale. Selain itu, telah disusun dokumen <i>Business Requirement Document</i> (BRD) sebagai dasar pengembangan ESG Dashboard, termasuk rencana integrasi lebih lanjut dengan aplikasi BRISPOT.
	Pengembangan Produk Sustainable Funding	a. Penerbitan Instrumen Non-DPK IDR dan Valas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI. Penerbitan funding non-DPK dilakukan tentatif dengan tetap memperhatikan pertumbuhan DPK & pinjaman serta kondisi pasar b. Penerbitan Non-DPK valas dalam bentuk loan untuk meng-cover kebutuhan likuiditas pinjaman jangka panjang (<i>matching basis</i>), termasuk funding plan untuk kebutuhan UKLN c. Penerbitan Efek Tapera (<i>Long Term Notes</i>) dalam rangka pembiayaan Kredit Tapera	Telah diterbitkannya <i>Goodfund Social Bond</i> sebesar Rp5 Triliun pada 26 Juni 2025. Selain itu, LTN Tapera Tahun 2025 telah dibukukan pada 16 Januari 2025 dengan nilai sebesar Rp81.271.555.499. Telah diterbitkan LTN sebesar Rp218 Miliar dan SBK sebesar Rp500 juta.
	Digitalisasi dan Inovasi Produk yang mendukung Sustainable Finance	Program kerja ini bertujuan untuk memperkuat inisiatif keuangan berkelanjutan melalui digitalisasi dan inovasi produk di BRI, program ini difokuskan untuk mengembangkan platform dan layanan yang terintegrasi dan efisien, dengan orientasi keberlanjutan dalam operasional dan pengelolaan keuangan.	Telah dilakukan pengembangan QLola Insurance Dashboard. BRI telah mengoptimalkan infrastruktur penerbitan (<i>issuing</i>) dan penerimaan (<i>acquiring</i>) kartu internasional (Mastercard, Visa, JCB) melalui sistem internal untuk meningkatkan efisiensi transaksi nasabah. BRI telah menyelesaikan serangkaian inovasi digital strategis sepanjang tahun 2025 mencakup: • penyediaan fitur pencairan kredit langsung melalui aplikasi (Loan on App), • optimalisasi transaksi QRIS yang lebih efisien, • digitalisasi layanan mandiri untuk pengajuan limit dan pemblokiran kartu, dan • perluasan akses melalui integrasi pengajuan kartu kredit pada platform mitra pihak ketiga BRI telah mengintegrasikan sistem pra-registrasi <i>Corporate Card</i> dan aplikasi <i>Ecopay</i> ke dalam platform QLola, guna memberikan kemudahan pengelolaan biaya operasional bagi nasabah korporasi. BRI telah merampungkan pengembangan modul verifikasi risiko dan uji kepatuhan kredit pada platform digital korporasi. BRI telah memperkuat infrastruktur teknologi untuk menjamin keberlangsungan layanan (<i>business continuity</i>) melalui modernisasi sistem cadangan (<i>Stand In</i>) guna meminimalkan waktu henti operasional (<i>downtime</i>). Selain itu, BRI telah mengimplementasikan sistem pendukung transaksi lintas mata uang (<i>Cross Currency</i>) yang terintegrasi, guna memfasilitasi kebutuhan transaksi valas nasabah secara lebih efisien dan kompetitif di pasar global.
Green Banking	Pengembangan Produk Carbon Management Nasabah	Penambahan fitur perhitungan carbon pada aplikasi QLola dan BRIimo.	Fitur perhitungan emisi karbon telah resmi beroperasi pada platform QLola untuk mendukung pengelolaan keberlanjutan nasabah korporasi.
			Telah tersedia hasil metodologi dan <i>business process</i> implementasi perhitungan carbon pada BRIimo.

Keberlanjutan di BRI

Kategori	Program	Deskripsi	Pencapaian
<i>Climate Risk</i>	Integrasi <i>climate risk</i> ke manajemen risiko	Program kerja ini bertujuan untuk mengintegrasikan risiko iklim ke dalam manajemen risiko BRI, sehingga memungkinkan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan dampak risiko iklim terhadap portofolio dan operasional perusahaan. Melalui integrasi ini, BRI berupaya memastikan bahwa strategi dan kebijakan risiko yang diambil dapat mengantisipasi perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan di masa depan.	Telah diimplementasikan strategi dekarbonisasi untuk emisi <i>Scope 1</i> dan <i>Scope 2</i> berdasarkan identifikasi sumber emisi, sebagai bagian dari upaya pengendalian dampak lingkungan operasional. Telah dilakukan survei kepuasan pengguna atas fitur QLola <i>Carbon Management</i> serta pengembangan lanjutan berdasarkan masukan pengguna, termasuk implementasi modul Finance Emission pada sistem BRISIM. Telah dilakukan pelaporan Buku 6 CRMS OJK untuk seluruh portofolio, guna mendukung pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan pengelolaan risiko.
<i>Stakeholder Empowerment</i>			
<i>Customer Empowerment</i>	Revamp produk & jasa yang mendukung <i>Financial Inclusion</i>	Melalui layanan seperti mikroasuransi atau mikrofinansial, BRI Group dapat memperluas penawaran untuk menjangkau pelanggan yang belum memiliki akses ke layanan keuangan dasar. Layanan semacam ini tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial yang semakin meningkat di banyak negara, tetapi juga mendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan, memperluas potensi basis pelanggan BRI, serta merespons semakin banyaknya investor yang mencari imbal hasil dengan prinsip <i>triple bottom line</i> .	Pengembangan PARI <i>Corporate</i> telah selesai dan diimplementasikan pada awal tahun 2025. Namun, berdasarkan kebijakan internal, pemasaran produk PARI serta penyaluran kredit terkait program tersebut dihentikan, sehingga tidak dilakukan pengembangan lanjutan atas program <i>Enhancement PARI Corporate</i>. New disbursement KPRS sebesar Rp 4,056 T. Jumlah Debitur KPRS 32.209. Implementasi host-to-host migrasi KPRS dari Tapera Mobile telah selesai dikembangkan pada tahun 2025. Saat ini, implementasi menunggu jadwal penutupan sistem Sikasep sebelum dilakukan integrasi <i>host-to-host</i> dengan Tapera Mobile.
	<i>Customer Excellence Policy & Program</i>	Meningkatkan pengalaman pelanggan melalui berbagai alat dan strategi yang telah diterapkan oleh BRI. Program ini fokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan, pengembangan strategi online yang efektif, serta optimalisasi saluran penjualan dan distribusi. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya kepuasan pelanggan dan perlindungan hak-hak konsumen, sehingga BRI dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan pendekatan ini, BRI berkomitmen untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan.	Per Desember 2025, terjadi percepatan SLA penyelesaian pengaduan nasabah sebesar 15,29% dengan rata-rata waktu penyelesaian 32,4 jam dibandingkan tahun 2024 sebesar 38,3 jam. Selain itu, proses pengadaan sistem CHM Fase 2 telah berjalan guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan pengaduan nasabah. Per Desember 2025, FCR mencapai 86,02%. Selain itu, dilakukan penyesuaian pengelolaan fungsi <i>complaint handling</i> kepada unit terkait untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan, termasuk pada layanan <i>merchant</i>, <i>e-banking</i>, dan <i>chargeback</i>.
<i>Community Empowerment</i>	Penyusunan Metodologi Social Impact - UNSDGs Adaptation (ISO/UNDP PAS 53002)	Kurangnya kerangka kerja yang jelas dalam implementasi SDGs di BRI menciptakan tantangan dalam menyelaraskan kegiatan bisnis dengan tujuan tersebut. Untuk meningkatkan kontribusi terhadap SDGs, BRI mengadopsi framework ISO/UNDP PAS 53002:2024. Framework ini dirancang sebagai panduan bagi organisasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan secara sistematis dalam operasi bisnis, merespons kebutuhan global akan praktik yang selaras dengan dampak sosial dan lingkungan yang positif.	Telah tersedia Sustainability Impact Framework.
	Program BRI Menanam	Emisi karbon semakin meningkat, sehingga diperlukan mitigasi untuk mengurangi emisi karbon tersebut. BRI mengambil langkah untuk turut serta dalam mengurangi emisi tersebut dengan	
		a. BRI Nursery Facility merupakan pusat pembibitan pohon-pohon produktif dalam program BRI Menanam	Telah dilakukan penanaman 55.000 mangrove di Rote Ndao, Kepulauan Rote, NTT, melanjutkan program sebelumnya.
		b. BRI Waste Management merupakan fasilitas budidaya maggot atau black soldier Fly (BSF) dengan metode pengelolaan Sampah Padat Domestik (SPD)	Telah dilakukan tambahan transplantasi 1.500 fragmen terumbu karang di Kapoposang, Sulawesi Selatan.
		c. Penanaman mangrove, tanaman produktif, secara bertahap dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih nyaman, dan mengurangi polusi di daerah tanam	Telah dilakukan penambahan sebanyak 1.900 bibit tanaman produktif di 18 Regional Office BRI

Keberlanjutan di BRI

Kategori	Program	Deskripsi	Pencapaian
<i>Employee Empowerment</i>	<i>Program Employee Well-Being</i>	Pengembangan materi komunikasi dan platform terkait <i>employer branding</i> yang kuat, <i>targeted</i> , dan <i>segmented</i> .	Telah terlaksana program sesi employer branding dengan skala nasional dan regional dalam bentuk berbagai Campus Visit, Job Fair, dan BRILIANEXT (offline) serta konten-konten employer branding di Instagram Life at BRI dan LinkedIn (online). Telah tersedia report analisa EVP/review EVP yang tertuang dalam report Employer Branding Survey 2025. Telah dilaksanakan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) untuk modul <i>Employee Carbon Tracker</i> pada aplikasi BRILiaN Apps.
<i>Responsible Business & Operation</i>			
<i>Corporate Governance</i>	Implementasi IFRS S1 & S2	Proses berkesinambungan untuk merumuskan tata kelola, strategi, pengelolaan risiko dan penetapan target terkait iklim sesuai dengan acuan IFRS. IFRS S1 dan IFRS S2 adalah standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk membantu perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan dan risiko yang terkait dengan perubahan iklim.	Telah Tersedia metrics dan target pada rekomendasi IFRS S1. Tersedia framework IFRS S1 disclosure yang akan dikomunikasikan dalam Sustainability Report 2025. Implementasi strategi dekarbonisasi BRI untuk scope 1 dan 2 berdasarkan sumber emisi, yang dilakukan dengan cara implementasi data primer dan/inisiatif lain.
<i>Risk & Cybersecurity</i>	<i>Digital Resiliency Policy and Program</i>	Integrasi manajemen risiko dalam struktur tata kelola perusahaan mencakup pada mitigasi risiko siber dan risiko terkait lingkungan.	Implementasi integrasi API consent dengan aplikasi front-end (Minimal 2 Aplikasi Front-End) Tersedianya Dokumen Hasil Testing & Piloting integrasi dengan aplikasi Front End (Minimal 2 Aplikasi Front-End) Implementasi enhancement Data Model Consent 1. Tersedia hasil penilaian kesenjangan penerapan perlindungan Data Pribadi (<i>Data Protection Gap Assessment</i>) pada Q3 2025 2. Telah tersedianya hasil analisis penilaian <i>Data Privacy Maturity Assessment</i> dengan score 2,45 (<i>Repeatable</i>). 3. Telah tersedianya pelaksanaan transfer knowledge dan penyampaian hasil Penilaian dan rencana tindakan lanjut <i>Data Privacy Maturity Assessment</i> kepada unit kerja terkait. 4. Telah terlaksananya pendampingan penyusunan ROPA, DPIA, dan LIA. 5. Telah terlaksananya aktivitas <i>Create & Review: 1. Final Document</i> 6. Telah tersedianya Laporan akhir <i>Project Data Privacy Maturity Assistance</i>. Implementasi <i>Data Privacy Management Tools</i> telah dimulai pada Desember 2025 yang ditandai dengan pelaksanaan <i>kick-off project</i>. Selain itu, dokumen pengadaan untuk implementasi sistem telah tersedia sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan perlindungan data. Telah dilakukan pengujian modul StoneX ISO 20022 pada proyek Modernisasi <i>Core Banking & Surrounding Applications</i> BRI <i>New York Agency</i> tahap MVP 2. Selain itu, kinerja keuangan BRI <i>New York Agency</i> pada tahun 2025 mencatat laba sebesar USD 13,411,699 atau mencapai 111,13% dari target, serta <i>Fee-Based Income</i> sebesar USD 12,336,592 atau mencapai 144,19% dari target. Telah tersedia Gap Assessment & Design Architecture PBC for 4th Usecase (PBC Savings Account)
	Penguatan <i>Risk Management</i> yang terkait dengan ESRM Framework	Program ini mempunyai fokus terhadap penguatan budaya risiko dan kebijakan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap proyek dan aktivitas bisnis.	Telah tersedia implementasi komunikasi <i>risk culture</i> berupa : • 3 buah Materi <i>Operational Risk News</i> • 1 Katalog <i>Risk Awareness</i> • 3 design Benner dan materi landing page BRISars • 3 design <i>Background</i> desktop pekerja Telah tersedia <i>Dashboard</i> atas data Kualitas Kredit Telah dilaksanakan <i>Webinar Risk Upgrade Series</i> <i>regularly</i>
<i>Green Network</i>	<i>Green Network Escalation</i>	Program kerja yang bertujuan untuk mendukung implementasi inisiatif keberlanjutan di Unit Kerja BRI.	Telah tersedianya <i>Ramp</i> di 100 Unit Kerja BRI Sebanyak 10 Unit Kerja BRI telah terpasang Solar Panel. Telah tersedia 130 unit kendaraan listrik

Keberlanjutan di BRI

Kategori	Program	Deskripsi	Pencapaian
<i>Business Ethics</i>	Penguatan infrastruktur audit dan tata kelola keuangan berkelanjutan	Program kerja yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan integritas yang tinggi dalam seluruh operasi keuangan perusahaan, khususnya dalam aspek keberlanjutan. Program ini meliputi langkah-langkah pengembangan sistem audit internal yang lebih kuat. Dengan sistem audit yang terintegrasi, perusahaan dapat lebih dini mendeteksi dan mengelola risiko yang berpotensi mengakibatkan fraud, sehingga menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.	Pengembangan aplikasi BRIMEN terus dilanjutkan melalui penyempurnaan modul pengelolaan gedung/depo, pengembangan fitur <i>inventory management</i>, serta penambahan fitur pengelolaan dokumen kredit. Selain itu, dilakukan integrasi dengan sistem terkait guna mendukung penguatan tata kelola dan pengendalian operasional yang lebih efektif. Penyesuaian target pengembangan dilakukan sesuai kebutuhan dan prioritas implementasi. Penguatan pengendalian dilakukan melalui percepatan penyediaan data anomali, pengembangan indikator pemantauan, serta penyediaan <i>dashboard monitoring</i> guna mendukung identifikasi <i>irregularity</i> secara lebih cepat dan akurat, disertai rekomendasi perbaikan kepada <i>control owner</i>. Tersedia metodologi dan perhitungan <i>capital allocation</i> pada level unit kerja Penyempurnaan sistem <i>pricing</i> dilakukan melalui pengembangan BRIGo sebagai pengganti E-Price, termasuk integrasi sistem, penyediaan laporan pendukung, pemenuhan rekomendasi audit, serta sosialisasi implementasi guna meningkatkan efektivitas pengendalian.

Pada implementasi RAKB, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran masing-masing sebagaimana berikut.^[E.1]

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk secara aktif melakukan pengawasan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 51 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, seperti:

- Memberikan persetujuan atas kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik bank.
- Memberikan persetujuan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
- Memberikan persetujuan mengenai Laporan Keberlanjutan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab pihak Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Direksi

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan, antara lain:

- menyusun dan mengusulkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan beserta perubahannya kepada Dewan Komisaris;
- menyusun dan mengusulkan RAKB kepada pihak Dewan Komisaris;
- menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan kepada Dewan Komisaris;
- mengomunikasikan RAKB kepada para Pemegang Saham dan seluruh struktur organisasi yang ada di bank;
- mengawasi satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan secara terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya;
- membentuk satuan kerja khusus di kantor pusat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank;

- mengawasi kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan;
- mengawasi Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional agar menunjuk pejabat untuk bertanggung jawab terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- mengawasi kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan agar sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi bank yang disesuaikan dengan perkembangan Keuangan Berkelanjutan;
- mengawasi program pengembangan kapasitas internal yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan secara berkala; serta
- mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko sebagai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan ^[OJK E.5]

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, BRI menghadapi berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal. Tantangan internal berupa pemahaman mengenai keberlanjutan yang belum merata di seluruh organisasi. Menghadapi tantangan tersebut, BRI menyelenggarakan sejumlah pelatihan yang terstruktur dan konsisten di berbagai tingkatan, mulai dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, hingga unit kerja lainnya. Selama tahun 2025, BRI menyelenggarakan pelatihan dan seminar mengenai topik-topik keberlanjutan, antara lain topik terkait kepatuhan, manajemen risiko, *human capital*, dan topik lainnya yang dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran halaman 234. Sementara tantangan eksternal melibatkan berbagai aspek, termasuk perkembangan regulasi terkait keuangan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi pasar. Kemajuan teknologi digitalisasi juga menjadi tuntutan besar bagi sektor perbankan. Selain itu, terbatasnya panduan dan informasi yang jelas mengenai keuangan berkelanjutan di setiap industri turut memperbesar tantangan yang dihadapi, menambah kompleksitas dalam menavigasi lanskap keberlanjutan yang terus berkembang. Untuk menanggapi tantangan eksternal ini, BRI menerapkan manajemen risiko yang kuat dengan secara sistematis mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko terkait tekanan eksternal. Pendekatan ini memastikan ketahanan dan adaptabilitas dalam inisiatif keuangan berkelanjutan BRI. ^{[OJK E-5] [GRI G FS6]}

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

BRI berkomitmen untuk mendengarkan dan menanggapi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif dalam proses penilaian materialitas. Dalam prosesnya, BRI memastikan bahwa berbagai kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan telah terakomodasi sehingga hasil penilaian materialitas mencerminkan prioritas internal sekaligus memenuhi ekspektasi eksternal, menjadi dasar kebijakan dan strategi keberlanjutan yang mencerminkan kepentingan bersama.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan^{[E.4][GRI 2-12][GRI 2-29][GRI 3-1][GRI G4 FS5]}

BRI memiliki komitmen kuat terhadap keterlibatan pemangku kepentingan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sejalan dengan Prinsip-prinsip United Nations Global Compact (UNGC), BRI menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Prinsip 1) serta memastikan kegiatan operasionalnya tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (Prinsip 2). Pelibatan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, serta dalam penerapan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi dampak.

BRI mengadopsi pendekatan yang sistematis dan inklusif dalam melibatkan pemangku kepentingan untuk mendengarkan, memahami, dan merespons kebutuhan serta harapan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa kebijakan perusahaan sesuai dengan ekspektasi mereka. Untuk memastikan pelibatan yang bermakna, BRI berkomitmen untuk menjalankan komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif, serta menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif. Dengan demikian, BRI dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pihak terkait.

Dalam proses penilaian materialitas BRI, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen yang esensial dari keseluruhan proses penilaian. Melalui pelibatan pemangku kepentingan, BRI memastikan bahwa berbagai kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan terakomodasi secara optimal, sehingga hasil penilaian mencerminkan prioritas internal sekaligus memenuhi ekspektasi eksternal.

Proses Identifikasi Pemangku Kepentingan

BRI mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan ketergantungan mereka terhadap aktivitas operasional BRI, serta dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnis BRI terhadap mereka. BRI mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam dua kategori, yaitu Pemangku Kepentingan Internal (Pekerja) dan Pemangku Kepentingan Eksternal (Nasabah, Investor, Regulator, dan Pemasok), sebagai pemangku kepentingan utama berdasarkan kebutuhan, keberagaman, kesediaan untuk terlibat, serta dampak timbal balik terhadap BRI. Dengan memprioritaskan pemangku kepentingan utama tersebut, BRI mendorong kolaborasi dan dukungan, serta memastikan keterlibatan mereka terintegrasi dalam seluruh aktivitas pengelolaan ESG, termasuk dalam proses penentuan materialitas.



Kriteria Penilaian dan Pemilihan Pemangku Kepentingan

- Kebutuhan
- Keberagaman
- Kemauan untuk berpartisipasi
- Pengaruh pada BRI
- Ketergantungan pada BRI



Stakeholder Groups Engaged

- Investor
- Regulator
- Nasabah
- Pemasok
- Dewan Komisaris dan Direksi
- Pekerja
- Badan Pengurus BUMN dan Danantara

Umpan Balik atas Laporan 2024 dan Pembahasan Manajemen^[G.3]

BRI senantiasa menyediakan kanal komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka. BRI memiliki mekanisme media *monitoring*, menyediakan *Whistleblowing System* (WBS), serta evaluasi rating ESG. Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2025, tidak terdapat masukan spesifik maupun keberatan dari pemangku kepentingan terhadap isi Laporan Keberlanjutan 2024.

Diskusi dan Tanggapan Investor

BRI melaksanakan diskusi dengan investor secara reguler sepanjang tahun guna mendapatkan aspirasi dan menanggapi umpan balik dari investor.

Kuesioner Materialitas

BRI menyebarkan kuesioner materialitas secara *online* guna mendapatkan perspektif pemangku kepentingan yang lebih luas.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

Saluran Pelibatan Pemangku Kepentingan^{[E.4][GRI 2-29]}

Untuk memastikan komunikasi yang efektif dan pelibatan yang bermakna, BRI menyediakan beragam saluran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap kelompok pemangku kepentingan. Melalui saluran tersebut, BRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyerap aspirasi, kebutuhan, dan ekspektasi pemangku kepentingan, yang kemudian diintegrasikan ke dalam strategi bisnis dan pengelolaan ESG perusahaan, termasuk dalam proses penentuan materialitas. Hasil pelibatan tersebut didokumentasikan sebagai masukan strategis dan diintegrasikan ke dalam berbagai aspek tata kelola serta praktik pengelolaan perusahaan.

Pemangku Kepentingan	Penanggung Jawab	Minat dan Kepentingan	Basis Penetapan	Respon BRI	Saluran Pelibatan
Nasabah	- Customer Experience Group - Corporate Secretary Group	- Bisnis yang Beretika - Privasi dan Keamanan Data - Keuangan Inklusif	Hubungan ekonomi yang timbul dari penggunaan produk dan layanan keuangan BRI oleh nasabah, yang secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah, ekspektasi terhadap kualitas layanan, serta hasil inklusi keuangan.	- Pengembangan produk dan layanan perbankan yang aman dan andal - Penguatan dukungan nonfinansial dan kapabilitas nasabah - Penguatan sistem privasi dan perlindungan data - Penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan nasabah	- Layanan nasabah (tersedia 24 jam setiap hari) - Platform digital: situs web, email, media sosial, dan <i>mobile banking</i> (dapat diakses setiap saat) - Survei kepuasan nasabah (dilaksanakan setiap bulan) - Kuesioner materialitas (didistribusikan setiap tahun)
Pekerja	- Human Capital Strategy & Policy Group - Human Capital Business Partner Group	- Bisnis yang Beretika - Privasi dan Keamanan Data - Manajemen Risiko dan Krisis - Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hubungan ketenagakerjaan dan kelembagaan dengan BRI, di mana pekerja BRI memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi, kinerja operasional, serta keberlanjutan penerapan praktik bisnis yang beretika.	- Mendorong penerapan praktik bisnis yang beretika - Memperkuat kesadaran terhadap keamanan siber dan privasi data - Meningkatkan kapabilitas manajemen risiko - Pelaksanaan program pengembangan pekerja	- Portal internal dan <i>hotline</i> melalui telepon serta email (tersedia 24 jam setiap hari) - Rapat manajemen (diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap bulan) - Kuesioner materialitas (didistribusikan setiap tahun) - Forum Kerja Sama Bipartit (diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun)
Investor	- Investor Relations Group - Corporate Secretary Group	- Bisnis yang Beretika - Perlindungan Keuangan Nasabah - Keuangan Inklusif	Hubungan ketenagakerjaan dan kelembagaan dengan BRI, di mana insan BRI memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi, kinerja operasional, serta keberlanjutan penerapan praktik bisnis yang beretika.	- Pengungkapan kinerja keuangan dan keberlanjutan secara transparan - Penguatan tata kelola perusahaan yang baik - Pendorongan inisiatif keuangan inklusif - Memastikan pengelolaan perlindungan keuangan nasabah yang bertanggung jawab	- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/RUPST (diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun) - Situs web (dapat diakses 24 jam setiap hari) - Pertemuan dengan investor (dilaksanakan setiap bulan) - Kuesioner materialitas (didistribusikan setiap tahun)
Regulator	Compliance Group	- Keuangan Inklusif - Privasi dan Keamanan Data - Manajemen Risiko dan Krisis - Bisnis yang Beretika	Hubungan hukum dan regulasi yang didasarkan pada kewajiban BRI untuk mematuhi ketentuan perbankan, persyaratan pengawasan, serta kebijakan nasional yang berkaitan dengan stabilitas keuangan dan perlindungan nasabah.	- Penyelarasan kebijakan internal, prosedur, dan praktik bisnis dengan ketentuan regulator - Memastikan kepatuhan terhadap perlindungan data dan keamanan siber - Penguatan kerangka manajemen risiko dan krisis	- Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tahun) - Sesi briefing mengenai kebijakan keuangan pemerintah (diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun) - Pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan/OJK (diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap tahun) - Kuesioner materialitas (didistribusikan setiap tahun)
Pemasok	- Fixed Assets Management Group - Procurement & Logistic Operation Group	- Privasi dan Keamanan Data - Bisnis yang Beretika - Keuangan Inklusif	Hubungan ekonomi dan kontraktual melalui pengadaan barang dan jasa yang mendukung kegiatan operasional serta rantai pasok BRI.	- Penerapan praktik pengadaan yang bertanggung jawab - Komunikasi standar tata kelola perusahaan dan kepatuhan - Penguatan keamanan data dalam kolaborasi dengan vendor/pihak ketiga	- Seminar dan sosialisasi (diselenggarakan sesuai kebutuhan) - Kuesioner materialitas (didistribusikan setiap tahun)

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

Penilaian Materialitas (*Double Materiality*) [GRI 3-1]

Penilaian materialitas merupakan landasan strategi keberlanjutan BRI, yang memungkinkan Perusahaan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu keberlanjutan yang paling relevan terhadap kinerja bisnis maupun ekspektasi pemangku kepentingan. Dalam menentukan topik material, BRI mengadopsi prinsip materialitas ganda (*double materiality*), yang memungkinkan Perusahaan menilai isu keberlanjutan dari dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu dampak aktivitas BRI terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, serta potensi implikasi finansial dari risiko dan peluang terkait keberlanjutan terhadap penciptaan nilai Perusahaan.

Melalui pendekatan ini, BRI mengevaluasi kapasitasnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor keberlanjutan yang berkontribusi terhadap penciptaan nilai jangka panjang dengan mempertimbangkan keterkaitan antara dampak eksternal (terhadap masyarakat dan lingkungan) dan dampak internal (terhadap nilai perusahaan). Sejalan dengan pedoman *International Sustainability Standards Board* (ISSB), BRI juga memasukkan penilaian materialitas finansial, khususnya dari perspektif investor, guna memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang diungkapkan dalam laporan ini mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

Analisis Materialitas

BRI melakukan analisis materialitas untuk mengidentifikasi isu-isu yang paling relevan dan berdampak signifikan terhadap kinerja finansial dan dampak sosial maupun lingkungan perusahaan. Berikut ini matriks materialitas yang menggambarkan pemetaan berbagai isu keberlanjutan berdasarkan dimensi materialitas finansial dan materialitas dampak.

Hasil Penilaian Materialitas^[GRI 3-1]

Matriks Materialitas

Topik Material 2025	Tingkat Kepentingan Pemangku Kepentingan					Double Materiality Assessment		Indeks Pengungkapan		
	Investor	Dewan dan Pekerja	Nasabah	Pemasok	Pemerintah/Regulator	Materialitas Keuangan	Materialitas Dampak	SEOJK	GRI	SASB
Bisnis yang Beretika	✓	✓	✓	✓	✓	●	●		205, 206, 207, 415	FN-CB-510a.1 FN-CB-510a.2
Privasi dan Keamanan Data	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	F.27	418	FN-CB-230a.1 FN-CB-230a.2
Keuangan Inklusif	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	F.3,F.17, F.26 – F.30	417 G4 FS6, FS7, FS10, FS13 – FS16	FN-CB-240a.1, FN-CB240a.2, FN-CB-240a.3, FN-CB-240a.4
Dampak Perubahan Iklim	✓	-	-	-	✓	○	●	E.5	102 G4 FS1-FS5, FS8	FN-CB-410a.2
Emisi yang Dibiayai	✓	-	✓	-	-	○	●	F.11	102	FN-CB-410b.1 FN-CB-410b.2 FN-CB-410b.3 FN-CB-410b.4
Pembiayaan Hijau	-	-	-	-	-	○	○	F.3, F.26	G4 FS1-FS4, FS8-11	FN-CB-410b.1 FN-CB-410b.2 FN-CB-410b.3 FN-CB-410b.4
Pengelolaan Emisi Operasional	-	-	-	-	-	○	○	F.6, F.7, F.11, F.12	102, 302	
Manajemen Risiko dan Krisis	✓	✓	-	✓	✓	●	●	E.3	2-12, 2-13	FN-CB-550a.1 FN-CB-550a.2
Pelindungan Keuangan Nasabah	✓	✓	-	✓	✓	●	●	F.27	417, 418 G4 FS15- FS16	FN-CB-220a.1 FN-CB-220a.2 FN-CB-220a.3 FN-CB-230a.1 FN-CB-230a.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	✓	✓	✓	-	●	●	F.18 – F.22	202, 401, 403, 404, 406, 407 FS4	
Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Masyarakat	✓	-	-	-	-	●	●	F.23 – F.25	203, 413	

Topik Material 2025

1. Bisnis yang Beretika
2. Privasi dan Keamanan Data
3. Keuangan Inklusif
4. Dampak Perubahan Iklim
5. Emisi yang Dibiayai
6. Pembiayaan Hijau
7. Pengelolaan Emisi Operasional
8. Manajemen Risiko dan Krisis
9. Pelindungan Keuangan Nasabah
10. Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Masyarakat

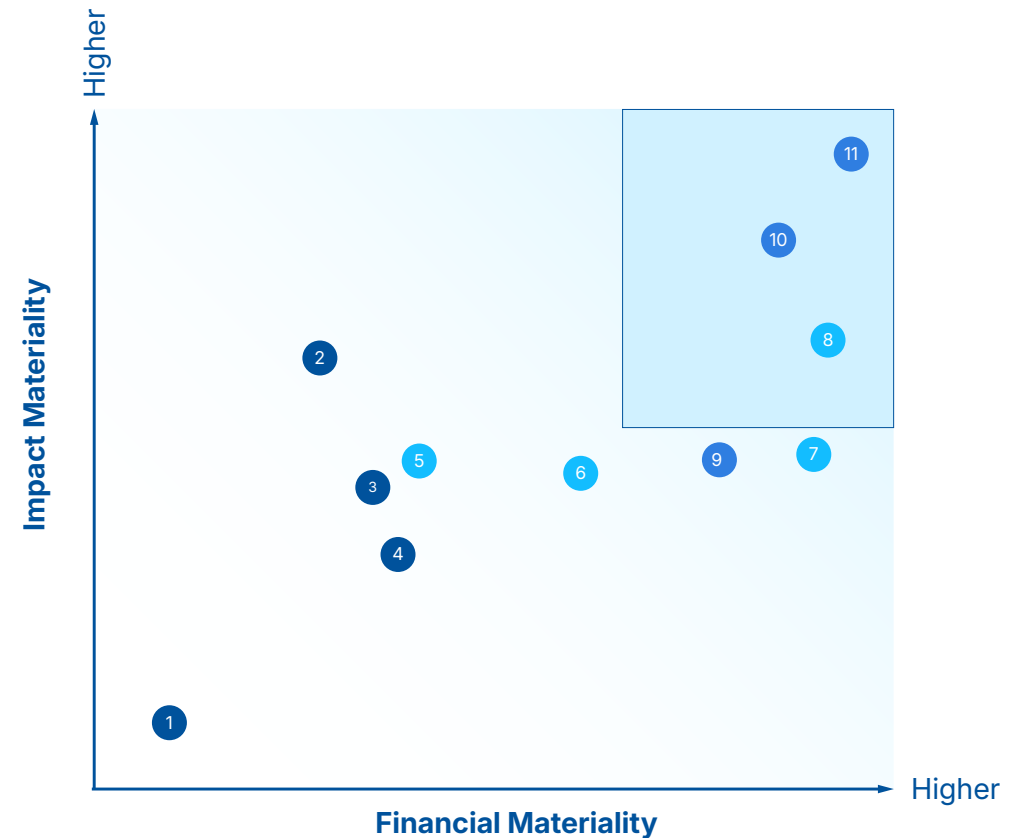
Tingkat dampak: ○ Rendah ● Sedang ● Tinggi

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

Topik Material Paling Signifikan^{[GRI 3-1] [GRI 3-2]}

Berdasarkan hasil *double materiality analysis*, diperoleh tiga topik material dengan tingkat signifikansi dampak tertinggi pada kinerja keuangan serta aspek sosial maupun lingkungan. Ketiga topik tersebut ialah Bisnis yang Beretika, Privasi dan Keamanan Data, serta Keuangan Inklusif. Tiga topik tersebut, ditambah topik Dampak Perubahan Iklim, telah ditinjau dan mendapatkan persetujuan dari Direksi, dan diungkapkan dengan mengadopsi IFRS S1 dan S2 dalam Laporan Keberlanjutan ini.

Seiring dengan dinamika lingkungan yang terus berkembang, topik material prioritas pada laporan ini berbeda dengan topik material yang diungkapkan pada tahun 2024. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan fokus keberlanjutan, serta adopsi pendekatan pengungkapan atas topik signifikan terkait keberlanjutan, risiko keuangan, dan risiko perubahan iklim.



- | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 Pengelolaan Emisi Operasional | 5 Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Masyarakat | 9 Manajemen Risiko dan Krisis |
| 2 Emisi yang Dibiayai | 6 Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10 Privasi dan Keamanan Data |
| 3 Dampak Perubahan Iklim | 7 Pelindungan Keuangan Nasabah | 11 Bisnis yang Beretika |
| 4 Pembiayaan Hijau | 8 Keuangan Inklusif | |

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

Topik Material yang Mendukung Nilai Perusahaan

Berdasarkan penilaian materialitas, BRI mengidentifikasi isu-isu material dengan menggunakan pendekatan *double materiality*, yang mengevaluasi topik keberlanjutan dari dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu materialitas keuangan (*outside-in*) dan materialitas dampak (*inside-out*). Dari perspektif materialitas keuangan, penilaian ini berfokus pada topik keberlanjutan yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan, ketahanan, serta nilai perusahaan dalam jangka panjang. Melalui penilaian ini, BRI mengidentifikasi sejumlah topik keberlanjutan utama yang dianggap material secara finansial karena dapat memengaruhi kinerja operasional, eksposur risiko, dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Secara khusus, Etika Bisnis, Privasi dan Keamanan Data, serta Keuangan Inklusif diidentifikasi sebagai topik prioritas yang memainkan peran penting dalam mendukung penciptaan nilai jangka panjang dan keberlanjutan bisnis BRI.

Topik	Kategori Topik	Pertimbangan Materialitas	Strategi	KPI 2025	Pencapaian 2025
Bisnis yang Beretika	<i>Financial Material Topic</i>	Bisnis yang beretika merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan keberlangsungan operasional usaha secara berkelanjutan. Perilaku yang tidak etis, seperti kecurangan, korupsi, atau benturan kepentingan, dapat menimbulkan sanksi hukum, kerugian finansial, serta merusak reputasi perusahaan. Sebagai institusi keuangan dengan cakupan hubungan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI perlu menerapkan standar etika yang kuat guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab di seluruh kegiatan operasional.	- Implementasi Kode Etik – Pelaksanaan pelatihan etika wajib, program penyegaran berkala, serta integrasi Kode Etik ke dalam penilaian kinerja pekerja guna memperkuat kesadaran etika. - Manajemen Risiko <i>Fraud</i> – Penguatan pengendalian internal melalui pendekatan tiga lini pertahanan, pemantauan <i>fraud</i>, serta analitik <i>fraud</i> untuk mendeteksi transaksi berisiko tinggi. - Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) – Kanal pelaporan yang dikelola secara independen dengan perlindungan bagi pelapor, proses investigasi yang terintegrasi, serta kampanye budaya <i>speak-up</i>.	KPI Terkait Grup - Pengendalian <i>Fraud</i> pada <i>E-Channel</i> Internal dan Eksternal - Persentase Proses Pemberian Sanksi Disipliner	- Penurunan jumlah kasus sebesar 10% pada <i>fraud</i> internal dan 12% pada <i>fraud</i> eksternal. - Sebanyak 97,82% kasus ditindaklanjuti melalui pemberian sanksi disipliner.
Privasi dan Keamanan Data	<i>Financial Material Topic</i>	Privasi dan keamanan data merupakan risiko operasional dan reputasi yang sangat krusial bagi BRI sebagai institusi keuangan yang mengelola volume besar data nasabah dan transaksi digital. Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan data atau insiden siber berpotensi mengganggu operasional perbankan, menurunkan kepercayaan nasabah, serta menimbulkan sanksi regulator dan kerugian finansial. Seiring dengan terus berkembangnya layanan perbankan digital, penguatan kapabilitas keamanan siber dan perlindungan data menjadi hal yang esensial untuk melindungi informasi nasabah dan menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital BRI.	- Tata Kelola Keamanan Siber: Memperkuat pengawasan atas keamanan informasi melalui Direksi dan Komite Teknologi Informasi, yang didukung oleh tinjauan internal dan eksternal secara berkala. - Manajemen Keamanan Informasi: Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis ISO 27001 serta memperkuat sistem pertahanan TI untuk mendeteksi, merespons, dan memantau ancaman siber. - Pemantauan dan Mitigasi Risiko: Melaksanakan penilaian risiko siber secara berkala serta memperkuat pemantauan terhadap malware, ransomware, phishing, dan risiko kejahatan siber lainnya. - Penguatan Kapabilitas dan Kesadaran: Menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawan yang bertanggung jawab atas teknologi informasi dan pengelolaan data guna memperkuat ketahanan siber. - Inovasi Digital yang Bertanggung Jawab: Menyusun kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi baru secara bertanggung jawab, termasuk kecerdasan artifisial, sekaligus memperkuat platform digital yang aman untuk layanan keuangan.	KPI Terkait Direksi: Memastikan Nol Insiden Kebocoran Data (<i>Zero Data Breach</i>)	<i>Zero Data Breach</i>
Keuangan Inklusif	<i>Financial Material Topic</i>	Inklusi keuangan mendukung penciptaan nilai perusahaan melalui perluasan basis nasabah BRI serta penguatan hubungan jangka panjang dengan segmen mikro, UMKM, ritel, dan kelompok <i>underserved</i> yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Layanan perbankan yang inklusif memungkinkan Bank menjangkau masyarakat belum terjangkau layanan perbankan (<i>unbanked</i>) dan masyarakat dengan akses perbankan yang masih terbatas (<i>underbanked</i>), sehingga mendorong penghimpunan dana, pertumbuhan kredit, serta peningkatan pendapatan berbasis komisi melalui volume transaksi yang lebih tinggi dan pemanfaatan produk yang lebih luas. Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan memperkuat ketahanan finansial nasabah dan mendorong perilaku keuangan yang bertanggung jawab, sehingga membantu menurunkan risiko kredit dan mendukung kinerja portofolio yang berkelanjutan. Melalui model perbankan inklusif, BRI memposisikan diri sebagai institusi keuangan terdepan yang mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.	BRI menerapkan strategi terintegrasi untuk mendorong inklusi keuangan melalui strategi berikut. - Pengembangan Produk Inklusif: Merancang produk keuangan yang terjangkau dan mudah diakses, yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen UMKM, ritel, dan kelompok yang belum atau masih terbatas aksesnya terhadap layanan keuangan formal, termasuk kredit mikro, tabungan berbiaya rendah, serta layanan keuangan inklusif lainnya. - Inovasi Digital: Penguatan inovasi digital untuk memperluas akses dan kemudahan pemanfaatan layanan keuangan inklusif. - Perluasan Titik Akses: Memperluas jangkauan layanan melalui jaringan kantor BRI di seluruh Indonesia serta agenBRILink guna menghadirkan layanan perbankan yang lebih dekat dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. - Literasi Keuangan dan Penguatan Kapasitas: Menyelenggarakan program edukasi keuangan dan berbagai inisiatif sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas finansial nasabah. - Kemitraan Strategis: Menjalin kolaborasi dengan institusi pemerintah, perusahaan <i>fintech</i>, dan organisasi masyarakat untuk memperluas akses keuangan serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.	KPI Terkait Direksi: - Rasio CASA Konsolidasi - Jumlah Pengguna Aktif Aplikasi BRImo <i>Net Promoter Score</i> (NPS) Bank - Realisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro - Realisasi Penyaluran KUR - Pertumbuhan Rata-Rata Kredit Segmen UKM - Realisasi Pembiayaan Berkelanjutan	- Rasio CASA: 70,61% - Pencapaian jumlah pengguna aktif BRImo: 110% - NPS: 69% - Pencapaian Penyaluran Kredit Ultra Mikro: 95,4% - Realisasi Penyaluran KUR: 98,93% - Rata-rata Pertumbuhan Kredit UMKM: 5,90% - Pembiayaan Berkelanjutan: Rp811,86 triliun

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

Metrik Material untuk Pemangku Kepentingan

Topik	Kategori Topik	Deskripsi	Pemangku Kepentingan Terkait	Target Kuantitatif (2025)	Capaian Kuantitatif (2025)	Penilaian Dampak dan Metrik Dampak
Bisnis yang Beretika	Impact Material Topic	BRI menyadari bahwa praktik etika bisnis yang kuat memiliki dampak langsung terhadap pemangku kepentingan eksternal, termasuk nasabah, investor, regulator, dan masyarakat luas. Perilaku bisnis yang beretika memastikan bahwa layanan perbankan diberikan secara transparan, adil, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Melalui penerapan Kode Etik, pengendalian anti-<i>fraud</i>, dan mekanisme <i>whistleblowing</i>, BRI mendorong integritas dan akuntabilitas di seluruh kegiatan operasional maupun hubungan bisnisnya. Praktik-praktik tersebut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dengan mencegah korupsi, <i>fraud</i>, benturan kepentingan, dan perilaku bisnis tidak etis yang berpotensi merugikan nasabah atau melemahkan integritas pasar. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan perilaku etis dapat memberikan dampak negatif bagi para pemangku kepentingan, antara lain berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, perlakuan yang tidak adil terhadap nasabah, atau menurunnya kepercayaan terhadap sektor keuangan. Oleh karena itu, BRI terus memperkuat budaya etika, kesadaran karyawan, dan sistem tata kelola guna memitigasi risiko tersebut serta memastikan praktik perbankan yang bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.	- Nasabah - Investor - Regulator - Vendor	KPI Terkait Grup - Pengendalian Fraud pada <i>E-Channel</i> Internal dan Eksternal - Persentase Proses Pemberian Sanksi Disipliner	- Penurunan jumlah kasus sebesar 10% pada <i>fraud</i> internal dan 12% pada <i>fraud</i> eksternal - Sebanyak 97,82% kasus ditindaklanjuti melalui penjatuhan sanksi disipliner	N/A
Privasi dan Keamanan Data	Impact Material Topic	Privasi dan keamanan data merupakan aspek yang sangat krusial dalam melindungi nasabah, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya yang data pribadi maupun finansialnya diproses melalui layanan perbankan BRI. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan platform digital dan layanan berbasis data oleh institusi keuangan, perlindungan terhadap informasi sensitif menjadi semakin penting guna menjaga kepercayaan serta melindungi individu dari risiko finansial maupun penyalahgunaan identitas. BRI menerapkan tata kelola keamanan informasi dan pengendalian keamanan siber yang kuat, termasuk melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001, pemantauan berkelanjutan terhadap ancaman siber, serta pengembangan infrastruktur perbankan digital yang aman. Upaya-upaya tersebut memberikan manfaat positif bagi para pemangku kepentingan eksternal dengan melindungi data pribadi, memastikan keamanan transaksi keuangan, serta menjaga keandalan layanan perbankan digital. Namun, insiden keamanan siber atau pelanggaran data berpotensi menimbulkan risiko bagi pemangku kepentingan, seperti penipuan finansial, pencurian identitas, maupun gangguan layanan. Risiko tersebut juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap layanan keuangan digital serta berdampak pada stabilitas ekosistem keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, BRI secara berkelanjutan memperkuat kapabilitas keamanan siber, meningkatkan kesadaran pekerja, serta memperkuat ketahanan sistem guna melindungi nasabah dan mendukung terciptanya lingkungan keuangan digital yang aman.	- Nasabah - Pekerja	KPI Terkait Direksi: Memastikan Nol Insiden Kebocoran Data (<i>Zero Data Breach</i>)	<i>Zero Data Breach</i>	N/A

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Materialitas

Metrik Material untuk Pemangku Kepentingan

Topik	Kategori Topik	Deskripsi	Pemangku Kepentingan Terkait	Target Kuantitatif (2025)	Capaian Kuantitatif (2025)	Penilaian Dampak dan Metrik Dampak
Keuangan Inklusif	<i>Impact Material Topic</i>	Keuangan inklusif memiliki peran penting dalam menghasilkan dampak sosial yang positif melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani dan kurang terlayani oleh layanan keuangan formal. Melalui layanan perbankan inklusif, BRI memungkinkan individu, pelaku usaha mikro, dan segmen belum terlayani secara optima (<i>underserved</i>) lainnya, seperti masyarakat pedesaan, perempuan pelaku usaha, serta rumah tangga berpenghasilan rendah, untuk mengakses produk keuangan formal, termasuk tabungan, kredit, layanan pembayaran, dan edukasi keuangan. Dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses serta meningkatkan literasi keuangan, BRI turut memperkuat partisipasi ekonomi, meningkatkan ketahanan finansial, dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Dampak tersebut berkontribusi pada manfaat sosial yang lebih luas, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun demikian, literasi keuangan yang belum memadai atau praktik pembiayaan yang tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti risiko kelebihan utang pada nasabah yang rentan. Untuk memitigasi risiko tersebut, BRI mengintegrasikan prinsip pembiayaan yang bertanggung jawab, inisiatif edukasi keuangan, serta mekanisme perlindungan nasabah guna memastikan bahwa inisiatif inklusi keuangan menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.	- Nasabah (UMKM dan masyarakat yang belum atau masih terbatas aksesnya terhadap layanan keuangan formal) - Masyarakat lokal - Pemerintah/Regulator	KPI Terkait Direksi: - Rasio CASA secara Konsolidasian - Jumlah Pengguna Aktif Aplikasi BRImo - Net Promoter Score (NPS) Bank - Realisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro - Realisasi Penyaluran KUR - Realisasi Pembiayaan Berkelanjutan	- Rasio CASA sebesar 70,61% - Pencapaian jumlah pengguna aktif BRImo: 110% - NPS Bank sebesar 69% - Pencapaian Penyaluran Kredit Ultra Mikro: 95,4% - Realisasi penyaluran KUR sebesar 98,93% - Realisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp811,86 triliun	BRI mengevaluasi dampak sosial dari aktivitas keuangan inklusif dengan menilai bagaimana akses terhadap layanan keuangan meningkatkan kondisi sosial ekonomi nasabah serta akses mereka terhadap layanan dasar. Penilaian ini mengadopsi pilar dampak dalam ICMA Social Bond Principles, dengan metrik yang selaras dengan kerangka pengukuran dampak IRIS+, serta berfokus pada hasil terukur yang dialami nasabah setelah memperoleh pembiayaan. Metrik Dampak Utama: - Akses terhadap Pembiayaan: 81,7% (KUR) dan 69,6% (Kupedes) nasabah memperoleh akses pertama kali terhadap pembiayaan formal. - Pemberdayaan Sosial Ekonomi: 42,8% (KUR) dan 48,0% (Kupedes) nasabah melaporkan peningkatan aset usaha. - Penciptaan Lapangan Kerja: Tercipta 45 (KUR) dan 57 (Kupedes) lapangan kerja baru per 100 nasabah yang memperoleh pembiayaan. Rincian lebih lanjut mengenai keseluruhan metrik dampak diungkapkan pada halaman 110.

Climate-Related Disclosure





Manajemen Risiko Iklim

Empat Pilar Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS

Tata Kelola

Gambaran Umum Tata Kelola

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Peran Manajemen

Strategi

Gambaran Umum Strategi BRI

Pendekatan BRI dalam Menganalisis Skenario Perubahan Iklim

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Iklim

Integrasi ERSRM

Pembiayaan Bertanggung Jawab

Mitigasi Risiko Transisi dalam Pembiayaan Korporasi

Metrik dan Target

What Gets Measured, Gets Managed

Pencapaian BRI

Inisiatif Hijau BRI

Tata Kelola

Gambaran Umum Tata Kelola

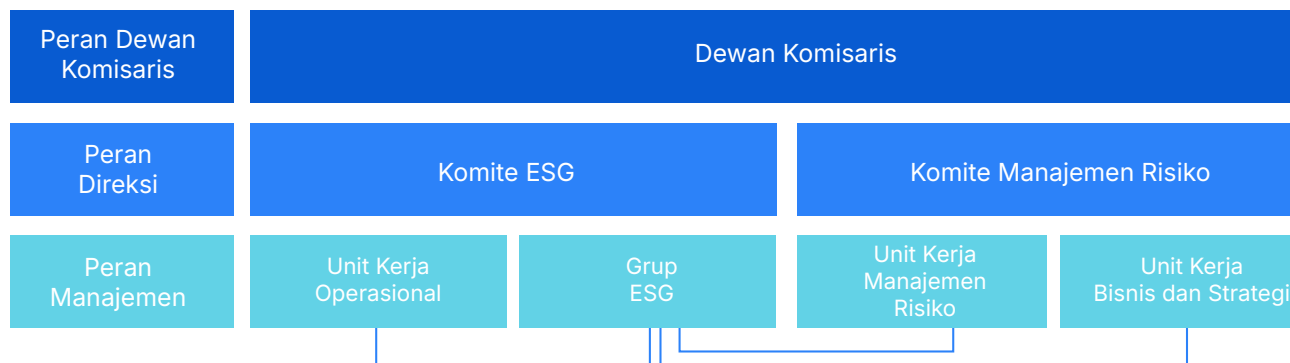
Climate Risk Shapes the Future, Decisions Define the Outcome

Perubahan iklim telah menimbulkan dampak fisik yang semakin nyata secara global, termasuk pencairan gletser, kenaikan permukaan air laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem. Dampak tersebut tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. IPCC Sixth Assessment Report (AR6) mencatat bahwa dampak-dampak ini telah terjadi di berbagai wilayah dan diproyeksikan akan meningkat seiring bertambahnya tingkat pemanasan global, dengan besaran risiko di masa depan sangat bergantung pada pilihan dan tindakan yang diambil saat ini, termasuk kebijakan mitigasi, adaptasi, serta peluang transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam konteks tersebut, tata kelola memegang peranan penting. Tata kelola iklim yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga menjadi fondasi untuk memastikan bahwa risiko dan peluang terkait iklim dapat diidentifikasi, dikelola, dan diintegrasikan secara konsisten ke dalam strategi, manajemen risiko, serta proses pengambilan keputusan jangka panjang.

Sebagai institusi keuangan yang beroperasi dalam perekonomian nasional, BRI menyadari perannya dalam merespons tantangan perubahan iklim bersama para pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat sebagaimana tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), BRI berupaya mendukung agenda nasional penanganan perubahan iklim melalui penerapan tata kelola iklim yang terstruktur. Untuk itu, BRI telah menetapkan kerangka kerja tata kelola iklim yang melibatkan Dewan Direksi serta manajemen di tingkat grup dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di seluruh tingkatan organisasi. Struktur tata kelola ini memungkinkan BRI untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim secara terarah, mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam model bisnis dan proses pengambilan keputusan, serta memperkuat ketahanan jangka panjang dan penciptaan nilai berkelanjutan.

Struktur Tata Kelola Risiko Iklim



Peran Dewan Komisaris dan Direksi [OJK E.1] [GRI 2-12]

Tugas dan Tanggung Jawab

Tata kelola perubahan iklim di BRI dipimpin oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ pengambil keputusan strategis tertinggi. Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan arah kebijakan dan strategi Keberlanjutan Perusahaan termasuk target terkait perubahan iklim serta mengawasi pelaksanaan dan kemajuannya secara terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko dan strategi bisnis Perusahaan. Komite ESG dan Komite Manajemen Risiko sebagai komite di bawah direksi, menjalankan peran masing-masing terkait perubahan iklim sesuai dengan mandat masing-masing komite. Dalam konteks risiko iklim, Komite ESG berperan dalam menyetujui dan mengarahkan pengelolaan risiko dan peluang perubahan iklim, termasuk komitmen *net zero emission* dan inisiatif dekarbonisasi. Sementara itu, Komite Manajemen Risiko menerima laporan hasil *Climate Scenario Analysis* yang memuat dampak perubahan iklim terhadap risiko inheren perbankan dan memutus serta menetapkan kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Uraian lebih lanjut mengenai mandat dan tanggung jawab masing-masing komite tersedia pada bagian [Keberlanjutan di BRI](#).

BRI memandang bahwa risiko perubahan iklim bukan merupakan risiko yang berdiri sendiri, melainkan bagian inheren dari risiko perbankan yang dapat memengaruhi profil risiko, kinerja keuangan, dan keberlanjutan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, kompetensi dalam memahami dan mengelola risiko perubahan iklim menjadi bagian dari persyaratan kapabilitas manajemen dan fungsi pengawasan, termasuk bagi pejabat yang duduk dalam Komite ESG dan Komite Manajemen Risiko. Sejalan dengan pendekatan tersebut, penguatan kompetensi terkait risiko dan peluang perubahan iklim diintegrasikan ke dalam kerangka pengembangan kompetensi manajemen risiko perbankan, antara lain melalui Program Pendidikan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR). Dalam program tersebut, disampaikan materi khusus mengenai risiko perubahan iklim oleh tenaga ahli kepada jajaran *Board of Commissioners* (BOC), *Board of Directors* (BOD), serta *Senior Executive Vice Presidents* (SEVP), guna memastikan bahwa pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat komite dilakukan secara terinformasi, terintegrasi, dan selaras dengan kerangka manajemen risiko perbankan.

Tata Kelola

Integrasi Risiko dan Peluang Perubahan Iklim dalam Strategi dan Pengambilan Keputusan

Perusahaan mengintegrasikan risiko dan peluang perubahan iklim ke dalam perumusan strategi, pengambilan keputusan utama, serta penetapan *risk appetite*, sejalan dengan kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang berlaku. Dalam konteks ini, Komite Manajemen Risiko dan Komite ESG menjadi forum utama dalam pembahasan dan pengambilan arah strategis, dengan peran yang saling melengkapi sesuai mandat masing-masing untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko perubahan iklim tercermin dalam kebijakan pembiayaan, pengelolaan eksposur, dan penetapan risk appetite Perusahaan. Strategi terkait iklim ini merupakan bagian dari strategi Perusahaan yang dirancang untuk memperkuat ketahanan bisnis (*business resilience*), menjaga kualitas portofolio, serta menangkap peluang pertumbuhan berkelanjutan dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Strategi Mitigasi Risiko

Strategi respons risiko perubahan iklim diarahkan untuk memitigasi potensi dampak terhadap profil risiko, kualitas aset, dan ketahanan portofolio Perusahaan. Arah strategis ini ditetapkan berdasarkan hasil Climate Scenario Analysis yang menilai eksposur terhadap risiko fisik dan risiko transisi dalam berbagai horizon waktu. Perusahaan memastikan bahwa risiko perubahan iklim dikelola secara sistematis sebagai bagian dari risiko inheren perbankan serta terintegrasi ke dalam kerangka manajemen risiko, kebijakan pembiayaan, penetapan risk appetite, dan proses pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas kinerja jangka menengah dan jangka panjang.

Strategi Menangkap Peluang

Selain sebagai sumber risiko, perubahan iklim juga dipandang sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan mengarahkan pengembangan portofolio dan solusi pembiayaan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk perluasan aktivitas pembiayaan berkelanjutan dan penguatan inisiatif penurunan emisi. Pendekatan ini memungkinkan Perusahaan menangkap peluang secara terukur sekaligus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, kualitas portofolio, dan pengelolaan risiko.

Ke depan, Perusahaan akan terus mengembangkan model analisis dampak finansial untuk mengkuantifikasi efek risiko dan peluang perubahan iklim, serta menggunakannya secara aktif dalam pengambilan keputusan strategis.

Pelaporan

BRI menerapkan mekanisme pelaporan dan eskalasi isu perubahan iklim yang terstruktur sebagai bagian dari tata kelola keberlanjutan Perusahaan. Penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris dilakukan secara berkala, minimal dua kali dalam setahun, sebagai wujud fungsi pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan risiko dan peluang perubahan iklim serta keselarasan strategi Perusahaan dengan arah transisi menuju ekonomi rendah karbon. Laporan tersebut mencakup perkembangan eksposur risiko iklim, hasil Climate Scenario Analysis, kinerja keberlanjutan, serta area yang memerlukan perhatian atau arahan lebih lanjut dari Dewan Komisaris. Sejalan dengan hal tersebut, Komite ESG dan Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat secara berkala, minimal dua kali dalam satu tahun, untuk membahas perkembangan, risiko, dan peluang terkait perubahan iklim. Pembahasan dalam komite didasarkan pada hasil analisis, penilaian risiko, serta rekomendasi teknis yang disusun oleh unit kerja terkait. Hasil pembahasan dan keputusan komite dituangkan dalam bentuk rekomendasi, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi manajemen dalam menetapkan dan menyesuaikan strategi, kebijakan, serta langkah-langkah pengelolaan perubahan iklim di BRI. Melalui mekanisme tersebut, BRI memastikan bahwa informasi terkait perubahan iklim disampaikan secara tepat waktu, terstruktur, dan berbasis analisis, serta digunakan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan strategis.

Pengawasan Target Perubahan Iklim dan Integrasi dalam Penilaian Kinerja

BRI menetapkan mekanisme pengawasan target perubahan iklim yang terstruktur dengan mengintegrasikan indikator keberlanjutan dan perubahan iklim ke dalam sistem penilaian kinerja pada tingkat Direksi dan manajemen. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa komitmen perubahan iklim tidak hanya ditetapkan sebagai kebijakan strategis, tetapi juga dimonitor secara berkelanjutan dan diterjemahkan ke dalam akuntabilitas kinerja. Pada tingkat Direksi, pengawasan kinerja perubahan iklim tercermin dalam indikator kinerja utama yang mencakup target pembiayaan berkelanjutan. Indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur efektivitas Direksi dalam mengarahkan strategi keberlanjutan, mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam pengambilan keputusan utama, serta memastikan pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim pada tingkat Perusahaan.

Sementara itu, pada tingkat manajemen, BRI menetapkan indikator kinerja yang berfokus pada implementasi strategi perubahan iklim, khususnya melalui target pembiayaan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Indikator ini mencerminkan tanggung jawab manajemen dalam menerjemahkan arah strategis Direksi ke dalam pelaksanaan program dan inisiatif dekarbonisasi di tingkat operasional dan unit kerja. Melalui penerapan indikator kinerja yang berjenjang tersebut, BRI memastikan adanya mekanisme pengawasan yang konsisten terhadap pencapaian target perubahan iklim, sekaligus memperkuat keterkaitan antara kinerja keberlanjutan dan sistem penilaian kinerja. Pendekatan ini mendukung integrasi risiko dan peluang perubahan iklim ke dalam tata kelola, strategi, dan operasional Perusahaan secara selaras dengan praktik tata kelola yang baik.

Tata Kelola

Peran Manajemen

Peran dan Tanggung Jawab

Perusahaan menerapkan pendelegasian peran dan tanggung jawab kepada manajemen dalam implementasi strategi perubahan iklim, dengan memastikan bahwa pelaksanaannya selaras dengan arah strategis, kebijakan, dan target yang telah ditetapkan di tingkat Direksi. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan isu perubahan iklim dan implementasi agenda keberlanjutan dikoordinasikan oleh ESG Group di bawah Direktorat Legal and Compliance, yang memastikan integrasi kebijakan, proses, dan inisiatif terkait perubahan iklim di seluruh unit kerja. Pendekatan pengelolaan dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi melalui keterlibatan Group Manajemen Risiko, Group Bisnis dan Strategi, serta unit Operasional, guna memastikan bahwa risiko dan peluang perubahan iklim dapat diidentifikasi, dikelola, dan dimonitor secara konsisten dalam aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan.

Grup ESG

Grup ESG bertanggung jawab dalam pengembangan dan penyempurnaan kerangka kebijakan, strategi, serta inisiatif keberlanjutan Perusahaan, termasuk yang terkait dengan pengelolaan risiko dan peluang perubahan iklim. ESG Group melakukan penelaahan berkala atas kebijakan dan praktik yang berlaku, serta memastikan keselarasan kebijakan BRI dengan standar dan praktik terbaik internasional melalui pemantauan regulasi dan benchmark global.

Selain itu, ESG Group memfasilitasi implementasi kebijakan iklim dan strategi keberlanjutan, termasuk dalam mendukung pencapaian Target Net Zero Emission BRI 2050, yang pengukurannya terintegrasi dalam indikator kinerja (KPI) pengurangan emisi. ESG Group juga mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan dan struktur tata kelola, serta memastikan tersedianya mekanisme pemantauan dan pelaporan kinerja ESG secara berkala kepada Direksi.

Unit Kerja Operasional

Unit Kerja Operasional bertanggung jawab atas identifikasi serta respons terhadap risiko dan peluang perubahan iklim yang relevan dengan kegiatan operasional unit kerja. Peran ini mencakup penyusunan dan pelaksanaan perencanaan anggaran untuk mendukung inisiatif pengelolaan perubahan iklim dan dekarbonisasi operasional Bank, sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

Unit Kerja Manajemen Risiko

Unit Kerja Manajemen Risiko berperan dalam mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam kerangka manajemen risiko Bank, melalui kolaborasi dengan ESG Group dalam pemetaan dan penilaian risiko, termasuk identifikasi risiko fisik dan risiko transisi. Group ini melaksanakan analisis skenario perubahan iklim untuk mengevaluasi potensi dampaknya terhadap kegiatan operasional dan ketahanan portofolio keuangan BRI, serta mendukung penguatan pengambilan keputusan berbasis risiko.

Unit Kerja Bisnis dan Strategi

Unit Kerja Bisnis dan Strategi berperan dalam integrasi risiko dan peluang perubahan iklim ke dalam aktivitas investasi dan pembiayaan Bank. Group ini memelihara kebijakan terkait emisi yang dibiayai (financed emissions) serta mengelola portofolio pembiayaan untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan.



Strategi

Gambaran Umum Strategi BRI ^[3-3]

Managing Climate Risk, Capturing Strategic Opportunity

Perubahan iklim telah menimbulkan risiko fisik yang semakin nyata secara global, antara lain mencairnya gletser, kenaikan permukaan air laut, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem. Perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan risiko material bagi lembaga keuangan, khususnya pada sektor-sektor yang terpapar risiko transisi seiring dengan pergeseran ekonomi menuju jalur rendah karbon. Dalam konteks ini, risiko iklim tidak hanya dipandang sebagai sumber ketidakpastian, tetapi juga sebagai faktor strategis yang apabila dikelola secara tepat dapat mendorong inovasi, memperkuat ketahanan bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perusahaan menyadari bahwa menjaga resiliensi jangka panjang memerlukan pendekatan yang terstruktur dan *forward-looking* dalam mengelola risiko perubahan iklim, sekaligus mengoptimalkan peluang yang muncul dari dinamika transisi dan upaya adaptasi. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perusahaan secara konsisten mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi risiko serta peluang terkait perubahan iklim dengan mengacu pada *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), selaras dengan standar global IFRS S2, serta mengadopsi praktik dalam penyusunan rencana transisi sebagaimana tercermin dalam kerangka *Transition Plan Taskforce*.

Horizon Waktu

Perusahaan mengelompokkan dampak risiko dan peluang terkait perubahan iklim ke dalam horizon jangka pendek (hingga satu tahun), jangka menengah (1–5 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Pengelompokan horizon waktu ini diselaraskan dengan proses pengambilan keputusan strategis Perusahaan dan digunakan sebagai dasar dalam penetapan prioritas serta target strategis jangka menengah dan panjang. Pendekatan tersebut memungkinkan Perusahaan untuk mengelola risiko dan peluang perubahan iklim secara bertahap dan terukur, sekaligus memastikan bahwa respons strategis yang ditetapkan tetap relevan dengan dinamika risiko, arah kebijakan, dan tujuan keberlanjutan Perusahaan dalam jangka panjang.

Tingkat Risiko	Penjelasan
Tinggi	Risiko yang dinilai dengan tingkat risiko tinggi merujuk pada risiko yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang pada operasional dan strategi bisnis BRI yang menyebabkan perubahan arah atau strategi bisnis.
Sedang	Risiko yang dinilai dengan tingkat risiko sedang merujuk pada risiko yang akan menimbulkan dampak jangka panjang pada operasional dan strategi bisnis BRI yang memerlukan tindakan yang dapat diambil dalam kerangka operasional dan strategi bisnis yang sudah ada.
Rendah	Risiko yang dinilai dengan tingkat risiko rendah merujuk pada risiko yang diperkirakan akan menimbulkan dampak jangka pendek pada operasional BRI yang memerlukan tindakan sekali waktu untuk beradaptasi dengan model operasional yang sudah ada atau pemantauan risiko yang berkelanjutan.



Strategi

Klasifikasi dan Faktor Pendorong Risiko Iklim

Perusahaan mengklasifikasikan risiko perubahan iklim mengacu pada kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), yang membagi risiko iklim ke dalam dua kategori utama, yaitu risiko transisi dan risiko fisik. Risiko transisi mencakup risiko yang timbul dari perubahan kebijakan dan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta aspek hukum dan reputasi dalam proses transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sementara itu, risiko fisik mencerminkan dampak langsung perubahan iklim terhadap aset dan aktivitas ekonomi, yang dikelompokkan ke dalam risiko akut akibat kejadian cuaca ekstrem serta risiko kronis yang timbul dari perubahan pola iklim jangka panjang. Dalam melakukan analisis risiko perubahan iklim, Perusahaan menilai potensi dampak risiko iklim terhadap aktivitas operasional serta portofolio pembiayaan dan investasi Perusahaan. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha perbankan serta eksposur risiko yang relevan terhadap profil risiko Perusahaan. Evaluasi dampak risiko perubahan iklim dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mencakup analisis potensi dampak terhadap kinerja keuangan, eksposur portofolio pembiayaan, serta risiko kredit. Sementara itu, pendekatan kualitatif mempertimbangkan implikasi terhadap reputasi Perusahaan, keberlanjutan hubungan dengan nasabah, serta persepsi pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko perubahan iklim dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko Perusahaan.

No	Kategori	Faktor Risiko	Dampak ke Keuangan ke Bisnis Perusahaan	Potensi Dampak Finansial	Tingkatan Dampak	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Risiko Transisi								
1	Risiko Teknologi	Meningkatnya permintaan akan teknologi rendah karbon	Biaya R&D dan investasi teknologi meningkat	Biaya riset, pengembangan, dan adopsi teknologi	Rendah		✓	✓
2	Risiko Kebijakan & Regulasi	- Harga karbon - Strategi nasional dekarbonisasi - Kewajiban pengungkapan terkait iklim	- Beban kepatuhan meningkat - Biaya transisi energi (EV, energi alternatif)	- Kenaikan biaya operasional - Penurunan nilai aset sektor karbon tinggi - Biaya litigasi dan sistem kepatuhan iklim	Tinggi	✓	✓	✓
3	Risiko Pasar	- Meningkatnya penggunaan energi terbarukan - Meningkatnya permintaan pasar untuk produk yang lebih ramah lingkungan - Perubahan perilaku nasabah - Permintaan pasar terhadap keuangan hijau	- Kebutuhan pengembangan produk hijau - Kenaikan kredit bermasalah sektor karbon tinggi - Penurunan permintaan & kepercayaan investor	Kenaikan credit loss portofolio karbon tinggi yang berdampak pada CAR Perusahaan	Tinggi		✓	✓
4	Risiko Reputasi	Risiko kehilangan kepercayaan dan keyakinan investor	- Penurunan reputasi institusi & debitur - Penurunan kepercayaan akibat kegagalan respons iklim	- Perubahan strategi bisnis yang meningkatkan biaya - Penurunan investasi & penjualan - Penurunan nilai merek	Rendah	✓	✓	✓
Risiko Fisik								
5	Risiko Fisik Akut	- Gelombang panas - Banjir - Siklon Tropis - Kebakaran Hutan	- Gangguan operasional - Kerusakan fasilitas dan rantai pasok - Gangguan layanan nasabah	- Risiko Likuiditas akibat penarikan dana - Biaya pemulihan aset dan infrastruktur	Menengah	✓	✓	✓
6	Risiko Fisik Kronis	- Kenaikan suhu - Kenaikan permukaan laut - Stres air	- Penurunan nilai aset jangka panjang - Kebutuhan relokasi atau penghapusan aset	- Penyusutan nilai aset - Penurunan nilai portofolio jangka panjang	Rendah		✓	✓

Strategi

Klasifikasi dan Faktor Pendorong Peluang Iklim

Perusahaan mengklasifikasikan peluang terkait perubahan iklim mengacu pada kerangka *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Peluang perubahan iklim diidentifikasi dalam beberapa kategori utama, antara lain efisiensi sumber daya, transisi energi, produk dan layanan berkelanjutan, pengembangan pasar, serta peningkatan ketahanan (*resilience*). Klasifikasi ini digunakan untuk memahami implikasi perubahan iklim terhadap sektor keuangan dan mengidentifikasi potensi peluang bisnis yang relevan bagi Perusahaan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang perubahan iklim, Perusahaan mempertimbangkan keterkaitannya dengan aktivitas usaha perbankan, khususnya dalam pengembangan pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta upaya peningkatan efisiensi dan ketahanan operasional. Salah satu peluang yang signifikan dari perubahan iklim terhadap operasi bisnis BRI adalah meningkatnya permintaan produk yang didorong oleh perubahan sikap investor terhadap aksi BRI dalam menghadapi perubahan iklim melalui pendanaan berbasis ESG. Saat ini, BRI mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pendanaan berbasis ESG dibandingkan dengan pendanaan konvensional.

No	Kategori	Faktor Risiko	Dampak ke Keuangan ke Bisnis Perusahaan	Potensi Dampak Finansial	Tingkatan Dampak	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1	Produk dan Layanan	- Perluasan produk dan layanan hijau - Perluasan penerapan teknologi hijau	- Peningkatan preferensi nasabah terhadap produk hijau - Perluasan skala produk hijau, investasi, dan pembiayaan - Peningkatan daya saing melalui pengembangan solusi keuangan hijau	- Peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan hijau serta ekspansi penjualan - Perkiraan peningkatan aset keuangan akibat pembiayaan project hijau	Tinggi	✓	✓	✓
2	Pasar	- Kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim sejalan dengan komitmen Indonesia dalam <i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i> (ENDC) - Peluang diversifikasi portofolio bisnis melalui pembiayaan dan investasi berkelanjutan.	- Perluasan akses ke segmen pasar baru melalui pengembangan pembiayaan dan layanan keuangan yang mendukung aktivitas rendah karbon. - Penguatan struktur laba melalui pembentukan portofolio aset berkelanjutan yang lebih terdiversifikasi.	- Perluasan sumber pendapatan dari pengembangan pasar dan segmen pembiayaan baru. - Penguatan reputasi Perusahaan dan peningkatan daya saing melalui diversifikasi portofolio bisnis yang berkelanjutan.	Tinggi	✓	✓	✓
3	Efisiensi Sumber Daya	- Peningkatan penggunaan energi yang lebih efisien dan rendah karbon, termasuk pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. - Peralihan menuju penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan dalam aktivitas operasional dan bisnis.	- Peningkatan kebutuhan pembiayaan dari nasabah, khususnya nasabah korporasi, yang melakukan upaya peningkatan efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi. - Penguatan proses identifikasi dan penilaian aktivitas ekonomi berkelanjutan, yang mendukung peningkatan portofolio pembiayaan berkelanjutan Perusahaan.	- Potensi penurunan biaya operasional seiring meningkatnya efisiensi energi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. - Peningkatan produktivitas yang berpotensi mendorong efisiensi biaya dan perbaikan kinerja keuangan dalam jangka menengah hingga panjang.	Menengah	✓	✓	✓
4	Sumber Energi	- Kebutuhan peningkatan investasi pada sumber energi terbarukan dan rendah karbon sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim sesuai dengan <i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i> (ENDC) Indonesia. - Perkembangan dan adopsi teknologi energi hijau dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.	- Peningkatan permintaan pembiayaan dari nasabah, khususnya sektor korporasi, yang berpartisipasi dalam proyek mitigasi perubahan iklim melalui pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. - Perluasan pembiayaan dan investasi pada proyek-proyek transisi energi dan proyek ramah lingkungan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.	- Penurunan eksposur risiko keuangan jangka panjang, khususnya risiko transisi seperti potensi biaya kebijakan karbon, seiring dengan berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca pada portofolio pembiayaan. - Potensi peningkatan kinerja keuangan jangka panjang melalui stabilitas arus kas dan efisiensi biaya dari proyek energi berkelanjutan. - Penguatan posisi strategis Perusahaan dalam pembiayaan berkelanjutan melalui partisipasi aktif dalam pendanaan mitigasi perubahan iklim nasional.	Menengah		✓	✓
5	Ketahanan	- Penguatan ketahanan usaha dan portofolio melalui adopsi praktik rendah karbon dan peningkatan efisiensi energi. - Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap risiko perubahan iklim, sejalan dengan agenda mitigasi dan adaptasi nasional.	- Penguatan ketahanan portofolio pembiayaan dan kualitas aset Perusahaan. - Diversifikasi portofolio bisnis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.	- Stabilitas kualitas aset dan arus kas dalam jangka menengah dan panjang. - Peningkatan daya tarik Perusahaan bagi pemangku kepentingan dan investor.	Menengah		✓	✓

Strategi

Strategi Dekarbonisasi (GRI 102-1)

BRI memandang transisi menuju ekonomi rendah karbon sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang Perusahaan. Strategi dekarbonisasi disusun selaras dengan kerangka *Transition Planning Taskforce* dan diintegrasikan dalam pengungkapan risiko dan peluang iklim sesuai IFRS S2. Untuk mencapai tujuan tersebut BRI telah memiliki tata kelola risiko iklim yang kuat sebagaimana diuraikan pada bagian [Tata Kelola](#) dan pondasi komitmen *Net Zero Emission* 2050 yang divalidasi oleh SBTi pada 2024. Hal ini menjadikan BRI sebagai lembaga jasa keuangan pertama di Indonesia yang mendapatkan validasi atas target NZE tersebut. Komitmen transisi menuju ekonomi rendah karbon ini selaras dengan ambisi global pembatasan *global warming* 1,5 °C.

Selanjutnya, BRI menyusun strategi implementasi dan *engagement* yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait di sepanjang rantai nilai. Implementasi strategi dekarbonisasi BRI mendorong penyesuaian bertahap pada model bisnis dan rantai nilai melalui integrasi pembiayaan berkelanjutan, transformasi operasional, dan keterlibatan pemangku kepentingan, dengan dampak yang diantisipasi muncul secara progresif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Melalui penetapan metrik dan target penurunan emisi Lingkup 1, 2, dan 3 secara bertahap, BRI memastikan transisi dijalankan secara terukur, menjaga ketahanan bisnis, dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Adapun rincian metrik dan target terkait iklim dapat dilihat pada [Metrik dan Target](#).



Strategi Dekarbonisasi	
Governance	Melakukan integrasi pengawasan strategi dekarbonisasi dan insentif ke dalam struktur tata kelola ESG.
Foundation	Merumuskan pendekatan menyeluruh BRI dalam mencapai target net zero melalui strategi pembiayaan utama, termasuk tujuan dan prinsip yang mendasari, komitmen jangka panjang yang didukung oleh target antara yang terukur, linimasa dan tonggak strategis, serta strategi pembiayaan transisi guna mencapai target tersebut.
Implementation strategy	Penyelarasan aktivitas bisnis, produk, dan kebijakan Perusahaan untuk mencapai net zero emission. Implementasinya dilakukan melalui penguatan kerangka keuangan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko iklim, percepatan transisi energi operasional, serta pengembangan kebijakan sektoral dan kriteria portofolio yang mendorong peningkatan pembiayaan hijau dan pengelolaan eksposur pada sektor beremisi tinggi.
Engagement Strategy	Meningkatkan kapabilitas internal untuk terlibat dengan pemangku kepentingan eksternal dan meningkatkan keterlibatan dengan nasabah, pemerintah, industri dan asosiasi perbankan dalam mendukung tujuan <i>net zero</i> .
Metrics and Target	Menyusun dan menetapkan metrik dan target terkait Tahun dasar emisi, Sumber emisi Operasional, Emisi yang dibiayai, Pembiayaan transisi, dann Monitoring progres pencapaian berdasarkan sumber emisi.

Strategi

Strategi Dekarbonisasi (GRI 102-1)

Setelah mengelompokkan dampak risiko dan peluang perubahan iklim ke dalam tiga horizon waktu, Perusahaan juga menetapkan target jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang serta melaksanakan langkah-langkah strategis untuk merespons perubahan iklim. Strategi ini disusun berdasarkan kajian atas risiko dan peluang perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi prospek bisnis, kinerja keuangan, dan ketahanan jangka panjang Perusahaan.

Tujuan	Strategi	Kegiatan Implementasi dan Keterlibatan	Potensi Dampak Finansial		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Mencapai <i>net zero</i> emisi operasional dan pembiayaan pada tahun 2050	ESRM Integration	Pengelolaan Emisi Operasional dan Efisiensi Energi - Mendukung komitmen nasional dan global terkait perubahan iklim, termasuk NDC dan Paris Agreement, sesuai peran Perusahaan. - Meningkatkan inisiatif hijau perseroan diantaranya: - Meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada kegiatan operasional. - Melakukan transisi armada kendaraan operasional ke kendaraan ramah lingkungan secara bertahap dan berbagai inisiatif hijau lainnya	- Peningkatan nilai aset tetap seiring dengan investasi pada infrastruktur energi terbarukan, seperti pemasangan panel surya. - Peningkatan belanja modal dan biaya operasional terkait konversi armada kendaraan ramah lingkungan. - Peningkatan biaya operasional untuk pelaksanaan program dan kampanye efisiensi energi.	- Penurunan biaya listrik dan bahan bakar melalui peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. - Peningkatan beban penyusutan aset tetap sebagai konsekuensi dari investasi pada infrastruktur hijau.	- Stabilitas dan potensi pertumbuhan kinerja usaha yang didukung oleh penguatan citra dan reputasi Perusahaan sebagai institusi yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. - Pengurangan eksposur terhadap risiko transisi, termasuk potensi dampak kebijakan iklim di masa depan seperti penerapan pajak karbon atau regulasi lingkungan yang lebih ketat.
		Pembiayaan Bertanggung Jawab - Melakukan peningkatan kapabilitas internal dalam mendukung pembiayaan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. - Melakukan <i>engagement</i> secara berkelanjutan dengan debitur untuk mendorong penetapan target pengurangan emisi dan transisi usaha menuju praktik rendah karbon. - Melakukan keterlibatan dalam berbagai forum industri dan asosiasi bisnis, komunikasi dengan pemerintah guna memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan. - Mengukur, memantau, dan mengelola emisi pembiayaan serta intensitas karbon pada setiap portofolio perusahaan yang dibiayai dan entitas anak, sebagai dasar pengambilan keputusan pembiayaan dan manajemen risiko. - Menerapkan analisis faktor ESG pada seluruh pengajuan fasilitas pembiayaan, baik pembiayaan tujuan umum maupun berbasis proyek. - Mengacu pada <i>Loan Portfolio Guidelines</i> (LPG) yang mencakup klasifikasi sektor, kriteria penerimaan sektor, batasan sektor, serta penggunaan ESG checklist sebagai bagian dari proses <i>Know Your Customer</i> (KYC) dan dituangkan dalam Memorandum Analisis Bisnis (MAB). - Mengimplementasikan Daftar Sektor Negatif/ Dikecualikan (<i>Negative or Exclusion List</i>) untuk membatasi eksposur pada sektor tertentu.	Peningkatan biaya pendidikan dan pelatihan pekerja, biaya implementasi terkait pengukuran emisi pembiayaan, serta pelaksanaan <i>engagement</i> dengan nasabah.	Penyesuaian komposisi portofolio pembiayaan seiring peningkatan eksposur ke sektor rendah karbon.	Stabilitas kinerja keuangan jangka panjang melalui penurunan risiko kredit terkait perubahan iklim dan peningkatan daya saing Perusahaan dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Strategi

Strategi Dekarbonisasi

Tujuan	Strategi	Kegiatan Implementasi dan Keterlibatan		Potensi Dampak Finansial		
				Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Mencapai <i>net zero</i> emisi operasional dan pembiayaan pada tahun 2050	ESRM Integration	Mitigasi Risiko Transisi dalam Pembiayaan Korporasi	Mengintegrasikan kebijakan pembiayaan subsektor sebagai dasar pengambilan keputusan pembiayaan berbasis ESG.	Peningkatan biaya terkait penguatan kebijakan, sistem pendukung, dan peningkatan kapasitas pegawai.	Penyesuaian struktur portofolio pembiayaan seiring dengan peningkatan eksposur pada sektor dan aktivitas rendah karbon termasuk potensi penurunan pendapatan bunga dari sektor beremisi tinggi	Penguatan kualitas aset, stabilitas keuangan, dan profitabilitas melalui pengelolaan risiko transisi yang lebih termitigasi.
		Mitigasi Risiko Fisik dalam Fasilitas Agunan Pembiayaan Mikro	Mengintegrasikan fasilitas kepesertaan asuransi agunan pada segmen mikro ke dalam proses pembiayaan dan pendampingan debitur, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko kredit yang timbul akibat kejadian iklim ekstrem.	Peningkatan biaya operasional terkait fasilitas kepesertaan asuransi, termasuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan debitur.	Penurunan eksposur risiko kredit pada segmen mikro dan UMKM seiring meningkatnya perlindungan terhadap dampak risiko fisik perubahan iklim.	Peningkatan kualitas portofolio pembiayaan serta penguatan ketahanan kinerja keuangan melalui peningkatan resiliensi debitur.
		Mitigasi Risiko Iklim dalam Kegiatan Operasional Perusahaan	- Pengalihan Risiko Fisik ke Asuransi - Optimalisasi Penilaian Risiko dan Ancaman - Realokasi Aset	Peningkatan biaya premi asuransi dan penyesuaian pengelolaan aset operasional	Penurunan potensi kerugian akibat gangguan operasional dan kerusakan aset.	Peningkatan ketahanan operasional dan stabilitas kinerja keuangan Perusahaan
Akselerasi transformasi portofolio menuju pembiayaan rendah karbon	Sustainable Portfolio	Peningkatan Responsible Asset Under Management dan Sustainable Related Funding	- Membangun dan mengembangkan sistem identifikasi debitur hijau - Mendorong implementasi pembiayaan berkelanjutan melalui penyelarasan dengan KPI	Peningkatan biaya penyusunan kebijakan dan pembangunan sistem identifikasi debitur hijau	Pertumbuhan pendapatan bunga dari peningkatan portofolio debitur rendah karbon serta penerbitan instrumen hijau.	Pertumbuhan penjualan melalui perluasan pangsa pasar dan diversifikasi portofolio bisnis
		Pengembangan Solusi dan Layanan Pendukung Transisi Nasabah	- Support Nasabah untuk dekarbonisasi - Menyediakan Carbon Management System melalui Qlola untuk mendukung pengelolaan emisi nasabah	Peningkatan biaya pengembangan aplikasi	Pertumbuhan pendapatan berbasis layanan melalui peningkatan adopsi nasabah	Penciptaan sumber pendapatan baru dan penguatan hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Strategi

Pendekatan BRI dalam Menganalisis Skenario Perubahan Iklim

BRI melaksanakan analisis skenario perubahan iklim untuk menilai potensi dampak perubahan iklim terhadap portofolio pembiayaan, kegiatan operasional, aset, dan kinerja keuangan Perusahaan. Analisis skenario ini dikembangkan bekerjasama dengan pihak eksternal dan mengacu pada praktik terbaik serta pedoman nasional dan internasional yang relevan, termasuk buku panduan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) Otoritas Jasa Keuangan, serta referensi internasional seperti *Network for Greening the Financial System* (NGFS) dan Intergovernmental *Panel on Climate Change* (IPCC) dan disesuaikan dengan portofolio perusahaan. Melalui analisis skenario ini, Perusahaan berupaya memahami ketahanan bisnis dan kesiapan strategi dalam menghadapi berbagai potensi jalur transisi dan risiko fisik perubahan iklim.



Skenario Perubahan Iklim yang Digunakan BRI

Aspek	Risiko Transisi	Risiko Fisik
Horizon Waktu Analisis	Analisis dampak jangka panjang untuk periode sekitar 25 tahun, dari akhir tahun 2025 hingga tahun 2050	
Ruang Lingkup Aset	Seluruh portofolio pembiayaan BRI (100%) pada seluruh sektor ekonomi dalam tahun buku 2025	Agunan pembiayaan pada sektor pertanian dan KPR, serta lokasi operasional BRI
Skenario yang Digunakan	Skenario NGFS: - Current Policies - Delayed Transition - Net Zero 2050	Skenario IPCC (RCP): - RCP2.6/SSP1-2.6 - RCP4.5/SSP2-4.5 - RCP8.5/SSP5-8.5

Strategi

Evaluasi Materialitas Sektor ^[GRI 102-7, 102-8]

Dalam mengidentifikasi sektor-sektor portofolio yang paling terpapar risiko transisi perubahan iklim, Perusahaan melakukan evaluasi materialitas sektor melalui analisis eksposur pembiayaan dan emisi karbon pada setiap sektor industri. Analisis ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara besaran eksposur pembiayaan, tingkat emisi, serta intensitas ekonomi karbon sebagai dasar pengelolaan risiko transisi secara terukur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sektor-sektor dengan kontribusi emisi gas rumah kaca yang tinggi tidak selalu memiliki eksposur pembiayaan terbesar. Oleh karena itu, Perusahaan tidak hanya mempertimbangkan nilai eksposur absolut, tetapi juga menggunakan pendekatan intensitas karbon untuk memperoleh gambaran risiko transisi yang lebih komprehensif pada masing-masing sektor.

Pemahaman Portofolio

Tiga sektor terbesar dalam portofolio pembiayaan BRI adalah (1) Perdagangan Besar dan Eceran, (2) Administrasi Publik dan Pertahanan, serta (3) Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan, yang secara keseluruhan mencakup 77,98% dari total portofolio kredit. Namun demikian, besarnya eksposur pada sektor-sektor tersebut tidak selalu mencerminkan tingkat risiko perubahan iklim yang dihadapi.

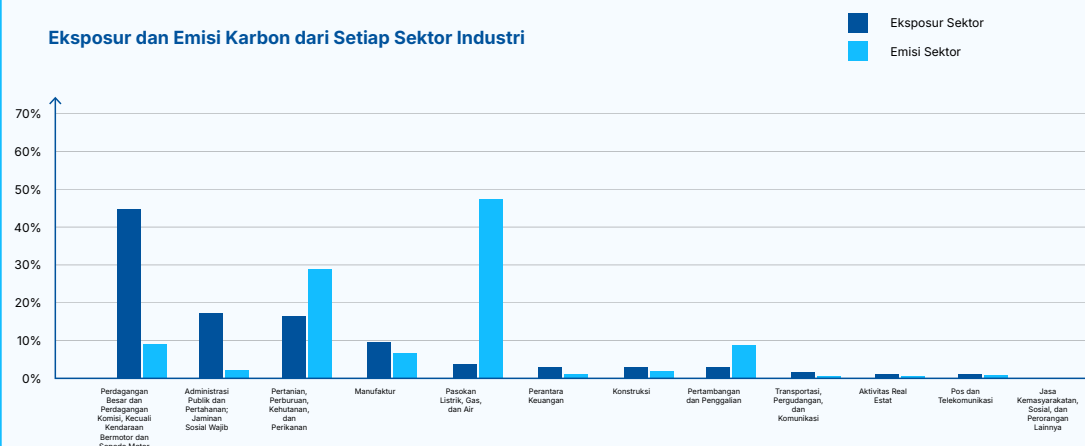
Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, analisis juga mempertimbangkan kontribusi emisi gas rumah kaca dari masing-masing sektor. Berdasarkan analisis tersebut, tiga sektor dengan kontribusi emisi terbesar—yang mencakup 82,13% dari total emisi portofolio pembiayaan yaitu (1) Listrik, Gas, dan Penyediaan Air; (2) Pertanian, Pemburuan, Kehutanan, dan Perikanan; serta (3) Pertambangan dan Penggalian. Analisis lanjutan terhadap intensitas karbon diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sektor dengan tingkat emisi tinggi.

Analisis *Exposure* dan Emisi

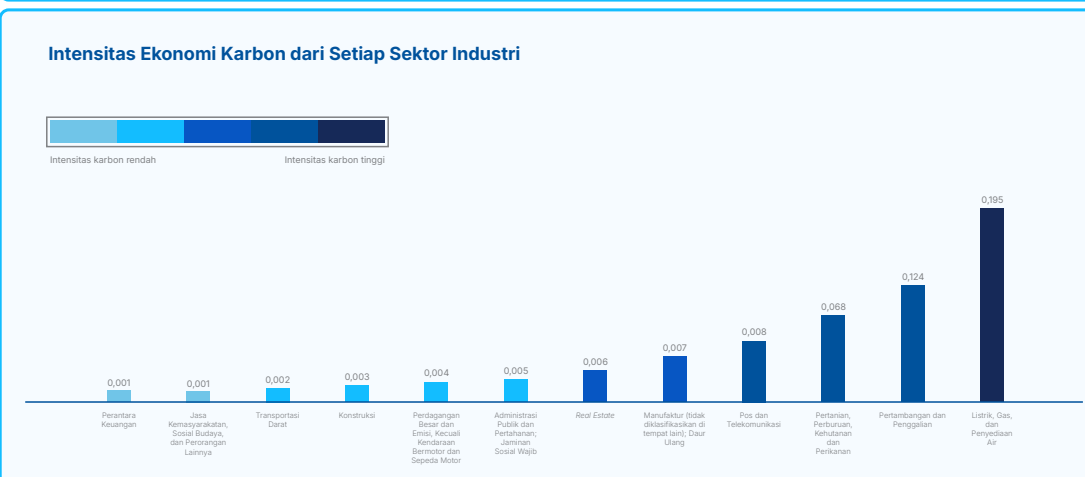
Dalam analisis intensitas karbon portofolio, sektor dengan intensitas karbon tertinggi meliputi: (1) Listrik, Gas, dan Penyediaan Air; serta (2) Pertambangan dan Penggalian. Dalam mengelola eksposur pada sektor-sektor dengan intensitas karbon tinggi, BRI menerapkan pendekatan keterlibatan (*engagement*) dengan mendorong sektor-sektor tersebut untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung penurunan emisi karbon sekaligus mendorong transformasi menuju ekonomi hijau secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, sektor-sektor dengan intensitas karbon tinggi diidentifikasi sebagai sektor prioritas dalam pengelolaan risiko transisi, mengingat sektor-sektor ini lebih rentan terhadap perubahan kebijakan iklim, pengetatan regulasi lingkungan, serta peningkatan biaya transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi materialitas sektor dan analisis intensitas karbon portofolio, Perusahaan mengintegrasikan risiko transisi perubahan iklim ke dalam *Risk Response Strategy*, khususnya melalui penguatan kebijakan pembiayaan. ^[GRI 102-2]

Eksposur dan Emisi Karbon dari Setiap Sektor Industri



Intensitas Ekonomi Karbon dari Setiap Sektor Industri



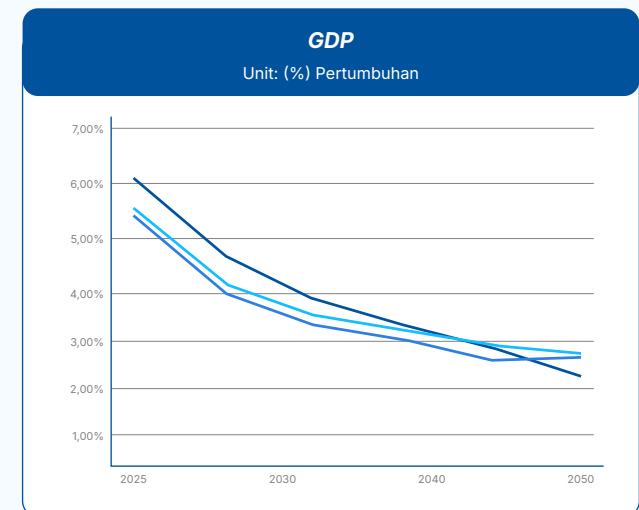
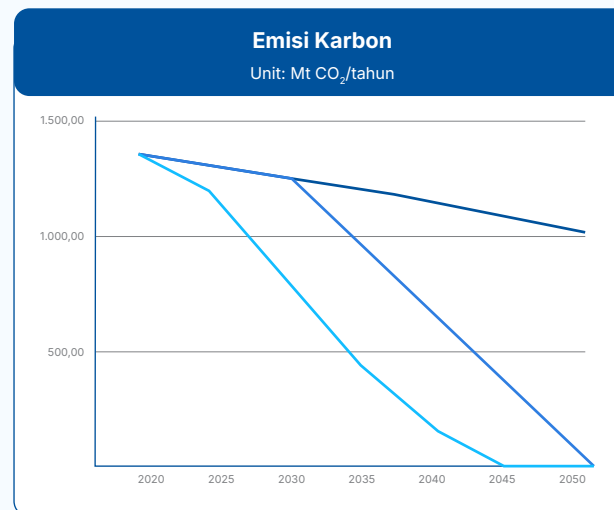
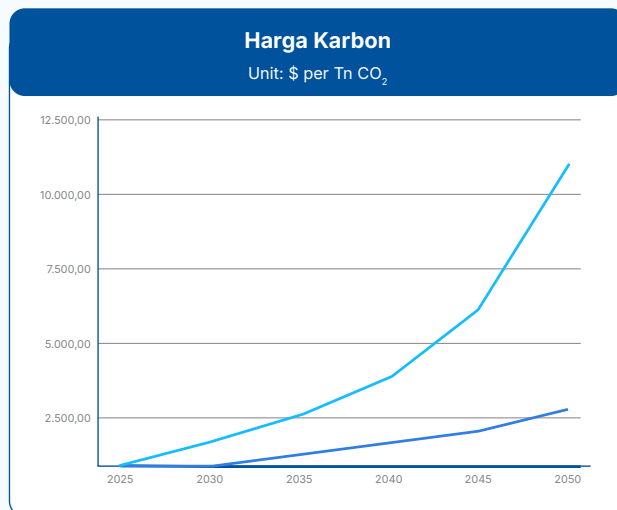
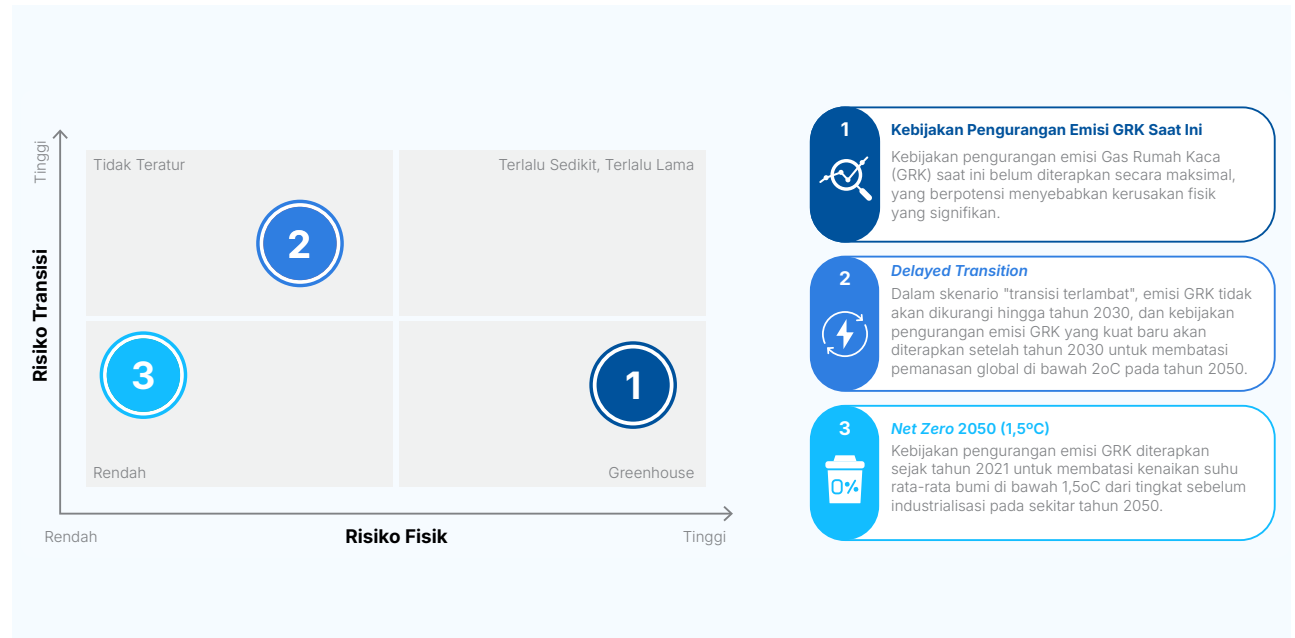
Strategi

Skenario Iklim Risiko Transisi - NGFS

Uji stres perubahan iklim dilakukan dengan menggunakan tiga skenario transisi yang dikembangkan oleh *Network for Greening the Financial System* (NGFS), yaitu *current policies*, *delayed transition*, dan *net zero*. Ketiga skenario ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jalur kebijakan dan tingkat ambisi transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Pada skenario *current policies*, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada awal periode diproyeksikan relatif tinggi, namun cenderung melambat dalam jangka panjang. Dalam skenario ini, penurunan emisi karbon berlangsung secara terbatas, dengan laju yang lebih lambat dibandingkan skenario transisi lainnya, seiring dengan tidak adanya penerapan harga karbon. Skenario *delayed transition* mencerminkan keterlambatan implementasi kebijakan iklim, di mana penurunan emisi karbon baru mulai berlangsung secara bertahap setelah tahun 2030. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko transisi pada periode selanjutnya akibat penyesuaian kebijakan yang lebih mendadak.

Sementara itu, pada skenario *net zero*, emisi karbon diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan, setiap tahunnya sampai dengan tahun 2050. Skenario ini juga mengasumsikan penerapan harga karbon yang lebih tinggi dibandingkan skenario lainnya.



Baseline (Kebijakan Saat Ini)

Transisi Terlambat

Net Zero 2050

Strategi

Skenario Iklim Risiko Fisik - IPCC

Dalam menganalisis risiko fisik perubahan iklim, BRI menggunakan pendekatan *Representative Concentration Pathways* (RCP) yang dikembangkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). RCP merupakan jalur konsentrasi gas rumah kaca yang digunakan untuk memproyeksikan kondisi iklim masa depan berdasarkan berbagai tingkat *radiative forcing* hingga tahun 2100. Nilai RCP mencerminkan besaran tambahan energi panas yang terakumulasi di sistem iklim global dalam satuan Watt per meter persegi (W/m^2), yang berimplikasi pada tingkat pemanasan global dan peningkatan risiko iklim.

Selaras dengan Buku 2: Panduan Teknis *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI memfokuskan analisis risiko fisik pada jenis risiko yang relevan dengan karakteristik geografis Indonesia serta profil portofolio pembiayaan Perusahaan, khususnya risiko banjir dan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 31 Desember 2023 tercatat sekitar 5.400 kejadian bencana di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana dengan frekuensi tertinggi, mencapai sekitar 2.051 kejadian, diikuti oleh banjir sebanyak sekitar 1.255 kejadian pada periode yang sama.

Risiko banjir dan kebakaran hutan tersebut tidak hanya bersifat kejadian tahunan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis, serta perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu yang semakin ekstrem seiring dengan perubahan iklim. Kondisi ini berpotensi meningkatkan eksposur risiko fisik terhadap agunan pembiayaan, kegiatan operasional, dan keberlanjutan kinerja Perusahaan dalam jangka menengah hingga panjang.

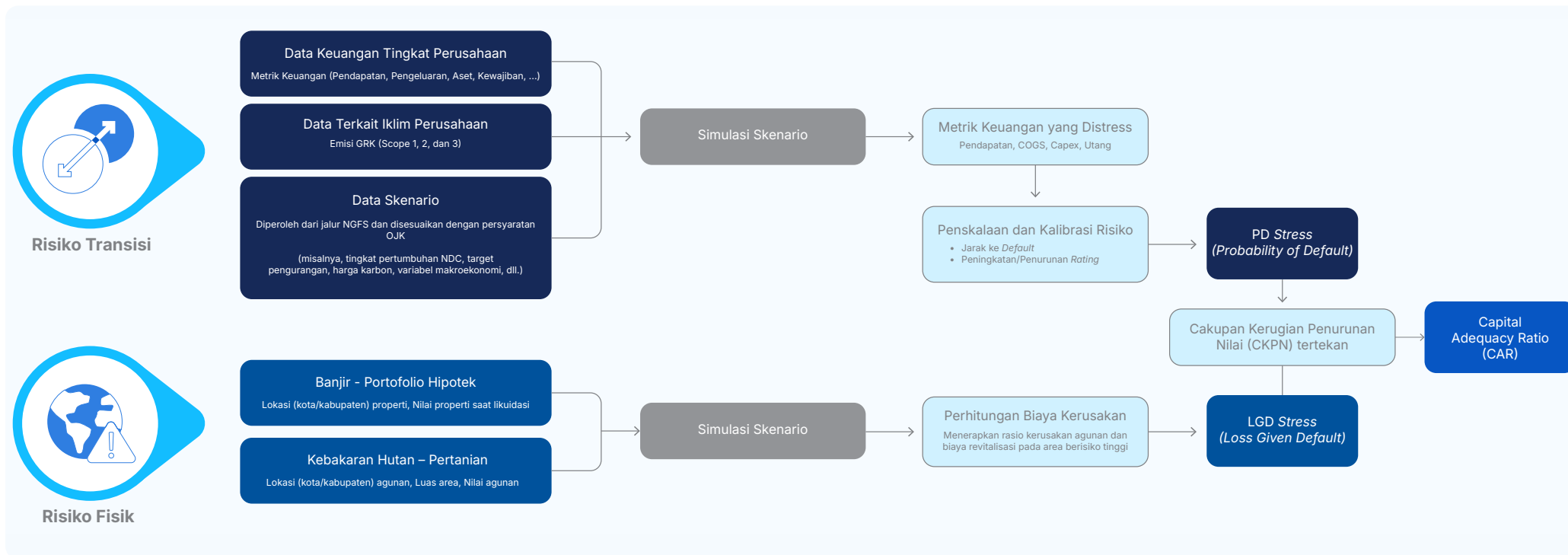
Skenario	Radiative Forcing 2100	Asumsi
RCP2.6/SSP1-2.6	$\approx 2,6 W/m^2$	Jalur mitigasi sangat ambisius, konsisten dengan pembatasan kenaikan suhu global sekitar $1,5-2^{\circ}C$
RCP4.5/SSP2-4.5	$\approx 4,5 W/m^2$	Jalur mitigasi moderat (<i>middle of the road</i>) dengan stabilisasi emisi di paruh kedua abad
RCP8.5/SSP5-8.5	$\approx 8,5 W/m^2$	Jalur emisi sangat tinggi tanpa mitigasi signifikan, meningkatkan risiko fisik ekstrem



Strategi

Metodologi Uji Stress Risiko Iklim

Perusahaan menerapkan metodologi uji stres risiko iklim untuk menilai ketahanan portofolio pembiayaan Perusahaan terhadap risiko transisi dan risiko fisik perubahan iklim. Metodologi ini dirancang untuk menerjemahkan hasil analisis skenario perubahan iklim ke dalam dampak kuantitatif terhadap risiko kredit dan permodalan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan risiko jangka menengah hingga panjang.



Hasil uji stres risiko transisi dan risiko fisik digunakan sebagai input dalam evaluasi ketahanan permodalan Perusahaan, termasuk dampaknya terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Dengan pendekatan ini, risiko iklim tidak hanya dianalisis sebagai risiko non-keuangan, tetapi juga dipertimbangkan secara kuantitatif dalam pengelolaan risiko kredit, pembentukan cadangan, dan perencanaan permodalan BRI.

[GRI 102-2]

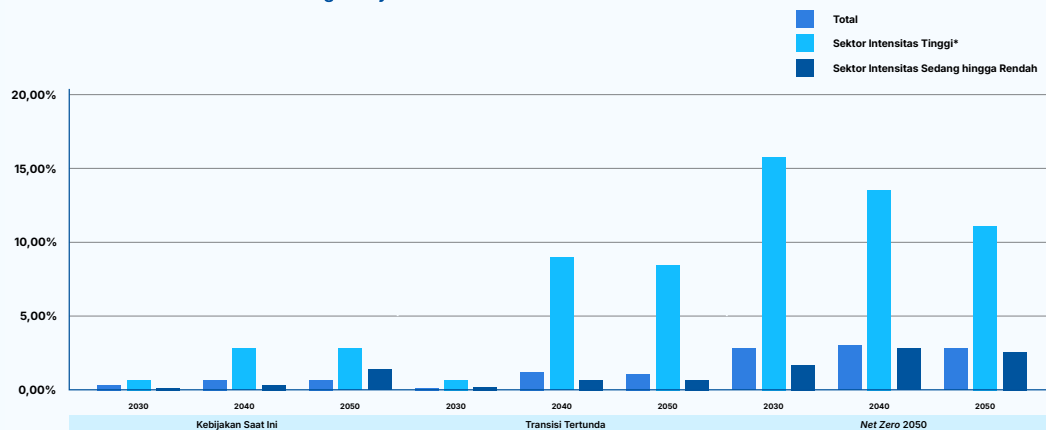
Strategi

Analisis Skenario Risiko Transisi

BRI melakukan analisis skenario risiko transisi untuk menilai potensi dampak kebijakan dan dinamika transisi menuju ekonomi rendah karbon terhadap kualitas kredit portofolio pembiayaan. Analisis ini menggunakan tiga skenario utama, yaitu kebijakan saat ini, transisi tertunda, dan *net zero emissions* 2050, dengan horizon analisis hingga tahun 2050.

Berdasarkan hasil analisis, skenario *net zero emissions* 2050 menunjukkan peningkatan probability of default (PD) yang paling signifikan dibandingkan dengan baseline tahun 2025. Secara agregat, estimasi PD portofolio pembiayaan BRI pada skenario ini diperkirakan meningkat pada kisaran 1,84% hingga 2,13%. Sementara itu, pada skenario transisi tertunda, estimasi peningkatan PD berada pada tingkat yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,01% hingga 1,23%. Peningkatan risiko kredit terutama terjadi pada sektor-sektor dengan intensitas karbon tinggi, seiring dengan meningkatnya biaya transisi, termasuk penyesuaian teknologi, kenaikan harga karbon, serta penguatan kebijakan dan regulasi lingkungan. Dampak risiko transisi diproyeksikan mencapai tingkat tertinggi pada periode sekitar tahun 2040 dalam skenario *net zero emissions* 2050, sebelum cenderung stabil dalam jangka panjang.

Estimasi Perubahan Probabilitas Gagal Bayar berdasarkan Skenario Risiko Transisi



Perubahan Probabilitas Gagal Bayar (PD) dibandingkan dengan dasar tahun 2024

*Listrik, gas & air, serta pertambangan & penggalian, seperti yang disajikan dalam penilaian materialitas sektor BRI

Analisis Risiko Transisi pada Segmen Kredit

BRI melakukan *deep dive analysis* pada skenario yang memiliki risiko transisi tertinggi (NZE 2050) untuk menilai sensitivitas risiko transisi terhadap kualitas kredit produktif pada masing-masing segmen pembiayaan, yaitu Korporasi dan MSME. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perubahan PD seiring dinamika transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus menjadi landasan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan portofolio serta menjaga ketahanan neraca BRI dalam jangka menengah dan panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa segmen MSME, yang merupakan kontributor terbesar terhadap total portofolio BRI dengan porsi sekitar 55,4%, memiliki tingkat sensitivitas yang relatif lebih rendah terhadap risiko transisi. Pada skenario NZE 2050, estimasi peningkatan PD pada segmen MSME tercatat relatif terbatas dengan kenaikan maksimum sebesar 0,43% pada tahun 2030, jauh lebih rendah dibandingkan dengan segmen korporasi yang berpotensi mengalami peningkatan maksimum PD hingga 9,29% pada tahun 2040. Ketahanan ini disebabkan oleh komposisi sektor di segmen MSME, di mana mayoritas nasabah (64,46%) terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran, yang memiliki intensitas karbon rendah sesuai Analisa pada bagian *Asset Portfolio Analysis*. Sedangkan untuk segmen kredit konsumtif, perubahan PD akibat risiko iklim tidak signifikan.

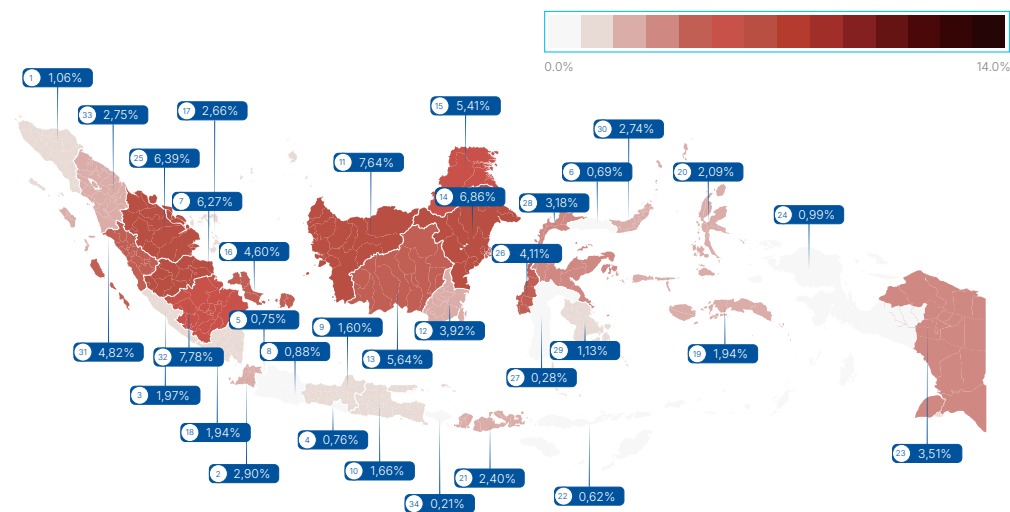


Strategi

Analisis Skenario Risiko Fisik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) sebagai panduan dalam pengelolaan risiko perubahan iklim bagi sektor jasa keuangan. Mengacu pada panduan tersebut, BRI melakukan analisis skenario risiko fisik untuk mengidentifikasi potensi dampak kejadian iklim ekstrem, khususnya banjir dan kebakaran hutan, terhadap portofolio pembiayaan. Analisis dilakukan secara granular pada tingkat provinsi guna memetakan kerentanan wilayah serta mengidentifikasi konsentrasi eksposur risiko dalam portofolio. Estimasi tingkat kerusakan dihitung melalui integrasi *regional damage function* yang dikembangkan oleh OJK dengan pendekatan skenario *forward-looking* berdasarkan jalur emisi *Representative Concentration Pathway* (RCP).

Physical Risk - RCP8.5/SSP5-8.5 Scenario Analysis (2050)

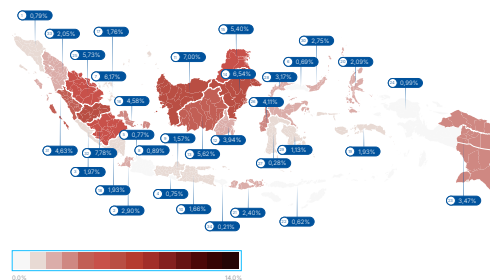


Analisis Risiko Fisik pada Segmen

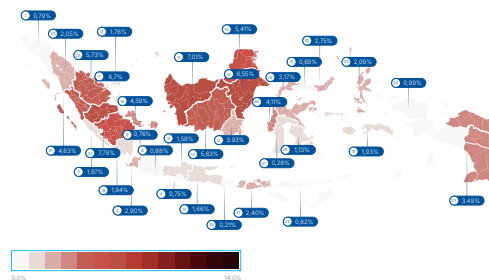
BRI melakukan deep dive analysis pada skenario perubahan iklim dengan tingkat risiko fisik tertinggi, yaitu RCP8.5/SSP5-8.5 (2050), untuk menilai sensitivitas risiko fisik terhadap nilai agunan pada masing-masing segmen pembiayaan BRI. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi rasio kerusakan (*damage ratio*) pada aset agunan yang terdampak oleh risiko fisik perubahan iklim. Peningkatan rasio kerusakan tersebut berpotensi menurunkan nilai agunan sehingga dapat berdampak pada peningkatan *Loss Given Default* (LGD) dalam perhitungan risiko kredit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa agunan pada segmen konsumtif memiliki estimasi *damage ratio* tertinggi sebesar 1,78%, diikuti oleh segmen MSME sebesar 1,55%, sedangkan segmen korporasi menunjukkan tingkat kerusakan yang relatif lebih rendah sebesar 0,12%. Temuan ini mengindikasikan bahwa eksposur agunan pada segmen konsumtif dan MSME relatif lebih sensitif terhadap risiko fisik perubahan iklim dibandingkan dengan segmen korporasi.

Physical Risk - RCP2.6/SSP2-2.6 Scenario Analysis (2050)



Physical Risk - RCP4.5/SSP4-4.5 Scenario Analysis (2050)



Keterangan Wilayah

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Aceh | 12. Kalimantan Selatan | 23. Papua |
| 2. Banten | 13. Kalimantan Tengah | 24. Papua Barat |
| 3. Bengkulu | 14. Kalimantan Timur | 25. Riau |
| 4. Daerah Istimewa Yogyakarta | 15. Kalimantan Utara | 26. Sulawesi Barat |
| 5. Jakarta | 16. Kepulauan Bangka Belitung | 27. Sulawesi Selatan |
| 6. Gorontalo | 17. Kepulauan Riau | 28. Sulawesi Tengah |
| 7. Jambi | 18. Lampung | 29. Sulawesi Tenggara |
| 8. Jawa Barat | 19. Maluku | 30. Sulawesi Utara |
| 9. Jawa Tengah | 20. Maluku Utara | 31. Sumatra Barat |
| 10. Jawa Timur | 21. Nusa Tenggara Barat | 32. Sumatra Selatan |
| 11. Kalimantan Barat | 22. Nusa Tenggara Timur | 33. Sumatra Utara |
| | | 34. Bali |

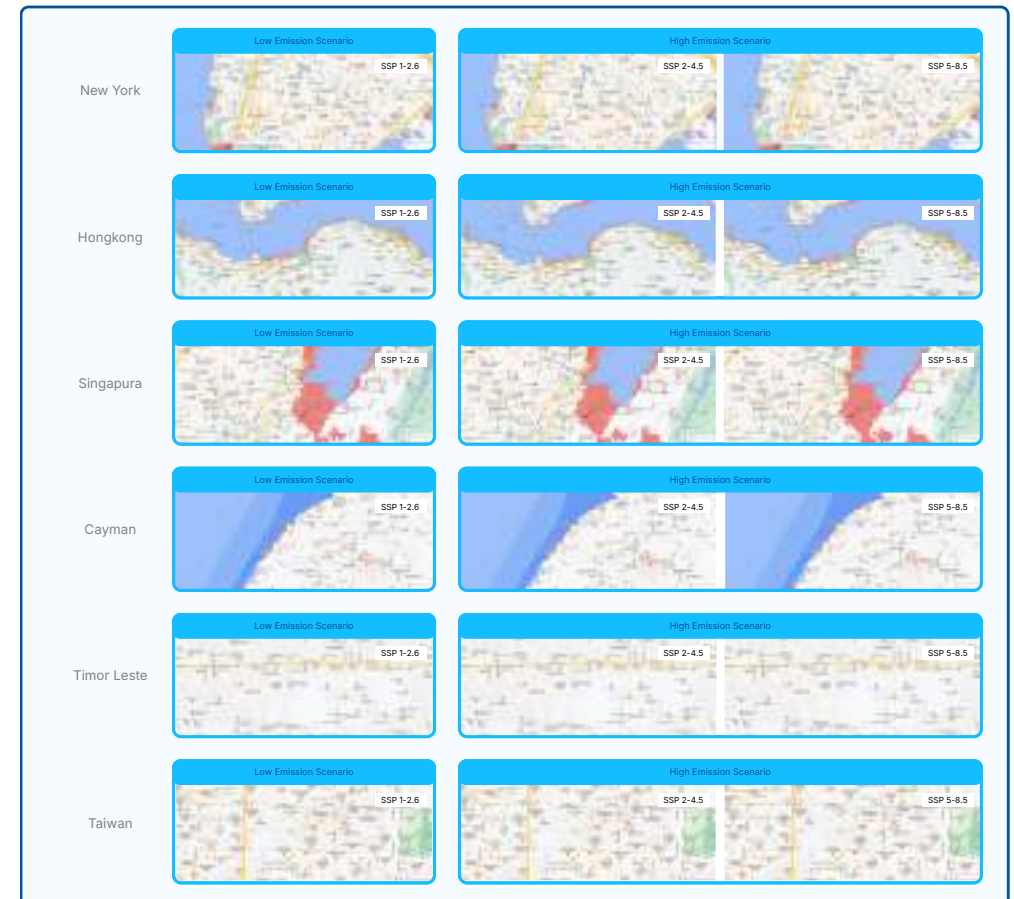
Strategi

Hasil Climate Risk Stress Test

BRI melakukan analisa risiko banjir karena pengaruh iklim yang disebabkan oleh karakteristik geografis Indonesia yang rentan terhadap risiko banjir akibat dari kejadian cuaca ekstrem serta kenaikan muka air laut. Risiko ini dapat memengaruhi operasional BRI, termasuk gangguan akses ke kantor cabang dan potensi kerusakan fisik pada infrastruktur. Analisis menunjukkan bahwa Jakarta menyumbang sekitar 25% dari total proyeksi biaya perubahan iklim di tingkat nasional. Kota ini sangat rentan terhadap banjir, baik akibat genangan dari kenaikan permukaan laut maupun peningkatan curah hujan. Meskipun kantor pusat dan pusat data BRI terletak di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, risiko langsung terhadap aset-aset tersebut relatif kecil. Namun demikian, gangguan pada operasional BRI masih dapat terjadi di 3,7% dari kantor cabang di daerah pesisir, dengan sebagian besar di antaranya terletak di kota Surabaya. Peta ini menyoroti provinsi dan kabupaten/kota yang terpapar risiko banjir tinggi.



BRI juga telah melakukan penilaian terhadap kantor cabang di luar negeri yang terpapar banjir.



Strategi

Hasil *Climate Risk Stress Test* ^[GRI 102-2]

BRI melakukan *Climate Risk Stress Test* (CRST) untuk menilai ketahanan portofolio terhadap risiko perubahan iklim hingga tahun 2050 berdasarkan posisi aset pada akhir tahun 2025. Hasil analisis ini menjadi salah satu referensi untuk penguatan pengelolaan risiko dan aktivitas bisnis berkelanjutan. Cakupan analisis meliputi 100% portofolio dengan ketersediaan data emisi karbon, sementara portofolio yang belum memiliki data emisi diestimasi menggunakan pendekatan berbasis indikator keuangan dan karakteristik industri.

Risiko Transisi dan Dampaknya terhadap PD

BRI melakukan pemodelan keuangan di tingkat debitur untuk mengukur dampak dan jalur transmisi dari faktor stres terkait iklim mikro dan makro terhadap laporan keuangan debitur. Laporan keuangan tersebut akan menjadi dasar untuk menghitung peluang gagal bayar (*stressed probability of default*), yang kemudian akan mempengaruhi peringkat kredit (*stressed credit rating*). Komponen-komponen yang mengalami stress ini akan digunakan untuk menentukan Perkiraan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) *stress*. Berdasarkan perhitungan, peluang gagal bayar akan terus meningkat hingga tahun 2030 dengan skenario *current policies* dan sedikit sesudah 2030 hingga tahun 2050.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam skenario kebijakan saat ini, PD diproyeksikan meningkat hingga tahun 2030 dan kemudian mengalami kenaikan moderat hingga tahun 2050. Pada skenario transisi terlambat, tren peningkatan risiko kredit relatif serupa hingga tahun 2030, namun meningkat lebih signifikan dalam jangka panjang akibat pengetatan kebijakan pengurangan emisi yang terjadi pada periode lebih akhir. Hal tersebut meningkatkan biaya karbon serta kebutuhan investasi transisi debitur. Pada skenario *Net Zero Emission* 2050, tekanan terhadap debitur terjadi lebih awal akibat implementasi kebijakan dekarbonisasi yang lebih agresif. Hal ini tercermin pada peningkatan peluang gagal bayar pada tahap awal. Namun demikian, risiko diproyeksikan menurun setelah tahun 2040 seiring dengan meningkatnya kapasitas adaptasi debitur terhadap ekonomi rendah karbon.

Risiko Fisik dan Dampaknya terhadap LGD

Dalam mengukur Loss Given Default (LGD), BRI telah mengintegrasikan pendekatan risiko fisik dengan mengacu pada metodologi yang dijelaskan dalam Buku 2 *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) OJK. Dalam pedoman tersebut, penurunan nilai aset dari agunan debitur berdasarkan luas wilayah dan kategori risiko tinggi menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB dinyatakan dapat berdampak terhadap penurunan nilai agunan. Sejalan dengan pedoman tersebut, BRI menerjemahkan dampak penurunan nilai agunan akibat risiko bencana ke dalam parameter kuantitatif berupa *damage ratio*. Parameter ini mencerminkan estimasi penurunan nilai aset agunan debitur akibat risiko banjir dan kebakaran hutan berdasarkan tingkat kerentanan wilayah.

BRI selanjutnya mengintegrasikan rasio kerusakan tersebut dengan skenario perubahan iklim jangka panjang menggunakan *Representative Concentration Pathway* (RCP) untuk menangkap dinamika risiko fisik secara *forward-looking* hingga tahun 2050. Pendekatan ini memungkinkan estimasi LGD yang tidak hanya berbasis kondisi historis, tetapi juga mempertimbangkan perubahan frekuensi dan intensitas bencana di masa depan. Berdasarkan hasil analisis, estimasi kenaikan *damage ratio* per provinsi berada pada kisaran 0,02% hingga 2,65%, yang mencerminkan perbedaan tingkat kerentanan wilayah terhadap risiko banjir dan kebakaran hutan. Variasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat eksposur geografis, karakteristik bencana, serta konsentrasi agunan pada wilayah dengan indeks risiko bencana yang tinggi. Peningkatan rasio kerusakan ini secara langsung berdampak pada estimasi peningkatan LGD melalui penurunan nilai agunan debitur. Dalam horizon pengujian, estimasi dampak terhadap LGD berada pada kisaran 0,00029% hingga 0,0014%.

Dampak terhadap CKPN dan Rasio Kecukupan Modal

Setelah memperoleh estimasi *Probability of Default* (PD) *stress* dan *Loss Given Default* (LGD) *stress* yang mencerminkan dampak risiko transisi dan risiko fisik perubahan iklim, BRI menghitung estimasi kebutuhan Perkiraan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam berbagai skenario iklim. Pendekatan ini memungkinkan BRI untuk mengukur potensi kerugian kredit secara lebih komprehensif dan *forward-looking*, serta memperkuat integrasi risiko iklim dalam manajemen risiko kredit.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh skenario menghasilkan peningkatan kebutuhan pencadangan sebagai respons terhadap meningkatnya risiko perubahan iklim. Skenario *Net Zero Emission* 2050 menghasilkan dampak tertinggi, dengan rasio CKPN diproyeksikan meningkat sebesar 1,11% hingga 1,24%. Hal ini mencerminkan tekanan awal terhadap debitur akibat percepatan kebijakan dekarbonisasi, peningkatan biaya karbon, serta kebutuhan investasi transisi menuju ekonomi rendah karbon.

BRI juga melakukan simulasi dampak terhadap rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) dengan mempertimbangkan peningkatan CKPN dalam setiap skenario. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal tetap berada pada tingkat yang memadai dan di atas ketentuan regulator pada seluruh skenario, meskipun mengalami penurunan. Pada skenario *Net Zero Emission* 2050, CAR diproyeksikan menurun sebesar 1,15% hingga 1,29%, yang merupakan penurunan terbesar dibandingkan skenario lainnya.



Strategi

Keterlibatan Sepanjang Rantai Nilai, Industri, dan Pemerintah

Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko terkait perubahan iklim berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan. Sebagai respons terhadap temuan tersebut, BRI memperkuat implementasi strategi dekarbonisasi melalui pendekatan keterlibatan yang terstruktur di sepanjang rantai nilai, yang mencakup penguatan kapabilitas internal, pengelolaan portofolio pembiayaan, serta kolaborasi dengan nasabah, mitra industri, dan otoritas pemerintah.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, BRI memperkuat kapabilitas internal dalam pengelolaan risiko iklim, pengelolaan emisi, serta pencapaian target *Net Zero Emission* dengan mengintegrasikan aspek perubahan iklim ke dalam fungsi bisnis dan mendorong kolaborasi lintas unit kerja. BRI juga memperkuat pengelolaan portofolio pembiayaan dengan mempertimbangkan eksposur emisi, peningkatan kualitas pengumpulan data, serta pengembangan rencana penurunan emisi pada tingkat portofolio. Menyadari bahwa pencapaian *Net Zero Emission* memerlukan aksi kolektif, BRI juga mendorong keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Secara internal, hal ini didukung melalui *Sustainability Culture Program* (SCP) untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap praktik ESG. Sementara itu, keterlibatan dengan nasabah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk *Sustainability-Linked Loans* (SLL), yang memungkinkan debitur menetapkan target kinerja keberlanjutan dengan mekanisme insentif atas pencapaiannya.

Sejalan dengan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, BRI juga berpartisipasi dalam berbagai forum industri dan asosiasi bisnis guna memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan. Keterlibatan ini dilakukan secara transparan dan bertujuan untuk mendukung penguatan kerangka kebijakan yang mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. BRI memastikan bahwa seluruh aktivitas keterlibatan kebijakan publik tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan tidak melibatkan kontribusi politik langsung. Melalui pendekatan ini, BRI memastikan bahwa aktivitas keterlibatan dengan pemangku kepentingan, termasuk dalam proses kebijakan publik, tetap selaras dengan strategi dekarbonisasi dan rencana transisi Perusahaan menuju *Net Zero Emission*.

Strategi BRI dalam Mengelola Risiko Iklim

Dalam mengelola risiko perubahan iklim, BRI menerapkan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) sesuai dengan pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta model risiko internal untuk melakukan *Climate Risk Stress Testing*. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi BRI dalam memperkuat komitmen pencapaian *Net Zero Emissions* pada tahun 2050 di seluruh aktivitas bisnis dan operasional.

Transparansi dalam aktivitas terkait iklim menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Untuk memastikan akuntabilitas dan keterbandingan informasi, BRI mengacu pada standar pengungkapan internasional yang diakui, termasuk IFRS *Sustainability Disclosure Standards*, sehingga informasi mengenai strategi, risiko, dan kinerja terkait iklim dapat disampaikan secara jelas dan komprehensif.

Sebagai lembaga keuangan, BRI juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan pembiayaan berkelanjutan yang mendukung proyek dan inisiatif ramah lingkungan. BRI terus memperluas *Responsible Asset Under Management* dengan meningkatkan pembiayaan pada kategori berwawasan lingkungan, investasi hijau, dan sustainability linked loan.

Dalam memastikan praktik pembiayaan yang bertanggung jawab, BRI juga menerapkan kebijakan pembiayaan khusus bagi subsektor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, antara lain subsektor kelapa sawit berkelanjutan, pulp dan kertas, batu bara, serta minyak dan gas. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan risiko lingkungan. [\[OJK F.9\]](#)

Upaya tersebut juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas internal organisasi dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan dalam mendukung aksi iklim. BRI secara aktif menyelenggarakan program pelatihan bagi pekerja, mendorong keterlibatan dengan nasabah dan mitra dalam penerapan praktik keberlanjutan, serta berpartisipasi dalam berbagai inisiatif industri yang mendorong percepatan aksi iklim.

Selain itu, BRI mengelola emisi operasional melalui berbagai inisiatif pengurangan jejak karbon, termasuk peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengimbangan emisi residual secara bertahap sebagai bagian dari upaya pencapaian target *Net Zero Emissions*. Melalui strategi yang terintegrasi tersebut, BRI berupaya memperkuat ketahanan bisnis terhadap risiko perubahan iklim sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Informasi lebih lanjut mengenai target, indikator kinerja, serta rencana aksi yang mendukung implementasi strategi ini disajikan pada bagian Metrics and Targets serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam laporan ini.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Iklim

Perusahaan memandang risiko terkait perubahan iklim sebagai risiko yang melekat (inherent) dalam aktivitas perbankan dan dikelola secara terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko Perusahaan. Risiko iklim tidak diperlakukan sebagai risiko yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategis, dengan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap kinerja keuangan, operasional, serta keberlanjutan usaha dalam jangka menengah hingga panjang. Sejalan dengan itu, Perusahaan juga mengidentifikasi peluang yang timbul dari respons terhadap perubahan iklim, khususnya dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam pengelolaannya, Perusahaan menerapkan proses yang mencakup identifikasi, penilaian, prioritasasi, dan pemantauan risiko dan peluang terkait perubahan iklim secara berkelanjutan. Proses ini didukung oleh penggunaan analisis skenario perubahan iklim untuk menilai sifat, kemungkinan, dan besaran dampak risiko iklim terhadap portofolio pembiayaan, operasional, aset, dan kinerja keuangan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan kebijakan pembiayaan, serta penguatan rencana transisi Perusahaan.

Pengelolaan risiko iklim dilaksanakan melalui koordinasi antara fungsi manajemen risiko dan fungsi ESG, serta dibahas secara berkala dalam Komite Manajemen Risiko dan Komite ESG. Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari pelaporan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pengambilan keputusan, serta menjadi dasar penetapan langkah-langkah mitigasi risiko iklim yang terintegrasi dalam kebijakan pembiayaan, pengelolaan agunan, dan proses manajemen risiko operasional Perusahaan.

No	Kategori	Risiko terkait Iklim	Mitigasi
Risiko Transisi			
1	Risiko Teknologi	Meningkatnya permintaan akan teknologi rendah karbon	- Memperluas investasi terkait teknologi beremisi karbon rendah - Memantau tren teknologi beremisi karbon rendah dan riset
2	Risiko Kebijakan & Regulasi	- Harga karbon - Strategi nasional dekarbonisasi - Kewajiban pengungkapan terkait iklim	Melakukan pelibatan dengan portofolio untuk mendorong penerapan kebijakan dan hukum terkait harga karbon, strategi dekarbonisasi, dan pengungkapan iklim
3	Risiko Pasar	- Meningkatnya penggunaan energi terbarukan - Meningkatnya permintaan pasar untuk produk yang lebih ramah lingkungan - Perubahan perilaku nasabah - Permintaan pasar terhadap keuangan hijau	- Memberikan saran kepada portofolio untuk beralih ke infrastruktur hijau - Mengembangkan produk dan layanan perbankan hijau
4	Risiko Reputasi	Risiko kehilangan kepercayaan dan keyakinan investor	- Merevitalisasi strategi dan implementasi yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan - Memperkuat kepercayaan pelanggan dan investor dengan memperkuat manajemen lingkungan - Mengungkapkan isu perubahan iklim melalui laporan TCFD dan SR
Risiko Fisik			
5	Risiko Fisik Akut	- Gelombang panas - Banjir - Siklon Tropis - Kebakaran Hutan	- Membentuk Business Continuity Plan (BCP) - Melaksanakan mock exercise dan simulasi evakuasi darurat - Mengembangkan strategi respons terhadap perubahan iklim sesuai dengan analisis skenario risiko fisik
6	Risiko Fisik Kronis	- Kenaikan suhu - Kenaikan permukaan laut - Stres air	

Manajemen Risiko

Integrasi ESRM

Ambisi Pencapaian NZE tahun 2050 diwujudkan melalui Strategi Inisiatif Dekarbonisasi yang dituangkan dalam SE Keberlanjutan No. SE.29-DIR/ESG/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan BRI. Strategi Dekarbonisasi sendiri adalah pendekatan terencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara bertahap melalui penyesuaian bisnis, operasional, dan pembiayaan guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perusahaan mengimplementasikan strategi dekarbonisasi secara menyeluruh dengan mengintegrasikan *Environmental, Social, and Risk Management* (ESRM) ke dalam kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan. Implementasi dalam kegiatan operasional dan bisnis BRI antara lain:

Operation	Business and Value chain
Menyusun rencana transisi kendaraan ramah lingkungan	Menyusun kerangka keuangan berkelanjutan berbasis aksi mitigasi risiko iklim yang selaras dengan target NZE
Pemasangan solar panel	Portfolio management dengan mengembangkan kebijakan pembiayaan sektor spesifik berbasis hasil CRST.
Efisiensi energi	Penyusunan daftar periksa ESG (ESG checklist) untuk mengumpulkan data guna menilai kinerja emisi perusahaan serta rencana transisinya.

Pengelolaan Emisi Operasional dan Efisiensi Energi

Integrasi ESRM pada kegiatan operasional diwujudkan dalam Kebijakan Pengelolaan aset tetap dalam Surat Edaran No SE.31-DIR/PLM/05/2022 tentang Pengelolaan Aset Tetap & *Procurement* Berbasis Prinsip ESG. Yaitu melalui pertimbangan aspek:

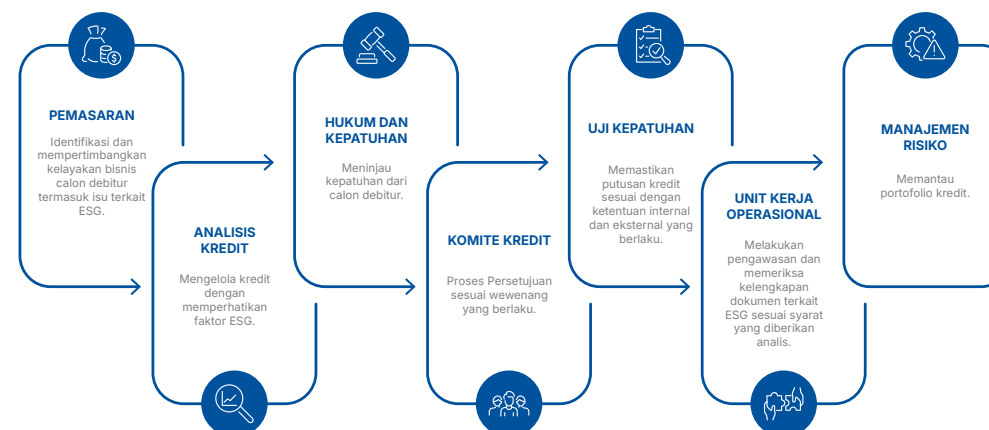
Environmental	Social	Governance
- Energi ramah lingkungan - Pengelolaan limbah - Konservasi SDA	- Keterlibatan CSR - Implementasi K3 - Kepastian perlindungan data pribadi	- Independensi BOC dan BOD Transparansi - Komitmen anti suap - Kepastian <i>conflict of interest</i>

Pembiayaan Bertanggung Jawab^[GRI G4 FS2]

Bisnis dan Value Chain

Pembiayaan Berkelanjutan

BRI secara konsisten menerapkan proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko ESG pada kebijakan Pemberian pinjaman. Sejalan dengan hasil CRST, perubahan iklim menjadi pertimbangan utama dalam penilaian risiko lingkungan. BRI juga melengkapi evaluasi aspek sosial terkait dampak terhadap masyarakat serta aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan, transparansi, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, guna membangun portofolio pembiayaan yang berkelanjutan dan selaras dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Prosedur penyaluran pinjaman di BRI:



BRI mengacu pada *Loan Portfolio Guidelines* (LPG) yang berlaku untuk seluruh jenis pembiayaan, baik pembiayaan untuk tujuan umum maupun berbasis proyek. LPG menetapkan persyaratan kredit yang mencakup analisis aspek ESG sebagai bagian dari proses *Know Your Customer* (KYC) untuk mengidentifikasi potensi isu lingkungan, sosial, hukum, dan litigasi calon debitur, yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Bisnis (MAB), serta mengatur klasifikasi sektor, kriteria penerimaan sektor, dan batasan sektor pembiayaan. ^[GRI G4 FS2]

Manajemen Risiko

Kebijakan Daftar Sektor Negatif atau Dikecualikan (*Negative atau Exclusion List*)

BRI berkomitmen untuk menghindari eksposur pada sektor-sektor tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Budidaya dan perindustrian narkotika golongan 1, seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium
- Pemanfaatan koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam
- Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam lampiran 1 Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES)
- Industri pembuatan senjata kimia;
- Industri bahan kimia industri dan industri bahan kimia perusak lapisan ozon;
- Perjudian dan/atau kasino;
- Untuk jenis usaha terkait kayu, diantaranya kayu gelondongan, moulding, dan sawmill tidak dapat dibiayai, kecuali usaha yang menggunakan kayu hasil Hutan Tanaman Industri/Rakyat yang dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku di Indonesia

Analisis Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola ^[GRI G4 FS2]

Proses selanjutnya dari Pemberian pinjaman Adalah melakukan analisis aspek ESG yang dilaksanakan sebagai berikut:

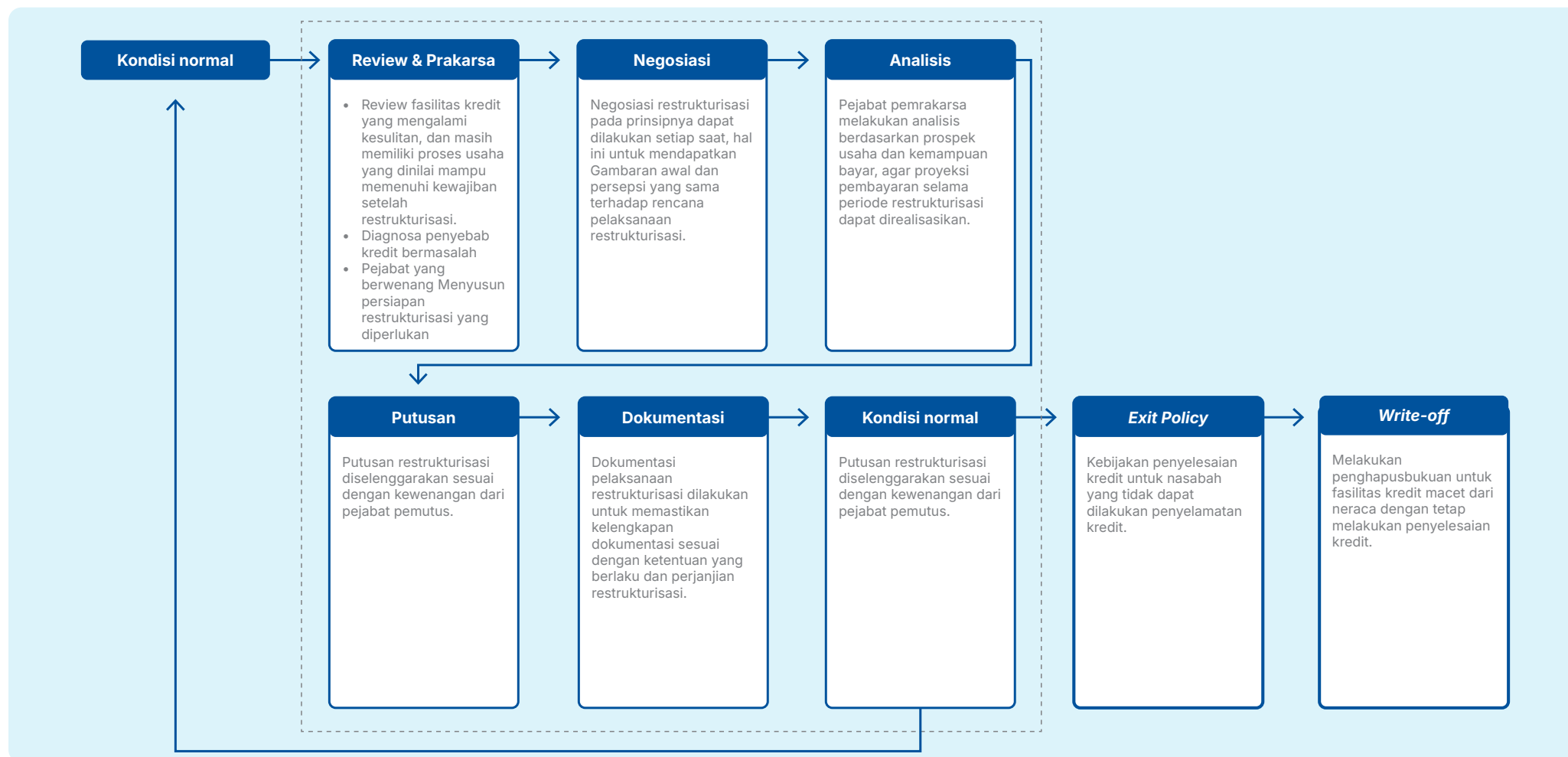
Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
Mitigasi risiko lingkungan yang timbul dari kegiatan pembiayaan, termasuk risiko biodiversitas, emisi gas rumah kaca, dan bencana alam, dituangkan dalam pemenuhan dokumen lingkungan seperti:	Mitigasi risiko sosial dituangkan dalam persyaratan, antara lain dengan analisis manajemen dan memastikan tidak terdapat keterlibatan dalam eksploitasi anak, pelanggaran HAM. Identifikasi nasabah/calon nasabah:	Pengelolaan risiko tata Kelola pada pembiayaan BRI diimplementasikan antara lain dengan pengecekan keterlibatan dalam insiden korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang. BRI juga melakukan asesmen atas kapabilitas manajemen perusahaan pada aspek analisis <i>capacity</i>
• Izin lingkungan (AMDAL) dan • Peringkat PROPER	• Penerapan K3 di Perusahaan, dan • Penerapan TJSL	



Manajemen Risiko

Kebijakan Pengelolaan Kredit Bermasalah

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku terkait pengelolaan kredit bermasalah termasuk penagihan utang, BRI menerapkan kebijakan pengelolaan kredit bermasalah yang mengikuti etika tinggi dan menghormati hak hak nasabah. Kebijakan ini dituangkan dalam Ketentuan “Pengelolaan Kredit Bermasalah”. Secara khusus penagihan utang diatur dalam modul penyelesaian kredit bermasalah pada modul 5 ketentuan tersebut. BRI memastikan kebijakan penagihan utang dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan hak-hak nasabah. Kebijakan ini mencakup penagihan yang dilakukan secara internal dan menggunakan pihak ketiga. Dalam hal penagihan dilakukan oleh pihak ketiga, BRI melakukan asesmen pemenuhan syarat dan kewajiban pihak ketiga yang telah tunduk pada regulasi yang ada di Indonesia dan BRI, dengan mendapatkan persetujuan oleh direktur manajemen risiko. Proses penagihan di BRI dilaksanakan baik secara langsung datang ke Lokasi maupun melalui media komunikasi dengan nasabah, dalam proses ini BRI mengedepankan aspek aspek perlindungan finansial yang menghormati hak nasabah serta aspek perjanjian kredit. Ketentuan pengelolaan kredit bermasalah ini berlaku untuk seluruh segmen kredit yang ada di BRI. Adapun pengelolaan kredit bermasalah di BRI adalah sebagai berikut:



Manajemen Risiko

Peninjauan Ulang Pembiayaan ^[GRI 4 FS3, FS9]

BRI terus meninjau setiap proyek yang mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Umum Perkreditan Bank (KPB), pengawasan dilakukan dengan meninjau dokumen kredit yang disampaikan oleh debitur. Pemantauan dan evaluasi rutin dilakukan minimal satu kali dalam setahun untuk memastikan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan oleh nasabah. Salah satu metode yang dilakukan adalah metode kunjungan (*site visit*). Jika peringkat PROPER nasabah turun dari Biru ke Merah atau Hitam, BRI melakukan pemantauan dan korespondensi khusus untuk mendukung pemulihan peringkat.

Apabila terdapat nasabah atau debitur yang belum memenuhi syarat ESG, BRI akan meminta informasi dan melakukan tindak lanjut secara berkala. Observasi dan pengumpulan informasi terkait teguran, pelanggaran, atau permasalahan terkait ESG juga akan dilakukan. BRI akan secara bertahap memperbaiki data kepatuhan ESG debitur. Informasi pemantauan dicatat dalam Laporan Kunjungan Nasabah dan hasil evaluasi digunakan untuk meninjau pembiayaan kepada debitur. BRI juga akan mengambil pendekatan yang diperlukan, termasuk manajemen portofolio, kesesuaian dengan regulasi, dan pendekatan lainnya. Hasil peninjauan secara berkala disampaikan melalui saluran internal BRI, sementara distribusi pembiayaan dilaporkan setiap tahun sesuai dengan kerangka kerja. Laporan tahunan mencakup aset yang memenuhi syarat berdasarkan kategori proyek dan sisa saldo hasil yang belum didistribusikan. BRI belum melaksanakan audit khusus terkait penerapan kebijakan lingkungan dan sosial pada proses pemberian kredit.

BRI menyediakan opsi restrukturisasi yang transparan dan terstruktur dengan mempertimbangkan prospek nasabah, kondisi keuangan dan karakter nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi di BRI menggunakan pedoman POJK 91 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dengan pilihan antara lain:

- Penurunan suku bunga
- Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda/penalti
- Perpanjangan jangka waktu
- Penambahan fasilitas kredit
- Penundaan pembayaran kewajiban
- Pengurangan tunggakan pokok
- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara
- Kombinasi poin-poin di atas, dan lain-lain.

Mitigasi Risiko Transisi dalam Pembiayaan Korporasi

Selanjutnya, dalam rangka melakukan mitigasi dari dampak perubahan iklim khususnya risiko Transisi yang dapat terjadi, BRI melakukan integrasi risiko iklim kedalam kebijakan pembiayaan. BRI telah mengidentifikasi sektor prioritas yang terdampak berdasarkan hasil analisis CRST. Integrasi diwujudkan dalam Mitigasi risiko iklim pada kebijakan sektor spesifik. Integrasi ini menjadi bagian dari strategi dekarbonisasi BRI untuk mengelola emisi keuangan. Kebijakan pembiayaan sektor spesifik masuk dalam prescreening proses pemberian pinjaman nasabah dan dituangkan dalam MAB. Kebijakan pembiayaan spesifik ini bersifat mengikat dan secara khusus mengatur pembiayaan kepada nasabah segmen komersial dan korporasi di sektor ketenagalistrikan. Kebijakan ini mencakup fasilitas pembiayaan untuk kredit modal kerja maupun pembiayaan berbasis proyek. Integrasi mitigasi risiko yang spesifik pada sektor tertentu adalah sebagai berikut:

Kelistrikan	Pertambangan	Manufaktur
Sektor penyediaan energi Listrik di Indonesia masih didominasi oleh sumber energi tidak terbarukan, kebijakan pembiayaan BRI dalam rangka mendukung mitigasi risiko iklim sbb: • Memiliki perijinan usaha sektor kelistrikan • Jangka waktu kredit selaras dengan rencana phase out Batubara dari pemerintah • Memiliki upaya penurunan emisi • Memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai dengan PP 33 tahun 2023 tentang konservasi energi	Batu bara • Memiliki perijinan usaha sektor Batubara • Memiliki rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Memiliki upaya penurunan emisi • Memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai dengan PP 33 tahun 2023 tentang konservasi energi	Pulp dan Paper • Memiliki perijinan usaha sektor pulp and paper • Memiliki bukti sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia
Biodiversitas	Minyak dan Gas Bumi	Agrikultur
Kehutanan, kayu dan karet • Memiliki perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku • Memiliki bukti sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia • Rencana Kerja Usaha (RKU) berdasarkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	• Memiliki perijinan sektor Minyak dan gas bumi • Memiliki upaya penurunan emisi • Memiliki bukti pelaksanaan manajemen energi sesuai dengan PP 33 tahun 2023 tentang konservasi energi • Untuk kegiatan eksploitasi, memiliki rencana reklamasi pasca tambang • Spesifik sub-sektor minyak dan gas bumi non konvensional*	Palm Oil • Komitmen No Deforestation, No Expansion on Peatland, and No Exploitation (NDPE) • RSPO dan/atau ISPO atau sekurang-kurangnya bukti pengurusan pendaftaran RSPO/ISPO • Untuk perusahaan inti, Dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun untuk pembangunan kebun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan • Dokumen yang menunjukkan keberlangsungan rantai pasok (<i>buyer dan supplier</i>) • Tersedia sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

Manajemen Risiko

Sustainability Linked Loan

Upaya penurunan emisi juga dilaksanakan diluar dari sektor prioritas. BRI memahami bahwa kebutuhan transisi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya pada sektor tinggi emisi, namun berlaku untuk seluruh nasabah di seluruh sektor. BRI senantiasa mendukung setiap upaya nasabah untuk melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon, untuk itu BRI menyediakan sebuah fasilitas yang menjawab kebutuhan nasabah yang memiliki upaya implementasi praktik keberlanjutan. Kebijakan pembiayaan ini dituangkan dalam *Sustainability-Linked Loan* (SLL). Melalui SLL, BRI memberikan insentif kepada nasabah yang berhasil mencapai target KPI keberlanjutan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, terdapat disinsentif bagi nasabah yang tidak mencapai KPI tersebut. SLL juga berfungsi sebagai sarana bagi BRI untuk mempublikasikan langkah-langkah dan kemajuan dalam penerapan ESG kepada pemangku kepentingan.

Penguatan Kapasitas dan Pelatihan Risiko Iklim ^[GRI G4 FS4]

Dalam rangka memperkuat pengelolaan risiko perubahan iklim, BRI secara berkelanjutan melaksanakan program peningkatan kapasitas pegawai yang terintegrasi dengan pengembangan kompetensi manajemen risiko. Inisiatif ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola risiko iklim untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko transisi dan risiko fisik perubahan iklim. Program peningkatan kapasitas difokuskan pada pemahaman metodologi, pengembangan analisis risiko, serta penerapan praktik pengelolaan risiko iklim, termasuk integrasi risiko perubahan iklim dalam manajemen risiko inheren perbankan.

Salah satu inisiatif utama adalah kerja sama dengan tenaga ahli dalam penyelenggaraan *Climate Resilience Training: BRI Climate Risk Stress Test* (CRST) *Methodology* dalam kerangka BRILiaN *Specialist Development Program* (BSDP). Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman teknis pegawai terhadap metodologi, asumsi, dan prosedur pelaksanaan *Climate Risk Stress Test* (CRST). Pelatihan tersebut melibatkan unit kerja terkait risiko di Kantor Pusat serta partisipasi Perusahaan Anak guna memastikan keselarasan pendekatan pengelolaan risiko iklim di seluruh entitas BRI Group. Selain itu, dalam proses penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan sektoral terkait mitigasi risiko transisi, BRI menyelenggarakan workshop, forum diskusi, dan knowledge sharing yang melibatkan unit bisnis, fungsi manajemen risiko, serta pembuat kebijakan di Kantor Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikembangkan bersifat implementatif, adaptif terhadap dinamika risiko sektor, serta mempertimbangkan aspek transisi yang adil. ^[GRI 102-3]

Sampai dengan tahun 2025, sebanyak 84 pekerja terdiri atas 43 laki-laki dan 41 perempuan telah mengikuti pendidikan dan workshop khusus terkait risiko iklim. Peningkatan awareness terkait risiko iklim juga disampaikan secara rutin kepada seluruh pekerja melalui webinar risk update, Catchup on ESG, dan kegiatan internal lainnya. Dalam periode pelaporan, BRI tidak melakukan program rekrutmen khusus, pemutusan hubungan kerja, maupun penempatan kembali tenaga kerja yang secara langsung terkait dengan implementasi kebijakan transisi atau adaptasi perubahan iklim.



Manajemen Risiko

Mitigasi Risiko Fisik dalam Fasilitas Agunan Pembiayaan Mikro dan UMKM

Perusahaan menerapkan langkah mitigasi terhadap risiko fisik perubahan iklim, khususnya pada portofolio pembiayaan Mikro dan UMKM, dengan memastikan bahwa agunan berupa tempat usaha nasabah dilindungi melalui skema asuransi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian finansial akibat kejadian iklim ekstrem, seperti banjir, kebakaran, maupun bencana alam lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah serta kualitas aset Perusahaan. Ke depan, Perusahaan berencana untuk semakin memperkuat mekanisme perlindungan tersebut melalui pengembangan skema asuransi yang lebih terstruktur dan komprehensif, termasuk mendorong perluasan cakupan perlindungan terhadap risiko-risiko terkait iklim. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan dalam meningkatkan ketahanan portofolio, menjaga stabilitas kinerja, serta memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara pruden dan berkelanjutan.

Mitigasi Risiko Iklim dalam Kegiatan Operasional Perusahaan

Proses Manajemen Risiko Operasional

Terkait dengan Perubahan Iklim Proses manajemen risiko operasional dilakukan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan dalam kerangka kerja manajemen risiko operasional dan menggunakan perangkat yang sesuai dengan ketentuan regulator dan praktik terbaik. Proses pengukuran dan perhitungan risiko operasional dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut

1

Business Impact Analysis (BIA)

BIA untuk menilai dampak kegiatan/proses bisnis dalam kejadian gangguan/bencana.

2

Penentuan Strategi Pemulihan

Dari hasil BIA, Strategi Pemulihan ditentukan untuk dapat mencapai target RTO (Recovery Time Objective) yang telah ditetapkan.

3

Pengembangan Prosedur Business Continuity

BIA untuk menilai dampak kegiatan/proses bisnis dalam kejadian gangguan/bencana.

4

Sosialisasi dan Percobaan

Untuk memastikan implementasi BCP dapat dilakukan dengan baik, kegiatan sosialisasi dan uji coba harus dilakukan secara rutin.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Iklim dalam Keuangan Berkelanjutan

Implementasi Rencana Keberlanjutan Bisnis (*Business Continuity Plan/BCP*).



Penilaian Risk and Control Self Assessment (RCSA)

Sebuah perangkat manajemen risiko kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi kasi dan mengukur risiko (termasuk risiko terkait perubahan iklim) berdasarkan dimensi dampak dan kemungkinan.



Penilaian Manajemen Risiko Kecukupan Produk Bank Baru

Penerapan proses manajemen risiko untuk setiap rencana penerbitan Produk Bank Baru di BRI dilakukan dengan mempertimbangkan isu perubahan iklim.



Pencatatan Kerugian Risiko Operasional dalam Loss Event Database (LED)

LED BRI mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian akibat perubahan iklim, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, yang mencakup kerugian aktual, potensial termasuk tindakan korektif, dan penanganan insiden.



Pemantauan Key Risk Indicator (KRI)

KRI merupakan sebuah perangkat manajemen risiko berupa indikator kuantitatif yang dapat memberikan informasi awal tentang peningkatan atau penurunan risiko dan/atau penurunan efektivitas pengendalian terhadap ambang batas yang telah ditetapkan.



Risk Assessment Plan (RAP)

Bentuk kegiatan persiapan strategi risiko yang dilakukan oleh Manajemen Risiko Regional dengan hasil berupa daftar risiko utama, prioritas unit kerja berdasarkan risiko akibat perubahan iklim, dan rencana kegiatan pengendalian risiko.



Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB)

BRI melaksanakan PRAB sebagai implementasi Business Continuity Management (BCM) untuk melindungi keamanan dan keselamatan jiwa karyawan, melindungi nyawa nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam unit kerja operasional BRI (rencana manajemen bencana), serta menjaga kesinambungan kegiatan bisnis/operasional, yang terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respons yang memadai dalam situasi gangguan/bencana alam akibat perubahan iklim (*business continuity plan*)

Manajemen Risiko

Mitigasi Risiko Iklim dalam Kegiatan Operasional Perusahaan

Berdasarkan hasil CCSA, BRI melakukan langkah-langkah Adaptasi Risiko Iklim Fisik untuk memitigasi potensi dampak perubahan iklim. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. **Pengalihan Risiko Fisik ke Asuransi.**
BRI menjajaki opsi-opsi untuk mengalihkan risiko fisik yang terkait dengan perubahan iklim kepada penyedia asuransi. Pendekatan ini dapat membantu mengimbangi beban keuangan dari kerusakan dan kerugian terkait iklim.
2. **Optimalisasi**
Penilaian Risiko dan Ancaman. Untuk melindungi bisnis BRI dari risiko fisik, BRI akan mengoptimalkan penilaian risiko dan ancaman seperti memantau perubahan cuaca serta mengalokasikan alat pelindung dan peralatan darurat sebelum terjadinya bencana iklim. Tindakan-tindakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen BRI terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan manajemen risiko yang proaktif dalam menghadapi tantangan terkait iklim.
3. **Realokasi Aset**
Aset yang berlokasi di area dengan paparan risiko fisik tinggi seperti banjir, kejadian cuaca ekstrem, dan bahaya terkait iklim lainnya dipertimbangkan untuk direlokasi ke lokasi yang lebih rendah risikonya. Strategi realokasi akan melibatkan penilaian risiko dan studi kelayakan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa lokasi baru menawarkan lingkungan yang lebih aman bagi aset. Melalui penerapan langkah-langkah adaptasi ini, BRI bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap fisik terhadap dampak perubahan iklim dan melindungi aset-asetnya dari potensi kerusakan. Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen BRI terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan manajemen risiko yang proaktif dalam menghadapi tantangan terkait iklim.



Metrik dan Target

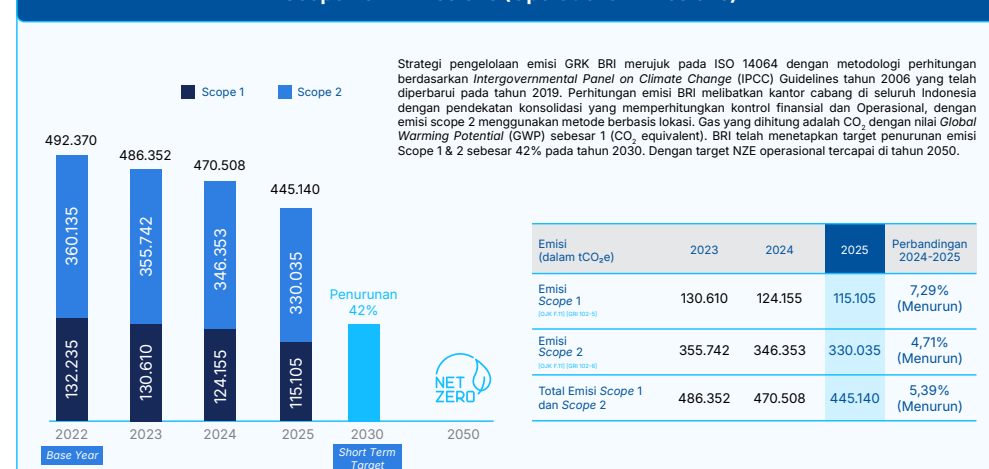
What Gets Measured, Gets Managed ^{[GRI 3-3] [FN-CB-410b.4]}

Pengukuran adalah komponen penting dari perbaikan. Tanpa mengukur kinerja, akan sulit menentukan apakah terjadi kemajuan atau apakah hasil yang diinginkan tercapai. Dengan mengukur dan mengelola kemajuan dari waktu ke waktu, proses pengambilan keputusan berbasis data akan lebih mudah. BRI mengukur dan mengelola emisi Scope 1 & 2 dan Scope 3. Emisi Scope 1 & 2 dihasilkan dari kegiatan operasional, sementara emisi Scope 3 merupakan financed emissions yang berasal dari kegiatan investasi dan pemberian pinjaman, dan menyumbang sebagian besar emisi gas rumah kaca.



BRI adalah perusahaan pertama di Indonesia yang bergabung dalam Partnership of Carbon Accounting Financials (PCAF) dan menggunakan metodologi PCAF untuk mengukur dan mengungkapkan financed emissions. Metodologi PCAF ini dikembangkan berdasarkan Greenhouse Gas Protocol yaitu standar akuntansi global untuk emisi gas rumah kaca dan menyediakan standar pengukuran yang konsisten dan tervalidasi. Selanjutnya, BRI mengikuti persyaratan cakupan SBTi untuk pengukuran financed emissions menurut jenis aset, termasuk pinjaman korporasi, pembiayaan proyek pembangkit listrik, real estate komersial, ekuitas tercatat, dan obligasi.

Scope 1 & 2 Emissions (Operational Emissions)



Keterangan:

- Faktor emisi Cakupan 1: Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) ESDM tahun 2021.
- Faktor emisi Cakupan 2: Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (DJK-ESDM) tahun 2019
- Sumber emisi lainnya menggunakan faktor emisi yang telah disepakati oleh IPCC.
- Gas perusak ozon (*Ozone Depleting Substances/ODS*), emisi biogenik, NO_x, SO_x, VOC (gas senyawa organik yang mudah menguap), PM (Materi Partikulat), dan gas penyumbang emisi udara signifikan lainnya belum diperhitungkan dalam kalkulasi ini. ^[GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-5, 305-6, 305-7]

Metrik dan Target

Metodologi Penetapan Target [GRI 102-4] [FN-CB-410b.4]

Salah satu bukti keseriusan BRI dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim diwujudkan melalui komitmen penetapan target Net Zero Emission. Di tahun 2023, BRI menjadi lembaga keuangan pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2050 menggunakan standar Science Based Target Initiatives (SBTi). Selain itu, di tahun 2024 BRI menjadi lembaga jasa keuangan pertama di Indonesia yang telah mendapatkan validasi atas metodologi pencapaian Net Zero Emission jangka pendek di tahun 2030 dalam rangka mencapai netralitas karbon di tahun 2050. BRI telah menetapkan target Scope 3 sesuai dengan kriteria SBTi untuk Target Portofolio Scope 3 sebagai berikut.

- FI-C15 - Persyaratan untuk menetapkan target pada Kegiatan Investasi dan Pembiayaan
Semua lembaga keuangan harus menetapkan target pada kegiatan investasi dan pembiayaan mereka sesuai dengan yang diperlukan oleh FI-C16, terlepas dari bagian emisi portofolio Scope 3 yang terukur dibandingkan dengan total emisi atau Scope 1, 2, dan 3 dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat memilih dari metode yang berlaku untuk menetapkan target, berdasarkan kelas aset.
- FI-C16 - Batas Target Portofolio
Lembaga keuangan harus menetapkan target pada semua "Kegiatan yang Diperlukan" dalam Tabel Kegiatan dan Metode yang Diperlukan mengikuti persyaratan cakupan batas minimum.

Sebagai bagian praktik bisnis yang berkelanjutan, BRI telah mengembangkan metodologi untuk menetapkan target pengurangan emisi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini.

- Kontribusi bank terhadap emisi gas rumah kaca
BRI menggunakan metodologi yang diakui secara internasional, seperti Protokol Gas Rumah Kaca, untuk menghitung emisi.
- Kemampuan bank untuk mengurangi emisi
BRI merumuskan berbagai strategi untuk mengurangi emisi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Sasaran pengurangan emisi nasional dan internasional
BRI menyelaraskan targetnya dengan tujuan yang lebih luas, seperti Kontribusi yang Nationally Determined Contributions (NDCs) dan Paris Agreement. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, BRI mengukur dan menetapkan target pengurangan emisi karbon dengan menggunakan metode SBTi, yaitu Sectoral Decarbonization Approach (SDA) dan Temperature Ratings Method (TRA).

Sectoral Decarbonization Approach (SDA)

BRI menetapkan target pengurangan emisi untuk setiap sektor industri berdasarkan prinsip-prinsip *Sectoral Decarbonization Approach* (SDA). Pendekatan ini memberikan penekanan khusus pada intensitas karbon sebagai indikator utama dalam menentukan target pengurangan. Efektivitas pendekatan ini terbukti dengan adanya perbedaan kontribusi sektor ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca, yang menyebabkan perbedaan kecepatan dalam mencapai *Net Zero Emission*.

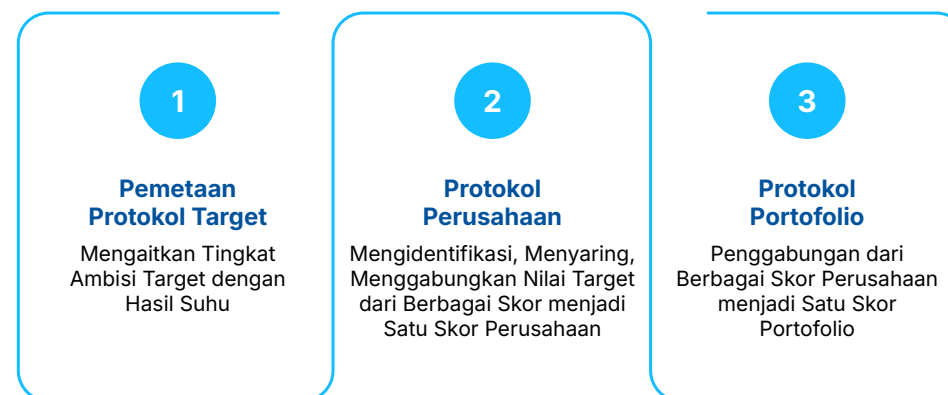
Pemahaman yang mendalam mengenai sumber emisi spesifik di setiap sektor memungkinkan BRI untuk merancang solusi yang lebih spesifik dan efisien. Dengan demikian, BRI dapat mencapai pengurangan emisi secara lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam mendukung upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Mengacu pada pedoman SBTi untuk lembaga keuangan, berikut ini adalah garis besar pendekatan SDA yang dilakukan BRI

Target	Pulp & Paper, Real Estate Komersial, Pembangkit listrik, dan Pembiayaan Proyek Pembangkit listrik			
Base year	2022			
Menghitung Intensitas Emisi Dasar untuk Menetapkan Target SDA	Menghitung emisi pada pinjaman dan investasi	Menghitung bagian emisi pada lembaga keuangan	Menghitung intensitas emisi	Memilih jalur dekarbonisasi dan menetapkan emisi berbasis SBTi
Penetapan target netralitas karbon	Penetapan target dan jalur pengurangan berdasarkan skenario suhu di bawah 2°C			

Temperature Rating Method (TRA)

BRI menggunakan Temperature Rating Method (TRA) untuk menetapkan target pengurangan emisi untuk berbagai sektor lain dalam pembiayaan korporasi di luar pendekatan SDA. Metode TRA mengukur sejauh mana perusahaan telah mengadopsi target pengurangan emisi karbon yang sejalan dengan tujuan pemanasan global secara ilmiah. Metode TRA memberikan peringkat suhu untuk mengaitkan target emisi karbon dengan perkiraan kenaikan suhu global dan menawarkan perspektif intuitif tentang dampak pengurangan emisi perusahaan terhadap perubahan iklim. Semakin tinggi target pengurangan emisi, semakin rendah skor suhu dan peringkat suhu portofolio aset BRI. Perumusan target pengurangan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan metodologi ini meliputi:



Untuk merumuskan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menggunakan Metodologi TRA, BRI mengkategorikan sektor-sektor dalam portofolio pinjaman, obligasi, dan ekuitas tercatat, serta menetapkan target pengurangan karbon berdasarkan peringkat suhu masing-masing. BRI berkomitmen untuk secara progresif mengurangi skor suhu portofolio menuju target 2040, yaitu peringkat suhu 1,75°C untuk Scope 1 & 2 dan 2,0°C untuk Scope 1, 2, dan 3.

Metrik dan Target

Pencapaian BRI

Penghitungan Sectoral Decarbonization Approach (SDA) [FN-CB-410b.1] [FN-CB-410b.2]

Sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2050, BRI telah melakukan perhitungan intensitas karbon atas emisi yang dibiayai serta menetapkan target sektoral dan jalur dekarbonisasi yang spesifik. Dengan menggunakan tahun 2022 sebagai tahun dasar, BRI menetapkan target dan jalur khusus untuk sektor industri, seperti *pulp and paper*, *real estate* komersial, pembangkit listrik, dan *project finance* pembangkit listrik.

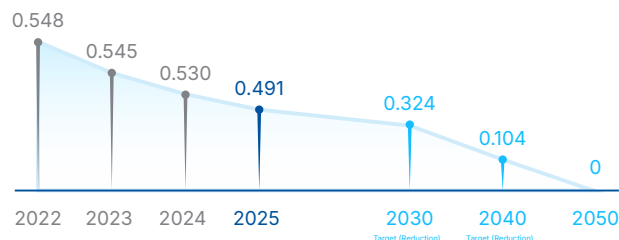
Secara keseluruhan, pada tahun 2025 terjadi penurunan intensitas emisi pada sektor-sektor yang dibiayai oleh BRI dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini didorong oleh upaya BRI dalam memperluas portofolio energi terbarukan. Namun demikian, terdapat sedikit peningkatan intensitas emisi pada sektor *pulp and paper*. Hal ini disebabkan oleh mayoritas nasabah di sektor tersebut yang melakukan pembaruan baseline emisi seiring dengan penyempurnaan metodologi, serta berhasil memperoleh validasi target dari *Science Based Targets initiative* (SBTi) pada tahun 2025. BRI meyakini bahwa pencapaian ini menunjukkan keselarasan yang lebih kuat dengan jalur dekarbonisasi berbasis sains serta mendukung target keberlanjutan jangka panjang dan kredibilitas pengelolaan emisi yang dibiayai.

Metrik dan Target (Target dan Jalur Pengurangan Tiap Sektor Industri berdasarkan SDA) [FN-CB-410b.1] [FN-CB-410b.2]



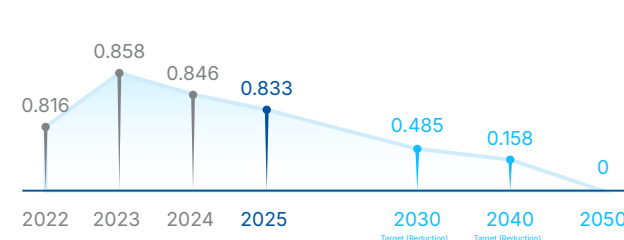
Pembangkit Listrik

Unit: metrik tonCO₂e/listrik dan panas yang dihasilkan MWh



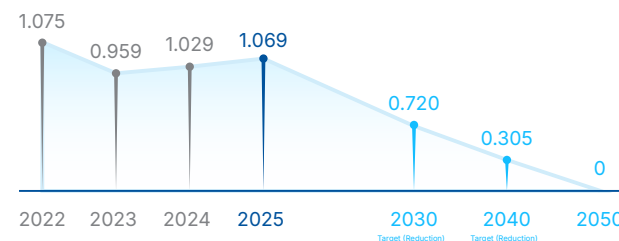
Pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik

Unit: metrik tonCO₂e/listrik dan panas yang dihasilkan MWh



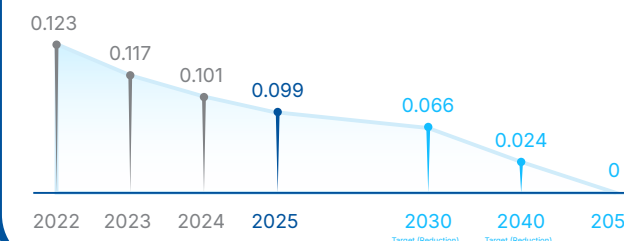
Kertas & Pulp

Unit: metrik tonCO₂e/metrik ton kertas dan pulp diproduksi



Commercial Real Estate

Unit: metrik tonCO₂e/m²



Metrik dan Target

Penghitungan Temperature Ratings Method (TRA) ^{[FN-CB-410b.1] [FN-CB-410b.3]}

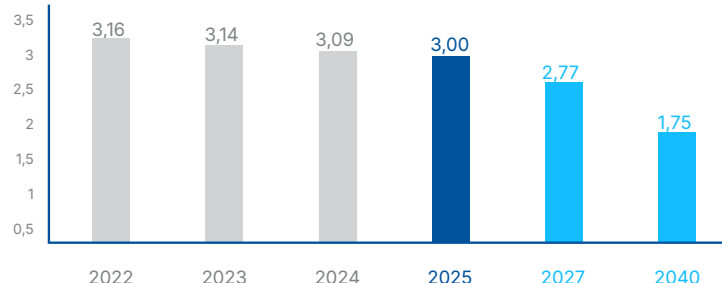
Dalam penetapan target penurunan emisi portofolio yang tidak menggunakan pendekatan *Sectoral Decarbonization Approach* (SDA), BRI menerapkan Metodologi Temperature Ratings untuk mengukur keselarasan portofolio terhadap jalur dekarbonisasi global. Pada tahun 2025, portofolio pinjaman menunjukkan kecenderungan penurunan temperature rating dibandingkan tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan keselarasan terhadap jalur transisi rendah karbon. Sementara itu, pada portofolio obligasi dan ekuitas tercatat peningkatan temperature rating pada cakupan *Scope 1*, *Scope 2*, dan *Scope 3*. Perubahan ini dipengaruhi oleh komposisi portofolio serta variasi cakupan target penurunan emisi pada entitas dalam portofolio, khususnya yang belum sepenuhnya mencakup emisi tidak langsung dalam rantai nilai, sehingga turut memengaruhi hasil agregasi pengukuran pada *Scope 1*, *Scope 2*, dan *Scope 3*.

Ke depan, BRI terus memperkuat upaya penurunan emisi portofolio melalui peningkatan pembiayaan pada sektor energi terbarukan serta keterlibatan aktif dengan debitur untuk mendorong penerapan praktik bisnis yang lebih rendah emisi. BRI juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan temperature rating portofolio guna memastikan keselarasan dengan target *Net Zero Emission* dan perkembangan praktik terbaik internasional.

Portofolio Pinjaman

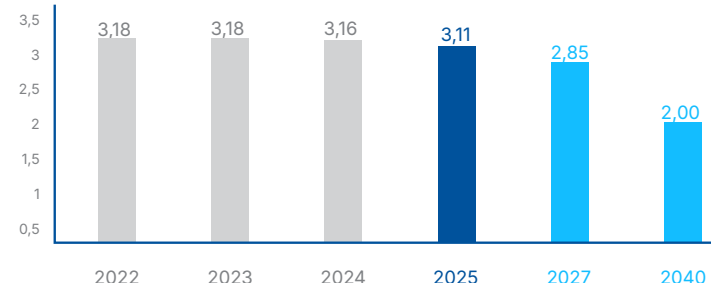
Scope 1 & 2

°C (derajat Celcius)



Scope 1, 2 & 3

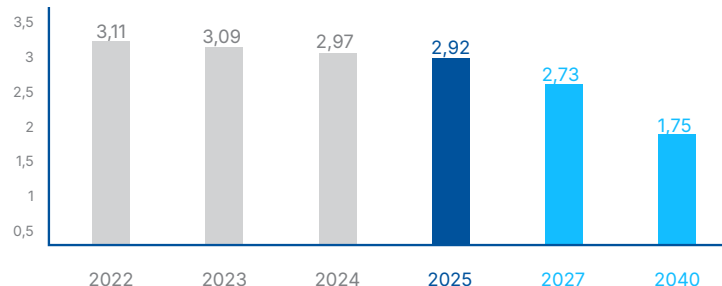
°C (derajat Celcius)



Portofolio Obligasi dan Ekuitas yang Tercatat

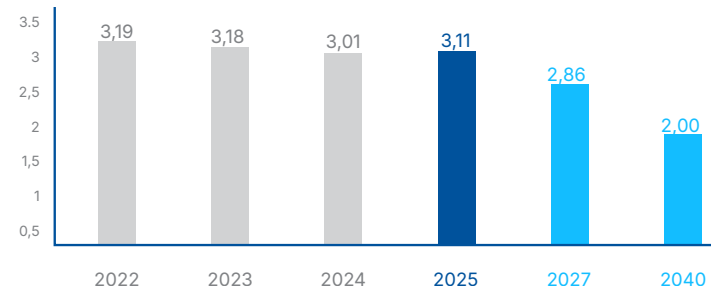
Scope 1 & 2

°C (derajat Celcius)



Scope 1, 2 & 3

°C (derajat Celcius)



Metrik dan Target

Penetapan Harga Karbon Internal

BRI menerapkan mekanisme Internal Carbon Pricing (ICP) menggunakan pendekatan shadow price untuk memperkuat manajemen risiko dan menginternalisasi dampak finansial dari emisi gas rumah kaca (GRK). ICP adalah mekanisme sukarela yang menetapkan nilai moneter konseptual untuk setiap ton emisi GRK terkait Scope 1, 2, dan 3. Mekanisme ini memungkinkan BRI menilai implikasi finansial dari emisi (risiko dan peluang) baik dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional.

Penetapan harga karbon internal BRI dipandu oleh skenario yang disediakan oleh Network for Greening the Financial System (NGFS). Skenario ini menetapkan rentang harga karbon, mulai dari Rp1.406.023 hingga Rp170.127.545 per ton CO₂e (setara USD berdasarkan kurs Rp16.865,91 per USD).

Harga karbon internal diterapkan di berbagai fungsi. Mekanisme ini memberikan informasi untuk evaluasi proyek dan investasi, memastikan risiko karbon jangka panjang diperhitungkan dalam tinjauan *business case*. ICP juga mendorong efisiensi operasional dan energi dengan mengidentifikasi aktivitas yang intensif emisi. Pada tingkat strategis, ICP membimbing pengambilan keputusan rendah karbon, mendukung perencanaan transisi, dan menyelaraskan praktik internal dengan regulasi dan ekspektasi terkait iklim yang berkembang.

Aplikasi utama ICP BRI terdapat dalam kerangka *Climate Risk Stress Testing* (CRST). Sebagai lembaga keuangan, BRI menyadari bahwa eksposur paling signifikan terhadap risiko transisi terkait iklim muncul dari bisnis yang dibiayainya. Dengan mengintegrasikan harga karbon ke dalam penilaian CRST, BRI dapat mengevaluasi bagaimana perubahan kebijakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan kelayakan kredit debitur, memungkinkan BRI menilai risiko transisi pada portofolio pinjaman dan memberikan masukan untuk pengambilan keputusan strategis.

Melalui pendekatan ini, BRI memastikan bahwa risiko dan peluang terkait karbon secara sistematis tertanam dalam efisiensi operasional, evaluasi proyek, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan kredit, sekaligus memperkuat komitmen terhadap praktik perbankan berkelanjutan.

Carbon Credits [GRI 102-10]

BRI memandang pengimbangan karbon sebagai instrumen pendukung dalam strategi menuju Emisi Nol Bersih, yang digunakan secara hati-hati dan tidak menggantikan upaya utama pengurangan emisi dari aktivitas operasional maupun portofolio pembiayaan. Dalam kerangka ini, pengimbangan karbon diposisikan sebagai bagian dari kontribusi di luar rantai nilai utama dan sebagai mekanisme terbatas untuk menangani emisi residual pada fase pencapaian target, dengan pencatatan dan pengungkapan yang transparan serta tanpa digunakan sebagai dasar klaim *net-zero* sebelum tahun target.

Dalam pelaksanaannya, BRI mengacu pada ketentuan regulator dan standar internasional dalam memilih proyek dan kredit karbon, termasuk partisipasi pada pasar karbon nasional, dengan memastikan kualitas, integritas, dan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan komitmen BRI untuk menjaga kredibilitas pencapaian target Emisi Nol Bersih sekaligus berkontribusi pada transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan dan inklusif. Pada tahun 2025 BRI tidak melakukan pembelian dan pembatalan kredit karbon.



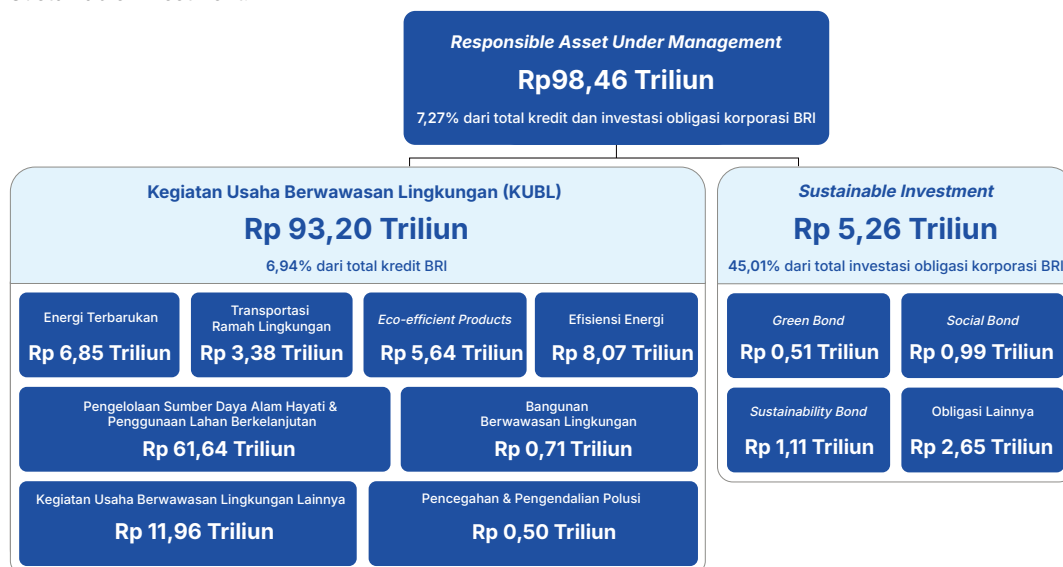
Metrik dan Target

Sustainable Portfolio

Dalam rangka mewujudkan strategi akselerasi transformasi portofolio menuju pembiayaan rendah karbon, BRI terus memperluas portofolio hijau melalui aktivitas pembiayaan berkelanjutan yang mencakup *green lending* serta investasi pada instrumen obligasi berkelanjutan.

Responsible Asset Under Management

Responsible Asset Under Management (Responsible AUM) mencerminkan total aset yang dikelola BRI dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dalam proses pembiayaan maupun investasi. Portofolio ini mencakup pembiayaan pada kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta investasi pada instrumen yang selaras dengan prinsip ESG. Pengukuran Responsible AUM dilakukan sebagai bagian dari upaya BRI untuk memantau kontribusi portofolio terhadap transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pada periode pelaporan, *Responsible Asset Under Management* BRI mencapai Rp 98,46 triliun, yang terdiri atas pembiayaan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) serta investasi pada instrumen *Sustainable Investment*.



Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada sektor atau aktivitas usaha yang memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pembiayaan ini mencakup berbagai sektor prioritas seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta sektor lain yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pada periode pelaporan, total pembiayaan berkelanjutan BRI mencapai Rp811,9 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp800 triliun dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam KPI Kolegial. Dari total tersebut, Rp93,2 triliun merupakan pembiayaan hijau yang disalurkan pada berbagai kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Capaian tersebut juga mencakup implementasi *Sustainability-Linked Loans* (SLL) BRI pada tahun 2025, yang diberikan kepada debitur pada sektor efisiensi energi serta bangunan berwawasan lingkungan, dengan mekanisme pembiayaan yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja keberlanjutan.

Sustainable Investment

Selain melalui pembiayaan, BRI juga mendukung pengembangan portofolio berkelanjutan melalui aktivitas investasi pada instrumen yang selaras dengan prinsip ESG, termasuk investasi pada obligasi berkelanjutan seperti *green bonds*, *social bonds*, maupun *sustainability bonds*. Pada periode pelaporan, nilai *Sustainable Investment* BRI tercatat sebesar Rp5,26 triliun, yang merupakan bagian dari upaya Bank dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan sosial.

Metrik dan Target

Sustainable - Related Funding

Dalam memperkuat penerapan prinsip ESG dari sisi pendanaan, BRI juga secara aktif mengembangkan sustainability-related funding melalui penerbitan instrumen pendanaan berbasis keberlanjutan. Pendanaan ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti *green bonds*, *sustainability bonds*, maupun fasilitas pinjaman yang dikaitkan dengan tujuan keberlanjutan. Melalui penerbitan instrumen tersebut, BRI tidak hanya memperluas sumber pendanaan yang mendukung kegiatan pembiayaan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan pasar keuangan berkelanjutan. Pada periode pelaporan, total *Sustainable-Related Funding* yang berhasil dihimpun BRI mencapai Rp34,79 triliun, yang berasal dari berbagai instrumen obligasi dan pinjaman berbasis ESG.



Green Bond BRI

BRI telah menerbitkan obligasi hijau (*green bond*) sesuai ketentuan POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) serta Green Bond Framework BRI. Penggunaan dana (*use of proceeds*) dialokasikan minimal 70% untuk pembiayaan Kegiatan Umum Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan maksimal 30% untuk pembiayaan kegiatan umum lainnya, seperti sektor mikro, kesehatan dan sosial.

BRI juga melakukan seleksi dan evaluasi terhadap portofolio dan penyaluran pembiayaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. BRI menerbitkan Green Bond Tahap I Tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp5 triliun dan mencatatkan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 4,4 kali.

Pada tahun 2023, BRI menerbitkan Green Bond Tahap II Tahun 2023 senilai Rp6 triliun dan mencatatkan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 2,63 kali. Penerbitan ini terbagi menjadi tiga seri yaitu Seri A (370 hari) dengan kupon 6,10%, Seri B (2 tahun) dengan kupon 6,35% dan Seri C (3 tahun) dengan kupon 6,30%. Pada tahun 2024, BRI menerbitkan *Green Bond* Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,5 Triliun dan mencatatkan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 1,64 kali. Penerbitan ini terbagi menjadi tiga seri yaitu Seri A (370 hari) dengan kupon 6,15%, Seri B (2 tahun) dengan kupon 6,25% dan Seri C (3 tahun) dengan kupon 6,25%.

Obligasi Hijau	Pencatatan	Jatuh Tempo	Nilai	Kupon
Tahap I Seri A*	21 Juli 2022	30 Juli 2023	Rp2,50 Triliun	3,70%
Tahap I Seri B*	21 Juli 2022	20 Juli 2025	Rp2,00 Triliun	5,75%
Tahap I Seri C	21 Juli 2022	20 Juli 2027	Rp0,50 Triliun	6,45%
Tahap II Seri A*	13 Oktober 2023	22 Oktober 2024	Rp1,35 Triliun	6,10%
Tahap II Seri B*	13 Oktober 2023	12 Oktober 2025	Rp4,15 Triliun	6,35%
Tahap II Seri C	13 Oktober 2023	12 Oktober 2026	Rp0,50 Triliun	6,30%
Tahap III Seri A*	20 Maret 2024	30 Maret 2025	Rp1,23 Triliun	6,15%
Tahap III Seri B	20 Maret 2024	20 Maret 2026	Rp0,88 Triliun	6,25%
Tahap III Seri C	20 Maret 2024	20 Maret 2027	Rp0,38 Triliun	6,25%

*) telah jatuh tempo

Pinjaman Terkait Keberlanjutan (*Sustainability-linked Loan*)

Pada 30 Agustus 2022, BRI berhasil mendapatkan pinjaman sindikasi dalam bentuk SLL dari bank-bank domestik dan internasional dengan total USD 1.000.000.000 yang difasilitasi oleh Facility Agent PT Bank HSBC Indonesia dan dikoordinasikan oleh UOB. Penarikan atas pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni sebagai berikut:

1. Fasilitas A sebesar USD 200.000.000 dari 10 (sepuluh) bank dengan suku bunga Compound SOFR dan waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak 15 September 2022 dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 September 2023.
2. Fasilitas B sebesar USD 300.000.000 dari 9 (sembilan) bank dengan suku bunga Compound SOFR dan waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 15 September 2022 dan telah jatuh tempo pada 15 September 2025.
3. Fasilitas C sebesar USD 500.000.000 dari 11 (sebelas) bank dengan suku bunga Compound SOFR dan waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak 15 September 2022 dan akan jatuh tempo pada 15 September 2026.

Metrik dan Target

Surat Berharga Berbasis Inklusi (*Inclusivity-based Securities*)

BRI menghimpun dana berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam bentuk surat berharga berbasis inklusi (*Inclusivity-based Securities*) yang penggunaan dananya dialokasikan untuk pembiayaan UMKM, korporasi UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Obligasi Subordinasi IV BRI 2023

BRI telah menerbitkan Obligasi Subordinasi IV pada bulan Juli 2023. Selain sebagai kewajiban pemenuhan modal pelengkap, penerbitan ini juga merupakan langkah BRI untuk mewujudkan visi menjadi *Champion of Financial Inclusion*. Seluruh *proceeds* dari penerbitan surat berharga ini dialokasikan seluruhnya untuk pembiayaan inklusif mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 2021.

BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi IV dengan nilai penerbitan sebesar Rp500 Miliar dan mencatatkan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 1,77 kali. Obligasi Subordinasi IV BRI memiliki tenor 5 tahun dengan kupon 6,45%.

Obligasi Subordinasi IV	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo	Nilai	Kupon BRI 2023
Seri A	6 Juli 2023	6 Juli 2028	Rp500 Miliar	6,45%

Pinjaman Berbasis Sosial (*Social Loan*)

Pada 27 Juni 2024, BRI berhasil mendapatkan Pinjaman berbasis Social (*Social Loan*) dengan total fasilitas sebesar USD 800 juta. Pinjaman berbasis sosial tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali, sebagian atau seluruhnya terhadap Proyek Sosial sesuai dengan framework yang telah ditetapkan.

Social Bond 2025

BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang menerbitkan social bond. Pada 2025, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I-2025 senilai Rp 5 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 20 triliun. Penerbitan ini mencatatkan oversubscription hingga Rp 6,57 triliun atau 1,31 kali lipat dari target awal.



Metrik dan Target

Inisiatif Hijau BRI

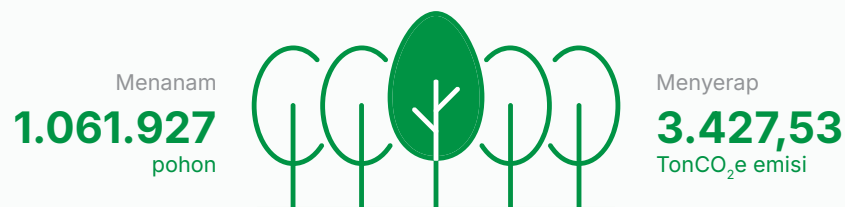
Selain melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terdapat beberapa inisiatif hijau yang dilakukan bersama pemangku kepentingan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Inisiatif yang dilakukan di antaranya penghematan energi dan air, penghindaran emisi dari penggunaan produk dan layanan perbankan, pengelolaan aset, pengelolaan sampah, praktik konsumsi berkelanjutan, serta penghijauan. Inisiatif-inisiatif tersebut mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pemangku kepentingan. Pada tahun 2024 BRI tidak menerima pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup. ^[F.16]

Program Penghijauan Lingkungan ^[F.12]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, BRI menginisiasi berbagai program penghijauan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program penghijauan BRI dijalankan melalui dua inisiatif utama, yaitu Grow & Green dan BRI Menanam. Program Grow & Green merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI pada pilar lingkungan yang berfokus pada upaya pemulihan dan pelestarian ekosistem daratan maupun pesisir. Salah satu kegiatan utamanya adalah restorasi mangrove yang hingga tahun 2025 telah mencapai penanaman sebanyak 65.300 pohon, dengan potensi pengurangan emisi karbon sekitar 43,43 tonCO₂e per tahun.

Sementara itu, program BRI Menanam melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya nasabah mikro seperti penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), nasabah Mekaar, serta komunitas Desa BRILiaN, untuk menanam dan memelihara bibit tanaman yang disalurkan oleh BRI. Jenis tanaman yang diberikan merupakan tanaman yang memiliki kemampuan menyerap karbon sekaligus bernilai ekonomis, seperti alpukat, durian, dan mangga. Hingga tahun 2025, program ini telah menyalurkan 996.627 bibit pohon kepada nasabah mikro dan masyarakat Desa BRILiaN, dengan estimasi potensi penyerapan karbon sebesar 3.384,10 tonCO₂e.

Melalui inisiatif ini, BRI tidak hanya berkontribusi terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan penyerapan karbon, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanaman produktif yang bernilai ekonomi. Program ini dikelola melalui sinergi antara fungsi tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan pembiayaan usaha mikro sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang berkelanjutan.



Setara 1.459.953 liter BBM

Setara 725 kendaraan setahun

Setara 648 rumah yang menggunakan listrik selama setahun

Zero Waste to Landfill ^{[F.5] [F.13] [F.14] [F.15] [GRI 3-3] [GRI 306-1] [GRI 306-2]}

Program *Zero-Waste to Landfill* merupakan bagian manajemen pengelolaan dan pemantauan sampah yang mencakup rangkaian kegiatan mulai dari pemilahan, pembuangan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan. Program ini dirancang untuk diterapkan di seluruh lingkungan kerja BRI untuk menghasilkan penghindaran emisi.

Program ini merupakan model pengelolaan sampah perkantoran yang efektif untuk mengurangi timbulan dan penumpukan sampah di lingkungan kantor. Sampah yang dihasilkan akan digunakan kembali atau didaur ulang sehingga tidak ada sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mencemari lingkungan. ^[B.3]

Pada tahun 2025, jumlah limbah yang didaur ulang sebanyak 740,011 kg dan berpotensi menghindari emisi sebesar 746.404 kgCO₂e. Selain itu BRI mendorong berbagai upaya pengurangan timbulan limbah, termasuk kewajiban bagi pekerjanya untuk setidaknya sekali seminggu menggunakan alat makan dan minum pribadi untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang dihasilkan dari kemasan atau wadah makanan dan minuman. Sepanjang periode pelaporan tidak terdapat sampah khusus atau B3 yang dihasilkan dan tidak terjadi ceceran atau tumpahan limbah. ^{[F.15] [F.12] [B.3]}



Metrik dan Target

Penghindaran Emisi dari Produk dan Layanan ^{[OJK F.12][GRI 302-5]}

BRI terus berupaya melakukan transformasi, terutama dalam menyediakan produk dan layanan perbankan. Melalui digitalisasi produk dan layanan, BRI pun turut memaksimalkan penggunaan platform digital untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari perjalanan, pengangkutan, dan kegiatan lain yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi perbankan di unit kerja BRI. Melalui digitalisasi, BRI memiliki potensi penghindaran emisi gas rumah kaca sekaligus melibatkan nasabah. Mengacu pada metode ISO 14064 Greenhouse Gases, BRI dapat memperkirakan jumlah emisi gas rumah kaca yang dapat dihindari sebagai berikut:

Jenis Layanan	Frekuensi (dalam ribuan)	Penghindaran Energi (MJ)	Penghindaran Emisi (kgCO ₂ e)
BRI ^{mo}	5.619.905	13.600.826	939.001
Merchant BRI	651.376	1.713.620	118.308
Qlola	16.715	43.973	3.036
BRI ^{Link}	1.186.209	3.120.642	215.449

Pengambilan data dilakukan melalui pengiriman kuesioner digital kepada nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai demografi nasabah, jarak rata-rata ke ATM atau Unit Kerja BRI, jenis kendaraan yang digunakan, efisiensi BBM kendaraan yang paling umum, dan penggunaan ponsel pintar untuk melakukan transaksi sehari-hari.

Implementasi BRI Green Network ^[F.12]

BRI terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi emisi operasional melalui pengembangan inisiatif terpadu yang dikenal sebagai BRI Green Network. Inisiatif ini mencerminkan upaya Bank dalam menurunkan emisi *Scope 1* dan *Scope 2* secara sistematis melalui pemanfaatan teknologi rendah karbon, peningkatan efisiensi energi, serta penerapan infrastruktur berkelanjutan di seluruh jaringan operasional BRI di Indonesia.

Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, BRI secara bertahap melakukan transisi pada armada operasional menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Hingga tahun 2025, BRI telah mengoperasikan 926 kendaraan ramah lingkungan yang terdiri dari mobil hybrid, mobil listrik, dan motor listrik. Pemanfaatan kendaraan ini berkontribusi pada pengurangan konsumsi bahan bakar serta menurunkan emisi langsung yang dihasilkan dari aktivitas operasional Bank. Di sisi lain, BRI juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan perkantoran. Hingga akhir 2025, BRI telah melakukan pemasangan panel surya di 152 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif ini mendukung peningkatan porsi energi bersih dalam konsumsi listrik operasional Bank sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi di jaringan kantor BRI.

Selain itu, BRI turut mengembangkan infrastruktur perkantoran yang berkelanjutan melalui penerapan standar bangunan hijau. Saat ini, dua gedung perkantoran milik BRI telah memperoleh sertifikasi bangunan hijau dari Green Building Council Indonesia (GBCI) dengan predikat Gold (Menara BR^{illiant} Jakarta dan Menara BR^{illiant} Medan), yang mencerminkan komitmen Bank dalam menerapkan prinsip efisiensi energi, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta desain bangunan yang ramah lingkungan. Melalui BRI Green Network, BRI terus memperkuat praktik operasional yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.

Penggunaan Energi ^{[F.6][F.7][GRI 302-1][GRI 302-2][GRI 302-3][GRI 302-4]}

Tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur penggunaan energi untuk bank komersial, namun BRI mengambil berbagai langkah untuk mengurangi jumlah energi yang digunakan oleh dalam proses bisnisnya. Pengurangan ini dilakukan dengan tujuan efisiensi, kontribusi pada lingkungan, serta mengurangi jumlah emisi *Scope 1* & *Scope 2* yang dihasilkan semaksimal mungkin. ^[GRI 3-3] BRI melakukan penghitungan energi di Kantor Pusat dan menetapkan 2022 sebagai tahun dasar rencana pengurangan penggunaan energi. Beberapa langkah yang telah dilakukan di antaranya efisiensi penggunaan listrik, budaya kerja hemat energi, penggunaan teknologi seperti lampu LED dan pengaturan penggunaan lift kantor, pengurangan BBM dengan pembatasan usia kendaraan dan pemeliharaan rutin, serta penggantian kendaraan operasional menjadi kendaraan listrik.

Total energi yang dikonsumsi sepanjang tahun 2025 adalah 2.622.589.522 MJ yang didapatkan dari penggunaan listrik dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Energi ini seluruh digunakan sendiri untuk kebutuhan operasional kantor. Listrik yang digunakan sepenuhnya berasal dari PT PLN (Persero) sementara operasional kendaraan menggunakan bahan bakar minyak dan listrik. Mengingat PT PLN (Persero) belum dapat menyajikan informasi mengenai bauran energi untuk menghasilkan listrik sampai ke masing-masing pengguna, maka laporan ini tidak dapat menyajikan informasi terkonsolidasi mengenai konsumsi energi dari sumber energi terbarukan maupun tidak terbarukan. ^[GRI 302-1]

Uraian	Satuan	2023	2024	2025
Konsumsi bahan bakar total ^[GRI 302-1]	Liter	42.927.942	42.521.434	37.968.046
Konsumsi listrik	kWh	403.192.231	383.878.408	365.472.236
Konsumsi energi total dalam organisasi	MJ	2.919.627.648	2.848.795.079	2.622.589.522
Penghematan Energi	MJ (YoY)	155.330.032	70.832.569	226.205.557
	% (YoY)	5,05	2,43	7,94
Intensitas energi menurut jumlah kantor	MJ/kantor/tahun	376.483	376.426	355.509
Intensitas energi menurut jumlah pekerja	MJ/kantor/tahun	24.271	23.620	20.880

Penghitungan energi dan faktor konversi yang dalam penghitungan ini menggunakan metodologi IPCC (1998) yang telah diadopsi Pemerintah Indonesia melalui panduan Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi yang diterbitkan Kementerian ESDM (2020). BRI telah mulai melakukan pencatatan penggunaan energi di setiap divisi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan energi perusahaan. Selain itu BRI memiliki beberapa inisiatif perubahan perilaku dan operasional seperti pemanfaatan teknologi digital untuk mengendalikan efisiensi dan intensitas energi. Langkah ini terbukti menurunkan konsumsi energi total dalam organisasi sebesar 226.205.557 MJ atau 7,94% pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga berdampak pada penurunan intensitas emisi energi sebesar 20.917 MJ/kantor/tahun dan 2.740 MJ/pekerja/tahun. ^{[GRI 302-4][GRI 302-5]}

Metrik dan Target

Penggunaan Air ^[F.8]

BRI tidak melakukan pencatatan limbah cair dalam proses bisnisnya, sebab BRI tidak memiliki kegiatan yang menghasilkan limbah cair secara signifikan dan bukan merupakan kegiatan bisnis utama. Pada tahun 2025, BRI melakukan pengukuran penggunaan air di Kantor Pusat dan mendapatkan intensitas pemakaian air per pekerja (termasuk pekerja alih daya) sebesar 16,27 m³, jumlah ini meningkat sebesar 4,27% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 16,25 m³.

Kampanye Nirkertas (*Paperless Campaign*) ^{[F.5] [GRI 306-2]}

Digitalisasi yang dilakukan BRI menciptakan efisiensi baik waktu, biaya, termasuk kertas serta nasabah dimudahkan dalam akses perbankan di mana saja dan kapan saja. Berikut adalah beberapa aplikasi nirkertas (paperless) yang diterapkan BRI:

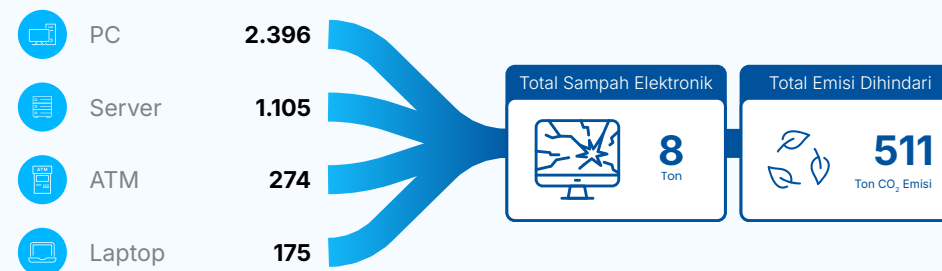
1. E-Tax: Aplikasi pelaporan pajak bagi nasabah pelaku usaha, menjadikan BRI sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia yang menggunakan aplikasi sejenis;
2. E-Form: Aplikasi pengganti metode pelayanan berbasis kertas bagi pekerja garis depan di Unit Kerja BRI;
3. E-Statement: Aplikasi yang memberi informasi pada nasabah melalui alamat surel yang telah terdaftar;
4. New Account Sweep: Membantu nasabah menghubungkan produk pinjaman dan giro tanpa harus memiliki dua rekening terpisah;
5. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa bukti cetak: Mengurangi penggunaan kertas dalam transaksi perbankan;
6. BRISPOT: Aplikasi berbasis Android dan terkoneksi melalui internet untuk memfasilitasi putusan pinjaman mikro secara cepat dan nirkertas;
7. BRILiaN Apps: Aplikasi internal BRI yang mencakup fitur e-office sebagai sarana surat menyurat secara daring dan menu kepegawaian lainnya;
8. BRISMART: Aplikasi sistem manajemen pembelajaran daring untuk keperluan internal BRI;
9. BRIOPRA (BRI Digital Operation Risk Management Information System): Aplikasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko, mencakup modul Risk and Control Self Assessment (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI), Manajemen Insiden (MI), Forum MR, dan Maturitas;
10. BRISIM (BRI Digital Management Information System): Aplikasi penyajian data dan informasi kinerja BRI berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat mobile. BRISIM membantu pekerja memantau kinerja mereka dimanapun dan kapanpun, termasuk pada saat berada di luar kantor;
11. BRIMEN (BRI Document Management System): Konsep penyimpanan dokumen kredit secara elektronik dengan dokumen fisik disimpan dalam satu tempat yang tersentralisasi, terstandarisasi, dan terintegrasi dengan sistem tersebut; dan
12. BRIImo: Aplikasi mobile banking (super app) yang memudahkan nasabah dalam mengakses produk dan layanan perbankan kapanpun dan di mana pun.

Melalui upaya-upaya ini, BRI berhasil mengurangi konsumsi kertas dalam kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2025, tercatat penurunan penggunaan kertas per pekerja sebesar 16,38%.

Meminimalkan Sampah Elektronik ^{[F.12] [GRI 306-2]}

Dalam rangka memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui minimalisasi limbah elektronik, BRI memanfaatkan teknologi penghapusan data secara digital untuk proses penghapusbukuan aset teknologi informasi. Teknologi ini membantu BRI dalam penghapusbukuan perangkat teknologi informasi yang memuat media fisik penyimpanan data, seperti komputer, laptop, server, anjungan tunai mandiri (ATM), dan perangkat serupa lainnya. Data di dalam perangkat tersebut dihapus secara digital dan aman untuk mencegah kebocoran data, sehingga perangkat seperti dalam kondisi baru dan terdapat potensi untuk penggunaan kembali oleh pihak ketiga, contohnya melalui proses lelang atau bantuan sosial.

Jenis dan Jumlah Sampah Elektronik



Sustainability Related Disclosure





Keuangan Inklusif

Empat Pilar Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS

Tata Kelola

Komitmen BRI terhadap Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Pelindungan Finansial Nasabah

Agenda Global dan Nasional yang Mendukung Komitmen BRI

Struktur Tata Kelola untuk Pembiayaan Inklusif dan Keunggulan Layanan Nasabah

Pengawasan Tingkat Manajemen Eksekutif dan Komite

Kebijakan dan Regulasi Internal

Strategi

Identifikasi Risiko dan Peluang

Strategi untuk Mengatasi Risiko dan Memanfaatkan Peluang

Inklusi Keuangan sebagai Respons Strategis

Pengembangan Produk dan Layanan Berorientasi Nasabah

Literasi Keuangan

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Keuangan Inklusif

Perbankan Inklusif dengan Fokus pada Kapabilitas dan Pelindungan

Pelindungan Finansial Nasabah

Metrik dan Target

Metrik untuk Keuangan Inklusif

Dampak Sosial Pinjaman Mikro

Pendapatan Terkait SDGs

Tata Kelola

Materiality Assessment BRI mengidentifikasi Inclusive Finance sebagai topik material prioritas, yang mencerminkan peran strategis Bank dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan serta mendorong partisipasi ekonomi yang inklusif di berbagai segmen nasabah. Selain itu, *Consumer Financial Protection* juga merupakan salah satu topik keberlanjutan yang menegaskan pentingnya memastikan bahwa layanan keuangan disampaikan secara bertanggung jawab dengan tetap melindungi hak dan kepentingan nasabah.

Meskipun dinilai sebagai dua topik material dengan skala dampak yang berbeda, BRI menyajikan *Inclusive Finance* dan *Consumer Financial Protection* dalam satu bab yang sama karena keduanya memiliki keterkaitan yang kuat dalam implementasinya. Perluasan akses terhadap layanan keuangan perlu disertai dengan praktik yang bertanggung jawab, tingkat pemahaman nasabah yang memadai, serta mekanisme perlindungan yang tepat agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, bab ini menguraikan pendekatan pengelolaan BRI dalam dua area utama, yaitu:

- *Inclusive Finance*, yang berfokus pada perluasan akses layanan keuangan dan peningkatan ketersediaan produk keuangan bagi berbagai segmen masyarakat, khususnya kelompok yang belum terlayani secara optimal; serta
- *Consumer Financial Protection*, yang berfokus pada perlindungan hak nasabah, penerapan prinsip transparansi dan perlakuan yang adil, serta penguatan kapabilitas nasabah melalui literasi keuangan.

Kedua pendekatan ini diimplementasikan melalui kerangka terintegrasi BRI yang mencakup tiga pilar utama, yaitu *Financial Inclusion*, *Financial Literacy*, dan *Consumer Financial Protection* yang secara bersama-sama mendukung intermediasi keuangan yang bertanggung jawab, partisipasi ekonomi yang inklusif, serta penciptaan nilai jangka panjang.

Komitmen BRI terhadap Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Perlindungan Finansial Nasabah [SEOJK F.17]

Komitmen terhadap Inklusi Keuangan

Memperluas akses yang adil terhadap layanan keuangan dan solusi pembiayaan inklusif

BRI berkomitmen untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan dan solusi pembiayaan bagi kelompok yang kurang terlayani dan kelompok sasaran, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, rumah tangga berpendapatan rendah, komunitas pedesaan, perempuan, pemuda, populasi lanjut usia, pekerja migran, dan kelompok lain yang kurang beruntung. Komitmen ini diwujudkan melalui:

- pengembangan dan perluasan produk dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kelompok yang kurang terlayani dan kelompok sasaran, didasarkan pada riset pasar dan umpan balik nasabah untuk memastikan relevansi, keterjangkauan, dan aksesibilitas;
- penyesuaian saluran distribusi dan titik akses dengan kebutuhan nasabah yang beragam dan kondisi geografis, termasuk jaringan cabang fisik, model tanpa cabang dan berbasis agen, serta platform perbankan digital;

- menyediakan solusi pembiayaan mikro dan inklusif yang mendukung aktivitas ekonomi produktif, pertumbuhan bisnis, dan peningkatan pendapatan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kelompok yang kurang beruntung, serta usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan milik negara, organisasi masyarakat, dan mitra ekosistem, untuk memperluas jangkauan, memperkuat distribusi, dan mendukung pengembangan ekosistem keuangan inklusif.

Komitmen terhadap Literasi Keuangan dan Pelindungan Finansial Nasabah

Memperkuat kapabilitas nasabah sekaligus memastikan perlakuan yang adil, transparansi, dan praktik keuangan yang bertanggung jawab

BRI menyadari bahwa inklusi keuangan harus didukung oleh pemahaman dan kemampuan nasabah yang memadai, serta perlindungan nasabah yang kuat, untuk memastikan penggunaan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan efektif. Dalam konteks ini, BRI berkomitmen untuk memperkuat literasi keuangan sebagai pendorong inklusi berkelanjutan sekaligus mengintegrasikan prinsip perlindungan finansial nasabah di seluruh penawaran produk, praktik penjualan, dan penyampaian layanan. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan diiringi dengan perilaku keuangan yang bertanggung jawab serta perlindungan yang memadai untuk mencegah risiko seperti utang berlebihan pada nasabah (*over-indebtedness*), penyimpangan keuangan, dan penyalahgunaan produk keuangan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BRI juga memastikan bahwa produk dan layanan keuangan dirancang, ditawarkan, dan disampaikan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas keuangan, serta tingkat pemahaman nasabah, sehingga dapat mendukung kesejahteraan finansial nasabah dalam jangka panjang.

Komitmen ini mencakup seluruh segmen nasabah dengan kebutuhan keuangan, kapabilitas, tahap kehidupan, serta tingkat kematangan usaha yang beragam, termasuk pelaku usaha mikro, perempuan, generasi muda, masyarakat berpenghasilan rendah, dan nasabah di wilayah yang kurang terlayani. BRI juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok unbanked, underbanked, dan underserved untuk memastikan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan selalu disertai dengan transparansi, keadilan, serta praktik yang bertanggung jawab di sepanjang siklus hubungan dengan nasabah. Komitmen ini diwujudkan melalui:

- program edukasi keuangan dan penguatan kapasitas yang terarah, termasuk dukungan non-finansial seperti pendampingan usaha, perencanaan keuangan, dan literasi digital, yang dirancang bagi individu dari kelompok rentan dan berpenghasilan rendah serta pelaku UMKM, guna mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih terinformasi dan selaras dengan kebutuhan nasabah serta aktivitas ekonominya;
- kemitraan dengan organisasi pendidikan keuangan, lembaga pendidikan, dan organisasi berbasis komunitas, untuk menyelenggarakan inisiatif literasi keuangan yang terstruktur, mudah diakses, dan ditargetkan dengan jangkauan dan dampak yang dapat diukur;
- pelatihan dan pengembangan kapasitas pekerja yang berinteraksi langsung dengan nasabah,

Tata Kelola

membekali staf lini depan dan manajer hubungan nasabah dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung keterlibatan nasabah yang bertanggung jawab dan memberikan bimbingan keuangan yang sesuai di seluruh segmen nasabah;

- praktik pemasaran dan penjualan yang adil dan bertanggung jawab, memastikan informasi produk dan komunikasi nasabah transparan, akurat, dan sesuai dengan profil dan kemampuan nasabah;
- praktik pinjaman yang bertanggung jawab dan etis, mencakup penilaian keterjangkauan dan kesesuaian, opsi modifikasi pinjaman yang bertanggung jawab, dan pendekatan penagihan utang yang etis yang menghormati martabat nasabah dan mematuhi peraturan yang berlaku;
- mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses dan efektif, memungkinkan nasabah untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian secara tepat waktu dan transparan; dan
- pelatihan pekerja dan standar perilaku dirancang untuk mencegah praktik penjualan agresif dan mempromosikan interaksi nasabah yang menghormati dan etis.

Komitmen BRI terhadap keuangan inklusif, literasi keuangan, dan perlindungan finansial nasabah terintegrasi dalam strategi bisnis inti dan didukung oleh akuntabilitas yang jelas di tingkat manajemen senior dan Direksi.

Agenda Global dan Nasional yang Mendukung Komitmen BRI

Komitmen BRI terhadap Keuangan Inklusif, Literasi Keuangan, dan Pelindungan Finansial Nasabah dalam Layanan Keuangan dibentuk oleh agenda keberlanjutan global dan prioritas pembangunan nasional, yang menempatkan inklusi keuangan dan layanan keuangan yang bertanggung jawab sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Agenda Pembangunan Global

Pada tingkat global, komitmen BRI selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mengakui keuangan inklusif sebagai enabler kritis dalam pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, kesetaraan gender, dan pengurangan ketidakefektifan. Melalui komitmen kami terhadap Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Pelindungan Finansial Nasabah, BRI berkontribusi pada tujuan pembangunan global terkait:

- **SDG 1 – Tanpa Kemiskinan:** memperluas akses ke layanan keuangan formal bagi populasi berpenghasilan rendah dan yang kurang terlayani, mendukung upaya pengentasan kemiskinan;
- **SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:** mempromosikan aktivitas ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja melalui pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
- **SDG 5 – Kesetaraan Gender:** memperkuat partisipasi ekonomi dan peluang bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya; dan
- **SDG 10 – Pengurangan Ketimpangan:** mengurangi hambatan struktural yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi dan keuangan.

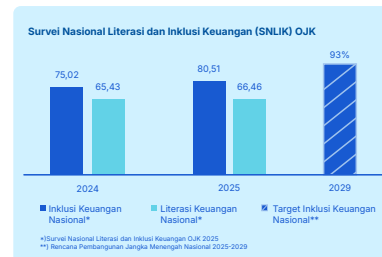
Dalam konteks ini, BRI memandang keuangan inklusif dan keunggulan layanan nasabah bukan sebagai tujuan terpisah, melainkan sebagai pendekatan terintegrasi yang menggabungkan akses yang diperluas, kemampuan keuangan yang diperkuat, dan perlindungan nasabah yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam aktivitas perbankan inti, BRI berupaya mendukung partisipasi ekonomi yang bermakna dan berkontribusi pada hasil pembangunan berkelanjutan di seluruh segmen nasabah dan komunitas. Keselarasan global ini juga memengaruhi cara BRI merancang tata kelola, kebijakan, dan mekanisme pengawasan untuk mewujudkan komitmennya secara konsisten dan akuntabel.

Agenda Pembangunan Nasional

Pada tingkat nasional, komitmen BRI didasarkan pada agenda pembangunan Indonesia, yang menempatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan sebagai prioritas strategis untuk ketahanan ekonomi dan keadilan sosial. Agenda ini diwujudkan melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020. SNKI mendefinisikan arah nasional, pilar prioritas, dan kelompok sasaran untuk mendorong inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Kelompok sasaran prioritas dalam SNKI meliputi, di antaranya: pelaku usaha mikro dan kecil, individu dan rumah tangga berpendapatan rendah, komunitas di daerah pedesaan, terpencil, dan kurang terlayani, perempuan, populasi lanjut usia, pemuda, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya. SNKI menekankan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan harus disertai dengan penguatan kemampuan keuangan dan perlindungan nasabah untuk mendukung partisipasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka Regulasi di Sektor Jasa Keuangan

Strategi nasional diimplementasikan di tingkat sektoral melalui serangkaian peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang secara kolektif menjadi landasan pendekatan BRI dalam hal inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan nasabah. Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan mengimplementasikan SNKI menjadi kewajiban konkret bagi lembaga keuangan, yang mencakup desain, implementasi, dan pelaporan program literasi dan inklusi keuangan. Peraturan ini menegaskan pentingnya inisiatif yang terarah dalam memenuhi kebutuhan dan kemampuan yang beragam dari kelompok nasabah yang kurang terlayani dan rentan.



Kemajuan literasi keuangan dan inklusi di tingkat nasional dievaluasi melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK, yang menyediakan indikator dasar dan tren resmi. Secara paralel, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan target nasional untuk meningkatkan proporsi populasi dewasa yang memiliki akses ke layanan keuangan formal menjadi 93% pada tahun 2029, sebagai tolok ukur yang jelas bagi upaya inklusi keuangan.

Tata Kelola

Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan lebih lanjut memperkuat peran pelindungan nasabah sebagai komponen integral dari penyediaan jasa keuangan yang bertanggung jawab. Peraturan ini menekankan transparansi dan pengungkapan informasi produk dan layanan, praktik komunikasi dan pemasaran yang bertanggung jawab, serta mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Peraturan ini memperkuat prinsip bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan harus didukung oleh perlakuan yang adil dan kualitas layanan di semua titik kontak nasabah.

Selain itu, Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Surat Utang Berkelanjutan dan Sukuk Berkelanjutan menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk pembiayaan sosial. Meskipun terutama mengatur instrumen pembiayaan berkelanjutan, peraturan ini secara eksplisit mengakui Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), termasuk:

- infrastruktur dasar yang terjangkau;
- akses ke layanan esensial;
- perumahan terjangkau;
- penciptaan lapangan kerja dan program yang bertujuan mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan;
- pemberdayaan sosial-ekonomi; dan
- kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat secara sosial.

Peraturan ini juga mengidentifikasi kelompok sasaran, seperti individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, komunitas terpinggirkan, penyandang disabilitas, migran dan pengungsi, populasi dengan pendidikan rendah, individu yang menganggur, perempuan dalam konteks kesetaraan gender, pemuda dan lansia yang rentan, serta komunitas yang terdampak bencana alam. Kerangka regulasi ini memfasilitasi pembiayaan sosial di berbagai segmen nasabah, mulai dari pembiayaan ultra-mikro dan mikro hingga pembiayaan korporasi berskala besar yang mendukung hasil sosial yang dapat diukur.

Struktur Tata Kelola untuk Pembiayaan Inklusif dan Keunggulan Nasabah

Untuk memastikan bahwa komitmennya terhadap Keuangan Inklusif, Literasi Keuangan, dan Pelindungan Finansial Nasabah dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan terintegrasi, BRI mengintegrasikan prioritas-prioritas ini ke dalam struktur tata kelola dan manajemen eksekutif yang sudah ada. Tanggung jawab pengawasan tersebut tidak ditempatkan dalam struktur tata kelola terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam Direksi dan fungsi manajemen senior yang relevan, sejalan dengan model bisnis inti BRI, segmentasi produk, dan lifecycle nasabah. Pendekatan tata kelola ini mencerminkan pandangan BRI bahwa keuangan inklusif dan keunggulan layanan nasabah merupakan bagian integral dari aktivitas perbankan inti dan harus dikelola bersamaan dengan strategi bisnis, manajemen risiko, dan pelaksanaan operasional.

Inklusi Keuangan

Tata Kelola Keuangan Inklusif berfokus pada memastikan akses yang luas dan adil terhadap layanan keuangan, serta ketersediaan produk dan layanan transaksi yang mendukung partisipasi ekonomi inklusif di seluruh segmen nasabah.

- Pengawasan terhadap akses layanan keuangan, termasuk saluran distribusi fisik dan digital, dilakukan melalui:
 - Direktorat *Network & Retail Funding*, yang bertanggung jawab atas jaringan cabang, produk pendanaan ritel, dan saluran akses digital seperti ATM dan BRImo; dan
 - Direktorat *Micro*, yang mengawasi inisiatif perbankan tanpa cabang, termasuk agen BRILink dan layanan ultra-mikro, untuk memperluas akses ke komunitas yang kurang terlayani dan terpencil.
- Pengawasan atas produk keuangan dan layanan transaksi, termasuk pembiayaan sosial di seluruh segmen nasabah, dilakukan melalui:
 - Direktorat *Micro*, yang mencakup pembiayaan mikro dan ultra-mikro;
 - Direktorat *Consumer Banking*, yang mencakup produk pinjaman konsumen, termasuk perumahan bersubsidi;
 - Direktorat *Commercial Banking*, yang mencakup pembiayaan UMKM;
 - Direktorat *Corporate Banking*, yang mencakup pembiayaan grosir dan solusi perbankan transaksi, termasuk platform seperti QLOLA yang mendukung transaksi nasabah korporat dan grosir; dan
 - Direktorat *Network & Retail Funding*, yang mencakup produk tabungan dan deposito.

Tata Kelola

Literasi Keuangan

Pengelolaan Literasi Keuangan berfokus pada penguatan kemampuan nasabah dan penggunaan layanan keuangan yang terinformasi sebagai pendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan. Pengawasan terhadap inisiatif literasi keuangan dan pembangunan kemampuan nasabah dilakukan melalui:

- Direktorat *Micro*, yang memimpin program pendidikan keuangan, pengembangan kapasitas UMKM, dan pemberdayaan nasabah yang ditujukan untuk nasabah usaha mikro dan kecil; dan
- *Corporate Secretary Group*, yang mengawasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mencakup pendidikan keuangan dan inisiatif pemberdayaan berbasis komunitas.

Pelindungan Finansial Nasabah

Pengelolaan Perlindungan Konsumen Keuangan berfokus pada memastikan perlakuan yang adil, transparansi, kualitas layanan, dan praktik keuangan yang bertanggung jawab di semua segmen nasabah. Pengawasan perlindungan konsumen dan kualitas layanan dilakukan melalui:

- Direktorat *Operations*, yang bertanggung jawab atas praktik pemasaran yang bertanggung jawab, transparansi produk, standar penyampaian layanan, proses penanganan keluhan, dan kualitas layanan nasabah secara keseluruhan; dan
- *Marketing Communication Group*, yang mengawasi praktik periklanan yang adil dan memastikan bahwa komunikasi produk dan aktivitas promosi akurat, transparan, dan sesuai dengan profil nasabah dan persyaratan regulasi.

Melalui kolaborasi lintas unit, berbagai fungsi bisnis di BRI berperan dalam mendukung implementasi keuangan inklusif serta peningkatan kualitas layanan nasabah, sejalan dengan segmentasi bisnis BRI dan kerangka kerja tata kelola produk yang berlaku.

Pengawasan Tingkat Manajemen Eksekutif dan Komite

Selain struktur tata kelola yang telah ditetapkan dan tanggung jawab fungsional di seluruh Direktorat, BRI menerapkan mekanisme pengawasan tingkat manajemen eksekutif dan komite untuk menangani isu-isu terkait Keuangan Inklusif dan Keunggulan Layanan Nasabah secara kasus per kasus, tergantung pada sifat, skala, dan profil risiko masalah tersebut. Mekanisme ini memberikan lapisan pengawasan tambahan untuk memastikan bahwa isu-isu material terkait inklusi keuangan, pembiayaan sosial, perlindungan nasabah, dan kualitas layanan dievaluasi melalui forum manajemen senior yang sesuai, tanpa mengulang proses pengambilan keputusan operasional.

Komite ESG

Komite ESG memberikan pengawasan tingkat tata kelola dengan meninjau dan memberikan panduan terkait evaluasi kebijakan, program, dan pengungkapan yang berkaitan dengan ESG yang disiapkan oleh unit kerja terkait. Komite ini dipimpin oleh Direktur Utama, mencerminkan tanggung jawab manajemen senior dalam mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan, termasuk Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Pelindungan Finansial Nasabah, ke dalam kerangka tata kelola BRI.

Topik inklusi keuangan dan literasi keuangan dipertimbangkan sebagai bagian dari dimensi sosial yang lebih luas ketika diidentifikasi sebagai material melalui peringkat ESG, umpan balik investor, atau perkembangan regulasi. Peran Komite berfokus pada memberikan panduan strategis, pertimbangan materialitas, dan tindakan tindak lanjut, tanpa terlibat dalam implementasi sehari-hari atau pengambilan keputusan operasional.

Komite Produk

BRI mengoperasikan Komite Produk dengan lingkup yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan segmen bisnis, yang bertugas mengawasi pengembangan, tinjauan, dan persetujuan produk, dan layanan perbankan. Komite Produk dipimpin langsung oleh Direktur Utama mencerminkan tanggung jawab manajemen senior dalam tata kelola produk, manajemen risiko, dan keselarasan dengan pertimbangan regulasi dan berkelanjutan. Dimana Komite Produk ini memiliki 2 kategori produk berdasarkan segmen bisnis.

1. Produk untuk segmen *Wholesale*: dimana dilakukan pengawasan pengembangan, tinjauan, dan persetujuan produk, untuk layanan perbankan pada segmen Wholesale (*Corporate* dan *Commercial*).
2. Produk untuk segmen Non *Wholesale*: dimana dilakukan pengawasan pengembangan, tinjauan, dan persetujuan produk, untuk layanan perbankan pada segmen Ultra Mikro, Mikro, Small dan Medium

Kedua komite terdiri dari anggota manajemen senior dan unit lintas fungsi, memungkinkan integrasi manajemen risiko, kepatuhan regulasi, pertimbangan perlindungan nasabah, dan aspek dampak ke dalam pengembangan produk dan manajemen siklus hidup produk. Komite Produk bertanggung jawab atas:

- meninjau dan menyetujui produk baru dan perubahan produk yang signifikan;
- menilai risiko, kepatuhan regulasi, dan pertimbangan kesesuaian nasabah; dan
- memastikan keselarasan antara pengembangan produk, strategi bisnis, dan peraturan yang berlaku.

Tata Kelola

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (RMC) memainkan peran kunci dalam mengawasi kerangka kerja tata kelola risiko secara keseluruhan di BRI. Dalam mandat ini, Komite juga mengawasi risiko yang berkaitan dengan nasabah, termasuk risiko yang timbul dari kualitas layanan, tren keluhan, dan masalah perlindungan nasabah. Melalui pengawasan ini, Komite memastikan bahwa risiko dan hasil yang berkaitan dengan nasabah tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan oleh BRI dan regulasi.

Koordinasi Lintas Grup Terkait Komunikasi

BRI melaksanakan koordinasi komunikasi lintas group sebagai bagian dari kerangka kerja tata kelola untuk memastikan bahwa kegiatan periklanan, komunikasi produk, dan pesan korporat dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Mekanisme koordinasi ini berfungsi sebagai sarana penyelarasan dan pengawasan untuk memastikan bahwa strategi komunikasi sejalan dengan persyaratan regulasi, kebijakan internal, serta prinsip perlindungan nasabah, sebagaimana diatur dalam SE.17-DIR/CSC/07/2024 tentang Komunikasi.

Koordinasi komunikasi lintas group dipimpin oleh Direktur Utama, yang mencerminkan keterlibatan Direksi dalam memastikan bahwa praktik komunikasi perusahaan dikelola secara tepat, khususnya yang berpotensi memiliki implikasi terhadap nasabah, operasional bisnis, maupun reputasi korporat. Tujuan utama koordinasi ini meliputi:

- mengoptimalkan peran dan tanggung jawab unit bisnis yang terlibat dalam aktivitas komunikasi;
- memastikan integrasi dan sinkronisasi strategi komunikasi korporat, produk, dan internal; dan
- menstandarkan proses persetujuan untuk strategi, perencanaan, dan pelaksanaan komunikasi.

Melalui koordinasi ini, BRI meninjau dan menyelaraskan berbagai inisiatif komunikasi strategis yang dapat memiliki implikasi signifikan terhadap nasabah, operasional bisnis, atau reputasi perusahaan, antara lain:

- penetapan agenda komunikasi untuk kampanye besar;
- kampanye pemasaran dan promosi berskala besar;
- iklan di media;
- pemilihan *brand ambassador*; dan
- aktivitas komunikasi lain yang dianggap material.

Sejalan dengan prinsip periklanan yang adil dan perlindungan nasabah, koordinasi komunikasi lintas group juga mempertimbangkan tingkat materialitas dan profil risiko dari konten komunikasi, khususnya apabila komunikasi tersebut:

- berkaitan dengan kampanye andalan atau *signature*;
- disetujui di tingkat Direksi;
- melibatkan anggaran yang signifikan;
- dapat memiliki dampak substansial terhadap nasabah atau hasil bisnis; atau
- berkaitan dengan isu sensitif yang dapat memengaruhi pemahaman, kepercayaan, atau pengambilan keputusan nasabah.



Tata Kelola

Kebijakan dan Regulasi Internal

BRI memiliki seperangkat kebijakan dan prosedur internal yang terstruktur yang mengatur pelaksanaan inklusi keuangan, inisiatif literasi keuangan, serta praktik perlindungan keuangan nasabah. Kebijakan-kebijakan ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menjunjung standar perbankan yang bertanggung jawab, serta memberikan kejelasan akuntabilitas di seluruh unit bisnis dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan berorientasi pada nasabah.

No	Topik	Kebijakan
1	Inklusi dan Literasi Keuangan	Surat Edaran Direksi SE.21-DIR/SCC/08/2024 tentang Pelindungan Konsumen, Buku 3 tentang Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
2	Periklanan dan Komunikasi yang Adil	Surat Edaran Direksi SE.17-DIR/CSC/07/2024 tentang Komunikasi
3	Pemasaran yang Bertanggung Jawab dan Penawaran Produk	Surat Edaran Direksi SE.21-DIR/SCC/08/2024 tentang Pelindungan Konsumen SO.41-CEX/12/2025 tentang Unit Kerja Operasional
4	Kebutuhan Kredit, Penilaian Keterjangkauan, dan Penagihan Utang yang Bertanggung Jawab	SO.11.b-CRO/06/2024 tentang Operasional Pinjaman
5	Modifikasi Pinjaman dan Proses Eskalasi Terstruktur	Surat Edaran Direksi SE.39-DIR/KRD/11/2023 tentang Pengelolaan Kredit Bermasalah

Strategi

Identifikasi Risiko dan Peluang

Sebagai bagian dari pengembangan strateginya, BRI mengidentifikasi risiko dan peluang kunci terkait keuangan inklusif dan keunggulan layanan nasabah yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil bisnis yang berkelanjutan. Identifikasi ini berfokus pada tema-tema strategis di bidang keuangan inklusif, kesesuaian produk, perlindungan nasabah, dan kemampuan nasabah. Penilaian ini mempertimbangkan dampak potensial terhadap bisnis BRI, signifikansi dampak tersebut, serta jangka waktu yang diharapkan di mana risiko dan peluang ini dapat terwujud. Untuk menilai tingkat risiko secara keseluruhan, BRI mengevaluasi setiap risiko yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan potensi dampaknya terhadap operasional, kinerja keuangan, dan reputasi perusahaan. BRI mengategorikan dampak dari berbagai risiko dan peluang terkait keberlanjutan ke dalam jangka pendek (hingga satu tahun), jangka menengah (1–5 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Klasifikasi ini selaras dengan proses pengambilan keputusan strategis Perusahaan dan menjadi dasar dalam penetapan target serta prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tema Risiko	Kategori Risiko	Deskripsi	Potensi Dampak terhadap Model Bisnis & Pengambilan Keputusan Strategis	Potensi Dampak Finansial	Tingkat Dampak	Horizon Waktu Dampak
Desain Produk dan Kesesuaian Nasabah	Risiko Kredit	Ketidaksesuaian fitur produk dengan kapasitas atau kebutuhan keuangan nasabah dapat menyebabkan penyaluran kredit yang tidak tepat dan meningkatkan risiko portofolio.	- Melemahnya efektivitas analisis kredit dan meningkatnya risiko portofolio. - Pengetatan kebijakan kredit dan batas toleransi risiko	- Peningkatan pinjaman bermasalah (NPL) dan penurunan kualitas portofolio pinjaman - Peningkatan pencadangan kerugian kredit serta biaya restrukturisasi	Tinggi	Jangka Menengah
	Risiko Strategis	Produk yang tidak selaras dengan kebutuhan atau kemampuan finansial nasabah dapat menurunkan keterlibatan nasabah dan meningkatkan rekening tidak aktif.	- Menurunnya relevansi produk bagi segmen sasaran. - Melemahnya strategi akuisisi dan retensi nasabah.	- Penurunan keterlibatan nasabah dapat melemahkan efektivitas strategi akuisisi dan retensi nasabah - Pertumbuhan simpanan dan CASA yang lebih rendah akibat meningkatnya rekening tidak aktif	Menengah-Tinggi	Jangka Pendek
Titik Akses terhadap Layanan Keuangan	Risiko Strategis	Keterbatasan akses layanan keuangan di wilayah kurang terlayani akibat terbatasnya saluran distribusi dapat menghambat mobilisasi dana dan peluang pertumbuhan.	- Menghambat efektivitas distribusi layanan dan implementasi strategi inklusi keuangan. - Menurunkan daya saing dibandingkan institusi dengan jaringan distribusi lebih luas.	- Pertumbuhan CASA lebih lambat akibat keterbatasan mobilisasi dana. - Pertumbuhan kredit lebih rendah, khususnya pada segmen mikro dan UMKM.	Tinggi	Jangka Menengah
	Risiko Operasional	<i>Fraud</i> pada berbagai saluran akses perbankan dapat menimbulkan kerugian finansial dan gangguan operasional.	- Melemahnya efektivitas pengendalian operasional. - Meningkatnya kompleksitas pengelolaan jaringan agen dan kanal digital.	- Kerugian finansial secara langsung akibat insiden <i>fraud</i> - Peningkatan biaya operasional, investigasi dan pemulihan	Tinggi	Jangka Pendek
Pemberdayaan Nasabah dan Edukasi Keuangan	Risiko Kredit	Rendahnya literasi keuangan nasabah dapat meningkatkan kerentanan terhadap penipuan atau penyalahgunaan layanan keuangan akibat keterbatasan pemahaman terhadap produk dan transaksi perbankan.	- Melemahnya penerapan prinsip kredit yang bertanggung jawab dan meningkatnya kerentanan portofolio. - Paparan risiko lebih tinggi pada segmen ritel dan mikro.	- Peningkatan keterlambatan pembayaran dan restrukturisasi pinjaman. - Peningkatan pencadangan kerugian kredit dan penurunan kualitas portofolio.	Menengah-Tinggi	Jangka Menengah
	Risiko Operasional	Praktik perlindungan konsumen atau mekanisme pengaduan yang tidak efektif dapat meningkatkan pengaduan nasabah dan inefisiensi operasional.	- Peningkatan pengaduan nasabah terkait transaksi atau penggunaan produk keuangan. - Meningkatnya kebutuhan penanganan komplain dan dukungan layanan nasabah.	- Peningkatan biaya operasional terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa nasabah - Potensi sanksi regulator serta biaya pemulihan	Menengah	Jangka Pendek
Pelindungan Keuangan Nasabah	Risiko Reputasi	Kualitas layanan atau praktik perlindungan nasabah yang tidak memadai dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan merugikan reputasi.	- Menurunnya kepercayaan nasabah dan reputasi merek. - Melemahnya strategi retensi dan hubungan dengan nasabah.	- Penurunan simpanan dan volume transaksi. - Penurunan pendapatan berbasis komisi dan <i>customer lifetime value</i>.	Menengah-Tinggi	Jangka Pendek

Strategi

BRI mengidentifikasi peluang bisnis yang terkait dengan keuangan inklusif dan keunggulan layanan nasabah sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan, memperkuat kapabilitas nasabah, meningkatkan kualitas layanan, serta mempertimbangkan dampak produk terhadap nasabah ^[F.28]. Peluang ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan yang inklusif dan berorientasi pada nasabah, perluasan distribusi layanan perbankan melalui kanal fisik, berbasis agen, dan digital, serta meningkatnya kesadaran terhadap literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Dengan memanfaatkan perkembangan tersebut, BRI dapat memperkuat akuisisi nasabah, memperdalam hubungan dengan segmen mikro, ritel, dan masyarakat yang kurang terlayani, serta meningkatkan daya saing jangka panjang. Hal ini juga didukung dukungan terhadap produk yang terlihat dari tidak adanya penarikan atau pembatalan produk oleh otoritas keuangan ^[F.29].

Potensi dampak dari peluang tersebut dinilai berdasarkan berbagai horizon waktu, yaitu jangka pendek (hingga satu tahun), jangka menengah (1–5 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Pendekatan ini mencerminkan bagaimana peningkatan relevansi produk, aksesibilitas layanan keuangan, kapabilitas nasabah, dan keunggulan layanan dapat mendorong pertumbuhan portofolio yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan nasabah, serta mendukung diversifikasi sumber pendapatan.

Tema Peluang	Deskripsi Peluang	Dampak terhadap Model Bisnis & Pengambilan Keputusan Strategis	Potensi Dampak Finansial	Tingkat Dampak	Horizon Waktu Dampak
Desain Produk dan Kesesuaian Nasabah	Meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan yang inklusif dan relevan di berbagai segmen nasabah, termasuk masyarakat yang kurang terlayani dan pasar yang sedang berkembang.	- Pengembangan produk keuangan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah. - Penguatan strategi akuisisi nasabah pada segmen mikro, ritel, dan masyarakat yang kurang terlayani. - Peningkatan relevansi produk yang mendukung pertumbuhan portofolio secara berkelanjutan.	- Peningkatan akuisisi nasabah. - Penguatan sumber pendanaan berbiaya rendah (CASA). - Peningkatan volume penyaluran kredit dan transaksi.	Menengah-Tinggi	Jangka Pendek
Titik Akses terhadap Layanan Keuangan	Semakin luasnya ketersediaan kanal layanan fisik, berbasis agen, dan digital di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani atau terpencil.	- Perluasan distribusi layanan keuangan melalui kanal fisik, agen, dan digital. - Penguatan implementasi strategi inklusi keuangan di wilayah yang kurang terlayani. - Peningkatan akuisisi nasabah melalui perluasan titik akses layanan.	- Pertumbuhan basis nasabah dan mobilisasi dana. - Peningkatan pendapatan berbasis transaksi dari kanal agen. - Peningkatan peluang penyaluran kredit pada segmen mikro dan UMKM.	Tinggi	Jangka Menengah
Pemberdayaan Nasabah dan Edukasi Keuangan	Meningkatnya kebutuhan terhadap program edukasi keuangan, literasi digital, dan penguatan kapabilitas nasabah untuk mendorong penggunaan produk keuangan secara bertanggung jawab serta mendukung kesejahteraan finansial jangka panjang.	- Penguatan praktik penyaluran kredit yang bertanggung jawab melalui peningkatan kapabilitas keuangan nasabah. - Peningkatan adopsi layanan perbankan digital dan produk keuangan. - Peningkatan efektivitas strategi <i>cross-selling</i> di berbagai segmen nasabah.	- Peningkatan frekuensi transaksi dan penggunaan layanan perbankan digital. - Pertumbuhan pendapatan berbasis komisi dari layanan digital (BRI^{mo} dan kanal lainnya). - Penguatan pertumbuhan pendapatan jangka panjang. - Peningkatan kualitas portofolio melalui perilaku pembayaran yang lebih baik.	Menengah-Tinggi	Jangka Panjang
Keunggulan Layanan Nasabah	Penguatan layanan yang berorientasi pada nasabah serta sistem penyelesaian pengaduan yang proaktif untuk meningkatkan pengalaman dan kepercayaan nasabah secara keseluruhan.	- Penguatan kepercayaan nasabah serta hubungan jangka panjang. - Peningkatan kualitas layanan yang mendukung strategi retensi nasabah. - Peningkatan kualitas layanan berbasis analisis data pengaduan nasabah.	- Peningkatan retensi nasabah dan <i>customer lifetime value</i>. - Peningkatan saldo simpanan dan volume transaksi. - Pertumbuhan pendapatan berbasis komisi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan.	Menengah-Tinggi	Jangka Panjang

Strategi

Strategi untuk Mengatasi Risiko dan Memanfaatkan Peluang

Strategi BRI dirancang untuk mengatasi risiko utama dan memanfaatkan peluang yang timbul dari perluasan keuangan inklusif dan keunggulan layanan nasabah. BRI fokus memperluas akses terhadap layanan keuangan, menyelaraskan produk dan layanan transaksi dengan kebutuhan nasabah, serta meningkatkan kemampuan nasabah melalui inisiatif perlindungan nasabah dan pemberdayaan yang kuat. Prioritas strategis ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan kualitas portofolio, dan penciptaan nilai jangka panjang di seluruh segmen nasabah.

Strategi	Risiko/Peluang Utama yang Diatasi	Kegiatan Utama	Dampak Finansial yang Diharapkan		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Mengembangkan Produk dan Layanan yang Berorientasi pada Nasabah	- Risiko ketidakcocokan produk dengan nasabah dan utang berlebihan - Risiko kualitas kredit dan kinerja portofolio - Kesempatan untuk memperluas pembiayaan inklusif dan sosial di berbagai segmen	- Merancang produk yang sesuai dengan profil nasabah, aktivitas ekonomi, dan siklus hidup - Mengintegrasikan desain produk yang bertanggung jawab ke dalam segmen mikro, konsumen, UMKM, dan grosir	Peningkatan adopsi dan pemanfaatan produk yang didorong oleh kesesuaian yang lebih baik antara produk dan kebutuhan nasabah	Pertumbuhan dalam pembiayaan, pendapatan berbasis biaya, dan peningkatan kualitas portofolio melalui desain produk yang bertanggung jawab	Aliran pendapatan yang beragam dan tangguh di seluruh segmen nasabah
Memperluas Titik Akses dan Jangkauan	- Risiko eksklusi keuangan akibat keterbatasan akses fisik atau digital - Risiko operasional dan layanan di saluran terdistribusi - Kesempatan untuk meningkatkan jangkauan di daerah yang kurang terlayani dan daerah terpencil	- Memperluas model tanpa cabang dan berbasis agen (BRILink Agents) - Peningkatan platform onboarding digital dan transaksi untuk meningkatkan aksesibilitas dan keandalan	Peningkatan pendaftaran nasabah dan aktivasi akun di seluruh saluran fisik dan digital	Pertumbuhan volume transaksi dan saldo CASA didorong oleh peningkatan aksesibilitas dan penggunaan	Perkembangan pasar yang berkelanjutan dan penguatan nilai merek melalui jangkauan nasabah yang luas dan inklusif
Peningkatan Dukungan Non-Keuangan dan Kemampuan Nasabah	- Risiko rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan kemampuan nasabah - Risiko over-indebtedness dan pemanfaatan kredit yang kurang optimal - Risiko kualitas kredit dan kinerja portofolio - Kesempatan untuk memperdalam hubungan dan mendukung perkembangan nasabah	Pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan dukungan non-keuangan	Pengurangan risiko regulasi, kepatuhan, dan reputasi	Peningkatan kepuasan dan retensi nasabah	Pendapatan stabil didukung oleh hubungan nasabah yang terpercaya
Penguatan Pelindungan Finansial Nasabah	- Risiko ketidakpuasan nasabah dan ketidakkonsistenan layanan - Risiko sanksi regulator akibat ketidakpatuhan terhadap standar perlindungan nasabah - Peluang untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, retensi, serta potensi <i>cross-selling</i>	Penerapan praktik perlindungan finansial nasabah secara end-to-end, yang mencakup desain produk yang bertanggung jawab, pemasaran yang adil dan komunikasi yang transparan, penyaluran kredit yang prudent, serta penyelesaian pengaduan yang efektif	Penurunan eskalasi kasus serta peningkatan indikator kepatuhan terhadap regulasi	Peningkatan kepuasan dan tingkat retensi nasabah serta pertumbuhan CASA	Penguatan nilai merek serta sumber pendapatan yang lebih terdiversifikasi dan stabil yang didorong oleh hubungan kepercayaan dengan nasabah

Strategi

Inklusi Keuangan sebagai Respons Strategis

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperluas inklusi keuangan; namun, kesenjangan struktural masih tetap ada. Sekitar 20% dari populasi usia produktif, setara dengan sekitar 43 juta orang, masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan penyebaran geografis di daerah pedesaan dan terpencil, tetapi juga kendala yang persisten dalam literasi keuangan, keterjangkauan, dan kesesuaian produk bagi komunitas yang kurang terlayani.

Dalam konteks ini, inklusi keuangan mewakili baik sebagai tuntutan pembangunan nasional maupun respons strategis bagi BRI. Inklusi keuangan diposisikan sebagai prioritas strategis dalam kerangka tata kelola BRI, terintegrasi ke dalam kebijakan institusional Bank, mekanisme pengawasan, dan strategi bisnis. BRI menyadari bahwa pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia bergantung pada perluasan akses yang adil terhadap layanan keuangan yang bertanggung jawab, terutama bagi segmen ultra-mikro, mikro, dan berpenghasilan rendah.

BRI mengimplementasikan mandat ini melalui strategi terstruktur berbasis ekosistem. Bank mengembangkan produk dan layanan yang berorientasi pada nasabah dan disesuaikan dengan profil sosio ekonomi yang berbeda, sekaligus memperluas titik akses dan jangkauan layanan melalui saluran fisik dan digital. Pendekatan terintegrasi ini memastikan bahwa inklusi tidak hanya terbatas pada kepemilikan rekening, tetapi juga mencakup penggunaan yang bermakna, perkembangan nasabah, dan ketahanan finansial jangka panjang. Melalui pendekatan ini, BRI menciptakan titik masuk kritis ke sistem keuangan formal bagi populasi yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan, membangun basis nasabah yang luas dan beragam mencakup segmen ultra-mikro, UMKM, dan ritel massal, serta menanamkan dasar untuk hubungan keuangan berbasis kepercayaan jangka panjang yang memfasilitasi mobilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai hasilnya, BRI berkontribusi sekitar 64,5%, setara dengan sekitar 80,1% dari total inklusi keuangan nasional, menunjukkan perannya yang sentral dalam mendorong inklusi keuangan Indonesia. Hasil-hasil ini menunjukkan bagaimana komitmen pada tingkat tata kelola diimplementasikan menjadi eksekusi strategis dan dampak yang dapat diukur. Berlandaskan fondasi strategis tersebut, bagian berikut ini menguraikan inisiatif BRI dalam mengembangkan produk dan layanan yang berorientasi pada nasabah serta memperluas titik akses dan jangkauan untuk lebih mempercepat hasil keuangan inklusif.

Indikator Utama



*) Proporsi BRI Golden CIF dibandingkan dengan populasi yang memenuhi syarat inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2025 (217,71 juta) (BPS 2025)

Strategi

Pengembangan Produk dan Layanan Berorientasi Nasabah [GRI G4 FS15] [FN-CB-240a.3]

BRI menerapkan pendekatan yang berorientasi pada nasabah dalam pengembangan produk di seluruh segmen nasabah, mulai dari nasabah mikro dan ritel hingga UMKM, komersial, dan korporasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tetap relevan, mudah diakses, serta selaras dengan kebutuhan, kapasitas, dan aktivitas ekonomi nasabah, sekaligus mendukung pertumbuhan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sejalan dengan Pedoman Manajemen Produk BRI (SE.30-DIR/PPM/11/2024 dan SE.30.a-DIR/PPM/11/2024), pengembangan produk mengikuti siklus hidup produk secara menyeluruh yang mencakup perencanaan strategis, pengembangan, kesiapan peluncuran, pemasaran dan komunikasi, pemantauan berkelanjutan, serta peningkatan atau penghentian produk apabila diperlukan. Siklus ini dirancang untuk menghadirkan proposisi nilai yang jelas, perjalanan nasabah yang efisien, serta produk yang ditawarkan secara bertanggung jawab.

Seluruh produk melalui proses penilaian dan persetujuan yang terstruktur melalui mekanisme tata kelola yang telah ditetapkan oleh BRI, termasuk melalui Komite Produk terkait atau Product Owner yang ditunjuk. Penilaian tersebut mempertimbangkan kesesuaian produk dengan profil nasabah, prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, kelayakan finansial, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Setelah diluncurkan, produk dan layanan terus dipantau dan ditinjau menggunakan umpan balik nasabah serta data kinerja untuk memastikan bahwa produk dan layanan tersebut tetap sesuai, aman, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Masukan terkait kebutuhan nasabah diperoleh melalui berbagai kanal, termasuk pemantauan keterlibatan nasabah, survei kepuasan, pemantauan operasional layanan, serta masukan yang diperoleh melalui interaksi layanan maupun proses penanganan pengaduan nasabah.

Produk Tabungan



2025
135,24 juta Rekening

Simpedes

Simpedes merupakan produk andalan dalam portofolio produk BRI, karena dirancang khusus untuk mempromosikan inklusi keuangan bagi populasi yang kurang terlayani. Dengan menawarkan saldo minimum rendah, persyaratan administratif minimal, dan akses luas melalui jaringan cabang BRI di tingkat desa, Simpedes memungkinkan penduduk pedesaan dan berpendapatan rendah untuk menabung dengan aman dan berpartisipasi dalam sistem keuangan formal.

Segmen Sasaran: Individu Berpenghasilan Rendah, Penduduk Pedesaan



2025
85,40 ribu Rekening

Simpedes TKI

Simpedes TKI adalah rekening tabungan yang dirancang untuk pekerja migran Indonesia, menyediakan saluran aman dan mudah diakses untuk mengelola penghasilan, tabungan, dan remitansi saat bekerja di luar negeri. Produk ini menawarkan persyaratan rekening yang terjangkau dan akses melalui jaringan layanan domestik dan internasional BRI, mendukung inklusi keuangan bagi pekerja migran dan keluarga mereka dengan memfasilitasi pengelolaan uang yang lebih aman dan koneksi yang lebih kuat ke sistem keuangan formal.

Segmen Sasaran: Pekerja Migran



2025
21,18 juta Rekening

Britama

Britama adalah produk tabungan ritel BRI yang dirancang untuk mendukung kebutuhan perbankan sehari-hari, menawarkan persyaratan masuk yang terjangkau, kartu debit untuk transaksi, dan akses melalui perbankan digital BRImo serta jaringan cabang dan ATM BRI yang luas di seluruh Indonesia, termasuk daerah pedesaan.

Segmen Sasaran: Individu dengan pendapatan rendah hingga menengah



2025
2,37 juta Rekening

BRIJunio

BRIJunio adalah rekening tabungan yang dirancang untuk anak-anak dan remaja berusia hingga 17 tahun, bertujuan untuk memperkenalkan literasi keuangan dasar dan kebiasaan menabung sejak dini. Produk ini menawarkan persyaratan masuk yang rendah, fitur pengawasan orang tua, dan akses melalui cabang BRI.

Segmen Sasaran: Anak-anak dan remaja, didukung oleh orang tua



2025
723,36 ribu Rekening

Britama Bisnis

Britama Bisnis adalah rekening tabungan transaksional yang dirancang untuk mendukung manajemen kas bisnis, menawarkan batas transaksi yang lebih tinggi, beberapa penandatanganan yang berwenang, dan integrasi dengan layanan pembayaran dan perbankan digital untuk memudahkan operasional bisnis sehari-hari.

Segmen Sasaran: UMKM

Strategi

Integrasi Umpun Balik Nasabah dalam Pengembangan Produk dan Layanan

Untuk mengelola inisiatif perbaikan secara sistematis, khususnya yang berkaitan dengan keluhan nasabah yang berulang, BRI menerapkan mekanisme Service Improvement Management sesuai dengan SOP SO.24-CEX/09/2025 tentang Layanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Nasabah. Melalui mekanisme ini, permasalahan layanan yang berulang maupun insiden operasional yang berpotensi menunjukkan adanya isu sistemik dianalisis oleh Service Improvement Team melalui analisis akar penyebab (*root cause analysis*) yang terstruktur. Proses tersebut mencakup investigasi, penentuan prioritas, penyusunan rencana resolusi, serta pemantauan implementasi perbaikan. Tanggung jawab antar unit kerja dikoordinasikan menggunakan matriks RASCI (Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed), yaitu model tata kelola yang digunakan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam suatu aktivitas, proyek, atau proses, sehingga memastikan akuntabilitas yang jelas dalam proses investigasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tindakan perbaikan. Wawasan yang dihasilkan dari proses tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat proses layanan, prosedur operasional, serta pengembangan dan penyempurnaan produk dan layanan perbankan, sehingga pengembangan produk dan layanan didasarkan pada pengalaman nyata nasabah serta wawasan operasional. Dengan mengintegrasikan umpan balik nasabah ke dalam proses peningkatan berkelanjutan, BRI memperkuat komitmennya dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang berorientasi pada nasabah agar tetap relevan, bertanggung jawab, dan selaras dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Produk Pinjaman (FN-CB-240a.2)

KUR		
KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil
Jumlah Debitur 2025	Jumlah Debitur 2025	Jumlah Debitur 2025
0,03 juta	7,98 juta	0,21 juta
KUR adalah pembiayaan yang diberikan kepada individu, entitas bisnis, atau kelompok bisnis yang produktif dan layak dengan jaminan tambahan yang terbatas atau tidak memadai, ditawarkan dengan suku bunga yang menguntungkan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil serta inklusi keuangan.		
Segmen Sasaran: Usaha Mikro dan Kecil pada tahap awal bisnis		

- KUR Super Mikro:** Pembiayaan bagi nasabah baru, khususnya pekerja terdampak PHK dan ibu rumah tangga dengan usaha produktif, dengan plafon hingga Rp10 juta.
- KUR Mikro:** Pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, termasuk usaha rintisan, dengan plafon Rp10 juta – Rp100 juta untuk mendukung pengembangan usaha produktif.
- KUR Kecil:** Pembiayaan bagi usaha kecil yang telah berkembang dengan kebutuhan modal lebih besar, dengan plafon di atas KUR Mikro untuk mendukung ekspansi usaha.

Kupedes
2025
3,93 juta Debitur
Kupedes adalah pinjaman umum, individu, dan selektif yang diberikan kepada usaha mikro yang memenuhi syarat dengan suku bunga komersial (non-subsidi), bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan bisnis.
Segmen Sasaran: Usaha mikro

Asuransi Mikro

AMKKM
2025
13,95 juta polis
AMKKM adalah produk yang difasilitasi melalui perusahaan anak BRI yang dirancang sebagai jaring pengaman sosial bagi peminjam mikro dengan melindungi keluarga dari beban keuangan pinjaman yang belum dilunasi ketika peminjam meninggal dunia atau menjadi cacat.
Segmen Sasaran: Usaha mikro

Melalui berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk berbagai segmen nasabah, BRI terus mendukung akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp648,3 triliun kepada segmen mikro dan Rp240,8 triliun kepada segmen UMKM, yang mencerminkan kontribusi signifikan kedua segmen tersebut dalam portofolio pembiayaan BRI. Sejalan dengan fokus tersebut, BRI juga berhasil mencapai target pertumbuhan kredit UMKM sebesar 5,90%, yang merupakan bagian dari KPI kolektif Direksi.

KPRS (Kredit Perumahan Bersubsidi)
2025
118,12 ribu Debitur
KPRS (Kredit Perumahan Bersubsidi) adalah pinjaman perumahan yang didukung oleh bantuan pemerintah, seperti subsidi suku bunga atau dukungan uang muka, untuk membuat kepemilikan rumah lebih terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Sasaran Terpisah: Rumah tangga berpenghasilan rendah

PNM Mekaar
2025
4,18 juta Debitur perempuan
PNM Mekaar adalah program mikrofinansial berbasis kelompok yang menyediakan pinjaman modal kerja tanpa jaminan disertai bimbingan dan pengembangan kapasitas untuk mendukung kegiatan yang menghasilkan pendapatan.
Segmen Sasaran: Wirausaha perempuan berpenghasilan rendah

Produk Pinjaman Pegadaian
2025
18,4 juta Pelanggan
Produk Pinjaman Pegadaian menyediakan produk keuangan gadai dan non-gadai yang dirancang untuk memberikan solusi likuiditas jangka pendek yang bertanggung jawab dan transparan. Melalui penawaran produknya, Pegadaian menerapkan struktur harga dan syarat yang jelas, struktur pembiayaan proporsional, standar perlindungan konsumen, dan pengawasan regulasi untuk memastikan nasabah dapat mengakses layanan keuangan tanpa terpapar utang berlebihan atau praktik paksa.
Segmen Sasaran: Individu berpenghasilan rendah

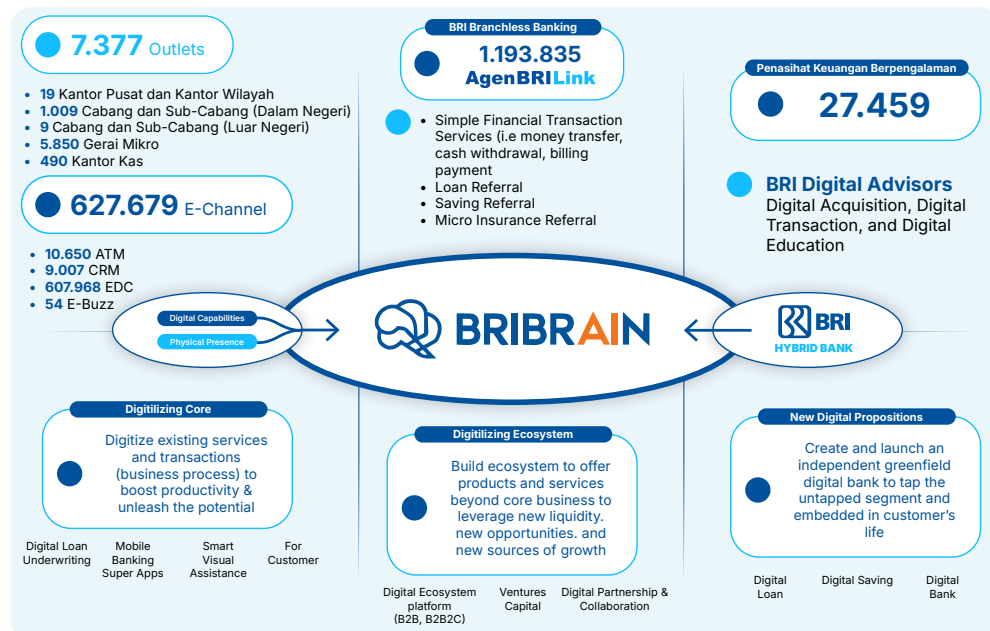
Asuransi Rumahku/Kerusakan Tempat Usaha
2025
17,51 juta polis
Asuransi Rumahku/Kerusakan Tempat Usaha adalah asuransi mikro berbiaya rendah yang melindungi rumah dan lokasi usaha mikro dari risiko tertentu, mendukung perlindungan aset dan ketahanan finansial bagi UMKM.
Segmen Sasaran: Usaha mikro

Strategi

Memperluas Titik Akses dan Jangkauan [GRI 4 FS13]

BRI memperluas akses ke layanan keuangan melalui model bisnis bank hibrida yang menggabungkan jaringan distribusi fisik yang luas dengan kemampuan digital yang dapat diskalakan. Pendekatan ini memungkinkan BRI untuk menjangkau segmen nasabah yang beragam di berbagai wilayah geografis, sekaligus tetap menjaga keandalan, konsistensi, dan kepercayaan layanan seiring dengan perluasan akses. Model hibrida menggabungkan jaringan cabang dan outlet mikro BRI di seluruh Indonesia, inisiatif perbankan tanpa cabang, dan distribusi berbasis agen dengan saluran digital yang mendukung pendaftaran, transaksi, dan penyampaian layanan. Strategi akses terintegrasi ini dirancang tidak hanya untuk menghilangkan hambatan fisik dan geografis, tetapi juga untuk memastikan nasabah mengalami standar layanan yang konsisten di semua titik kontak.

Inisiatif perbankan tanpa cabang, agen BRILink, memperluas jangkauan BRI ke komunitas yang kurang terlayani dan terpencil dengan menyediakan layanan keuangan dasar lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari nasabah. Pada saat yang sama, saluran digital seperti perbankan mobile, e-channels, ATM, EDC, dan layanan yang didukung CRM memfasilitasi akses yang scalable dan aktivitas transaksi yang lebih tinggi di segmen ritel, mikro, UMKM, dan nasabah secara luas. Secara paralel, BRI memperkuat akses yang didukung manusia melalui penasihat keuangan yang terlatih dan berpengalaman, memastikan bahwa nasabah yang memerlukan bimbingan menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Keseimbangan antara kehadiran fisik, inovasi digital, dan interaksi manusia mendukung akses inklusif serta memperkuat kualitas layanan dan keterlibatan nasabah yang bertanggung jawab.



Agen BRILink: Memperluas Jangkauan Melalui Kemitraan Berbasis Komunitas

Sebagai bagian dari strateginya untuk mempertahankan dan memperluas akses ke layanan keuangan di tengah perubahan struktural pada jaringan fisiknya, BRI memperkuat saluran distribusi alternatif untuk melengkapi proses rasionalisasi bertahap kantor cabang. BRI menerapkan model layanan hibrida yang mengintegrasikan kapabilitas digital dengan titik layanan fisik berbasis komunitas, tanpa bergantung semata pada kehadiran fisik melalui jaringan kantor cabang tradisional, sehingga memastikan jangkauan layanan yang luas di berbagai wilayah dan segmen nasabah. Salah satu pilar utama strategi ini adalah perluasan jaringan AgenBRILink sebagai saluran distribusi terakhir. AgenBRILink didasarkan pada model kemitraan berbasis komunitas, di mana nasabah individu berkolaborasi dengan BRI sebagai agen independen untuk menyediakan layanan perbankan dasar dan mikrofinansial di komunitas lokal mereka, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan kurang terlayani di mana akses ke cabang mungkin terbatas. Model berbasis komunitas ini memungkinkan BRI untuk memperluas jangkauan layanan tanpa mengorbankan aksesibilitas, kelangsungan layanan, atau tujuan inklusi.

Melalui kemitraan ini, AgenBRILink memfasilitasi pembukaan rekening, penarikan tunai, pembayaran tagihan, transaksi keuangan digital, dan rujukan calon peminjam, bertindak sebagai saluran terakhir yang kritis bagi populasi yang kurang terlayani dan tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Selain meningkatkan akses ke layanan keuangan formal, model AgenBRILink menciptakan nilai ekonomi bersama bagi komunitas lokal. Agen memperoleh biaya transaksi yang berfungsi sebagai sumber penghasilan tambahan, sekaligus mendukung ekosistem mikrofinansial BRI dengan mengidentifikasi dan merujuk calon nasabah mikro yang kebutuhan pembiayaannya sesuai dengan kerangka kerja pinjaman bertanggung jawab BRI. Pendekatan berbasis kemitraan ini memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan jangkauan ke segmen yang kurang terlayani secara finansial, dan mendukung pertumbuhan mikrofinansial yang berkelanjutan melalui pemberdayaan komunitas dan penyediaan layanan yang berakar di tingkat lokal.



Memperluas Akses Melalui Saluran Digital

Melengkapi upaya jangkauan fisik berbasis komunitasnya, BRI juga memperkuat akses digital sebagai pilar utama strategi akses dan inklusi. Melalui portofolio platform digital yang disesuaikan dengan segmen nasabah yang berbeda, BRI memperluas jangkauan layanan, kenyamanan, dan keterlibatan sepanjang siklus keuangan. Senyum Mobile mendukung nasabah ultra-mikro dengan menyediakan titik akses digital yang sederhana untuk tabungan, investasi emas, serta pembiayaan berbasis referal di seluruh ekosistem BRI; Sabrina, *chatbot* berbasis AI milik BRI, meningkatkan akses terhadap informasi dan dukungan nasabah; BRImo melayani nasabah ritel dengan kapabilitas perbankan digital *end-to-end*; sementara Qlola menyediakan layanan pengelolaan kas dan transaksi terintegrasi bagi nasabah korporasi serta nasabah yang terhubung dalam ekosistem bisnis. *Platform-platform* tersebut mendukung upaya BRI untuk memperluas akses secara efisien, mengurangi ketergantungan pada titik layanan fisik, serta menghadirkan layanan keuangan inklusif yang responsif terhadap beragam kebutuhan individu, pelaku usaha mikro, dan pelaku usaha.

Strategi

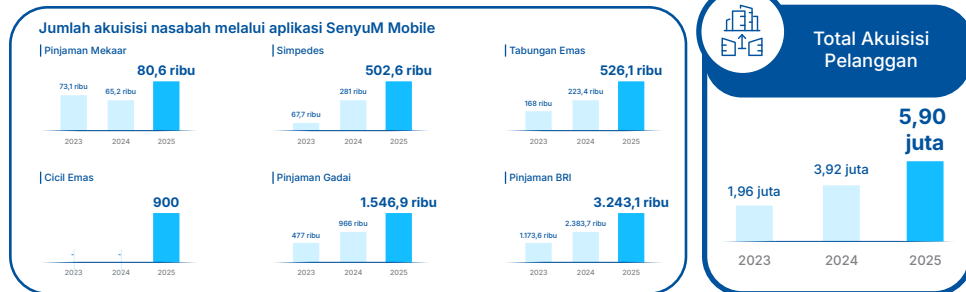
Akses Digital



SenyuM Mobile

SenyuM Mobile adalah platform akuisisi bersama yang dirancang untuk nasabah ultra-mikro, memudahkan akses ke produk dan layanan keuangan yang disesuaikan, termasuk tabungan Simpedes UMi, layanan investasi emas, dan pembiayaan berbasis rujukan di PNM Mekaar, Pegadaian, dan BRI.

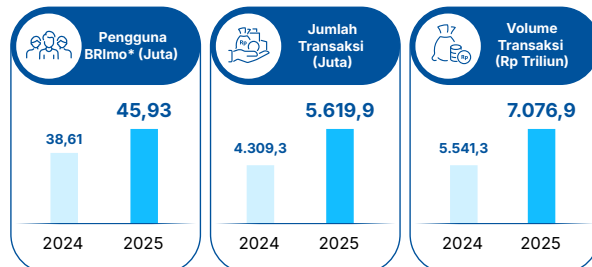
Segmen Target: Nasabah Ultra-Mikro



BRI Mo

BRI Mo adalah aplikasi perbankan digital BRI yang memungkinkan nasabah mengakses layanan tabungan, pembayaran, transfer, dan layanan perbankan lainnya melalui perangkat seluler. Dengan menyediakan akses yang nyaman, biaya rendah, dan 24/7 ke layanan keuangan, BRI Mo mendukung inklusi keuangan yang lebih luas, terutama bagi nasabah yang mungkin menghadapi hambatan geografis, waktu, atau mobilitas dalam mengakses saluran perbankan fisik.

Segmen Target: Nasabah ritel dan pasar massal



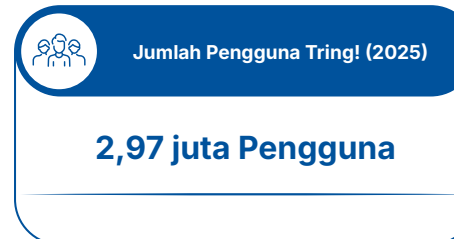
*Pengguna BRI Mo berdasarkan jumlah rekening



Tring!

Tring! merupakan platform layanan digital/aplikasi Pegadaian yang memungkinkan nasabah mengakses layanan Pegadaian secara online, khususnya produk terkait emas dan solusi pembiayaan, seperti Gadai Tabungan Emas (menggunakan tabungan emas untuk memperoleh likuiditas secara cepat) serta berbagai layanan emas digital lainnya.

Segmen Target: Nasabah ritel massal (terutama individu yang mencari solusi investasi emas yang terjangkau dan fleksibel)



Raya – Digital Bank

Raya – Digital Bank merupakan aplikasi mobile banking Bank Raya untuk kebutuhan perbankan digital sehari-hari (misalnya pengelolaan rekening, transfer/pembayaran, serta berbagai transaksi digital lainnya) sebagai bagian dari layanan perbankan digital Bank Raya.

Segmen Target: Nasabah ritel yang aktif secara digital dan pelaku usaha



Strategi

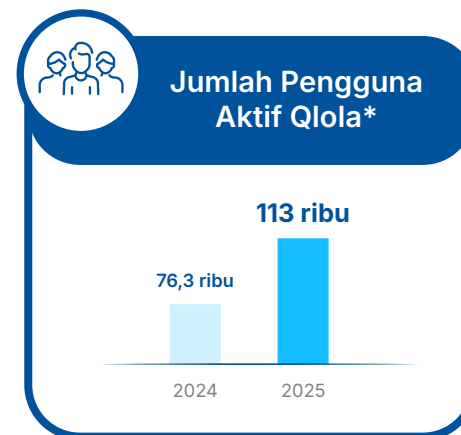
Layanan Digital



Qlola

Qlola adalah aplikasi perbankan digital super dari BRI yang dirancang untuk membantu nasabah mengelola faktur dan mengoptimalkan rantai pasokan. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan BRI dengan sistem pembayaran dan fasilitas pinjaman. Fitur Manajemen Rantai Pasokan (SCM) dalam Qlola oleh BRI telah menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan utama, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan mitra UMKM dengan lebih mudah.

Segmen Target: Klien Korporat, Komersial, dan UMKM



*) Pengguna Qlola termasuk Qlola Cash Management dan Qlola IB.

**) Volume transaksi berasal dari Qlola Cash Management, CMS, dan Qlola IB.



Sabrina

Sabrina adalah asisten virtual berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh BRI untuk memudahkan layanan dan memberikan informasi kepada nasabah dan calon nasabah. Sabrina dapat diakses dengan mudah melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Sabrina membantu nasabah dalam memperoleh informasi tentang produk, layanan, promosi, reservasi layanan cabang, penonaktifan kartu debit, konsultasi investasi, lokasi kantor cabang BRI, ATM, atau AgenBRILink terdekat, serta rekomendasi *merchant*. Asisten virtual ini juga terintegrasi dengan BRImo, memungkinkan penyediaan informasi terkait transaksi perbankan, saldo rekening, dan laporan rekening.

Pada tahun 2025, interaksi dengan Sabrina mencapai 45% dari total 21.535.701 interaksi di seluruh saluran Contact BRI, meningkat 5% dibandingkan tahun 2024. Tingkat kegagalan, atau persentase pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Sabrina, terus menurun, dari 9,33% pada tahun 2024 menjadi 4% pada tahun 2025. Hal ini telah menjadikan Sabrina sebagai saluran komunikasi utama untuk Contact BRI. Menurut survei kepuasan nasabah, 87,37% pengguna melaporkan merasa puas, meningkat dari 80,50% pada tahun 2024.

Segmen Target: Semua nasabah dan calon nasabah

	2024	2025
Pengguna Sabrina	4,31 juta	5,85 juta

Strategi

Literasi Keuangan [GRI G4 FS16]

Sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen untuk mendorong keuangan inklusif, BRI menyadari bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia—yang tercatat sebesar 66,46% pada tahun 2025—masih menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam pemahaman keuangan dan pemanfaatan produk keuangan secara bertanggung jawab. Kondisi ini menegaskan peran penting lembaga keuangan dalam memperkuat kapabilitas nasabah, tidak sekadar melalui perluasan akses terhadap produk keuangan.

Pendekatan literasi keuangan BRI oleh karena itu disusun melalui tiga dimensi yang terintegrasi. Pertama, program literasi dan pemberdayaan keuangan yang berfokus pada nasabah. BRI menyelenggarakan berbagai inisiatif literasi dan penguatan kapasitas secara terstruktur yang bertujuan meningkatkan kapabilitas usaha, disiplin keuangan, dan kesiapan digital, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Melalui MSME Empowerment Framework yang terintegrasi, BRI menyelaraskan kesiapan kewirausahaan dengan intervensi literasi yang tepat, integrasi ekosistem, serta jalur pembiayaan yang progresif. Pendekatan ini memastikan bahwa inklusi keuangan berjalan seiring dengan peningkatan kapabilitas dan keberlanjutan kelayakan pembiayaan (bankability) dalam jangka panjang.

Kedua, praktik pemasaran yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. BRI memperkuat literasi keuangan tidak hanya melalui program edukasi, tetapi juga melalui komunikasi produk dan praktik penjualan yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup pengungkapan yang jelas mengenai fitur produk, harga, syarat dan ketentuan, serta risiko yang terkait; memastikan kesesuaian produk dengan profil nasabah; serta penerapan prinsip pembiayaan yang bertanggung jawab untuk mencegah risiko over-indebtedness dan praktik mis-selling. Dengan memperkuat praktik pemasaran dan pemberian advis yang beretika, BRI mendukung pengambilan keputusan nasabah yang lebih terinformasi serta pemanfaatan kredit yang berkelanjutan.

Ketiga, mekanisme penanganan pengaduan dan perlindungan nasabah yang mudah diakses. Sebagai pelengkap upaya literasi dan pemasaran yang bertanggung jawab, BRI menyediakan saluran pengaduan dan umpan balik yang terstruktur guna memastikan bahwa setiap keluhan nasabah ditangani secara adil, transparan, dan tepat waktu. Mekanisme ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan untuk memperkuat kepercayaan nasabah, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik keterlibatan dengan nasabah.

Melalui ketiga dimensi tersebut—program pemberdayaan, praktik pasar yang bertanggung jawab, dan mekanisme perlindungan nasabah—BRI menempatkan literasi keuangan tidak sekadar sebagai inisiatif edukasi, tetapi juga sebagai strategi terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan nasabah, memitigasi risiko perilaku (conduct risks), serta memperkuat pertumbuhan portofolio yang berkelanjutan.

Indikator Utama

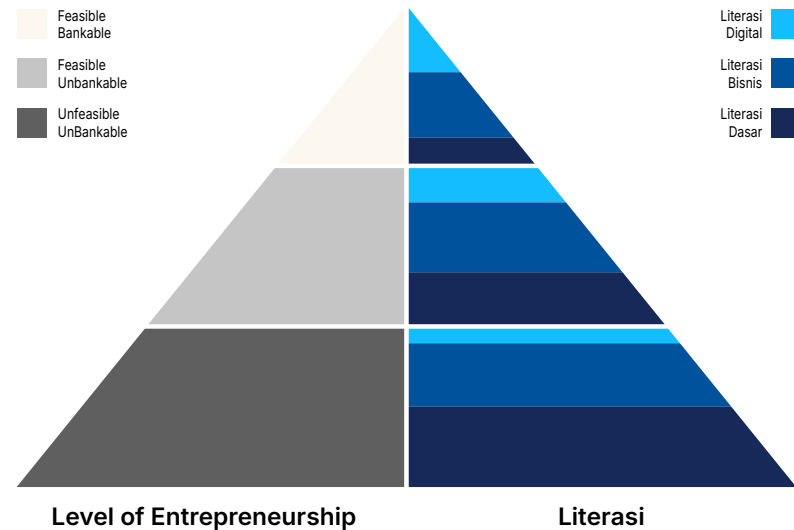
Kepuasan Nasabah



Tingkat Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Strategi



Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro dan UKM

Untuk memastikan bahwa dukungan non-keuangan dilaksanakan secara terstruktur dan berorientasi pada dampak, BRI menerapkan Kerangka Pemberdayaan UMKM yang terintegrasi dengan berlandaskan pada kesiapan kewirausahaan dan pengembangan bertahap.

Kerangka ini mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga tingkat kewirausahaan, dengan penekanan literasi yang berbeda sesuai dengan tingkat kematangan usaha:

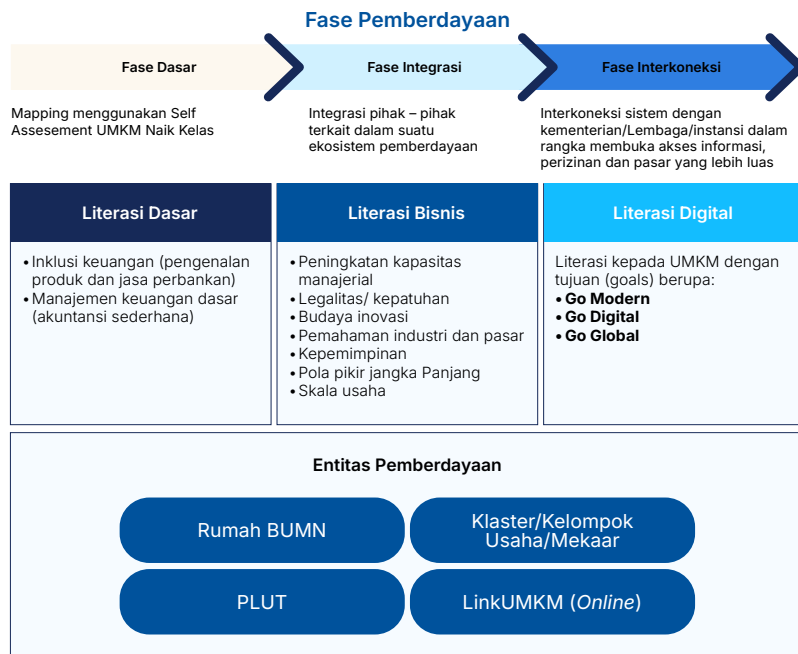
- **Unfeasible Unbankable:** pelaku usaha tahap awal atau ultra mikro dengan kelayakan usaha yang masih terbatas serta akses yang sangat minimal terhadap layanan keuangan formal. Pada tingkat ini, pemberdayaan terutama menekankan literasi keuangan dasar, yang berfokus pada pemahaman inklusi keuangan, pengelolaan keuangan sederhana, serta pengenalan terhadap produk keuangan formal.
- **Feasible but Unbankable:** usaha yang telah menunjukkan potensi operasional, tetapi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan. Pemberdayaan pada tahap ini berfokus pada literasi bisnis, termasuk penguatan kapabilitas manajerial, pencatatan keuangan, pemahaman kepatuhan, peningkatan produktivitas, serta formalisasi usaha.
- **Feasible & Bankable:** UMKM yang telah berkembang dengan tata kelola usaha yang lebih terstruktur serta telah memenuhi kriteria untuk memperoleh pembiayaan komersial. Pada tingkat ini, pemberdayaan memprioritaskan literasi digital, termasuk mendorong adopsi teknologi digital, perluasan pasar, integrasi ekosistem, serta peningkatan daya saing usaha.

Program pemberdayaan dilaksanakan secara bertahap melalui tiga fase pengembangan, yaitu:

1. Fase Fondasi, berfokus pada penguatan pemahaman dasar usaha dan kesadaran keuangan.
2. Fase Integrasi, menekankan peningkatan kapabilitas manajerial, kesiapan kepatuhan, serta partisipasi dalam ekosistem usaha.
3. Fase Interkoneksi, mendukung perluasan akses pasar, adopsi teknologi digital, serta konektivitas dengan berbagai institusi.

Pada setiap fase tersebut, intervensi pemberdayaan disesuaikan dengan tingkat kewirausahaan masing-masing UMKM, dengan kedalaman dan intensitas yang meningkat seiring dengan kesiapan dan perkembangan usaha.

Bagian berikutnya menjelaskan bagaimana kerangka ini diimplementasikan melalui tahapan yang terstruktur, yaitu: (i) inklusi keuangan ultra mikro, (ii) pelatihan dan pengembangan literasi yang terarah, serta (iii) graduasi UMKM, yang mencerminkan komitmen BRI untuk transformasi akses keuangan menjadi kemajuan usaha yang berkelanjutan.



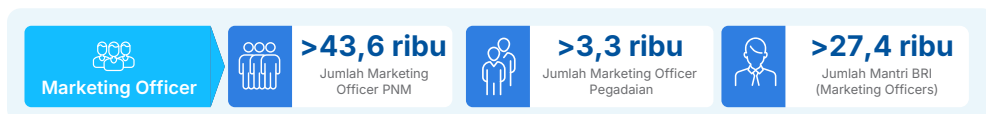
Strategi

Literasi Keuangan Dasar melalui Ekosistem Ultra Mikro ^[FN-CB-240a.4]



Ekosistem Ultra Mikro dirancang tidak hanya untuk memperluas akses terhadap pembiayaan, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan nasabah yang bermakna, peningkatan literasi keuangan, serta mobilitas ekonomi yang lebih tinggi. Melalui kolaborasi terintegrasi antara PNM, Pegadaian, dan BRI, nasabah ultra mikro berkembang melalui jalur graduasi yang terstruktur yang menggabungkan akses pembiayaan dengan penguatan kapabilitas serta integrasi yang lebih luas ke dalam ekosistem usaha.

Ekosistem ini didukung oleh jaringan distribusi berbasis lapangan yang luas, termasuk ribuan marketing officer di berbagai segmen, yaitu marketing officer PNM, marketing officer Pegadaian, serta Mantri BRI (*Micro Marketing Officer*), yang memastikan kedekatan layanan dan jangkauan langsung kepada masyarakat yang belum terlayani secara optimal di seluruh Indonesia.



1. Tahap Pemberdayaan (*Empower*)

Pada tahap Pemberdayaan, fokus utama adalah menjangkau pelaku usaha ultra mikro yang sebelumnya belum terakses oleh layanan keuangan formal serta membekali mereka dengan kapabilitas keuangan dasar.

1.1. Solusi Keuangan yang Menargetkan Nasabah *Unbanked, Underbanked, dan Underserved*

PNM dan BRI menyalurkan pembiayaan modal kerja berbasis kelompok yang secara khusus menyasar pelaku usaha yang unbanked, underbanked, dan underserved, yang menjalankan usaha ultra mikro secara informal. Para nasabah dihimpun dalam kelompok tanggung renteng sehingga memungkinkan mereka memperoleh akses pembiayaan dengan nominal kecil tanpa memerlukan agunan konvensional. Solusi keuangan ini tidak hanya memperluas partisipasi ekonomi, tetapi juga mendorong pemberdayaan sosial melalui berbagai program yang terarah dan terstruktur, antara lain:

- **Pemasaran Langsung dan Proses *Onboarding* oleh Petugas Lapangan**
Pelaku usaha ultra mikro dijangkau melalui petugas lapangan yang melakukan pendekatan langsung, asesmen keuangan, serta pembentukan kelompok. Sebagai bagian dari proses onboarding tersebut, nasabah juga diperkenalkan pada layanan perbankan formal, yang menghasilkan pembukaan 14,04 juta rekening tabungan Simpedes UMi dengan total saldo kolektif melebihi Rp1,3 triliun. Upaya berbasis kedekatan ini tidak hanya membuka akses bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki riwayat perbankan, tetapi juga memperkuat perilaku menabung serta partisipasi dalam sistem keuangan formal di kalangan nasabah ultra mikro.
 - **Akses terhadap Modal Kerja Esensial**
Melalui penyaluran pinjaman berbasis kelompok, sebanyak 13,2 juta debitur perempuan telah memperoleh pembiayaan Mekaar, dengan total penyaluran mencapai Rp43,4 triliun. Model ini menunjukkan keterlibatan langsung dan signifikan BRI Group dalam sektor microfinance, karena pembiayaan disalurkan secara langsung kepada nasabah melalui mekanisme tanggung renteng PNM, yang didukung oleh pemantauan berkelanjutan, pengawasan pembayaran kembali, serta pendampingan keuangan yang terintegrasi. Model layanan yang bersifat langsung ini menegaskan peran operasional aktif BRI Group, bukan sekadar eksposur tidak langsung atau pembiayaan secara wholesale dalam sektor *microfinance*.
 - **Pertemuan Kelompok Mingguan**
Peningkatan literasi keuangan secara terstruktur diberikan melalui pertemuan kelompok mingguan yang mencakup pengelolaan keuangan dasar, praktik pembayaran kembali yang bertanggung jawab, pembentukan kebiasaan menabung melalui rekening Simpedes UMi, serta perencanaan arus kas sederhana. Sesi ini memperkuat kesadaran keuangan, kedisiplinan, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga pelaku usaha ultra mikro dapat mengelola modal secara lebih bijak dan menstabilkan usahanya.
- Segmen sasaran program ini terutama terdiri dari perempuan pelaku usaha ultra mikro berpendapatan rendah yang sebelumnya belum memiliki riwayat perbankan.

Strategi

Literasi Keuangan Dasar melalui Ekosistem Ultra Mikro

1.2. Inisiatif Literasi Keuangan bagi Kelompok Underserved atau Individu Berpendapatan Rendah Pada tahun 2025, BRI Group melaksanakan Program Pelatihan Khusus bagi Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro yang bertujuan mendukung formalisasi usaha serta meningkatkan kapabilitas keuangan. Sebagai bagian dari inisiatif ini:

- 2.200.000 nasabah telah memiliki rekening bank yang aktif dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang mencerminkan penguatan formalisasi usaha di kalangan perempuan pelaku usaha ultra mikro.
- Sebanyak 52.394 sesi pelatihan literasi keuangan dan digital telah diselenggarakan dan menjangkau 1.853.170 peserta.

Materi pelatihan mencakup pengelolaan keuangan dasar, praktik pembayaran kembali yang bertanggung jawab, pembentukan kebiasaan menabung melalui rekening Simpedes UMI, literasi digital, serta perencanaan arus kas sederhana.

2. Tahap Integrasi (*Integrate*)

Pada tahap Integrasi, nasabah yang telah menunjukkan peningkatan kedisiplinan dalam pembayaran serta stabilitas usaha mulai dihubungkan dengan layanan keuangan yang lebih luas serta ekosistem transaksi yang lebih terintegrasi.

2.1. Inovasi Saluran Distribusi Alternatif Tanpa Kantor Cabang untuk Layanan Keuangan Ultra Mikro

Penyediaan layanan pada tahap ini diperkuat melalui inovasi saluran distribusi alternatif tanpa kantor cabang (*branchless channels*) untuk layanan keuangan. Implementasi dilakukan melalui perluasan Agen BRILink Mekaar hingga mencapai 456.128 Agen BRILink. Total transaksi melalui BRILink Mekaar telah mencapai Rp13,08 triliun. Saluran *branchless* ini membantu mengurangi hambatan geografis sekaligus membangun riwayat transaksi nasabah, khususnya di wilayah terpencil dan masyarakat yang belum terlayani secara optimal.

Segmen sasaran: nasabah ultra mikro yang sedang bertransisi menuju pemanfaatan layanan perbankan formal.

2.2. Pelatihan UMKM Terarah pada Tahap Integrasi

Pelaku usaha ultra mikro juga didukung melalui program pengembangan UMKM yang terarah untuk memperkuat partisipasi dalam ekosistem usaha serta integrasi dengan pasar digital.

- Pada tahun 2025, sebanyak 434 UMKM binaan BRI, Pegadaian, dan PNM berpartisipasi dalam program pengembangan komunitas usaha melalui kolaborasi dengan platform e-commerce. Program ini memfasilitasi proses onboarding digital sehingga UMKM dapat memperluas akses pasar, meningkatkan visibilitas produk, serta memperkuat daya saing di pasar daring.
- Secara paralel, keterlibatan digital juga diperkuat melalui pemanfaatan media sosial sebagai saluran pemasaran bagi produk nasabah UMi. Akun resmi pada platform Instagram dan Facebook digunakan untuk mempromosikan usaha UMi serta menampilkan produk mereka kepada audiens daring yang lebih luas. Hingga tahun 2025, akun Instagram tersebut memiliki 8.221 pengikut, sementara laman Facebook mencapai 21.515 pengikut, sehingga membantu pelaku usaha ultra mikro meningkatkan visibilitas produk serta memperluas jangkauan pasar di luar pasar lokal mereka.

3. Tahap *Upgrade*

Intervensi inklusi dan literasi keuangan yang terstruktur pada tahap Pemberdayaan dan Integrasi pada akhirnya menghasilkan proses peningkatan kelas nasabah yang terukur. Dalam tahap ini, pelaku usaha ultra mikro yang menunjukkan perilaku menabung yang konsisten, kinerja pembayaran yang baik, serta stabilitas usaha, bertransisi dari skema pembiayaan berbasis kelompok di bawah PNM menuju pembiayaan berbasis individu melalui Pegadaian atau BRI. Melalui transisi tersebut, nasabah memperoleh akses terhadap pembiayaan dengan plafon yang lebih besar serta layanan perbankan formal yang lebih luas. Keputusan peningkatan kelas nasabah didasarkan pada sejumlah indikator yang terukur, antara lain peningkatan kinerja pembayaran, terbentuknya riwayat transaksi melalui kanal fisik maupun digital, serta ketahanan usaha yang terbukti. Sebagai hasil dari perkembangan yang terstruktur ini, pada tahun 2025 sebanyak 1,4 juta nasabah Ultra Mikro PNM dan 456,7 ribu nasabah Ultra Mikro Pegadaian mengalami peningkatan kualitas pembiayaan atau naik kelas segmen usaha.

Segmen awal & entitas	Progresi Segmen	Entitas Tujuan	Jumlah Peminjam
Ultra Mikro - PNM	Tetap di Ultra Mikro - Batas Kredit Lebih Tinggi	PNM	670 ribu
	Tetap di Ultra Mikro - Batas Kredit Lebih Tinggi	Pegadaian	396,6 ribu
	Tetap di Ultra Mikro - Batas Kredit Lebih Tinggi	BRI	264,1 ribu
	Ditingkatkan ke Mikro	PNM	1,0 ribu
	Ditingkatkan ke Mikro	Pegadaian	71,4 ribu
	Ditingkatkan ke Mikro	BRI	8,5 ribu
Total			1,4 juta
Ultra Mikro - Pegadaian	Tetap di Ultra Mikro - Batas Kredit Lebih Tinggi	Pegadaian	144,3 ribu
	Tetap di Ultra Mikro - Batas Kredit Lebih Tinggi	BRI	97,3 ribu
	Ditingkatkan ke Mikro	Pegadaian	134,7 ribu
	Ditingkatkan ke Mikro	BRI	80,4 ribu
Total			456,7 ribu

Strategi

Pemberdayaan Nasabah melalui Pembiayaan KUR ^[FN-CB-240a.2]

Jalur graduasi KUR mencerminkan komitmen BRI dalam mendorong pemberdayaan nasabah tidak hanya melalui penyediaan kredit. Melalui keterlibatan yang berkelanjutan, Relationship Manager berperan aktif tidak hanya sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga sebagai penasihat keuangan yang mendukung pengembangan usaha dan kesiapan finansial nasabah secara berkelanjutan.

Dimulai dari produk KUR pada tahap awal, nasabah memperoleh pendampingan yang terstruktur melalui interaksi rutin dengan Relationship Manager, termasuk pemantauan usaha, penguatan disiplin keuangan, pengelolaan arus kas, serta pemanfaatan kredit secara bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas usaha. Peran pendampingan ini membantu nasabah memperkuat kapabilitas operasional serta membangun rekam jejak keuangan yang lebih baik.

Seiring dengan peningkatan kinerja usaha, perilaku pembayaran, dan kapabilitas keuangan nasabah, mereka secara bertahap ditingkatkan ke produk pembiayaan yang lebih maju dengan plafon kredit yang lebih besar, selaras dengan kebutuhan usaha yang berkembang serta profil risiko masing-masing. Proses ini mencerminkan peningkatan ketahanan usaha, kelayakan pembiayaan (bankability), serta kesiapan nasabah untuk mengembangkan skala usahanya.

Melalui jalur graduasi KUR ini, BRI memperkuat peran Relationship Manager sebagai mitra terpercaya dalam perjalanan pertumbuhan nasabah, sekaligus mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah dan kualitas portofolio pembiayaan.

Produk KUR Awal	Hasil Graduasi	Jumlah Peminjam
KUR Super Mikro	KUR Mikro	36,5 ribu
	KUR Kecil	5,3 ribu
KUR Mikro	Kupedes	255,1 ribu
	KUR Mikro dengan batas kredit yang lebih tinggi	804,3 ribu
KUR Kecil	Komersial Kecil	10,9 ribu
	KUR Kecil dengan batas kredit yang lebih tinggi	3,9 ribu
Total		1,1 juta

Program Dukungan Non-Kuangan untuk Masyarakat

BRI menyediakan berbagai program dukungan non-keuangan yang komprehensif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu yang belum terlayani secara optimal serta pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Inisiatif ini terbuka bagi masyarakat luas dan dirancang untuk memperkuat literasi keuangan, kapabilitas digital, keterampilan kewirausahaan, serta ketahanan usaha dalam jangka panjang di berbagai segmen.

Selain penyediaan produk atau layanan keuangan, BRI juga menghadirkan layanan dukungan yang terstruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang belum terlayani secara optimal serta memperkuat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan keuangan dan bisnis secara lebih terinformasi. Program-program ini dijalankan secara independen dari produk inklusi keuangan BRI dan tidak mensyaratkan penggunaan layanan keuangan BRI. Melalui pelatihan, pendampingan teknis, platform pembelajaran digital, mentoring, serta fasilitasi ekosistem usaha, BRI memastikan bahwa berbagai intervensi peningkatan kapasitas tersebut berfungsi sebagai mekanisme dukungan yang berdiri sendiri, sehingga memungkinkan para pelaku usaha untuk berkembang secara berkelanjutan sekaligus tetap memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan keuangan mereka.



Rumah BUMN

Rumah BUMN merupakan inisiatif pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan melalui kerangka kemitraan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Program ini menyediakan pelatihan terstruktur, pendampingan usaha, akses jaringan, serta fasilitas bersama seperti ruang kerja bersama (*co-working space*) guna memperkuat kapabilitas kewirausahaan dan kesiapan digital. Rumah BUMN menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu:

- Pengembangan UMKM: Mendukung UMKM untuk berkembang dari tahap *Go Modern, Go Digital*, dan *Go Online* menuju *Go Global* melalui program pendampingan dan penguatan usaha yang terstruktur.
- *Community & Emergency*: Berfungsi sebagai pusat koordinasi di tingkat lokal yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait apabila diperlukan.
- *Millennial Basecamp*: Menjadi ruang kolaboratif untuk pembelajaran, kegiatan magang, serta sumber inspirasi kewirausahaan bagi generasi muda.
- Pusat Informasi dan Program: Berfungsi sebagai pusat informasi terkait program pembiayaan berbasis kemitraan serta berbagai inisiatif dukungan pengembangan usaha.

Hingga tahun 2025, BRI mendukung 54 lokasi Rumah BUMN di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pemberdayaan UMKM. Sepanjang tahun tersebut, sebanyak 529.000 pelaku UMKM berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan usaha melalui program Rumah BUMN. Melalui model yang terintegrasi ini, Rumah BUMN berperan sebagai akselerator penguatan kapasitas berbasis komunitas, yang menghubungkan UMKM dengan pendampingan, sumber daya pelatihan, serta peluang dalam ekosistem usaha yang lebih luas guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Strategi

New Pasar.id

New Pasar.id merupakan platform marketplace digital yang dirancang untuk memungkinkan pedagang pasar tradisional menjual produknya secara daring langsung kepada konsumen. Platform ini:

- Mendukung digitalisasi pasar ritel tradisional
- Memungkinkan partisipasi dalam transaksi daring
- Memfasilitasi integrasi dalam ekosistem usaha

Partisipasi dalam platform ini tidak mensyaratkan pengambilan kredit, sehingga para pedagang yang belum terlayani secara optimal tetap dapat mengadopsi perdagangan digital secara mandiri. Hingga tahun 2025, New Pasar.id mencatat 5.465 transaksi dengan total nilai transaksi sebesar Rp248,08 juta. Saat ini, platform tersebut telah mencakup 7.384 pasar tradisional dan melayani 223.644 merchant, yang mencerminkan perluasan ekosistem yang berkelanjutan serta partisipasi merchant yang stabil. Pertumbuhan year-on-year pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,04%, yang menunjukkan keberlanjutan adopsi platform di segmen ritel tradisional.

LinkUMKM: Platform Literasi dan Kesiapan UMKM

LinkUMKM merupakan platform pembelajaran dan asesmen digital terintegrasi milik BRI yang dirancang untuk mendukung UMKM di berbagai segmen, mulai dari ultra mikro hingga usaha kecil dan menengah, dalam memperkuat kapabilitas usaha, meningkatkan literasi keuangan, serta mempercepat kesiapan untuk naik kelas. Platform ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga baik nasabah maupun non-nasabah BRI dapat memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran dan pengembangan kapasitas yang tersedia. LinkUMKM dapat diakses melalui situs web dan aplikasi seluler, serta menyediakan modul pembelajaran terstruktur, fitur diagnosis usaha, sarana digital showcase, akses coaching, serta konektivitas dengan ekosistem usaha. Platform ini berfungsi sebagai akselerator literasi sekaligus sarana penguatan pengelolaan usaha, yang memberikan dukungan non-keuangan tanpa mensyaratkan penggunaan produk atau layanan keuangan BRI.

Melalui fitur “UMKM Smart” pada LinkUMKM, pengguna dapat mengikuti asesmen Graduasi UMKM (Naik Kelas) yang dirancang untuk mengukur tingkat kematangan usaha serta kesiapan UMKM untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, UMKM diklasifikasikan ke dalam tiga klaster pengembangan, yaitu:

- *Traditional*
- *Developing*
- *Modern*

Klasifikasi ini memungkinkan pelaksanaan intervensi literasi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing UMKM. Hingga tahun 2025:

- 14,9 juta pengguna telah terdaftar pada platform LinkUMKM
- 11,4 juta pengguna telah mengikuti asesmen Graduasi UMKM
- 2,9 juta pengguna tergolong dalam klaster *Traditional* MSMEs

- 7,6 juta pengguna tergolong dalam klaster *Developing* MSMEs
- 0,8 juta pengguna tergolong dalam klaster *Modern* MSMEs
- Tersedia lebih dari 800 modul pelatihan dan lebih dari 50 mentor mendukung pengguna melalui fitur *coaching*.

Dukungan Non-Finansial melalui LinkUMKM

Kategori Dukungan Non-Finansial	Bidang Pelatihan	Nama Pelatihan	Kemitraan	Sasaran Peserta	KPI Dampak Sosial Kuantitatif 2025 (Jumlah Peserta)
Pelatihan Literasi Keuangan atau Digital	Literasi Keuangan	Dasar-Dasar Bisnis: dari Pencatatan Keuangan hingga Laporan Keuangan Sederhana	Pakar Akademik		222
	Literasi Digital	UMKM <i>Go Cashless</i> bersama BRI: Transformasi Cerdas Menuju Pengelolaan Keuangan Digital	Pakar Industri	UMKM, nasabah unbanked, dan individu berpendapatan rendah	31
	Literasi Digital	Manajemen Rantai Pasok Cerdas di Era Digital: Solusi Transaksi melalui <i>Mobile Banking</i>	Pakar Industri		56
Pendampingan Teknis	Pertanian	Inovasi Pertanian Ramah Lingkungan: Strategi bagi UMKM untuk Meningkatkan Produktivitas dan Mengoptimalkan Harga Jual	Pakar Pertanian	Petani kecil	69
Manajemen Bisnis	Pengembangan Bisnis	Memahami Pelanggan Lebih Baik dari Kompetitor: Strategi Efektif Mengidentifikasi Peluang Pasar	Pakar Industri	UMKM, nasabah unbanked, masyarakat berpenghasilan rendah	56

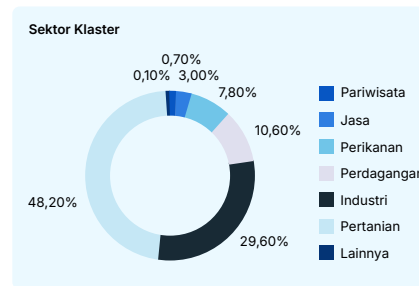
Strategi

Program Dukungan Non-Kuangan untuk Nasabah

Program ini mendukung nasabah BRI di segmen ultra mikro, mikro, dan kecil melalui pengembangan klaster yang terstruktur, penguatan kelembagaan, serta integrasi ekosistem usaha.

Klasterku Hidupku

BRI Klaster Usaha merupakan program pemberdayaan bisnis yang dirancang untuk mendukung kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan minat dalam suatu wilayah tertentu. Hingga tahun 2025, BRI telah memfasilitasi pembentukan 42,7 ribu klaster usaha di seluruh Indonesia, yang memperkuat kapasitas kolektif dan kolaborasi antar pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui inisiatif ini, BRI menyediakan berbagai program pemberdayaan yang komprehensif, termasuk pelatihan, pendampingan, dukungan infrastruktur usaha, serta fasilitasi perluasan akses pasar guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota klaster.



Kategori Dukungan Non-Finansial	Bidang Pelatihan	Nama Pelatihan	Kemitraan	Sasaran Peserta	KPI Dampak Sosial Kuantitatif 2025 (Jumlah Peserta)
Pelatihan Literasi Keuangan atau Digital	Literasi Keuangan	Strategi Keuangan untuk Mengoptimalkan Potensi Usaha Berbasis Kelompok	Lembaga Edukasi Keuangan	UMKM, nasabah <i>unbanked</i> , dan individu berpendapatan rendah	31
	Literasi Bisnis	Pengembangan Proposal Bisnis yang Efektif untuk Memperluas Peluang Usaha	Pakar Akademik		45
	Literasi Digital	Digitalisasi UMKM: Langkah Cerdas Menjangkau Pasar Ekspor			122
Pendampingan Teknis	Pertanian	Adaptasi Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman	Pakar Akademik	Petani kecil	83
	Perikanan	Pengembangan Produk Perikanan yang Inovatif dan Menguntungkan	Pakar Perikanan	Wirausaha mikro	197
	Pertanian	Smart Farmers: Meningkatkan Pendapatan Pertanian melalui Kemitraan yang Menguntungkan	Pakar Akademik	Petani kecil	94
	Peternakan	Strategi Usaha Ternak Kurban selama Pandemi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	Pakar Akademik	Petani kecil	49

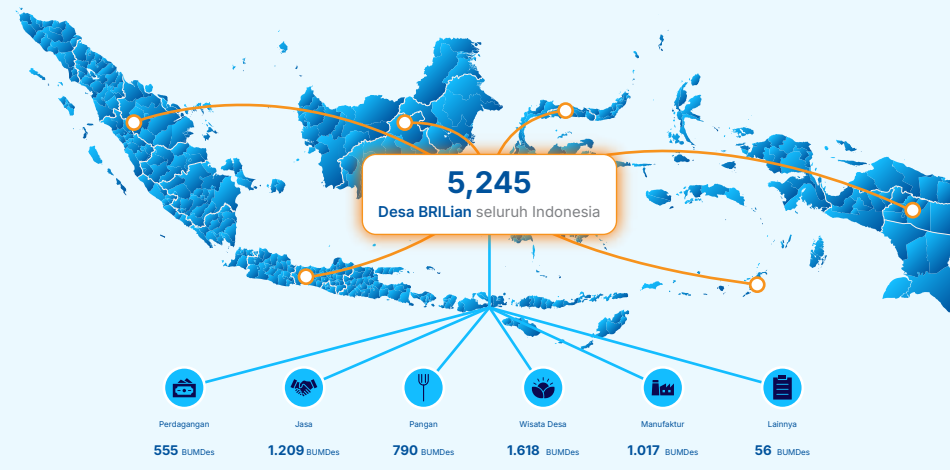
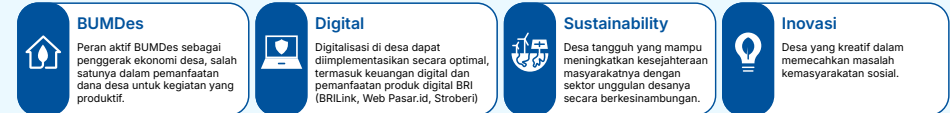
Desa BRILiaN

Desa BRILiaN merupakan inisiatif pemberdayaan desa yang bertujuan mengembangkan desa percontohan dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola kolaboratif, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), program ini disusun berdasarkan empat pilar utama pengembangan desa, yaitu:

- BUMDes (Badan Usaha Milik Desa): meningkatkan kapasitas dan kinerja BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa.
- Digitalisasi: mengintegrasikan solusi dan teknologi digital untuk memodernisasi administrasi desa, layanan publik, serta aktivitas ekonomi.
- Keberlanjutan: mendorong ketahanan jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.
- Inovasi Kreatif: mendorong pengembangan ide, produk, serta inovasi berbasis komunitas untuk memperluas peluang ekonomi.

Hingga Desember 2025, program Desa BRILiaN telah berhasil memberdayakan lebih dari 5.245 desa.

Profil Usaha BUMDes Desa BRILiaN



BRI juga mendukung ekosistem berbasis komoditas melalui platform digital yang menghubungkan produsen, agregator, dan pembeli, sehingga memfasilitasi transaksi yang lebih efisien serta meningkatkan akses pasar, termasuk melalui platform seperti Pasar Rakyat Indonesia (PARI).

Strategi

Program Pelatihan Ekspor

Sebagai bagian dari dukungan non-finansial untuk peningkatan UMKM, BRI Peduli menyelenggarakan Program Pelatihan Ekspor 2025 untuk 30 UMKM yang didukung BRI di sektor kuliner, fashion, perhiasan, kerajinan tangan, dan dekorasi rumah. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Layanan Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan memberikan peserta pengetahuan tentang peraturan perdagangan internasional, dokumen ekspor, serta strategi riset pasar global.

Program ini dilengkapi dengan bantuan teknis, termasuk konsultasi desain produk bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Desain Indonesia (IDDC) dan pendidikan logistik dan rantai pasok yang diselenggarakan bersama mitra strategis. Melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah dan pengembangan bisnis, inisiatif ini menyediakan pelatihan manajemen bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UMKM yang dibantu, memperkuat kesiapan ekspor dan daya saing mereka di pasar global. Uji kompetensi pra- dan pasca-pelatihan menunjukkan peningkatan rata-rata kompetensi sebesar 30,24% (dari 67,17 menjadi 82,32), sementara 68% peserta menilai pelatihan sebagai 'sangat baik' dan 64% menganggap kontennya sangat relevan dengan kebutuhan bisnis mereka.



Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Keuangan Inklusif

Sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko perusahaan, BRI mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan inisiatif keuangan inklusif dan penyampaian layanan kepada nasabah. Risiko tersebut dapat timbul dari kesesuaian produk, akses terhadap layanan keuangan, kualitas layanan, kapabilitas nasabah, serta praktik perlindungan konsumen di berbagai kanal perbankan. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko ini dapat memengaruhi kepercayaan nasabah, kualitas portofolio, efektivitas operasional, serta keberlanjutan strategi inklusi keuangan Bank.

Untuk mengelola risiko tersebut, BRI menerapkan sejumlah kerangka tata kelola, kebijakan, serta pengendalian operasional yang bertujuan untuk memastikan penawaran produk yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil bagi nasabah, serta kualitas layanan yang konsisten di seluruh operasional perbankan. Risiko utama beserta langkah mitigasinya dirangkum sebagai berikut.

No.	Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Mitigasi
Desain Produk dan Kesesuaian Produk bagi Nasabah			
1	Risiko Kredit	Ketidaksesuaian antara produk dan kebutuhan nasabah	- Menerapkan penilaian kebutuhan kredit dan kemampuan bayar untuk memastikan produk selaras dengan kapasitas keuangan nasabah. - Menerapkan kebijakan pemasaran dan penawaran produk yang bertanggung jawab guna mendorong distribusi produk yang tepat.
2	Risiko Strategis	Rendahnya relevansi produk terhadap kebutuhan nasabah	- Menerapkan kebijakan periklanan dan komunikasi yang adil untuk memastikan transparansi informasi produk. - Memanfaatkan umpan balik nasabah serta pemantauan layanan guna meningkatkan relevansi dan penawaran produk.
Akses terhadap Layanan Keuangan			
3	Risiko Strategis	Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan di wilayah yang belum terlayani	- Memperluas kanal layanan keuangan inklusif, termasuk perbankan digital dan jaringan agen. - Menerapkan kebijakan literasi dan inklusi keuangan guna mendukung perencanaan dan penyediaan layanan yang inklusif.
4	Risiko Operasional	Risiko fraud di berbagai kanal perbankan	- Menerapkan kebijakan pemasaran dan penawaran produk yang bertanggung jawab untuk mencegah praktik penjualan yang bersifat menyesatkan. - Memperkuat pemantauan kualitas layanan serta mekanisme perlindungan nasabah.
Pemberdayaan Nasabah dan Edukasi Keuangan			
5	Risiko Kredit	Rendahnya literasi keuangan dan kapabilitas nasabah	- Memperluas program literasi keuangan dan pemberdayaan nasabah. - Menerapkan modifikasi pinjaman serta proses eskalasi terstruktur untuk mendukung pemulihan keuangan yang bertanggung jawab.
6	Risiko Operasional	Lemahnya penanganan pengaduan atau perlindungan konsumen	- Memperkuat proses penanganan pengaduan serta dukungan layanan nasabah. - Menerapkan Service Improvement Management untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan meningkatkan kualitas layanan.
Pelindungan Keuangan Nasabah			
7	Risiko Reputasi	Risiko reputasi akibat kualitas layanan yang tidak memadai	- Memperkuat pemantauan kualitas layanan serta pengawasan tata kelola. - Menerapkan standar penagihan yang bertanggung jawab guna memastikan perlakuan yang adil terhadap nasabah.

Manajemen Risiko

Perbankan Inklusif dengan Fokus pada Kapabilitas dan Perlindungan

Dalam konteks Keuangan Inklusif dan Keunggulan Layanan Nasabah, pendekatan manajemen risiko BRI mencakup seluruh spektrum mulai dari perluasan akses keuangan, kemampuan dan literasi nasabah, hingga perlindungan finansial nasabah. Dimensi-dimensi ini saling terkait erat dan dikelola sebagai bagian dari tata kelola risiko bank secara keseluruhan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas operasional, kepatuhan regulasi, kepercayaan nasabah, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Risiko utama yang diidentifikasi di bidang ini, seperti ketidakcocokan produk dengan kebutuhan nasabah, ketidakkonsistenan penyampaian layanan di berbagai titik akses, pemahaman nasabah yang terbatas terhadap produk keuangan, dan paparan yang meningkat terhadap risiko perilaku dan reputasi, ditangani melalui kombinasi kontrol kebijakan, pengamanan operasional, dan mekanisme pemantauan terstruktur. Pendekatan ini memastikan bahwa pertumbuhan yang didorong oleh inklusi tidak berujung pada peningkatan penjualan yang tidak tepat, celah kualitas layanan, atau paparan regulasi, dan bahwa hasil bagi nasabah tetap sejalan dengan selera risiko BRI dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Akses yang Memberdayakan, Literasi yang Berkelanjutan ^[GRI G4 FS14]

Kebijakan Literasi Keuangan & Inklusi

Dari perspektif manajemen risiko, inklusi keuangan dan literasi keuangan di BRI diatur sebagai kegiatan yang diatur dan sensitif terhadap risiko, berdasarkan Surat Edaran Direksi SE.21-DIR/SCC/08/2024 tentang Pelindungan Nasabah, Buku 3 tentang Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, bukan sebagai inisiatif jangka panjang mandiri. Kebijakan inklusi dan literasi BRI menetapkan persyaratan yang jelas untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, berfungsi sebagai kontrol utama untuk mitigasi risiko terkait penargetan yang tidak tepat, perluasan akses yang tidak efektif, dan kemampuan nasabah yang tidak memadai. Inisiatif inklusi diwajibkan untuk terlebih dahulu menetapkan segmen konsumen, sasaran, saluran distribusi (fisik atau digital), skala, periode implementasi, dan indikator evaluasi. Kerangka perencanaan terstruktur ini memitigasi risiko terkait penawaran produk atau layanan yang tidak sesuai dengan profil nasabah, kapasitas keuangan, atau kemampuan penggunaan, yang dapat mengakibatkan peningkatan volume keluhan, pengawasan regulasi, dan penurunan kepercayaan nasabah.

Risiko operasional dan reputasi yang timbul akibat perluasan akses dikelola lebih lanjut melalui penyediaan infrastruktur yang diatur, termasuk jaringan cabang, kemitraan dengan pihak ketiga, saluran distribusi digital, dan fasilitas aksesibilitas untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Dengan mengontrol cara titik akses didirikan dan dipelihara, BRI mengurangi risiko ketidakkonsistenan layanan, pelanggaran oleh agen, dan pengalaman nasabah yang tidak merata di berbagai wilayah dan segmen. ^[GRI G4 FS14] Kegiatan literasi keuangan berfungsi sebagai pelengkap mitigasi risiko, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dan pemahaman yang dapat membatasi pemanfaatan produk secara efektif atau meningkatkan kemungkinan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Kegiatan ini tunduk pada evaluasi sistematis dan pelaporan regulasi berkala, memungkinkan BRI untuk memantau apakah upaya inklusi berujung pada peningkatan akses, penggunaan produk yang bertanggung jawab, dan hubungan nasabah yang berkelanjutan, sekaligus mengidentifikasi sinyal peringatan dini yang mungkin memerlukan tindakan korektif.

Customer Excellence & Pengelolaan Kualitas Layanan

Sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko, BRI mengelola pengalaman nasabah dan kualitas layanan untuk memitigasi risiko operasional, strategis, dan reputasi yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Perusahaan memantau keterlibatan nasabah melalui *Customer Engagement Index*, yang mengukur kualitas interaksi nasabah di berbagai kanal layanan. Pada tahun 2025, BRI mencatat skor *Customer Engagement* sebesar 4,67, melampaui target internal sebesar 4,55. Selain itu, survei kepuasan nasabah dan *Net Promoter Score* (NPS) digunakan untuk mengukur persepsi nasabah secara lebih luas terhadap kualitas layanan dan tingkat loyalitas, sekaligus menjadi indikator pendukung dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta memperkuat standar layanan. Hasil pengukuran tersebut disajikan lebih rinci pada bagian [Metrik and Target](#). Untuk memastikan layanan yang inklusif, BRI juga menyediakan prosedur khusus bagi nasabah penyandang disabilitas dan nasabah lanjut usia sesuai dengan SO.41-CEX/12/2025 tentang Unit Kerja Operasional, yang mengatur mekanisme layanan dengan pendampingan. Melalui ketentuan ini, nasabah dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk sebagai pendamping saat melakukan pembukaan rekening atau transaksi, dengan tetap memastikan bahwa petugas BRI memberikan penjelasan yang jelas agar nasabah dapat mengambil keputusan keuangan secara tepat.

Pelindungan Finansial Nasabah

Mengintegrasikan Proses dan Kebijakan Bisnis yang Bertanggung Jawab

BRI menerapkan pendekatan '*Protection by Design*' dengan terus meninjau dan meningkatkan proses bisnis dan prosedur operasional standar (SOP) untuk meningkatkan konsistensi, transparansi, dan kontrol sepanjang perjalanan nasabah dari awal hingga akhir. Upaya *reengineering* proses, termasuk peninjauan ulang akses berdasarkan peran dan pemetaan ulang wewenang, memperkuat pencegahan penyalahgunaan operasional dan penipuan. Peningkatan ini juga meningkatkan keandalan dan auditabilitas proses yang berinteraksi dengan nasabah, seperti *onboarding*, dokumentasi kredit, persetujuan, dan pemberitahuan, memastikan bahwa hak, kewajiban, dan titik keputusan nasabah diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan praktik manajemen risiko yang prudent.

Komunikasi Produk, Periklanan, dan Praktik Penjualan ^[GRI 3-3]

Kebijakan Periklanan dan Komunikasi yang Adil

BRI menerapkan praktik periklanan dan komunikasi yang adil melalui kerangka kerja tata kelola terpusat yang diatur dalam Surat Edaran Direksi SE.17-DIR/CSC/07/2024 tentang Komunikasi. Kebijakan ini mengatur komunikasi korporat, komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta komunikasi merek, produk, dan layanan, memastikan bahwa semua pesan yang ditujukan kepada publik akurat, konsisten, dan tidak menyesatkan. Pengawasan terhadap kegiatan periklanan dan komunikasi besar-besaran dilakukan melalui Forum Komunikasi Korporat, yang dipimpin oleh Direktur Utama dan melibatkan koordinasi lintas fungsi antar unit terkait. Forum ini memberikan pengawasan manajemen senior terhadap inisiatif komunikasi strategis, berdampak tinggi, dan lintas unit, termasuk kampanye besar dan kegiatan promosi, untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan regulasi, pertimbangan reputasi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Manajemen Risiko

Untuk mendukung tujuan tersebut, BRI menerapkan pendekatan terintegrasi melalui sinergi pilar-pilar komunikasi yang mencakup komunikasi korporat dan pemangku kepentingan yang dikelola oleh *Corporate Secretary Group*; komunikasi merek, produk, dan layanan yang dikelola oleh *Branding & Marketing Communication Group*; serta komunikasi internal yang dikelola oleh *Culture Transformation Group*. Struktur tata kelola ini memungkinkan komunikasi yang terkoordinasi, memperkuat konsistensi merek, serta memastikan keselarasan seluruh aktivitas komunikasi dengan tujuan strategis BRI dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Selain itu, BRI juga menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi bagi pekerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran, komunikasi produk, dan keterlibatan nasabah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip periklanan yang adil serta standar perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian pengembangan kapabilitas pekerja pada halaman [108](#).

Kebijakan Pemasaran dan Penawaran Produk yang Bertanggung Jawab ^{IGRI 417-1}

Kebijakan pemasaran dan penawaran produk yang bertanggung jawab di BRI diatur oleh Surat Edaran Direksi SE.21-DIR/SCC/08/2024 tentang Perlindungan Pelanggan dan SO.41-CEX/12/2025 tentang Unit Kerja Operasional. Kebijakan ini menetapkan standar perilaku pasar yang mencakup pengungkapan produk yang transparan, penawaran produk yang sesuai, dan perlakuan yang adil terhadap nasabah sepanjang siklus hidup produk, termasuk interaksi langsung antara *Relationship Manager* atau Tim *Frontliner* dengan nasabah.

Aktivitas pemasaran dan penawaran produk diwajibkan untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami, sehingga nasabah dapat membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Materi komunikasi dan penjelasan produk mencakup pengungkapan yang seimbang mengenai fitur utama, biaya, risiko, dan konsekuensi potensial, memastikan bahwa nasabah tidak hanya mengetahui manfaat tetapi juga kewajiban dan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan produk keuangan. Produk ditawarkan kepada target pasar yang sesuai, dengan mempertimbangkan kebutuhan nasabah, kemampuan finansial, dan tingkat pemahaman, serta dilakukan dengan persetujuan nasabah sebelumnya. Praktik-praktik ini didukung oleh pedoman operasional untuk memperkuat literasi keuangan dan mempromosikan inklusi keuangan, disertai dengan mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Untuk memperkuat produk dan layanan yang bertanggung jawab, kerangka kebijakan yang sama berlaku sepanjang siklus hidup produk dan layanan, mencakup desain, penawaran, penyampaian, dan penggunaan berkelanjutan produk perbankan dan layanan nasabah. Kerangka ini mencerminkan komitmen BRI terhadap penyediaan produk dan layanan yang bertanggung jawab dengan memastikan bahwa produk dirancang, dipasarkan, dan disampaikan dengan mengutamakan kesesuaian produk dengan kebutuhan nasabah, transparansi, serta hasil yang adil bagi nasabah. Kontrol internal diterapkan untuk memastikan bahwa baik produk maupun penyampaian layanan tetap sesuai untuk segmen nasabah yang dituju dan secara konsisten selaras dengan prinsip perlindungan nasabah.

Masukan dari pengukuran kepuasan nasabah juga diintegrasikan ke dalam proses peningkatan produk dan layanan, sehingga BRI dapat secara berkelanjutan menyempurnakan fitur produk,

penyampaian layanan, serta pendekatan interaksi dengan nasabah guna meningkatkan kepuasan nasabah secara keseluruhan.

Praktik Pemberian Pinjaman yang Bertanggung Jawab

Penilaian Kebutuhan dan Kemampuan Membayar Kredit

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pinjaman yang bertanggung jawab dan pemberdayaan nasabah, BRI menerapkan SO.11-CRO/06/2024 tentang Operasional Pinjaman beserta perubahannya tentang Operasi Pinjaman, yang mengatur proses kredit secara *end-to-end*, mulai dari penyampaian informasi kepada nasabah, penilaian kredit, proses persetujuan kredit, dan pelayanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, BRI menyediakan fitur simulasi perhitungan kredit yang dapat diakses melalui situs resmi Perseroan untuk meningkatkan transparansi kepada nasabah. Fitur ini memungkinkan nasabah memperkirakan besaran cicilan bulanan sebelum mengajukan kredit. Melalui pendekatan ini, BRI menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam proses pemberian kredit, dengan menyediakan informasi yang jelas serta mendorong nasabah untuk mengambil keputusan keuangan secara lebih terinformasi. Pendekatan ini turut membantu memitigasi risiko timbulnya beban utang yang tidak terkendali bagi nasabah serta memperkuat hubungan kemitraan finansial antara BRI dan nasabahnya.

BRI juga berkomitmen kuat untuk menerapkan praktik penyaluran kredit yang bertanggung jawab dan adil, serta tidak melakukan praktik pembiayaan yang bersifat eksploitatif atau berisiko tinggi yang memanfaatkan kerentanan finansial nasabah. Seluruh aktivitas perkreditan dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, termasuk melalui penilaian keterjangkauan (*affordability assessment*) dan kapasitas pembayaran kembali (*repayment capacity assessment*), yang didukung oleh mekanisme penilaian kredit dan evaluasi risiko internal untuk memastikan bahwa produk kredit yang diberikan tetap selaras dengan kemampuan finansial nasabah. Proses tersebut merupakan bagian integral dari kerangka manajemen risiko kredit BRI, sehingga setiap keputusan pembiayaan mempertimbangkan evaluasi kelayakan nasabah secara prudent serta kesesuaian produk dengan profil dan kapasitas finansial nasabah.

Selain itu, BRI secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap kinerja kredit untuk mengidentifikasi secara dini potensi kesulitan pembayaran maupun tanda-tanda tekanan finansial pada nasabah. Melalui mekanisme pemantauan tersebut, BRI dapat mengambil langkah-langkah proaktif, termasuk melakukan komunikasi dengan nasabah serta tindakan pengelolaan kredit yang diperlukan, guna mencegah meningkatnya tekanan finansial pada nasabah. Praktik perkreditan di BRI dan seluruh entitas anak juga berada dalam pengawasan regulasi serta kerangka perlindungan konsumen yang mengharuskan transparansi informasi, perlakuan yang adil kepada nasabah, serta praktik penagihan yang beretika. Pendekatan yang terintegrasi ini membantu memitigasi risiko terjadinya utang berlebih (*over-indebtedness*) pada nasabah, sekaligus memperkuat kepercayaan serta membangun kemitraan finansial yang bertanggung jawab antara BRI dan nasabahnya.

Penagihan Utang yang Bertanggung Jawab

BRI telah menetapkan kebijakan penagihan kredit komprehensif yang dirancang untuk melindungi hak nasabah dan data pribadi, sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini memastikan bahwa semua aktivitas penagihan dilakukan secara transparan

Manajemen Risiko

dan bebas dari intimidasi, pelecehan, atau perlakuan tidak adil. Persyaratan ini diperkuat melalui SO.11.b-CRO/06/2024 tentang Operasi Pinjaman, yang mengatur proses kredit *end-to-end*, termasuk prosedur penagihan, pengelolaan akun, jalur eskalasi, dan standar komunikasi dengan nasabah, untuk memastikan praktik yang disiplin dan bertanggung jawab sepanjang siklus kredit. Untuk mendukung praktik penagihan yang bertanggung jawab, BRI secara terus-menerus memperkuat kompetensi dan profesionalisme pekerja yang terlibat dalam penagihan kredit melalui pelatihan terarah, program sertifikasi, dan inisiatif pengembangan kapasitas berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa pekerja memahami prosedur penagihan dengan baik sekaligus tetap menjaga empati dan sensitivitas terhadap kondisi keuangan nasabah. Selain itu, BRI menerapkan tata kelola dan pengawasan yang ketat terhadap agen penagihan utang pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan dan standar etika yang tinggi. Melalui pendekatan yang seimbang ini, BRI berupaya melindungi kepentingan perusahaan serta membangun hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan dengan nasabah dan menjaga kepuasan nasabah.

Modifikasi Pinjaman dan Proses Eskalasi Terstruktur

BRI menerapkan pendekatan terstruktur dan hati-hati dalam modifikasi pinjaman dan penyelesaian pinjaman bermasalah (NPL) sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam kerangka kerja mitigasi risiko kreditnya, yang diatur oleh Surat Edaran Direksi SE.39-DIR/KRD/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pengelolaan Pinjaman Bermasalah. Kerangka kerja ini dirancang untuk melindungi nasabah, terutama yang menghadapi guncangan ekonomi tak terduga atau kesulitan keuangan berkepanjangan, sekaligus menjaga kualitas portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang hati-hati.

Dalam mengelola pinjaman bermasalah (NPL), BRI menerapkan pendekatan berbasis risiko dan segmentasi nasabah yang mempertimbangkan kondisi keuangan debitur, kemampuan pembayaran, prospek bisnis, dan itikad baik yang telah ditunjukkan. BRI memprioritaskan restrukturisasi pinjaman sebagai mekanisme pemulihan utama, mencerminkan filosofi penyelesaian yang seimbang dan berorientasi pada nasabah yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan nasabah sejauh mungkin. Langkah-langkah restrukturisasi dapat mencakup penundaan pembayaran, penyesuaian suku bunga, penjadwalan ulang atau perpanjangan tenor pinjaman, dan modifikasi lain yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan nasabah dan keberlanjutan bisnisnya. Keputusan ini didasarkan pada penilaian keuangan komprehensif dan dipandu oleh prinsip itikad baik, kerja sama, dan kelayakan operasional debitur.

Jika restrukturisasi tidak memungkinkan atau tidak dapat memulihkan kelayakan pinjaman, BRI menerapkan mekanisme penyelesaian NPL alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar tata kelola internal. Mekanisme ini meliputi penyelesaian tanpa proses hukum, penyelesaian melalui jalur hukum, upaya penagihan terstruktur, klaim melalui lembaga penjaminan kredit atau asuransi, lelang jaminan, dan transfer piutang atau penjualan pinjaman (*cessie*). Pemilihan langkah penyelesaian disesuaikan dengan karakteristik debitur dan eksposur kredit, memungkinkan perlakuan yang berbeda antara nasabah koperasi dan nasabah yang tidak memiliki prospek bisnis yang layak atau tidak menunjukkan itikad baik.

Selama proses penyelesaian NPL, BRI memastikan transparansi melalui komunikasi yang jelas dengan nasabah mengenai kondisi keuangan mereka, opsi penyelesaian yang tersedia, dan implikasi potensial. Semua tindakan penyelesaian tunduk pada proses tata kelola internal, pengawasan, dan persetujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan, proporsionalitas, kepatuhan regulasi, dan akuntabilitas. Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan BRI mengelola risiko kredit secara efektif sekaligus melindungi hak nasabah, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, dan mempertahankan kemitraan keuangan yang tangguh dan jangka panjang.

Proses Penanganan Keluhan

BRI memiliki proses yang jelas dan terstruktur dalam mengelola produk keuangan, memastikan bahwa semua keluhan nasabah ditangani dengan cepat dan efisien. BRI menyediakan berbagai saluran komprehensif untuk menerima dan menangani keluhan melalui BRI Contact Center (Contact BRI) dan layanan di kantor-kantor BRI, termasuk cabang, sub-cabang, dan unit BRI. Nasabah dapat menghubungi Contact BRI melalui telepon di 1500017, platform media sosial resmi, *email* di callbri@bri.co.id, *WhatsApp Chatbot* Sabrina di 0812 1214 017, dan layanan digital melalui menu Pusat Bantuan di aplikasi BRImo untuk layanan mandiri dan dukungan bebas pulsa. Selain itu, nasabah dapat mengajukan keluhan secara langsung di Unit Kerja BRI melalui *Frontliners (Universal Bankers & Customer Service)* atau melalui *Video Banking*.

Setiap keluhan yang diterima ditinjau secara cermat oleh tim yang berkualifikasi untuk memahami masalah dan menemukan solusi yang tepat. BRI memastikan bahwa tindakan korektif segera diterapkan untuk menangani keluhan nasabah dan mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. BRI menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) dan Otomatisasi Proses Robotik (RPA) untuk memantau Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) guna meningkatkan pengalaman nasabah, mempercepat penyelesaian masalah, dan mengoptimalkan proses bisnis dalam layanan nasabah.

Untuk memperkuat pengawasan independen, pada tahun 2025 BRI melakukan audit internal tematik yang berfokus pada efektivitas penanganan keluhan, kepatuhan terhadap prosedur, dan kepatuhan terhadap standar perlindungan nasabah. Hasil audit digunakan sebagai mekanisme tinjauan independen untuk mengevaluasi masalah sistemik, mengidentifikasi area perbaikan, dan mendukung tindakan korektif di seluruh unit kerja terkait. Temuan dari tren keluhan dan tinjauan tematik diangkat melalui saluran tata kelola dan digunakan untuk meningkatkan kebijakan, prosedur, dan kontrol layanan.

Sepanjang tahun 2025, BRI secara efektif mengelola proses penanganan dan investigasi pengaduan, serta melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan komitmen BRI untuk menyelesaikan seluruh pengaduan sesuai dengan *Service Level Agreements (SLA)* yang telah ditetapkan. Proses ini juga berkontribusi terhadap peningkatan berkelanjutan atas kebijakan dan prosedur, sehingga mendorong peningkatan kepuasan nasabah serta menjaga standar kualitas layanan yang tinggi. Pada tahun 2025, BRI menyelesaikan 99,98% dari total 1.262.275 keluhan yang diterima melalui semua saluran. Dari jumlah tersebut, 1.261.976 keluhan berhasil diselesaikan, sementara 299 keluhan masih dalam proses penyelesaian. BRI berkomitmen untuk menyelesaikan semua proses yang masih dalam tahap pengolahan, sesuai dengan Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) yang telah ditetapkan.

Manajemen Risiko

Pemberdayaan Kapasitas Sumber Daya Manusia

BRI memperkuat perlindungan keuangan nasabah dengan meningkatkan kapabilitas layanan dan standar perilaku pada seluruh peran yang berinteraksi langsung dengan nasabah, termasuk *frontliner*, *middle manager*, *relationship manager*, serta unit pendukung. Hal ini diwujudkan melalui penguatan budaya layanan serta berbagai inisiatif terstruktur seperti program *onboarding*, pengembangan kinerja, *role-playing exercises*, *quality assurance* berlapis, *mystery shopping*, serta penyempurnaan mekanisme CSAT. Upaya tersebut menginstitusionalisasikan penyampaian informasi produk yang konsisten, praktik penjualan yang bertanggung jawab, serta jalur eskalasi yang efektif. Dengan demikian, langkah-langkah ini membantu memitigasi risiko misinformasi dan mis-selling, sekaligus memungkinkan nasabah mengambil keputusan yang lebih tepat melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai ketentuan utama, biaya, serta risiko yang terkait.

BRI menerapkan pendekatan yang terstruktur dan berlapis untuk memperkuat perlindungan nasabah serta praktik perilaku yang bertanggung jawab di seluruh titik interaksi dengan nasabah. Pendekatan ini mengintegrasikan komunikasi produk yang adil, perlindungan nasabah, serta praktik penagihan yang beretika ke dalam pengembangan kepemimpinan, pelatihan *frontliner*, dan program fungsional khusus guna memastikan standar yang konsisten di seluruh organisasi.

Untuk memperkuat praktik periklanan yang adil serta komunikasi produk yang bertanggung jawab, BRI mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen ke dalam program pengembangan kepemimpinan dan manajerial pada tahun 2025 yang menjangkau total 84 peserta, terdiri dari *Regional Operation Heads*, *Department Heads*, calon *Branch Heads*, serta *Bank Representatives*. Program-program ini menekankan komunikasi yang transparan, pengungkapan yang tepat atas fitur dan risiko produk, serta kepatuhan terhadap standar regulasi.

Secara paralel, pelatihan terstruktur juga diberikan kepada karyawan yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Pada tahun 2025, program *onboarding* menjangkau 412 *frontliner* yang baru diangkat, sementara program *equipping* memperkuat kompetensi 578 karyawan *customer-facing* yang telah ada, termasuk materi pelatihan perlindungan nasabah.

Selain itu, BRI juga menyediakan program pelatihan khusus bagi personel yang terlibat dalam fungsi restrukturisasi dan pemulihan kredit guna memastikan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan internal penagihan utang serta standar regulasi. Pada tahun 2025, pelatihan khusus mengenai *Credit Restructuring & Recovery* (CRR) diberikan kepada 811 peserta, yang terdiri dari 781 anggota tim RM CRR (*Credit Recovery & Restructuring*) dan 30 pimpinan tim RM CRR. Program-program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis serta menegaskan praktik penagihan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip perlindungan nasabah.

Pelatihan ini menekankan:

- Interaksi dengan nasabah yang etis dan penuh penghormatan selama proses restrukturisasi
- Kepatuhan terhadap kebijakan internal penagihan utang dan peraturan yang berlaku
- Mekanisme negosiasi dan restrukturisasi yang bertanggung jawab

Melalui pelatihan yang terstruktur ini, BRI memastikan bahwa kegiatan pemulihan dan restrukturisasi dilaksanakan secara profesional, transparan, serta dengan tetap menjaga martabat nasabah, sekaligus mempertahankan standar manajemen risiko yang *prudent*.

Program Pelatihan	Topik Utama yang Dibahas	Peserta Sasaran	Peserta 2025	Tujuan
Pelatihan Pelindungan Konsumen & Komunikasi yang Bertanggung Jawab	Transparansi penyampaian informasi produk, praktik pemasaran yang adil, perilaku penjualan yang bertanggung jawab, standar komunikasi dengan nasabah	Frontliner	412 pekerja baru	Memastikan nasabah menerima informasi produk yang akurat dan transparan
Pengembangan Kapabilitas Layanan Nasabah	Interaksi dengan nasabah secara etis, praktik penanganan pengaduan, standar kualitas layanan, pencegahan mis-selling	Pekerja yang berinteraksi langsung dengan nasabah	578 pekerja eksisting	Memperkuat kapabilitas layanan dan mendorong interaksi yang bertanggung jawab dengan nasabah
Program Pengembangan Kepemimpinan & Manajerial	Prinsip perlindungan konsumen, praktik penanganan pengaduan, standar kualitas layanan, pencegahan mis-selling	Regional Operational Head, Departement Head, calon Kepala Cabang, Bank Representatives	84 pekerja	Mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen dalam fungsi pengawasan manajerial
Pelatihan Restrukturisasi & Pemulihan Kredit (CRR)	Praktik penagihan yang etis, negosiasi restrukturisasi, kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pemulihan kredit	Anggota tim dan pimpinan tim Credit Recovery & Restructuring	811 pekerja	Memastikan praktik pemulihan kredit yang bertanggung jawab dan menghormati martabat nasabah

Metrik dan Target

Metrik untuk Keuangan Inklusif

Komitmen BRI untuk mendorong inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan finansial nasabah terus menghasilkan capaian yang terukur dalam ekosistem bisnis dan nasabah. Upaya ini tercermin dari semakin luasnya jangkauan inklusi keuangan BRI, tingginya tingkat kepuasan nasabah, serta integrasi indikator kinerja utama terkait ke dalam kerangka remunerasi eksekutif.



Jangkauan Inklusi Keuangan BRI

Melalui penerapan strategi keuangan inklusif, praktik manajemen risiko, serta indikator kinerja yang terukur, jangkauan inklusi keuangan BRI terus mengalami perluasan. Hingga tahun 2025, BRI melayani 140,5 juta nasabah individu di seluruh Indonesia, yang berkontribusi terhadap estimasi tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 64,5%.

91,72_{/100}

Pengukuran Kepuasan Nasabah

BRI melakukan pengukuran kepuasan nasabah secara berkala untuk memahami persepsi nasabah terhadap kualitas layanan serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pengukuran kepuasan nasabah dilakukan melalui survei periodik bekerja sama dengan lembaga independen pihak ketiga. Pada tahun 2025, hasil survei menunjukkan kinerja layanan yang baik dan melampaui target internal, dengan skor *Customer Service Excellence* sebesar 91,72. Umpan balik yang diperoleh melalui berbagai kanal, baik offline maupun digital, dimanfaatkan secara sistematis untuk meningkatkan penyampaian layanan dan pengalaman nasabah. Hasil pengukuran ini juga digunakan sebagai referensi untuk memantau dan meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengidentifikasi gap layanan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan guna memastikan bahwa produk dan layanan keuangan BRI tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

KPI Direksi yang Terkait dengan Remunerasi

KPI Direksi	Target 2025	Pencapaian 2025
Rasio CASA Konsolidasi	67,28%	70,61%
Jumlah Pengguna Aktif BRI _{mo}	24,25 juta	110%
Penyaluran KUR	80,00%	98,93%
Pembiayaan Berkelanjutan	Rp800 triliun	Rp811,86 triliun
NPS untuk Bank	54,43%	69%

Sebagai bagian dari kerangka KPI kolegial Direksi, BRI menetapkan indikator untuk memperkuat dukungan pembiayaan pada segmen usaha produktif. Pada tahun 2025, pertumbuhan rata-rata kredit UMKM tercatat sebesar 5,9%, yang mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperluas pembiayaan kepada pelaku usaha dengan tetap menjaga pengelolaan portofolio secara prudent.

Selain itu, pencapaian KPI kolegial untuk penyaluran kredit ultra mikro pada tahun 2025 tercatat sebesar 95,4%, yang menunjukkan komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen usaha ultra mikro.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, komposisi portofolio kredit konsolidasi BRI Group juga menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap segmen mikro dan UMKM. Pada tahun 2025, penyaluran kredit kepada segmen mikro mencapai Rp648,3 triliun, atau 42,6% dari total kredit konsolidasi, sementara kredit kepada segmen UMKM tercatat sebesar Rp240,8 triliun, atau 15,8% dari total portofolio kredit konsolidasi.

Metrik dan Target

Dampak Sosial Pinjaman Mikro

Sebagai bagian dari strategi Keuangan Inklusif, BRI bertujuan tidak hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga menghasilkan dampak sosial ekonomi yang bermakna bagi nasabah. Melalui penyediaan solusi pembiayaan, BRI berupaya memperkuat ketahanan finansial nasabah serta mendukung peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan kapasitas usaha. Untuk memahami dampak tersebut secara lebih baik, BRI melakukan penilaian dampak sosial terhadap nasabah peminjam kredit mikro. Survei ini menangkap sinyal awal perubahan dalam perilaku keuangan, stabilitas mata pencaharian, serta akses terhadap layanan dasar setelah nasabah memperoleh akses pembiayaan. Indikator yang disajikan di bawah ini berasal dari survei dampak sosial yang dilakukan terhadap sampel sebanyak 838 nasabah KUR dan Kupedes, dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* sebesar 5%.

Kategori Dampak Sosial	Dampak Utama	Representasi Dampak	Metrik	2025
Akses ke Layanan Esensial	Keuangan Inklusif	Menunjukkan persentase nasabah yang mendapatkan akses pertama kali ke kredit formal, mencerminkan perluasan inklusi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan atau memiliki akses terbatas ke sistem keuangan.	Persentase nasabah dengan akses baru (nasabah perbankan pertama kali)	KUR: 81,7% Kupedes: 69,6%
	Pendidikan	Menunjukkan perubahan yang dilaporkan oleh nasabah dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga yang bergantung setelah mendapatkan akses ke pembiayaan mikro.	Persentase nasabah yang dapat memberikan akses pendidikan bagi tanggungan	KUR: 74,9% Kupedes: 70,8%
Infrastruktur Dasar yang Terjangkau	Air	Mencatat perubahan yang dilaporkan nasabah dalam akses ke air bersih setelah menerima pembiayaan.	Persentase nasabah yang memperoleh akses air bersih yang lebih baik	KUR: 51,7% Kupedes: 51,4%
Keamanan Pangan & Sistem Pangan Berkelanjutan	Keamanan Pangan	Mencerminkan perbaikan yang dilaporkan nasabah dalam akses ke makanan sehat setelah pembiayaan.	Persentase nasabah yang melaporkan peningkatan akses terhadap makanan sehat	KUR: 71,9% Kupedes: 66,6%
Pemberdayaan dan Peningkatan Sosial Ekonomi	Pengembangan Usaha	Menunjukkan perubahan peningkatan aset yang dilaporkan oleh nasabah.	Pelanggan nasabah yang mengalami peningkatan aset	KUR: 42,8% Kupedes: 48,0%
Penciptaan Lapangan Kerja & Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak	Mencerminkan perubahan yang dilaporkan oleh nasabah dalam aktivitas bisnis, termasuk tenaga kerja dan kepemilikan aset, setelah pembiayaan.	Jumlah Pekerjaan yang Diciptakan per 100 pinjaman	KUR: 45 pekerjaan baru per 100 fasilitas KUR yang diberikan Kupedes: 65 pekerjaan baru per 100 fasilitas Kupedes yang diberikan

Secara keseluruhan, hasil-hasil ini menggambarkan perkembangan yang jelas dalam dampak keuangan inklusif. Pinjaman mikro pertama-tama memperoleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, seperti pendidikan, air, makanan, dan perumahan. Seiring dengan meningkatnya stabilitas, inklusi meluas ke perempuan dan nasabah yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, memperkuat partisipasi dalam sistem keuangan formal. Landasan ini memungkinkan nasabah untuk mengembangkan aset produktif, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja, menandakan ketahanan keuangan awal dan memperkuat peran keuangan inklusif sebagai pendorong kemajuan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Metrik dan Target

Pendapatan Terkait SDGs

Seiring dengan upaya BRI dalam mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan serta melindungi kesejahteraan finansial nasabah, sebagian besar pendapatan Bank selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada tahun 2025, sekitar 65,6% dari total pendapatan BRI terkait dengan aktivitas yang selaras dengan SDGs, terutama mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui pembiayaan yang mendorong pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas.

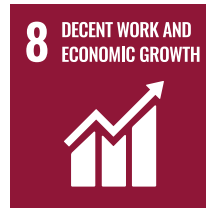


65,6%

dari revenue BRI
atau

Rp106,33 Triliun

(Pendapatan Bunga & FBI yang selaras dengan Sustainable Development Goals)



SDG 8 – Decent Work and Economic Growth

Rp101,52 Tn

Tingginya konsentrasi pendapatan pada SDG 8 menegaskan posisi strategis BRI sebagai bank universal dengan mandat pembangunan yang kuat, dalam mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang di seluruh Indonesia.



SDG 2 – Nol Kelaparan
Rp3,13 Tn



SDG 11 – Kota dan Komunitas Berkelanjutan
Rp0,98 Tn



SDG 7 – Energi Bersih dan Terjangkau
Rp0,48 Tn



SDG 8 – Decent Work and Economic Growth
Rp19.96 Tn

Meskipun memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan SDG 8, pendapatan yang selaras dengan SDGs 2, 7, 11, dan 12 mencerminkan dukungan BRI yang terdiversifikasi terhadap ketahanan pangan, transisi energi bersih, pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta ekosistem produksi yang bertanggung jawab.



Privasi dan Keamanan Data

Empat Pilar Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS

Tata Kelola

Dewan Komisaris

Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab
Manajemen

Pelaporan dan Evaluasi Progres

Strategi

Time Horizon

Identifikasi Risiko dan Peluang

Respon Identifikasi Risiko dan Peluang

Manajemen Risiko

Infrastruktur IT Sebagai Pondasi

Ketahanan Sistem Teknologi Informasi

Pengelolaan Privasi dan Data

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Privasi dan Data

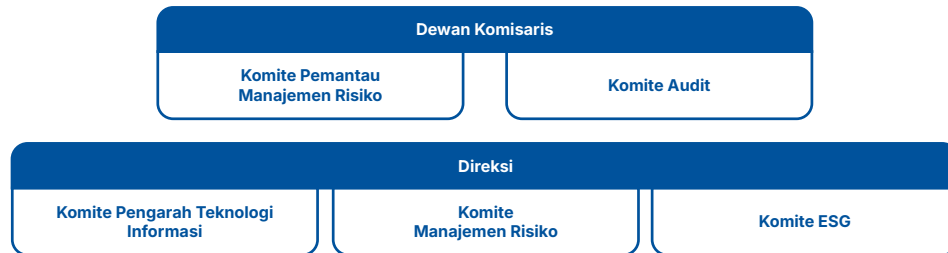
Metrik dan Target

Pencapaian BRI

Tata Kelola

BRI menyadari bahwa privasi dan keamanan data merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan keberlanjutan usaha. Seiring dengan percepatan transformasi digital dan meningkatnya risiko siber, pengelolaan data yang aman, andal, dan sesuai regulasi menjadi prioritas strategis Perusahaan. Tata Kelola Privasi dan Keamanan Data di BRI diimplementasikan melalui struktur pengawasan dan pengendalian yang kuat, termasuk pembentukan komite pada level Dewan Komisaris, Direksi, serta manajemen puncak. Tata Kelola terkait Privasi dan Keamanan Data di BRI baik pada level BOD maupun BOC mempertimbangkan anggota yang memiliki pengalaman sesuai guna memastikan perlindungan data dilakukan secara terintegrasi, akuntabel, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian. ^[GRI 3-3]

Mengawal Privasi dan Keamanan Data



Dewan Komisaris

BRI menerapkan tata kelola terintegrasi secara grup yang mencakup perumusan strategi, pengambilan keputusan, hingga fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan privasi dan keamanan data dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada level Dewan Komisaris, Komite Pemantau Manajemen Risiko berperan sebagai forum strategis untuk pertukaran informasi sekaligus pengawasan atas eksposur risiko, termasuk risiko teknologi informasi dan risiko digital. Komite ini melakukan pemantauan berkala atas implementasi kerangka pengelolaan risiko serta kecukupan pengendalian yang diterapkan. Komite ini juga menjalankan fungsi pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Audit diselenggarakan secara berkala dalam satu tahun sesuai ketentuan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi strategis yang selaras dengan arah kebijakan korporat BRI. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi acuan bagi manajemen dalam menetapkan dan menyempurnakan strategi perlindungan privasi dan keamanan data, dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat ketahanan operasional Perusahaan, menjaga kepercayaan dan kepentingan pemangku kepentingan, serta memastikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi

Di tingkat eksekutif, Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Direktur *Information Technology* dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan rekomendasi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan, dan operasional teknologi informasi. BRI menempatkan evaluasi berkelanjutan, pembaruan rutin terhadap protokol keamanan, dan komitmen terhadap inovasi sebagai prioritas dalam menjaga efektivitas langkah-langkah keamanan siber, terutama saat industri keuangan menavigasi lanskap digital yang semakin dinamis. Oleh karena itu, BRI melakukan pendekatan proaktif, adaptif, dan kolaboratif terhadap keamanan siber guna menjaga integritas sistem keuangan dan memperkuat kepercayaan publik.

Komite Manajemen Risiko Bidang Risiko Digital membahas perkembangan eksposur risiko digital yang mencakup berbagai aspek, termasuk profil risiko digital, *top risk*, penilaian risiko atas aset teknologi informasi serta keamanan privasi dan data. Komite ini juga menjadi ruang untuk meninjau isu-isu strategis lainnya yang relevan dengan ketahanan operasional, keamanan informasi, serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi dinamika risiko digital yang terus berkembang. Selanjutnya BRI memiliki Komite ESG untuk meningkatkan fokus dan pengawasan terhadap isu-isu keberlanjutan. Komite ESG dilaksanakan secara berkala, yaitu minimal dua kali dalam setahun, dengan salah satu tugas dan tanggung jawab Komite ESG adalah menetapkan isu keberlanjutan dan memberikan arahan dan reviu terkait implementasi keberlanjutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen

BRI menyusun tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi untuk fokus dalam mendukung pengelolaan privasi dan keamanan data, mulai dari infrastruktur, sistem informasi, hingga manajemen privasi dan keamanan data. Organisasi tersebut meliputi Direktorat Teknologi Informasi dan Direktorat Manajemen Risiko. Dalam struktur ini terdiri dari beberapa fungsi, antara lain:

1. *Chief Information Security Officer* (CISO) memimpin pengelolaan keamanan informasi secara menyeluruh;
2. *Data Protection Officer* (DPO) memastikan seluruh praktik pengelolaan data pribadi mematuhi ketentuan regulasi dan standar internal;
3. *Certified Information Systems Auditor* (CISA);
4. *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP); dan
5. *Certified Information Privacy Manager* (CIPM)

Secara bersama-sama, fungsi-fungsi tersebut membentuk kerangka kerja yang terpadu untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mendukung keberlanjutan Privasi dan Keamanan Data jangka panjang Perusahaan.

Pelaporan dan Evaluasi Progres

BRI menerapkan mekanisme pelaporan yang terstruktur untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Melalui laporan berkala serta mekanisme eskalasi insiden, manajemen dapat memantau perkembangan risiko, mengevaluasi efektivitas pengendalian, serta memastikan respons yang cepat dan transparan terhadap setiap potensi pelanggaran. Laporan terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi tersebut

Tata Kelola

disampaikan secara berkala kepada Komite Pengarah IT, Komite Manajemen Risiko (MR) Bidang Digital, sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap pengelolaan risiko teknologi informasi di BRI.

- Laporan Keamanan Siber Berkala
Laporan formal mengenai profil risiko siber, efektivitas sistem pertahanan, serta hasil *vulnerability assessment* untuk menjamin resiliensi teknologi Bank.
- Laporan Privasi Data
Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP/DPO) melaporkan kepatuhan pemrosesan data pribadi dan status hak subjek data guna memastikan keselarasan dengan strategi perlindungan privasi Bank.
- Eskalasi Insiden
Terdapat mekanisme pelaporan segera (*immediate reporting*) untuk setiap indikasi pelanggaran data guna memastikan respons strategis yang cepat dan transparan di tingkat manajerial tertinggi.

Unit satuan kerja teknologi informasi melaporkan kepada Direktur *Information Technology* dan bertanggung jawab atas bidang-bidang utama berikut:

- Desain Arsitektur Keamanan;
- Keamanan Operasional;
- Risiko Siber dan Intelijen Siber;
- Pencegahan Kehilangan Data & Penipuan;
- Manajemen Identitas & Akses;
- Program Manajemen, Investigasi, dan Forensik; serta
- *Security Governance*

Unit kerja terkait keamanan informasi (CISO, CISA dan CISSP) melapor langsung kepada Direktur *Information Technology* dan bertanggung jawab atas bidang-bidang utama berikut:

- Tata Kelola Keamanan;
- Manajemen Identitas dan Akses;
- Keamanan Data;
- Keamanan Aplikasi;
- Manajemen Pencegahan Kehilangan Data & Penipuan;
- Manajemen Ancaman dan Kerentanan; dan
- Manajemen Insiden Keamanan.

Selain Unit Keamanan Informasi, BRI juga telah membentuk Tim Respon Insiden Keamanan Siber (CSIRT) untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap insiden keamanan siber. CSIRT dipimpin oleh Koordinator CSIRT yang mengawasi beberapa tim khusus, termasuk:

- Koordinator CSIRT (sebagai koordinator untuk tim lain);
- Unit Kerja TI Fungsi Keamanan Informasi;
- Unit Kerja TI Fungsi Perencanaan;
- Unit Kerja TI Fungsi Pengembangan Sistem Aplikasi;
- Unit Kerja TI Fungsi Operasional Sistem Aplikasi;
- Unit Kerja TI Fungsi Infrastruktur dan Operasional;

- Unit Kerja TI Fungsi Manajemen Data;
- Unit Kerja Fungsi Manajemen Risiko Digital;
- Unit Kerja Fungsi Manajemen Risiko Operasional;
- Unit Kerja Fungsi Layanan dan Customer Experience;
- Unit Kerja Fungsi Sekretaris Perusahaan;
- Unit Kerja Fungsi Legal;
- Unit Kerja Fungsi Kepatuhan; dan
- Unit Kerja Fungsi Transformasi Budaya.

Sebagai bentuk komitmen BRI atas perlindungan privasi dan keamanan data, BRI menetapkan struktur tata kelola keamanan data melalui Surat Keputusan Direksi No.Kep: 2532-DIR/PPM/08/2024. Struktur ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan strategis terhadap privasi data nasabah. BRI secara resmi membentuk Tim *Data Protection* yang dipimpin oleh *Data Protection Officer* (DPO). Ketetapan tersebut juga mengatur *Steering Committee* yang beranggotakan Direksi dengan keanggotaan lintas grup guna memastikan kebijakan perlindungan data terintegrasi di seluruh lini bisnis, dibagi ke dalam lima *stream* utama:

- *Legal, Risk & Compliance Stream*
Berkonsentrasi pada kepatuhan terhadap Undang-undang Pelindungan Data Pribadi serta mitigasi risiko hukum dan kepatuhan yang terkait.
- *Digital & Information Technology Stream*
Berkonsentrasi pada penguatan infrastruktur teknologi, enkripsi, dan sistem keamanan siber untuk melindungi data dari ancaman akses ilegal.
- *Audit Stream*
Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan keamanan data di lapangan.
- *Communication & Customer Stream*
Mengelola aspek edukasi kepada nasabah serta memastikan saluran komunikasi terkait privasi data berjalan transparan dan responsif.
- *Subsidiary Stream*
Memastikan standardisasi dan konsistensi penerapan tata kelola keamanan data diseluruh perusahaan anak (*subsidiaries*) dalam ekosistem BRI

Keandalan Privasi dan Keamanan Data menjadi tulang punggung operasional layanan. Dalam upaya melakukan perlindungan privasi dan pengamanan data, BRI terus berinovasi memperkuat pertahanan sistem dari ancaman serangan siber. Keseriusan dalam penanganan ancaman tersebut diwujudkan melalui penetapan KPI kolektif di level Direksi. Metrik ini kemudian diterjemahkan ke jajaran *top executive management* sebagai berikut.

Manajemen	KPI	Target/Tujuan
Direktur Utama, Direktur <i>Information Technology</i>	Pelanggaran Keamanan Siber	Meminimalkan jumlah insiden keamanan siber yang terjadi
DRD dan CISO Group	Pelanggaran Data Insiden Keamanan Siber	

Strategi

Privasi dan Keamanan Data menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan bisnis. Karena itu, strategi perusahaan difokuskan pada penguatan perlindungan informasi, peningkatan ketahanan operasional, dan pemanfaatan teknologi yang lebih cerdas dan aman. Melalui pendekatan yang proaktif dan terukur, BRI memastikan bahwa setiap langkah inovasi digital selalu diimbangi dengan pengendalian risiko yang kuat, sehingga layanan tetap aman, andal, dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. ^[GRI 3-3]

Time Horizon

BRI membagi dampak dari berbagai risiko dan peluang keberlanjutan, termasuk yang terkait Privasi dan Keamanan Data, ke dalam *horizon* waktu jangka pendek (hingga satu tahun), jangka menengah (1–5 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). Klasifikasi ini diselaraskan dengan proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan

target dan prioritas jangka menengah hingga panjang untuk memperkuat ketahanan digital dan tata kelola keberlanjutan secara berkelanjutan.

Identifikasi Risiko dan Peluang

Identifikasi risiko dan peluang menjadi bagian dari strategi BRI untuk mengukur dampak yang ditimbulkan serta menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Pada bagian ini, BRI menganalisis dampak pada model bisnis, rantai nilai, dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, asesmen dampak kejadian berdasarkan jangka waktu diidentifikasi sehingga BRI dapat mengantisipasi dan melakukan upaya mitigasi yang sesuai. BRI melakukan identifikasi risiko dan peluang dari isu keberlanjutan Privasi dan Keamanan Data, kemudian melakukan asesmen dampak terhadap aktivitas Perusahaan. Di bawah ini adalah hasil identifikasi risiko dan peluang tersebut.

Kategori	Deskripsi	Potensi Dampak			Dampak pada Model Bisnis dan Rantai Nilai	Dampak pada Pengambilan Keputusan Strategis	Dampak Keuangan
		Hulu	Operasi Internal	Hilir			
Risiko							
Risiko Serangan <i>Malware</i>	Risiko serangan siber berupa <i>malware</i> yang mengancam sistem, aplikasi dan server perangkat <i>Information Technology (IT)</i>	✔	✔	✔	Gangguan pada aset, sistem, aplikasi, dan perangkat teknologi informasi BRI yang dapat menghambat kelangsungan operasional dan layanan digital.	- Memperkuat prioritas investasi IT pada arsitektur keamanan, deteksi dini, dan perlindungan sistem serta data sensitif. - Mengarahkan pengembangan layanan digital agar mengadopsi <i>security-by-design</i> dan meningkatkan ketahanan operasional perusahaan. - Mendorong keputusan strategis untuk meningkatkan edukasi nasabah, standar keamanan IT, dan pemilihan mitra teknologi yang kredibel.	Potensi kerugian finansial akibat gangguan layanan, pemulihan sistem, dan penanganan insiden keamanan, dan biaya perbaikan infrastruktur IT.
Risiko <i>Ransomware</i>	Risiko <i>ransomware</i> akibat kurangnya pengamanan sistem yang menyebabkan kehilangan kontrol atas <i>database</i> informasi sensitif baik informasi nasabah, vendor, maupun perusahaan	✔	✔	✔	- Meningkatnya risiko kompromi data seperti transaksi dan layanan digital, data proses dan integrasi, hingga upaya pemulihan akibat gangguan dan kejahatan siber. - Potensi kerugian finansial dan reputasi yang dapat memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap ketahanan infrastruktur IT.		Risiko denda dan konsekuensi kepatuhan dari pelanggaran data pribadi atau ketidakpatuhan terhadap regulasi.
Risiko <i>Phishing</i> dan Kejahatan Siber	Risiko kejahatan siber yang menyerang data privasi nasabah yang rentan dengan berbagai metode <i>phishing</i>		✔	✔			Penurunan pendapatan dan peningkatan biaya tambahan dari berkurangnya kepercayaan nasabah, meningkatnya <i>fraud</i>, dan potensi hilangnya peluang bisnis digital.
Risiko Penyalahgunaan Teknologi Baru (AI)	Risiko penyalahgunaan teknologi terbaru seperti Kecerdasan Buatan (AI) yang memanipulasi suara, gambar, video, respons, dan interaksi nasabah			✔	- Berisiko menurunkan kualitas dan kepuasan pengalaman nasabah dalam mengakses produk dan layanan secara digital. - Mengganggu keandalan model bisnis digital BRI dengan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap autentikasi dan interaksi layanan berbasis teknologi.	- Memperkuat strategi keamanan digital melalui verifikasi identitas yang lebih canggih serta peningkatan fokus pada teknologi pendeteksi manipulasi AI pada layanan digital. - Kebijakan pengembangan layanan digital dan inovasi baru mengadopsi prinsip <i>security-by design</i> serta mengutamakan perlindungan nasabah dari misinformasi atau interaksi yang dimanipulasi AI.	Pada tahun 2025, BRI mencatat tidak ada pelanggaran keamanan siber (<i>zero cyber security breach</i>), sehingga tidak terdapat dampak signifikan terhadap keuangan BRI.

Strategi

Kategori	Deskripsi	Potensi Dampak			Dampak pada Model Bisnis dan Rantai Nilai	Dampak pada Pengambilan Keputusan Strategis	Dampak Keuangan
		Hulu	Operasi Internal	Hilir			
Risiko Tata Kelola IT yang Tidak Mutakhir	Manajemen risiko pengelolaan produk, layanan dan data yang tidak mutakhir. Hal ini menyebabkan kelemahan dalam pengelolaan data, dan kehilangan optimalisasi peluang bisnis		✓		- Berpotensi melemahkan efektivitas model bisnis digital karena proses, data, dan layanan tidak mengikuti kebutuhan dan perkembangan pasar. - Mengakibatkan hilangnya peluang bisnis baru karena inovasi dan adaptasi layanan tertunda. - Ketergantungan IT ke pihak ketiga yang dapat membatasi inovasi yang dilakukan.	Mendorong percepatan modernisasi sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan data untuk keputusan berbasis <i>insight</i> yang akurat.	Peningkatan biaya operasional karena kebutuhan perbaikan sistem, pembaruan proses, dan peningkatan kualitas data.
Peluang							
Personalisasi Layanan Keuangan Digital	Peningkatan pengalaman nasabah dalam mengakses produk dan layanan keuangan secara lebih dekat dan personal dengan memanfaatkan <i>platform</i> berbasis integrasi data dan TI mutakhir		✓	✓	- Memperkuat model bisnis berbasis personalisasi layanan melalui pemanfaatan data dan teknologi yang meningkatkan relevansi interaksi dengan nasabah. - Meningkatkan efisiensi dan kelancaran rantai nilai melalui integrasi data yang mempercepat inovasi produk dan memperkuat loyalitas nasabah.	Memperkuat integrasi data dan teknologi dalam upaya pengembangan layanan yang lebih personal.	- Potensi peningkatan pendapatan dari peluang <i>upselling</i>, <i>cross-selling</i>, dan loyalitas nasabah yang lebih tinggi. - Efisiensi biaya melalui otomatisasi dan analitik berbasis AI yang mengurangi kebutuhan proses manual. - Peningkatan profitabilitas jangka panjang melalui pertumbuhan basis nasabah aktif dan nilai transaksi yang lebih besar.
Platform digital yang tangguh dan tahan terhadap ancaman dan kejahatan siber	Peningkatan kenyamanan akses layanan keuangan melalui <i>platform</i> yang aman dan tangguh dari serangan siber		✓	✓	- Memperkuat model bisnis digital dengan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah melalui akses layanan yang aman dan stabil. - Meningkatkan ketahanan <i>supply chain</i> teknologi melalui penguatan infrastruktur keamanan, sehingga layanan tetap beroperasi optimal meskipun menghadapi ancaman siber.	Mengarahkan strategi perusahaan untuk memperkuat infrastruktur keamanan digital guna memastikan keberlanjutan dan keandalan layanan.	

Dalam pengelolaan privasi dan keamanan data, BRI telah mengidentifikasi risiko dan peluang serta menilai potensinya terhadap operasional dan tata kelola perusahaan. BRI memahami bahwa risiko yang muncul dari privasi dan keamanan data dapat datang secara tidak terduga, untuk itu BRI telah menerbitkan kebijakan pengelolaan data yang menyeluruh yang dituangkan dalam Surat Edaran no SE.27-DIR/EDM/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang *Data Management*. Kebijakan ini terdiri dari 11 modul sebagai pedoman komprehensif pengelolaan data. BRI belum melakukan pengukuran kuantitatif atas dampak keuangan secara spesifik, mengingat karakteristik risiko keamanan data dan privasi yang bersifat dinamis, preventif, dan terintegrasi dengan risiko operasional serta keberlanjutan lainnya. Meskipun demikian, BRI memahami bahwa pengelolaan keamanan data dan privasi berpotensi mempengaruhi biaya operasional, kepatuhan regulasi, dan kepercayaan nasabah secara kualitatif, sehingga pengelolaannya terus dilakukan secara terintegrasi dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRI secara bertahap terus mengembangkan metodologi dan kerangka pengukuran yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi Potensi dampak keuangan, sejalan dengan peningkatan praktik manajemen risiko dan standar pelaporan yang berlaku.

Strategi

Respon Identifikasi Risiko dan Peluang [FN-CB-230a.2]

Dari hasil identifikasi risiko dan peluang keamanan privasi dan data terhadap kelangsungan bisnis, BRI menyusun strategi sebagai berikut.

	Identifikasi Risiko	Tindakan	Tingkat Dampak	Horizon Dampak
Risiko 	Risiko Serangan <i>Malware</i>	Tata Kelola 1. Pengawasan langsung oleh Direksi melalui Komite Teknologi Informasi. 2. Pelaksanaan reviu internal dan/atau eksternal secara berkala untuk memastikan proses berjalan dengan baik.	Tinggi	Jangka Pendek
	Risiko <i>Ransomware</i>	3. Pengelolaan teknologi informasi oleh manajemen yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.	Tinggi	Jangka Pendek
	Risiko <i>Phishing</i> dan Kejahatan Siber	Proses 1. Penerapan standar ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada aspek teknologi informasi di BRI.	Tinggi	Jangka Pendek
	Risiko Penyalahgunaan Teknologi Baru (AI)	2. Meningkatkan sistem pertahanan IT dalam upaya mendeteksi, merespons, monitoring, dan evaluasi insiden terkait risiko IT.	Tinggi	Jangka Menengah
	Risiko Tata Kelola IT yang Tidak Mutakhir	3. Melakukan asesmen risiko secara berkala untuk memastikan mitigasi risiko kejadian serangan siber dan kejahatan terkait IT dapat dikelola dengan baik. 4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja yang mengelola teknologi informasi.	Tinggi	Jangka Panjang
Peluang 	Personalisasi Layanan Keuangan Digital	Tata Kelola Mmenyusun kebijakan terkait penggunaan kecerdasan buatan sesuai dengan regulasi dan prinsip kecerdasan buatan yang berlaku.	Menengah	Jangka Pendek
	Platform Digital yang Tangguh dan Tahan terhadap Ancaman dan Kejahatan Siber	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja yang mengelola integrasi data.	Menengah	Jangka Pendek

Manajemen Risiko

Kebijakan dan Proses dalam Privasi dan Keamanan Data [OJK F.27][GRI 3-3]

Pengelolaan Privasi dan Keamanan Data membutuhkan pendekatan dari berbagai sisi. Untuk itu, BRI menyusun inisiatif strategis yang mendukung keberlanjutan perusahaan secara operasional. Inisiatif strategis tersebut dituangkan dalam empat kebijakan utama yang mendukung pencapaian Privasi dan Keamanan Data, dimulai dari infrastruktur sebagai fondasi sistem informasi teknologi yang andal, pengelolaan data, peningkatan kapabilitas pekerja, hingga perlindungan nasabah. Kebijakan yang mendukung privasi dan keamanan data telah disahkan oleh Direksi, dan berlaku di seluruh aktivitas perusahaan yang melibatkan data dan privasi. Di bawah ini adalah kebijakan tersebut.

Infrastruktur Teknologi Informasi	Keamanan Sistem Informasi	Privasi Data	Pelindungan Nasabah
SE.28-DIR/ISG/10/2024 tentang Perencanaan, Manajemen, dan Sinergi Digital dan Teknologi Informasi	SE.37-DIR/ISC/09/2023 tentang Sistem Tata Kelola Keamanan Informasi	SE.27-DIR/EDM/12/2025 tentang <i>Data Management</i> – Buku 6: <i>Data Security (Data Privacy)</i> , Bagian 1: <i>Data Security</i> dan Bagian 2: <i>Pelindungan Data Pribadi</i>	SE.21-DIR/SCC/08/2024 tentang Pelindungan Nasabah

Infrastruktur IT sebagai Pondasi

Pengelolaan keamanan siber di BRI diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, serta standar dan kerangka kerja internasional yang relevan, termasuk ISO 27001:2013, PCI-DSS, dan NIST. Pengelolaan risiko privasi dan keamanan data dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif, mulai dari perencanaan strategis infrastruktur, penyelarasan dengan strategi korporasi, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, hingga pemenuhan regulasi serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan risiko privasi dan keamanan data dikelola dengan baik.

Pengelolaan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor SE.28-DIR/ISG/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Perencanaan, Manajemen, dan Sinergi Digital dan Teknologi Informasi, yang menjadi acuan tata kelola digital di lingkungan BRI untuk memperkuat pengendalian risiko digital, menjaga kepercayaan nasabah, dan mendukung keberlanjutan. Penyusunan tata kelola untuk tanggap insiden keamanan informasi yang sejalan dengan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) BRI yang dituangkan dalam Surat Edaran tentang Business Continuity Management. BCP wajib diuji coba minimal sekali dalam satu tahun dengan melibatkan pengguna akhir (*end-to-end*).

Ketahanan Sistem Teknologi Informasi

Pengelolaan Privasi dan Keamanan Data di BRI didukung oleh sistem yang andal melalui penerapan pengamanan siber terintegrasi, termasuk pengamanan berlapis seperti *firewall*, sistem deteksi

intrusi, perlindungan titik akhir, pemanfaatan kecerdasan buatan dan *machine learning* untuk pemantauan ancaman, serta perancangan arsitektur siber yang aman. Pengelolaan keamanan siber BRI mengacu pada kebijakan internal serta kerangka regulasi yang berlaku. Kerangka tersebut mencakup POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; Peraturan Bank Indonesia No. 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia; SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 1 Tahun 2024 tentang Manajemen Insiden Siber; serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, BRI juga mengacu pada standar internasional seperti ISO 27001:2022, PCI-DSS, dan NIST sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keamanan informasi dan ketahanan siber secara berkelanjutan.

Pengelolaan keamanan sistem informasi BRI mengacu pada ketentuan regulasi dan standar yang berlaku, termasuk POJK No. 38/POJK.03/2016, serta kerangka kerja internasional seperti ISO 27001, PCI-DSS, dan NIST. Kebijakan ini dituangkan dalam SE.37-DIR/ISC/09/2023 tentang sistem Tata Kelola Keamanan Informasi.

Komitmen Penguatan Ketahanan Sistem Teknologi Informasi

Pengelolaan informasi merupakan aspek penting dalam operasional yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai potensi risiko, termasuk akses tidak sah dan ancaman siber. Untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan keberlangsungan operasional bisnis, BRI secara berkelanjutan memperkuat keamanan informasi melalui strategi perlindungan yang terstruktur dan komprehensif sebagai berikut:

- menetapkan tata kelola keamanan informasi serta tujuan perlindungan aset informasi yang selaras dengan arah strategis BRI;
- menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi perlindungan aset informasi, termasuk penetapan tanggung jawab individu terkait keamanan informasi di seluruh lini organisasi;
- melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait, baik pemangku kepentingan internal maupun pihak ketiga, mengenai pentingnya pencapaian tujuan perlindungan aset informasi sesuai dengan tata kelola keamanan informasi dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga seluruh pihak memahami serta mematuhi persyaratan keamanan informasi yang telah ditetapkan;
- memastikan dan mengarahkan implementasi program manajemen risiko untuk mendukung pemantauan serta respons terhadap ancaman keamanan informasi, sekaligus melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas sistem keamanan informasi sehingga perlindungan aset informasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan; serta
- mengembangkan strategi serta melakukan evaluasi berkala pada kepatuhan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi guna memastikan integritas serta keamanan data terjaga.

Manajemen Risiko

BRI menerapkan ketentuan perlindungan data nasabah sesuai dengan SEOJK No. 14/SEOJK.07/2014 untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. BRI secara konsisten terus mengembangkan sistem keamanan informasi yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Kerangka keamanan sistem terhadap risiko keamanan siber disusun dalam *Enterprise Security Architecture* (ESA) yang mengacu pada *National Institute of Standards and Technology* (NIST) *Cybersecurity Framework*. ESA dirancang berdasarkan analisis risiko dan perkembangan lanskap ancaman siber terkini guna memastikan efektivitas pengendalian keamanan. ESA terdiri dari enam pilar utama, dengan fungsi khusus *Security Operation Center* (SOC) yang didukung oleh pengamanan berlapis seperti *firewall*, sistem deteksi intrusi, pemanfaatan AI dan *machine learning* untuk pemantauan melalui *Security Operation Center* (SOC) selama 24/7, serta diperkuat dengan mekanisme respons dan pemulihan insiden yang terkoordinasi.

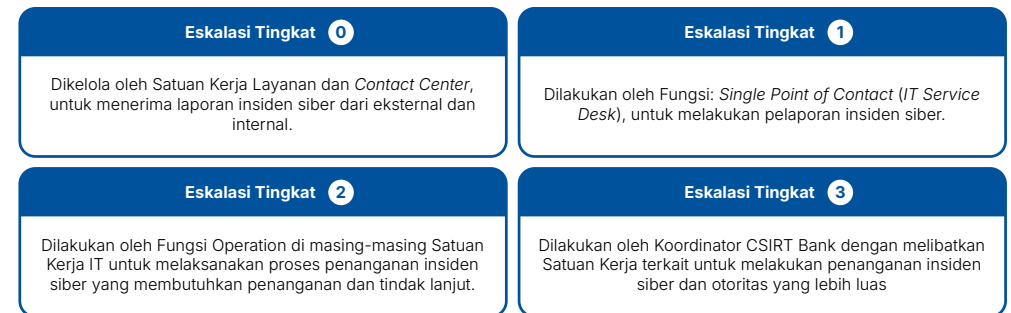


Pada tahap identifikasi, BRI melakukan penilaian kematangan pada sistem keamanan teknologi informasi serta melakukan *gap analysis*. BRI menerapkan proses identifikasi dan penilaian risiko keamanan informasi yang selaras dengan ISO/IEC 27001, guna mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Proses ini dilakukan secara berkala dan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan ancaman internal maupun eksternal serta kerentanan sistem yang ada.

Untuk menangani risiko kebocoran dan pelanggaran data, BRI menerapkan pengendalian keamanan informasi yang mencakup pengelolaan akses, perlindungan sistem dan data, pemantauan keamanan, serta mekanisme manajemen insiden keamanan informasi. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya insiden, meminimalkan dampak apabila terjadi pelanggaran, serta memastikan pemulihan dan perbaikan yang tepat waktu sesuai dengan persyaratan standar ISO/IEC 27001. Dalam upaya mengidentifikasi kerentanan sistem dan melakukan peninjauan terhadap keamanan sistem informasi, BRI melakukan serangkaian *vulnerability assessment*, *penetration test* dan simulasi serangan siber (*red team exercise*). Pedoman pelaksanaan ini dituangkan dalam SO.46-CIS/12/2025 tentang Pengamanan Sistem Aplikasi IT.

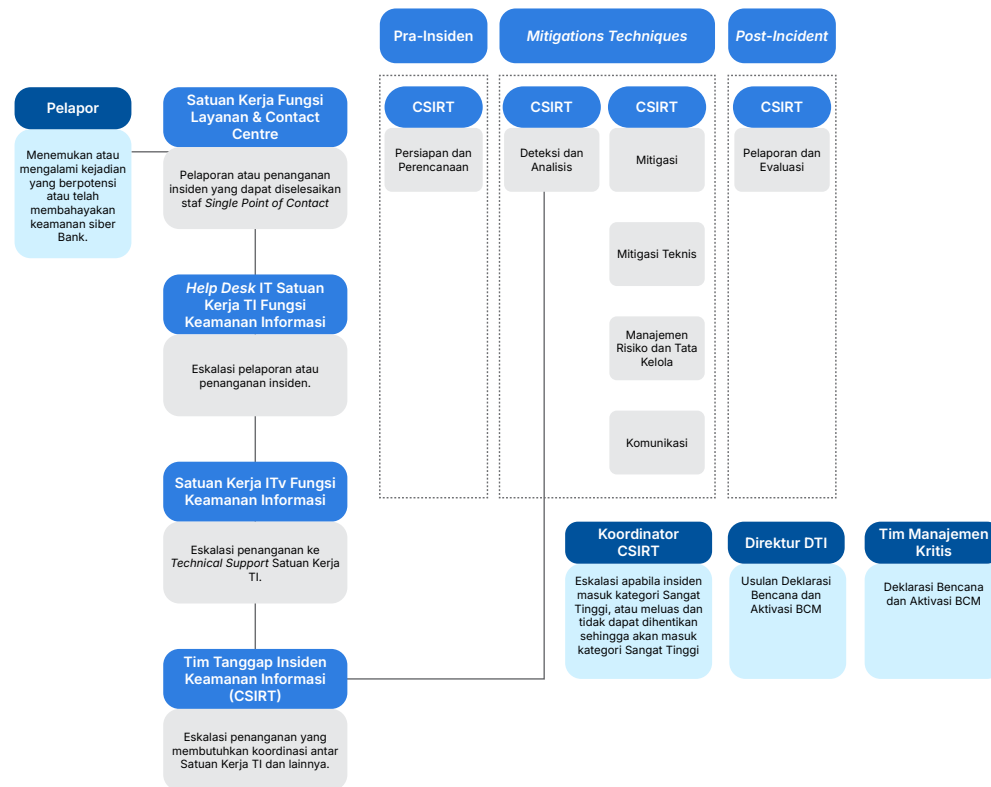
Untuk menjaga integritas serta pengelolaan data secara berkelanjutan, BRI telah menerbitkan kebijakan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan data, kebijakan tersebut dituangkan dalam SE.27-DIR/EDM/12/2025 tentang *Data Management* – Buku 6: *Data Security (Data Privacy)*, Bagian 1: *Data Security* dan Bagian 2: *Pelindungan Data Pribadi*. Pada sisi keamanan informasi, BRI telah menerbitkan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sistem informasi. Melalui kebijakan ini BRI telah memiliki satuan kerja khusus pengamanan sistem informasi dan standar keamanan informasi dengan pihak ketiga (*supplier*, pemasok dll) yang terkait dengan data informasi. BRI terus melakukan pemantauan terhadap kinerja kepatuhan persyaratan informasi dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga. Dalam rangka memastikan ketentuan dan protokol tanggap insiden siber telah dibuat dengan baik, BRI secara rutin dalam tiga tahun terakhir telah melakukan simulasi insiden siber.

Asesmen atas risiko dan peluang dinilai secara berkala dengan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap keberlangsungan operasional, keandalan sistem, perlindungan data nasabah, serta reputasi Perusahaan. Identifikasi risiko yang mengancam privasi dan keamanan data dapat datang dari berbagai aspek, seperti *malware*, *ransomware*, *phishing*, *cybercrime*, dll. BRI telah menyusun proses eskalasi untuk tetap menjaga keamanan informasi privasi dan data. Hal ini dilakukan melalui kerangka tanggap insiden siber oleh *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT). CSIRT melaksanakan dalam empat tahap yaitu:



BRI menyiapkan kerangka kerja, program, dan tim keamanan informasi untuk mengantisipasi pelanggaran dan insiden keamanan siber, dengan evaluasi tingkat kematangan dan kesiapan yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Untuk menjaga ketersediaan layanan, BRI menetapkan standar waktu deteksi insiden selama 90 menit serta penanganan dan pemulihan selama 180 menit. Proses penanganan insiden tersebut dilaksanakan secara sistematis melalui empat tingkat pelaporan dan eskalasi, sebagaimana tercantum dalam SOP Manajemen Insiden Siber SO.32-ISC/11/2025.

Manajemen Risiko



BRI melaksanakan berbagai inisiatif untuk memperkuat keamanan siber, antara lain melalui penguatan tata kelola penanganan insiden keamanan informasi yang terintegrasi dengan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP). Pengelolaan keberlangsungan usaha tersebut diatur dalam Surat Edaran terkait *Business Continuity Management*, dengan pelaksanaan uji coba BCP secara menyeluruh (*end-to-end*) melibatkan pengguna akhir (*end-user*) paling sedikit satu kali dalam setahun. Dalam upaya identifikasi kerentanan sistem dan melakukan peninjauan terhadap keamanan sistem informasi, BRI melakukan serangkaian *vulnerability assessment*,

penetration testing, dan simulasi serangan siber (*red team exercise*). Pedoman pelaksanaan ini dituangkan dalam SO.46-CIS/12/2025 tentang Pengamanan Sistem Aplikasi IT. Dalam penanganan insiden, BRI membentuk *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan data dan privasi secara cepat dan terkoordinasi, didukung oleh protokol komunikasi untuk penyampaian informasi kepada publik serta kerja sama dengan pakar keamanan siber berpengalaman global dalam melakukan telaah forensik dan investigasi insiden siber. Untuk tetap menjaga kualitas dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan implementasi, BRI melakukan internal audit secara berkala pada infrastruktur dan sistem teknologi informasi. Untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam pengamanan aset informasi, BRI melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi risiko secara berkala melalui penerapan manajemen risiko, tinjauan manajemen, analisis insiden, serta tindakan korektif dan preventif yang ditindaklanjuti secara sistematis oleh fungsi keamanan informasi.

Sertifikasi Keamanan Informasi

Sertifikasi	Lingkup	Penerbit	Masa Berlaku
ISO 27001:2022	BRI API, Big Data, Managing Event & Cyber Threat Monitoring, Card IProduction, Spacecraft Operation, dan Data Center Facility	British Standards Institution (BSI)	13 Desember 2027
ISO/IEC 20000	Surveillance BRINets Express, BRILink Mobile, BRI mo, Extend Scope Brispot	British Standards Institution (BSI)	17 November 2027

Verifikasi Internal dan Eksternal atas Sistem informasi

Untuk memastikan keamanan infrastruktur teknologi informasi serta efektivitas sistem manajemen keamanan informasi, pada tahun 2025 BRI melakukan asesmen tingkat maturitas terhadap infrastruktur IT dan sistem manajemen keamanan informasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga independen. Selain itu, BRI juga melaksanakan verifikasi keamanan melalui *Penetration Testing* dan *Vulnerability Assessment* oleh pihak eksternal guna mengidentifikasi potensi kerentanan serta meningkatkan ketahanan sistem terhadap ancaman siber. Sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan informasi, audit independen eksternal dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun, sementara audit internal dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan efektivitas penerapan pengendalian keamanan informasi sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku.

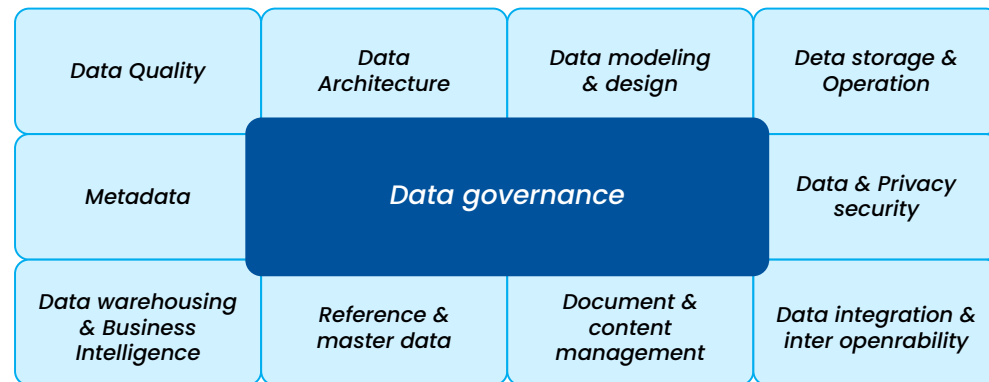
Manajemen Risiko

Pengelolaan Privasi dan Data [OJK F.26][GRI3-3][FN-CB-230a.2]

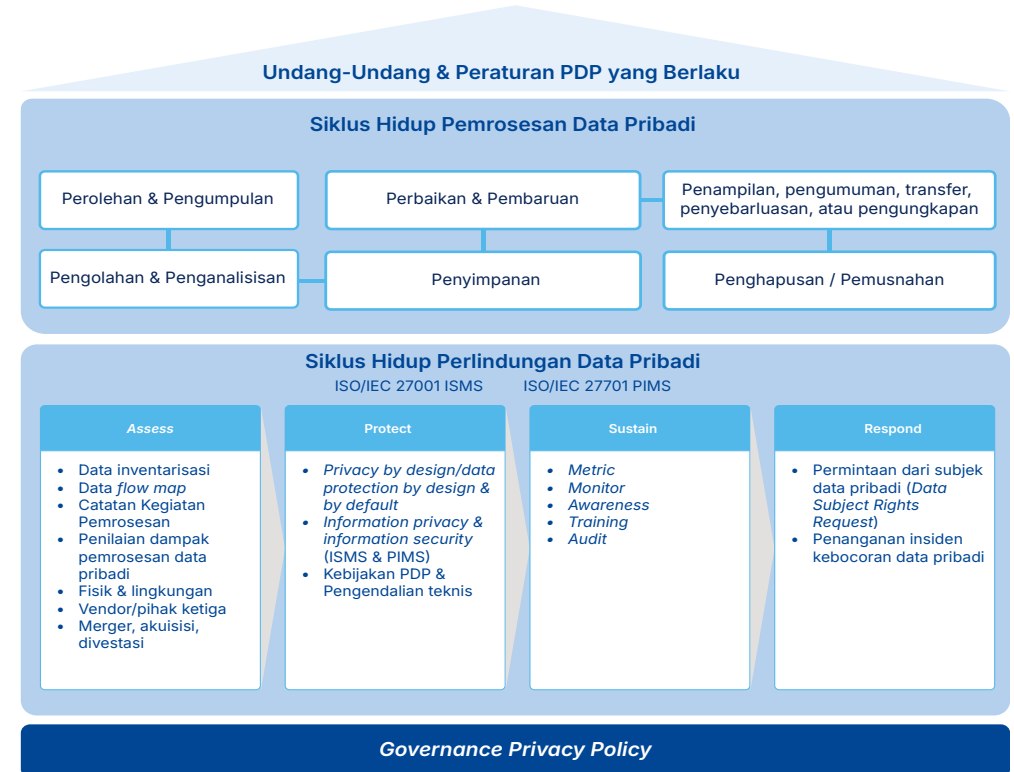
Your Privacy is Our Priority

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, BRI memandang keamanan data dan privasi sebagai aspek penting dalam pengelolaan risiko perusahaan. Risiko terkait keamanan data dan privasi dapat berdampak pada kelangsungan operasional, kepercayaan nasabah, dan reputasi Perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, BRI menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi untuk memastikan data dan privasi nasabah dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan risiko terkait data dan privasi dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE.27-DIR/EDM/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang *Data Management*, yang mengatur secara menyeluruh. Kebijakan ini menjadi landasan dalam memastikan keamanan data dan privasi dikelola secara konsisten. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh lini bisnis, sehingga penerapan standar pengelolaan data dilakukan secara konsisten di lingkungan perusahaan. Penerapan kebijakan ini mendukung pengelolaan data dan privasi yang terstruktur serta selaras dengan kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku. Pada kebijakan tersebut manajemen data disusun menjadi masing-masing fokus pengelolaan data sebagai berikut.



Pelindungan data nasabah dituangkan dalam *framework* berikut:



Siklus Perlindungan data pribadi dilaksanakan melalui beberapa proses yaitu:

Assess

BRI secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas proses manajemen privasi untuk memastikan keselarasan dengan praktik terbaik serta ketentuan kepatuhan yang berlaku. Evaluasi ini mencakup identifikasi kesenjangan (gap analysis), penyusunan dan pemutakhiran aktivitas perekaman pemrosesan data, pelaksanaan penilaian dampak perlindungan data pribadi, penilaian risiko privasi terhadap pihak ketiga, serta pengelolaan inventaris dan pemetaan data.

Protect

BRI menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional untuk melindungi data pribadi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Upaya perlindungan tersebut mencakup, namun tidak

Manajemen Risiko

terbatas pada, penerapan enkripsi, tokenisasi, *data loss prevention*, serta teknologi pengamanan lainnya guna mencegah akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, perubahan, maupun penghapusan data yang tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sustain

BRI berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi serta meningkatkan praktik perlindungan data melalui pelatihan dan program peningkatan kesadaran bagi seluruh pekerja di kantor pusat maupun cabang. Untuk memastikan pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai pedoman yang berlaku, BRI juga melaksanakan audit atas penerapan perlindungan data pribadi dengan mempertimbangkan skala dan karakteristik operasional bisnis.

Respond

BRI telah memiliki prosedur penanganan insiden siber untuk menangani pelanggaran data pribadi dengan segera dan efektif. Selain itu, sebagai bentuk transparansi terhadap pemrosesan data pribadi, BRI telah menyusun dan mempublikasi pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada tautan <https://bri.co.id/privacy>.

Apabila insiden berpotensi mengakibatkan kegagalan perlindungan data pribadi, BRI melakukan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan otoritas paling lambat 3 × 24 jam sejak insiden diketahui, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan setidaknya memuat jenis data yang terdampak, waktu dan penyebab kejadian, serta langkah mitigasi dan pemulihan yang telah dan akan dilakukan. Penanganan insiden kebocoran data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja yang terlibat meliputi:

- Koordinator CSIRT: Mengkoordinasikan seluruh proses tanggap insiden dan memastikan kesesuaian dengan tata kelola BRI-CSIRT.
- Satuan Kerja TI Fungsi Keamanan Informasi: Bertindak sebagai penanggung jawab teknis, memimpin eskalasi, dan dokumentasi insiden.
- Satuan Kerja TI Fungsi Operasional Sistem Aplikasi: Mengamankan dan memulihkan sistem aplikasi serta mendokumentasikan perubahan.
- Satuan Kerja TI Fungsi Infrastruktur dan Operasional: Mengelola pengamanan infrastruktur dan memastikan tindak lanjut sesuai prosedur.

Di tingkat operasional, BRI telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan sebagai panduan standar di seluruh unit kerja, yang terdiri dari sebagai berikut.

- Surat Edaran Pelindungan Data Pribadi (SE PDP)
SE PDP merupakan kebijakan internal BRI yang menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data nasabah sesuai dengan standar kepatuhan regulasi nasional dan praktik terbaik internasional.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Data
Panduan teknis ini memastikan mitigasi risiko privasi dilakukan secara sistematis melalui empat SOP yakni:
 1. *Records of Processing Activities (ROPA)*
Penatausahaan seluruh aktivitas pemrosesan data untuk menjamin transparansi dan ketertelusuran.
 2. *Data Protection Impact Assessment (DPIA)*
Mekanisme evaluasi dini untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko privasi pada setiap produk atau sistem baru.
 3. *Consent Management*
Pengelolaan persetujuan nasabah guna memastikan penggunaan data dilakukan secara sah dan sesuai dengan preferensi pemilik data.
 4. *Data Transfer*
Pengaturan prosedur pertukaran data yang aman, baik secara internal maupun dengan pihak ketiga, untuk mencegah kebocoran informasi.

Dalam pengelolaan data nasabah, bank menerapkan pengendalian keamanan yang kuat seperti enkripsi data dan pembatasan akses berbasis otorisasi untuk melindungi informasi sensitif. Akses terhadap data diatur melalui mekanisme *access control* sehingga hanya pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu, pada kondisi tertentu diterapkan teknik enkripsi serta de-identifikasi atau anonimisasi data guna mengurangi risiko penyalahgunaan informasi. Penerapan langkah-langkah ini mendukung terjaganya kerahasiaan, integritas, dan keamanan data sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan yang berlaku. Pada sisi nasabah, BRI menerbitkan kebijakan perlindungan nasabah pada Surat Edaran Nomor SE.21-DIR/SCC/08/2024 tentang Perlindungan Nasabah. Kebijakan ini menekankan pada perlindungan hak dan kepentingan nasabah pada setiap aktivitas perjanjian produk sehingga tercapai literasi keuangan yang baik dari sisi nasabah.

Manajemen Risiko

Pengelolaan Keamanan Privasi^[FN-CB-230a.2]

Pengelolaan risiko operasional, reputasi, dan strategis dilakukan secara terintegrasi di perusahaan melalui penguatan proses, peningkatan kompetensi pekerja, penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), serta perlindungan privasi dan respons cepat terhadap pengaduan nasabah. Dengan dukungan analisis data dan evaluasi berkelanjutan, BRI terus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan nasabah dan dinamika bisnis. Di atas semuanya, kepercayaan nasabah menjadi prioritas utama, yang dijaga melalui kerangka perlindungan privasi yang konsisten, aman, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi dan teknologi.

Menyadari bahwa kepercayaan nasabah sangat bergantung pada bagaimana data pribadi mereka dijaga, BRI menempatkan perlindungan privasi sebagai bagian penting dalam setiap layanan perbankan. BRI memastikan bahwa data pribadi nasabah dikelola secara aman dan bertanggung jawab dengan berlandaskan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kebijakan Internal yang Kuat, dan Dukungan Teknologi yang Andal. Untuk itu, *Chief Information Security Officer* (CISO) Group memimpin pengelolaan keamanan informasi secara menyeluruh dan *Data Protection Officer* (DPO) memastikan seluruh praktik pengelolaan data pribadi mematuhi ketentuan regulasi dan standar internal.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan data, termasuk manajemen BRI, penyelenggara sistem elektronik, serta pihak yang memproses data pribadi. Seluruh entitas yang terlibat dalam pengumpulan, pengiriman, penyebarluasan, maupun penghapusan data pribadi (seperti pekerja, vendor, mitra, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulasi perbankan di Indonesia, serta praktik terbaik di industri. Melalui pendekatan ini, BRI memastikan penerapan standar perlindungan data yang konsisten sekaligus mengelola risiko yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.

Ruang Lingkup Keamanan Data Privasi

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten, BRI membentuk fungsi Petugas Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*/DPO) serta menetapkan pedoman yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko, BRI menerapkan kebijakan dan langkah kepatuhan untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.

Subjek Pelindungan Data Pribadi	Cakupan Pelindungan Data Pribadi
- Calon nasabah dan nasabah - Calon pekerja dan pekerja - Vendor - Pihak ketiga lainnya	- Pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan - Penyimpanan - Perbaikan dan pembaruan - Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau - Penghapusan atau pemusnahan

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, BRI menetapkan kebijakan dan mekanisme kepatuhan untuk memastikan pemrosesan data pribadi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, termasuk manajemen, penyelenggara sistem elektronik, dan prosesor data pribadi di lingkungan BRI. Ruang lingkup perlindungan data privasi mencakup subjek data serta aspek perlindungan sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku. Melalui penerapan kerangka ini, BRI berkomitmen untuk menjaga keamanan data nasabah, mengendalikan risiko, serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap layanan BRI di setiap aktivitas yang berkaitan dengan data pribadi.

Evaluasi Keamanan Privasi

Sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko, BRI menerapkan kebijakan dan langkah kepatuhan untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan data, termasuk manajemen BRI, penyelenggara sistem elektronik, serta pihak yang memproses data pribadi. Seluruh entitas yang terlibat dalam pengumpulan, pengiriman, penyebarluasan, maupun penghapusan data pribadi (seperti pekerja, vendor, mitra, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulasi perbankan di Indonesia, serta praktik terbaik di industri. Melalui pendekatan ini, BRI memastikan penerapan standar perlindungan data yang konsisten sekaligus mengelola risiko yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.

Dalam hal evaluasi BRI melalui satuan kerja internal audit secara *periodic* melaksanakan internal audit pada implementasi pengelolaan data privasi. Audit perlindungan data pribadi mencakup evaluasi tata kelola kebijakan perlindungan data pribadi, pemenuhan hak subjek data, pelaksanaan pemrosesan data pribadi di seluruh unit kerja, kepatuhan dan kewajiban pihak ketiga, efektivitas fungsi dan unit kerja terkait perlindungan data pribadi, penerapan prinsip-prinsip privasi, serta mekanisme penanganan insiden atau pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi.

Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Dalam mengelola dan melindungi privasi data pribadi, BRI berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagai landasan dalam seluruh aktivitas pemrosesan data.

- Pengumpulan terbatas dan transparan: Data pribadi dikumpulkan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
- Pembatasan tujuan: Pemrosesan data dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Pemenuhan hak subjek data: Pemrosesan data dilaksanakan dengan menjamin hak-hak subjek data pribadi.
- Akurasi data: Data pribadi dijaga agar akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Keamanan data: Data pribadi dilindungi dari akses, pengungkapan, perubahan, atau penyalahgunaan yang tidak sah, serta dari kerusakan dan kehilangan.
- Kejelasan informasi pemrosesan: Tujuan, aktivitas, dan risiko pemrosesan data disampaikan secara jelas kepada subjek data.
- Pembatasan retensi data: Data pribadi dihapus, dimusnahkan, atau ditinjau kembali setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan yang sah.

Manajemen Risiko

- Akuntabilitas: Seluruh pemrosesan data dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan kepatuhannya terhadap prinsip perlindungan data pribadi.

Persetujuan Penggunaan Data Nasabah

Dalam hal penggunaan data nasabah, BRI memberikan kontrol kepada nasabah untuk dapat memberikan persetujuan untuk menerima rekomendasi produk, layanan dan promosi yang tersedia di BRI Group, afiliasi dan pihak ketiga yang bekerja sama melalui sarana yang ditentukan. BRI memastikan bahwa data pribadi nasabah tidak digunakan di luar tujuan pemrosesan awal tanpa persetujuan dari nasabah. Sebagai bagian dari komitmen perlindungan data pribadi, BRI secara konsisten memantau penggunaan data nasabah untuk keperluan lain. Pada tahun 2025, penggunaan tersebut mencakup 3,6% dari data nasabah yang telah memberikan persetujuan untuk menerima rekomendasi produk, layanan, dan promosi.

BRI mengelola data nasabah dengan menekankan perlindungan privasi dan penggunaan informasi pribadi secara bertanggung jawab. Dalam proses tersebut, nasabah diberikan pilihan untuk memberikan persetujuan secara eksplisit (*opt-in*) sebelum data pribadi mereka dapat dibagikan kepada pihak ketiga untuk tujuan di luar penyelesaian transaksi atau pemberian layanan. Nasabah juga memiliki hak untuk mengakses, memperbarui termasuk melakukan pembatasan penggunaan (*opt-out*), dan meminta penghapusan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data pribadi yang sudah tidak diperlukan akan dimusnahkan secara aman sesuai dengan kebijakan retensi data yang berlaku di Perusahaan. Informasi lebih lanjut mengenai hak subjek data dan kebijakan perlindungan data pribadi dapat diakses melalui *Privacy Notice* BRI pada laman resmi perusahaan di: <https://bri.co.id/en/privacy>.

Audit Internal Pengelolaan Privasi

Sesuai dengan SO.35-ASQ/12/2024 tentang SOP Audit Internal pada Modul 2 mengenai Prosedur Audit Internal Teknologi Informasi, tim audit internal BRI secara berkala melaksanakan audit internal atas implementasi perlindungan data pribadi di seluruh lingkungan BRI untuk memastikan bahwa pengelolaan data pribadi telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Audit perlindungan data pribadi ini mencakup evaluasi terhadap tata kelola kebijakan perlindungan data pribadi, pemenuhan hak subjek data, pelaksanaan aktivitas pemrosesan data pribadi di seluruh unit kerja, kepatuhan dan kewajiban pihak ketiga, efektivitas pejabat atau unit kerja yang memiliki fungsi perlindungan data pribadi, penerapan prinsip-prinsip privasi data, serta mekanisme penanganan insiden atau pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi.

Pelanggaran Keamanan Privasi dan Data

Pelanggaran keamanan informasi atau keamanan siber merupakan bagian dari tindakan disiplin pekerja BRI yang diatur dalam Surat Edaran tentang Peraturan Disiplin. Pelaku pelanggaran dapat diproses menggunakan metrik pelanggaran fundamental dengan sandi TSI-19, yaitu ketidakmampuan dalam menjaga keamanan ruang dan sistem TI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta TSI-20, yaitu ketidakmampuan dalam menjaga nama pengguna, kata sandi, atau keamanan akses data TI lainnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi disiplin yang berdampak pada penilaian kinerja, berupa pengurangan skor evaluasi pekerja sebesar 0,25.

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Privasi dan Data

BRI menyelenggarakan pelatihan Privasi dan perlindungan data pribadi kepada seluruh pekerja (pekerja tetap, pekerja kontrak dan *outsourcing*) dengan pendekatan berbasis peran dan risiko. Kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi menjadi bagian dari penguatan budaya organisasi, didukung oleh program peningkatan kompetensi serta pengelolaan vendor berbasis risiko dan kontrak yang memuat kewajiban perlindungan data. Implementasi ini memastikan bahwa pengamanan data tidak hanya bersifat teknis, tetapi terinternalisasi dalam tata kelola dan operasional sehari-hari. BRI terus meningkatkan kapabilitas dan kesadaran pekerja dalam pengelolaan keamanan data dan privasi melalui pelatihan keamanan siber, pengembangan serta pengujian rencana respons insiden untuk meminimalkan dampak dan waktu pemulihan, serta pengelolaan risiko pihak ketiga dengan memastikan kepatuhan vendor dan mitra terhadap standar keamanan siber BRI. BRI juga melaksanakan program peningkatan *awareness*, *e-learning* dan pelatihan melalui berbagai media komunikasi salah satunya *Data Community Update*, sebagai sarana edukasi dan diseminasi informasi terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Sepanjang tahun 2025, program ini telah dijalankan melalui sejumlah inisiatif untuk memperkuat budaya keamanan data diseluruh organisasi, antara lain:

Pelatihan Keamanan Informasi

Seluruh Insan BRILiaN wajib mengikuti dan lulus pelatihan kesadaran keamanan siber setiap tahun. Pelatihan ini mencakup topik antara lain:

- pencegahan phishing;
- keamanan kata sandi; dan
- *security awareness*.

Pelatihan Pengelolaan Data Privasi

Pengembangan kapasitas pekerja diwujudkan melalui 22 aktivitas yang terdiri dari sosialisasi, training, dan podcast/webinar/meet the expert terkait data privasi.

BRI menyediakan dan mewajibkan seluruh pekerja lini pertama (*frontliner*) dan seluruh pekerja yang berhubungan langsung dengan pelanggan untuk melaksanakan Pendidikan *e-learning* tentang perlindungan data privasi secara tahunan.



Meet The Expert

Penyelenggaraan podcast yang menghadirkan expert untuk meningkatkan awareness topik yang dibahas, selama tahun 2025 topik *meet the expert* antara lain:

- Data Security Awareness,
- AI Powered Interactions Streamlining Work Efficiency with Chat BRIBrain



Quizzes and Competition

Bentuk lain peningkatan awareness adalah aktivitas yang melibatkan pekerja untuk aktif berpartisipasi, kegiatan diwujudkan dalam:

- *Kick off and data community Quizes*
- *Data story telling competition*



E Learning

- *Learning agility for banking in the era of AI*
- *Data governance*
- *Jaga Data Jaga BRI*
- *Pelindungan data pribadi*
- *Penanganan data sensitif*

105.743 Pekerja

telah mengikuti pelatihan perlindungan data nasabah secara rutin minimal satu tahun sekali ke seluruh pekerja terutama pekerja yang berhubungan langsung dengan nasabah.

Metrik dan Target

Dilihat secara komprehensif, privasi dan keamanan data tidak lepas dari pondasi infrastruktur teknologi informasi yang kuat, keandalan sistem informasi, kecukupan regulasi hingga dukungan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan keamanan privasi dan data. Beberapa indikator yang digunakan dalam *monitoring* isu keberlanjutan ini adalah:

- Pelanggaran keamanan siber untuk mantau keandalan infrastruktur teknologi informasi dan keandalan sistem informasi.
- Pelatihan perlindungan data privasi.
- Jumlah nasabah yang terdampak kejadian kebocoran data pribadi.
- Denda dari regulator terkait pelanggaran keamanan informasi.

Pelanggaran keamanan privasi dan data berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kontinuitas operasi, kepercayaan nasabah, serta risiko sanksi atau tuntutan dari regulator maupun pihak yang dirugikan.

Identifikasi Risiko dan Peluang		Metrik	Target	Progress
Risiko	Risiko Serangan Siber <i>Malware</i>	Jumlah insiden keamanan siber	Mencapai 0 pelanggaran data (<i>data breach</i>)	0 <i>Data breach</i>
	Risiko Serangan Siber <i>Ransomware</i>			
	Risiko <i>Phishing</i> dan Kejahatan Siber	Jumlah nasabah yang terdampak oleh pelanggaran [FN-CB-230a.1]		
	Risiko Penyalahgunaan Teknologi Baru (AI)	Jumlah pelanggaran keamanan informasi		
	Risiko Tata Kelola IT yang Tidak Mutakhir	Denda atau sanksi atas pelanggaran keamanan informasi atau keamanan siber		
Peluang	Personalisasi Layanan Keuangan Digital	Ketersediaan aplikasi secara menyeluruh (<i>end-to-end</i>)	99,96%	99,97%
	Platform Digital yang Tangguh dan Tahan terhadap Ancaman dan Kejahatan Siber			



Bisnis yang Beretika

Empat Pilar Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS

Tata Kelola

Tata Kelola Bisnis yang Beretika

Strategi

Identifikasi Risiko dan Peluang

Strategi Pengelolaan Risiko dan Optimalisasi Peluang

Kode Etik BRI dan Insan BRILiaN

Penguatan Strategis Kerangka Anti-Penyuapan dan Gratifikasi

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang Independen

Penguatan Kapabilitas Etika dan Kepatuhan

Manajemen Risiko

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Kebijakan dan Praktik Bisnis yang Beretika

Upaya Pencegahan Tindakan Tidak Etis

Metrik dan Target

Pelanggaran atas Kode Etik

Penanganan Investigasi Kecurangan dan Penyelesaian Kasus

Tata Kelola

Bisnis yang Beretika merupakan fondasi ketahanan dan keberlanjutan jangka panjang BRI. Sebagai lembaga keuangan dengan peran strategis dalam sistem keuangan Indonesia, BRI memandang integritas bukan sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan sebagai prasyarat mendasar untuk menjaga kinerja ekonomi, reputasi perusahaan, dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Bisnis yang Beretika ditetapkan sebagai topik material yang secara langsung memengaruhi profil risiko Perusahaan serta penciptaan nilai jangka panjang.

Dalam sektor perbankan, risiko etika tidak hanya timbul dari operasional internal, tetapi juga dari hubungan bisnis di sepanjang rantai nilai, termasuk interaksi dengan nasabah, mitra, dan pihak ketiga. Penerapan standar etika yang kuat dan konsisten memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memitigasi paparan terhadap risiko hukum, keuangan, sosial, dan potensi risiko terkait hak asasi manusia. Sebaliknya, kelemahan dalam pengelolaan etika dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas usaha dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks ini, BRI mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam struktur tata kelola, kebijakan, serta sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa risiko etika dikelola secara proaktif, terukur, dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan terus memperkuat mekanisme pencegahan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta melakukan evaluasi berkala atas implementasi standar integritas guna memastikan penerapan yang konsisten di seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola Bisnis yang Beretika

BRI menempatkan integritas sebagai nilai fundamental yang mendasari perilaku seluruh Insan BRILiaN dalam menjalankan kegiatan usaha. Integritas tidak hanya dipandang sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai elemen inti dalam sistem tata kelola yang memastikan kinerja berkelanjutan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap reputasi Perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

BRI membangun budaya etika melalui lingkungan kerja yang kondusif, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat, serta keteladanan pimpinan di seluruh jenjang organisasi. Untuk memastikan penerapan yang konsisten, BRI telah menetapkan Kode Etik BRI yang disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023, Buku 6 tentang Kode Etik. Kode Etik tersebut terdiri atas Kode Etik Bank dan Kode Etik Insan BRILiaN, yang masing-masing mengatur prinsip perilaku profesional pada tingkat organisasi serta pedoman etika bisnis dan perilaku bagi individu.

Kode Etik BRI wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan BRILiaN, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja. Pelaksanaan dan internalisasi Kode Etik berada di bawah pengawasan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, dengan dukungan Compliance Group serta Fungsi Kepatuhan pada Kantor Wilayah dan Unit Kerja Luar Negeri. Fungsi-fungsi tersebut memastikan bahwa standar etika diterapkan secara konsisten, dipantau secara berkala, serta ditindaklanjuti secara tepat apabila terjadi pelanggaran.

Dewan Komisaris

Pengawasan atas Bisnis yang Beretika di BRI dilaksanakan melalui struktur tata kelola berlapis yang terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko Perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan strategis atas risiko etika melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko, termasuk penelaahan kebijakan antikorupsi dan anti-penyuapan, implementasi kerangka Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), tata kelola partisipasi politik, serta kepatuhan perpajakan yang bertanggung jawab. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pelaporan berkala, penelaahan profil risiko etika, serta evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan arah strategis serta memastikan implementasi kebijakan Bisnis yang Beretika secara efektif dalam seluruh kegiatan operasional. Pengawasan atas Bisnis yang Beretika dipimpin oleh Direktur yang membawahi *Human Capital & Compliance**, yang bertanggung jawab memastikan bahwa standar etika, kerangka kepatuhan, dan pengendalian integritas diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Direksi memastikan bahwa pengelolaan risiko etika terintegrasi penuh dalam proses manajemen risiko Perusahaan, termasuk melalui identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan berkelanjutan atas risiko etika. Direksi juga memastikan tersedianya sumber daya, sistem, dan mekanisme pengendalian yang memadai untuk menjaga penerapan standar integritas secara konsisten di seluruh organisasi.

Sebagai penguatan atas struktur tata kelola tersebut, BRI menerapkan mekanisme pelaporan, eskalasi, dan pengelolaan konsekuensi yang terstruktur guna memastikan bahwa risiko dan pelanggaran etika ditangani secara efektif dan konsisten di seluruh organisasi. BRI memiliki mekanisme pelaporan dan eskalasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa risiko dan pelanggaran etika dapat diidentifikasi, dilaporkan, serta ditindaklanjuti secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Isu etika, termasuk potensi pelanggaran Kode Etik, kebijakan antikorupsi dan anti-penyuapan, serta kerangka APU, PPT, dan PPPSPM, dilaporkan melalui jalur pengendalian internal yang telah ditetapkan dan dikonsolidasikan oleh Fungsi Kepatuhan.

Untuk memperkuat independensi dan kredibilitas, sejak tahun 2025, Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) BRI dikelola oleh pihak ketiga yang independen. Mekanisme ini memungkinkan pekerja, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara rahasia dan tanpa rasa takut terhadap segala bentuk retaliasi. Seluruh laporan ditindaklanjuti melalui proses penelaahan, investigasi, dan penyelesaian secara terstruktur sesuai dengan protokol tata kelola yang berlaku.

*Per 18 Desember 2025, Pengawasan atas Bisnis yang Beretika dipimpin oleh Direktur yang membawahi *Legal & Compliance*.

Tata Kelola

Laporan berkala mengenai eksposur risiko etika, temuan kepatuhan, kasus *whistleblowing*, dan insiden signifikan disampaikan kepada Direksi serta, apabila relevan, dieskalasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko. Pelanggaran yang bersifat material disampaikan secara segera kepada manajemen senior dan, apabila diperlukan, kepada tingkat Dewan. Kerangka pelaporan ini memastikan transparansi, independensi, dan efektivitas pengawasan atas pengelolaan risiko etika di seluruh organisasi.

Pengelolaan Konsekuensi ^[GRI 2-25]

BRI menerapkan kerangka pengelolaan konsekuensi yang tegas dan konsisten untuk menegakkan standar etika serta memperkuat akuntabilitas. Perusahaan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap *fraud*, korupsi, penyuapan, dan bentuk perilaku tidak etis lainnya.

Setiap pelanggaran yang terbukti atas Kode Etik maupun kebijakan terkait dikenakan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengelolaan konsekuensi dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran. Selain pemberian sanksi, Perusahaan juga melakukan langkah perbaikan serta penguatan pengendalian untuk mengatasi akar permasalahan dan mencegah terulangnya pelanggaran. Melalui pendekatan ini, BRI memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh organisasi.

Strategi

Identifikasi Risiko dan Peluang

Risiko dan peluang utama yang berkaitan dengan praktik Bisnis yang Beretika diidentifikasi secara sistematis sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan secara menyeluruh. Proses ini mencakup integritas pekerja, pengelolaan risiko perilaku, pencegahan *fraud*, transparansi dalam kegiatan operasional dan kegiatan usaha, serta efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Penilaian ini dirancang untuk mengevaluasi potensi dampak terhadap ketahanan operasional, reputasi perusahaan, dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Tingkat signifikansi dan kemungkinan terjadinya risiko maupun peluang tersebut selanjutnya dievaluasi dengan mempertimbangkan implikasinya terhadap kinerja usaha dan efektivitas tata kelola. Dampak yang teridentifikasi diklasifikasikan dalam jangka pendek (≤ 1 tahun), jangka menengah (1–5 tahun), dan jangka panjang (> 5 tahun), sehingga menyediakan dasar yang terstruktur untuk penentuan prioritas, perumusan respons strategis, serta pengembangan target keberlanjutan yang berbasis integritas.

Tema Risiko/ Peluang	Risiko/ Peluang	Deskripsi	Kategori Risiko	Potensi Dampak terhadap BRI	Tingkat Dampak	Jangka Waktu
Perilaku dalam Interaksi dengan Pihak Ketiga	Risiko	Pelanggaran oleh perusahaan dan pekerja dalam interaksi dengan pihak ketiga (misalnya, mis-selling, perlakuan tidak adil, pelanggaran etika layanan, ketidakpatuhan pajak, pelanggaran kebijakan kontribusi politik).	- Risiko Kepatuhan - Risiko Reputasi - Risiko Operasional - Risiko Kredit	- Peningkatan keluhan pihak ketiga - Sanksi regulator - Penurunan loyalitas dan reputasi - Potensi peningkatan eksposur risiko kredit	Tinggi	Jangka Menengah
	Peluang	Penguatan standar etika perusahaan, etika layanan, dan pengendalian risiko perilaku untuk meningkatkan kualitas layanan, memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik perusahaan, serta membangun kepercayaan nasabah.		- Peningkatan loyalitas nasabah - Penurunan tingkat keluhan - Kualitas portofolio yang lebih baik - Stabilitas pendapatan	Tinggi	Jangka Panjang
<i>Fraud</i> dalam Kegiatan Operasional dan Kegiatan Usaha	Risiko	Potensi praktik <i>fraud</i> dan gratifikasi dalam kegiatan operasional dan usaha (misalnya, proses pengadaan dan pembiayaan kredit).	- Risiko Kepatuhan - Risiko Reputasi - Risiko Operasional - Risiko Kredit	- Kerugian keuangan - Inefisiensi - Penurunan kualitas aset kredit - Litigasi dan sanksi regulator - Penurunan kepercayaan pemangku kepentingan	Tinggi	Jangka Pendek
	Peluang	Penguatan pengendalian internal, transparansi proses, dan tata kelola di seluruh kegiatan operasional dan usaha.		- Penurunan <i>fraud</i> - Peningkatan kualitas portofolio kredit - Efisiensi biaya - Peningkatan kepercayaan investor	Tinggi	Jangka Panjang

Strategi

Strategi Pengelolaan Risiko dan Optimalisasi Peluang

Strategi BRI dirancang untuk mengelola risiko utama sekaligus mengoptimalkan peluang yang timbul dari penerapan Bisnis yang Beretika. Perusahaan memprioritaskan penguatan integritas pekerja, peningkatan pengelolaan risiko perilaku, pencegahan *fraud*, transparansi dalam proses pengadaan dan pembiayaan, serta peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Prioritas strategis tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola yang baik, menjaga kualitas operasional dan portofolio, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, BRI berupaya melindungi nilai perusahaan dalam jangka panjang dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Strategi	Risiko/Peluang Utama yang Ditangani	Kegiatan Utama	Dampak Keuangan yang Diharapkan		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Pengembangan Budaya Etika dan Pedoman Perilaku	- Risiko pelanggaran Kode Etik oleh pekerja dan perusahaan - Risiko keluhan nasabah dan sanksi regulator - Peluang untuk memperkuat budaya integritas dan profesionalisme pekerja	- Pelatihan wajib kode perilaku bagi pekerja - Pelatihan refreshment melalui pembelajaran etika berbasis studi kasus - Penilaian pemahaman pekerja atas kode perilaku - Integrasi kode perilaku ke dalam KPI dan evaluasi kinerja - Kampanye kesadaran etika dan keteladanan pimpinan	Peningkatan pemahaman pekerja terhadap kode perilaku dan penurunan pelanggaran etika	Penguatan budaya integritas, peningkatan kualitas layanan, serta penurunan risiko kepatuhan dan reputasi	Reputasi organisasi yang kuat, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, dan kinerja usaha yang berkelanjutan
Penguatan Pengelolaan Risiko <i>Fraud</i> dalam Operasional dan Kegiatan Usaha	- Risiko <i>fraud</i> dan gratifikasi dalam operasional dan kegiatan usaha - Risiko kerugian keuangan dan penurunan kualitas aset - Peluang untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola yang lebih kuat	- Penguatan pengendalian internal dan model tiga lini pertahanan - Digitalisasi dalam operasional dan kegiatan usaha - Penerapan opini risiko dalam tahapan pengadaan - Pemantauan transaksi berisiko tinggi dan analitik <i>fraud</i>	Penurunan potensi penyimpangan proses dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan	Efisiensi biaya pengadaan dan peningkatan kualitas aset kredit	Tata kelola yang kuat, ketahanan portofolio, dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan
Penguatan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System/WBS</i>) yang Dikelola Pihak Ketiga	- Rendahnya tingkat pelaporan akibat terbatasnya kepercayaan pelapor - Keterlambatan deteksi <i>fraud</i> dan pelanggaran - Peluang untuk meningkatkan kepercayaan pelaporan, kerahasiaan, dan transparansi serta memperkuat tata kelola	- Implementasi sistem pelaporan pelanggaran yang dikelola secara independen - Kanal pelaporan anonim dan perlindungan pelapor - Integrasi pelaporan dengan investigasi internal dan remediasi - Sosialisasi anti-retaliasi dan kampanye speak-up - Pemantauan efektivitas dan kualitas penanganan kasus	Peningkatan kepercayaan pelapor dan jumlah laporan yang valid	Deteksi pelanggaran yang lebih dini dan peningkatan tata kelola investigasi	Budaya integritas yang kuat dan peningkatan kredibilitas tata kelola

Strategi

Kode Etik BRI dan Insan BRILiaN

Kode Etik BRI dan Insan BRILiaN berfungsi sebagai kerangka fundamental yang mengatur standar etika dan perilaku profesional bagi seluruh Insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai bagian integral dari komitmen BRI terhadap Bisnis yang Beretika, Kode Etik memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan mencerminkan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta selaras dengan nilai-nilai inti Perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023, Buku 6 tentang Kode Etik BRI, Kode Etik Perusahaan disusun dalam dua komponen yang saling melengkapi, yaitu Kode Etik Bank dan Kode Etik Insan BRILiaN. Kode Etik Bank memuat prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi yang mengatur standar profesional dan tata perilaku institusional. Sementara itu, Kode Etik Insan BRILiaN memberikan panduan rinci mengenai perilaku etis dan etika bisnis pada tingkat individu yang berlaku bagi seluruh pekerja di semua jenjang organisasi. Secara keseluruhan, kedua kode tersebut membentuk kerangka etika yang komprehensif untuk mendukung penerapan standar perilaku yang konsisten di seluruh Perusahaan serta memperkuat budaya integritas BRI.

Kode Etik Bank	Kode Etik Insan BRILiaN
1. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, termasuk penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) 2. Perlakuan adil dan menerapkan kebijakan saling menghormati di tempat kerja ketika berhubungan dengan Insan BRILiaN. 3. Melindungi kerahasiaan data dan informasi pribadi nasabah. 4. Menjunjung tinggi persaingan sehat, anti-monopoli, dan berlaku adil terhadap mitra kerja. 5. Memberikan kontribusi dan nilai optimal, melindungi hak-hak pemegang saham, dan menjalankan transparansi dalam penyampaian informasi. 6. Menjaga integritas dan akurasi pelaporan Bank. 7. Menjunjung tinggi HAM, mengatasi perubahan iklim, dan larangan keterlibatan dalam aktivitas politik 8. Etika sebagai kelompok usaha (BRI Group); serta 9. Pengendalian atas gratifikasi, penyuapan, dan korupsi.	1. Kepatuhan terhadap hukum, kebijakan regulator, dan kebijakan internal bank; 2. Perlindungan aset bank, menjaga keamanan informasi, larangan insider trading, dan melaporkan pelanggaran melalui sistem pelaporan pelanggaran; 3. Memberikan perlakuan adil terhadap nasabah dan melindungi data nasabah; 4. Hubungan dengan pesaing dan mitra kerja. 5. Hubungan antar sesama pekerja termasuk dengan pekerja BRI Group: mematuhi respectful workplace policy; 6. Hubungan dengan regulator. 7. Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan hidup. 8. Pengendalian gratifikasi, penyuapan, dan korupsi.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan etika BRI terkait korupsi dan penyuapan, diskriminasi, kerahasiaan informasi, benturan kepentingan, anti-monopoli dan persaingan usaha, anti-pencucian uang, perdagangan orang, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta *Whistleblowing System* (WBS) dapat diakses melalui https://www.ir-bri.com/esg/code_of_conduct.html. ^{IGRI 206-1}

Pengendalian Kode Etik

Pengendalian Kode Etik di BRI dilaksanakan melalui berbagai mekanisme. Setiap tahun, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pekerja menandatangani Pernyataan *Anti-Fraud* sebagai bagian dari BRILiaN Improvement Forum. Selain itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan, unit kerja pengguna, vendor, serta mitra usaha wajib menandatangani pakta integritas. BRI juga mewajibkan setiap insan BRILiaN untuk menyampaikan Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik BRI serta mengungkapkan potensi benturan kepentingan setiap tahun, baik melalui aplikasi BRILIANAPPS maupun saluran lain yang ditetapkan. Dalam hal ini, komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjadi teladan dalam menjunjung tinggi dan menerapkan Kode Etik BRI memiliki peran penting dalam memastikan penerapan yang efektif di seluruh pekerja BRI.

Sosialisasi dan Komunikasi Kode Etik

BRI secara konsisten melaksanakan sosialisasi dan komunikasi Kode Etik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Untuk memastikan penerapan yang efektif, BRI juga menyebarluaskan Kode Etik melalui:

- situs resmi BRI (www.ir-bri.com/esg/code_of_conduct.html) yang dapat diakses oleh publik, termasuk mitra bisnis;
- landing page pada aplikasi BRILIANAPPS;
- Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja BRI dan Manajemen BRI;
- poster, video, dan media komunikasi lainnya di area kantor Perusahaan;
- sesi sosialisasi tatap muka bagi pekerja di Kantor Pusat;
- program *e-learning* yang diwajibkan bagi seluruh pekerja; dan
- program pelatihan induksi wajib bagi seluruh pekerja baru.

Keterlibatan Politik

BRI menjunjung kebijakan netralitas politik dan non-partisan guna menjaga integritas, independensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. BRI melarang Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan seluruh Insan BRILiaN untuk terlibat dalam politik praktis atas nama Perusahaan, termasuk memberikan kontribusi politik secara langsung maupun tidak langsung, donasi, sponsor, ataupun melakukan aktivitas lobi.

Ketentuan tersebut secara formal diatur dalam Kode Etik Bank dan Kode Etik Insan BRILiaN serta berlaku sebagai standar perilaku yang mengikat bagi seluruh pekerja dan pemangku kepentingan terkait. BRI tidak memberikan pendanaan politik, donasi politik, maupun pengeluaran untuk kepentingan politik. Setiap keterlibatan dalam forum kebijakan publik atau konsultasi regulasi yang sah dilakukan secara terbatas, transparan, dan sesuai ketentuan, semata-mata untuk berkontribusi pada pengembangan sektor keuangan serta selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Strategi

Perpajakan ^[IGRI 207-1, 207-2]

Tata Kelola dan Pengawasan

Tata kelola perpajakan berada di bawah pengawasan Direktur Keuangan, yang bertanggung jawab atas implementasi dan peninjauan strategi perpajakan Bank. Strategi perpajakan ditinjau setiap tahun dan diselaraskan dengan perkembangan regulasi untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas yang berkelanjutan. BRI telah menetapkan pedoman perpajakan internal serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku di seluruh unit kerja. Kewajiban perpajakan dimonitor secara berkelanjutan melalui proses rekonsiliasi dan revidu yang terstruktur guna memastikan akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Strategi Perpajakan

BRI menerapkan strategi perpajakan yang prudent dan bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko perpajakan yang dapat memengaruhi kinerja keuangan, stabilitas operasional, dan reputasi perusahaan. Perusahaan secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko perpajakan di seluruh kegiatan operasionalnya, baik di tingkat domestik maupun internasional, termasuk risiko yang timbul akibat perubahan regulasi, perbedaan interpretasi, penyesuaian kebijakan fiskal, ekspansi pasar, serta transaksi lintas batas.

BRI memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perpajakan di setiap yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi serta mengelola risiko *transfer pricing* sesuai dengan pedoman OECD dan regulasi yang berlaku. BRI tidak melakukan perencanaan pajak yang agresif dan melaksanakan seluruh transaksi berdasarkan substansi komersial serta prinsip perbankan yang sehat.

Kepatuhan dan Transparansi

BRI berkomitmen terhadap pelaporan pajak yang transparan dan mengungkapkan pembayaran pajak dalam Laporan Keberlanjutan tahunan guna meningkatkan akuntabilitas serta memitigasi risiko reputasi. BRI menjaga hubungan yang konstruktif dengan otoritas perpajakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tanpa melakukan advokasi maupun upaya untuk memengaruhi kebijakan perpajakan. Sepanjang periode pelaporan, BRI mempertahankan kepatuhan penuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, didukung oleh pengendalian internal yang kuat, revidu pajak berkala, serta koordinasi berkelanjutan dengan otoritas pajak guna memastikan ketepatan, ketepatan waktu, dan kelengkapan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada tahun 2025, BRI memenuhi kriteria untuk memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 3% yang berlaku bagi perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan regulasi sehingga tarif PPh Badan yang berlaku menjadi sebesar 19%. Pada tahun 2025, BRI berkontribusi melalui pembayaran PPh Badan dan pajak lainnya kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp7,33 miliar.

Komitmen terhadap Praktik Perpajakan yang Bertanggung Jawab

BRI memastikan bahwa pengelolaan perpajakan dilakukan secara proaktif, bertanggung jawab,

serta seimbang dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Seluruh transaksi usaha disusun berdasarkan substansi komersial yang jelas dan mematuhi standar regulasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BRI beroperasi di Indonesia dengan beberapa kantor cabang luar negeri dan memenuhi seluruh kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pendekatan yang disiplin dan transparan ini, BRI menegaskan komitmennya terhadap praktik perpajakan yang bertanggung jawab, tata kelola yang baik, serta penciptaan nilai yang berkelanjutan. ^[IGRI 207-3]

Penguatan Strategis Kerangka Anti-Penyuapan dan Gratifikasi

Sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat integritas bisnis dan tata kelola dalam seluruh aktivitas operasional, BRI telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 yang mencakup proses pengadaan barang dan jasa. BRI pertama kali memperoleh sertifikasi ISO 37001 pada tahun 2020 dan berhasil mempertahankan sertifikasi tersebut melalui proses resertifikasi pada tahun 2023. Sertifikasi ini mencerminkan komitmen strategis Perusahaan dalam menstandarisasi praktik anti-penyuapan, meningkatkan transparansi, serta menanamkan mekanisme pengawasan yang terstruktur dalam kegiatan pengadaan. Melalui kerangka yang selaras dengan ISO tersebut, BRI mendorong penerapan uji tuntas (*due diligence*), pemisahan fungsi, mekanisme pemantauan, serta proses perbaikan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan transaksi pengadaan secara disiplin dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas operasional bisnis. ^[IGRI 3-3]

Nama Sertifikasi	Penerbit	Periode Berlaku
ISO 37301 Sistem Manajemen Kepatuhan	British Standard Institution	2023–2025
ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	British Standard Institution	2023–2026
ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu	British Standard Institution	2023–2026

Kebijakan Anti-Korupsi dan Gratifikasi bagi Pemasok

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga integritas di seluruh rantai pasok, BRI menerapkan Kebijakan Anti-Korupsi dan Gratifikasi bagi Pemasok, yang mewajibkan seluruh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank untuk mematuhi standar anti-korupsi yang setara dengan kebijakan internal BRI. Kebijakan ini menegaskan bahwa seluruh hubungan bisnis dengan pemasok harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

Dalam implementasinya, BRI melakukan proses uji kelayakan (*due diligence*) terhadap pemasok, termasuk pengecekan latar belakang serta evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa mitra usaha yang bekerja sama dengan BRI memiliki integritas serta menjalankan praktik usaha yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan terkait anti-korupsi dan anti-gratifikasi juga secara tegas dicantumkan dalam perjanjian kerja sama antara BRI dan vendor, di mana setiap pelanggaran terhadap klausul tersebut dapat berakibat pada pengakhiran hubungan kerja sama.

Strategi

Untuk semakin memperkuat pengendalian terhadap risiko penyuapan, BRI telah melakukan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang mengacu pada standar ISO 37001:2016 dalam lingkup pengadaan barang dan jasa di Kantor Pusat. Sistem ini telah memperoleh sertifikasi dari lembaga sertifikasi independen. Selaras dengan standar tersebut, Perseroan juga membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bertugas memantau efektivitas pelaksanaan program secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil audit eksternal terbaru, tidak ditemukan kelemahan signifikan dalam penerapan SMAP di lingkungan Perseroan, yang mencerminkan komitmen kuat BRI dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan rantai pasok.

Pada tahun 2025, BRI juga melakukan penguatan organisasi melalui pembentukan fungsi pengawasan khusus yang bertugas memberikan opini risiko independen atas aktivitas proses pengadaan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat mekanisme review independen, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pertimbangan tata kelola terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan operasional. Sejalan dengan penguatan tersebut, BRI juga memperbarui kebijakan pengadaan yang mewajibkan seluruh aktivitas pengadaan memperoleh opini independen sebelum pelaksanaan.

Kebijakan Lingkungan dan Sosial bagi Pemasok

BRI menerapkan praktik pengadaan yang bertanggung jawab melalui kebijakan dan petunjuk pelaksanaan terkait pengadaan barang dan/atau jasa, yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam proses seleksi dan evaluasi vendor. Komitmen tersebut diatur dalam Kebijakan No. SE.18-DIR/PLM/05/2023, Surat Edaran No. SE.29-DIR/ESG/12/2025 tentang Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan, Buku 2 Bagian 1 : Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta dijabarkan lebih lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan No. JL.23-FAG/11/2025, yang mengatur prinsip dan prosedur kerja sama dengan vendor dan pemasok di lingkungan Perseroan.

Dalam ketentuan tersebut, BRI mewajibkan seluruh pemasok atau vendor untuk mematuhi standar perilaku bisnis yang bertanggung jawab, antara lain meliputi:

1. larangan mempekerjakan pekerja anak dan kerja paksa;
2. penerapan praktik keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
3. pemberian upah layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. penerapan prinsip non-diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan;
5. penyediaan kondisi hidup yang layak;
6. penghormatan terhadap kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama; serta
7. ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemasok menjalankan praktik usaha yang etis serta menghormati hak asasi manusia.

Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, BRI menerapkan mekanisme *Vendor Risk Rating* (VRR), yaitu alat ukur standar yang digunakan untuk menilai dan menggambarkan profil risiko calon vendor. VRR mengombinasikan indikator kualitatif dan kuantitatif, sehingga BRI dapat menentukan

apakah usulan vendor dapat diterima atau perlu ditolak berdasarkan hasil evaluasi risiko secara menyeluruh. Penilaian VRR mencakup beberapa dimensi utama, yaitu aspek finansial, teknis, lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Penilaian pada aspek lingkungan mencakup evaluasi terhadap penggunaan energi terbarukan, penerapan teknologi ramah lingkungan, keberadaan instalasi pengolahan air limbah, serta inisiatif pengurangan penggunaan kertas.

Sementara itu, aspek sosial menilai kepatuhan vendor terhadap standar ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, termasuk kepatuhan terhadap Upah Minimum Regional (UMR), partisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta larangan mempekerjakan pekerja di bawah umur. Selain itu, vendor juga diwajibkan untuk melakukan asesmen Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat proses pendaftaran vendor melalui mekanisme *self-assessment*. Adapun pada aspek tata kelola, penilaian dilakukan terhadap komitmen vendor dalam menerapkan integritas anti-penyuapan serta kepatuhan terhadap program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mendorong penggunaan barang dan jasa dari dalam negeri.



Strategi

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang Independen [FN-CB-510a.2]

Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko *fraud* dalam kegiatan operasional dan usaha, BRI mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) sebagai mekanisme utama deteksi *fraud* dan transparansi dalam kerangka pengelolaan risiko etika. WBS menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi pekerja, nasabah, mitra usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan *fraud*, pelanggaran Kode Etik, maupun praktik tidak etis lainnya, sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk memperkuat independensi, objektivitas, dan kredibilitas pelaporan, sejak tahun 2025, WBS dikelola secara strategis oleh pihak ketiga yang independen. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, meminimalkan potensi benturan kepentingan, serta mendukung identifikasi *fraud* lebih awal. Mekanisme ini juga menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor bagi laporan yang teridentifikasi, serta tetap memungkinkan penyampaian laporan secara anonim. Selama periode pelaporan, BRI menerima total 89 laporan melalui WBS, yang terdiri atas 68 kasus terbukti, 4 (empat) kasus terbukti sebagian, 9 (sembilan) kasus tidak terbukti, dan 8 (delapan) kasus yang masih dalam proses investigasi. Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2025 pelanggaran yang paling sering dilaporkan dan terbukti berasal dari subkategori *fraud* dan pelanggaran Kode Etik. Namun demikian, tidak terdapat kasus signifikan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berujung pada denda atau sanksi non-moneter, sebagaimana ditampilkan berikut ini. [GRI 2-27, 206-1, 205-3][FN-CB-510a.1]

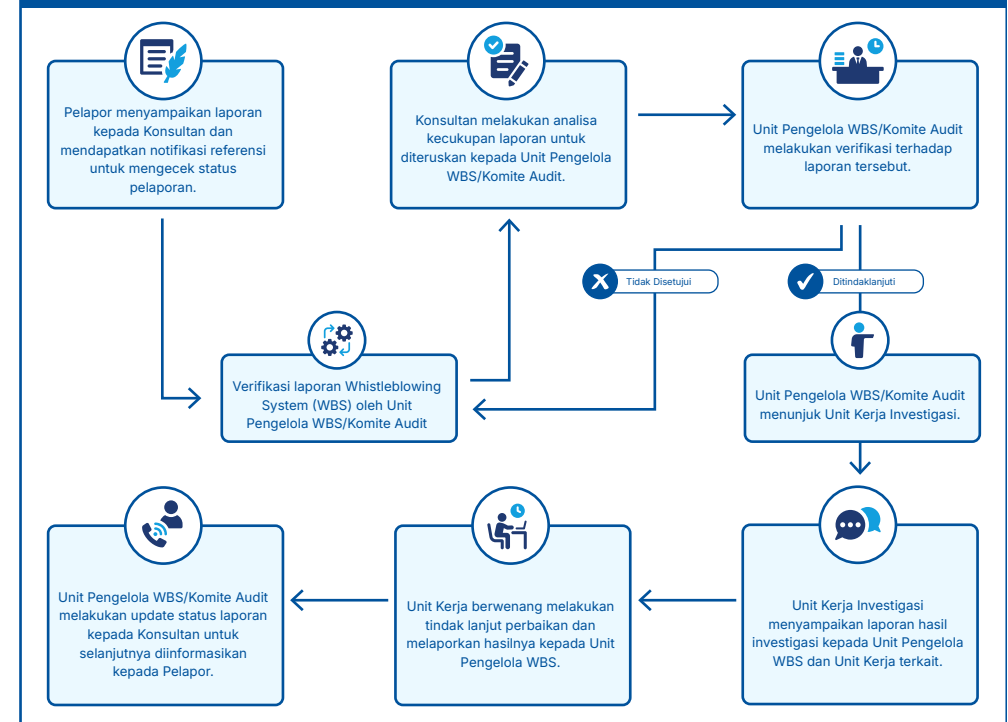
Kategori Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Terbukti	Terbukti Sebagian	Tidak Terbukti	Dalam Proses
Gratifikasi Ilegal	6	4	0	1	1
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	9	6	0	3	0
Pelanggaran Respect <i>Workplace Policy</i> (RWP)	19	14	1	1	3
Pelanggaran Kode Etik	23	16	2	3	2
Pelanggaran Prosedur Perusahaan Lainnya	3	2	0	1	0
Penyalahgunaan Aset	3	3	0	0	0
Tindakan Lain yang Dapat Disamakan dengan <i>Fraud</i>	26	23	1	0	2

Jumlah laporan yang diterima mencerminkan pemanfaatan mekanisme secara aktif serta menunjukkan efektivitas WBS sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Seluruh laporan yang disampaikan terlebih dahulu diverifikasi melalui proses verifikasi awal sebelum dieskalasikan kepada Unit Pengelola WBS, yang berada di bawah supervisi Direktur Utama dan diawasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Unit tersebut mengoordinasikan investigasi, tindakan perbaikan, serta pemantauan penyelesaian kasus sesuai prosedur yang berlaku guna memastikan respons yang tepat waktu dan penguatan pengendalian internal secara berkelanjutan. Untuk kasus yang terbukti, BRI menerapkan tindak lanjut yang proporsional sesuai dengan tingkat keparahan dan sifat pelanggaran, mulai dari sanksi administratif dan disiplin internal hingga pemutusan hubungan kerja serta, apabila relevan, pelimpahan kepada aparat penegak hukum.

Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas, menjunjung standar tata kelola, serta menegaskan sikap *zero-tolerance* BRI terhadap pelanggaran.

Sanksi/Tindak Lanjut	Hukuman Disiplin
Dalam Proses	52
Teguran Lisan	3
Surat Pembinaan	65
Peringatan Tertulis	20
Teguran Tertulis	28
Teguran Tertulis Terakhir	6
Turun Jabatan 1 Grade	3
PHK	29

Alur Mekanisme Pelaporan *Whistleblowing System* (WBS)



Strategi

Ruang lingkup pelaporan mencakup korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan pelaporan keuangan, kebocoran informasi, pelanggaran etika, serta bentuk pelanggaran lain yang setara dengan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pekerja maupun anggota organ perusahaan. BRI mengintegrasikan pengaduan dan laporan WBS ke dalam satu saluran terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas serta menyederhanakan pengelolaan dan penanganan kasus yang secara lengkap dapat diakses melalui laman resmi https://www.ir-bri.com/esg/gcg_policies.html

Saluran Pelaporan



Surat
PO Box 1450 JKP 10014



SMS dan WhatsApp
+62 811 8113 530



Email
bri-whistleblowingsystem@tipoffs.info



Website
<https://idn.deloitte-halo.com/bri-whistleblowingsystemc>

Penguatan Kapabilitas Etika dan Kepatuhan

Penguatan integritas kelembagaan memerlukan investasi berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi dan kesadaran pekerja. Dalam konteks ini, BRI menyelenggarakan program pelatihan etika dan kepatuhan yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman atas risiko *fraud* dan kejahatan keuangan, memperkuat perilaku yang bertanggung jawab, serta mendukung penerapan standar tata kelola secara konsisten di seluruh jenjang organisasi. BRI mengintegrasikan pembelajaran etika dan kepatuhan dalam kerangka pengembangan berkelanjutan yang mencakup modul *onboarding* wajib, program refreshment berkala, serta inisiatif peningkatan kesadaran berbasis sertifikasi. Materi pelatihan mencakup Kode Etik dan Kepatuhan, program Antikorupsi, e-learning Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), serta pelatihan Kepatuhan Perpajakan. Melalui program yang terstruktur ini, pekerja dibekali pemahaman komprehensif mengenai kewajiban regulasi, ekspektasi pengendalian internal, serta prosedur eskalasi, sehingga mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan secara dini dan memperkuat kerangka manajemen risiko perusahaan.

Sebagai pelengkap program pembelajaran formal, BRI juga melaksanakan inisiatif peningkatan kesadaran di tingkat organisasi, termasuk kampanye integritas dan kegiatan antikorupsi, untuk mendorong budaya *speak-up* yang kuat serta meningkatkan keterlibatan pekerja dalam menjunjung standar etika. Inisiatif ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah mitigasi risiko yang bersifat preventif, tetapi juga sebagai enabler strategis untuk menumbuhkan akuntabilitas dan praktik bisnis yang beretika secara berkelanjutan. Untuk mendukung transparansi dan memantau cakupan penguatan kapabilitas etika dan kepatuhan, BRI mencatat partisipasi pekerja dalam berbagai program pelatihan utama terkait etika bisnis, antikorupsi, pencegahan kejahatan keuangan, dan

kepatuhan regulasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas program, BRI turut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi dan kampanye antikorupsi. Salah satu program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan *in-house training* dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi.



Tabel berikut menyajikan jumlah pekerja yang berpartisipasi dalam masing-masing inisiatif pelatihan selama periode pelaporan. [\[GRI 205-2\]](#)

Pelatihan dan E-Learning	Jumlah Peserta
E-Learning APU, PPT, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi	Seluruh Pekerja
Kode Etik dan Kepatuhan	Seluruh Pekerja
Pelatihan Antikorupsi	87.226
Pelatihan Kepatuhan Pajak & Anti-Penghindaran Pajak	52
Sertifikasi Kesadaran Antikorupsi	33
Seminar Hari Antikorupsi Internasional	112

Data partisipasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan atas efektivitas dan cakupan pelatihan, guna mendukung peningkatan kesadaran etika, penguatan pengendalian risiko perilaku, serta perbaikan praktik pengendalian internal. Selain sebagai instrumen mitigasi risiko yang preventif, inisiatif pelatihan juga berkontribusi pada penguatan pengembangan kapabilitas organisasi melalui integrasi pembelajaran etika dan kepatuhan dalam kerangka pengembangan berkelanjutan. Modul *onboarding* wajib, program *refreshment* berkala, inisiatif berbasis sertifikasi, serta kampanye integritas di tingkat organisasi secara kolektif memperkuat perilaku usaha yang bertanggung jawab dan mendukung penerapan standar tata kelola secara konsisten di seluruh jenjang organisasi. Melalui pendekatan terintegrasi ini, pelatihan berfungsi sekaligus sebagai mekanisme pengendalian risiko dan enabler strategis untuk menumbuhkan integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga praktik bisnis yang beretika di seluruh organisasi.

Manajemen Risiko

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Risiko Etika Bisnis diidentifikasi dan dinilai melalui pendekatan berbasis risiko yang terstruktur dan dilakukan secara berkala, serta terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko perusahaan (*Enterprise Risk Management/ERM*) Bank. Penilaian mencakup risiko anti-korupsi dan anti-suap, kepatuhan terkait keterlibatan politik, integritas perpajakan, benturan kepentingan, serta risiko etika yang timbul dari hubungan dengan pihak ketiga dan nasabah, yang berpotensi menimbulkan dampak hukum, reputasi, operasional, dan keuangan bagi Bank.

Penilaian risiko mempertimbangkan tingkat kemungkinan terjadinya serta potensi dampak dari paparan risiko etika, dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, termasuk dinamika bisnis dan perkembangan regulasi. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam penetapan strategi mitigasi, penguatan pengendalian internal, serta penyesuaian aktivitas bisnis dengan *risk appetite* Bank dalam horizon jangka pendek, menengah, dan panjang.

Initial Customer Screening and Due Diligence

Sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko, BRI melakukan *customer screening* dan uji tuntas (*due diligence*) secara menyeluruh sebelum menjalin hubungan bisnis. Pendekatan berbasis risiko diterapkan melalui *Individual Risk Assessment* (IRA) untuk menentukan tingkat uji tuntas (*due diligence*) yang sesuai, termasuk *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), khususnya bagi nasabah berisiko lebih tinggi seperti *Politically Exposed Persons* (PEPs) atau nasabah yang terkait dengan yurisdiksi berisiko tinggi.

Proses tersebut mencakup verifikasi identitas, identifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemprofilan transaksi, pemeriksaan *watchlist* dan daftar sanksi, serta pemantauan pemberitaan negatif (*adverse media*). Untuk kasus dengan tingkat risiko lebih tinggi, BRI menerapkan prosedur penelaahan yang lebih mendalam dan mensyaratkan persetujuan pada level manajemen senior. Pendekatan yang terstruktur ini memastikan hubungan bisnis dijalankan berdasarkan prinsip integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus menjadi fondasi bagi pemantauan berkelanjutan sepanjang siklus hubungan dengan nasabah. Seluruh proses tersebut juga ditinjau secara independen melalui audit internal untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.

Penilaian Risiko Bisnis yang Beretika [GRI 205-1]

BRI melaksanakan Penilaian Risiko Etika secara terstruktur dan berkala setiap tahun untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi reputasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta stabilitas operasional Bank. Penilaian ini terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko perusahaan (*Enterprise Risk Management/ERM*) dan menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk mengevaluasi tingkat paparan di seluruh unit bisnis, proses operasional, dan hubungan eksternal.

Ruang lingkup penilaian mencakup risiko korupsi dan penyuapan, benturan kepentingan, kepatuhan terhadap anti pencucian uang (AML), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta efektivitas kebijakan etika dan mekanisme pelaporan. Tingkat paparan risiko dievaluasi dengan mempertimbangkan aspek kemungkinan dan dampak, termasuk pada area yang memiliki kerentanan lebih tinggi seperti aktivitas pengadaan, pembiayaan dan transaksi bernilai besar, keterlibatan pihak ketiga, serta hubungan bisnis pada yurisdiksi berisiko tinggi.

Berdasarkan penilaian tersebut, BRI mengidentifikasi lima aktivitas utama dengan paparan signifikan terhadap risiko gratifikasi dan penyuapan, terutama pada realisasi dan pencairan kredit, penerimaan permohonan dan analisis kredit, pembinaan, *monitoring* dan *recovery*, transaksi finansial dan non finansial kepada nasabah, dan aktivitas yang berhubungan dengan kinerja jasa pihak ketiga. Identifikasi aktivitas berisiko tinggi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan pengawasan, serta menyusun strategi mitigasi yang lebih terarah. Rencana penanganan risiko (*risk treatment plan*) dipantau secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan standar integritas, *risk appetite*, dan kerangka tata kelola BRI.

Audit Kepatuhan terhadap Standar Etika

BRI melaksanakan audit independen atas standar etika untuk memberikan assurance atas efektivitas pengendalian internal, kerangka kepatuhan, serta penerapan Kode Etik (*Code of Conduct*) di seluruh organisasi. Audit tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen dari manajemen dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Audit dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko dan mencakup area dengan paparan risiko etika yang lebih tinggi, termasuk proses perkreditan, aktivitas pengadaan, keterlibatan pihak ketiga, transaksi keuangan, serta kepatuhan terhadap kerangka anti-korupsi dan AML. Audit menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian, baik dari sisi desain kontrol maupun efektivitas pelaksanaannya, serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan etika dan persyaratan regulasi.

Apabila ditemukan kelemahan, temuan audit didokumentasikan secara formal dan disampaikan kepada fungsi manajemen terkait. BRI menyusun rencana tindakan perbaikan (*corrective action plan*) dan memantau pelaksanaannya untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu. Temuan yang material ditindaklanjuti kepada Manajemen Senior dan Dewan sesuai kebutuhan.

Selain audit berkala, fungsi audit internal memanfaatkan analitik data dan teknik pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*) untuk mendeteksi indikasi ketidakwajaran, memperkuat kapabilitas deteksi kecurangan, serta meningkatkan pengawasan atas transaksi dan aktivitas berisiko tinggi. Mekanisme assurance independen ini memastikan standar etika diterapkan secara konsisten dan terus ditingkatkan di seluruh organisasi.

Manajemen Risiko

Kebijakan dan Praktik Bisnis yang Beretika

Dalam kerangka manajemen risiko, BRI menempatkan kebijakan etika dan kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arsitektur pengendalian risiko untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis dijalankan sesuai prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, pada bagian ini disajikan kebijakan-kebijakan utama terkait etika bisnis, mencakup APU, PPT, dan PPPSPM, Anti Suap dan Anti Korupsi, Keterlibatan Politik, serta Tata Kelola Perpajakan sebagai bentuk pengungkapan atas keselarasan kebijakan dengan proses identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan.

Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut memperkuat lingkungan pengendalian secara menyeluruh serta mendukung pengelolaan risiko kepatuhan dan integritas secara efektif. Meskipun kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan mitigasi dalam kerangka manajemen risiko, proses persetujuan, akuntabilitas, dan pengawasannya tetap mengacu pada struktur tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi

Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi BRI diatur secara formal melalui Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tentang Tata Kelola Perusahaan, Buku 3: Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh insan BRILiaN, termasuk pegawai tetap, pekerja kontrak, dan tenaga alih daya.

Bank menerapkan pendekatan *zero tolerance* terhadap praktik suap, korupsi, dan gratifikasi. Sebagai bagian dari kerangka pengendalian internal, BRI mewajibkan konfirmasi kepatuhan tahunan (*annual sign-off*) untuk memastikan *awareness*, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar anti korupsi senantiasa terjaga di seluruh jenjang organisasi. Pada tahun 2025, seluruh karyawan telah menyelesaikan proses *annual sign-off* sebagai bentuk pemahaman dan komitmen untuk mematuhi Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi. BRI juga menerapkan Program Pengendalian Suap dan Gratifikasi yang terintegrasi dan selaras dengan nilai Brilian Way, dengan memperkuat langkah-langkah pencegahan atas pembayaran yang tidak semestinya serta melarang kontribusi politik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam bentuk donasi, *sponsorship*, atau dukungan lainnya. Kerangka kebijakan ini diintegrasikan ke dalam proses operasional dan didukung oleh pengawasan manajerial, pemantauan kepatuhan, serta pelaporan berkala kepada Dewan Komisaris melalui komite terkait.

Untuk memitigasi risiko *fraud* dan gratifikasi, BRI menerapkan pengendalian yang ketat terhadap pembayaran yang tidak sah. Bank menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk *facilitation payment*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. *Facilitation payment* didefinisikan sebagai pembayaran dalam jumlah kecil yang dimaksudkan untuk mempercepat proses administratif rutin yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya biaya tambahan. Untuk memperkuat pengendalian institusional, BRI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di bawah Fungsi Kepatuhan, yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, program peningkatan *awareness*, serta pengelolaan pelaporan

dan analisis gratifikasi. Seluruh laporan gratifikasi diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme pelaporan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

BRI juga memperkuat pengendalian anti suap melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, yang disertifikasi oleh lembaga independen dan diterapkan pada proses pengadaan di Kantor Pusat. Sistem ini dipantau secara berkelanjutan dan diaudit secara eksternal secara berkala untuk memastikan efektivitasnya serta keselarasan yang berkelanjutan dengan ketentuan regulasi dan standar tata kelola. Hasil pemantauan dan penilaian audit eksternal dilaporkan secara formal kepada *Chief Executive Officer* sebagai bagian dari pengawasan eksekutif dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawasan untuk memastikan akuntabilitas pada tingkat manajemen dan tata kelola tertinggi. Audit eksternal terakhir mengonfirmasi bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan sistem tersebut.

BRI juga memperluas standar anti korupsi kepada pemasok dan mitra usaha melalui proses uji tuntas pihak ketiga, klausul anti korupsi dalam perjanjian, serta audit rantai pasok. Seluruh vendor diwajibkan mematuhi ketentuan anti korupsi yang setara dengan standar internal Bank, dan pelanggaran dapat berakibat pada penghentian kerja sama sesuai ketentuan kontrak. Untuk mendorong transparansi dan memudahkan akses pemangku kepentingan, BRI menyediakan pengungkapan kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi secara lengkap melalui microsite resmi https://www.ir-bri.com/gcg_policies.html.

Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan pengawasan aktif untuk memastikan implementasi program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi (APU, PPT dan PPPSPM) berjalan efektif sesuai kebijakan yang berlaku serta ketentuan regulasi. Isu-isu strategis terkait pelaksanaan program tersebut ditelaah dalam rapat Dewan secara berkala paling sedikit setiap semester, dengan perhatian khusus pada perkembangan regulasi, ekspektasi pemangku kepentingan, serta tipologi yang berkembang atas risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas operasional, BRI membangun kerangka tata kelola yang terstruktur bagi implementasi APU, PPT dan PPPSPM di seluruh jenjang manajemen, Kantor Pusat, dan unit operasional. Di tingkat Kantor Pusat, Grup APU, PPT dan PPPSPM berperan sebagai fungsi khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan, serta penyusunan laporan konsolidasi kepada Direktur Human Capital dan Compliance.

Di tingkat operasional, pelaksanaan program didukung oleh unit *Regional Operation Risk & Compliance* (RORC) serta *Micro & Retail Risk & Compliance* (MRR), yang berkoordinasi secara berkala dengan Grup APU, PPT dan PPPSPM untuk memastikan penerapan standar yang konsisten di seluruh wilayah. Untuk menjaga ketangguhan kerangka tersebut, BRI terus meningkatkan kompetensi personel yang bertanggung jawab atas APU, PPT, dan PPPSPM melalui pelatihan berkala serta program sertifikasi profesional. Pendekatan ini memastikan kapabilitas manajemen risiko tetap selaras dengan ekspektasi regulasi yang terus berkembang dan praktik terbaik internasional.

Manajemen Risiko

Kebijakan dan Prosedur Implementasi Program APU, PPT, dan PPPSPM

BRI telah menetapkan kerangka APU, PPT, dan PPPSPM yang komprehensif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan regulator, serta praktik terbaik internasional, sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Direksi No. SE.04-DIR/KEP/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Kerangka tersebut mencakup pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta penetapan tanggung jawab yang jelas bagi pejabat/penanggung jawab Program APU, PPT, dan PPPSPM. Kerangka ini menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk melakukan penilaian dan pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi secara berkelanjutan pada seluruh aktivitas bisnis.

Elemen inti program meliputi prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah yang kuat melalui *Customer Due Diligence* (CDD), yang mencakup calon nasabah dan nasabah eksisting, pemilik manfaat (*beneficial owner*), *walk-in customer*, serta profil tertentu dengan tingkat risiko lebih tinggi. Kerangka ini juga mensyaratkan pemutakhiran profil nasabah secara berkala dan pemantauan transaksi untuk memastikan keselarasan antara profil risiko yang dinyatakan dengan perilaku transaksi yang terjadi. Untuk memperkuat efektivitas screening, Bank menjaga akurasi dan pembaruan sistem data yang mencakup daftar pemantauan teroris, daftar pendanaan proliferasi, serta basis data *Politically Exposed Person* (PEP). Kerangka ini juga mencakup proses penyaringan pegawai, penerapan *Know Your Employee* (KYE), serta program pelatihan berkala guna meningkatkan *awareness* dan integritas internal.

Secara operasional, program memastikan dokumentasi yang memadai dan penyimpanan catatan (*record retention*) atas data nasabah dan transaksi, penerapan di kantor cabang dalam negeri dan luar negeri serta entitas anak dalam konglomerasi keuangan, serta penguatan pengendalian internal. Bank memiliki kewenangan untuk menolak transaksi, menghentikan sementara aktivitas, atau mengakhiri hubungan bisnis apabila teridentifikasi risiko APU/PPT/PPPSPM.

BRI memenuhi kewajiban pelaporan kepada regulator melalui penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT/CTR), laporan transfer dana lintas negara, serta pengungkapan APU/PPT/PPPSPM lainnya kepada PPATK, OJK, dan otoritas berwenang terkait. Kerangka ini juga mengatur hubungan koresponden perbankan lintas negara serta transfer dana internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) global. Melalui kerangka yang terstruktur dan berbasis risiko ini, BRI memastikan pengendalian APU, PPT, dan PPPSPM diterapkan secara konsisten, dipantau, dan terus diperkuat di seluruh tingkatan operasional.

BRI menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko yang selaras dengan regulasi yang berlaku, *National Risk Assessment* (NRA), *Sectoral Risk Assessment* (SRA), serta praktik terbaik internasional. Kerangka implementasi program tersebut disusun ke dalam komponen-komponen utama sebagai berikut.

1. Penetapan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi
Pada tahun 2025, BRI melaksanakan *Individual Risk Assessment* (IRA) untuk menilai paparan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi pada aspek nasabah, wilayah geografis, produk/layanan, transaksi, serta kanal distribusi. Berdasarkan penilaian tersebut, BRI mengidentifikasi sejumlah area dengan tingkat risiko lebih tinggi, antara lain:
 - profil nasabah, seperti *Politically Exposed Persons* (PEPs), wirausahawan, serta pegawai badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD);
 - struktur entitas hukum, seperti perseroan terbatas yang beroperasi pada sektor jasa keuangan, perdagangan, dan perkebunan;
 - wilayah geografis, termasuk sejumlah wilayah domestik tertentu (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah), serta yurisdiksi berisiko tinggi yang diidentifikasi oleh otoritas global (Korea Utara, Iran, dan Myanmar);
 - produk dan layanan, khususnya yang melibatkan transfer dana lintas negara serta layanan priority/private banking; dan
 - kanal transaksi digital, termasuk BRILink dan BRIimo.
2. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*)
BRI menerapkan *Risk-Based Approach* dalam pelaksanaan uji tuntas melalui *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon nasabah, nasabah eksisting, *Walk-in Customers* (WIC), serta *Beneficial Owners* (BO), baik pada tahap pembukaan hubungan (*onboarding*) maupun pada saat transaksi. Pelaksanaan uji tuntas ini juga disertai pemantauan berkala berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi yang dilakukan Bank.

Dalam menjalin hubungan bisnis, BRI melaksanakan CDD melalui langkah-langkah berikut:

- identifikasi nasabah dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung untuk memahami profil calon nasabah, nasabah, WIC, dan BO;
- verifikasi, meliputi:
- pemeriksaan akurasi dan konsistensi data, informasi, serta dokumen pendukung yang disampaikan; dan
- pemeriksaan kesesuaian antara pihak penyedia data/informasi/dokumen dengan profil nasabah/BO untuk memastikan keaslian;
- pemantauan berkala atas profil dan transaksi nasabah, WIC, dan BO.

CDD diterapkan pada kondisi berikut:

- saat membangun hubungan bisnis dengan calon nasabah;
- untuk transaksi dengan nilai sama dengan atau melebihi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- pada transaksi transfer dana;
- apabila teridentifikasi indikasi mencurigakan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi;
- apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran/keakuratan informasi nasabah.

Manajemen Risiko

Untuk verifikasi non tatap muka, BRI menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik sendiri maupun pihak ketiga dengan memanfaatkan data kependudukan serta menerapkan minimal dua faktor autentikasi, antara lain:

- *something you are* (misalnya pengenalan wajah, sidik jari, pola iris/retina); dan
- *something you have* (misalnya kartu identitas, *One-Time Password/OTP*, tanda tangan digital).

3. Enhanced Due Diligence (EDD)

BRI mengklasifikasikan nasabah, WIC, dan BO ke dalam tiga kategori risiko (tinggi, menengah, dan rendah) berdasarkan:

- profil nasabah (pekerjaan, sektor usaha, struktur entitas, tujuan pembukaan rekening, kewarganegaraan);
- wilayah geografis (lokasi usaha dan alamat domisili);
- produk/layanan/transaksi (jenis produk yang digunakan, tujuan hubungan, profil transaksi, tingkat penghasilan); dan
- kanal distribusi (mekanisme dan fasilitas yang digunakan).

Kategori risiko tinggi mencakup *Politically Exposed Persons* (PEPs), yaitu individu yang dipercayakan untuk menjalankan fungsi publik yang penting, baik di dalam negeri maupun internasional. Untuk nasabah berisiko tinggi dan PEP, BRI menerapkan prosedur EDD, antara lain pengumpulan data yang lebih mendalam terkait sumber dana (*source of funds*), sumber dan nilai kekayaan (*source and amount of wealth*), informasi tambahan mengenai penghasilan, keterkaitan dengan PEP, serta pemeriksaan terhadap pemberitaan negatif (*adverse news*) dan daftar sanksi. Pembukaan hubungan bisnis atau kelanjutan transaksi bagi nasabah berisiko tinggi memerlukan persetujuan Pejabat Senior (minimal satu tingkat di atas manajemen, seperti *Branch Manager/Kepala Unit/Authorized Officer*). Nasabah berisiko tinggi dan PEP juga dikenakan penelaahan EDD secara berkala serta pemantauan yang ditingkatkan.

Pembukaan hubungan usaha atau penerusan Transaksi untuk kategori risiko tinggi (*high risk*) wajib mendapat putusan dari Pejabat Senior (pejabat minimal setingkat lebih tinggi/manajemen, seperti *Branch Manager/Pemimpin Unit/Pejabat yang diberikan kewenangan*). Calon nasabah, nasabah, WIC dan BO kategori risiko tinggi (*high risk*) dan PEP menjalankan prosedur EDD secara berkala dan dipantau lebih ketat atas hubungan usaha.

4. Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner* (BO)

BRI melakukan identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner* (BO) untuk nasabah perorangan yang tidak menyampaikan penghasilan serta nasabah badan usaha/non-perorangan, berdasarkan sumber informasi yang andal. Proses identifikasi dan verifikasi mencakup:

- informasi identitas BO;
- sumber dana;
- rata-rata penghasilan tahunan;
- hubungan hukum antara nasabah dan BO; serta
- pernyataan nasabah mengenai identitas BO dan sumber dana.

Apabila kepemilikan pengendali tidak dapat ditentukan secara jelas, BRI melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pihak yang menjalankan pengendalian (misalnya direksi atau jabatan setara). Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara nasabah dan BO, pelaksanaan CDD/EDD dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang lebih tinggi.

5. Watchlist Screening

BRI memastikan bahwa hubungan bisnis tidak dibentuk dengan pihak-pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), daftar sanksi, maupun internal *watchlist* (data dugaan pelaku tindak pidana). Sistem *screening* otomatis yang terintegrasi pada kanal onboarding dan transaksi meliputi:

- *Watchlist Screening System*;
- *Safewatch (Sanction List) Screening System*; dan
- *PEP Screening System*.

Apabila kepemilikan pengendali tidak dapat ditentukan secara jelas, BRI melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pihak yang menjalankan pengendalian (misalnya direksi atau jabatan setara). Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara nasabah dan BO, pelaksanaan CDD/EDD dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang lebih tinggi. BRI tidak memfasilitasi pembukaan rekening bagi individu/entitas yang tercantum dalam DTTOT, DPPSPM, daftar sanksi, maupun internal *watchlist*. EDD diterapkan untuk kategori PEP, serta penelaahan berkala dilakukan untuk memitigasi potensi *false positive* pada hasil *screening*.

6. Pemantauan Berkelanjutan (*Ongoing Monitoring*)

BRI memanfaatkan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi aktivitas dan transaksi nasabah yang mencurigakan atau tidak wajar, antara lain:

- sistem APU, PPT, dan PPPSPM yang menghasilkan alert harian berdasarkan indikator kecurigaan;
- *Graph Database System* yang memvisualisasikan pola transaksi dalam format spider-web, termasuk keterkaitan lapis kedua dan ketiga;
- *Real-Time Detection Tools* untuk mendeteksi anomali transaksi;
- sistem pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM yang mendukung penyampaian LTKM (STR), LTKT (CTR), laporan transfer dana lintas batas, serta pelaporan lainnya sesuai ketentuan regulator; dan
- *Customer Portfolio Application* yang mengkonsolidasikan data nasabah untuk mendukung permintaan regulator dan aparat penegak hukum.

BRI secara proaktif menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR) dan dapat menunda transaksi sesuai ketentuan regulasi serta pertimbangan manajemen risiko guna mencegah aliran dana ilegal.

Manajemen Risiko

7. Pengelolaan Hubungan Bisnis (*Business Relationship Management*)

Apabila nasabah atau pihak terkait:

- tidak memenuhi persyaratan CDD/EDD;
- menggunakan dokumen palsu;
- diduga menggunakan dana yang berasal dari tindak pidana;
- tercantum dalam daftar DTTOT dan/atau DPPSPM; atau
- berasal dari negara berisiko tinggi yang diidentifikasi oleh FATF;

maka BRI dapat menolak pembukaan hubungan bisnis, membatasi transaksi, mengakhiri hubungan, serta menyampaikan LTKM/STR, dengan tetap mematuhi ketentuan *Anti-Tipping Off*.

8. Penyimpanan Dokumen (*Record Keeping*)

BRI menyimpan dokumentasi nasabah, WIC, dan BO paling singkat lima tahun sejak:

- berakhirnya hubungan bisnis atau selesainya transaksi; atau
- ditemukannya ketidaksesuaian transaksi.

Penyimpanan dokumen transaksi dilaksanakan sesuai ketentuan dan kebijakan pengelolaan dokumen perusahaan yang berlaku.

9. Independent Audit

BRI menyimpan dokumentasi nasabah, WIC, dan BO paling singkat lima tahun sejak:

- kecukupan kebijakan dan prosedur;
- struktur tata kelola dan pembagian peran; serta
- pengujian independen atas efektivitas program.

Pada tahun 2025, implementasi APU, PPT, dan PPPSPM telah ditelaah oleh Audit Internal pada triwulan II dan Audit Eksternal pada triwulan IV. Tidak terdapat temuan signifikan, khususnya terkait prosedur CDD/EDD serta penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi. Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu perbaikan yang telah disepakati.

Strategi dan kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM BRI juga dirancang dan diimplementasikan untuk mencegah serta memerangi aliran dana yang terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan, lingkungan, dan sumber daya alam, yang dikenal sebagai *Green Financial Crime* (GFC). BRI menerapkan mekanisme pemantauan transaksi dengan memasukkan indikator anomali yang berpotensi terkait tindak pidana GFC. Apabila terdeteksi alert transaksi mencurigakan, BRI menerapkan prosedur EDD. Jika transaksi dinilai mencurigakan, BRI menyampaikan LTKM/STR, serta dapat menangguhkan transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan manajemen risiko internal.

Upaya Pencegahan Tindakan Tidak Etis

Sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko, BRI menetapkan mekanisme pencegahan, deteksi, dan korektif yang terstruktur untuk memitigasi risiko perilaku tidak etis di seluruh aktivitas bisnis. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan potensi pelanggaran terhadap Kode Etik (*Code of Conduct*) dan kebijakan etika terkait dapat diidentifikasi sejak dini, dilaporkan tepat waktu, serta ditangani secara efektif. BRI menyediakan kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi karyawan maupun pemangku kepentingan terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara rahasia, disertai perlindungan yang memadai terhadap tindakan pembalasan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelaporan ini terintegrasi dalam sistem pengendalian internal Bank untuk mendukung proses investigasi, perbaikan, serta peningkatan berkelanjutan.

Untuk memperkuat pengendalian pencegahan, BRI menyelenggarakan program pelatihan berkala terkait etika bisnis dan kepatuhan hukum guna meningkatkan *awareness* dan akuntabilitas karyawan. Melalui pendekatan terintegrasi ini, Bank memperkuat lingkungan pengendalian dan mendorong budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab.

Investigasi Pelanggaran Kode Etik (*Code of Conduct*)

Sebagai bagian dari kerangka pengelolaan risiko etika, BRI memiliki mekanisme investigasi yang terstruktur untuk menangani dugaan pelanggaran Kode Etik (*Code of Conduct*) dan kebijakan internal terkait. Seluruh laporan insiden, baik yang berkaitan dengan perilaku tidak etis maupun ketidakpatuhan, ditindaklanjuti melalui penelaahan yang tepat waktu dan menyeluruh sesuai prosedur yang berlaku.

Investigasi dilaksanakan secara objektif, adil, dan menjaga kerahasiaan, dipimpin oleh Fungsi Kepatuhan dengan melibatkan unit pengendalian terkait sesuai kebutuhan untuk memastikan pengumpulan fakta yang komprehensif serta penilaian yang independen. Sepanjang proses, prinsip *due process* dijunjung tinggi, termasuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan. Setelah investigasi selesai, tindakan perbaikan dan disiplin ditetapkan berdasarkan tingkat keparahan dan dampak pelanggaran. Tindakan tersebut dapat mencakup penguatan pengendalian, penyesuaian kebijakan, penguatan pelatihan secara terarah, atau pemberian sanksi disiplin sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelemahan yang teridentifikasi beserta akar penyebabnya didokumentasikan, dan rencana perbaikan dipantau untuk memastikan penyelesaian yang efektif serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Apabila ditemukan pelanggaran yang material, hasil investigasi disampaikan kepada manajemen senior dan forum tata kelola terkait sesuai dengan kerangka pelaporan dan tindak lanjut BRI.

Metrik dan Target

Untuk memastikan penerapan prinsip etika, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan yang konsisten di seluruh organisasi, BRI menetapkan mekanisme pengukuran dan target yang jelas. Setiap metrik dirancang untuk memantau efektivitas program, menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, serta memastikan prosedur dijalankan dengan baik. Pengukuran ini juga menjadi dasar dalam mengevaluasi komitmen BRI terhadap integritas, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sekaligus mendukung komunikasi yang transparan kepada manajemen dan pemangku kepentingan.



Pelanggaran atas Kode Etik

Sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap etika dan kepatuhan, setiap pelanggaran terhadap Kode Etik (*Code of Conduct*) ditangani secara serius melalui prosedur investigasi yang jelas. Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) dan dapat berdampak pada remunerasi serta penilaian kinerja individu, guna menjaga integritas, disiplin, dan akuntabilitas seluruh insan BRI.

Pada Tahun 2025

3.914 karyawan dikenakan sanksi korektif

1.114 karyawan dikenakan sanksi disiplin yang berdampak pada batannya



Penanganan Investigasi Kecurangan dan Penyelesaian Kasus

Insiden kecurangan ditangani melalui proses investigasi formal untuk memastikan penyelesaian yang tepat sesuai kebijakan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Bergantung pada karakteristik dan tingkat keparahan kasus, tindak lanjut dapat mencakup langkah penanganan internal serta diteruskan ke proses hukum untuk menegakkan akuntabilitas dan menjaga integritas kegiatan operasional maupun bisnis.

Pada Tahun 2025

1.023 karyawan yang terlibat dalam kecurangan

707 Sanksi disiplin
314 Proses remediiasi internal
141 Diproses secara hukum



General Sustainability Topic Disclosure



Tata Kelola

Tata Kelola Perusahaan

BRI menerapkan tata kelola perusahaan yang terintegrasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selama tahun 2025, BRI telah melakukan penyempurnaan pada kerangka Tata Kelola Terintegrasi, menetapkan *parenting style* untuk mengelola Perusahaan Anak, dan melakukan evaluasi terhadap tingkat kematangan penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta pelaksanaan tugas di setiap unit kerja yang terintegrasi di dalam Konglomerasi Keuangan BRI.

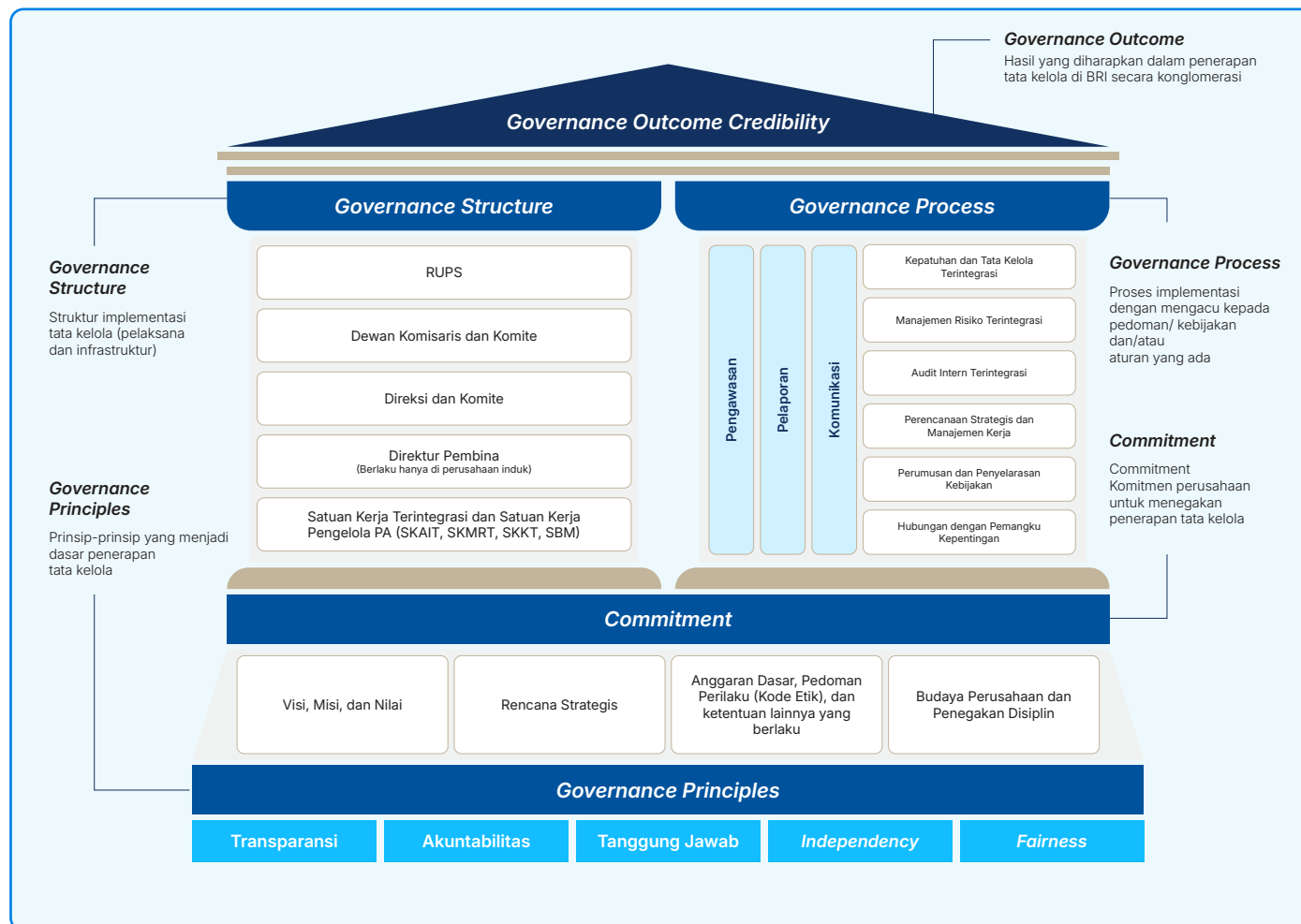
Penerapan GCG memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Perusahaan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional.
4. Mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip dan Struktur Tata Kelola

Prinsip Tata Kelola

BRI berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan kegiatan operasional. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). BRI juga menyelaraskan prinsip GCG tersebut dengan prinsip dasar GCG yang berpedoman pada Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021.



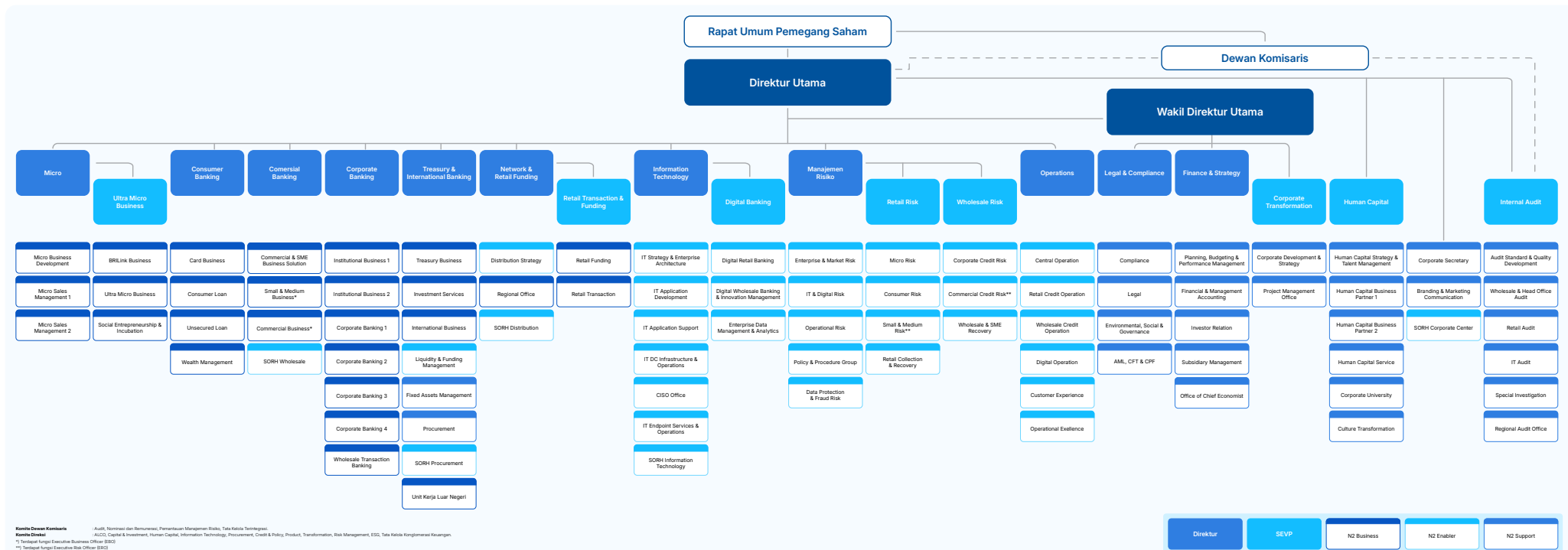
Tata Kelola

Struktur dan Kepemimpinan Dewan ^[GRI 2-9] ^[GRI 2-11]

Struktur tata kelola BRI mengadopsi sistem dua tingkat (*two-tier system*) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dengan batasan yang jelas untuk menjaga independensi dan akuntabilitas. Dewan Komisaris merupakan direktur non-eksekutif yang menjalankan fungsi pengawasan secara independen, sementara Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris BRI terdiri dari enam (6) anggota, termasuk tiga (3) Komisaris Independen, sementara Direksi terdiri dari tiga belas (13) Direktur. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Struktur tata kelola BRI terdiri atas:

1. Organ Utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
2. Organ Pendukung yang terdiri dari Komite di bawah Dewan Komisaris serta Komite dan Unit Kerja dibawah Direksi. Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan Komite dan Unit Kerja di bawah Direksi mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasional BRI.

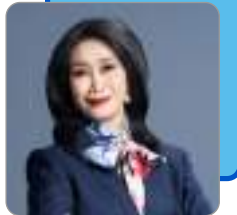


Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite-komitennya mencerminkan keseimbangan antara anggota eksekutif dan non-eksekutif, dengan mempertimbangkan aspek independensi, masa jabatan, dan pengalaman profesional. Anggota ditunjuk untuk masa jabatan yang telah ditentukan. Informasi ini diungkap untuk memastikan transparansi mengenai komitmen dan potensi konflik kepentingan. ^[GRI 2-9] Selain itu, BRI memastikan bahwa anggota badan tata kelola tertinggi secara kolektif memiliki kompetensi yang relevan dalam mengidentifikasi risiko serta peluang terkait keberlanjutan beserta dampaknya. Representasi dan wawasan pemangku kepentingan juga diintegrasikan dalam proses tata kelola, mendukung pengawasan yang berdasarkan informasi dan memperkuat komitmen Perusahaan untuk menciptakan nilai yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan. ^[GRI 2-9]

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 1 Januari – 24 Maret 2025

					
	Sunarso*	Catur Budi Harto*	Agus Noorsanto	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Handayani*
Jabatan	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	Direktur Keuangan	Direktur Bisnis Konsumer
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2019 – 2024 (Periode Pertama) 2023 – 2025 (Periode Kedua) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2019 – 2024 (Periode Pertama) 2024 – 2025 (Periode Kedua) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2019 – 2024 (Periode Pertama) 2024 – 2025 (Periode Kedua)	2021 – 2026 (Periode Pertama) 2025 – 2030 (Periode Kedua)	2017 – 2022 (Periode Pertama) 2022 – 2025 (Periode Kedua) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025
Usia	62 Tahun	62 Tahun	61 Tahun	47 Tahun	60 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan
Pendidikan	- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1988) - Magister Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (2002)	- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1986) - Magister Manajemen, Universitas Prasetya Mulya (2002)	- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1988) - Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (1999)	- Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2001) - Master of Business Administration, University of Rochester, US (2010)	- Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga (1988) - Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran (2001)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (2017 – 2019) - Wakil Direktur Utama BRI (2019) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019 – 2025)	- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2017 – 2019) - Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019 – 2025)	- Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> & Kelembagaan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019 – 2025) - Wakil Direktur Utama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025)	- AVP Planning, Corporate Development & Strategy PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2016 – 2017) - AVP Equity Management, Corporate Development & Strategy PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2017 – 2018) - VP Subsidiary Management Desk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018 – 2019) - EVP Subsidiary Management Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019) - Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2025) - Direktur Finance & Strategy PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025) - Wakil Direktur Utama BRI (2025 – sekarang)	- Direktur Consumer Banking, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2016 – 2017) - Direktur Konsumer, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017 – 2025) - Wakil Ketua CWMA (2017 – sekarang) - Sekjen ASPI (2019 – sekarang)
Keahlian	Wholesale Banking, Corporate Banking, Micro Banking, Risk Management	Consumer Banking, Wholesale Banking, Risk Management	Wholesale Banking, Corporate Banking, Risk Management	Corporate Finance, Accounting Management, Risk Management	Consumer Banking, Wholesale Banking, Risk Management

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 1 Januari – 24 Maret 2025

					
	Supari*	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Agus Sudiarto*	Agus Winardono*	Amam Sukriyanto*
Jabatan	Direktur Bisnis Mikro	Direktur Kepatuhan	Direktur Manajemen Risiko	Direktur <i>Human Capital</i>	Direktur <i>Commercial, Small and Medium Business</i>
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2019 – 2024 (Periode Pertama) 2024 – 2025 (Periode Kedua) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2018 – 2023 (Periode Pertama) 2023 – 2025 (Periode Kedua)	2018 – 2023 (Periode Pertama) 2023 – 2028 (Periode Kedua) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2021 – 2025 (Periode Pertama) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2021 – 2025 (Periode Pertama) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025
Usia	59 Tahun	55 Tahun	60 Tahun	60 Tahun	57 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya (1989) - Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gadjah Mada (2005)	- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Jember (1990) - Magister Manajemen, Marketing/MIS, UGM/Adger Collage University Norway (2000)	- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1988) - Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2004)	- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Krisna Dwipayana (1988) - Magister Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2001) - Doctor of HR Management, Universitas Negeri Jakarta (2024)	- Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya (1991) - Master of Business Administration, the University of Adelaide, Australia (2006)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Direktur Bisnis Ritel dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018 – 2019) - Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019 – 2025)	- Direktur Kepatuhan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2025) - Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025)	- SEVP Special Asset Management Bank Mandiri (2017 – 2019) - Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019 – 2025)	- Direktur <i>Human Capital</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2025) - Ketua Bidang V, FHCI BUMN (2024 – sekarang) - Ketua PMO Pengembangan Aplikasi <i>Human Capital</i> Terintegrasi, BUMN (2023 – sekarang) - Wakil Ketua Bidang I – Digital Capacity Building, Forum Digital BUMN (FORDIGI) (2023 – sekarang) - Bendahara, BUMN School of Excellent (2023 – sekarang)	- SEVP <i>Fixed Assets Management & Procurement Directorate</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2020 – 2021) - Direktur Bisnis Kecil dan Menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2024) - Direktur <i>Commercial, Small, and Medium Business</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2024 – 2025)
Keahlian	<i>Micro Banking, Risk Management</i>	<i>Risk Management, Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), Wholesale Banking</i>	<i>Risk Management, Sharia Banking, Corporate Banking</i>	<i>Human Capital, Risk Management</i>	<i>Retail Banking, International Business Banking, Risk Management</i>

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 1 Januari – 24 Maret 2025

		
	Arga M. Nugraha*	Andrijanto*
Jabatan	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Direktur <i>Retail Funding and Distribution</i>
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2021 – 2025 (Periode Pertama) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2022 – 2025 (Periode Pertama) *berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025
Usia	44 Tahun	51 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	• Sarjana Teknik Informatika, Universitas Bina Nusantara (2003) • Master of Science, Carnegie Mellon University, USA (2011)	• Sarjana (Akuntansi), Universitas Airlangga (1998) • Master (Finance), Indiana University, USA (2012)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	• EVP <i>Briliink Network Division</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2020 – 2021) • Direktur Jaringan & Layanan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2022) • Direktur Digital & Teknologi Informasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2022 – 2025)	• Kepala Divisi <i>Planning, Budgeting & Performance Management</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2022) • Direktur Jaringan dan Layanan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2022 – 2024) • Direktur <i>Retail Funding and Distribution</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024 – 2025)
Keahlian	<i>IT & Digital Banking, Risk Management</i>	<i>Finance, Risk Management</i>

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 24 Maret – 17 Desember 2025



Hery Gunardi



Agus Noorsanto*



Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari



Ahmad Solichin Lutfiyanto*

	Hery Gunardi	Agus Noorsanto*	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Ahmad Solichin Lutfiyanto*
Jabatan	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	Direktur <i>Finance & Strategy</i>	Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2019 – 2024 (Periode Pertama) 2024 – 2025 (Periode Kedua) *berhenti menjabat sejak 17 Desember 2025	2021 – 2026 (Periode Pertama) 2025 – 2030 (Periode Kedua)	2018 – 2023 (Periode Pertama) 2023 – 2025 (Periode Kedua) *berhenti menjabat sejak 17 Desember 2025
Usia	63 Tahun	61 Tahun	47 Tahun	55 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Pendidikan	- Sarjana Administrasi Niaga, Universitas 17 Agustus Jakarta (1987) <i>Master of Business Administration</i>, Major in Finance and Accounting, University of Oregon USA (1991) - Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran Bandung (2021)	- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1988) - Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (1999)	- Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2001) - Master of Business Administration, University of Rochester, USA (2010)	- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Jember (1990) - Magister Manajemen, Marketing/MIS, UGM/ Adger Collage University Norway (2000)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Direktur, PT AXA Mandiri Financial Services (2003–2006) <i>Senior Vice President, Group Head Wealth Management</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – 2009) <i>Executive Vice President, Group Head Distribution Network I</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009 – 2013) <i>Senior Executive Vice President, Consumer Finance</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013) - Direktur <i>Micro & Business Banking</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015) - Direktur <i>Consumer Banking</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2016) - Direktur <i>Distributions</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 – 2018) - Direktur Bisnis & Jaringan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019) - Direktur <i>Consumer & Retail Transaction</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 – 2020) - Wakil Direktur Utama, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020) - Ketua <i>Project Management Office</i>, Merger Bank Syariah Milik BUMN (2020 – 2021) - Direktur Utama, PT Bank Syariah Mandiri (2020) - Direktur Utama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2020 – 2025) - Direktur Utama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2025 – sekarang)	- Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019 – 2025) - Wakil Direktur Utama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025)	<i>AVP Planning, Corporate Development & Strategy</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2016 – 2017) <i>AVP Equity Management, Corporate Development & Strategy</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2017 – 2018) <i>VP Subsidiary Management Desk</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018 – 2019) <i>EVP Subsidiary Management Division</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019) - Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2025) - Direktur <i>Finance & Strategy</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025) - Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- Direktur Kepatuhan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2025) - Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025)
Keahlian	<i>Consumer Banking, Micro & Retail Banking, Project Management, Treasury, Insurance & Investment, Shariah Banking</i>	<i>Wholesale Banking, Corporate Banking, Risk Management, Manajemen, Akuntansi</i>	<i>Corporate Finance, Accounting Management, Risk Management</i>	<i>Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), Wholesale Banking</i>

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 24 Maret – 17 Desember 2025



	Hakim Putratama	Riko Adyitha	Aquarius Rudianto	Farida Thamrin
Jabatan	Direktur Operations	Direktur Corporate Banking	Direktur Network & Retail Funding	Direktur Treasury & International Banking
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)
Usia	49 Tahun	52 Tahun	58 Tahun	53 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan
Pendidikan	- Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1998) - Master International Business dari Aston University, Inggris (2001)	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1994) - Master of Business Administration dari Booth Business School, University of Chicago, USA (2008)	Sarjana Sosial Politik Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (1990)	Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Depok (1996)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Senior Vice President (SVP) Head of Marketing & Segment Offering PT Bank Commonwealth (2012 – 2015) - Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary Division PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (2015 – 2018) - Senior Vice President (SVP) Consumer Funding Retail Division PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (2018 – 2022) - Head of International and Transaction Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (2022 – 2023) - Direktur Institutional Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2023 – 2024) - Direktur Operations and Customer Experience PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2024 – 2025) - Direktur Operations PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – Sekarang)	- Vice President – Structured Trade Finance, Citibank New York (September 2001 – Agustus 2003) - Director/Deputy Country CFO, Citi (Agustus 2003 – Oktober 2010) - Director/COO Treasury & Trade Solutions, Citi (Oktober 2010 – Oktober 2012) - Director/Country Head Treasury & Trade Solutions, Citi (Oktober 2012 – November 2013) - Managing Director/Country Head Treasury & Trade Solutions, Citi (November 2013 – Oktober 2015) - Managing Director/Country Head Global Subsidiaries Group, Citi (Oktober 2015 – Agustus 2018) - Managing Director Global Banking, HSBC Indonesia (Agustus 2018 – Desember 2022) - Direktur Wholesale Banking, HSBC Indonesia (Januari 2023 – Desember 2024) - Presiden Direktur (Designate), HSBC Indonesia (Januari – Maret 2025) - Direktur Corporate Banking, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- Senior Vice President Commercial Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2010 – 2014) - Senior Vice President Regional CEO, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 – 2018) - Senior Executive Vice President (SEVP) Operation, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2018 – 2019) - Komisaris, Mandiri AXA General Insurance (2019 – 2020) - Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis dan Jaringan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020) - Komisaris, PT Bank Syariah Mandiri (2020) - Direktur Jaringan & Retail Funding, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2020 – 2025) - Direktur Network & Retail Funding, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- SVP Market Risk Group Head Bank Mandiri (2015 – 2016) - SVP Treasury Group Head Bank Mandiri (2016 – 2019) - Komisaris PT Mandiri Sekuritas (2019 – 2021) - SEVP Corporate Banking Solution Head Bank Mandiri (2019 – 2021) - Komisaris PT Bukit Pembangkit Inovatif (2021 – 2024) - Komisaris PT Bukit Multi Investasi (2022 – 2023) - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam (2021 – 2025) - Direktur Treasury and International Banking BRI (2025 – sekarang)
Keahlian	International Banking, Transaction Banking, Banking Operations, Consumer Banking, Risk Management	Wholesale Banking, Transaction Banking, International & FDI Connectivity, Transformation, Finance, Risk Management	Risk Management, Operasional, Consumer Banking, Commercial Banking, Distribution & Retail Banking	Treasury, Finance, Risk Management, Corporate Banking, International Banking

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 24 Maret – 17 Desember 2025



	Akhmad Purwakajaya	Alexander Diplo Paris Y. S.	Nancy Adistyastari*	Mucharom*	Saladin Dharma Nugraha Effendi
Jabatan	Direktur Mikro	Direktur <i>Commercial Banking</i>	Direktur <i>Consumer Banking</i>	Direktur Manajemen Risiko	Direktur Teknologi Informasi
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama) *berhenti menjabat sejak 17 Desember 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama) *berhenti menjabat sejak 17 Desember 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama)
Usia	54 Tahun	43 Tahun	44 Tahun	56 Tahun	51 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998) - Magister Manajemen dari STIE Widya Wiwaha (2020)	- Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Indonesia (2004) - Master of Management dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2009) - Master of Business Administration dari University of Cambridge, London (2012)	Sarjana Bidang Geofisika dan Meteorologi dari Institut Teknologi Bandung (2004)	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (1995) - Magister Manajemen Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)	<i>Bachelor of Engineering</i> , Mechanical Engineering dari Swinburne University of Technology Melbourne Australia (1999)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	<i>Executive Vice President</i> Divisi SOE BRI (2020 – 2021) - Pemimpin Cabang Khusus BRI (2021 – 2022) - Regional CEO BRI Jakarta 1 (2022 – 2023) - Direktur Utama PT Jamkrindo (2023 – 2025) - Direktur Micro BRI (2025 – sekarang)	<i>VP of Automotive Sector Development for Commercial Banking Client</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 – 2017) <i>VP of Financial Sector Department for Government and Institutional Banking Client</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 – 2020) - Komisaris PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) (2023) - Komisaris Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) (2024 – 2025) - SVP SME Banking Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2020 – 2025) - Direktur Commercial Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- Direktur Komersial dan UMKM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (2020 – 2025) - Direktur <i>Consumer Banking</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025)	- Direktur <i>Human Capital & Compliance</i> PT Bank Negara Indonesia (22 Agustus 2022 – 24 Maret 2024) - Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025)	<i>Information Technology Consultant</i>, PT Astra Graphia Information Technology (2000 – 2003) <i>Head of Competence</i> (HoC), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003 – 2006) <i>Head of Information Technology</i>, Senior Vice President (SVP), HSBC Indonesia (2006 – 2014) <i>Head of IT Division</i>, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2014 – 2018) <i>Group Head Chief Information Security Officer</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2018 – 2023) - Direktur Teknologi Informasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2023 – 2025) - Direktur <i>Information Technology</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)
Keahlian	Micro Banking, Wholesale Banking, Corporate Banking, Risk Management, Insurance	Corporate Banking, Commercial Banking, SME Banking, Transaction Banking, Multifinance, Risk Management	Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Banking, SME Banking, Management Subsidiaries, Consumer Banking, Risk Management	Risk Management, Compliance, Human Capital, Strategic Management, GRC	IT & Digital Banking, Cyber Security, Risk Management

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 17 – 31 Desember 2025

				
	Hery Gunardi	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Hakim Putratama	Riko Adyitha
Jabatan	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	Direktur <i>Operations</i>	Direktur <i>Corporate Banking</i>
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2021 – 2026 (Periode Pertama) 2025 – 2030 (Periode Kedua)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)
Usia	63 Tahun	47 Tahun	49 Tahun	52 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	- Sarjana Administrasi Niaga, Universitas 17 Agustus Jakarta (1987) - Master of <i>Business Administration</i>, Major in Finance and Accounting, University of Oregon USA (1991) - Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran Bandung (2021)	- Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2001) - Master of Business Administration, University of Rochester, USA (2010)	- Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1998) - Master International Business dari Aston University, Inggris (2001)	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1994) - Master of Business Administration dari Booth Business School, University of Chicago, USA (2008)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Direktur, PT AXA Mandiri Financial Services (2003–2006) - Senior Vice President, Group Head <i>Wealth Management</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – 2009) - Executive Vice President, Group Head <i>Distribution Network I</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009 – 2013) - Senior Executive Vice President, <i>Consumer Finance</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013) - Direktur <i>Micro & Business Banking</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015) - Direktur <i>Consumer Banking</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2016) - Direktur <i>Distributions</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 – 2018) - Direktur <i>Bisnis & Jaringan</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019) - Direktur <i>Consumer & Retail Transaction</i>, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 – 2020) - Wakil Direktur Utama, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020) - Ketua <i>Project Management Office</i>, Merger Bank Syariah Milik BUMN (2020 – 2021) - Direktur Utama, PT Bank Syariah Mandiri (2020) - Direktur Utama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2020 – 2025) - Direktur Utama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2025 – sekarang)	- AVP <i>Planning, Corporate Development & Strategy</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2016 – 2017) - AVP <i>Equity Management, Corporate Development & Strategy</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2017 – 2018) - VP <i>Subsidiary Management Desk</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018 – 2019) - EVP <i>Subsidiary Management Division</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2019) - Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 – 2025) - Direktur <i>Finance & Strategy</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025) - Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- Senior Vice President (SVP) <i>Head of Marketing & Segment Offering</i> PT Bank Commonwealth (2012 – 2015) - Senior Vice President (SVP) <i>Corporate Secretary Division</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (2015 - 2018) - Senior Vice President (SVP) <i>Consumer Funding Retail Division</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (2018 - 2022) - Head of <i>International and Transaction Banking</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (2022 – 2023) - Direktur <i>Institutional Banking</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2023 – 2024) - Direktur <i>Operations and Customer Experience</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2024 – 2025) - Direktur <i>Operations</i> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- Vice President – Structured Trade Finance, Citibank New York (September 2001 – Agustus 2003) - Director/Deputy Country CFO, Citi (Agustus 2003 – Oktober 2010) - Director/COO <i>Treasury & Trade Solutions</i>, Citi (Oktober 2010 – Oktober 2012) - Director/Country Head <i>Treasury & Trade Solutions</i>, Citi (Oktober 2012 – November 2013) - Managing Director/Country Head <i>Treasury & Trade Solutions</i>, Citi (November 2013 – Oktober 2015) - Managing Director/Country Head <i>Global Subsidiaries Group</i>, Citi (Oktober 2015 – Agustus 2018) - Managing Director <i>Global Banking</i>, HSBC Indonesia (Agustus 2018 – Desember 2022) - Direktur <i>Wholesale Banking</i>, HSBC Indonesia (Januari 2023 – Desember 2024) - Presiden Direktur (<i>Designate</i>), HSBC Indonesia (Januari – Maret 2025) - Direktur <i>Corporate Banking</i>, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)
Keahlian	Consumer Banking, Micro & Retail Banking, Project Management, Treasury, Insurance & Investment, Shariah Banking	Corporate Finance, Accounting Management, Risk Management	International Banking, Transaction Banking, Banking Operations, Consumer Banking, Risk Management	Wholesale Banking, Transaction Banking, International & FDI Connectivity, Transformation, Finance, Risk Management

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 17 – 31 Desember 2025

	 Aquarius Rudianto	 Farida Thamrin	 Akhmad Purwakajaya	 Alexander Diplo Paris Y. S.
Jabatan	Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	Direktur Mikro	Direktur <i>Commercial Banking</i>
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)
Usia	58 Tahun	53 Tahun	54 Tahun	43 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	Sarjana Sosial Politik Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (1990)	Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Depok (1996)	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998) - Magister Manajemen dari STIE Widya Wiwaha (2020)	- Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Indonesia (2004) - Master of Management dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2009) - Master of Business Administration dari University of Cambridge, London (2012)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Senior Vice President Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2010 - 2014) - Senior Vice President Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 - 2018) - Senior Executive Vice President (SEVP) Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2018 - 2019) - Komisaris Mandiri Axa General Insurance (2019 - 2020) - Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis dan Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 - 2020) - Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020) - Direktur Jaringan & Retail Funding PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2020 - 2025) - Direktur Network & Retail Funding PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)	- SVP Market Risk Group Head Bank Mandiri (2015 - 2016) - SVP Treasury Group Head Bank Mandiri (2016 - 2019) - Komisaris PT Mandiri Sekuritas (2019 - 2021) - SEVP Corporate Banking Solution Head Bank Mandiri (2019 - 2021) - Komisaris PT Bukit Pembangkit Inovatif (2021 - 2024) - Komisaris PT Bukit Multi Investasi (2022 - 2023) - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam (2021 - 2025) - Direktur Treasury and International Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)	- Executive Vice President Divisi SOE PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2020 - 2021) - Pemimpin Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 - 2022) - Regional CEO BRI Jakarta 1 (2022 - 2023) - Direktur Utama PT Jamkrindo (2023 - 2025) - Direktur Micro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)	- VP of Automotive Sector Development for Commercial Banking Client PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 - 2017) - VP of Financial Sector Department for Government and Institutional Banking Client PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 - 2020) - Komisaris PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) (2023) - Komisaris Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) (2024 - 2025) - SVP SME Banking Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2020 - 2025) - Direktur Commercial Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)
Keahlian	Risk Management, Operasional, Consumer Banking, Commercial Banking, Distribution & Retail Banking	Treasury, Finance, Risk Management, Corporate Banking, International Banking	Micro Banking, Wholesale Banking, Corporate Banking, Risk Management, Insurance	Corporate Banking, Commercial Banking, SME Banking, Transaction Banking, Multifinance, Risk Management

Tata Kelola

Profil Direksi^[GRI 2-9]

Periode 17 – 31 Desember 2025

					
	Saladin Dharma Nugraha Effendi	Mahdi Yusuf	Ety Yuniarti	Aris Hartanto	Achmad Royadi
Jabatan	Direktur Teknologi Informasi	Direktur Legal & Compliance	Direktur Manajemen Risiko	Direktur Consumer Banking	Direktur Finance & Strategy
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)
Usia	51 Tahun	60 Tahun	44 Tahun	50 Tahun	50 Tahun
Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	<i>Bachelor of Engineering</i> , Mechanical Engineering dari Swinburne University of Technology Melbourne Australia (1999)	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Saburai, Bandar Lampung (2005) - Magister Hukum dari Universitas Lampung, Bandar Lampung (2016)	- Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2003) - Master of Business Administration dari University of Melbourne (2012)	- Ekonomi - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya (1998) - Master of Business Administration dari Clark University, Massachusetts, Amerika Serikat (2010)	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung (1998) - Master of Business Administration dari Tulane University, New Orleans, Amerika Serikat (2007)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Information Technology Consultant, PT Astra Graphia Information Technology (2000 - 2003) - Head of Competence (HoC), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003 - 2006) - Head of Information Technology, Senior Vice President (SVP), HSBC Indonesia (2006 - 2014) - Head of IT Division, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2014 - 2018) - Group Head Chief Information Security Officer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2018 - 2023) - Direktur Teknologi Informasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2023 - 2025) - Direktur Information Technology PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)	- Kepala Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Juli 2019 - Januari 2020) - Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Maret 2020 - Februari 2024) - Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Februari 2024 - Juli 2024) - Pjs Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Juli 2024 - Januari 2025) - Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Januari 2025 - Desember 2025) - Direktur Legal & Compliance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)	- Assistant Vice President - Head of Investor Communications Department BRI (Maret 2015 - Juli 2018) - Assistant Vice President - Head of Strategic Investments Department BRI (Juli 2018 - Oktober 2019) - Assistant Vice President, Deputy Head of Asset Liability Management & MIS Group BRI (November 2019 - November 2020) - Senior Vice President - Head of Credit Risk & Policy Group BRI (Desember 2020 - Desember 2021) - Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Group BRI (Januari 2022 - Mei 2025) - Komisaris Utama, BRI Ventura Investama (April 2022 - Juni 2025) - Senior Executive Vice President, Head of Retail Risk Sub Directorate BRI (Juni 2025 - Desember 2025) - Direktur Manajemen Risiko BRI (2025 - sekarang)	- Business Manager - BRI New York Agency (Mei 2014 - Juli 2018) - General Manager - Branch BRI Singapore (Juli 2018 - November 2020) - Division Head - Distribution Network Division (November 2020 - November 2022) - Regional CEO of Regional Office, BRI Medan (November 2022 - Februari 2024) - Direktur Utama PT Asuransi BRI Life (Februari 2024 - Desember 2025) - Director of Consumer Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)	- Group Head Global Market (Maret 2014 - April 2016) - Group Head Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (April 2016 - Mei 2017) - Vice President - Divisi Corporate Development & Strategy (Juni 2017 - Mei 2018) - Executive Vice President Investor Relations BRI (2018 - 2021) - Senior Executive Vice President Treasury & Global Services BRI (2021 - 2025) - Komisaris Utama PT BRI Danareksa Sekuritas (2022 - 2025) - Direktur Finance & Strategy PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)
Keahlian	IT & Digital Banking, Cyber Security, Risk Management	Legal, Compliance, Risk Management	Risk Management, Corporate Finance, Information System Audit	Risk Management, Consumer Banking, International Business, Network Management, Insurance Business	Finance & Strategy, Treasury & International Business, Pension Fund, Risk Management

Tata Kelola

Profil Dewan Komisaris^[GRI 2-9]

Periode 1 Januari – 24 Maret 2025



	Kartika Wirjoatmodjo	Rofikoh Rokhim*	Rabin Indrajad Hattari*	Dwi Ria Latifa*
Jabatan	Komisaris Utama	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris	Komisaris Independen
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2020 – 2025 (Periode Pertama) 2025 – 2030 (Periode Kedua)	2020 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2020 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2020 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025
Usia	52 Tahun	54 Tahun	50 Tahun	57 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pendidikan	- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok (1996) - Master of Business Administration, Erasmus University, Rotterdam, Belanda (2001)	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1993) - Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994) - Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) Paris (2000) - D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (2002) - Ph.D. bidang Economics (Applied Macro and Micro Economics Development Studies in Finance) dari Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris (2005)	- Sarjana Ekonomi & Matematika, University of Georgia, USA (1996) - Magister Manajemen, Universitas Indonesia, Depok (2001) - Ph.D. in Economics, George Mason University, USA (2008)	- Sarjana Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta (1990) - Alumni Lemhanas-40 (2007) - Magister of Science, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2012)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Presiden Direktur dan CEO di Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (2011 – 2013) - Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2014 – 2015) - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016 – 2019) - Ketua Umum PERBANAS (2016 – 2024) - Anggota APEC Business Advisory Council (ABAC) – Indonesia Member (2017 – sekarang) - Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (2019 – 2025) - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2020 – sekarang) - Wakil Ketua Umum Bidang BUMN – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2021 – sekarang)	- Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2006 – sekarang) - Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021 – 2025) - Komite Penilai Perusahaan dan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (2023 - sekarang) - Komisaris Independen PT Telkom (Persero) Tbk (2025 - Sekarang)	- Staf Ahli Perencanaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI (2020 - sekarang) - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2025) - Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN (2021 – 2023) - Anggota Komite Remunerasi dan SDM, Indonesia Investment Agency (INA) (2021 - sekarang) - Sekretaris Kementerian BUMN (2023 - sekarang)	- Pendiri dan Pimpinan Kantor Rialatifa & Partners (1992 – sekarang) - Pendiri dan Anggota Dewan Pakar Serikat Pengacara Indonesia (1997 - sekarang) - Anggota DPR RI (2000 - 2004) - Ketua DPP bidang Perempuan dan Perlindungan Anak PERADI (2009 - 2014) - Anggota DPR RI (2014 - 2019) - Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Cairo (2016 – 2020) - Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2025) - Komisaris Utama PT Bersua Utama Indonesia (2022 – sekarang)
Keahlian	Perbankan, Keuangan, Manajemen Risiko	Keuangan, Ekonomi, Manajemen	Statistik, Ekonomi, Manajemen	Hukum, Sosial Politik, Regulasi

Tata Kelola

Profil Dewan Komisaris^[GRI 2-9]

Periode 1 Januari – 24 Maret 2025

				
	Heri Sunaryadi*	Nurmaria Sarosa*	Agus Riswanto*	Paripurna Poerwoko Sugarda*
Jabatan	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Komisaris
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2021 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2021 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2021 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025	2020 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025
Usia	60 Tahun	60 Tahun	63 Tahun	68 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	- Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1987) - Master of Business Administration BINUS Business School, Jakarta (2011)	Sarjana Arsitektur, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1989)	- Sarjana Hukum, Kristen Satya Wacana University, Salatiga (1986) - Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta (2001)	- Doktorandus Manajemen, Universitas Islam Indonesia, Jakarta (1984) - Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1986) - Magister Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1999) - Master of Laws dari University of Groningen, Netherlands (2008) - Doktor Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2012)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Direktur utama Bahana sekuritas (2007-2009) - Direktur utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009 - 2013) - Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2013 – 2014) - Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2014 – 2016) - Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2016 – 2021) - Dewan Komisaris PT Merdeka Cooper Gold Tbk. (2018 – 2021) - Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2021 - 2025) - Komisaris Independen Tower Bersama Group (2022 – sekarang)	- Director of Finance and Corporate Affairs, PT Cardig International Support (2017 - 2020) - Director of Finance and Corporate Affairs, PT Cardig Express Nusantara (2020 - 2021) - Direktur Eksekutif PT Selaras Logistik Indonesia (2021 - 2022) - Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2022 - 2025)	- Kepala Kejaksaan Tinggi, Bangka Belitung (2014 - 2015) - Direktur Sandi dan Produksi Intel, Kejaksaan Agung RI (2015 - 2018) - Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung RI (2018 - 2022) - Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2022 - 2025)	- Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (1988 - sekarang) - Dekan Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (2012 - 2014) - Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, Universitas Gajah Mada (2014 - 2022) - Head of Asia Pacific Research Center, Universitas Gajah Mada (2020 - 2022) - Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2022 - 2025) - Komisaris Utama PT Kaltim Methanol Industri (2022 – sekarang)
Keahlian	Pasar Modal, Teknologi, Manajemen	ESG, Logistik, Manajemen	Hukum, Intelijen, Regulasi	Hukum, Sosial Politik, Regulasi

Tata Kelola

Profil Dewan Komisaris^[GRI 2-9]

Periode 1 Januari – 24 Maret 2025

		
	Awan Nurmawan Nuh	Haryo Baskoro Wicaksono*
Jabatan	Komisaris	Komisaris Independen
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2023 – 2028 (Periode Pertama)	2021 – 2025 (Periode Pertama) * Berhenti menjabat sejak 24 Maret 2025
Usia	57 Tahun	43 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	• Sarjana Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992) • Master of Business Taxation, University of Southern California, USA (1997)	• Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2001) • Magister Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2009)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	• Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak (2016 – 2021) • Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2020 – 2023) • Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan (2021 – sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (2023 – sekarang) • Anggota Dewan Pengawas, Ikatan Akuntan Indonesia (2022 – sekarang) • Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2023 – sekarang)	• <i>Head of Risk Management</i>, FIF Group (2011 – 2018) • <i>Head of Risk Management, Head of Internal Audit, Head of Governance & Compliance</i>, Astra Financial Conglomeration (2018 – 2022) • <i>Head of Transformation & Subsidiaries</i>, Bank Muamalat Indonesia (2023) • <i>Head of Transformation & Corporate Strategy</i>, Bank Bukopin Syariah (2023) • Komisaris PT Transportasi Gas Indonesia (2023–2024) • Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024 – 2025)
Keahlian	Akuntansi, Audit, Perpajakan	GRC, Manajemen

Tata Kelola

Profil Dewan Komisaris^[GRI 2-9]

Periode 24 Maret – 31 Desember 2025

	 Kartika Wirjoatmodjo	 Parman Nataatmadja	 Helvi Yuni Moraza	 Awan Nurmawan Nuh
Jabatan	Komisaris Utama	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris	Komisaris
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2020 – 2025 (Periode Pertama) 2025 – 2030 (Periode Kedua)	2025 – 2030 (Periode Pertama)	2025 – 2030 (Periode Pertama)	2023 – 2028 (Periode Pertama)
Usia	52 Tahun	68 Tahun	58 Tahun	57 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok (1996) - Master of Business Administration, Erasmus University, Rotterdam, Belanda (2001)	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok (1985) - Master of Finance dari State University of New York, Buffalo, Amerika Serikat (1988)	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas, Padang (1991) - Magister Manajemen dari Universitas Pasundan, Bandung (2023)	- Sarjana Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992) - Master of Business Taxation, University of Southern California, USA (1997)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	- Presiden Direktur dan CEO di Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (2011 – 2013) - Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2014 – 2015) - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016 – 2019) - Ketua Umum PERBANAS (2016 – 2024) - Anggota APEC Business Advisory Council (ABAC) – Indonesia Member (2017 – sekarang) - Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (2019 – 2025) - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2020 – sekarang) - Wakil Ketua Umum Bidang BUMN – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2021 – sekarang)	- Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2008 – 2018) - Komisaris Utama PT PNM Venture Capital (2008 – 2018) - Komisaris Utama, PNM Investment Management (2008 – 2018) - Komisaris, PNM Investment Management (2018) - Komisaris Utama Mitra Dagang Madani (2017 – 2018) - Staf Khusus V Menteri BUMN (2018 – 2019) - Komisaris Utama PT Bank BRI Syariah Tbk. (2019 – 2020) - Komisaris Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk. (2018 – 2019) - Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN (2020 – 2021) - Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (2020 – 2025) - Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah (2021 – 2025) - Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- Manager Marketing PT Trias Munarta (1992 – 1995) - Kepala Bagian Kredit Cabang Pembantu PT Bank Susila Bhakti, Bandung Setiabudi (1995 – 1999) - Direktur Majalah Seni Kreatif BKKI (1999 – 2002) - Redaktur Majalah Tani Merdeka DPN HKTI (2010 – 2014) - Senior Associate FAS Law Firm (2014 – 2025) - Komisaris Independen PT LEN Industri (Persero) Holding Industri (2021 – 2025) - Wakil Menteri Kementerian UMKM RI (2024 – sekarang) - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak (2016 – 2021) - Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2020 – 2023) - Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan (2021 – sekarang) - Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (2023 – sekarang) - Anggota Dewan Pengawas, Ikatan Akuntan Indonesia (2022 – sekarang) - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2023 – sekarang)
Keahlian	Perbankan, Keuangan, Manajemen Risiko	Perbankan, Keuangan, Manajemen Risiko	Manajemen, Manajemen Risiko, Ekonomi	Akuntansi, Audit, Perpajakan

Tata Kelola

Profil Dewan Komisaris^[GRI 2-9]

Periode 24 Maret – 31 Desember 2025

		
	Edi Susianto	Lukmanul Khakim
Jabatan	Komisaris Independen	Komisaris Independen
Periode Jabatan Selama Tahun 2025	2025 – 2030 (Periode Pertama)	2025 - 2030 (Periode Pertama)
Usia	58 Tahun	43 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Pendidikan	• Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan dari Universitas Padjajaran, Bandung (1990) • Master of Economics and Finance dari Loughborough University, Inggris (1999)	• Sarjana Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (2006) • Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta (2014)
Pengalaman Kerja ^[GRI 2-9]	• Kepala Grup Neraca Pembayaran dan Pengembangan Statistik – Bank Indonesia (2016 – 2017) • Direktur-Bank Indonesia Perwakilan Singapura (2017 – 2018) • Direktur Eksekutif Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (2018 – 2021) • Direktur Eksekutif Kepala Departemen Manajemen Risiko-Bank Indonesia (2021 – 2022) • Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas-Bank Indonesia (2022 – 2023) • Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (2023 – 2025) • Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 – sekarang)	• Staf Khusus Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Oktober 2014 - Oktober 2016) • Anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan, Perindustrian, BUMN dan Koperasi UMKM Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Maret 2018 - September 2019) • Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Peningkatan Export dan Perluasan Pasar Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Maret 2020 – Juni 2022) • Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (November 2024 – 2025) • Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2025 - sekarang)
Keahlian	Keuangan, Ekonomi, Manajemen Risiko, Akuntansi	Hukum, Administrasi Bisnis, Manajemen Risiko, GRC

Tata Kelola

Efektivitas dan Akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi ^[GRI 2-16]

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat

BRI memandang efektivitas tata kelola perusahaan sebagai aspek penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Untuk itu, perusahaan berkomitmen menerapkan GCG secara optimal melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi berfungsi sebagai instrumen utama untuk menilai sejauh mana penerapan tata kelola ini berjalan efektif. Setiap kebijakan strategis akan dibahas dan diputuskan dalam rapat ini untuk memastikan kelangsungan bisnis serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. ^[GRI 2-16]

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Rapat Dewan Komisaris (Rakom) yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Bidang dan/atau *Senior Executive Vice President* (SEVP) terkait;
2. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan SEVP.

Rapat Dewan Komisaris diadakan secara rutin, minimal satu kali setiap bulan, sementara rapat bersama Direksi diadakan setidaknya sekali setiap empat bulan. Rapat juga dapat diselenggarakan kapan saja atas permintaan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran rapat, rata-rata kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2025 mencapai 98,50%.

Rapat Direksi

Kebijakan mengenai rapat Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi. Direksi diwajibkan untuk mengadakan rapat secara berkala, minimal satu kali setiap bulan, untuk membahas dan mengambil keputusan terkait pengelolaan dan operasional Perusahaan. Selain itu, rapat bersama Dewan Komisaris juga diadakan secara rutin, sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan hadir, Wakil Direktur Utama akan memimpin rapat. Pada rapat tersebut, topik material terkait keberlanjutan seperti privasi data, keuangan inklusif, etika bisnis dan iklim dibahas secara komprehensif. Informasi lebih lengkap mengenai kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi disajikan pada Laporan Tahunan BRI 2025.

Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari dua per tiga (2/3) dari jumlah total anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BRI. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran, rata-rata kehadiran Berdasarkan rekapitulasi kehadiran rapat, rata-rata kehadiran Direksi dalam rapat Direksi mencapai 96,74%.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan Dewan Komisaris telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Remunerasi Variabel/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada bidang tugas fungsional pada Lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
 - a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 4 wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
6. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Tata Kelola

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris BRI telah mematuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dan tidak terdapat rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dimaksud. Seluruh Dewan Komisaris BRI memiliki kurang dari empat mandat. ^[GRI 2-15]

Independensi Dewan

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi^[GRI 2-15]

BRI memastikan setiap anggota Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan perusahaan dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Untuk itu, BRI memiliki kebijakan terkait kriteria Komisaris Independen, yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut.

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pemilihan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan dalam periode berikutnya.
2. Tidak memiliki saham secara langsung atau tidak langsung di Perusahaan.
3. Tidak memiliki afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham signifikan Perusahaan.
4. Tidak memiliki hubungan bisnis, langsung atau tidak langsung yang terkait dengan kegiatan bisnis Perusahaan.

Pihak-pihak terafiliasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut.

1. Komisaris, Direksi, pejabat, dan pekerja Bank.
2. Pihak yang memberikan jasa kepada Bank, di antaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
3. Pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau pekerja Bank.

Adapun kriteria Komisaris Independen mengacu pada hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Badan Usaha Milik Negara yang Signifikan;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Perusahaan Publik; POJK 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; serta peraturan dan standar nasional atau internasional yang berlaku.

Pengungkapan lengkap terkait independensi termasuk konflik kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan BRI 2025. BRI juga mengatur kepemilikan saham BRI oleh Direksi dan Dewan Komisaris (non-independen) sebagai bagian dari komponen remunerasi, sejalan peraturan dari Kementerian Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (dahulu Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia), dengan tujuan mencapai kinerja yang berkelanjutan. Hingga tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat kepemilikan saham yang bersifat signifikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham di dalam Kelompok Usaha Bank BRI, data tersebut sebagaimana telah disampaikan pada bagian Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan atas Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

BRI memiliki kebijakan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, kepemimpinan perempuan di Direksi mencakup 23,08% dari 13 anggota Direksi. ^[GRI 2-10]

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI membawa berbagai pengalaman, pendidikan, dan keahlian yang memperkaya proses pengambilan keputusan perusahaan. Keberagaman keahlian Dewan Komisaris dan Direksi telah diinformasikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dan Direksi sesuai periode jabatan di dalam laporan ini.

BRI juga secara aktif mengembangkan kompetensi dan keterampilan anggota dewan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. ^[GRI 2-10]

Tata Kelola

Struktur Dewan Komite

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite	Tanggung Jawab	Ketua Komite
Komite Audit	Mengevaluasi dan memastikan penerapan pengendalian internal, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan, pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), tata kelola terintegrasi, kepatuhan terhadap regulasi di Perusahaan, serta efektivitas auditor independen. Selain itu, Komite Audit memastikan fungsi <i>Whistleblowing System</i> (WBS) sebagai sarana pengaduan yang transparan, pengawasan pada implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melakukan penilaian atas tingkat kesehatan Perseroan untuk memastikan operasional berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.	Komisaris Independen – Edi Susianto
Komite Nominasi dan Remunerasi	Mengevaluasi dan memastikan penerapan terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	Komisaris Independen – Edi Susianto
Komite Pemantau Manajemen Risiko	Mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perusahaan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perusahaan tetap dapat terkendali pada batas/limit risiko yang dapat diterima serta menguntungkan Perusahaan.	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen – Parman Nataatmadja
Komite Tata Kelola Terintegrasi	Mengevaluasi dan memastikan tata kelola yang komprehensif dan efektif dengan menerapkan prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>) atau profesional (<i>professional</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.	Komisaris Independen – Lukmanul Khakim

Komite di Bawah Direksi

Komite	Tanggung Jawab	Ketua Komite
Asset and Liability Committee (ALCO)	- Menetapkan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank dalam rangka upaya optimalisasi NII, antara lain meliputi: - strategi pengelolaan likuiditas; - strategi pengelolaan risiko pasar (suku bunga dan nilai tukar); - strategi pengelolaan liabilitas berbiaya/funding dan beban bunga (CoF Management); dan - strategi pengelolaan aset produktif dan pendapatan bunga (<i>Yield Management</i>). - Menetapkan strategi suku bunga untuk produk Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Trade Finance (TF), antara lain meliputi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Suku Bunga Counter dan Suku Bunga Khusus (<i>Special Rate</i>). - Mengevaluasi strategi sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas dan risiko pasar.	Direktur Utama

Tata Kelola

Komite	Tanggung Jawab	Ketua Komite
<i>Credit Policy Committee</i>	- Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) OJK dan kebijakan perkreditan lainnya yang memerlukan putusan dari Rapat <i>Credit Policy Committee</i>. - Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara bertanggung jawab dan penuh kesinambungan serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala. - Melakukan reviu berkala Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRI minimal 3 tahun sekali dan kebijakan perkreditan lainnya sesuai dengan jangka waktu minimal review kebijakan perkreditan lainnya. - Melakukan evaluasi terhadap: - kebenaran pelaksanaan proses pemberian kredit atau penyediaan dana, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu; - kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan kredit atau penyediaan dana; - kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); - debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar Kredit Dalam Perhatian Khusus; - kebijakan penyisihan cadangan kerugian pelaksanaan penurunan nilai kredit (CKPN) dan cadangan penghapusbukuan; - penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan - ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit. - Melakukan penilaian efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) perkreditan. - Menyampaikan laporan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Komisaris mengenai: - hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan (dapat mencakup KPB maupun kebijakan perkreditan lainnya); dan - hasil evaluasi hal yang berhubungan dengan poin 4. - Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.	Direktur Utama
<i>Environmental, Social & Governance Committee</i>	- Menyetujui dan memberikan arahan atas hasil review dan evaluasi terkait implementasi kebijakan atau tata kelola (<i>governance</i>) parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL yang telah disusun oleh Unit Kerja terkait yang kemudian diusulkan oleh Tim Penunjang Komite. - Menetapkan program kerja yang termasuk program strategis yang mendukung roadmap implementasi ESG, komitmen <i>net zero emission</i>, serta langkah-langkah dekarbonisasi Perusahaan dan inisiatif TJSL berdasarkan rekomendasi Tim Penunjang Komite. - Menyetujui dan memberikan arahan atas hasil review dan evaluasi terkait implementasi program kerja yang masuk ke dalam parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL serta pelaporan data dan informasi terkait ESG, termasuk pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim serta pelaksanaan inisiatif pembiayaan berkelanjutan. - Menyetujui dan memberikan arahan atas hasil review terkait laporan ESG Rating, Investor concerns atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI. - Menetapkan isu material dari hasil laporan ESG Rating, Investor concerns atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI. - Menyetujui rencana tindak lanjut atas hasil review dan evaluasi untuk kemudian dapat diusulkan menjadi program kerja baru yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait. - Menyetujui dan memberikan arahan isu terkait ESG dan TJSL, termasuk peraturan perundang-undangan, inisiatif global, praktik bisnis, serta informasi penting lain terkait ESG dan TJSL termasuk perkembangan agenda dan respons terhadap perubahan iklim yang dapat berdampak pada strategi keberlanjutan Perusahaan.	Direktur Utama

Tata Kelola

Komite	Tanggung Jawab	Ketua Komite
<i>Human Capital Committee</i>	<i>Human Capital Committee</i> memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bidang <i>Human Capital Policy</i> a. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas human capital BRI dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan <i>Corporate Plan</i> BRI. b. Menetapkan kebijakan strategis di bidang <i>human capital</i>. 2. Bidang <i>Talent</i> a. Penetapan <i>Talent Cluster</i>, termasuk identifikasi dan penetapan top talent (<i>Brilian Society Member</i>). b. Penetapan <i>Succession Plan</i> untuk seluruh jabatan. c. Penetapan <i>Talent Pool</i> berdasarkan bidang keahlian Pekerja. d. Menetapkan putusan atas <i>Talent Review/Talent Panel</i>. 3. Bidang <i>Performance Management</i> a. Menetapkan KPI Direktorat, Sub-Direktorat, Unit Kerja BOD-1 (termasuk Regional Office), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit. b. Mengevaluasi dan menetapkan predikat kinerja Unit Kerja BOD-1 dan Kantor Cabang. c. Mengevaluasi dan menetapkan predikat kinerja individu Jabatan BOD-1, <i>Corporate Band 2</i>, <i>Corporate Band 3</i>, dan Pemimpin Cabang. 4. Bidang <i>Job Evaluation</i> Menetapkan Golongan Jabatan.	Bidang <i>Human Capital Policy</i>: Direktur Utama Bidang <i>Talent</i> Bidang <i>Talent 1</i>: Direktur Utama Bidang <i>Talent 2</i>: Direktur Human Capital & Compliance Bidang <i>Talent 3</i>: Group Head, Human Capital Business Partner 1 atau Group Head, Human Capital Business Partner 2 Bidang <i>Performance Management</i> Sub Bidang <i>Planning 1</i>: Direktur Utama Sub Bidang <i>Planning 2</i>: Direktur Finance & Strategy Sub Bidang Evaluation 1: Direktur Utama Sub Bidang Evaluation 2: Regiol CEO Sub Bidang Predikat Kinerja Individu 1: Direktur Utama Sub Bidang Predikat Kinerja Individu 2: Direktur Bidang (Khusus Jajaran Audit Internal oleh SEVP Satuan Kerja Audit Internal) Sub Bidang Predikat Kinerja Individu 3: Regional CEO Bidang <i>Job Evaluation</i>: Direktur Finance & Strategy
<i>Information Technology Steering Committee</i>	1. Rencana Strategik Teknologi Informasi jangka panjang yang sejalan dengan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan di dalam ITSP BRI. 2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama. 3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan ITSP BRI. 4. Kesesuaian arsitektur teknologi saat ini (baseline) dengan target arsitektur Teknologi Informasi BRI dalam mendukung kapabilitas bisnis. 5. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati. 6. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank. 7. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank. 8. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi. 9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, termasuk issue terkait data governance, dimana permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu. 10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.	Direktur <i>Information Technology</i>
<i>Procurement Committee</i>	1. Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur dan menghindari benturan kepentingan dalam pemberian persetujuan pengadaan. 2. Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya dalam hal diselenggarakan melalui rapat Komite. 3. Memberikan putusan pengadaan, melalui: a. Risalah Rapat Direksi, atau b. Risalah Rapat <i>Procurement Committee</i>, atau c. Nota Dinas Sirkuler.	<i>Procurement Committee 1</i>: Direktur Utama <i>Procurement Committee 2</i>: Wakil Direktur Utama <i>Procurement Committee 3</i>: Direktur Treasury & International Banking <i>Procurement Committee 4</i>: Direktur Treasury & International Banking

Tata Kelola

Komite	Tanggung Jawab	Ketua Komite
<i>Product Committee</i>	- Perencanaan produk yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: - tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; - merupakan pengembangan dari produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya. - Penghentian produk (sesuai Surat Keputusan Daftar Taksonomi Produk BRI). - Kajian permasalahan produk yang tidak dapat diputus pada tingkat Direktur Bidang.	<i>Product Committee</i> 1 segmen <i>wholesale</i> : Direktur Utama <i>Product Committee</i> 1 segmen <i>non-wholesale</i> : Direktur Utama <i>Product Committee</i> 2 segmen <i>wholesale</i> : Direktur Finance & Strategy <i>Product Committee</i> 2 segmen <i>non-wholesale</i> : Direktur Finance & Strategy
<i>Risk Management Committee</i>	<i>Risk Management Committee</i> Bidang <i>Risk Management</i> memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: - menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko yang juga mempertimbangkan risiko terkait perubahan iklim, dan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi; - menetapkan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya; - menetapkan limit risiko dan perubahannya; - menetapkan Peringkat Profil Risiko termasuk integrasi aspek ESG sebagai bagian dari pengelolaan risiko reputasi dan Tingkat Kesehatan Bank serta tindak lanjut apabila diperlukan. - menetapkan langkah perbaikan berdasarkan analisis permodalan dan stress testing BRI Individu serta hasil <i>Climate Scenario Analysis</i> yang memuat dampak perubahan iklim terhadap risiko inheren perbankan; - menyampaikan Strategi <i>Anti Fraud</i>; dan - menyampaikan analisis realisasi <i>Trigger Level</i> Rencana Aksi pemulihan. <i>Risk Management Committee</i> Bidang <i>Digital Risk</i> memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan arahan, rekomendasi, tindak lanjut dan putusan terkait penerapan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko digital PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. <i>Risk Management Committee</i> Bidang <i>Credit Risk</i> memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan arahan, rekomendasi, tindak lanjut dan putusan terkait penerapan kebijakan dan pengelolaan portfolio per segmen aset produktif PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<i>Risk Management Committee</i> Bidang <i>Risk Management</i>: Direktur Utama <i>Risk Management Committee</i> Bidang <i>Digital Risk</i>: Direktur Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i> Bidang <i>Credit Risk</i>: Direktur Manajemen Risiko
<i>Organisasi Transformation Steering Committee (TSC)</i>	- Memberikan arahan di tingkat korporat terhadap inisiatif strategis/proyek Perusahaan. - Memberikan arahan terhadap strategi implementasi inisiatif strategis/proyek untuk memastikan keselarasan dengan pencapaian tujuan strategis Perusahaan. - Memberikan arahan terhadap implementasi inisiatif strategis/proyek secara berkala, serta melakukan <i>review</i> terkait relevansi inisiatif strategis/proyek dengan perkembangan kondisi terkini. - Mengawasi pelaksanaan tata kelola yang baik dalam implementasi inisiatif strategis/proyek. - Memberikan putusan atas usulan penyelesaian masalah dalam pengelolaan inisiatif strategis/proyek. - Mengambil keputusan terhadap usulan perubahan atas ruang lingkup, parameter keberhasilan, <i>timeline</i>, dan hal lainnya yang tercantum dalam project charter dan selanjutnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. - Menetapkan prioritas inisiatif strategis/proyek untuk dilaksanakan oleh PMO dan/ atau Unit Kerja Pemilik Proyek. - Menyetujui kebijakan terkait manajemen perubahan (<i>change management</i>) untuk memastikan inisiatif strategis/proyek diterima oleh seluruh level organisasi. - Memberikan keputusan-keputusan lainnya terkait dengan inisiatif strategis/proyek. - Menyelesaikan konflik atau isu lintas fungsi yang muncul selama implementasi inisiatif strategis/proyek. - Melakukan <i>alignment</i> dengan program kerja lainnya yang dikelola oleh Unit Kerja terkait, termasuk memberikan arahan untuk meminimalkan silo antar-segmen atau Unit Kerja. - Memberikan arahan terhadap hasil <i>Post Implementation Review</i> (PIR) yang sudah dilaksanakan sebagai bagian dari lessons learned dalam pelaksanaan inisiatif strategis/proyek selanjutnya. - Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan <i>Project Management</i> (PPPM) atau kebijakan dan ketentuan lainnya yang mengatur terkait dengan inisiatif strategis/proyek.	Direktur Utama

Tata Kelola

Komite	Tanggung Jawab	Ketua Komite
Komite Tata Kelola Konglomerasi Keuangan	<i>Alignment</i> pelaksanaan Performance, Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko, IT, <i>Human Capital</i>, dan Audit Intern Terintegrasi: - menetapkan program strategis Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; - menetapkan Rencana Korporasi Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. - Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan: - melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan rencana, kebijakan dan program kerja strategis anggota Konglomerasi Keuangan; - melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Performance, Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Information Technology, Human Capital, dan Audit Intern Terintegrasi). - Pengawasan atas penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan: - melakukan evaluasi dan monitoring penguatan, penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan; - melakukan evaluasi dan monitoring tindakan perbaikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan tepat dan mendukung rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan. - Pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian pada Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan: - menetapkan dan memberikan arahan tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau teguran Regulator terkait pelaksanaan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan; - melakukan evaluasi pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian pada Konglomerasi Keuangan. - Pengawasan pemenuhan sumber daya pada setiap Anggota Konglomerasi Keuangan antara lain melalui pemberian arahan dan evaluasi atas <i>support</i> sumber daya kepada Anggota Konglomerasi Keuangan	Direktur Pengelola Konglomerasi Keuangan
Komite Kredit	Mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.	Masing-masing komite kredit terdiri dari jajaran fungsi risiko dan fungsi bisnis. Struktur dan anggota komite kredit sesuai delegasi kewenangan kredit yang berlaku.

Tata Kelola

Pengawasan Audit

Pengalaman dan Independensi Komite Audit

BRI berkomitmen untuk memperkuat tata kelola perusahaan melalui struktur yang transparan dan independen, termasuk dalam pengelolaan Komite Audit. Komite Audit di BRI memiliki independensi yang kuat, dengan 100% anggota komite audit yang independen. Selain itu, anggota komite juga memiliki keahlian dan pengalaman di industri keuangan dan perbankan. Untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian anggota Komite Audit, BRI menyelenggarakan sejumlah pelatihan agar tugas pengawasan terhadap laporan keuangan dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dapat dijalankan optimal, mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Informasi lengkap mengenai keanggotaan Komite Audit, termasuk jabatan serta keberagaman pengalaman dan keahlian terdapat pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan BRI 2025.

Pengawasan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi^{[GRI 2-18][GRI 2-19][GRI 2-20][GRI 2-21]}

BRI memiliki Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2015 dan SE OJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
2. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
3. POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum; serta
4. Peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Dalam implementasinya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung pelaksanaan tugas remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Prosedur Remunerasi^[GRI 2-20]

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi BRI mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta praktik bisnis yang mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kinerja Bank. Kebijakan ini mencakup komponen remunerasi tetap dan remunerasi variabel.

Dalam menetapkan besaran remunerasi, BRI mempertimbangkan antara lain kinerja individu dan kinerja Bank secara keseluruhan, tingkat tanggung jawab masing-masing jabatan, serta kesesuaian dengan praktik industri perbankan yang berlaku secara umum. Kebijakan remunerasi ini sejalan dengan prinsip GCG, di mana struktur dan besaran remunerasi ditetapkan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di BRI mengatur pemberian remunerasi dalam bentuk remunerasi yang bersifat tetap dan variabel.

Remunerasi Tetap

Pada remunerasi tetap, komponennya mencakup antara lain gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas maupun elemen lain yang bersifat tetap yang diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Proporsi besaran remunerasi tetap bersifat proporsional terhadap besaran Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 90% dan anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama. Sementara proporsi besaran Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Komisaris Utama. ^[GRI 2-21]

Remunerasi Variabel

Sedangkan dalam memberikan remunerasi yang bersifat variabel, perusahaan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang mempertimbangkan capaian kinerja berbasis *Key Performance Indicators* (KPI), kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, keberlanjutan kinerja jangka panjang Bank sebagai bagian pengelolaan kinerja yang dikaitkan dengan risiko. Komponen remunerasi variabel mencakup antara lain bonus, remunerasi variabel/insentif kinerja yang dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun saham. Remunerasi variabel dapat diberikan berdasarkan pencapaian kinerja, sebagai berikut.

■ Insentif Jangka Pendek (*Short Time Incentive/STI*)

Insentif jangka pendek yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengesahan laporan tahunan. STI diberikan sebagai bentuk dorongan dalam upaya pencapaian kinerja tahunan yang optimal. Besaran STI diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian hasil kinerja tahunan sesuai dengan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) kolektif dan tujuan jangka pendek perusahaan.

■ Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentives/LTI*)

Long Term Incentives (LTI) merupakan insentif jangka panjang yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai putusan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan. Pemberian LTI bertujuan untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainability*) serta pengelolaan risiko yang berkesinambungan. Besaran LTI diberikan dengan memperhitungkan capaian KPI tambahan yang bersifat target jangka panjang dan diperjanjikan selama jangka waktu tertentu atas persetujuan RUPS/Seri A. Remunerasi tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pencapaian visi, misi dan strategi jangka panjang perusahaan. Pemberian LTI diatur dengan tata kelola khusus yang di antaranya mengatur periode kinerja (*vesting period*) dan periode penangguhan (*holding period*) tertentu yang selanjutnya diberikan sesuai dengan hasil pencapaian kinerja jangka panjang.

Tata Kelola

Remunerasi variabel diberikan dalam bentuk saham bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen, serta dalam bentuk tunai untuk Komisaris Independen. Dalam hal terjadinya kondisi khusus tertentu, perusahaan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang telah ditetapkan menjadi *Material Risk Takers* (MRT). Penyesuaian pembayaran Remunerasi Variabel yang ditangguhkan (*malus*) dilakukan apabila terjadi kondisi berupa:

1. terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang dan/atau melakukan tindak pidana oleh Penerima Remunerasi Variabel yang ditangguhkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan;
2. *restatement*/penyajian kembali laporan keuangan Perusahaan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi Variabel;
3. peringkat risiko pada triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan Remunerasi Variabel yang ditangguhkan adalah peringkat 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk;
4. komitmen laba dan dividen sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/*Corporate Plan* periode yang terkait tidak tercapai;
5. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan; dan
6. pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.

Dalam hal penarikan kembali Remunerasi Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) dilakukan apabila terjadi kondisi berupa:

1. terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang dan/atau melakukan tindak pidana oleh penerima Remunerasi Variabel yang ditangguhkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan;
2. *restatement*/penyajian kembali laporan keuangan Perusahaan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi Variabel;
3. peringkat risiko pada triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan Remunerasi Variabel yang ditangguhkan adalah peringkat 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk;
4. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan; dan
5. pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.

Melalui struktur remunerasi yang terstruktur, BRI berkomitmen untuk memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif yang tidak hanya menghargai pencapaian kinerja jangka pendek tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Kebijakan ini juga mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan sistem pengawasan yang transparan, memastikan bahwa semua pihak memenuhi syarat/*eligibility* dan mengikuti aturan yang ditetapkan secara jelas serta konsisten. Informasi lengkap terkait manajemen kerja dan sistem kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan BRI 2025.



Tata Kelola

Praktik Remunerasi

Sesuai keputusan RUPS Tahunan 2025, besar remunerasi ditetapkan untuk Dewan Komisaris dan Direksi ialah sebagai berikut.

Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris

No.	Nama	Honorarium	Tunjangan Transport	THRK	Pengobatan	Tantiem Setelah Pajak	Premi Asuransi Purna Jabatan
1	Kartika Wirjoatmodjo	√	√	√	√	-	√
2	Parman Nataatmadja*	√	√	-	√	-	√
3	Awan Nurmawan Nuh	√	√	√	√	-	√
4	Edi Susianto*	√	√	-	√	-	√
5	Lukmanul Khakim*	√	√	-	√	-	√
6	Helvi Yuni Moraza*	√	√	-	√	-	√
7	Rofikoh Rokhim**	√	√	√	√	-	√
8	Rabin Indrajad Hattari**	√	√	√	√	-	√
9	Dwi Ria Latifa**	√	√	√	√	-	√
10	Heri Sunaryadi**	√	√	√	√	-	√
11	Nurmaria Sarosa**	√	√	√	√	-	√
12	Agus Riswanto**	√	√	√	√	-	√
13	Paripurna P. Sugarda**	√	√	√	√	-	√
14	Haryo Baskoro Wicaksono**	√	√	√	√	-	√

* (Diangkat sebagai Dewan Komisaris BRI dalam RUPST pada tanggal 24 Maret 2025)
** (Diberhentikan sebagai Dewan Komisaris BRI dalam RUPST pada tanggal 24 Maret 2025)

Tata Kelola

Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi

No.	Nama	Gaji	THRK	Tantiem Setelah Pajak	Tunjangan Perumahan	Pengobatan	Premi Asuransi Purna
1	Sunarso**	✓	✓	-	✓	✓	✓
2	Catur Budi Harto**	✓	✓	-	✓	✓	✓
3	Agus Noorsanto***	✓	✓	-	✓	✓	✓
4	Handayani**	✓	✓	-	✓	✓	✓
5	Amam Sukriyanto**	✓	✓	-	✓	✓	✓
6	Arga Mahanana Nugraha**	✓	✓	-	✓	✓	✓
7	Agus Sudiarto**	✓	✓	-	✓	✓	✓
8	Viviana Dyah Ayu Retno K.	✓	✓	-	✓	✓	✓
9	Supari**	✓	✓	-	-	✓	✓
10	Ahmad Solichin Lutfiyanto***	✓	✓	-	✓	✓	✓
11	Agus Winardono**	✓	✓	-	✓	✓	✓
12	Andrijanto**	✓	✓	-	✓	✓	✓
13	Hery Gunardi*	✓	-	-	✓	✓	✓
14	Hakim Putratama*	✓	-	-	✓	✓	✓
15	Riko Adythia*	✓	-	-	✓	✓	✓
16	Aquarius Rudianto*	✓	-	-	✓	✓	✓
17	Farida Thamrin*	✓	-	-	✓	✓	✓
18	Akhmad Purwakajaya*	✓	-	-	✓	✓	✓
19	Alexander Diplo Paris Y. S.*	✓	✓	-	✓	✓	✓
20	Nancy Adistyasari *) ***)	✓	-	-	✓	✓	✓
21	Mucharom *) ***)	✓	-	-	✓	✓	✓
22	Saladin Dharmannugraha Effendi*	✓	-	-	✓	✓	✓
23	Achmad Royadi****	✓	-	-	-	-	-
24	Ety Yuniarti****	✓	-	-	-	-	-
25	Mahdi Yusuf****	✓	-	-	-	-	-
26	Aris Hartanto****	✓	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Diangkat sebagai Direksi BRI dalam RUPST pada tanggal 24 Maret 2025

**) Diberhentikan dengan hormat sebagai Direksi BRI dalam RUPST pada tanggal 24 Maret 2025

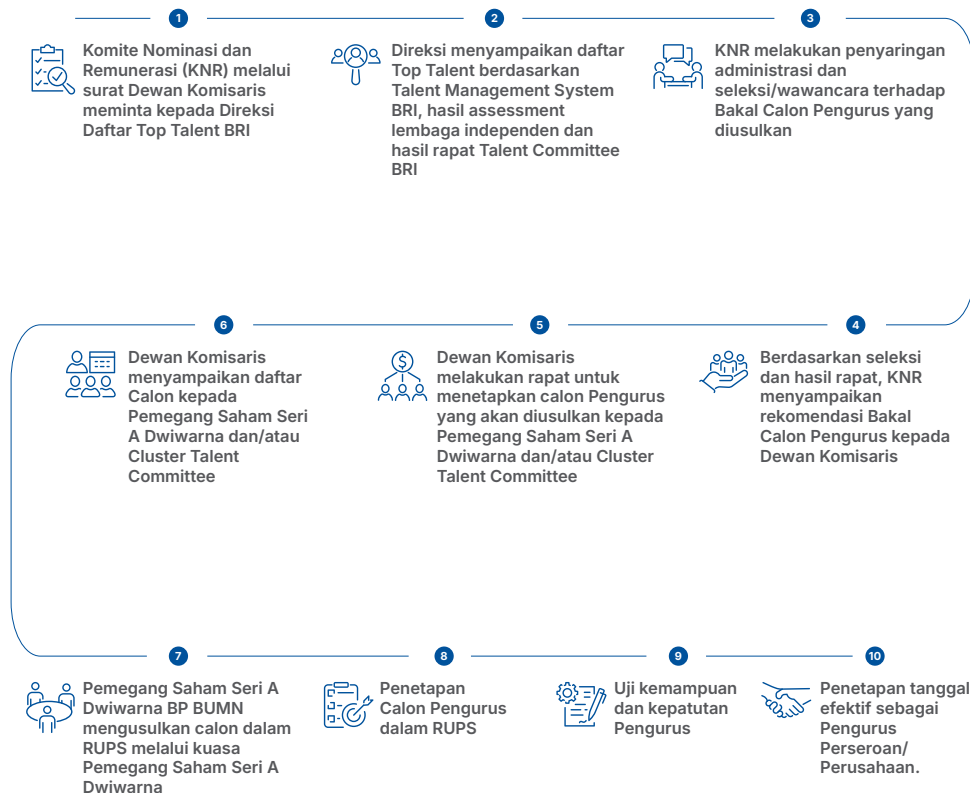
***) Diberhentikan dengan hormat sebagai Direksi BRI dalam RUPSLB pada tanggal 17 Desember 2025

****) Diangkat sebagai Direksi BRI dalam RUPSLB pada tanggal 17 Desember 2025

Tata Kelola

Pengawasan Nominasi [GRI 2-10]

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi berlangsung pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah diangkat untuk satu periode jabatan (hingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke lima), anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diangkat kembali untuk satu kali periode jabatan selanjutnya selama maksimal lima tahun. Prosedur pemilihan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:



Adapun proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui Surat Keputusan NOKEP:07- KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015 dengan kebijakan umum sebagai berikut:



Pengawasan Risiko Tata Kelola

Penerapan manajemen risiko oleh BRI mendukung pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang sehat serta bertanggung jawab. Selain memastikan kepatuhan, BRI mengelola dan membuat keputusan berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), yang disusun dengan mengacu pada regulasi serta praktik terbaik (*best practices*) di industri. KMNR memuat dasar-dasar kebijakan dan berfungsi sebagai pedoman utama serta peraturan tertinggi dalam manajemen risiko. Kebijakan ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait manajemen risiko, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

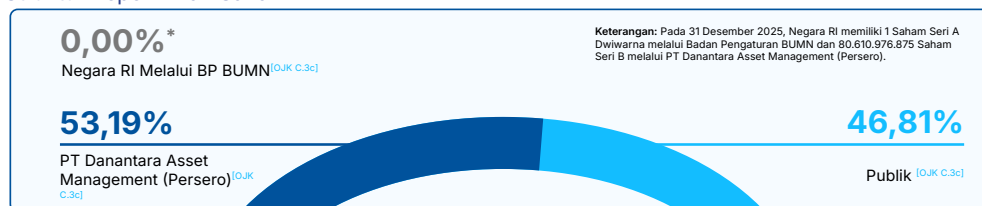
Tata Kelola

Pengendalian Kepemilikan dan Hak Pemegang Saham

BRI berkomitmen untuk menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan seimbang, dengan memperhatikan hak-hak pemegang saham. Struktur kepemilikan perusahaan melibatkan pemegang saham pengendali, namun kami memastikan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tetap terlindungi melalui kebijakan yang adil.

BRI terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pemilihan direksi dan akses proksi, memberi kesempatan lebih besar bagi pemegang saham untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, pengambilan keputusan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Struktur Kepemilikan Saham



PT Danantara Asset Management (Persero) memiliki saham mayoritas BRI sehingga memiliki hak suara yang memberi pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Namun demikian, BRI memastikan bahwa pengambilan keputusan mencerminkan kepentingan negara, dengan tetap mengutamakan transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan perusahaan. Meski tidak memiliki direksi independen, BRI tetap menjaga struktur tata kelola perusahaan yang efisien dan berorientasi pada jangka panjang.

Pada periode berikutnya, BRI berupaya melakukan perbaikan dalam aspek tata kelola independen untuk memastikan bahwa keberagaman suara dan kontrol yang lebih seimbang dapat terwujud di dalam struktur dewan perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap keberlanjutan dan transparansi perusahaan.

Kepemilikan Saham oleh Direksi^{[GRI 2-19][GRI 2-20]}

BRI mengatur ketentuan kepemilikan saham oleh Direksi dalam SE.09.c-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Desember 2024 mengenai Penerapan *Good Corporate Governance*. Hal tersebut mencerminkan komitmen BRI atas manajemen yang bertanggung jawab dan upaya peningkatan nilai Perusahaan dalam jangka panjang.

BRI mendorong Direksi untuk memiliki saham BRI selama masa jabatannya, termasuk melalui pemberian insentif jangka pendek (STI). Per 31 Desember 2025, kepemilikan saham oleh dua anggota Dewan Komisaris tercatat sebanyak 2.390.500 lembar. Adapun kepemilikan saham oleh Direksi sebesar 6.357.698 lembar, termasuk saham Direktur Utama sebanyak 435.000 lembar.

Hak Pemegang Saham dan Partisipasi dalam Pemungutan Suara

BRI berkomitmen untuk memastikan hak pemegang saham terjamin melalui mekanisme yang transparan dan inklusif. Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B terbanyak tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama.

Pemegang saham dapat memanggil rapat khusus dengan memegang 10% dari hak suara yang beredar, serta mengajukan mata acara rapat dalam RUPS Tahunan. Selain itu, pemegang saham juga dapat menyetujui keputusan perusahaan melalui persetujuan tertulis (*Act by Written Consent*) sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih fleksibel.

BRI memastikan pengawasan eksekutif yang baik dengan memberikan pemegang saham kemampuan untuk meninjau dan menyetujui kebijakan kompensasi eksekutif. Meskipun tidak beroperasi di pasar yang mewajibkan *Say On Pay*, BRI tetap berkomitmen untuk mendengarkan pandangan pemegang saham dalam hal ini.

Mekanisme Pengendalian dan Ketentuan Pengambilalihan

PT Danantara Asset Management (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali BRI dengan kepemilikan sebesar 53,19%. Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pemerintah juga memegang satu lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan hak strategis tertentu, terutama dalam menjaga keselarasan visi Bank dengan pembangunan nasional.

Meskipun demikian, BRI memastikan bahwa struktur tersebut tidak membatasi hak pemegang saham publik. Setiap keputusan strategis dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang transparan, di mana setiap saham Seri B memiliki hak suara yang setara (*One Share, One Vote*). Sementara Kepentingan pemegang saham minoritas dilindungi secara ketat melalui keberadaan Komisaris Independen yang mewakili 50% dari total anggota Dewan Komisaris, guna memastikan pengawasan yang objektif.

Terkait ketentuan pengambilalihan, BRI berkomitmen untuk menjaga efisiensi mekanisme pasar dan tidak menerapkan hambatan buatan terhadap dinamika kepemilikan saham. Bank memastikan tidak ada ketentuan pengambilalihan (*anti-takeover provisions*) yang dapat menghalangi transaksi perubahan kendali yang wajar. Prosedur pengambilalihan sepenuhnya tunduk pada regulasi pasar modal Indonesia, salah satunya mencakup mekanisme Penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer*) yang memberikan perlindungan harga dan hak keluar yang adil bagi pemegang saham minoritas saat terjadi perubahan pengendali.

BRI memastikan keberadaan Saham Seri A Dwiwarna merupakan ketentuan hukum yang bersifat strategis untuk keselarasan visi nasional dan tidak ditujukan untuk menghambat efisiensi mekanisme pasar saham atau likuiditas investasi publik.

Tata Kelola

Tata Kelola Keberlanjutan

BRI memperkuat tata kelola ESG dengan menerbitkan Surat Edaran Direksi mengenai Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan (*Sustainability Policy and Strategy*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sejak 2021, BRI telah menetapkan tata kelola ESG untuk secara langsung memantau kinerja dan pengungkapan ESG perusahaan. Tata kelola ESG tersebut diwujudkan melalui pembentukan Komite *Environmental, Social & Governance* (ESG) berlandaskan Surat Keputusan NOKEP. 102-DIR/PPM/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang mencabut NOKEP. 872-DIR/PPM/06/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Pengawasan Dewan

Penanggung Jawab Keberlanjutan^{[OJK E.1] [GRI 2-12]}

Komite ESG di BRI diketuai oleh Direktur Utama yang didukung oleh Wakil Direktur Utama, sejumlah Direktur lainnya, dan divisi terkait, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Komite ESG

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara (Voting)
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap dengan hak suara)	✓
Group Head ESG atau Unit Kerja Pengelola ESG	Sekretaris (Merangkap anggota tetap tanpa hak suara)	✗
Anggota Tetap dengan Hak Suara		
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	Anggota Tetap	✓
Direktur <i>Corporate Banking</i>	Anggota Tetap	✓
Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	Anggota Tetap	✓
SEVP <i>Wholesale Risk</i>	Anggota Tetap	✓
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara		
Seluruh Direktur/SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	✓
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara		
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	Anggota Tetap	✗

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG:^{[GRI 2-12] [GRI 2-13] [GRI 2-14] [GRI G4 FS12]}

1. menyetujui dan memberikan arahan atas hasil review dan evaluasi terkait implementasi kebijakan atau tata kelola (governance), parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL yang telah disusun oleh Unit Kerja terkait yang kemudian diusulkan oleh Tim Penunjang Komite;
2. menetapkan program kerja yang termasuk kategori inisiatif ESG dan inisiatif TJSL berdasarkan rekomendasi Tim Penunjang Komite;
3. menyetujui dan memberikan arahan atas hasil review dan evaluasi terkait implementasi program kerja yang masuk ke dalam parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL serta pelaporan data dan informasi terkait ESG;
4. menyetujui dan memberikan arahan atas hasil review terkait laporan ESG Rating, Investor concerns atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI;
5. menetapkan isu material dan hasil laporan ESG *Rating, Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI;
6. menyetujui rencana tindak lanjut atas hasil review dan evaluasi untuk kemudian dapat diusulkan menjadi program kerja baru yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait; serta
7. menyetujui dan memberikan arahan isu terkait ESG dan TJSL, termasuk peraturan perundang-undangan, inisiatif global, praktik bisnis, serta informasi penting lain terkait ESG dan TJSL.

Selain memiliki Komite ESG, BRI membentuk ESG Group yang berada di bawah supervisi Direktur *Legal & Compliance* dan Wakil Direktur Utama. Grup ini bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan implementasi keuangan berkelanjutan serta pengelolaan dampak terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mengkoordinasikan kebijakan keberlanjutan dan perubahan iklim di tingkat perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, ESG Group bekerja sama erat dengan tim manajemen risiko dan berkoordinasi dengan semua unit kerja terkait.

Grup ESG melaporkan kinerja ESG secara langsung kepada Direksi melalui Komite ESG. Secara berkala, laporan ini juga disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi-Dewan Komisaris serta diungkapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain pelaporan, Grup ESG juga berperan penting dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan tujuan yang selaras dengan komitmen BRI terhadap pembangunan berkelanjutan. ^{[OJK}

E.1][GRI 2-9][GRI 2-12][GRI 2-13][GRI 2-24][GRI G4 FS12]

Tata Kelola

Pengembangan Kapasitas untuk Penerapan Keuangan Berkelanjutan

BRI terus berupaya meningkatkan pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman badan tata kelola tertinggi mengenai pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti sejumlah program pengembangan kapasitas guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. [\[OJK E.2\] \[GRI 2-17\]](#)

Dewan Komisaris BRI periode 1 Januari 2025 s.d 24 Maret 2025:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Pelaksanaan	Penyelenggara
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Risk Management Refresher Program Jenjang 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Leading Global Business Strategy	North Carolina, 16 - 19 Februari 2025	Fuqua School of Business, Duke University
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Jakarta, 6 Februari 2025	Corpu dan LSPP
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Leading the AI-Driven Organization	Massachusetts, 10 - 14 Februari 2025	MIT Sloan School of Management
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Jakarta, 6 Februari 2025	Corpu dan LSPP
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Jakarta, 24 Januari 2025	Corpu dan LSPP
		Leading the AI-Driven Organization	Massachusetts, 10 - 14 Februari 2025	MIT Sloan School of Management
Agus Riswanto	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Jakarta, 6 Februari 2025	Corpu dan LSPP
Parpurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Jakarta, 6 Februari 2025	Corpu dan LSPP
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	Risk Management Refresher Program Jenjang 6	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Haryo Baskoro Wicaksono	Komisaris Independen	Private Equity: Investing and Creating Value	Philadelphia, 2-7 Februari 2025	Wharton School, University of Pennsylvania

Dewan Komisaris BRI periode 24 Maret 2025 s.d 31 Desember 2025:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Pelaksanaan	Penyelenggara
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Refreshment Manajemen Risiko Level 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa
Parman Nataatmadja	Wakil Komisaris Utama/Independen	Pendidikan Manajemen Risiko Level 6	Jakarta, 23-25 April 2025	LSPP
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	Pendidikan Manajemen Risiko Level 6	Jakarta, 27 November 2025	BARa
Edi Susianto	Komisaris Independen	Pendidikan Manajemen Risiko Level 6	Jakarta, 23-25 April 2025	LSPP
Helvi Yuni Moraza	Komisaris	Pendidikan Manajemen Risiko Level 6	Jakarta, 23-25 April 2025	LSPP
Lukmanul Khakim	Komisaris Independen	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Jakarta, 23 dan 30 April 2025	Corpu dan LSPP
		Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 15 Desember 2025	BSMR

Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Pelaksanaan	Penyelenggara
Hery Gunardi	Direktur Utama	Risk Management Refresher Program Jenjang 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Viviana Dyah Ayu R. K.	Wakil Direktur Utama	Risk Management Refresher Program Jenjang 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Alexander Dippo Paris Y S	Direktur Commercial Banking	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 20-21 April 2025	LSPP
Aris Hartanto	Direktur Consumer Banking	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 23-24 Desember 2025	LSPP
		Program Pembelajaran Bersama Cornell University	Jakarta, 15 Oktober 2025-16 Desember 2025	PT Danareksa Asset Management (Persero) (Danantara Indonesia)
Riko Adyithia	Direktur Corporate Banking	Risk Management Refresher Program Jenjang 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)

Tata Kelola

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Pelaksanaan	Penyelenggara
Achmad Royadi	Direktur <i>Finance & Strategy</i>	Seminar <i>Refreshment</i> Program Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 28 Agustus 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
		<i>Training Basic Insurance</i>	Jakarta, 19–21 November 2025	LPMA-STMA Trisakti
Saladin Dharma Nugraha Effendi	Direktur <i>Information Technology</i>	<i>Risk Management Refresher</i> Program Jenjang 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Ety Yuniarti	Direktur Manajemen Risiko	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 5–6 Oktober 2025	LSPP
Akhmad Purwakajaya	Direktur <i>Micro</i>	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 20–21 April 2025	LSPP
Aquarius Rudianto	Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	<i>Risk Management Refresher</i> Program Jenjang 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Hakim Putratama	Direktur <i>Operations</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Level 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Farida Thamrin	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 20–21 April 2025	LSPP
		Pembekalan dan Uji Kompetensi <i>Dealer Treasury Advance</i>	Jakarta, 14–18 April 2025	Apuvindo & ACI
Agus Noorsanto	Wakil Direktur Utama	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Level 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Human Capital & Compliance	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Level 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)
Nancy Adistiyasari	Direktur Consumer Banking	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Level 7	Jakarta, 27 November 2025	BARa (Bankers Association for Risk Management)

Tata Kelola

Metrik dan Target Keberlanjutan

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris^[GRI 2-18]

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja pada awal tahun dan melaksanakan penilaian mandiri (*self-assessment*) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun berdasarkan realisasi kinerja serta indikator kinerja utama (KPI) yang telah ditetapkan. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris BRI dilakukan secara internal tanpa melibatkan pihak ketiga, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penilaian tersebut berpedoman pada sejumlah regulasi, antara lain:

- Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
- Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Hasil evaluasi dan penilaian mandiri atas kinerja Dewan Komisaris beserta komite di bawahnya menunjukkan bahwa seluruh rencana kerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025 telah terealisasi dengan skor 101,25. Informasi lebih lanjut mengenai evaluasi Dewan Komisaris disajikan dalam Laporan Tahunan BRI 2025.

Evaluasi Kinerja Direksi^[GRI 2-18]

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan KPI Kolegial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN. Evaluasi kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penilaian atas KPI Kolegial Direksi telah melalui tahap tinjauan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan objektivitas dan keandalan hasil penilaian.

Kategori	Bobot	KPI	ESG/C	Pencapaian
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	Finansial	PPOP Konsolidasi (12%)	C	100,7%
		ROE Tier 1 Konsolidasi (10%)	C	98,8%
	Operasional	Total <i>Shareholder Return</i> (TSR) (8%)	C	66,7%
		<i>Cost of Credit</i> (CoC) <i>Parent Only</i> (8%)	G	98,1%
		CIR Konsolidasi (7%)	C	100,0%
	Sosial	Realisasi Penyaluran KUR (7%)	S	110,0%
		NPS <i>for Bank</i> (5%)	S	110,0%
Inovasi Model Bisnis	10%	CASA <i>Ratio</i> Konsolidasi (5%)	C	105,0%
		Pertumbuhan rata-rata kredit Konsumer & SME <i>Parent Only</i> (5%)	C	81,9%
Kepemimpinan Teknologi	10%	Jumlah Pengguna Aktif BRI _{mo} (5%)	C	110,0%
		<i>Cyber Security Breach</i> (5%)	G	110,0%
Peningkatan Investasi	15%	<i>Environment, Social, Government</i> (ESG) <i>Rating</i> (5%)	E	100,0%
		<i>Disbursement</i> Kredit Ultra Mikro (5%)	C	95,4%
		Pembiayaan/Kredit Berkelanjutan <i>Parent Only</i> (5%)	E	101,5%
Pengembangan talenta	8%	<i>Human Capital Transformation</i> (8%)	S	92,0%

Deskripsi: (C) *Commercial*; (E) *Environmental*; (S) *Social*; (G) *Governance*

Tata Kelola

Insentif Berbasis Keberlanjutan di BRI

Komitmen BRI terhadap keberlanjutan dan pengelolaan risiko iklim tercermin melalui penerapan KPI dan remunerasi yang dikaitkan dengan keberlanjutan (*sustainability-linked KPIs and remuneration*), dengan aspek lingkungan dan pembiayaan berkelanjutan menjadi bagian dari KPI Kolegial Direksi. Pada tahun 2025, Direksi memiliki target penyaluran pembiayaan berkelanjutan yang secara langsung dikaitkan dengan sistem remunerasi berbasis kinerja. Pencapaian target tersebut digunakan sebagai indikator kinerja kolektif untuk menilai efektivitas kepemimpinan secara menyeluruh, dan berdampak langsung pada penetapan remunerasi variabel Direksi. Pengaturan ini merupakan bagian dari insentif manajemen terkait perubahan iklim (*climate-related management incentives*), yang memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis terkait iklim dan keberlanjutan terintegrasi dalam sistem insentif eksekutif, sekaligus memperkuat akuntabilitas manajemen dalam mendukung transisi menuju bisnis berkelanjutan.

BRI menetapkan metrik dan target keberlanjutan sebagai bagian integral dari sistem tata kelola dan pengelolaan kinerja Perusahaan. Pencapaian target keberlanjutan dipantau melalui *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan dan Manajemen, yang mencerminkan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan kinerja.

Selain itu, BRI menumbuhkan budaya keberlanjutan di seluruh organisasi melalui *Sustainability Culture Program* (SCP). Program ini memberikan apresiasi kepada Divisi dan Kantor Wilayah yang berkontribusi aktif dalam implementasi inisiatif ESG, sehingga strategi keberlanjutan dijalankan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Unit kerja dengan kinerja terbaik dalam program ini memperoleh insentif finansial sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi terhadap pencapaian target keberlanjutan Perusahaan.

Topik Keberlanjutan	Pemilik KPI	Keterkaitan KPI dengan Remunerasi Variabel
Peringkat ESG	Chief Executive Officer	5% dari evaluasi kinerja tahunan CEO dikaitkan dengan kinerja Perseroan terkait Peringkat ESG
	Anggota Dewan Direksi	5% dari evaluasi kinerja tahunan Direksi dikaitkan dengan kinerja Perseroan terkait Peringkat ESG
	ESG Group Head	10% dari KPI tahunan ESG Group Head dikaitkan dengan kinerja Perseroan terkait Peringkat ESG
Pembiayaan Berkelanjutan	Chief Executive Officer	5% dari evaluasi kinerja tahunan CEO dikaitkan dengan kinerja Perseroan terkait Pembiayaan Berkelanjutan
	Anggota Dewan Direksi	5% dari evaluasi kinerja tahunan Direksi dikaitkan dengan kinerja Perseroan terkait Pembiayaan Berkelanjutan
Pengurangan Emisi (Scope 1 & Scope 2)	ESG Group Head	15% dari KPI tahunan ESG Group Head dikaitkan dengan pencapaian pengurangan emisi Scope 1 dan Scope 2 Perseroan
Implementasi Inisiatif Green Network	Distribution & Strategy Group Head	2,5% dari KPI tahunan DSG Group Head dikaitkan dengan pengurangan emisi Scope 1 dan Scope 2 melalui implementasi inisiatif Green Network
Peningkatan Produk dan Proses ESG	ESG Group Head	10% dari KPI tahunan ESG Group Head dikaitkan dengan peningkatan produk dan proses ESG Perseroan
Implementasi Climate Risk Management System (CRMS) dan Analisis Skenario Iklim	ESG Group Head	5% dari evaluasi kinerja tahunan ESG Group Head dikaitkan dengan implementasi CRMS

Manajemen Risiko

Tata Kelola Risiko dan Risiko Perusahaan

Tata Kelola Risiko^[OJK E.3]

Dewan Komisaris dan Direksi BRI bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memainkan peran sentral dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan implementasinya di seluruh unit kerja. Secara khusus, pemantauan dan pengendalian risiko bank secara menyeluruh (*bank-wide*) ditangani oleh Direktur Manajemen Risiko. Sementara Dewan Komisaris mengevaluasi kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, serta menerima laporan profil risiko secara berkala dari manajemen. Melalui evaluasi tersebut, ditujukan untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko BRI secara efektif.

Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko harus memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur, metodologi pengelolaan risiko, dan sesuai dengan praktik terbaik industri. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas perusahaan tetap dapat terkendali pada batas/limit risiko yang dapat diterima serta memberikan nilai tambah perusahaan.

Dewan Komisaris maupun anggota Komite KPMR memiliki kompetensi dan keahlian, termasuk sertifikasi di bidang Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan. BRI secara konsisten berupaya meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota Dewan Komisaris melalui program pelatihan dan pengembangan keahlian di bidang manajemen risiko.^{[OJK E.2] [GRI 2-17]}

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)

KPMR membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko. Pengawasan ini memastikan bahwa aktivitas BRI tetap berada dalam batas risiko yang dapat diterima, serta memperkuat pengendalian yang efektif terhadap operasional bank.

Komite Manajemen Risiko (KMR)

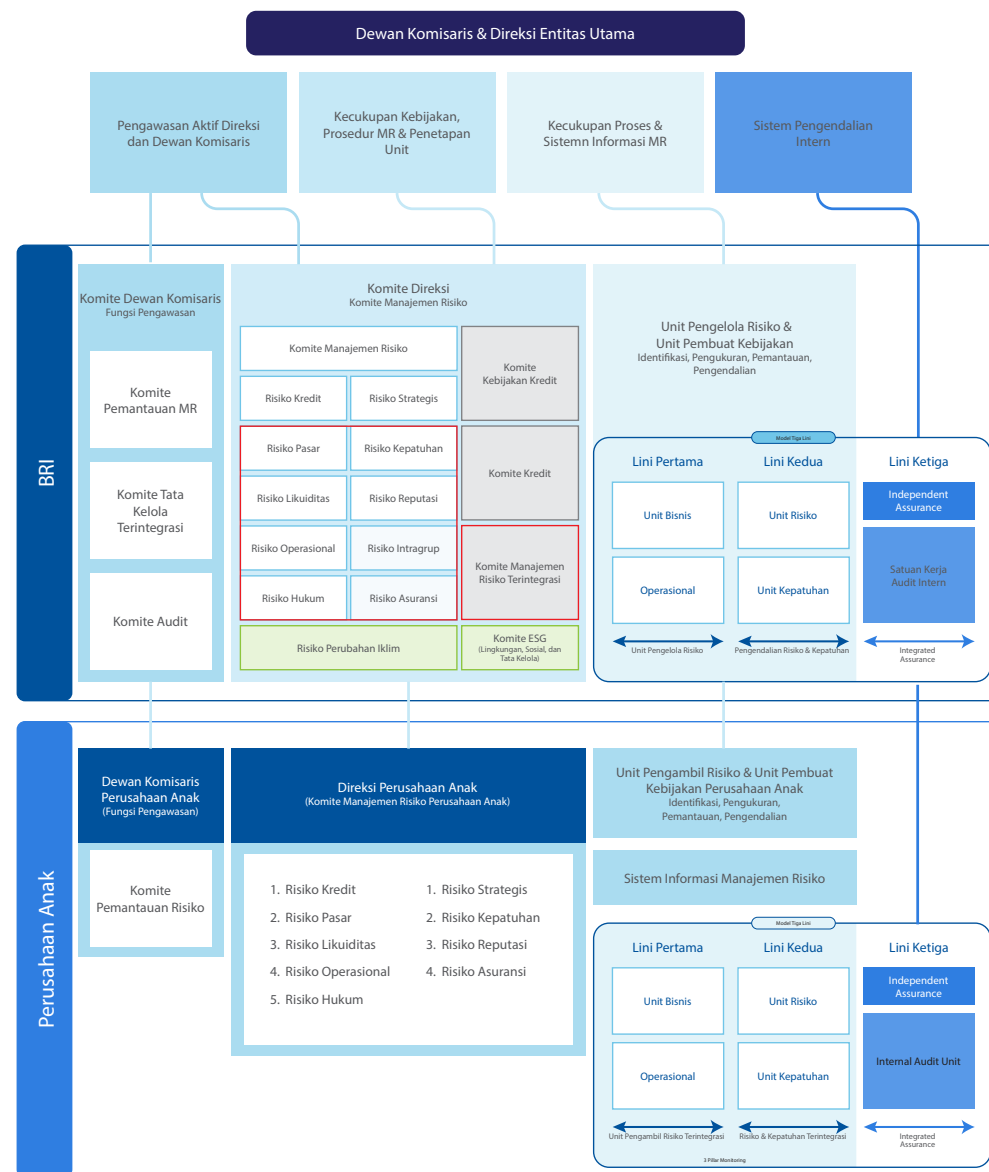
Komite yang bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

SKMR BRI merupakan unit kerja yang bersifat independen dari *Risk Taking Unit* dan SKAI yang menjalankan fungsi sebagai pembuat kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko serta menjalankan fungsi pengawasan secara berkala terhadap *Risk Taking Unit*.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI memiliki fungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses *governance*.



Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Perusahaan

BRI menerapkan proses manajemen risiko yang terintegrasi dan berkesinambungan di seluruh unit kerja melalui sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis. Setiap unit kerja bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu pada model tiga lini (*three lines model*), di mana unit pengambil risiko berperan sebagai lini pertama, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko sebagai lini kedua, serta audit internal sebagai lini ketiga. Untuk memastikan konsistensi dan efektivitas penerapan manajemen risiko, Direksi menetapkan fungsi manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi, mulai dari Kantor Pusat hingga unit kerja operasional di dalam dan luar negeri.

Pengelolaan risiko operasional dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta mengacu pada ketentuan regulator dan praktik terbaik industri. Proses penilaian risiko didukung oleh berbagai perangkat dan metodologi, antara lain penilaian risiko dan pengendalian mandiri, pemantauan indikator risiko utama, pencatatan kejadian kerugian operasional, serta penilaian risiko atas produk, proses, dan potensi ancaman operasional.

Hasil pengelolaan risiko dilaporkan secara berkala kepada manajemen dan pemimpin unit kerja sebagai bagian dari mekanisme pemantauan dan pengambilan keputusan. Laporan risiko mencakup profil risiko operasional, analisis risiko, serta temuan dan tindak lanjut atas indikasi kejadian risiko, guna memastikan risiko dikelola secara efektif dan selaras dengan tingkat toleransi risiko yang ditetapkan.

Skenario Manajemen Risiko

Di sisi tata kelola perusahaan, BRI senantiasa menghadapi dinamika lingkungan seperti pasar dan regulasi yang terus berkembang, untuk itu disusun skenario manajemen risiko yang mencakup aspek-aspek berikut ini.

- Penyempurnaan kerangka akuntabilitas seperti penetapan peran dan tanggung jawab bagi dewan direksi, eksekutif, dan pekerja untuk memastikan akuntabilitas pengambilan keputusan.
- Keragaman dan Inklusi dengan mempromosikan keragaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk menghadirkan perspektif yang beragam dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
- Integrasi Keberlanjutan dengan memasukkan prinsip-prinsip ESG ke dalam tata kelola untuk mengatasi risiko dan peluang lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- Inisiatif Transparansi melalui pengungkapan kinerja keuangan, praktik manajemen risiko, dan kebijakan tata kelola secara teratur kepada para pemangku kepentingan.
- Adopsi Teknologi melalui penggunaan perangkat alat digital seperti platform tata kelola.

Profil Risiko Keuangan dan Permodalan

BRI menerapkan pengelolaan risiko keuangan dan permodalan secara pruden melalui proses pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang terintegrasi. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah pelaksanaan simulasi *stress-testing* secara berkala, minimal satu kali setiap

triwulan, untuk mengevaluasi ketahanan kinerja dan kondisi keuangan Bank dalam menghadapi kondisi pasar yang ekstrem dan tidak normal. ^[FN-CB-550a.2]

Simulasi *stress-testing* ini menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja dan kondisi keuangan BRI terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak terhadap portofolio, antara lain:

1. portofolio kredit dan non kredit, untuk melihat risiko gagal bayar (*Stress test* Risiko Kredit);
2. portofolio surat berharga dan posisi devisa, untuk melihat risiko akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar (*Stress test* Risiko Pasar);
3. portofolio aset likuid dan profil liabilitas, untuk melihat risiko likuiditas (*Stress test* Risiko Likuiditas).

Simulasi ini juga digunakan untuk mengelola risiko sistemik BRI. Hasil *stress-testing* dimanfaatkan sebagai dasar dalam menilai ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas, serta untuk memperkuat perencanaan modal, strategi jangka panjang, dan pengelolaan aktivitas bisnis secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan BRI untuk mengantisipasi risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan dalam berbagai skenario makroekonomi.

Guna mendukung disiplin pengelolaan risiko, BRI menetapkan risk appetite dan limit risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan dalam *Risk Appetite Statement* (RAS) yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan zero tolerance. Parameter RAS dan limit risiko ditinjau secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan dinamika bisnis dan lanskap risiko yang berkembang.

BRI juga melakukan *self-assessment* atas profil risiko perusahaan sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap tingkat risiko yang dihadapi. Pada triwulan IV 2025, hasil *self-assessment* tersebut menunjukkan peringkat risiko BRI berada pada tingkat *low to moderate*, mencerminkan kemampuan Bank dalam mengelola risiko secara efektif seiring dengan perkembangan bisnis dan dinamika persaingan di sektor perbankan Indonesia. Berdasarkan hasil pengelolaan risiko tersebut, BRI secara berkelanjutan memantau dan menjaga profil risiko keuangan dan permodalan, termasuk memastikan tingkat *leverage* yang sehat, kecukupan penyangga modal inti (*Tier 1 capital buffer*) sesuai profil risiko dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas aset.

Leverage Ratio

Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) diterapkan sebagai bagian dari penguatan kerangka permodalan Bank untuk mencegah *leverage* yang berlebihan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Rasio Pengungkit merupakan pengukuran yang lebih sederhana dan tidak berbasis risiko sehingga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berbasis risiko (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM). Melalui penerapan Rasio Pengungkit, Bank memastikan struktur permodalan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi maupun volatilitas pasar.

Manajemen Risiko

Tier 1 Capital Buffer

Bank memantau dan mengelola Kecukupan Modal Inti (*Tier 1 Capital*) secara berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan permodalan. Selain memastikan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Bank juga menjaga *capital buffer* di atas persyaratan minimum regulator sebagai lapisan perlindungan tambahan untuk menyerap potensi kerugian dalam kondisi tekanan ekonomi.

Asset Quality

Kualitas aset dikelola melalui penerapan manajemen risiko kredit yang disiplin, pemantauan portofolio secara berkelanjutan, serta pengendalian eksposur risiko. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kualitas portofolio, mitigasi potensi penurunan nilai aset, dan mendukung kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Tinjauan dan Audit Risiko

Pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kerangka manajemen risiko diperkuat melalui kaji ulang dan audit independen yang dilakukan secara berkala satu kali setahun oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penilaian risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan, telah dilaksanakan secara memadai. Selain itu, SKAI juga secara berkala melakukan kegiatan audit untuk setiap level Unit Kerja di BRI. SKAI menyampaikan laporan secara rutin kepada Direktur Utama dan Komite Audit, dan diketahui oleh Direktur Kepatuhan.



Manajemen Risiko

Emerging and Sustainability Related Risk

BRI menyadari bahwa perubahan lingkungan bisnis, dinamika ekonomi, serta isu keberlanjutan yang berkembang dapat menimbulkan risiko baru maupun memperbesar risiko yang telah ada. Menghadapi kondisi tersebut, BRI secara proaktif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang bersifat emerging dan terkait dengan keberlanjutan sebagai bagian integral dari kerangka manajemen risiko perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan usaha, mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Emerging Risk

Bank menghadapi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha di masa mendatang. Berdasarkan hasil kajian, BRI mengidentifikasi dua kategori risiko utama yang diperkirakan akan berdampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kategori	Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak Risiko	Tindakan Mitigasi
Geopolitik	Ketidakpastian Makroekonomi dan Geopolitik Global	Ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, termasuk konflik Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, terus menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global dan rantai pasok komoditas. Perkembangan ini berkontribusi terhadap tekanan inflasi yang persisten, volatilitas suku bunga yang meningkat, serta pemulihan ekonomi yang lebih lambat di berbagai ekonomi utama dunia. Selain itu, pemulihan ekonomi Tiongkok masih tidak merata, dipengaruhi oleh tantangan struktural di sektor properti, melemahnya permintaan domestik, serta eskalasi perang tarif dengan AS. Mengingat peran Tiongkok sebagai mitra dagang utama bagi banyak negara berkembang, perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat secara tidak langsung memengaruhi arus perdagangan global dan pasar komoditas. Sebagai institusi keuangan yang beroperasi dalam perekonomian Indonesia yang terbuka dan terkait dengan komoditas, BRI dapat terdampak secara tidak langsung oleh volatilitas makroekonomi global melalui portofolio treasury, kondisi pendanaan, serta kinerja debitur pada sektor-sektor yang sensitif terhadap permintaan global dan harga komoditas.	Ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik global yang meningkat dapat memengaruhi BRI melalui beberapa faktor, antara lain: • volatilitas pasar, termasuk fluktuasi suku bunga dan pasar valuta asing yang dapat memengaruhi valuasi instrumen keuangan dalam portofolio treasury BRI; • transmisi risiko kredit, khususnya bagi debitur pada sektor berorientasi ekspor atau sektor berbasis komoditas yang sensitif terhadap fluktuasi permintaan global; • kondisi pendanaan dan likuiditas, karena tekanan pasar keuangan global dapat meningkatkan biaya pendanaan dan memengaruhi akses ke pasar modal; • volatilitas laba akibat potensi perubahan valuasi aset, pembentukan pencadangan risiko kredit, serta biaya pendanaan. Dinamika tersebut dapat memengaruhi profitabilitas Bank, pengelolaan permodalan, serta profil risiko pada periode tekanan ekonomi global.	BRI mengelola eksposur terhadap risiko makroekonomi dan geopolitik global melalui kerangka manajemen risiko terpadu yang mencakup risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Langkah mitigasi utama meliputi: • pengelolaan aset dan liabilitas secara aktif untuk mengelola risiko suku bunga dan likuiditas, didukung oleh pengawasan rutin melalui rapat bulanan <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO); • diversifikasi portofolio investasi pada berbagai instrumen dan penerbit; • pemantauan eksposur kredit sektoral, khususnya bagi debitur yang sensitif terhadap siklus komoditas global; • pelaksanaan <i>stress testing</i> secara berkala dan analisis skenario untuk menilai dampak guncangan makroekonomi yang merugikan; • menjaga <i>buffer</i> modal dan likuiditas yang memadai, didukung oleh Risk Appetite Statement BRI dan rencana pendanaan kontinjensi. Melalui langkah-langkah tersebut, BRI memperkuat ketahanan keuangan dan menjaga stabilitas di tengah dinamika kondisi makroekonomi global.

Manajemen Risiko

Kategori	Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak Risiko	Tindakan Mitigasi
Teknologi	Disrupsi Teknologi dari <i>Artificial Intelligence</i> , <i>Blockchain</i> , dan Mata Uang Digital	Perkembangan pesat teknologi keuangan, termasuk kecerdasan buatan (AI), infrastruktur <i>blockchain</i>, serta mata uang digital seperti <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) dan <i>stablecoin</i>, sedang membentuk kembali lanskap layanan keuangan global. Teknologi ini mendorong munculnya ekosistem keuangan digital yang lebih luas, model keuangan terdesentralisasi (DeFi), serta infrastruktur pembayaran alternatif yang berpotensi menantang peran perantara perbankan tradisional. Seiring percepatan inovasi keuangan digital, pemain baru seperti perusahaan fintech dan platform teknologi semakin menawarkan layanan keuangan yang bersaing langsung dengan produk dan model distribusi perbankan tradisional.	Perkembangan pesat teknologi keuangan dapat mengganggu model bisnis perbankan tradisional dan mengubah ekspektasi nasabah terhadap layanan keuangan. Teknologi seperti sistem pembayaran berbasis <i>blockchain</i> dan mata uang digital dapat memungkinkan transaksi keuangan yang lebih cepat, murah, dan terdesentralisasi di luar infrastruktur perbankan konvensional. Bagi BRI, perkembangan ini menimbulkan beberapa potensi risiko, antara lain: - risiko disintermediasi, ketika platform keuangan digital alternatif mengurangi ketergantungan pada layanan perbankan tradisional; - tekanan persaingan dari perusahaan fintech dan teknologi yang menawarkan produk keuangan berbasis AI dan layanan digital; - kesenjangan adopsi teknologi, apabila keterlambatan dalam mengadopsi teknologi baru melemahkan posisi kompetitif dalam ekosistem keuangan digital; - risiko operasional dan keamanan siber akibat potensi penyalahgunaan teknologi atau kerentanan pada infrastruktur digital yang berkembang. Jika tidak diantisipasi dengan baik, perkembangan tersebut dapat memengaruhi akuisisi nasabah, volume transaksi, dan daya saing jangka panjang BRI di lanskap keuangan digital Indonesia yang berkembang pesat.	Untuk mengelola risiko yang muncul, BRI terus memperkuat strategi transformasi digital dan kapabilitas teknologi. Inisiatif utama meliputi: - penguatan ekosistem digital banking BRI, termasuk pengembangan BRImo sebagai <i>platform mobile banking</i> dan layanan keuangan digital terintegrasi; - pemanfaatan kecerdasan buatan dan analitik data untuk meningkatkan pengalaman nasabah, manajemen risiko, serta deteksi fraud. BRI menggunakan BRIBRAIN, platform AI proprietary Bank yang mendukung fitur seperti <i>Pipeline Management</i>, <i>Customer Analytics</i>, layanan <i>chatbot</i>, <i>Information Retrieval</i>, dan <i>Content Generation</i>; - pemantauan perkembangan teknologi <i>blockchain</i> dan mata uang digital, termasuk potensi implikasinya terhadap sistem pembayaran dan intermediasi keuangan; - penguatan kerangka kerja keamanan siber dan tata kelola teknologi guna memastikan ketahanan terhadap ancaman digital yang terus berkembang. Melalui inisiatif tersebut, BRI berupaya tetap adaptif terhadap disrupsi teknologi sekaligus terus menghadirkan layanan keuangan yang aman, inklusif, dan kompetitif.

Risk & Governance Culture

Risk & Governance Culture merupakan landasan pelaksanaan tema budaya nasional BRI One Culture untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam setiap aktivitas perbankan. Melalui budaya ini, BRI mendorong pelaksanaan nilai-nilai budaya risiko oleh pekerja serta peningkatan kapabilitas dalam pengambilan dan pengelolaan risiko secara bertanggung jawab. Sebagai panduan implementasi bagi Insan BRILiaN, pada tahun 2023 BRI telah menerbitkan ketentuan Budaya Risiko melalui SE.04-DIR/CTR/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Corporate Culture Buku 2 Budaya Risiko, yang menjadi acuan dalam mendukung penerapan budaya risiko di seluruh organisasi.

Internalisasi Budaya Kesadaran Risiko

Implementasi budaya risiko didorong melalui program-program internalisasi budaya risiko, antara lain:

- Culture Activation Program (CAP)**
Setiap unit kerja telah menetapkan CAP untuk membentuk perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai KPI secara prudent melalui aktivitas yang telah ditetapkan pada CAP.
- Membangun Risk Awareness Pekerja di Unit Kerja**
SKMR secara rutin menyampaikan media risk awareness baik dalam bentuk surat, media infografis, webinar, podcast, *e-learning*, akun media sosial resmi Bank dan email/WA/sms blast.
- Empowering Risk Officer**
Diperlukan keterlibatan *Risk Officer* sebagai Tim Penggerak Transformasi dalam menginternalisasi dan memastikan terlaksananya penerapan budaya risiko. Penguatan fungsi MR dilakukan melalui penyesuaian operasional prosedur serta upgrading pengetahuan dan *technical skills* melalui pendidikan/sosialisasi.
- Early Detection**
Penerapan budaya risiko perlu didukung oleh *Early Warning System Tools* yang dapat membantu mitigasi maupun mengoreksi kejadian risiko secara lebih dini.
- Business Process Review**
Aktivitas budaya risiko tercermin melalui pelaksanaan operasional prosedur perbankan secara harian. Sehingga diperlukan reviu kecukupan kontrol atas operasional prosedur tersebut.

Our People: Insan BRILiaN

Komitmen Praktik Ketenagakerjaan

BRI berkomitmen penuh untuk menerapkan praktik ketenagakerjaan yang etis, transparan, dan berkeadilan sebagai fondasi utama dalam mengelola *human capital*. Komitmen ini merupakan manifestasi dari kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku serta penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja di seluruh lingkup organisasi.

Landasan hukum praktik ketenagakerjaan di BRI telah mengacu sepenuhnya pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejalan dengan dinamika regulasi nasional, BRI juga telah mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang) sejak 30 Desember 2022. Praktik ketenagakerjaan di BRI diterapkan oleh seluruh pekerja baik pekerja tetap maupun kontrak. BRI berkomitmen pada prinsip-prinsip berikut.

1. *Respect Freedom of Association*

BRI menghormati hak setiap individu untuk membentuk, bergabung, atau tidak bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi perwakilan pilihannya tanpa intimidasi maupun pembalasan. Hak tersebut dijalankan sesuai ketentuan hukum nasional dan standar ketenagakerjaan internasional guna memastikan kebebasan berserikat yang bertanggung jawab.

2. *Uphold the Rights to Collective Bargaining*

BRI mengakui dan menghormati hak atas perundingan bersama sebagai mekanisme untuk mewujudkan kondisi kerja yang adil dan setara. Komitmen ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Bersama sebagai hasil dialog konstruktif antara manajemen dan pekerja, termasuk pengaturan hak, kewajiban, kesejahteraan, serta perlindungan pekerja secara transparan dan inklusif.

3. *Ensure Workforce Wellbeing*

BRI memastikan kesejahteraan tenaga kerja melalui penerapan praktik kerja yang mendukung keselamatan, martabat, dan kualitas hidup pekerja. Hal ini mencakup perlindungan privasi, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, pemberian berbayar, pengaturan jam kerja maksimum, pencegahan lembur berlebihan, serta mekanisme konsultasi dan/atau pemberitahuan sebelum pelaksanaan pemutusan hubungan kerja massal. BRI juga memastikan remunerasi yang adil dan setara untuk pekerjaan yang bernilai sama.

4. *Elimination of Forced Labor*

BRI melarang secara tegas segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Seluruh pekerja dipekerjakan secara sukarela dengan kondisi kerja yang adil serta menerima kompensasi yang memenuhi atau melampaui *living wage*, sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik kerja yang bermartabat.

5. *Abolition of Child Labor and Prevention of Human Trafficking*

BRI tidak mentoleransi pekerja anak dalam bentuk apa pun dan menerapkan kebijakan serta uji tuntas untuk mencegah keterlibatan anak di bawah umur dalam operasional maupun *supply chain*. Perusahaan juga berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan manusia, praktik rekrutmen yang menyesatkan, maupun pengaturan kerja yang mengancam kebebasan dan keselamatan individu.

6. *Elimination of Discrimination*

BRI membangun budaya kerja yang berlandaskan kesetaraan dan inklusi serta melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, etnis, agama, ras, warna kulit, suku, kelompok sosial, status sosial, bahasa, pandangan politik, usia, maupun disabilitas. Komitmen ini selaras dengan prinsip *International Labour Organization (ILO) Convention No. 111* tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, kemudian diinternalisasikan melalui *Respectful Workplace Policy* serta praktik remunerasi yang menjamin kesetaraan remunerasi untuk pekerjaan dengan nilai yang sama dan keberagaman di seluruh jenjang organisasi.



Our People: Insan BRILiaN

Strategi Human Capital dan Tinjauan Pekerja ^[GRI 3-3]

BRI memandang sumber daya manusia sebagai penggerak utama transformasi strategis yang dikelola melalui strategi *Human Capital* yang adaptif terhadap dinamika industri perbankan. Strategi ini diwujudkan melalui proses rekrutmen dan pengelolaan *human capital* yang akuntabel serta implementasi nilai-nilai *Diversity, Equity & Inclusion* (DEI). BRI juga memastikan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan setiap fase perjalanan pekerja hingga masa pensiun guna menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh Insan BRILiaN. Seiring dengan dinamika pasar tenaga kerja dan meningkatnya mobilitas talenta di industri keuangan, BRI juga mengidentifikasi sejumlah risiko terkait retensi talenta dan stabilitas tenaga kerja yang dapat memengaruhi keberlanjutan kapabilitas organisasi.

Pengukuran Risiko Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia, BRI mengidentifikasi berbagai risiko yang berkaitan dengan retensi talenta dan stabilitas tenaga kerja yang dapat memengaruhi keberlanjutan kapabilitas organisasi serta kinerja bisnis. Penilaian ini mempertimbangkan mobilitas tenaga kerja, tingkat turnover pekerja, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan menarik talenta berkualitas. Untuk menilai tingkat risiko secara keseluruhan, BRI mengevaluasi setiap risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya—yang tercermin dari tren turnover pekerja—serta tingkat keparahan dampaknya terhadap operasional, kinerja keuangan, dan reputasi Bank. Pendekatan ini memungkinkan BRI untuk memprioritaskan pengelolaan talenta dan memperkuat stabilitas tenaga kerja.

Tema Risiko	Kategori Risiko	Deskripsi	Dampak terhadap Bisnis	Level Dampak	Jangka Waktu Dampak
Retensi Talenta dan Stabilitas Pekerja	Risiko Operasional	Tingkat turnover dan mobilitas pekerja memerlukan proses penggantian tenaga kerja serta onboarding secara berkelanjutan.	Peningkatan biaya rekrutmen, <i>onboarding</i> , dan pelatihan pekerja.	Med	Jangka Pendek-Menengah
	Risiko Strategi	Keluar masuknya pekerja dapat memengaruhi keberlanjutan pengetahuan organisasi, keahlian, dan kapabilitas tenaga kerja.	Potensi penurunan produktivitas serta kebutuhan investasi tambahan dalam pengembangan kapabilitas.	Med	Jangka Menengah
	Risiko Reputasi	Tingkat turnover dan tantangan dalam retensi talenta dapat memengaruhi persepsi perusahaan sebagai tempat bekerja.	Menurunnya kemampuan perusahaan dalam menarik talenta berkualitas.	Med	Jangka Panjang

BRI secara berkala memantau dinamika tenaga kerja serta mengidentifikasi berbagai risiko yang berkaitan dengan retensi talenta dan stabilitas tenaga kerja. Pemahaman terhadap potensi risiko tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kapabilitas organisasi serta kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja perusahaan. Oleh karena itu, BRI terus memperkuat praktik pengelolaan sumber daya manusia secara terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi Human Capital

Dalam menyusun *strategi* manajemen sumber daya manusia (SDM), *human capital* BRI melakukan penyesuaian dengan aspirasi dan strategi korporasi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan peran dan keikutsertaan *human capital* BRI sebagai fungsi pendukung bisnis (*business enabler*) sekaligus sebagai upaya untuk mencapai visi HC BRI. *Human capital* BRI memiliki beberapa *Group* yang terdiri dari berbagai fungsi *human capital* secara *end-to-end* di bawah *Human Capital Sub Directorate*.

Adapun strategi pengelolaan *human capital* BRI (HC *lifecycle*) diawali dengan pengumpulan input strategi bisnis Perusahaan yang terdiri dari strategi jangka pendek hingga jangka panjang yang akan menjadi guidance HC BRI dalam menyusun dan mengimplementasikan *people process*. HC *lifecycle* terdiri dari pengelolaan sumber daya manusia secara *end-to-end*, seperti HC *strategy*, HC *planning*, *resourcing*, *onboarding*, *learning*, *development*, *performance management*, *reward*, *career management*, *exit policy*, dan *retirement*.

Strategi *Human Capital* BRI berfokus pada pengelolaan Insan BRILiaN secara komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip kesetaraan, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan holistik di lingkungan kerja. Strategi ini dimulai dengan penguatan budaya kerja inklusif melalui kebijakan *Respectful Workplace Policy* yang menjamin anti-diskriminasi, pemberdayaan kepemimpinan perempuan hingga inklusi bagi penyandang disabilitas. Pengembangan kompetensi diberikan secara setara melalui pelatihan internal, eksternal sampai beasiswa pendidikan untuk menunjang produktivitas pekerja yang berlandaskan kinerja. BRI menerapkan sistem remunerasi yang adil dan transparan berdasarkan prestasi dan kontribusi pekerja.

Selain itu, BRI sangat memprioritaskan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh melalui pelaksanaan rangkaian Well-being Fest, inisiatif BRILiaN Well-being yang mencakup kesehatan fisik, sosial, mental, dan finansial, serta keseimbangan kerja termasuk upaya menjadikan BRI tempat bekerja yang ramah keluarga pekerja. Adapun agenda kegiatan Well-being Fest meliputi donor darah, cek kesehatan dasar, art therapy, dan sesi konseling psikolog. BRI juga menghargai dedikasi dan loyalitas pekerja dengan memberikan manfaat dan mempersiapkan insan BRILiaN untuk menjalani masa purna bakti yang bermartabat melalui program kewirausahaan agar mereka tetap berdaya dan sejahtera.

Our People: Insan BRILiaN

Human Capital Framework

Pengelolaan *human capital* di BRI (*HC lifecycle*) terdiri dari 6 (enam) tahapan rangkaian pengelolaan sumber daya manusia di BRI, yakni:

- Align*: melalui penyusunan strategi dan perencanaan;
- Attract*: melalui proses rekrutmen dan *onboarding* pekerja baru;
- Evolve*: melalui program *learning* dan *development*;
- Accomplish*: melalui *performance management*;
- Engage*: melalui pemberian *rewards* dan *career management*;
- Offboard*: melalui *exit policy* dan program pensiun.

Pengelolaan HC BRI melibatkan peran berbagai pihak, termasuk melibatkan *stakeholder* terkait, seperti nasabah, pekerja, pemerintah, *national* dan *global alliance*, media, serta mitra yang bekerja sama dengan BRI. Lebih dari itu, pengelolaan HC juga didukung oleh *industrial relations* (IR) yang harmonis, *human capital information system* (HCIS), *people analytics*, serta *HC communication* yang kreatif.

Komposisi Pekerja

Headcount & Composition

Komposisi gender pekerja BRI pada tahun 2025 hampir seimbang, dengan 57,07% pekerja laki-laki dan 42,93% pekerja perempuan. Sementara dari segi pendidikan, mayoritas pekerja atau 96,39% telah menempuh pendidikan tinggi (Strata-1 dan Diploma). Seluruh data kuantitatif pekerja BRI yang diungkapkan, disusun berdasarkan metode *headcount* oleh Divisi *Human Capital Service Group*. Pengungkapan data pekerja BRI disajikan pada tabel data di halaman [228-230](#), termasuk pengungkapan berdasarkan kewarganegaraan. [OJK F.18][GRI 2-7, 2-8, 401-1]

Perempuan dalam Manajemen [OJK F.18]

Komposisi perempuan sebanyak 36.466, mencakup 42,93% dari seluruh insan BRILiaN di tahun 2025, menjadikan BRI sebagai tempat yang inklusif dan kondusif bagi perempuan. Lebih dari itu, peran perempuan pada posisi manajerial yang terus meningkat juga mendukung perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Hingga akhir 2025, sebanyak 25,63% pekerja di level manajemen junior, menengah, dan atas adalah perempuan. BRI memperkuat kompetensi kepemimpinan dan networking pemimpin perempuan melalui program BRILiaN Women Leaders Indonesia (BWLII). BRI terus berperan aktif mendukung pekerja perempuan mengembangkan keterampilan dan memperkuat peran mereka dalam lingkungan profesional. Pengungkapan data pekerja Perempuan berdasarkan Tingkat jabatan disajikan pada table data halaman [228](#).

Perempuan dalam Fungsi Penghasil Pendapatan serta Bidang STEM

BRI secara aktif mendorong peningkatan peran perempuan pada posisi strategis, khususnya di unit-unit kerja penghasil pendapatan (*revenue-generating*) serta bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) yang menjadi tulang punggung transformasi digital Bank. BRI memberikan dukungan penuh bagi pekerja perempuan untuk mengambil peran sentral

dalam manajemen portofolio bisnis, pengembangan produk perbankan, hingga pengelolaan teknologi informasi dan analisis data (*data science*). Upaya ini merupakan langkah nyata BRI untuk menghapus kesenjangan peran berbasis gender dan memastikan bahwa setiap perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi penggerak utama inovasi dan profitabilitas Perusahaan, sekaligus memperkuat daya saing BRI di era perbankan masa depan. Saat ini komposisi perempuan pada fungsi penghasil pendapatan mencapai 30,48%, dan fungsi terkait STEM sebesar 27,19%.

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas [OJK F.18]

Sebagai upaya meningkatkan keberagaman dan inklusivitas, BRI juga merekrut penyandang disabilitas sebagai pekerja. Meskipun memiliki keterbatasan, Perusahaan percaya bahwa mereka tetap dapat berkontribusi sebagai insan BRILiaN sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing. Perusahaan mengadakan program pelatihan dan pemagangan yaitu BRI Sahabat Disabilitas untuk mempersiapkan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) agar memiliki kapabilitas yang sesuai dengan karakteristik masing-masing individu untuk bekerja di BRI. Selain itu, BRI berkomitmen untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan TKPD saat bekerja dengan menyediakan peralatan kerja penunjang serta fasilitas umum fisik dan non-fisik khusus untuk TKPD. Pekerja dengan disabilitas juga diberikan kesempatan pelatihan dan penguatan kapasitas, serta pengembangan karier yang sama berdasarkan *Talent Development System* untuk mendukung karier mereka di BRI.

People Process

BRI berkomitmen untuk membangun keunggulan kompetitif melalui pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi, dimulai dari proses perekrutan talenta (*talent acquisition*) yang inklusif untuk menjaring bibit unggul, dilanjutkan dengan program pengembangan kapasitas (*learning & development*) berkelanjutan guna memastikan kesiapan menghadapi dinamika industri. Fokus perusahaan juga tertuju pada manajemen kinerja dan karier yang transparan berbasis meritokrasi, disinergikan dengan kebijakan remunerasi dan kesejahteraan (*reward & benefits*) yang kompetitif serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan upah (*pay equity*). Seluruh pendekatan tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh Insan BRILiaN.

Talent Acquisition

Rekrutmen Pekerja

Pada tahun 2025, BRI merekrut 92.112 pekerja (termasuk perekrutan internal dan baru). Sebanyak 12.070 karyawan baru (*new hire*) direkrut dari berbagai kelompok usia dan wilayah di seluruh Indonesia. Rekrutmen ini juga mencerminkan komitmen BRI dalam menerapkan prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), termasuk dengan meningkatkan partisipasi talenta perempuan untuk berkontribusi dan berkembang dalam organisasi. Dari total rekrutmen baru (*new hire*) tersebut, sebanyak 7.321 karyawan merupakan Perempuan dan 4.749 karyawan merupakan laki-laki. Rincian tersedia pada Tabel Perekrutan Internal dan Perekrutan Baru di halaman [231](#).

Our People: Insan BRILiaN

Inisiatif Penarikan Talenta

BRI menyediakan berbagai jalur untuk menyaring talenta terbaik melalui berbagai program berikut:

1. BRILiaN Future Leader Program (BFLP)

Program BFLP menjadi program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat potensial serta memberikan pendidikan sebagai bekal menjadi calon pemimpin di masa depan dari sumber eksternal.

2. BRILiaN Banking Associate Program (BBAP)

Program rekrutmen dan pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dengan level corporate title Associate baik bersumber dari eksternal dan internal yang bertujuan untuk mendukung kinerja perusahaan sesuai standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.

3. BRILiaN Next Leader Program (BNLP)

Program rekrutmen dan pendidikan bagi Pekerja Internal BRI yang memiliki potensi besar menjadi pemimpin perusahaan di masa depan.

4. BRILiaN Specialist Hiring Program (BSHP)

Program rekrutmen untuk pekerja yang memiliki kualifikasi keahlian di bidang tertentu dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Rekrutmen pekerja melalui BSHP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam mengisi jabatan atau pekerjaan tertentu, yaitu:

- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk/aktivitas baru atau bidang baru karena pengembangan Organisasi Perseroan, di mana Perseroan belum memiliki pekerja yang mempunyai kualifikasi keahlian yang memadai di bidang tersebut.
- Kekurangan jumlah pekerja yang mempunyai kualifikasi keahlian di bidang tertentu di mana pekerja internal yang menguasai bidang tersebut masih sangat terbatas.
- Kebutuhan pemenuhan pekerja tersebut bersifat mendesak di mana tidak dimungkinkan untuk mengembangkan keahlian pekerja internal dalam waktu singkat.

5. BRILiaN Internship Program (BIP)

Program pemagangan untuk memberikan ruang bagi lulusan SMA/SMK, Mahasiswa atau *Fresh Graduate* dalam mendapatkan pengalaman pelatihan kerja di Unit Kerja BRI sekaligus memberikan *support* dalam pekerjaan Unit Kerja BRI.

6. BRILiaN Scholarship Program (BSP)

Merupakan *early recruitment program* yang dapat menarik minat *potential young generation* serta sebagai sarana pembentukan karakter sebelum menjadi Pekerja BRI melalui Program Penerimaan Pekerja yang ada di Bank.

Manajemen Talenta

BRI menerapkan *Talent Management System* sebagai *framework* pengelolaan *talent* BRI terintegrasi yang mencakup 5 (lima) tahapan, yaitu *Attraction*, *Identification*, *Selection*, *Development* dan *Succession*.

1. Tahapan *Attraction*

BRI telah menyiapkan *talent source* dan juga *talent channel* untuk menarik kandidat-kandidat terbaik untuk BRI. Beberapa program di antaranya adalah program rekrutmen melalui *regular recruitment* dan *talent scouting*.

2. Tahapan *Identification*

Tahap ini merupakan pengelompokkan Pekerja BRI berdasarkan aspirasi, penilaian individu (*annual performance*) dan *competency*, dan *clustering* ke dalam *Human Asset Value Matrix* serta bidang keahlian (*talent pool*).

3. Tahapan *Selection*

Pekerja dikategorikan ke dalam *talent class* sesuai dengan *capacity* dan *performance* Pekerja. Hasil tersebut dikalibrasi sebagai dasar seleksi dan penetapan *Top Talent* di tahun tersebut. Pekerja yang terpilih sebagai *Top Talent* akan mendapatkan program pengembangan khusus dalam rangka mempersiapkan *Top Talent* sebagai *pool of successors* atau *future leaders*.

4. Tahapan *Development*

Pekerja akan diberikan *development program* sesuai kebutuhan berdasarkan *talent cluster*, *corporate title*, *role* Pekerja, maupun *career journey*. Tahapan *Development* bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Pekerja, mempersiapkan Pekerja menjalankan perannya, dan mengintegrasikan aspirasi karier Pekerja dengan kebutuhan Perusahaan. Beberapa *development program* antara lain *soft competencies*, *leadership competencies*, dan *technical competencies*.

5. Tahapan *Succession*

Tahapan ini merupakan proses pemilihan kandidat untuk ditempatkan sebagai suksesor melalui promosi atau rotasi *talent* pada suatu jabatan kritikal, melalui perencanaan suksesor. Tahapan *Succession* menjadi tahapan bagi Perusahaan untuk mempersiapkan *successor candidate* dan *readiness* sehingga keberlanjutan dari ketersediaan kandidat yang menduduki *role* tertentu dapat dipenuhi secara strategis.

Learning dan Development

BRI percaya bahwa keberhasilan Perusahaan hanya dapat diraih dengan pengembangan *human capital* yang konsisten dan terarah. Hal ini meningkatkan komitmen terhadap organisasi, memberikan kepuasan kerja, mendukung pencapaian kinerja, hingga mempertahankan dedikasi dan loyalitas para pekerja.

Pada dasarnya, seluruh pengembangan pekerja BRI dilakukan berdasarkan *Framework Development Program* yang telah mencakup siklus perjalanan pekerja secara *end-to-end*. Dengan adanya *framework* tersebut, maka setiap program pengembangan dapat diberikan secara tepat untuk mendukung kesiapan dan efektivitas pekerja sesuai peranannya masing-masing. Secara umum, siklus pengembangan pekerja terbagi dalam 4 (empat) fase, yaitu *Onboarding*, *Performing*, *Developing*, dan *Offboarding*, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Fase *Onboarding*

Program pengembangan yang dirancang khusus bagi pekerja baru, baik new hire maupun new role, untuk memastikan kesiapan pekerja dalam menjalankan peranannya di unit kerja. Salah satu materi yang diberikan adalah digital knowledge access sebagai bagian dari digital transition program, seperti BRISPOT untuk tenaga pemasar, NDS untuk bagian operasional, dan sebagainya. Selain pembelajaran dalam kelas, materi juga diberikan dalam bentuk Playbook sehingga pekerja dapat mengakses dan mempelajari materi tersebut kapanpun dan dimanapun.

Our People: Insan BRILiaN

Fase Performing

Program pengembangan ini dirancang bagi pekerja yang telah menduduki suatu jabatan dengan tujuan *capability boost* atau penguatan kompetensi pekerja sesuai dengan jabatannya, sehingga mampu meningkatkan kinerja mereka. Materi yang umum diberikan pada seluruh jabatan adalah internalisasi budaya BRI. Hal ini penting untuk menjaga semangat Insan Brilian dalam mengimplementasikan nilai-nilai Brilian Way secara berkelanjutan.

Fase Developing

Seluruh pekerja (mulai dari *Band 1* s.d *Band 6*) secara berjenjang juga diberikan penguatan terhadap kemampuan *leadership*. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan *leader* yang mampu berorientasi strategis dan siap memimpin transformasi. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 1.341 pekerja telah mengikuti Brilian Leadership Development Program (BLDP).

Fase Offboarding

Program pengembangan bagi pekerja yang akan memasuki masa pensiun ini membekali pekerja dengan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun. Sepanjang tahun 2025, peserta yang telah mengikuti Brilian Leader Retirement Program (BLRP) mencapai 825 pekerja. Hal ini menjadi bukti kepedulian BRI terhadap kesejahteraan pekerja dengan mempersiapkan mereka untuk menjalani masa pensiun yang bermakna dan berdaya.

Selain itu, dalam rangka mendukung layanan perbankan yang inklusif dan setara sejalan dengan Peraturan OJK, termasuk kepada penyandang disabilitas, BRI memberikan "Pendidikan Pelayanan Keuangan Kepada Penyandang Disabilitas" untuk jajaran *Frontliner* yang terdiri dari 113 pekerja *Customer Service*, *Teller*, dan *Security* sepanjang tahun 2025. Program ini termasuk dalam *training* terkait *diversity*.

Pelatihan Khusus sesuai Posisi dan Program Pelatihan Pengembangan Berbasis Pekerjaan ^{[OJK}

F.22][GRI 404-2]

BRI menyediakan berbagai wadah untuk memberikan kesempatan belajar, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan karier pekerja. Program pengembangan yang diberikan diharapkan dapat mendukung kesuksesan pekerja ketika menduduki suatu posisi atau bidang pekerjaan tertentu. Pengembangan karier sejalan dengan promosi dan aspirasi karier pekerja berdasarkan hasil evaluasi pekerja sehingga sesuai dengan kapabilitas, kompetensi, dan arah karier. Sejak tahun 2015, BRI Corporate University memiliki 6 (enam) kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI Corporate University juga menaungi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sejak tahun 2019 dan merupakan pionir LSP pertama di industri perbankan yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Surat Keputusan Nomor KEP.0351/BNSP/II/2020. Selanjutnya, berbagai program pengembangan talenta (*talent development*) untuk menjawab tantangan kompetensi masa depan telah dijalankan BRI, di antaranya:

BRILiaN Leadership Development Program (BLDP)	BRILiaN Bright Scholarship Program (BBSP)	BRILiaN Specialist Development Program (BSDP)	BRILiaN Leader Retirement Program (BLRP)
Program Pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja menjadi <i>global leader</i> melalui pengembangan <i>leadership</i> yang berkelanjutan dan komprehensif yang memberikan penekanan pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan bisnis/perbankan, serta wawasan teknologi.	Program beasiswa pendidikan pagi pekerja tetap BRI untuk menempuh pendidikan S2 luar negeri di top 30 universitas terbaik di dunia.	Program ini termasuk <i>job specific development training programs</i> BRI untuk pengembangan kompetensi teknis (<i>technical competency</i>) yang memberikan penekanan pada pengetahuan dan keterampilan spesifik sesuai kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi spesialis di bidang tertentu dengan juga menyesuaikan pada kebutuhan perusahaan.	Program untuk mempersiapkan Pekerja sebelum memasuki masa pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun.
Tipe Program	Tipe Program	Tipe Program	Tipe Program
Leadership development program	Leadership development program	Digital transition program, technical education	Transition program for retiring and terminated employees
Learning Methods	Learning Methods	Learning Methods	Learning Methods
Coaching or mentoring, in-class training	In-class training	Coaching or mentoring, in-class training	In-class training
Pekerja Tetap	Pekerja Tetap	Pekerja Tetap dan Kontrak	Pekerja Tetap
Peserta 2025 1.341 pekerja	Peserta 2025 2 pekerja	Peserta 2025 84.621 pekerja	Peserta 2025 825 pekerja

Our People: Insan BRILiaN

Certification Program (Mandatory and Non-Mandatory)

Dukungan terhadap pembelajaran mandiri ini juga diwujudkan melalui dukungan bagi pekerja untuk memperoleh sertifikasi keahlian, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) guna memenuhi standar regulasi pada peran spesifik, maupun sertifikasi pilihan (*optional*) untuk pengayaan kompetensi individu. Pencapaian sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti otentik atas penguasaan keahlian yang relevan dan diakui secara profesional di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, setiap Insan BRILiaN tidak hanya memiliki wawasan yang luas, tetapi juga kredibilitas teknis yang teruji untuk memberikan nilai tambah nyata bagi Perusahaan dan nasabah.

Support for Self-Directed Learning

BRI menyadari bahwa dinamika bisnis dan perkembangan teknologi menuntut setiap insan BRILiaN untuk belajar dengan cepat, sehingga Bank memberikan dukungan penuh terhadap pembelajaran secara mandiri (*self-directed learning*) bagi seluruh Insan BRILiaN. Melalui platform digital pembelajaran terintegrasi BRISmart, pekerja dapat mengakses berbagai materi kurikulum, modul spesialisasi, hingga literatur bisnis yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Dengan memberikan kebebasan bagi pekerja untuk menentukan jalur pengembangan yang sesuai dengan minat dan aspirasi karier mereka, BRI tidak hanya membangun budaya pembelajar (*learning culture*) yang kuat, tetapi juga memastikan bahwa setiap talenta memiliki inisiatif tinggi dalam memperbarui kompetensinya guna mendukung transformasi berkelanjutan Perusahaan.

Pelatihan ESG untuk Pekerja [OJK E.2, F.1][GRI 2-24][GRI G4 FS4]

Pemahaman pekerja mengenai keuangan berkelanjutan menjadi fondasi dalam mencapai strategi keberlanjutan. Maka dari itu, BRI mengintegrasikan konsep keuangan berkelanjutan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan pekerja, baik melalui pelatihan tatap muka maupun pembelajaran daring (*e-learning*). Pada tahun 2025 diadakan *Understanding Checking* terkait *Financial Inclusion* kepada Insan BRILiaN yang diakses oleh 59.151 pekerja atau 69,63% dari seluruh Insan BRILiaN.

Sustainability Culture [OJK F.1]

Sustainability Culture Program (SCP) telah diselenggarakan sejak tahun 2024 sebagai inisiatif strategis untuk menanamkan dan memperkuat budaya keberlanjutan di seluruh Insan BRILiaN. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam perilaku kerja sehari-hari melalui indikator yang terukur dan relevan dengan aktivitas operasional.

Pada aspek lingkungan, SCP mendorong pengelolaan aktivitas yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pengendalian penggunaan kendaraan operasional dan peningkatan efisiensi energi listrik. Pada aspek sosial, program ini menitikberatkan pada pengembangan *human capital* melalui indikator partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, pada aspek tata kelola, SCP menekankan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur Perusahaan serta pencegahan pelanggaran yang dapat mempengaruhi penerapan *good corporate governance*.

SCP diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja dan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi. Melalui pendekatan ini, BRI memperkuat internalisasi nilai keberlanjutan sebagai bagian integral dari budaya kerja, sehingga mendukung terciptanya organisasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pelatihan Kolaboratif dengan Lembaga Eksternal

Sebagai upaya standardisasi keahlian, BRI menyelenggarakan pelatihan kolaboratif dengan lembaga sertifikasi eksternal. Fokus utama dari program ini adalah membekali pekerja dengan sertifikasi keahlian yang relevan.

Dalam perencanaan maupun pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, LSP BRI juga bekerja sama dengan beberapa lembaga eksternal, antara lain Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi – Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSP-LSPP), LSP Sistem Pembayaran Indonesia (LSP SPI), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan sebagainya. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Perusahaan dalam memvalidasi kapabilitas talenta internal agar memiliki daya saing yang tinggi, sekaligus memastikan seluruh operasional bisnis dijalankan oleh praktisi yang memenuhi standar kualifikasi nasional maupun global.

Efektivitas dan Hasil Pembelajaran

BRI memastikan bahwa setiap investasi pelatihan pengembangan pekerja menghasilkan dampak yang terukur melalui evaluasi efektivitas dan hasil pembelajaran yang komprehensif. BRI mengukur efektivitas pembelajaran tidak hanya dari tingkat kepuasan peserta, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi teknis, perubahan perilaku kerja yang positif, hingga kontribusinya terhadap pencapaian target bisnis perusahaan.

Peningkatan Intensitas Pembelajaran	Quantitative business impact Program Onboarding Area Head
Pada tahun 2025, rata-rata jam pelatihan per pekerja mencapai 83 jam per tahun, meningkat dibandingkan 79 jam per tahun pada 2024, yang mencerminkan perluasan akses serta intensitas pembelajaran bagi seluruh Insan BRILiaN.	Hasil evaluasi salah satu BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) yaitu program onboarding untuk Area Head yang diikuti oleh 74 peserta menunjukkan dampak bisnis yang signifikan, antara lain: - Peningkatan pencapaian <i>low cost liquidity</i> sebesar 114%, dan - Peningkatan <i>effective distribution</i> sebesar 100%

Melalui sistem *monitoring* yang ketat dan dialog dengan pekerja secara berkala, BRI memastikan bahwa ilmu dan keahlian yang diperoleh dari berbagai pelatihan dapat diterapkan secara langsung dalam operasional sehari-hari. Pendekatan berbasis hasil ini menjamin bahwa seluruh program pengembangan pekerja mampu menghasilkan Insan BRILiaN yang lebih produktif, inovatif, dan siap memberikan kontribusi maksimal bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Our People: Insan BRILiaN

Pengelolaan Karir dan Kinerja

Perencanaan Karier yang Terdefinisi

BRI berkomitmen untuk menumbuhkan talenta terbaiknya melalui Perencanaan Karier sehingga memberikan kejelasan jalur pertumbuhan profesional bagi setiap Insan BRILiaN. Hal ini dirancang secara terukur untuk menyelaraskan aspirasi individu dengan kebutuhan perusahaan, sehingga setiap pekerja memiliki *career journey* yang jelas sesuai dengan *soft competencies*, *leadership competencies*, dan *technical competencies* yang dikembangkan. Adapun *development program* diberikan kepada Pekerja sesuai kebutuhan baik itu berdasarkan *talent cluster*, *corporate title*, *role* pekerja, ataupun *career journey*.

Selain itu, dilakukan juga proses pemilihan kandidat untuk ditempatkan sebagai suksesor melalui promosi atau rotasi *talent* pada suatu jabatan kritical, melalui perencanaan suksesor. Proses ini disebut tahapan *succession* di mana perusahaan mempersiapkan *successor candidate* dan *readiness* sehingga keberlanjutan dari ketersediaan kandidat yang menduduki *role* tertentu dapat dipenuhi secara strategis.

Regular Performance Appraisals and Feedback Process

Proses *performance management appraisals* Individu di BRI dikemas dalam satu rangkaian yang dinamakan BRI *Continuous Performance Management* (BRICORE). BRICORE merupakan proses berkesinambungan atau berkelanjutan yang dilaksanakan selama periode kinerja dan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu *planning* (perencanaan), *managing* (pengelolaan), dan *evaluating* (evaluasi). Proses pengelolaan kinerja (*managing*) merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang periode (*continuous*) yang diwujudkan dalam *Performance Dialogue*. Adapun tahapan siklus dimaksud adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan Kinerja (*Planning*)

1. Merupakan proses untuk menetapkan sasaran kinerja Pekerja yang dalam tahapan ini terjadi kesepakatan antara Pekerja dan Penilai serta memastikan keselarasan antara sasaran kinerja Pekerja dan sasaran kinerja Unit Kerja.
2. Tahap ini tidak hanya dilakukan pada awal periode kinerja (awal tahun) atau awal penugasan pekerja pada suatu jabatan/bidang tugas baru dan Unit Kerja, namun dapat dilakukan secara berkala apabila dibutuhkan sepanjang selaras dengan sasaran kinerja Unit Kerja.
3. Penetapan sasaran kinerja tersebut tertuang dalam *performance plan* masing-masing Pekerja.

Tahap Pengelolaan Kinerja (*Managing*)

1. Tahap pengelolaan kinerja melalui *Performance Dialogue*, yaitu kegiatan komunikasi dua arah antara Pekerja dan Penilai dalam bentuk *effective* dan *constructive feedback* untuk memperoleh peningkatan kinerja individu yang berkesinambungan dan proses yang melekat pada keseluruhan tahapan BRICORE.
2. Pelaksanaan *Performance Dialogue* direncanakan dengan baik (*dedicated time*) yang bertujuan:
 - a. Pekerja mengetahui peran dan kontribusinya terhadap pencapaian Unit Kerja.

- b. Memberikan solusi terbaik atau umpan balik yang efektif atas hambatan/masalah yang berkaitan dengan kinerja Pekerja.
 - c. Memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Pekerja sehingga dapat mencapai target selanjutnya yang lebih menantang.
 - d. Sarana penyusunan *individual development plan* Pekerja.
3. *Performance Dialogue* dilakukan berkesinambungan sepanjang periode kinerja dengan penjelasan:
 - d. *Mandatory* (wajib) dilakukan saat awal periode kinerja (melakukan perencanaan kinerja) dan akhir periode kinerja (melakukan evaluasi kinerja).
 - e. *Optional* dilakukan di luar pelaksanaan *mandatory* sesuai kebutuhan masing-masing Pekerja atau apabila Pekerja menunjukkan indikasi menurunnya kinerja yang ditunjukkan dari tanda-tanda: kualitas kerja tidak memuaskan, inisiatif rendah, menolak pekerjaan, komplain meningkat, defensif, atau menghindari pekerjaan yang lebih menantang.

Tahap Evaluasi Kinerja (*Evaluating*)

1. Proses untuk mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi kinerja, termasuk melakukan *review* kembali perkembangan kinerja dan membandingkan pencapaian kinerja dengan sasaran kinerja yang ditetapkan (*measuring employee performance*)
2. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing Pekerja selama periode kinerja, baik itu triwulanan, semesteran, maupun tahunan.
3. Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka *monitoring* kinerja (*performance check-in*) dan penilaian kinerja (*performance appraisal*).
4. Penilaian kinerja masing-masing Pekerja (*Performance Appraisal*) berupa *Individual Performance Score* (IPS) dan predikat kinerja individu
5. Untuk menghindari evaluasi kinerja yang kurang objektif, Pekerja agar menghindari kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - I. *Halo Effect*, evaluasi kinerja yang hanya didasarkan pada sifat-sifat positif yang menonjol dari Pekerja yang dievaluasi.
 - II. *Horn Effect*, evaluasi kinerja yang hanya didasarkan pada sifat-sifat negatif yang menonjol dari Pekerja yang dievaluasi.
 - III. *Leniency*, penilai cenderung mudah memberikan evaluasi yang baik kepada Pekerja.
 - IV. *Strictness*, penilai cenderung sulit memberikan evaluasi yang baik kepada Pekerja.
 - V. *Central Tendency*, penilai cenderung memberikan evaluasi yang berada di posisi tengah (antara baik dan buruk).
 - VI. *Recency Error*, penilai cenderung memberikan evaluasi terhadap prestasi kerja Pekerja pada periode terakhir/belakangan (bukan keseluruhan kinerja selama periode penilaian).

BRI menggunakan aplikasi MyCore sebagai *tools* penunjang untuk mendukung pelaksanaan BRICORE *level* Individu. Aplikasi tersebut digunakan oleh Pekerja dari tahap *input performance plan* sampai dengan proses evaluasi kinerja. Pencapaian kinerja Perusahaan yang baik juga ditunjukkan dengan keselarasan pada *Individual Performance Score* (IPS) Pekerja.

Our People: Insan BRILiaN

Salah satu cara BRI dalam mengelola kinerja di tingkat Perusahaan, kinerja di tingkat Unit Kerja, dan kinerja di tingkat Individu adalah dengan adanya proses *performance management*. Hal ini bertujuan untuk memastikan kinerja Individu selaras dengan kinerja Perusahaan, mendorong motivasi Pekerja untuk fokus mencapai target, serta mendukung terciptanya pencapaian kinerja terbaik. Perusahaan mengevaluasi proses manajemen kinerja individu Pekerja secara keseluruhan, termasuk pengelolaan Pekerja dengan kinerja di bawah standar minimal yang dipersyaratkan (*underperform*). Dalam mengelola Pekerja dengan kinerja *underperform*, BRI memiliki program *Productivity & Performance Enhancement Program* (PPEP), yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pekerja agar mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.

Pada tahun 2025, BRI kembali mengimplementasikan *Productivity & Performance Enhancement Program* dengan berbagai dukungan selama proses pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. *Pendampingan Buddy*: *Buddy* dipilih oleh Pemimpin Unit Kerja.
2. *Training*: *Training* dilaksanakan secara daring maupun luring.
3. *Mentoring*: *Mentoring* dilakukan langsung oleh atasan maupun pemimpin unit kerja terkait.
4. *Coaching*: *Coaching* dilakukan oleh atasan atau *internal certified coach* BRI.
5. *Counseling*: Melibatkan *counselor* yang ditunjuk Perusahaan.

Evaluasi *Productivity & Performance Enhancement Program* sudah dilakukan pada bulan Oktober 2025, di mana hasil evaluasi bahwa dari total 2.152 peserta terdapat 1.817 peserta yang lulus (pencapaian kinerja >90% dan/atau penyelesaian *development plan* 100% dari target yang ditetapkan) dari *Productivity & Performance Enhancement Program* atau 84% dari total seluruh peserta PPEP. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan tren jumlah peserta PPEP yang lulus dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dinilai bahwa program PPEP berdampak positif terhadap peningkatan kinerja Pekerja.

Keberhasilan sistem manajemen kinerja ini tercermin nyata dalam pergerakan talenta di internal Bank. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 6.872 orang atau 8,09% dari total pekerja BRI berhasil mendapatkan promosi, yang membuktikan bahwa mekanisme evaluasi di BRI secara efektif menjadi akselerator bagi pertumbuhan profesional pekerja yang berprestasi. [\[GRI 404-3\]](#)

Reward, Benefits & Pay Equity

Kompensasi Yang Adil dan Perlindungan Sosial

BRI menjunjung prinsip kesetaraan dengan menerapkan strategi remunerasi berdasarkan penilaian objektif berbasis kinerja (*performance-driven culture*). BRI juga memberikan kenaikan upah kepada pekerja berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*) yang besarnya tergantung dengan tingkat jabatan, masa kerja, dan beban kerja. Insentif dan bonus diberikan untuk meningkatkan motivasi pekerja dalam mencapai target dan prestasi. Hal ini memastikan pengembangan karier setiap pekerja berjalan tanpa diskriminasi [\[OUK F.18\]\[3-3\]\[GRI 405-2\]](#)

Remunerasi ditetapkan berdasarkan tingkat jabatan dan kompetensi secara objektif. Langkah ini diharapkan dapat menarik calon pekerja, mempertahankan pekerja kompeten; serta mendorong motivasi pekerja untuk bisa berkontribusi maksimal terhadap perusahaan. Penetapan kompensasi dan manfaat diatur dalam Kebijakan Remunerasi Nomor: SE.36-DIR/HCS/12/2024 tanggal 30 Desember 2024. Perusahaan memberikan kompensasi tetap (*fixed pay*) seperti upah pokok dan tunjangan, serta kompensasi tidak tetap (*variable pay*) seperti insentif dan bonus. Selain itu, insan BRILiaN juga menerima manfaat, seperti asuransi kesehatan, fasilitas perjalanan dinas, dan program pensiun.

Rasio kompensasi total tahunan yang terdiri dari nilai total gaji tahunan individu tertinggi terhadap nilai tengah total gaji tahunan pekerja sebesar 26,67 pada tahun pelaporan. Hal ini disebabkan peningkatan nilai tengah kompensasi total pekerja (tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi) sebesar 0,45%, sementara kompensasi total tahunan individu dengan bayaran tertinggi meningkat 5,38% dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, BRI tetap berkomitmen untuk memberikan kompensasi yang kompetitif untuk seluruh pekerja dengan mengikuti *Total Reward Survey* melalui konsultan independen yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga senantiasa menyesuaikan besaran remunerasi dengan *benchmark* industri perbankan. Survei dilaksanakan secara objektif dan sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya *conflict of interest* antara BRI dan konsultan remunerasi. [\[GRI 2-20, 2-21\]](#)

BRI mematuhi penetapan Upah Minimum Regional (UMR) setiap daerah dengan memastikan gaji untuk pekerja tingkat terendah di atas UMR. Rata-rata upah terendah BRI di tahun 2025 adalah 1,09 kali UMR yang berlaku. Hal ini menjamin pemberian upah memperhatikan kelayakan biaya hidup pekerja sesuai lokasi bekerja mereka. [\[OUK F.20\]\[GRI 202-1\]](#) Selain itu, BRI memberikan perlindungan dan istirahat melahirkan kepada pekerja penuh waktu sebagai berikut. [\[GRI 401-2\]](#)

Jenis Manfaat	Nama Program	PKWTT	PKWT
Asuransi Jiwa	- Jaminan Kematian - Santunan Duka - Asuransi Jiwa & <i>Personal Accident</i> Pekerja	Ya	Sesuai Isi Perjanjian
Asuransi Kesehatan	- Jaminan Kesehatan Nasional - Asuransi Kesehatan Pekerja	Ya	Sesuai Isi Perjanjian
Tanggungans Kecacatan dan Ketidakmampuan	- Jaminan Kecelakaan Kerja - Asuransi Jiwa & <i>Personal Accident</i> Pekerja	Ya	Sesuai Isi Perjanjian
Cuti	- Cuti Melahirkan/Cuti Ayah - Cuti Tahunan - Cuti untuk keperluan kesehatan/keluarga	Ya	Sesuai Isi Perjanjian

Our People: Insan BRILiaN

Insentif Jangka Panjang Untuk Pekerja ^[GRI 401-2]

BRI memberikan insentif jangka panjang dalam bentuk kepemilikan saham melalui dua program, yakni Program Alokasi Saham Pekerja (*Employee Stock Allocation/ESA*) dan Program Opsi Saham Pekerja (*Employee Stock Option Plan/ESOP*) yang dilaksanakan sejak tahun 2016. ESA diberikan melalui empat tahapan kepada seluruh level pekerja yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BRI, meliputi masa kerja, kinerja individu, dan rekam jejak pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya. Sementara itu, ESOP merupakan opsi pembelian saham dengan harga khusus. Kedua program ini diberikan kepada pekerja level tertentu yang termasuk *High Potential Talent* dan *Value Creator* BRI sebagai inisiatif untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) mereka.

Program Alokasi Saham Pekerja (ESA)		Program Opsi Saham Pekerja (ESOP)	
Lembar Saham 2024	967.718.000	Lembar Saham 2024	148.926.100
Penambahan lembar saham pada tahun 2025	83.597.400	Penambahan lembar saham pada tahun 2025	-

Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

BRI menjunjung tinggi prinsip Kesempatan Kerja yang Setara (*Equal Employment Opportunity*) dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan HC yang non-diskriminatif guna memastikan setiap individu diperlakukan adil tanpa memandang latar belakang. Komitmen ini diperkuat melalui penerapan Kebijakan Lingkungan Kerja yang Saling Menghormati (*Respectful Workplace Policy*) serta Komitmen Praktik Ketenagakerjaan yang sehat, demi menciptakan ruang kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk pelecehan maupun diskriminasi.

Kesetaraan Peluang dalam Bekerja ^{[OJK F.18] [GRI 2-23]}

BRI berkomitmen untuk senantiasa menjadi tempat kerja yang inklusif dan setara dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keberagaman, dan anti-diskriminasi bagi pekerja yang beragam. Perusahaan memberikan kesempatan berkembang yang sama bagi pekerja tanpa memandang jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, atau faktor diskriminatif lainnya. Kebijakan anti-diskriminasi BRI yang komprehensif telah menjadi bagian dari semua aspek manajemen *human capital*, termasuk rekrutmen, pengembangan karier, dan remunerasi.

Kebijakan *Respectful Workplace*

BRI menegaskan komitmen terhadap kesetaraan dengan menerapkan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*), sebagaimana dicantumkan dalam Surat Direksi nomor SK.B.1221-DIR/HCS/07/2022. Adapun *Respectful Workplace Policy* memiliki beberapa prinsip dengan rincian, sebagai berikut:

Prinsip *Respectful Workplace Policy*



Mengakui dan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja yang beragam dengan berbagai macam latar belakang etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, disabilitas, sudut pandang atau karakteristik individu lainnya untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif.



Pemimpin unit kerja menjamin setiap pekerja tidak diperlakukan berbeda karena karakteristiknya serta memiliki kesempatan akses sarana dan prasarana yang sama dan adil.



Menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang saling menghargai, tidak melakukan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam bentuk apapun.

Kebijakan HC Anti-diskriminasi

BRI telah menjadikan prinsip tersebut sebagai kebijakan internal melalui Surat Direksi Nomor B.1221-DIR/HCS/07/2022 perihal *Respectful Workplace Policy* (Kebijakan Berperilaku Saling Menghormati di Tempat Kerja). Hal-hal yang tercantum dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. definisi *respectful workplace*, diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan;
2. kriteria perbuatan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan;
3. prinsip-prinsip *respectful workplace*; dan
4. tindakan pencegahan, penanganan, dan pengawasan.

Perusahaan menekankan pendekatan *top down* dengan mewajibkan para BRI *Leaders* sebagai *role model* dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif, dan produktif untuk menjunjung tinggi hak asasi dan meningkatkan produktivitas semua insan BRILiaN. ^[GRI 2-24]

Our People: Insan BRILiaN

Memperkuat Budaya Perusahaan

Membangun Budaya Perusahaan^{[F.1] [GRI 2-23]}

Brilian Way

BRI One Culture merupakan pedoman budaya perusahaan yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya visi Perseroan. BRI One Culture berlandaskan Brilian Way yang berfungsi sebagai nilai dan perilaku utama yang diinternalisasikan dalam aktivitas kerja sehari-hari seluruh Insan BRILiaN.

Pada tanggal 14 Juli 2025, BRI secara resmi menetapkan Brilian Way sebagai budaya kerja yang menjadi pedoman perilaku Insan BRILiaN dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Brilian Way merefleksikan karakter dan nilai utama (values) Insan BRILiaN sebagai penggerak utama kinerja dan transformasi Perusahaan. Brilian Way dirumuskan melalui proses kolaboratif dan partisipatif antara jajaran Direksi bersama dengan Insan BRILiaN sehingga menegaskan komitmen BRI dalam memperkuat budaya perusahaan sebagai pilar strategis akselerasi transformasi dan pencapaian aspirasi jangka panjang Perusahaan. Brilian Way terdiri dari 5 (lima) *values* utama, yaitu *Integrity*, *Collaborative*, *Accountability*, *Growth Mindset*, dan *Customer Focus*. Masing-masing *values* ini memiliki 3 (tiga) perilaku utama yang diharapkan dapat dijalankan oleh seluruh Insan BRILiaN dengan rincian sebagai berikut:

 Integrity	 Collaborative	 Accountability	 Growth Mindset	 Customer Focus
Definition Menjunjung tinggi profesionalisme, etika, dan kejujuran dengan mempertimbangkan risiko dalam setiap tindakan	Definition Bersinergi dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama	Definition Tanggung jawab penuh terhadap pengembangan people, disiplin dalam eksekusi untuk mencapai hasil optimal	Definition Adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap proses pembelajaran di setiap tahap perubahan	Definition Berempati memberikan layanan & solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah
Perilaku Utama - Bekerja profesional, menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang terukur - Konsisten dalam perkataan dan perbuatan - Tidak mentolerir setiap bentuk pelanggaran dan gratifikasi	Perilaku Utama - Menempatkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan tim - Membangun komunikasi terbuka berdasarkan asas saling percaya - Berani berpendapat dan berkontribusi secara aktif untuk mencapai tujuan bersama	Perilaku Utama - Bertanggung jawab untuk tumbuh sehat dan sustain - Menerapkan disiplin eksekusi untuk hasil optimal - Terus melakukan pengembangan diri dan tim	Perilaku Utama - Memiliki pola pikir inovatif untuk selalu maju dan berkembang - Tangguh dan pantang menyerah dalam mencapai kinerja terbaik - Terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun	Perilaku Utama - Memberikan layanan cepat, akurat, dan memenuhi kebutuhan nasabah - Selalu membina hubungan baik dengan nasabah untuk kepentingan Perusahaan - Menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah

Internalisasi Budaya

Transformasi BRI dijalankan dengan dua fokus utama, yaitu penguatan aspek bisnis dan pengembangan budaya perusahaan. Dalam kerangka tersebut, budaya perusahaan diposisikan sebagai salah satu fondasi strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan serta menjadi bagian integral dari strategi perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut serta untuk memastikan implementasi transformasi BRI yang konsisten dan terukur, BRI Group secara berkelanjutan melaksanakan berbagai upaya internalisasi nilai dan inisiatif budaya kerja.

Perjalanan Transformasi Budaya BRI

Perjalanan Transformasi Budaya BRI merupakan upaya berkelanjutan yang secara terarah menekankan pengembangan dan penguatan budaya kerja sebagai penggerak utama dalam mendukung agenda transformasi perusahaan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai inisiatif, program untuk membentuk perilaku, pola pikir dan cara kerja Insan Brilian agar selaras dengan arah strategis perusahaan.

BRI menyusun *Roadmap Culture Transformation* hingga 2030 sebagai kerangka strategis jangka panjang untuk memastikan budaya perusahaan secara konsisten mendorong perilaku yang selaras dengan strategi bisnis dan keberlanjutan Perusahaan, mencakup antara lain:

1. Internalisasi Brilian Way secara menyeluruh.
2. Pemberdayaan *Change Leader* dan *Change Agent* sebagai role model budaya.
3. Integrasi budaya dalam seluruh siklus *Human Capital* mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga pengelolaan kinerja.
4. Penguatan sistem pengukuran budaya yang berbasis data.

Upaya ini didukung oleh fondasi pengelolaan *Human Capital*, penciptaan lingkungan kerja yang kolaboratif dan positif, serta strategi komunikasi yang terintegrasi melalui berbagai kanal internal dan eksternal.

Our People: Insan BRILiaN

Aspek Internalisasi Budaya Kerja

Sepanjang 2025, BRI telah menjalankan berbagai inisiatif strategis dalam internalisasi budaya kerja yang selaras dengan framework BRI One Culture. Internalisasi BRI One Culture difokuskan pada 4 (empat) aspek utama, yaitu:



1. Strengthening Corporate Values (I Understand)

Strengthening Corporate Values merupakan fondasi utama dalam memastikan setiap Insan BRILiaN memiliki pemahaman yang utuh terhadap *Core Values* BRI beserta definisi dan perilaku utamanya. BRI secara berkelanjutan melakukan internalisasi nilai-nilai utama melalui pendekatan komunikasi (*change story/campaign*) yang konsisten, pemanfaatan berbagai kanal internal seperti Media Sosial @lifeatbri dan BRILiaN Apps, serta penggunaan artefak dan simbol budaya kerja.

2. Promoting Role Model (I See It)

Promoting Role Model menekankan peran kepemimpinan sebagai penggerak utama budaya kerja BRI. Seluruh pemimpin Unit Kerja di BRI berperan sebagai *Culture Leader* yang secara aktif menjadi teladan dalam menerapkan Brilian Way. Peran mereka sebagai Leader ditopang oleh *Change Agent* yang ada di setiap Unit Kerja. Inisiatif ini diperkuat melalui program pemberdayaan *Culture Leader* dan *Change Agent* untuk memastikan konsistensi perilaku dan pesan budaya di seluruh lini organisasi.

3. Competence & Skill Development (I Am Capable)

Competence & Skill Development berfokus pada penguatan kapabilitas Insan BRILiaN agar selaras dengan Brilian Way. Internalisasi budaya diintegrasikan secara sistematis ke dalam seluruh Program Pengembangan Pekerja, termasuk materi onboarding bagi new hire dan program refreshment bagi Pekerja eksisting.

4. Management System (I Have System)

Management System merupakan aspek pendukung strategis yang memastikan pengelolaan Budaya Kerja BRI berjalan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. BRI secara konsisten mengembangkan BRILiaN Apps sebagai platform utama implementasi budaya, termasuk dukungan terhadap aplikasi BRISMART & Portal Budaya Kerja dan Inovasi, program BRILiaN Rookie Buddy, serta sistem *monitoring Culture Action Program* (CAP) yang terintegrasi dan berbasis data. Sejalan dengan itu, BRI juga melakukan penyelarasan Budaya Kerja secara menyeluruh pada siklus *Human Capital*, mulai dari *recruitment*, pengembangan *Learning & Development*, hingga *Performance Management*.

Internalisasi Brilian Way BRI Group



Sebagai bagian dari penguatan budaya perusahaan, Direksi BRI melaksanakan sosialisasi Brilian Way secara langsung melalui rangkaian kegiatan Kick Off Brilian Way di Regional Office binaan masing-masing. Kegiatan ini menjadi sarana strategis bagi Direksi untuk menyampaikan arah, makna, serta ekspektasi penerapan Brilian Way secara langsung kepada Insan BRILiaN di seluruh Unit Kerja Operasional. Pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) Insan BRILiaN dan menegaskan bahwa transformasi budaya merupakan agenda bersama.

BRI juga memastikan bahwa implementasi Brilian Way telah diselaraskan di seluruh entitas dalam BRI Group, termasuk 10 perusahaan anak. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis, tingkat kematangan organisasi, dan kebutuhan strategis masing-masing entitas. Selain itu BRI juga melakukan beberapa inisiatif untuk memastikan internalisasi Brilian Way dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh Insan Brilian diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Culture Team

Dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan Budaya Kerja BRI dan implementasi BRI One Culture di Unit Kerja, maka diperlukan peranan aktif dari *Culture Team* untuk menjadi *role model* dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja BRI. *Culture Team* terdiri atas *Change Leader* (CL), *Change Agent* (CA) dan *Change Agent Koordinator* (CAK) yang berperan aktif memastikan keberhasilan culture program yang mendorong behavior untuk peningkatan kinerja.

2. Penyelarasan Brilian Way di Siklus Human Capital BRI

BRI menjadikan budaya kerja sebagai landasan dalam pengelolaan Human Capital untuk memastikan keberlanjutan kinerja organisasi. Budaya kerja secara sistematis diintegrasikan ke

Our People: Insan BRILiaN

dalam seluruh tahapan *Human Capital Lifecycle*, mulai dari rekrutmen, *onboarding*, *learning & development*, manajemen kinerja, hingga pengembangan dan suksesi karier.

3. Culture Measurement

Untuk memastikan Brilian Way dipahami dan dijalankan secara konsisten, BRI melakukan pengukuran budaya (*culture measurement*) secara rutin dan terarah. Pengukuran dilakukan terhadap pemahaman pekerja atas nilai, definisi dan perilaku utama Brilian Way, penerapan budaya pada tingkat Unit Kerja, serta keteladanan (*role modeling*) manajemen dalam menjalankan nilai & perilaku utama tersebut.

4. BRI Excellence Award

BRI *Excellence Award* (BEA) merupakan salah satu bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan BRI kepada pekerja dan unit kerja BRI yang secara konsisten memberikan kinerja terbaik dalam mencapai target yang telah ditetapkan Perusahaan. Pelaksanaan BEA di tahun 2026 diberikan kepada Unit Kerja dan Pekerja terbaik berdasarkan pencapaian di tahun 2025.

Culture Team^{[F.1][GRI 2-23]}

Internalisasi budaya menjadi elemen kunci dalam membangun budaya keberlanjutan di BRI serta memperkuat penerapan BRI One Culture di seluruh unit kerja. Untuk mendukung hal tersebut, BRI mengembangkan *Culture Team* yang terdiri dari *Change Leader* (CL), *Change Agent* (CA), dan *Change Agent Koordinator* (CAK). *Culture Team* berperan memastikan efektivitas implementasi budaya perusahaan melalui pembentukan perilaku kerja yang selaras dengan nilai-nilai BRI dan mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sebagai *role model* di unit kerja, *Culture Team* berperan dalam mengawal implementasi nilai Brilian Way sehingga terbentuk perilaku kolektif yang produktif dan bertanggung jawab. *Change Leader* memegang peran strategis dalam menjadi role model sehingga *Culture Activation Program* (CAP) yang merupakan aktivitas yang mampu mendukung pencapaian KPI dapat berjalan di Unit Kerja. *Culture Team* memastikan nilai budaya terinternalisasi secara menyeluruh, sekaligus berfungsi sebagai penghubung komunikasi internal yang efektif antara manajemen dan unit kerja. Keberadaan *Culture Team* mendukung pengambilan keputusan yang adaptif dan penguatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Pekerja

BRI berkomitmen menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan melalui program *employee well-being* yang komprehensif serta penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ketat demi menjamin keamanan seluruh insan BRI di lingkungan kerja. Perusahaan juga senantiasa memelihara hubungan industrial yang harmonis dengan menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama (*collective bargaining*), sebagai fondasi dalam menciptakan iklim kerja yang kolaboratif, adil, dan sejahtera bagi seluruh karyawan.

Program Kesejahteraan Pekerja^[GRI 403-6, 403-7]

Perusahaan senantiasa mewujudkan 4 (empat) aspek BRILiaN *well-being*, yang terdiri dari aspek fisik, sosial, mental, dan finansial sejalan dengan *Employee Well-Being Policy*.

Kesejahteraan Fisik "Happy Physic"^[GRI 403-3, 403-6]

BRI memprioritaskan kesejahteraan fisik pekerja melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu, BRI memfasilitasi *healthy program initiative* berupa *General Medical Check-Up* kepada pekerja secara berkala dan kegiatan donor darah rutin setiap triwulan yang diselenggarakan oleh Human Capital Service Group bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).



Kesejahteraan Sosial "Happy Social"

BRI memenuhi kesejahteraan sosial pekerja dengan menciptakan lingkungan kerja positif, yang menghargai hubungan personal maupun profesional yang harmonis. Komitmen ini diwujudkan melalui BRILiaN *Community*, sebuah ekosistem yang menaungi 28 komunitas di bidang olahraga (*sport*), seni (*art*), serta sosial (*social*). Dikelola hingga tingkat regional, komunitas ini berfungsi sebagai wadah inklusif bagi Insan BRILiaN untuk menyalurkan hobi, memperkuat kolaborasi, dan membangun interaksi yang sehat di luar batasan formal pekerjaan.



Lebih dari sekadar penyaluran minat, BRILiaN *Community* memiliki peran strategis dalam:

- Mendukung *work-life balance*, sehingga menciptakan keseimbangan antara tuntutan profesional dan aktualisasi diri lewat penyaluran hobi dan minat.
- Memperkuat budaya kolaboratif dengan meningkatkan keterlibatan dan kekompakan antar unit kerja serta antar wilayah melalui aktivitas bersama dan ajang kompetisi.
- Menjadi saluran komunikasi informal antara pemimpin dan pekerja untuk menyampaikan informasi maupun aspirasi.
- Mengembangkan talenta non-profesional sekaligus sarana kampanye positif untuk memperkuat citra perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Melalui BRILiaN *Community*, setiap Insan BRILiaN diberikan ruang untuk bertemu, berbagi, dan belajar bersama. Ketika merasa dihargai dan terlibat secara aktif, pekerja dapat meningkatkan nilai diri dan kompetensinya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan inovasi, kinerja, dan produktivitas Insan BRILiaN secara keseluruhan.

Kesejahteraan Mental "Happy Mind"

BRI memberikan perhatian mendalam pada aspek kesejahteraan mental guna memastikan setiap pekerja mampu mengelola emosi, informasi, dan tekanan kerja secara sehat dan seimbang. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai kanal edukatif seperti webinar/Podcast maupun *Podcast* mengenai kesehatan mental yang disampaikan oleh psikolog. Lebih lanjut, BRI juga menyediakan Teman Cerita BRILiaN, yang merupakan layanan konseling *one-on-one* bersama psikolog, yang dapat dilakukan oleh Insan BRILiaN secara tatap muka ataupun daring.



Aspek Finansial "Happy Financial"

Melalui pemberian edukasi dan peningkatan literasi keuangan, BRI membekali pekerja dengan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi secara bijak. Inisiatif seperti webinar/Podcast Literasi Keuangan menyediakan akses pengetahuan mengenai perencanaan investasi, manajemen aset, hingga pengelolaan arus kas keluarga. Melengkapi pemahaman tersebut, BRI menyediakan *employee welfare credit* melalui produk BRI Guna Kawan sebagai fasilitas fleksibel yang dapat dioptimalkan pekerja untuk mendukung kebutuhan proteksi dan kesejahteraan mereka. Dengan pemahaman finansial yang kuat disertai dukungan yang tepat, Insan BRILiaN diharapkan dapat membangun kemandirian ekonomi dan menjalani kehidupan yang berkualitas tanpa tekanan finansial, sehingga mampu memberikan fokus dan kontribusi maksimal terhadap pencapaian strategis Perusahaan.



Our People: Insan BRILiaN

Tempat Kerja Ramah Keluarga ^[OJK F.21]

BRI memahami bahwa setiap insan BRILiaN merupakan bagian tidak terpisahkan dari keluarga mereka. Maka dari itu, Perusahaan berkomitmen lebih untuk menjadikan BRI sebagai tempat kerja yang ramah terhadap keluarga pekerja. BRI mendukung pekerja Perempuan melalui kebijakan dan dukungan fasilitas terkait kehamilan dan perawatan anak. Setiap karyawan pekerja perempuan mendapatkan hak cuti melahirkan selama tiga bulan yang dibayar penuh, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada persiapan proses persalinan hingga perawatan anak pada bulan awal kelahirannya.

BRI juga memberikan cuti ayah yang dibayar kepada pekerja laki-laki untuk mendampingi proses persalinan istri mereka paling lama tiga hari kerja. Untuk para pekerja yang menjadi ibu menyusui, kantor-kantor BRI memiliki ruang menyusui yang nyaman. Pada beberapa kantor BRI juga tersedia *Childcare facilities* berupa *daycare* yang memungkinkan pekerja menitipkan anak mereka selama bekerja.

Kebijakan cuti dan izin kerja untuk pekerja BRI memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan yang ketentuannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Insan BRILiaN dapat mengajukan cuti tahunan dan *mandatory leave* (wajib 5 hari berturut-turut sebagai bagian dari cuti tahunan). Selain itu, pekerja dapat mengambil cuti yang dibayar untuk keperluan lainnya, seperti pernikahan, menstruasi, serta merawat anggota keluarga yang sakit maupun menghadiri pemakaman keluarga.

Pengelolaan Waktu Kerja ^[OJK F.21]

Insan BRILiaN dengan tugas dan tanggung jawab tertentu dapat melakukan kerja jarak jauh (*remote working*) sehingga memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja tanpa perlu datang ke kantor. Selaras dengan inisiatif tersebut, salah satu manifestasi konkret dari evolusi *corporate culture* adalah penerapan *New Way of Working* yang merepresentasikan pergeseran dari model kerja tradisional menuju pendekatan yang lebih fleksibel, digital, dan berpusat pada manusia.

The New Way of Working mencakup fleksibilitas lokasi dan waktu kerja, optimalisasi teknologi digital, serta transformasi budaya organisasi yang mendukung kolaborasi jarak jauh dan kesejahteraan pekerja. *Work From Anywhere* (WFA), *Work From Home* (WFH) ataupun *Work From Satellite Office* (WFS) merupakan penerapan dari *The New Way of Working*. BRI memiliki fasilitas *Remote working place* (BRI Work) yang berlokasi di Gedung RO Jakarta 3, KC Bintaro, KCP Bekasi, dan KC Dewi Sartika Bogor. Lebih dari itu, BRI juga menerapkan *flexible working hours* untuk unit dan grup kerja divisi-divisi yang memiliki periode kerja intensif. Inisiatif ini mendukung kesejahteraan pekerja dan juga peran mereka untuk keluarganya.

Untuk memastikan pengelolaan waktu kerja yang tertib, BRI menerapkan sistem pencatatan kehadiran (*attendance system*) yang merekam data *clock-in* dan *clock-out* pekerja di seluruh unit operasional serta terintegrasi dengan sistem penggajian. Sistem ini digunakan untuk memantau jam kerja pekerja termasuk pengelolaan lembur sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, BRI juga menerapkan mekanisme lembur yang terstruktur

melalui sistem aplikasi pekerja yang memastikan adanya persetujuan atasan serta pemberian kompensasi yang sesuai bagi pekerja yang melaksanakan kerja lembur.

Pengelolaan Pengaduan Pekerja ^[GRI 2-26]

BRI menjamin perlindungan bagi pekerja dari tindakan diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, pelecehan seksual dan non-seksual, perundungan, serta berbagai bentuk kekerasan fisik, verbal, dan mental lainnya, sebagai bagian pengelolaan *human capital*. Penegasan ini juga telah tertuang dalam kebijakan maupun *webinar* mengenai *Respectful Workplace Policy* (RWP) yang perlu diterapkan dan ditekankan kepada insan BRILiaN di seluruh Unit Kerja. Pelaku yang merugikan pekerja akan diproses sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan jika terbukti, akan mendapatkan sanksi tegas hingga pemutusan hubungan kerja.

Pekerja dapat menyampaikan pengaduan dan pertanyaan melalui sarana komunikasi internal bagi pekerja seperti *Call Center Human Capital*, BRI Human Capital Assistant dan menu BASIC pada BRILiaN Apps yang dikelola oleh *Human Capital Service Group* (HSC) maupun sistem pelaporan pelanggaran perusahaan (*Whistleblowing System*). Jika diperlukan, pekerja dapat mengajukan sesi *coaching* dengan *coach* internal BRI ataupun sesi konsultasi dengan konselor eksternal. BRI menjamin kerahasiaan informasi yang disampaikan maupun identitas pekerja dalam proses pengaduan dan pengajuan sesi.

Keterlibatan Pekerja

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam menerapkan praktik pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan, Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi keterikatan karyawan melalui *Employee Engagement Survey* (EES). Pada *Employee Engagement Survey* (EES) yang dilakukan tahun 2024, sebanyak 73,4% pekerja BRI menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi di skala 3,51 dari 4. Hasil tersebut mewakili kepuasan kerja yang dirasakan para insan BRILiaN. Bersamaan dengan tingkat rata-rata kepuasan pekerja yang cukup tinggi, tingkat perputaran pekerja secara sukarela, hanya 1,24% pada tahun 2025, menandakan retensi pekerja yang lebih tinggi dibandingkan industri perbankan lainnya.

2024
Employee Engagement

 3,51/4,00

2024
Survey Scope

 73,4%

Pada tahun pelaporan ini, Perusahaan melakukan penyempurnaan metodologi, instrumen, dan kerangka analisis EES untuk meningkatkan kualitas pengukuran, termasuk aspek reliabilitas,

Our People: Insan BRILiaN

cakupan, serta keselarasan dengan arah strategi dan dinamika organisasi. Sehubungan dengan proses peningkatan tersebut, EES untuk sementara tidak dilaksanakan sebagai survei tahunan pada 2025 dan akan dilanjutkan kembali setelah metodologi diperbaharui.

Selama masa penyempurnaan metodologi, Perusahaan memastikan proses *employee listening* tetap berjalan melalui berbagai saluran, termasuk komunikasi internal, forum dialog karyawan-manajemen, mekanisme penyampaian aspirasi/ pengaduan, serta pemantauan indikator SDM yang relevan (antara lain tingkat perputaran pekerja). Fokus Perusahaan pada 2025 diarahkan pada penguatan tindak lanjut hasil EES periode sebelumnya, antara lain peningkatan efektivitas komunikasi internal, penguatan kapasitas kepemimpinan, serta optimalisasi program pengembangan karier dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan menargetkan pelaksanaan EES dengan metodologi yang telah diperbarui pada periode pelaporan berikutnya, dengan pengungkapan yang memperhatikan pembentukan baseline dan komparabilitas hasil.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja ^[OJK F.21]

Struktur Kebijakan K3 di BRI

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah diterapkan di seluruh unit kerja BRI. Departemen Business Continuity Management (BCM) & Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang merupakan bagian dari Operational Risk Group (ORD) bertanggung jawab atas seluruh aspek SMK3, termasuk penyusunan, penyempurnaan, dan implementasi K3. Secara khusus, *Group Head* ORD memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengawasan K3. Kebijakan SMK3 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keterlibatan pekerja melalui Surat Edaran Nomor: SE.12-DIR/MPE/09/2025 Buku 2 yang mencakup berbagai aspek terkait SMK3. ^[GRI 2-23, 403-1, 403-8]

Kebijakan SMK3 memuat ketentuan sebagai berikut.

1. ketentuan disusun berdasarkan peraturan pemerintah dan standar ISO 45001:2018 tentang *Occupational Health and Safety Management System* (OHSMS);
2. ketentuan berlaku untuk pekerja dan non-pekerja BRI, seperti pekerja mitra dan pemasok di lingkungan operasional BRI;
3. Ketentuan bertujuan untuk memitigasi dan mengendalikan risiko terkait K3 dari kegiatan operasional, seperti kecelakaan akibat kerja (KAK) dan penyakit akibat kerja (PAK).
4. kebijakan turut mengatur upaya mitigasi dan pengendalian K3 dalam proses pengadaan barang dan jasa perusahaan; dan
5. struktur koordinasi SMK3 terdiri dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Tim Tanggap Darurat.

Ketentuan dalam kebijakan SMK3 diturunkan dalam *standard operating procedure* (SOP) dengan nomor SO.09-ORD/03/2025. Aspek SMK3 yang diatur dalam SOP tersebut mencakup elemen-elemen berikut:

1. Penetapan Tim Tanggap Darurat di setiap Unit Kerja dilakukan secara berjenjang:
 - Melakukan sosialisasi K3 dan uji coba tanggap darurat secara berkala.
 - Uji coba tanggap darurat dilaksanakan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas

penerapan SMK3. Peninjauan dilakukan terhadap aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SMK3.

3. Pemantauan dan evaluasi K3 dilakukan secara berkala melalui kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian, dan audit internal terhadap implementasi SMK3.
4. Internalisasi budaya K3 disosialisasikan untuk memastikan pekerja memahami SMK3 sebagai hak dan kewajiban pekerja. Metode internalisasi yang dilakukan antara lain:
 - pelatihan tatap muka, webinar, pembelajaran daring;
 - media komunikasi lainnya (surat, infografis, video, podcast, dan lainnya);
 - uji coba tanggap darurat minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
5. Pencegahan dan pengendalian risiko kegiatan operasional, seperti kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa perusahaan.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan wadah kolaborasi strategis yang terdiri dari jajaran manajemen dan perwakilan pekerja. Pembentukan komite ini sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. P2K3 berperan sentral dalam:

- Memberikan rekomendasi strategis terkait Kebijakan K3 kepada manajemen.
- Melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja.
- Memastikan terciptanya komunikasi dua arah antara Perusahaan dan pekerja guna membangun budaya keselamatan yang proaktif.

Metrik dan Target K3 ^[GRI 403-9, 403-10]

BRI memandang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan operasional serta kesejahteraan Insan BRILiaN. Sebagai institusi yang bergerak di sektor perbankan, Bank mengklasifikasikan lingkungan kerjanya sebagai area dengan tingkat risiko kecelakaan kerja rendah.

Meskipun demikian, BRI tetap bertindak proaktif dalam mengidentifikasi dan memitigasi setiap potensi bahaya guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Melalui implementasi SMK3, Bank menjalankan prosedur *Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control* (HIRADC) secara berkala untuk memetakan risiko K3 di seluruh unit kerja, yang menjadi dasar dalam *setting up prioritization and action plans* guna memastikan pengendalian risiko dilakukan secara efektif dan terstruktur.

Mengingat mayoritas aktivitas operasional berpusat di gedung perkantoran dan kantor cabang, BRI memberikan perhatian khusus pada bahaya spesifik seperti korsleting listrik, risiko kebakaran, gempa bumi, hingga permukaan lantai yang licin. Sepanjang tahun 2025, tercatat terdapat 216 kecelakaan kerja di seluruh lokasi kerja BRI. Sebagai bentuk respons cepat dan upaya pencegahan di masa depan, Bank memperkuat sinergi dengan *Building Management* (BM) Sentra BRI Kantor Pusat dan *General Affairs* Kantor Cabang untuk mengimplementasikan langkah-langkah

Our People: Insan BRILiaN

pengendalian yang terukur. Upaya ini mencakup pemasangan material lantai *anti-slip* pada jalur *pedestrian outdoor* di sekitar Kantor Pusat, peningkatan frekuensi patroli kebersihan gedung dan kantor secara rutin, serta pelaksanaan simulasi (*drill*) kebakaran dan gempa bumi guna memastikan kesiapsiagaan seluruh Insan BRILiaN dalam menghadapi situasi darurat.

Selain aspek keselamatan fisik, BRI berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan para pekerjanya guna mencegah munculnya Penyakit Akibat Kerja (PAK). Melalui program pemeriksaan kesehatan rutin tahunan atau *Annual Medical Check-Up* (MCU), Bank memantau kondisi kesehatan pekerja secara berkala. Di lingkungan perkantoran, identifikasi risiko kesehatan difokuskan pada faktor ergonomi dan perilaku kerja yang berpotensi menyebabkan keluhan kesehatan ringan namun berdampak jangka panjang, seperti nyeri punggung atau *Carpal Tunnel Syndrome*. Dalam hal ini, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) aktif menyosialisasikan posisi kerja yang ergonomis sebagai langkah preventif harian.

Dalam aspek pencegahan penyakit menular, Bank mempertahankan standar kebersihan yang tinggi dengan mewajibkan penggunaan masker bagi pekerja yang sedang dalam kondisi kesehatan kurang prima saat berada di ruang kerja bersama. Kebijakan ini, ditambah dengan sosialisasi etika batuk atau bersin dan penyediaan akses layanan kesehatan melalui klinik perusahaan, merupakan langkah nyata Bank dalam memitigasi risiko infeksi pernapasan di lingkungan kerja. Lebih lanjut, BRI menyadari bahwa kesehatan mental merupakan komponen krusial dalam produktivitas pekerja. Oleh karena itu, Bank menyediakan layanan konseling profesional sebagai instrumen untuk memitigasi risiko psikososial akibat stres kerja, sehingga setiap Insan BRILiaN memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai keseimbangan antara profesionalisme dan kesejahteraan mental.

Tingkat Kecelakaan Kerja Pekerja Tetap dan Pekerja Tidak Tetap Tahun 2025 [\[GRI 403-9\]](#)

Keterangan	Jumlah Insiden (a)	Jam Kerja Total (b)	Rasio (per 1.000.000 Jam Kerja) [a/b x 1.000.000]
Fatalitas	0	161.742.896	0,00
Recordable Incidents	216		1,34

Keterangan :
Jam Kerja Total dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh pekerja, termasuk manajemen puncak (84.949 orang) dengan jumlah jam kerja selama hari kerja efektif tahun 2025 (238 hari kerja dikali 8 jam kerja).

Jumlah Penyakit Akibat Kerja Pekerja Tetap dan Pekerja Tidak Tetap Tahun 2025 [\[GRI 403-10\]](#)

Keterangan	Jumlah Penyakit Akibat Kerja	Jenis Penyakit Akibat Kerja
Fatalitas	0	N/A
Recordable Ill Health	0	N/A

Promosi K3 dan Budaya Tanggap Darurat [\[GRI 403-2\]](#) [\[GRI 403-4\]](#)

Promosi K3 berperan dalam membangun fondasi bagi budaya keselamatan dan tanggap darurat, mendorong kepatuhan terhadap standar dan peraturan K3, serta menciptakan lingkungan kerja

yang aman dan sehat bagi pekerja. Penyampaian sosialisasi *awareness* terhadap risiko K3 disampaikan kepada manajemen eksekutif hingga seluruh pekerja BRI. Selain itu, Perusahaan menjalankan pelatihan keselamatan secara rutin untuk memberi pemahaman protokol keselamatan secara nyata bagi semua pekerja, sehingga mereka mampu mengidentifikasi dan merespons potensi bahaya secara mandiri. [\[GRI 403-5\]](#)

Dalam upaya menerapkan budaya tanggap darurat, BRI menempatkan sarana penunjang K3 yang memadai, seperti penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kotak PK3 di setiap ruangan atau lokasi strategis. Perusahaan juga menyediakan Klinik BRIMEDIKA sebagai unit kesehatan pertama yang dapat diakses pekerja jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan wujud penerapan SMK3, BRI telah menjalankan sertifikasi penerapan SMK3 oleh PT Multi Sertifikasi Indonesia sejak Juni 2023 dengan 64 kriteria untuk kategori tingkat awal dan mendapatkan nilai 90,62%. Selanjutnya, pada Agustus 2024, BRI kembali menjalankan sertifikasi dengan 122 kriteria dan mendapatkan nilai 94,26%. Nilai ini termasuk ke dalam predikat "Memuaskan", sehingga BRI memperoleh Bendera Emas SMK3.

Pengelolaan Risiko Bencana

Bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh perubahan iklim juga turut menjadi risiko terkait keselamatan pekerja, terutama bagi mereka yang bekerja di lokasi-lokasi rentan. Maka dari itu, Perusahaan memastikan pemahaman *Emergency Response Plan* untuk semua pekerja serta memastikan kesiapan anggota Tim Manajemen Krisis (TMK), Tim Panitia Keselamatan Darurat (TPKD), *Building Management* (BM) Sentra BRI Kantor Pusat, dan *Floor Warden* dalam menghadapi kemungkinan bencana, termasuk kesiapan sarana evakuasi darurat seperti perahu karet di wilayah rawan banjir.

Pelatihan K3 [\[GRI 403-5\]](#)

BRI berkomitmen untuk membangun budaya K3 yang preventif dengan memastikan bahwa setiap pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menghadapi risiko kerja. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan K3 secara berkelanjutan bagi seluruh Insan BRILiaN, baik di kantor pusat maupun unit kerja operasional.

Program pelatihan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari prosedur dasar keselamatan perkantoran, ergonomi kerja, mitigasi risiko kebakaran, hingga teknik evakuasi darurat. Selain pelatihan yang bersifat umum, BRI juga menyelenggarakan sertifikasi khusus bagi anggota P2K3 dan Tim Tanggap Darurat guna memastikan mereka memiliki kompetensi teknis dalam menangani situasi krisis secara profesional.

Melalui edukasi yang rutin dan simulasi tanggap darurat (*drill*) yang dilakukan secara berkala, BRI memastikan bahwa setiap individu mampu mengidentifikasi potensi bahaya sejak dini, bertindak cepat saat terjadi keadaan darurat, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang nihil kecelakaan (*zero accident*).

Our People: Insan BRILiaN

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

Keterlibatan antara Perwakilan Pekerja dan Manajemen [GRI 2-30]

BRI mengedepankan dialog konstruktif dan berkelanjutan antara Manajemen dan perwakilan pekerja dalam Forum Kerja Sama Bipartit sebagai kunci stabilitas organisasi. Bentuk nyata dari keterlibatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merinci secara komprehensif hak serta kewajiban Perusahaan, Serikat Pekerja, dan seluruh pekerja.

Untuk memastikan relevansinya terhadap dinamika industri dan regulasi, PKB diperbarui secara berkala setiap dua tahun sekali melalui proses perundingan yang transparan dan inklusif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dengan menerapkan asas-asas hubungan industrial yang sehat. Melalui sinergi ini, Manajemen dan perwakilan pekerja bersama-sama menyelaraskan kepentingan strategis perusahaan dengan kesejahteraan pekerja, guna memitigasi risiko perselisihan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

Kebebasan Berserikat [3-3] [407-1]

BRI menjamin sepenuhnya hak setiap pekerja untuk berserikat dan berkumpul, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memandang Serikat Pekerja sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem kerja yang berkeadilan.

Implementasi kebebasan berserikat di BRI diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap aktivitas organisasi pekerja dan penyediaan ruang bagi Serikat Pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara formal maupun informal. Dengan menjamin hak untuk berorganisasi tanpa adanya intervensi atau diskriminasi, BRI berkomitmen menciptakan budaya kerja yang demokratis, di mana setiap suara pekerja memiliki wadah yang diakui secara legal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hubungan ketenagakerjaan.

Pada 31 Desember 2025, BRI memiliki 84.949 pekerja purna waktu, dengan 59.714 (70,29%) pekerja tetap, 24.539 (28,89%) pekerja kontrak, dan 696 (0,82%) pekerja *trainee*. BRI tidak memiliki pekerja paruh waktu atau pekerja dengan jam kerja tak tentu. Sebanyak 36.872 atau 43,76% pekerja tetap telah tergabung dalam Serikat Pekerja BRI, yang mencerminkan terpenuhinya hak pekerja dalam berserikat. Keikutsertaan pekerja dalam Serikat Pekerja sepenuhnya merupakan hak kebebasan pekerja, maka dari itu belum seluruh pekerja tetap bergabung dalam Serikat Pekerja. Meskipun demikian, seluruh hasil perundingan ketenagakerjaan yang disepakati Serikat Pekerja dan Perusahaan tetap berlaku bagi seluruh insan BRILiaN, tanpa memandang keanggotaan Serikat Pekerja. Hal ini memastikan bahwa standar perlindungan kerja, jaminan sosial, serta kebijakan remunerasi tetap konsisten dan inklusif bagi setiap individu di lingkungan BRI.

Pensiun dan Transisi Tenaga Kerja

BRI berkomitmen untuk mengelola siklus karier karyawan secara bertanggung jawab, termasuk dalam memantau tingkat perputaran karyawan (*turnover rate*) guna menjaga stabilitas organisasi

dan retensi talenta terbaik. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi jangka panjang, kami menyelenggarakan program pensiun yang komprehensif untuk memastikan kesiapan finansial dan transisi yang bermartabat bagi karyawan dalam memasuki masa pensiun.

Perputaran Pekerja

Sepanjang 2025, sebanyak 3.323 pekerja telah keluar dari BRI dengan rincian pada Tabel Tingkat Perputaran Pekerja di halaman [235](#).

Program Pensiun [GRI 401-2, 404-2]

BRI senantiasa berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan Pekerja baik saat masa aktif maupun saat berakhirnya hubungan kerja melalui program benefit yang meliputi:

1. program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
2. program Jaminan Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan);
3. program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan);
4. program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens);
5. program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP);
6. program Pensiun Iuran Pasti (PIIP); dan
7. program Tunjangan Hari Tua (THT).

Selain itu dalam masa persiapan pensiun, Pekerja berhak mendapatkan pendidikan kewirausahaan dari Perusahaan sebagai bekal memasuki dan mempersiapkan masa pensiun. Pendidikan kewirausahaan diberikan dalam bentuk program BLRP (Brilian Leader Retirement Program) untuk mempersiapkan Pekerja sebelum memasuki masa pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun. Pada tahun 2025, BRI melaksanakan program BLRP untuk pekerja yang memasuki masa pensiun. Adapun sampai dengan Desember 2025 tercatat sebanyak 741 Pekerja BRI terdaftar dalam program *development* persiapan masa pensiun BRI.

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja secara adil sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan persyaratan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan guna memastikan pemenuhan hak pekerja. Seluruh pekerja tetap wajib mengikuti program pensiun, dengan iuran yang bersumber dari kontribusi Perusahaan sebesar 75% dan pekerja sebesar 25%.

[GRI 201-3] Selain manfaat pensiun, pekerja juga memperoleh tanda jasa, cuti besar, program persiapan masa pensiun, kepesertaan BPJS Kesehatan pasca kerja, serta manfaat lainnya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas yang diberikan.

Estimasi nilai liabilitas imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang dihitung menggunakan *metode projected unit credit* yang dilakukan oleh aktuaris independen. Pada 31 Desember 2025, total liabilitas imbalan pasca kerja tercatat sebesar Rp19,9 triliun, yang mencakup liabilitas pensiun imbalan pasti dan tunjangan hari tua. [GRI 201-3]

Local Communities Around Us and Human Rights

Keterlibatan Masyarakat Lokal melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan aktivitas strategis bagi BRI dalam menciptakan nilai bersama (*creating shared value*). Melalui pemberdayaan kelompok rentan dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, inisiatif ini tidak hanya memitigasi risiko sosial tetapi juga memperkuat stabilitas industri keuangan secara nasional. Dengan memperluas akses layanan perbankan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan, BRI memastikan bahwa pertumbuhan bisnis jangka panjang senantiasa selaras dengan kesejahteraan masyarakat yang inklusif.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui BRI Peduli [GRI 403-2] [OJK F.25]

BRI Peduli merupakan instrumen penyelenggaraan program TJSL dengan tujuan mencegah, mengurangi dan memitigasi dampak operasional perusahaan sekaligus memperkuat kontribusi positif di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam pendekatannya, BRI Peduli mengusung prinsip keberlanjutan dan penciptaan nilai bersama (*creating shared value*) bagi masyarakat penerima manfaat dan perusahaan. BRI melaksanakan inisiatif pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi mereka. Perusahaan juga menjalankan mandat Peraturan Menteri BUMN untuk memfokuskan penyaluran TJSL pada bidang Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Seluruh manfaat TJSL yang perusahaan berikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran BRI dalam keuangan berkelanjutan.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) [OJK F.23]

BRI mengambil peran untuk memberi dukungan kepada kelompok rentan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di sekitar lokasi operasional perusahaan. Program-program TJSL BRI dijalankan untuk memperkuat ketahanan keuangan dan ekonomi masyarakat sekitar yang membutuhkan, sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis jangka panjang. Inisiatif TJSL BRI berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas akses mereka terhadap layanan perbankan. Upaya-upaya ini tidak hanya mendorong dampak sosial yang positif, tetapi juga memperkuat posisi BRI sebagai mitra keuangan yang terpercaya.

Tata kelola TJSL BRI dijalankan melalui visi untuk menjadi yang terdepan dalam praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan demi memberikan nilai dan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Visi ini diwujudkan melalui misi strategis yang mengintegrasikan pengelolaan TJSL dengan tata kelola yang baik dan pengelolaan yang terukur untuk menciptakan *blended value*, yakni perpaduan nilai ekonomi dan sosial, sehingga tidak hanya mendukung keberlanjutan bisnis, tetapi juga memperkuat reputasi BRI di mata publik. Dalam implementasinya, program BRI Peduli berpijak pada tiga pilar utama, yaitu pilar Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, yang seluruhnya dijalankan dengan panduan pilar Hukum guna memastikan dampak yang luas, terencana, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang kuat.



Visi

Menjadi yang terdepan dalam praktik TJSL perusahaan untuk memberikan nilai & manfaat yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.



Misi

- Melaksanakan TJSL perusahaan untuk mendukung bisnis BRI dengan tata kelola (*governance*) dan pengelolaan (*management*) yang baik, terencana, strategis, berdampak luas, dan berkelanjutan.
- Menciptakan perpaduan nilai (*blended value*) bagi BRI dan pemangku kepentingan.
- Meningkatkan reputasi BRI di mata pemangku kepentingan.



Pilar

Implementasi BRI Peduli TJSL mengacu pada 3 (tiga) pilar utama, yakni pilar Sosial, pilar Ekonomi, dan pilar Lingkungan, serta dipandu oleh pilar Hukum.

Perencanaan Program

Pengelolaan Program BRI Peduli dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk memastikan keberhasilan program dapat dicapai dengan baik dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

Perencanaan Program BRI Peduli mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-01/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diadopsi ke dalam aturan internal perusahaan melalui Surat Edaran Nomor: SE.24-DIR/CSC/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BRI memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas program agar dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyusunan rencana Program BRI Peduli TJSL dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. dampak dan risiko dari aktivitas perusahaan;
2. kebutuhan dan potensi yang timbul;
3. keunggulan dan kearifan lokal;
4. orientasi keberlanjutan dan dampak yang ingin diharapkan; dan
5. fokus dan arah pembangunan berkelanjutan.

BRI juga mengajak insan BRILiaN dalam setiap pelaksanaan program TJSL. Hal tersebut menumbuhkan kepedulian pekerja terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar unit kerja BRI. Lebih lanjut, untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan program BRI Peduli, BRI telah menyusun peta jalan yang dirancang sebagai panduan agar program yang dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran dengan memprioritaskan bidang pendidikan, lingkungan dan pengembangan UMKM yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Program BRI Peduli.

Local Communities Around Us and Human Rights

Monitoring dan Evaluasi [OJK F.23] [GRI 203-1, 413-1, 413-2]

BRI menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat mengenai perencanaan program TJSL yang tepat di daerah mereka. Selanjutnya, Perusahaan juga mensosialisasikan pelaksanaan program agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Secara berkala, BRI melakukan pemantauan dan evaluasi guna menjaga efektivitas pelaksanaan, serta sebagai masukan dalam meningkatkan pelaksanaan program TJSL di masa mendatang. Pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas dampak program dilakukan dengan pendekatan *Social Return on Investment* (SROI) dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai berikut.

Nama Program	Nilai (SROI)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		IKM Pelayanan	Mutu Pelayanan
Bantuan Sarana Pasar Gentan	18,22	90,57%	Sangat Baik
Pelatihan dan Sertifikasi Eksport	14,15	85,83%	Baik
Bantuan Alat Pengelolaan Kopi Kelompok Tani Ijen Tourism	7,35	94,76%	Sangat Baik
Bantuan Pengembangan Daerah Wisata Kya-Kya	4,39	88,66%	Sangat Baik
Bantuan Sarana dan Prasarana Ekosistem Urban Farming Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	4,36	85,17%	Baik
Bantuan Pengembangan Potensi Hijau Kawasan Den Bukit Buleleng	4,23	86,54%	Sangat Baik
Bantuan Pembangunan Penataan Obyek Wisata Air Terjun Taman Sari Waterfall, Kec. Gianyar	4,13	95,81%	Sangat Baik
Bantuan Pengadaan Mesin Pengolahan Hasil Panen Ubi Jalar KWT Sri Mandiri Sembawa Kecamatan Jalaksana Kuningan	3,98	96,69%	Sangat Baik
Bantuan Alat Membatik Gadisku 2 UPT PSBR Blitar	3,92	97,78%	Sangat Baik
Apresiasi Dana Pendidikan Desa BRILiaN Sigumpar Julu, Kabupaten Toba	3,09	94,61%	Sangat Baik

Selama tahun 2025, BRI tidak menerima keluhan dan pengaduan masyarakat secara formal terkait dampak kegiatan BRI. [F.24]

Pencapaian Program

Program BRI Peduli mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak melalui penghargaan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut.

Kategori	Penyelenggara Award	Program	Bulan Perolehan
<i>Sustainable Impact in Women-Led Urban Agriculture</i>	Tribun Network - Lokal Asri	BRInita	Mei 2025
TOP CSR AWARD 2025	Top Business	BRI Peduli	Juni 2025
TJSL & CSR AWARD	BUMN Track	BRI Peduli	Juni 2025
<i>Banking, Finance, Insurance Category</i>	<i>The International CSR Excellent Award</i>	<i>Philanthropy</i>	Juli 2025
<i>Banking, Finance, Insurance Category</i>	<i>The International CSR Excellent Award</i>	<i>Socio-economic</i>	Juli 2025
<i>Banking, Finance, Insurance Category</i>	<i>The International CSR Excellent Award</i>	<i>Equal Opportunities</i>	Juli 2025
Silver SDGs	Nusantara CSR Award 2025	- Yok Kita Gas - BRInita - Grow & Green - Ini Sekolahku - AURA	Juli 2025
Penggerak Ekonomi Hijau Inklusif	Liputan 6 Award	<i>Grow & Green</i>	Agustus 2025
<i>Best Excellence Practices Awards</i>	<i>Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) 2025</i>	- Yok Kita Gas - BRInita - Desa BRILiaN	November 2025

Local Communities Around Us and Human Rights

Daftar Program Unggulan [OJK F.23] [GRI 203-2]

Sosial



Pilar Sosial

Pilar Sosial untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program

- Program BRI Peduli “Ini Sekolahku”
- Cegah *Stunting* Itu Penting Dalam Rangka Hari Gizi Nasional 2025
- Program BRI Peduli Beasiswa Pelajar 2025

Ekonomi



Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

Program

- Pelatihan Ekspor bagi UMKM
- Bantuan Sarana Prasarana Pasar Gentan Yogyakarta
- Bantuan Alat Pengelolaan Kopi Kelompok Tani Ijen

Lingkungan



Pilar Lingkungan

Pilar Lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Program

- Jaga Sungai Jaga Kehidupan dalam rangka Hari Sungai Sedunia Tahun 2025
- BRI Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Kelola Sampah) Waste Management Journey
- Program BRI Peduli *Grow & Green* Transplantasi Terumbu Karang

Hukum dan Tata Kelola



Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Program

Local Communities Around Us and Human Rights

Pilar Sosial [OJK F-25] [GRI 203-2]

Pemenuhan Hak Dasar Manusia yang Berkualitas Secara Adil dan Setara



Program Sosial 2025	Tanggal	SDGs
BRI Peduli menyalurkan bantuan untuk SD Negeri Gambiran I, Prigen, Pasuruan	15 Januari 2025	
BRI <i>Regional Office</i> Bandar Lampung bersama IWABRI menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Teluk Betung Selatan	20 Januari 2025	 
Program "Cegah <i>Stunting</i> Itu Penting" untuk Memperingati Hari Gizi Nasional	25 Januari 2025	 
BRI Peduli menyalurkan paket sembako bagi warga di Tangerang dan Singkawang dalam rangka Tahun Baru Imlek	29 Januari 2025	 
BRI Peduli menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir Jabodetabek	5 Maret 2025	 
BRI membagi 100.000 paket sembako di Bulan Ramadan	27 Maret 2025	 
BRI Peduli berbagi kepada Masyarakat Desa Adat Soka, Tabanan dalam rangka Hari Raya Nyepi	29 Apr 2025	 
BRI mendukung kualitas pendidikan Indonesia melalui BRI Peduli - Ini Sekolahku	2 Mei 2025	

Program Sosial 2025	Tanggal	SDGs
BRI Peduli menyalurkan paket sembako bagi umat Buddha di Tangerang pada Hari Raya Waisak	9 Mei 2025	 
BRI menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memastikan layanan tetap berjalan pascagempa di Bengkulu	2 Juni 2025	
BRI Peduli menyalurkan bantuan pemberdayaan usaha bagi Peternak Domba Garut di Desa Sukalaksana	6 Juni 2025	 
BRI Peduli mendukung pendidikan karakter anak lewat kegiatan agro edukasi bagi siswa/i sekolah dasar pada Hari Anak Nasional	23 Juli 2025	 
BRI memberi apresiasi Anggota Paskibraka dan Tenaga Pendukung Paskibraka Nasional	20 Agustus 2025	
BRI Peduli menyalurkan bantuan tanggap bencana banjir Bali dan NTT	12 September 2025	
BRI Peduli memperkuat infrastruktur kesehatan lewat penyaluran ratusan unit ambulans di seluruh Indonesia selaras dengan Asta Cita	12 November 2025	
BRI Peduli mengapresiasi peran Guru dalam dunia pendidikan dan menyalurkan bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung untuk memperingati Hari Guru Nasional	25 November 2025	

Local Communities Around Us and Human Rights

Program Unggulan Pilar Sosial



1. BRI Peduli "Ini Sekolahku" Program

BRI turut berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif, sekaligus memperluas akses pendidikan yang inklusif. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, BRI melanjutkan program BRI Peduli "Ini Sekolahku" pada tahun 2025 di 12 (dua belas) titik sekolah di wilayah Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Banjarmasin dan Denpasar.

Program ini dirancang untuk menjawab dua kebutuhan utama, yaitu peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta dukungan pembiayaan melalui beasiswa. Pada aspek infrastruktur, BRI melakukan pembangunan dan renovasi gedung sekolah serta penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, termasuk di wilayah terpencil. Pada aspek dukungan pendidikan, BRI juga menyalurkan beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan dan berprestasi serta berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.



2. "Cegah Stunting itu Penting" Dalam Rangka Hari Gizi Nasional 2025

Program BRI Peduli "Cegah Stunting Itu Penting" dilaksanakan sebagai bentuk intervensi sosial terarah untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan anak dan penguatan layanan kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif, pelaksanaan program ini relevan dengan kondisi masyarakat serta mendukung keberlanjutan upaya pencegahan *stunting* di tingkat komunitas. Implementasi program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, perluasan akses anak terhadap asupan gizi yang memadai, serta pengurangan tekanan ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional 2025, BRI melaksanakan Program "Cegah Stunting Itu Penting" di wilayah Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, Manado, Padang, dan Malang. Di sisi lain, praktik kolaborasi yang terbangun melalui program ini memperkuat ekosistem penanganan *stunting* yang terintegrasi di tingkat lokal.



3. Program BRI Peduli "Beasiswa Pelajar 2025"

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa karena melalui pendidikan individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas turut membentuk sumber daya manusia unggul yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, BRI melalui Program BRI Peduli menyelenggarakan penyaluran bantuan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan/atau berasal dari keluarga kurang mampu kurang lebih sebanyak 200 siswa di wilayah Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Banjarmasin dan Denpasar.

Dukungan terhadap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan yang disertai dengan penyediaan akses beasiswa diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, sehingga memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi generasi muda. Program ini merupakan salah satu wujud kontribusi BRI untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Local Communities Around Us and Human Rights

Pilar Ekonomi^{[OJK F.25] [GRI 203-2]}

Penciptaan Peluang Kerja, Usaha, dan Industri yang Inklusif



Program Ekonomi 2025	Tanggal	SDGs
BRI Peduli memberi bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa BRILiaN Jatihurip	21 Maret 2025	 
BRI memberdayakan Wanita Indonesia melalui Program BRInita	21 April 2025	  
BRI Peduli memberikan internet gratis di SMP Negeri 6 Bayan Lombok Utara untuk pemerataan akses digital di wilayah 3T	20 Mei 2025	 
BRI kembali menggelar pelatihan ekspor untuk meningkatkan daya saing UMKM tembus pasar global	15 Agustus 2025	 
BRI Peduli membekali Pekerja Migran Indonesia di Lombok NTB dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan peluang usaha baru	08 Oktober 2025	 
BRI Peduli mendukung ketahanan pangan melalui Panen Raya BRInita	16 Oktober 2025	  

Local Communities Around Us and Human Rights

Program Unggulan Pilar Ekonomi



1. "Pelatihan Ekspor" bagi UMKM

BRI sebagai BUMN dengan fokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong pelaku usaha, termasuk segmen mikro dan ultra mikro, agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Pelatihan Ekspor yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan UMKM dalam memasuki pasar global. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan usaha melalui peningkatan daya saing produk, perluasan akses pasar internasional, serta penguatan pemahaman pelaku usaha terhadap proses ekspor. Melalui program ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung promosi produk dan budaya Indonesia di pasar global. Program ini sekaligus mempertegas peran BRI sebagai mitra pertumbuhan UMKM dalam memperkuat kontribusi sektor usaha rakyat terhadap perekonomian nasional.



2. Bantuan Sarana Prasarana Pasar Gentan Yogyakarta

Pasar tradisional merupakan pilar penting dalam perekonomian rakyat, namun seringkali menghadapi tantangan persaingan dari pasar modern. Pasar Gentan di Kecamatan Ngaglik, Sleman, adalah salah satu pasar harian yang menjadi andalan bagi banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Menyadari peran vital pasar tradisional dalam ekosistem ekonomi lokal, BRI bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk melakukan revitalisasi fasilitas di Pasar Gentan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar. Revitalisasi ini bertujuan meningkatkan daya saing pasar melalui perbaikan fasilitas fisik, menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman bagi pedagang dan pengunjung, serta mendukung promosi dan visibilitas pedagang agar aktivitas perdagangan semakin berkembang. Upaya ini sekaligus memperkuat peran Pasar Gentan sebagai pusat ekonomi komunitas lokal yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.



3. Bantuan Alat Pengelolaan Kopi Kelompok Tani Ijen

Kawasan Agrowisata Ijen di Banyuwangi merupakan salah satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dengan potensi unggulan kopi yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi sekaligus daya tarik wisata berbasis komunitas. Dalam mendukung pengembangan potensi tersebut, BRI berkolaborasi dengan *Ijen Tourism Cluster* (ITC) untuk memperkuat kapasitas petani dan pelaku usaha kopi, mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga dukungan sarana pengolahan, sehingga pelaku usaha tidak hanya menjual biji kopi mentah tetapi mampu menghasilkan produk kopi olahan bernilai tambah. Program ini turut memperkuat branding "Kopi Banyuwangi" sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Local Communities Around Us and Human Rights

Pilar Lingkungan [OJK F.10] [GRI 203-2]

Penataan dan Pelestarian Ekosistem Lingkungan secara Berkelanjutan



2025 Environmental Programs	Tanggal	SDGs	2025 Environmental Programs	Tanggal	SDGs
Program BRI Menanam - "Grow & Green" di Tanjung Prepat Berau menyerap 2.987,62 kg CO ₂ e per tahun dan mendorong ekonomi masyarakat	7 Februari 2025	 	BRI Menanam – "Grow & Green" mempertegas komitmen dalam menjaga ekosistem lingkungan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia	5 Juni 2025	  
BRI Menanam – "Grow & Green" Transplantasi Terumbu Karang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem laut dan mendorong pendapatan nelayan di Pulau Maratua	14 Februari 2025	 	BRI mendorong kesadaran masyarakat melalui pengelolaan sampah guna menjaga ekosistem sungai untuk memperingati Hari Sungai Nasional	26 Juli 2025	  
BRI Peduli memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dengan aksi nyata bersama masyarakat dan siswa	21 Februari 2025	 	BRI melakukan penanaman <i>mangrove</i> di Muara Gembong, Bekasi pada Hari Mangrove Sedunia	26 Juli 2025	  
BRI Menanam - "Grow & Green" Transplantasi Terumbu Karang melestarikan ekosistem laut di Gili Matra NTB	1 April 2025	 	BRI Peduli melestarikan sungai dalam rangka Hari Sungai Sedunia	23 September 2025	 
BRI Menanam - "Grow & Green" di Pulau Kapoposang berkolaborasi untuk ekosistem laut yang lestari	28 April 2025	 	BRI dan Generasi Muda menjaga ekosistem lingkungan melalui penanaman <i>mangrove</i> dan pengelolaan limbah plastik pada Hari Aksi Iklim Sedunia	24 Oktober 2025	 

Local Communities Around Us and Human Rights

Program Unggulan Pilar Lingkungan



1. "Jaga Sungai Jaga Kehidupan" dalam rangka Hari Sungai Sedunia Tahun 2025

Program "Jaga Sungai Jaga Kehidupan" merupakan wujud komitmen BRI dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem sungai secara berkelanjutan melalui kolaborasi bersama Sungai Watch. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga pada peningkatan kesadaran ekologis masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas air, keseimbangan ekosistem perairan, dan menekan emisi CO₂. Perbaikan kualitas lingkungan sungai turut berkontribusi pada pengurangan dampak pencemaran, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta mendukung keberlanjutan ekosistem bagi masyarakat sekitar. Manfaat yang dirasakan komunitas antara lain peningkatan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko bencana, serta mendukung terciptanya peluang ekonomi hijau dan kualitas hidup yang lebih berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif, program ini mendorong perilaku ramah lingkungan serta memperkuat tata kelola sungai berbasis komunitas.



2. BRI Peduli "Yok Kita GAS (Gerakan Kelola Sampah)" Waste Management Journey

Penumpukan sampah masih menjadi tantangan lingkungan di berbagai wilayah akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan sampah. Menjawab kondisi tersebut, program ini mendukung pembentukan dan penguatan TPS 3R serta Bank Sampah di lokasi terpilih yang digerakkan oleh *local heroes*, dengan tujuan mengurangi pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Program ini telah dilaksanakan di beberapa beberapa pasar dan difokuskan pada peningkatan kapasitas melalui edukasi pemilahan sampah, literasi pengelolaan sampah, serta pemahaman nilai ekonomi sampah, yang didukung oleh penguatan infrastruktur dan sarana prasarana. Bantuan yang diberikan meliputi mesin pengolahan sampah, kendaraan operasional Bank Sampah, pembangunan fasilitas maggot *Black Soldier Fly* (BSF), tempat sampah, alat keselamatan kerja, seragam, serta perlengkapan pendukung lainnya. Melalui inisiatif ini, Bank Sampah diharapkan mampu berperan optimal dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, meningkatkan nilai ekonomi sampah, dan mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara berkelanjutan.



3. Program BRI Peduli "Grow & Green Transplantasi Terumbu Karang" [OJK F.9, F.10]

BRI melalui program "Grow & Green" melanjutkan inisiatif konservasi lingkungan melalui kegiatan transplantasi terumbu karang di Pulau Maratua (Kalimantan Timur), Pulau Kapoposang (Sulawesi) dan Gili Matra (Nusa Tenggara Barat). Program ini bertujuan memulihkan ekosistem bawah laut guna meningkatkan keanekaragaman hayati sekaligus menopang keberlanjutan aktivitas perikanan dan pariwisata bahari yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Melalui kolaborasi dengan komunitas lokal dan mitra lingkungan, "Grow & Green" mengintegrasikan upaya pelestarian ekosistem laut dengan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Program ini menegaskan komitmen BRI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan ekosistem pesisir serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Local Communities Around Us and Human Rights

Komitmen terhadap HAM

Kebijakan Hak Asasi Manusia [GRI 2-23]

BRI menyadari bahwa terdapat risiko terkait HAM yang mungkin terjadi pada pekerja dalam rantai pasok perusahaan, seperti *Occupational Health and Safety, Forced Labor, Discrimination, Right to Collective Bargaining, Freedom of Association, Child Labor & Human Trafficking*. Perusahaan berkomitmen untuk mengintegrasikan risiko-risiko tersebut dalam manajemen risiko serta pelaksanaan inisiatif sosial dan tata kelola.

Penerapan berbagai kebijakan terkait HAM dalam kegiatan operasional BRI diatur melalui Kebijakan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Praktik Ketenagakerjaan yang dapat diakses pada tautan berikut https://www.ir-bri.com/esg/human_right_commitment.html. Kebijakan-kebijakan ini mengatur aspek HAM bagi pekerja BRI maupun untuk pekerja pemasok dan mitra perusahaan. Hal ini memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diterapkan secara konsisten, tidak hanya di dalam organisasi, tetapi juga sepanjang rantai pasok dan hubungan kemitraan bisnis.

Lebih dari itu, BRI berupaya mendukung komitmen global terhadap HAM dengan mematuhi sepuluh prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs on BHR), yang juga dikenal sebagai 10 prinsip UNGC. Komitmen ini mencakup perlindungan HAM dalam aktivitas operasional dan bisnis, termasuk tenaga kerja, mitra bisnis, hingga rantai pasok perusahaan. Informasi terkait komitmen dan tindak lanjut BRI terhadap UNGPs on BHR dapat ditemukan pada laman UN Global Compact (<https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/156911-PT-Bank-Rakyat-Indonesia-Persero-Tbk->). [FN-CB-410a.2]

Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia [GRI 2-24]

BRI senantiasa berupaya untuk memperluas pemahaman terkait HAM untuk mendorong komitmen pelaksanaannya melalui:

1. menyelenggarakan pelatihan dan komunikasi secara berkala bagi pekerja untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia;
2. mengomunikasikan implementasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan melalui berbagai media/sarana komunikasi internal; dan
3. melaporkan praktik penghormatan hak asasi manusia kepada pemangku kepentingan eksternal melalui laporan keberlanjutan.

Penilaian Risiko dan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia [OJK F.19] [GRI 408-1, 409-1]

BRI menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam mengelola kemungkinan risiko terhadap pemenuhan HAM pekerja di seluruh proses bisnis perusahaan. Untuk mencapai hal ini, BRI melakukan uji tuntas HAM dengan mengidentifikasi dan menilai potensi dampak serta risiko dari setiap aktivitas operasional BRI, rantai nilai atau kegiatan lain yang terkait dengan bisnis BRI, termasuk hubungan bisnis baru (merger dan akuisisi) dengan memberi perhatian lebih pada kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan memprioritaskan upaya tersebut, BRI memperkuat komitmennya untuk menciptakan ekosistem bisnis yang menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia, terutama bagi pihak-pihak yang rentan terhadap risiko HAM.

Pemegang Hak	Kelompok Rentan	Risiko terkait HAM
 Pekerja	• Pekerja Perempuan • Pekerja Pidak Tetap • Pekerja Penyandang Disabilitas • Pekerja anak	 • <i>Occupational Health and Safety</i> • <i>Forced Labor</i> • <i>Discrimination</i> • <i>Right to Collective Bargaining</i> • <i>Freedom of Association</i> • <i>Child Labor & Human Trafficking</i>
 Pemasok/Pihak ketiga	• Tenaga Kerja Pemasok • Tenaga Kerja Perempuan	 • Diskriminasi, Pelecehan, dan Kekerasan • Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Kebebasan Berserikat • Keragaman, Kesetaraan dan Inklusi • Kerja Paksa • Tenaga Kerja Anak • <i>Human Trafficking</i>

BRI telah melakukan penilaian HAM pekerja pada aktivitas bisnis internal dan eksternal organisasi sejak 2023. Penilaian HAM dilakukan secara berkala berdasarkan prioritas dan kebutuhan Perusahaan untuk mengidentifikasi risiko terkait HAM. Proses penilaian HAM dilakukan dengan menetapkan frekuensi (kemungkinan) dan dampak (keparahan) dari setiap risiko terkait HAM yang teridentifikasi, sehingga memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap risiko bawaan (*inherent risk*) beserta risiko yang masih ada (*residual risk*).

Pelaksanaan uji tuntas HAM di lingkup internal dan eksternal organisasi mengacu pada Surat Direksi No.B.1470-DIR/ ESG/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Kebijakan Hak Asasi Manusia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui kerangka kerja terstruktur yang meliputi:

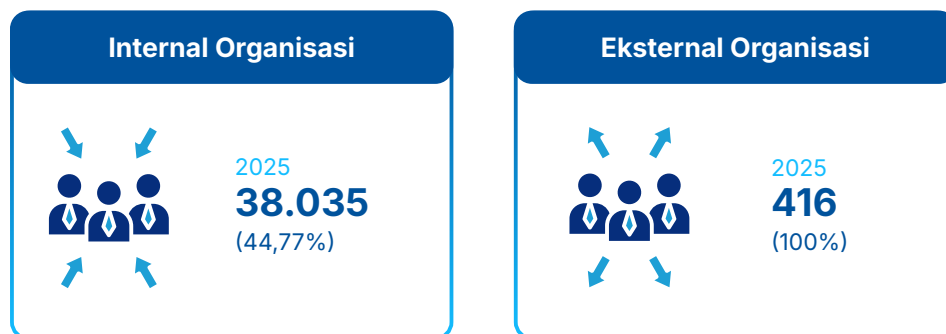
1. komitmen HAM;
2. identifikasi dampak dan risiko;
3. penilaian dampak dan risiko;
4. mitigasi dan remediasi; dan
5. komunikasi dampak.

Secara khusus, BRI telah melaksanakan proses uji tuntas HAM yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui aplikasi PRISMA. Berdasarkan proses uji tuntas tersebut, BRI mendapatkan kategori Hijau, yang menandakan kepatuhannya terhadap Standar Indikator Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Local Communities Around Us and Human Rights

Penilaian Hak Asasi Manusia

BRI melaksanakan *self-assessment* hak asasi manusia terhadap karyawan dan pemasok pada tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Melalui proses ini, BRI mengidentifikasi berbagai risiko utama terkait hak asasi manusia serta merumuskan langkah-langkah mitigasi dan remediasi yang terstruktur untuk mengelola dan menangani risiko tersebut secara efektif. Berikut merupakan hasil *self-assessment* hak asasi manusia terhadap karyawan dan pemasok:



Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian dampak dan risiko HAM yang dilakukan sepanjang periode pelaporan pada 416 pemasok, tidak ditemukan adanya insiden maupun operasional pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap praktik pekerja anak maupun kerja paksa. Upaya pengawasan ini terus diperkuat melalui evaluasi berkala guna memastikan bahwa seluruh mitra bisnis tetap selaras dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijunjung oleh BRI. Sebagai langkah preventif dan syarat mutlak dalam menjalin kerja sama, BRI mewajibkan seluruh pemasok untuk menandatangani pakta integritas serta mematuhi batas usia kerja minimum dan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. ^[GRI 408-1, 409-1]

Pemantauan Pengelolaan Hak Asasi Manusia

Hasil identifikasi dan penilaian dampak dan risiko HAM dalam proses uji tuntas HAM yang dilakukan secara sistematis dan berkala memberi gambaran mengenai aspek-aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam memenuhi HAM pekerja internal dan eksternal. Secara internal, BRI berkomitmen untuk tidak merekrut pekerja anak maupun menerapkan kerja paksa di seluruh lingkungan operasional perusahaan. BRI memprioritaskan terciptanya lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan kondusif bagi semua insan BRILiaN dengan melindungi hak-hak dasar pekerja, menyediakan peluang untuk pengembangan kompetensi profesional, serta mempromosikan nilai keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Selain itu, BRI telah menetapkan peraturan yang jelas untuk mencegah diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Untuk membina hubungan kerja yang harmonis, BRI memastikan kebebasan berserikat bagi pekerja, termasuk berpartisipasi dalam Serikat Pekerja. Privasi pekerja juga dilindungi dengan ketat sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap penerapan lingkungan kerja yang etis.

Dalam memastikan HAM dalam rantai pasok, BRI menjunjung praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan melakukan kerja sama hanya terhadap pemasok, mitra kerja, dan nasabah peminjam yang menunjukkan komitmen terhadap operasi yang etis dan berkelanjutan. Untuk memperkuat hal ini, BRI telah merumuskan Kebijakan Rantai Pasok yang mengatur persyaratan yang diterapkan untuk mitra kerja, mencakup praktik bisnis yang beretika, pemenuhan HAM dan hak buruh, pertimbangan dampak lingkungan, privasi data, kesehatan dan keselamatan, serta keberagaman pemasok. Selain itu, penilaian terhadap risiko HAM dari penugasan dan evaluasi pengendalian pemasok dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan standar HAM BRI.

Mitigasi dan Remediasi Hak Asasi Manusia ^[GRI 2-26]

BRI telah menerapkan langkah-langkah proaktif untuk memitigasi pelanggaran HAM dalam kegiatan operasional dan bisnis di seluruh unit kerja BRI. Upaya mitigasi dirancang untuk menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kegiatan operasional dan bisnis telah sejalan dengan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs BHR). Meskipun demikian, BRI juga menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani isu-isu hak asasi manusia dan memfasilitasi proses pemulihan dari dampak buruk yang timbul melalui tindakan remediasi:

- permohonan maaf;
- restitusi;
- rehabilitasi;
- jaminan tidak terulang kembali;
- kompensasi finansial/non-finansial; serta
- upaya hukum.

Pengaduan terkait pelanggaran HAM dapat disampaikan pada sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS). Sistem pelaporan pelanggaran menjamin kerahasiaan identitas dan perlindungan bagi pelapor. Laporan terkait pelanggaran HAM yang disertai bukti pendukung dapat diajukan oleh pekerja BRI, pelanggan, mitra kerja, atau pemangku kepentingan eksternal melalui sarana berikut.

Whistleblowing System

- ☎ 0811 8113 5306
- @ bri-whistleblowingsystem@tipoffs.info
- ✉ PO Box 1450
JKP 10014
- 🌐 <https://idn.deloitte-halo.com/bri-whistleblowingsystem>

Seluruh laporan yang disertai dengan bukti pendukung akan diproses melalui investigasi yang menyeluruh, independen, dan objektif. Apabila hasil investigasi menyatakan laporan tersebut terbukti, BRI akan mengenakan sanksi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. ^[GRI 406-1]

Responsible Artificial Intelligence

Kebijakan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab

BRI menyadari bahwa integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dapat mendukung pertumbuhan dalam strategi BRIVolution Reignite. Guna memastikan teknologi kecerdasan buatan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan memitigasi risiko, BRI menetapkan kebijakan *Responsible AI* yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut.

Menghormati privasi data dalam penggunaan dan/atau pengembangan AI

BRI menempatkan perlindungan data pelanggan sebagai prioritas tertinggi. Setiap pengembangan model AI, termasuk platform BRIBrain yang menyediakan implementasi AI dalam lingkup internal, wajib mematuhi kebijakan perlindungan privasi nasabah yang selaras dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Standar Internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013. Informasi identitas pribadi nasabah (*personally identifiable information*) untuk pelatihan model AI dilakukan melalui penyamaran data (*data masking*) otomatis dengan metode enkripsi guna menjamin kerahasiaan informasi pribadi pelanggan yang sensitif.

Menghindari potensi bias dalam penggunaan dan/atau pengembangan AI

Dalam mendukung inklusi keuangan, BRI memastikan bahwa pemanfaatan algoritma untuk keperluan strategis seperti penilaian kredit dirancang secara etis. Perusahaan secara proaktif memitigasi risiko bias algoritma untuk memastikan bahwa penilaian kredit dilakukan secara objektif, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, wilayah, atau latar belakang sosial nasabah, sejalan dengan prinsip perlakuan adil dalam Kode Etik Bank.

Menjaga pengawasan dan memungkinkan intervensi manusia (*human-in-the-loop*) untuk keputusan krusial

Meskipun AI dan *Robotic Process Automation* (RPA) telah meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, BRI tetap menerapkan prinsip *Human-in-the-Loop* untuk keputusan krusial seperti persetujuan kredit bernilai tinggi atau penanganan sengketa nasabah yang kompleks. Verifikasi akhir tetap dilakukan oleh Insan BRILian untuk menjamin empati dan pertimbangan kontekstual yang tidak dapat digantikan oleh kecerdasan buatan dan otomatisasi.

Memastikan transparansi sistem AI dan kejelasan hasil/keputusan yang dihasilkan AI

BRI memastikan bahwa setiap hasil atau keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat ditelusuri dan dijelaskan secara memadai oleh tim internal terkait, terutama ketika berdampak pada layanan yang diberikan kepada nasabah. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa setiap keputusan otomatis memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menetapkan akuntabilitas yang jelas atas hasil yang dihasilkan oleh model/perangkat AI

Akuntabilitas AI diintegrasikan ke dalam tata kelola Teknologi Informasi di bawah pengawasan *Information Technology Steering Committee*. BRI menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi pengembang dan unit bisnis pengelola pemanfaatan AI untuk memantau performa model secara berkala, memastikan mitigasi risiko siber, dan menangani dampak yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi AI.

Program Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab

BRI menjalankan program kecerdasan buatan yang bertanggung jawab secara strategis, dengan berfokus pada penguatan ekosistem digital yang aman dan inklusif sebagai berikut.

- **Audit dan Pemutakhiran Algoritma Berkala**
BRI melakukan peninjauan algoritma secara independen, termasuk pengujian terhadap setiap model AI yang dikembangkan dan digunakan melalui mekanisme monitoring secara berkala. Hal ini memastikan kinerja dan akurasi tetap optimal dan andal. Evaluasi periodik dapat mendeteksi adanya potensi model *drift* (pergeseran model), yaitu kondisi di mana performa model AI menurun atau menyimpang dari tujuan awal akibat perubahan pola data atau algoritma. Melalui pengawasan ketat ini, BRI memastikan bahwa setiap algoritma yang digunakan tetap berada pada jalur yang tepat (*on track*), konsisten dalam memberikan hasil yang akurat, serta selalu selaras dengan standar etika dan parameter bisnis yang telah ditetapkan perusahaan. Langkah ini mencerminkan komitmen bank dalam menjaga integritas teknologi demi perlindungan dan kenyamanan nasabah secara jangka panjang.
- **Integrasi AI dalam Manajemen Keamanan Siber**
Pemanfaatan AI Bot sebagai bagian dari koordinasi internal memfasilitasi eskalasi aktivitas mencurigakan secara lebih cepat, guna memastikan respons yang efektif dalam memperkuat ketahanan operasional Bank.
- **Literasi Etika Digital bagi Insan BRILian**
BRI menyelenggarakan program edukasi bagi pekerja mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh talenta BRI mampu memanfaatkan AI beserta teknologi terkait dengan kesadaran penuh terhadap risiko kepatuhan dan perlindungan konsumen. Ke depan, bank berkomitmen untuk melaksanakan program literasi digital terkait AI ini secara berkala, sebagai bagian dari upaya sistematis Perusahaan untuk memastikan setiap Insan BRILian memiliki kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam operasional bisnis.
- **Pemberdayaan UMKM melalui AI yang Inklusif**
Melalui pengembangan Sabrina (*Smart Virtual Assistance*) dalam menunjang ekosistem digital, pemanfaatan AI telah mempermudah penanganan keluhan dari seluruh masyarakat secara digital, sehingga mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional.

Lampiran



Keuangan & Bisnis

Skala Perusahaan (hanya Bank) [C.3] [GRI 2-6]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Laba Bersih	Rp Miliar	53.153	54.841	50.404
Pendapatan	Rp Miliar	189.646	215.738	217.379
Total Aset	Rp Miliar	1.835.249	1.840.395	1.931.536
Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp Miliar	1.352.683	1.360.134	1.460.089
Total Liabilitas	Rp Miliar	1.536.512	1.541.022	1.632.040
Ekuitas	Rp Miliar	298.737	299.373	299.496
Dana Non-DPK	Rp Miliar	183.829	180.888	171.951
Jumlah Unit Kerja Beroperasi	Unit	7.755	7.568	7.377

Pencapaian Kinerja Ekonomi [F.2] [GRI 201-1]

	Realisasi		Target (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Presentase (%)
	2023	2024		2025	
Total Aset	1.835.249	1.840.395	1.943.799	1.931.536	99,37
Aset Produktif	1.684.737	1.711.302	1.834.161	1.856.531	101,22
Kredit/Pembayaran Bank	1.146.083	1.215.847	1.307.098	1.342.674	102,72
Dana Pihak Ketiga	1.352.683	1.360.134	1.461.532	1.460.089	99,90
Total Pendapatan*	189.122	214.685	220.054	216.951	98,59
Total Biaya	122.050	145.574	155.440	154.750	99,56
Laba Bersih	53.153	54.841	51.303	50.404	98,25

*) Total pendapatan merupakan seluruh pendapatan operasional dan non operasional. Total biaya terdiri dari seluruh beban operasional, kecuali biaya pajak yang dibayarkan.

Nilai Ekonomi Langsung Didapat dan Didistribusikan ^[GRI 201-1]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Pendapatan Bunga	Rp Miliar	146.918	162.229	163.606
Pendapatan Non Bunga	Rp Miliar	42.728	53.508	53.773
Pendapatan Non Operasional	Rp Miliar	-524	-1.053	-428
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung Didapat	Rp Miliar	189.122	214.684	216.951
Biaya Operasional Non Bunga di Luar Pekerja	Rp Miliar	30.526	35.013	35.747
Biaya Tenaga Kerja (di luar <i>Outsource</i>)	Rp Miliar	26.519	26.842	27.900
Pembayaran Dividen kepada Pemerintah	Rp Miliar	23.234	25.715	27.682
Bunga Kredit dan Bunga Bank	Rp Miliar	38.484	50.579	50.025
Pembayaran kepada Pemerintah (Pajak)	Rp Miliar	23.447	28.014	22.068
Pengeluaran Investasi kepada Masyarakat	Rp Miliar	342	343	326
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung Didistribusi	Rp Miliar	142.552	166.506	163.747
Nilai Ekonomi Langsung yang Ditahan	Rp Miliar	46.570	48.178	53.204

Global Systemically Important Bank
^[FN-CB-550a.1]

BIS Leverage Ratio				
Aspek	Satuan	2023	2024	2025
Basel III Tier 1 Capital	Rp	238.956.599	241.043.217	246.050.197
Basel III Total Exposure	Rp	1.749.457.664	1.798.631.971	1.920.699.682
Basel III Leverage Ratio	%	13,66	13,40	12,81

Pelaporan Pajak* [GRI 207-4]

Keterangan	Satuan	2022		2023		2024	
		Domestik	Lainnya	Domestik	Lainnya	Domestik	Lainnya
Jumlah Pekerja	Orang	74.735	105	77.739	66	81.848	68
Pendapatan	Rp Juta	202.710.231	1.581.523	240.297.151	2.909.234	210.031.414	3.787.814
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp Juta	65.536.208	614.553	75.885.153	386.520	68.476.430	727.504
Pajak Penghasilan Masih Harus Dibayar	Rp Juta	13.103.645	125.386	12.515.017	67.504	12.353.974	106.521
Pajak Penghasilan yang Telah Dibayar	Rp Juta	24.473.827	84.337	16.413.631	87.215	13.421.313	41.204

*) Seluruh informasi dalam laporan ini milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanpa mencakup perusahaan anak. Di sisi lain, BRI melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi yang mencakup perusahaan anak seperti Bank Raya, BRI Remittance, BRI Life, BRI Finance, BRI Ventures, BRIDS, BRI Insurance, Pegadaian, dan PNM. Informasi terkait perusahaan anak tersebut tidak termasuk dalam laporan ini. [GRI 2-2]

Kredit Per-Segmen [GRI G4 FS6]

Segmen	Satuan	2023	2024	2025
Mikro	Rp Triliun	496,55	491,22	470,77
	%	43,33	40,40	35,06
Ritel	Rp Triliun	442,70	470,39	519,88
	%	38,63	38,69	38,72
Korporasi	Rp Triliun	206,83	254,24	352,02
	%	18,05	20,91	26,22
Total	Rp Triliun	1.146,08	1.215,85	1.342,67
	%	100	100	100

Kredit Per-Wilayah (Indonesia) [GRI G4 FS6]

Wilayah	Satuan	2023	2024	2025
Jakarta	Rp Triliun	306,55	371,48	473,49
	%	26,75	30,55	35,27
Sumatera	Rp Triliun	183,10	187,71	199,75
	%	15,98	15,44	14,88
Jawa Barat	Rp Triliun	88,94	77,58	76,57
	%	7,76	6,38	5,70
Jawa Tengah & DI Yogyakarta	Rp Triliun	140,41	137,10	133,86
	%	12,25	11,28	9,97
Jawa Timur	Rp Triliun	136,61	140,90	142,86
	%	11,92	11,59	10,64
Indonesia Timur & Indonesia Tengah	Rp Triliun	260,79	276,75	284,75
	%	22,76	22,76	21,21
Lainnya	Rp Triliun	29,68	24,33	31,37
	%	2,59	2,00	2,34
Total	Rp Triliun	1.146,08	1.215,85	1.342,65
	%	100	100	100

Kredit Per-Wilayah (Di Luar Indonesia)

[GRI G4 FS6]

Wilayah	Satuan	2023	2024	2025
New York	Rp Triliun	8,38	13,50	8,16
	%	50,73	55,49	26,03
Singapura	Rp Triliun	6,88	9,25	12,84
	%	41,65	38,02	40,92
Timor Leste	Rp Triliun	0,95	1,02	1,06
	%	5,75	4,19	3,37
Taiwan	Rp Triliun	0,31	0,56	0,85
	%	1,88	2,30	2,71
Kepulauan Cayman	Rp Triliun	–	–	8,46
	%	–	–	26,98
Jumlah	Rp Triliun	16,52	24,33	31,37
	%	100	100	100

Kredit Per-Sektor Usaha [GRI G4 FS6]

Sektor Usaha	Satuan	2023	2024	2025
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp Triliun	1,52	6,14	8,34
	%	0,13	0,51	0,62
Industri Pengolahan	Rp Triliun	102,53	110,19	117,67
	%	8,95	9,06	8,77
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	Rp Triliun	53,70	61,07	62,27
	%	4,69	5,02	4,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp Triliun	4,22	4,53	6,45
	%	0,37	0,37	0,48
Jasa Pendidikan	Rp Triliun	0,86	0,97	1,29
	%	0,08	0,08	0,10
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	Rp Triliun	1,00	0,90	0,75
	%	0,09	0,07	0,06
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	Rp Triliun	31,41	8,86	9,18
	%	2,74	0,73	0,68
Konstruksi	Rp Triliun	33,73	35,48	79,33
	%	2,94	2,92	5,91
Listrik, Gas, dan Air	Rp Triliun	30,37	36,44	53,41
	%	2,65	3,00	3,98
Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha	Rp Triliun	239,69	254,89	275,98
	%	20,91	20,96	20,56
Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rp Triliun	22,38	24,64	24,05
	%	1,95	2,03	1,79
Perantara Keuangan	Rp Triliun	15,85	26,51	20,89
	%	1,38	2,18	1,56
Perdagangan Besar dan Eceran	Rp Triliun	361,13	364,07	370,46
	%	31,51	29,94	27,60
Perikanan	Rp Triliun	10,88	10,53	10,04
	%	0,95	0,87	0,75
Pertambangan dan Penggalian	Rp Triliun	31,81	36,47	29,39
	%	2,78	3,00	2,19

Sektor Usaha	Satuan	2023	2024	2025
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	Rp Triliun	166,64	193,61	222,09
	%	14,54	15,92	16,54
Real Estate, Usaha Persewaaan dan Jasa perusahaan	Rp Triliun	11,65	12,27	17,65
	%	1,02	1,01	1,31
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	Rp Triliun	26,70	28,27	33,19
	%	2,33	2,33	2,47
Lainnya	Rp Triliun	0	0	0
	%	0	0	0
Jumlah	Rp Triliun	1.146,07	1.215,84	1.342,41
	%	100	100	100

Produk Pinjaman Mikro [GRI 203-2][GRI G4 FS6]

[FN-CB-240a.1]

Deskripsi	Satuan	2023	2024	2025
Outstanding KUR	Rp Triliun	219,90	231,29	235,39
Debitur KUR	Juta	8,80	8,11	8,02
Outstanding KUPEDES	Rp Triliun	212,30	200,22	175,60
Debitur KUPEDES	Juta	4,64	4,49	3,93

Keuangan Berkelanjutan

Nasabah dengan PROPER Rating [GRI G4 FS8, F10, F11]

Peringkat	Satuan	2023	2024	2025
Emas	Debitur	16	8	10
Hijau	Debitur	7	9	5
Biru	Debitur	46	48	56
Total	Debitur	69	65	71

Nilai Kredit Nasabah dengan PROPER Rating [GRI G4 FS8, FS10, FS11]

Peringkat	Satuan	2023	2024	2025
Emas	Rp Triliun	13,38	10,69	19,07
Hijau	Rp Triliun	9,27	17,29	3,65
Biru	Rp Triliun	63,05	88,46	88,10
Total	Rp Triliun	85,70	116,44	110,82

Nasabah dengan Sertifikasi ISPO/RSPO* [GRI G4 FS8, FS10, FS11]

Sertifikat	Satuan	2023	2024	2025
RSPO	Debitur	16	14	21
Dalam proses RSPO	Debitur	0	0	0
ISPO	Debitur	25	26	21
Dalam proses ISPO	Debitur	8	5	6
Total	Debitur	49	45	48

*) Data mencakup nasabah di segmen Korporasi.

Nilai Pembiayaan untuk Nasabah dengan Sertifikasi ISPO/RSPO* [GRI G4 FS8, FS10, FS11]

Sertifikat	Satuan	2023	2024	2025
RSPO	Rp Triliun	18,90	29,97	44,64
Dalam proses RSPO	Rp Triliun	0	0	0
ISPO	Rp Triliun	14,88	18,06	12,68
Dalam proses ISPO	Rp Triliun	2,74	1,32	2,30
Total	Rp Triliun	36,52	49,35	59,62

*) Data mencakup nasabah di segmen Korporasi.

Produk Berkelanjutan per Segmen ^{[OJK B.1.d] [GRI G4 FS7, FS8]}

2025						
Kategori Produk Per Segmen	Satuan	Outstanding	Total	Total Pinjaman Per Segmen	Komposisi pinjaman berkelanjutan dietiap segmen	Deskripsi Produk
Pinjaman Konsumer						
KPR Green Financing	Rp Triliun	0,37	16,53	66,34	25%	Terdiri dari kredit kepemilikan rumah yang dikhususkan untuk pembiayaan pembelian rumah baru dengan konsep perumahan berkonsep hijau serta kredit pemilihan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total pendapatan keluarga (suami dan istri) maksimal Rp8 juta per bulan.
KPR Subsidi	Rp Triliun	16,16				
Pinjaman Korporasi						
Kredit Hijau Segmen Korporasi	Rp Triliun	89,24	89,24	351,76	25%	Terdiri dari kredit hijau kepada segmen korporasi dengan aktivitas usaha berbasis energi terbarukan, pengelolaan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, bangunan ramah lingkungan, serta kegiatan usaha berwawasan lingkungan lainnya.
Pinjaman UMKM (Produktif)						
Kredit Hijau Segmen Medium	Rp Triliun	3,59	706,09	706,09	100%	Terdiri dari kredit sosial kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap, memiliki usaha produktif dengan skala bisnis kecil dan menengah.
Kredit Usaha Segmen UMKM	Rp Triliun	702,51				

Penyaluran Kredit kepada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan ^{[F.10] [GRI 305-3]}

Keterangan	Satuan	Capaian			Target 2025	Persentase Pencapaian 2025
		2023	2024	2025		
UMKM	Rp Triliun	690,43	698,66	718,67	800	101,48
Energi Terbarukan	Rp Triliun	6,02	6,34	6,85		
Pencegahan dan Pengendalian Polusi	Rp Triliun	0,55	0,51	0,50		
Transportasi Ramah Lingkungan	Rp Triliun	11,24	3,61	3,38		
Bangunan Berwawasan Lingkungan	Rp Triliun	2,04	0,29	0,71		
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan	Rp Triliun	52,82	64,68	61,64		
Efisiensi Energi	Rp Triliun	0	0	2,52		
Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	Rp Triliun	0,23	0	0		
Pengelolaan Air & Limbah Berkelanjutan	Rp Triliun	0,003	0	0		
Eco-efficient Product	Rp Triliun	7,50	8,07	5,64		
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	Rp Triliun	1,93	3,06	11,96		
Total	Rp Triliun	772,74	785,22	811,86	800	101,48

Penyaluran Kredit kepada Sektor Energi
Tak Terbarukan dan Energi Baru
Terbarukan [GRI 305-3]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Energi Tak Terbarukan	Rp Triliun	21,60	25,12	37,21
Energi Baru & Terbarukan	Rp Triliun	6,02	6,34	6,85
Total Pembiayaan	Rp Triliun	27,62	31,46	44,06

Nasabah

Titik Layanan Nasabah

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Kantor Pusat	#	1	1	1
Kantor Wilayah	#	18	18	18
Kantor Cabang & Kantor Cabang Khusus*	#	453	453	454
Kantor Cabang Luar Negeri	#	6	6	6
Kantor Cabang Pembantu**	#	556	555	555
Kantor Cabang Pembantu di Luar Negeri**	#	3	3	3
BRI Unit**	#	5.117	5.086	5.082
Kantor Kas**	#	505	500	490
Teras BRI**	#	977	873	758
Teras Keliling	#	115	69	6
Teras Kapal	#	4	4	4
Jumlah Unit Kerja Operasional	#	7.755	7.568	7.377

*) Sesuai dengan Nota Dinas B.63.e-PPM/ODV/OD2/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 Perihal Penyampaian persetujuan perubahan supervisi KCK.

**) Sejak tahun 2024, sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, terdapat penyesuaian untuk jaringan kantor bank hanya terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Sesuai POJK tersebut, jenis Kantor BRI Unit, Teras BRI, dan Kantor Kas BRI termasuk dalam kategori Kantor Cabang.

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
ATM	#	12.263	10.663	10.650
CRM	#	9.007	9.007	9.007
EDC	#	664.801	727.303	607.968
E- Buzz	#	57	57	54
Agen BRILink	#	740.818	1.064.219	1.193.835

Co-Location UMI

Co-Location UMI	Unit	2023	2024	2025
Sumatera	Unit	202	210	207
Jawa	Unit	537	520	533
Kalimantan	Unit	49	71	64
Sulawesi	Unit	142	127	125
Bali & Nusa Tenggara	Unit	74	74	74
Maluku	Unit	0	15	16
Papua	Unit	14	15	15
Total	Unit	1.018	1.032	1.034

Teras BRI

Teras BRI	Unit	Satuan	2023	2024	2025
Sumatera	Teras BRI	#	217	206	192
	Teras BRI Keliling	#	2	2	0
	Teras Kapal	#	1	1	1
Jawa	Teras BRI	#	502	416	345
	Teras BRI Keliling	#	59	58	0
	Teras Kapal	#	1	1	1
Kalimantan	Teras BRI	#	72	86	66
	Teras BRI Keliling	#	6	2	2
	Teras Kapal	#	0	0	0
Sulawesi	Teras BRI	#	52	28	23
	Teras BRI Keliling	#	43	1	1
	Teras Kapal	#	1	0	0
Bali & Nusa Tenggara	Teras BRI	#	117	112	110
	Teras BRI Keliling	#	4	4	2
	Teras Kapal	#	1	1	1
Maluku	Teras BRI	#	0	11	10
	Teras BRI Keliling	#	0	1	1
	Teras Kapal	#	0	1	1
Papua	Teras BRI	#	17	14	12
	Teras BRI Keliling	#	1	1	0
	Teras Kapal	#	0	0	0
Total	Teras BRI	#	977	873	758
	Teras BRI Keliling	#	115	69	6
	Teras Kapal	#	4	4	4

Kinerja BRI Kapal

Kinerja BRI Kapal	Bentuk	Satuan	2023	2024	2025
Bahtera Seva I (Wilayah Kepulauan Seribu)	Total Simpanan				
	Rekening	#	8.997	9.663	6.779
	Saldo	Rp Miliar	22,94	23,30	14,23
	Total Kredit				
	Debitur	#	716	781	679
	OS Pinjaman	Rp Miliar	25,06	29,08	27,39
Bahtera Seva II (Wilayah Kepulauan Halmahera Selatan)*	Total Simpanan				
	Rekening	#	20.536	15.154	15.402
	Saldo	Rp Miliar	43,33	47,47	51,21
	Total Kredit				
	Debitur	#	912	822	836
	OS Pinjaman	Rp Miliar	24,17	24,00	25,19
Bahtera Seva III (Wilayah Kepulauan Anambas)	Total Simpanan				
	Rekening	#	6.262	5.890	5.097
	Saldo	Rp Miliar	9,49	9,08	11,32
	Total Kredit				
	Debitur	#	242	277	450
	OS Pinjaman	Rp Miliar	8,21	8,77	13,75
Nera Seva (Wilayah Kepulauan NTT–Labuan Bajo)*	Total Simpanan				
	Rekening	#	1.874	1.066	1.380
	Saldo	Rp Miliar	7,34	7,81	7,05
	Total Kredit				
	Debitur	#	886	1.018	936
	OS Pinjaman	Rp Miliar	25,25	25,63	27,26
Total	Total Simpanan				
	Rekening	#	37.669	31.773	28.658
	Saldo	Rp Miliar	83,10	87,66	83,80
	Total Kredit				
	Debitur	#	2.756	2.898	2.901
	OS Pinjaman	Rp Miliar	82,69	87,48	93,59

*) Pada tahun 2025, terdapat perubahan cakupan wilayah operasional untuk Bahtera Seva II dan Nera Seva.

Agen BRILink

Agen BRILink	Satuan	2023	2024	2025
Sumatera	Agen	165.053	239.380	273.100
	%	22,28	22,49	22,88
Jawa	Agen	395.383	580.569	653.256
	%	53,37	54,55	54,72
Kalimantan	Agen	56.500	68.832	75.220
	%	7,63	6,47	6,30
Sulawesi	Agen	69.798	96.720	104.252
	%	9,42	9,09	8,73
Bali dan Nusa Tenggara	Agen	39.070	59.860	65.007
	%	5,27	5,62	5,45
Maluku dan Maluku Utara	Agen	6.949	8.865	9.370
	%	0,94	0,83	0,78
Papua	Agen	8.065	9.993	13.630
	%	1,09	0,94	1,14
Total	Agen	740.818	1.064.219	1.193.835
	%	100	100	100

Transaksi Agen BRILink	Satuan	2023	2024	2025
Nilai Transaksi	Rp Triliun	1.427,60	1.589,04	1.746,17
Jumlah Transaksi	Juta	1.096,61	1.204,25	1.186,21

Nasabah BRI Pengguna Layanan Bergerak (E-Banking)

Jenis E-banking	Satuan	2023	2024	2025
BRImo	Pengguna	31.616.014	38.613.867	45.933.232
BRIZZI	Pengguna	23.756.098	24.424.356	25.411.181

Jumlah Transaksi Layanan Bergerak (E-Banking) ^[FS8]

Jenis Layanan	Satuan	2023	2024	2025
Transaksi Finansial BRImo	Ribu	3.088.817	4.309.334	5.619.905
BRILink	Ribu	1.096.611	1.204.251	1.186.209
Merchant EDC	Ribu	197.788	509.616	651.376
BRIMOLA	Ribu	10.819	14.223	16.715
BRIZZI	Ribu	171.200	196.202	947.462
ATM BRI	Ribu	3.521.211	2.499.740	2.191.082

Nilai Transaksi Layanan Bergerak (E-Banking) ^[FS8]

Jenis Layanan	Satuan	2023	2024	2025
Transaksi Finansial BRImo	Rp Miliar	4.158.849	5.541.345	7.076.864
BRILink	Rp Miliar	1.427.583	1.589.039	1.746.170
Merchant EDC	Rp Miliar	119.764	186.335	223.196
BRIMOLA	Rp Miliar	15.102	20.262	24.110
BRIZZI	Rp Miliar	6.190	6.187	23.627
ATM BRI	Rp Miliar	2.972.941	2.646.152	2.338.365

Survei Kepuasan Nasabah ^[F.30]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Tingkat Kepuasan Nasabah	%	84,66	87,06	91,72
Tingkat Penyelesaian Pengaduan Nasabah	%	99,56	99,81	99,98

Kualitas Layanan BRI vs Kualitas
Layanan Industri Perbankan di
Indonesia

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Layanan Industri Perbankan (Peringkat MRI)	Peringkat	6	5	2

Pengaduan Nasabah ^{[418-1] [F.24]}

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Jumlah Transaksi	#	72.970.667.382	135.156.818.290	157.298.028.811
Jumlah Pengaduan	Kasus	4.751.604	1.925.215	1.262.275
Persentase Pengaduan terhadap Jumlah Transaksi	%	0,007	0,001	0,001
Pengaduan Diselesaikan	Kasus	4.730.478	1.921.529	1.261.976
Persentase Penyelesaian Keluhan Terseselesaikan terhadap Jumlah Keluhan	%	99,56	99,81	99,98
Pengaduan Dalam Proses	Kasus	21.126	3.686	299
Persentase Dalam Proses	%	0,4446	0,1915	0,0237

*) Sejak tahun 2024, jumlah pengaduan disajikan berdasarkan penyesuaian metodologi perhitungan yang mengacu pada panduan terbaru dari OJK.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis
Transaksi Keuangan

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	
Kartu Kredit	3.387	99,62	13	0,38	0	0	3.400
Produk/Jasa Bank Lainnya	1.729	99,94	1	0,06	0	0	1.730
Simpanan	46.164	100	2	0,004	0	0	46.166
ATM/CRM	647.196	100	7	0,001	0	0	647.203
E-banking	561.390	99,95	268	0,05	0	0	561.658
Kredit Tanpa Agunan	1.254	99,44	7	0,56	0	0	1.261
Pinjaman (Modal Kerja, Investasi, Konsumer)	856	99,88	1	0,12	0	0	857
Jumlah	1.261.976	99,98	299	0,02	0	0	1.262.275

Pengaduan terkait Keamanan Data Nasabah [418-1] [F.24]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Pengaduan* dari Pihak Eksternal	#	0	0	0
Pengaduan* dari Pihak Pemerintah	#	0	0	0

*) Pengaduan yang dibuktikan mengenai pelanggaran privasi nasabah dan hilangnya data nasabah.

Insiden Keamanan Informasi [FN-CB-230a.1]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Jumlah Pelanggaran Keamanan Informasi atau Keamanan Siber	#	0	0	0
Denda atau Sanksi dari Pelanggaran Keamanan Informasi atau Keamanan Siber	Rp	0	0	0
Jumlah Nasabah yang Terpengaruh oleh Pelanggaran	#	0	0	0

Pekerja

Komposisi Pekerja [GRI 2-7, 405-1] [OJK C.3, C.3.b, C.3.b.1, C.3.b.2, C.3.b.3, C.3.b.4, C.3.b.5]

Deskripsi		Satuan	2023	2024	2025	
Jenis Kelamin	Total	Orang	77.739	81.848	84.949	
	Pria	Orang	47.262	48.131	48.483	
	Perempuan	Orang	30.477	33.717	36.466	
	Komposisi Perempuan	%	39,20	41,19	42,93	
Status Kepegawaian	Pekerja Tetap	Total	Orang	60.084	59.495	59.714
		Pria	Orang	39.875	39.237	39.286
		Perempuan	Orang	20.209	20.258	20.428
		Komposisi Perempuan	%	33,63	34,05	34,21
	Pekerja Kontrak	Total	Orang	17.207	22.244	24.539
		Pria	Orang	7.135	8.837	8.879
		Perempuan	Orang	10.072	13.407	15.660
		Komposisi Perempuan	%	58,53	60,27	63,82
	Trainee	Total	Orang	448	109	696
		Pria	Orang	252	57	318
		Perempuan	Orang	196	52	378
		Komposisi Perempuan	%	43,75	47,71	54,31
Usia	< 30 Tahun	Total	Orang	21.348	23.890	28.393
	30-50 Tahun	Total	Orang	52.627	54.611	53.555
	> 50 Tahun	Total	Orang	3.764	3.347	3.001
Tingkat Jabatan	Top Management	Total	Orang	117	125	127
		Pria	Orang	90	98	96
		Perempuan	Orang	27	27	31
		Komposisi Perempuan	%	23,08	21,60	24,41
	Middle Management	Total	Orang	1.591	1.682	1.725
		Pria	Orang	1.238	1.315	1.351
		Perempuan	Orang	353	367	374
		Komposisi Perempuan	%	22,19	21,82	21,68
	Junior Management	Total	Orang	2.757	2.715	2.615
		Pria	Orang	2.013	1.968	1.875
		Perempuan	Orang	744	747	740
		Komposisi Perempuan	%	26,99	27,51	28,30
	Non Management	Total	Orang	73.274	77.326	80.482
		Pria	Orang	43.921	44.750	45.161
		Perempuan	Orang	29.353	32.576	35.321
		Komposisi Perempuan	%	40,06	42,13	43,89

Deskripsi			Satuan	2023	2024	2025
Wilayah	Jakarta	Total	Orang	15.205	13.809	15.993
		Pria	Orang	9.121	8.051	8.631
		Perempuan	Orang	6.084	5.758	7.362
	Sumatera	Total	Orang	14.157	13.224	15.009
		Pria	Orang	9.021	8.236	8.644
		Perempuan	Orang	5.136	4.988	6.365
	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta	Total	Orang	31.113	33.757	37.041
		Pria	Orang	19.143	19.811	20.441
		Perempuan	Orang	11.970	13.946	16.600
	Indonesia Bagian Timur (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)	Total	Orang	17.217	21.058	24.202
		Pria	Orang	9.936	12.033	12.712
		Perempuan	Orang	7.281	9.025	11.490
Kewarganegaraan	Indonesia		Orang	77.739	81.848	84.949
	Timor Leste		Orang	24	24	29
	Amerika		Orang	7	7	8
	Singapura		Orang	14	14	11
	Taiwan		Orang	10	12	7
	Lainnya		Orang	11	11	3
Revenue-generating Functions		Komposisi Perempuan	%	30,51	30,87	30,48
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)-related functions		Komposisi Perempuan	%	25,34	29,29	27,19
Pekerja Disabilitas	Total		Orang	60	51	57
	Pria		Orang	35	30	35
	Perempuan		Orang	25	21	22
	Komposisi Perempuan		%	41,67	41,18	38,60

Deskripsi		Satuan	2023	2024	2025
Tingkat Pendidikan	Sekolah Dasar & Sekolah Menengah Pertama	Total	Orang	0	0
		Pria	Orang	0	0
		Perempuan	Orang	0	0
		Komposisi Perempuan	%	0	0
	Sekolah Menengah Atas	Total	Orang	1.149	1.146
		Pria	Orang	509	444
		Perempuan	Orang	640	702
		Komposisi Perempuan	%	55,70	61,26
	Diploma I-III	Total	Orang	8.727	9.469
		Pria	Orang	4.701	4.947
		Perempuan	Orang	4.026	4.522
		Komposisi Perempuan	%	46,13	47,76
	Sarjana	Total	Orang	66.079	69.462
		Pria	Orang	40.745	41.454
		Perempuan	Orang	25.334	28.008
		Komposisi Perempuan	%	38,34	40,32
	Pascasarjana	Total	Orang	1.774	1.761
		Pria	Orang	1.297	1.278
		Perempuan	Orang	477	483
		Komposisi Perempuan	%	26,89	27,43
	Doktor	Total	Orang	10	10
		Pria	Orang	10	8
		Perempuan	Orang	0	2
		Komposisi Perempuan	%	0	20

Catatan: Komposisi pekerja tidak termasuk pekerja *outsourcing*. [\[GRI 2-7, 2-8\]](#)

Perekrutan Internal dan Perekrutan Baru

[GRI 401-1]

Deskripsi			Satuan	2023	2024	2025
Total Perekrutan Internal			Orang	48.606	69.242	80.042
Total Perekrutan Baru			Orang	9.692	13.131	12.070
Persentase Perekrutan Internal terhadap Total Perekrutan			%	83,38	84,06	86,90
Persentase Perekrutan Baru terhadap Total Perekrutan			%	16,62	15,94	13,10
Persentase Perekrutan Baru terhadap Total Pekerja			%	12,47	16,04	14,21
Perekrutan Internal	Jenis Kelamin	Pria	Orang	22.685	38.689	44.030
		Perempuan	Orang	25.921	30.553	36.012
	Usia	< 30 Tahun	Orang	21.048	23.928	28.547
		30-50 Tahun	Orang	25.332	42.756	48.882
		> 50 Tahun	Orang	2.226	2.558	2.613
Perekrutan Baru	Jenis Kelamin	Pria	Orang	3.436	5.840	4.749
		Perempuan	Orang	6.256	7.291	7.321
	Usia	< 30 Tahun	Orang	9.464	12.245	11.685
		30-50 Tahun	Orang	225	878	368
		> 50 Tahun	Orang	3	8	17
	Wilayah	Jakarta & Banten	Orang	1.117	1.451	2.480
		Sumatera	Orang	1.529	2.611	1.869
		Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta	Orang	4.890	5.769	4.581
		Indonesia Bagian Timur (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)	Orang	2.156	3.300	3.140

Rata-rata Biaya Perekrutan Tenaga Kerja [GRI 401-1]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Rata-rata Biaya Perekrutan Tenaga Kerja	Rp	8.676.201	8.571.150	3.018.000

Kebebasan Berserikat [2-30]

Uraian	Satuan	2023	2024	2025
Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja	#	39.939	39.176	36.872
	%	66,47	65,85	43,76
Total Pekerja	#	77.739	81.848	84.253

Indikator Upah Berdasarkan Jenis Kelamin [GRI 202-1]

Keterangan	Kelompok Jabatan	Jenis Kelamin	Satuan	2023	2024	2025
Rata-rata Upah	Manajemen	Pria	Rp Juta	18,90	20,97	24,26
		Perempuan	Rp Juta	18,25	19,83	23,42
	Non-Manajemen	Pria	Rp Juta	5,80	6,23	7,21
		Perempuan	Rp Juta	4,72	5,33	6,21
Rata-rata Upah dan Insentif Lain	Manajemen	Pria	Rp Juta	79,88	86,47	86,72
		Perempuan	Rp Juta	77,33	81,98	82,72

Rasio Kompensasi Pekerja [GRI 2-21]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Gaji Pekerja tertinggi dan terendah	Kali	66,20	54,55	48,80
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Kali	1,18	1,18	1,18
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	Kali	1,11	1,11	1,11
Gaji Direksi tertinggi dan Pekerja tertinggi	Kali	3,16	3,75	2,57

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Nilai tengah kompensasi tanpa nilai tertinggi	Rp Juta	53,36	61,64	61,92
Nilai rata-rata kompensasi tanpa nilai tertinggi	Rp Juta	60,16	70,24	72,95
Perubahan Rasio Kompensasi Total Tahunan	%	24,29	25,42	26,67

Pelatihan [GRI 404-1] [F.22]

Kategori		Satuan	2023	2024	2025
Rata-rata Biaya Pelatihan per Pekerja		Rp Juta	9,11	8,50	6,48
Rata-rata Jam Pelatihan per Pekerja		Jam	84	79	83
Jenis Kelamin	Pria	Jam	81	77	85
	Perempuan	Jam	90	79	79
Usia	< 30 Tahun	Jam	96	81	80
	30-50 Tahun	Jam	81	74	83
	> 50 Tahun	Jam	95	102	102
Tingkat Jabatan	Top Management	Jam	56	61	62
	Middle Management	Jam	118	87	116
	Junior Management & Officer	Jam	81	77	77

Jenis dan Ruang Lingkup Pelatihan ^{[GRI}

404-2] [GRI G4 FS4]

Jenis Pelatihan	Nama Vendor	Satuan	2023	2024	2025
<i>Audit Intern Bank</i>	LSP BRI	Peserta	184	69	186
<i>Wealth Management</i>	MCI	Peserta	16	89	583
<i>Treasury Dealer</i>	LSP ACIBRI	Peserta	2	65	3
<i>General Banking</i>	LSP BRI	Peserta	1.779	0	276
Manajemen Risiko	BSMR & LSPP	Peserta	29	698	2.834
Kepatuhan	LSP BRI	Peserta	0	4	84
<i>Credit</i>	LSP BRI	Peserta	730	1.635	1.498
<i>Human Capital</i>	LSP BRI	Peserta	0	0	12
IT	LSP BRI	Peserta	6	4	4
<i>Funding & Service</i>	LSP BRI	Peserta	95	51	101

Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan
In-class & E-Learning

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Jumlah Peserta	Peserta	2.800.792	2.413.766	2.118.427
Jumlah Jam	Jam	9.128.524	9.234.247	9.096.459
Rata-Rata Jam Pendidikan/Pekerja	Jam	84	79	83

Tingkat Perputaran Pekerja ^[GRI 401-1]

Kategori		Satuan	2023	2024	2025
Total Perputaran	Total Tingkat Perputaran	%	3,24	4,96	5,58
	Jenis Kelamin	Pria	1,75	5,09	5,71
		Perempuan	5,61	4,77	5,32
	Usia	< 30 Tahun	0,46	2,33	3,03
		30-50 Tahun	2,60	3,64	4,35
		> 50 Tahun	20,72	27,15	29,16
	Jabatan	Top Management	14,53	12,65	4,86
		Junior and Middle Management	4,65	4,61	4,87
		Non-Management	2,94	4,97	5,70
	Total Tingkat Perputaran Sukarela	%	1,01	1,29	1,24
Perputaran Sukarela (Voluntary Turnover)	Jenis Kelamin	Pria	0,91	0,96	0,92
		Perempuan	1,18	1,94	1,87
	Usia	< 30 Tahun	0,20	0,48	1,14
		30-50 Tahun	1,12	1,22	1,16
		> 50 Tahun	2,48	3,10	2,72
	Jabatan	Top Management	–	0,68	0,97
		Junior and Middle Management	1,12	0,99	1,00
		Non-Management	1,00	1,34	1,29

*Sejak tahun 2024, perubahan metodologi telah diterapkan dalam perhitungan total perputaran pekerja.

Tren Keterlibatan Pekerja

Keterangan	Satuan	2023	2024
Keterikatan Pekerja	skala 4	3,49	3,51
Cakupan Pekerja	%	100	100
Pekerja Terlibat Aktif	%	93	93,80
Jenis Kelamin	Pria	93	93,80
	Perempuan	94	93,80
Usia	< 30 Tahun	89	91
	30-50 Tahun	93	94
	> 50 Tahun	95	93
Cakupan Pekerja	%	77,60	73,40

Survei Kepuasan Pekerja

Keterangan	Satuan	2023	2024
Indeks Kepuasan	#	3,35	3,40
Cakupan	%	77,64	73,38

Cuti Melahirkan ^[GRI 401-3]

Keterangan	Jenis Kelamin	Satuan	2023	2024	2025
Jumlah pekerja yang berhak menerima cuti melahirkan	Pria	orang	35.165	34.445	34.867
	Perempuan	orang	30.477	33.717	36.466
Jumlah Pekerja yang mengambil cuti melahirkan	Pria	orang	1.142	1.070	964
	Perempuan	orang	2.282	1.841	2.020
Kembali setelah mengambil cuti melahirkan	Pria	orang	1.142	1.069	892
	Perempuan	orang	2.265	1.817	1.828
Tingkat pekerja yang mengambil cuti melahirkan yang kembali bekerja dan dapat dipertahankan	Perempuan	%	99,50	99,14	91,15

Absenteeism Rate

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Absentee Rate	%	1,16	3,44	3,28
Jumlah Hari dalam setahun	hari	236	235	238
Jumlah Total Pekerja	orang	77.739	81.848	84.949

Tingkat Kepatuhan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Kewajiban	Jabatan	Satuan	2023	2024	2025
Wajib LHKPN	Dewan Komisaris	Pekerja	11	10	10
	Direksi	Pekerja	12	12	12
	Pekerja BRI	Pekerja	105	155	160
Wajib LHKPN yang telah melaporkan	Dewan Komisaris	Pekerja	11	10	10
		%	100	100	100
	Direksi	Pekerja	12	12	12
		%	100	100	100
	Pekerja BRI	Pekerja	105	155	160
		%	100	100	100
Wajib LHKPN yang belum melaporkan	Dewan Komisaris	Pekerja	0	0	0
		%	0	0	0
	Direksi	Pekerja	0	0	0
		%	0	0	0
	Pekerja BRI	Pekerja	0	0	0
		%	0	0	0

**Jumlah Pelaporan dan Tindak Lanjut
Whistleblowing System** [GRI 205-3]

Keterangan		2023	2024	2025
Jumlah Pelaporan		50	63	89
Tindak Lanjut	Terbukti	29	48*	68
	Terbukti Sebagian	0	0	4
	Tidak Terbukti	16	15	9
	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	0	0	0
	Dalam Proses	0	0*	8

*) Pengaduan dalam proses di tahun 2024 telah selesai ditindak lanjuti di tahun 2025 dengan hasil terbukti, sehingga total pelanggaran terbukti di tahun 2024 menjadi 48 pelanggaran.

**Kategori Pelanggaran di Whistleblowing
System**

Indikasi Pelanggaran	Satuan	2023	2024	2025
Pelanggaran Pekerja terhadap Kode Etik				
Korupsi dan Penyuapan	#	16	18	5
Konflik Kepentingan	#	5	2	3
Pelanggaran Atas Keamanan Informasi Nasabah	#	1	1	0
Diskriminasi dan Pelecehan	#	0	2	23
Pencucian Uang atau Insider Trading	#	0	0	0
Lainnya	#	7	25	49
Status				
Jumlah Pelanggaran	#	29	48	72
Dalam Proses	#	0	0	8
Selesai	#	29	48	80

Jumlah Tindak Lanjut Kasus *Fraud* ^{IGRI}
 205-3]

Keterangan	Jabatan	Satuan	2023	2024	2025
Pekerja Terlibat <i>Fraud</i>	Dewan Komisaris dan Direksi	Pekerja	-	-	2
	Pekerja Tetap	Pekerja	160	1.040	905
	Pekerja Tidak Tetap	Pekerja	4	119	116
Telah Diselesaikan Proses Hukuman Disiplin	Dewan Komisaris dan Direksi	Pekerja	-	-	-
	Pekerja Tetap	Pekerja	79	456	636
	Pekerja Tidak Tetap	Pekerja	3	69	71
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank (Hukuman Disiplin)	Dewan Komisaris dan Direksi	Pekerja	-	-	-
	Pekerja Tetap	Pekerja	16	584	269
	Pekerja Tidak Tetap	Pekerja	0	50	45
Belum Diupayakan Penyelesaian	Dewan Komisaris dan Direksi	Pekerja	-	-	-
	Pekerja Tetap	Pekerja	65	0	0
	Pekerja Tidak Tetap	Pekerja	1	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	Dewan Komisaris dan Direksi	Pekerja	-	-	2
	Pekerja Tetap	Pekerja	9	133	114
	Pekerja Tidak Tetap	Pekerja	8	24	25

Kontribusi dan Pengeluaran Lainnya
 *[415-1]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
<i>Lobbying</i> , representasi kepentingan, dsb	Rp	0	0	0
Kegiatan kampanye dan kandidat/organisasi politik lokal, regional, nasional	Rp	0	0	0
Asosiasi dagang / kelompok bebas pajak	Rp	0	0	0
Pengeluaran lainnya (misalnya pengeluaran untuk perhitungan suara pemilihan atau referendum)	Rp	0	0	0

Catatan: BRI melarang adanya kontribusi politik kepada organisasi berdasarkan Kode Etik dan kebijakan internal perusahaan.

Pemasok

Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemasok BRI [GRI 2-6, 204-1] [B.1e]

Segmen	Satuan	2023	2024	2025
Pemasok Domestik	%	97,27	99,63	98,39
Pemasok Luar Negeri	%	2,73	0,37	1,61

Total Vendor Berdasarkan Wilayah dan Jenis Vendor Tahun 2025 (yang memiliki SKT) [GRI 2-6, 204-1] [B.1e]

Wilayah	Properti	Kendaraan	Mesin- Mesin kantor	Meubelair	Inventaris	IT	Percetakan	Advertising	Barang Lainnya	Konsultan Jasa Lainnya	Jasa Konstruksi	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Jasa Lainnya	Jasa Pemasok Barang	Jasa Pemasok Barang Non Konstruksi	Total Vendor
Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandung	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	9
Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pekanbaru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
Malang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denpasar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5
Manado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Surabaya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6
Semarang	4	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	11
Kantor Pusat	17	2	6	1	3	36	6	1	3	6	8	37	74	60	20	280
Medan	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	32	2	6	1	7	37	6	1	4	6	8	37	85	71	22	416

Masyarakat

Penyaluran Program TJSL BRI Peduli [F.4]
[F.25]

Program	Satuan	2023	2024	2025
Sosial	Rp Juta	236.170	259.265	235.703
	%	69,06	75,57	72,30
Ekonomi	Rp Juta	21.366	23.330	24.079
	%	6,25	6,80	7,39
Lingkungan	Rp Juta	84.462	60.484	66.218
	%	24,70	17,63	20,31
Total	Rp Juta	341.998	343.079	326.000
	%	100	100	100

Alokasi Anggaran Program
Pengembangan Masyarakat TJSL BRI
Peduli [F.25]

Program	Satuan	2023	2024	2025
Sumbangan Sosial (Charitable Donations)	%	48,50	49,40	52,15
Investasi Masyarakat (Community Investments)	%	45,65	43,98	40,69
Inisiatif Komersial (Commercial Initiatives)	%	5,85	6,63	7,16
Total	%	100	100	100

Tipe Kontribusi TJSL [F.25]

Tipe Kontribusi	Satuan	2023	2024	2025
Kontribusi Tunai*	Rp Juta	0	0	0
In-Kind Giving (donasi produk atau layanan, proyek/kolaborasi atau sejenisnya)**	Rp Juta	341.998	343.079	326.000
Management Overhead (biaya konsultasi dan riset)	Rp Juta	1.925	2.140	2.425

*) BRI tidak memberikan bantuan dalam bentuk tunai kepada masyarakat. Kontribusi TJSL seluruhnya diimplementasi melalui program pengembangan masyarakat dan pembangunan infrastruktur strategis.
**) Merupakan total dana realisasi program TJSL.

Lingkungan

Penggunaan Energi ^[F.6] [GRI 302-1] [GRI 302-2] [GRI 302-3] [GRI 302-4]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Penggunaan BBM	Liter	42.927.942	42.521.434	37.968.046
Pemakaian Listrik	kWh	403.192.231	383.878.408	365.472.236
Penggunaan BBM	Rp	526.974.322.479	483.403.295.406	430.787.417.822
Pemakaian Listrik	Rp	574.118.412.662	555.530.945.998	529.576.077.817
Total Energi yang Dikonsumsi	MJ	2.919.627.648	2.848.795.079	2.622.589.522
Penghematan Energi	MJ	155.330.032	70.832.569	226.205.557
Intensitas Energi per Kantor	MJ/kantor/tahun	376.483	376.426	355.509
Intensitas Energi per Pekerja	MJ/pekerja/tahun	24.271	23.620	20.880

Catatan:

- (1) Standar perhitungan dan faktor konversi yang digunakan untuk perhitungan energi bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Data energi telah terverifikasi oleh pihak ketiga independen; dan
- (3) Penghematan energi adalah nilai pengurangan energi dibandingkan tahun sebelumnya.

Penggunaan Air ^[F.8]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Pemakaian Air	m ³	2.396.993	1.959.810	2.043.589
Performa Pemakaian Air	%	23,00	-18,24	4,27
Intensitas Pemakaian Air	m ³ /pekerja	19,93	16,25	16,27

Penggunaan Kertas ^[F.5]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Pemakaian Kertas per Unit Kerja*	kg/unit kerja	149,04	113,01	100,92
Pemakaian Kertas per Pekerja**	kg/pekerja	9,61	7,09	5,93

*) Seluruh Unit Kerja di Indonesia

**) Seluruh Pekerja termasuk *Outsourcing*

Pengelolaan Limbah [F.13] [F.14] [F.15] [GRI 306-2] [GRI 306-3] [GRI 306-3] [GRI 306-4] [GRI 306-5]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Total Pemanfaatan Kembali/Daur Ulang/Pemulihan Limbah	ton	591,20	703,56	740,01
Pengurangan Emisi (Limbah)	kgCO ₂ e	441.817	524.180	746.404
Total Limbah Dibuang (Landfill)*	ton	16.563	14.245	12.508

*) Timbulan sampah secara *bankwide* diekstrapolasikan berdasarkan data timbulan sampah per pekerja di kantor pusat BRI. Sampah di kantor pusat dikirim ke TPA pada Januari hingga Juli 2023. Sejak Agustus 2023 dan seterusnya, dengan diluncurkannya program *Zero Waste to Landfill*, semua sampah yang dihasilkan dialihkan dari TPA melalui teknologi pengomposan, daur ulang, dan RDF. Pada tahun 2024 tidak ditemukan insiden tumpahan atau kebocoran sampah.

Pengendalian Emisi di Seluruh Kantor Cabang [F.11] [GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3] [GRI 305-4] [GRI 305-5]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Emisi yang Berasal dari <i>Scope 1: Mobile & Stationary Combustion</i> (Emisi Positif)*	tCO ₂ e	125.120	118.689	105.949
Emisi yang Berasal dari <i>Scope 1: Fugitive & Refrigerant</i> (Emisi Positif)*	tCO ₂ e	5.490	5.466	9.156
Emisi yang Berasal dari <i>Scope 2</i> (Emisi Positif)*	tCO ₂ e	355.742	346.353	330.035
Emisi <i>Scope 3: Financed Emissions</i>	tCO ₂ e	10.434.550	12.884.676	12.370.526
Emisi <i>Scope 3: Purchased Goods and Services</i> ***	tCO ₂ e	121.156,00	99.166,97	700.340
Emisi <i>Scope 3: Waste Generated in Operations</i> ****	tCO ₂ e	8.937	8.340	8.415
Emisi <i>Scope 3: Business Travel</i>	tCO ₂ e	8.272	7.217	6.897
Intensitas Emisi <i>Scope 1</i> dan <i>2</i>	tCO ₂ e/Unit Kerja	62,70	62,17	60,34
Intensitas Emisi <i>Scope 1</i> dan <i>2</i> *****	tCO ₂ e/Pekerja	4,00	3,90	3,54
Intensitas <i>Financed Emissions</i>	tCO ₂ e/outstanding dalam Rp juta	0,097	0,098	0,091

*) Emisi Positif adalah emisi yang dihasilkan dari aktivitas operasional perbankan *Scope 1* yang berasal dari pemakaian bahan bakar dan refrigeran dan *Scope 2* yang berasal dari pemakaian listrik di seluruh unit kerja BRI di Indonesia. Penggunaan sumber energi tersebut masih dalam kontrol BRI.

**) Terdapat pengungkapan kembali (*restatement*) pada angka Emisi *Scope 3: Financed Emissions* di tahun 2022 karena terdapat perbaikan kualitas data untuk sektor manufaktur, yang semula perhitungan emisi menggunakan pendekatan *revenue* menjadi menggunakan data publikasi.

***) Faktor emisi *spend-based* diadopsi untuk memperkirakan emisi yang terkait dengan: Barang dan jasa yang dibeli, Barang modal, Transportasi dan distribusi hulu. Cakupan Emisi *Scope 3: Purchased Goods and Services* pada tahun 2022 adalah 44,16% dan 2023 adalah 100%.

****) Timbulan sampah secara *bankwide* diekstrapolasikan berdasarkan data timbulan sampah per pekerja di kantor pusat BRI. Sampah di kantor pusat dikirim ke TPA pada Januari hingga Juli 2023. Sejak Agustus 2023 dan seterusnya, dengan diluncurkannya program *Zero Waste to Landfill*, semua sampah yang dihasilkan dialihkan dari TPA melalui teknologi pengomposan, daur ulang, dan RDF.

*****) Guna mendukung validitas intensitas emisi per pekerja, pekerja *outsourcing* masuk dalam perhitungan intensitas total pekerja. Hal ini mengingat bahwa seluruh energi yang dihasilkan perusahaan digunakan oleh seluruh pekerja BRI termasuk *outsourcing*.

Emisi Scope 3: Financed Emission
berdasarkan Asset Class ^{[GRI 305-3] [GRI 305-5]}
 [F.11] [FN-CB-410b.2.]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Investasi dalam obligasi	tCO ₂ e	460.841	336.014	301.158
Pinjaman	tCO ₂ e	6.358.055	8.472.896	8.199.527
Ekuitas yang terdaftar	tCO ₂ e	881	852	487
Pembiayaan proyek pembangkit listrik	tCO ₂ e	3.504.669	3.816.573	3.820.961
Real estat komersial	tCO ₂ e	110.104	258.341	48.392
Total	tCO₂e	10.434.550	12.884.676	12.370.526

*) Terdapat pengungkapan kembali (*restatement*) pada angka *Emisi Scope 3: Financed Emissions* di tahun 2022 karena terdapat perbaikan kualitas data untuk sektor manufaktur, yang semula perhitungan emisi menggunakan pendekatan revenue menjadi menggunakan data publikasi.

Emisi Scope 3: Financed Emission
berdasarkan Sektor ^[F.11]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	tCO ₂ e	114.347	208.106	849.558
Konstruksi	tCO ₂ e	39.104	226.374	101.065
Listrik, gas, uap, dan penyediaan pengkondisian udara	tCO ₂ e	6.286.465	7.325.977	7.718.301
Kuangan dan Asuransi	tCO ₂ e	2.360	2.653	1.322
Manufaktur	tCO ₂ e	2.028.631	3.513.694	2.362.650
Pertambangan dan Penggalian	tCO ₂ e	1.848.358	1.345.290	1.288.332
Real Estat	tCO ₂ e	110.104	258.341	48.601
Transportasi dan Penyimpanan	tCO ₂ e	5.181	4.242	697
Total	tCO₂e	10.434.550	12.884.676	12.370.526

Penghindaran Emisi (Avoided Emission)
[F.12] [GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3] [GRI 305-5]

Keterangan	Satuan	2023	2024	2025
Kegiatan Zero Waste to Landfill*	kgCO ₂ e	441.817	524.180	746.404
Digitalisasi Produk dan Jasa	kgCO ₂ e	872.713	1.096.551	1.275.794

*) Penghitungan ini tidak termasuk limbah yang diklasifikasikan sebagai "Lainnya", seperti tisu, styrofoam, masker, dan lainnya, dikarenakan tidak tersedia faktor emisi untuk Teknologi RDF.



Issued Securities Impact Reporting

Green Bond Phase I

Pengantar

BRI sebagai bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada segmen mikro, kecil, dan menengah, terus memperkuat kontribusinya bagi negeri. Melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, BRI berperan aktif mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, serta ketahanan sosial dan ekonomi nasional. BRI berperan memberikan layanan terbaik dengan membina, memberdayakan, serta mengoptimalkan kompetensi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekosistem ekonomi rakyat. Upaya berkelanjutan ini merupakan langkah nyata BRI dalam mewujudkan visi BRI 2026 menjadi *"Becoming One of -or The- Most Profitable Banks In southeast Asia"*.

Sebagai agen pembangunan, BRI berperan dalam menekan ketimpangan ekonomi melalui distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Selain itu, BRI turut mengambil peran dalam konservasi sumber daya alam dan lingkungan—seperti pengelolaan lahan berkelanjutan, efisiensi air dan irigasi, serta pertumbuhan ekonomi hijau—demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara luas.

Seluruh aktivitas bisnis dan inisiatif strategis BRI dijalankan secara berkelanjutan, selaras dengan butir-butir UN SDG. Hal ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip ESG. Salah satu langkah konkretnya adalah penerbitan Green Bond sebagai sumber likuiditas bank. Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 merupakan *Green Bond* pertama yang diterbitkan oleh perbankan di Indonesia

Penerbitan Green Bond BRI – Tahap I 2022

Pada tahun 2022, BRI menerbitkan *Green Bond I* Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan nilai emisi sebesar Rp5 triliun yang disambut sangat baik oleh investor di pasar surat berharga ditunjukkan dengan kelebihan permintaan (*oversubscribe*) sebesar 4.4 kali pada saat proses *bookbuilding*.

Ringkasan Transaksi Obligasi

Nama	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022					
PUB	Rp 5 Triliun					
Seri	Tenor	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo	Kupon	Nilai	Status
A	370 Hari	21 Juli 2022	30 Juli 2023	3,70%	Rp 2,5 Triliun	Mature
B	3 Tahun	21 Juli 2022	20 Juli 2025	5,75%	Rp 2 Triliun	Mature
C	5 Tahun	21 Juli 2022	20 Juli 2027	6,45%	Rp 0,5 Triliun	Aktif
Rating	idAAA (Pefindo)					
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia					

Ringkasan Kerangka Kerja Green Bond Tahap I Tahun 2022

BRI telah mengembangkan kerangka Green Bond pada Juli 2022. Dalam memastikan kesesuaian kerangka kerja dengan regulasi maupun standar yang berlaku, BRI memperoleh Opini Tanaga Ahli dari SDGs Hub Universitas Indonesia. Penerbitan Green Bond BRI dalam mata uang Rupiah ini dilaksanakan dengan mengacu pada POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Dalam kerangka kerja yang telah disusun, terdapat 4 fokus utama antara lain Penggunaan Dana, Proses Evaluasi & Pemilihan Proyek, Pengelolaan Dana dan Pelaporan.

Penggunaan Dana

Minimal 70% pembiayaan Kegiatan Umum Berwawasan Lingkungan (KUBL)

Maksimal 30% pembiayaan kegiatan umum lainnya, misalnya sektor mikro, kesehatan dan sosial

a. KUBL

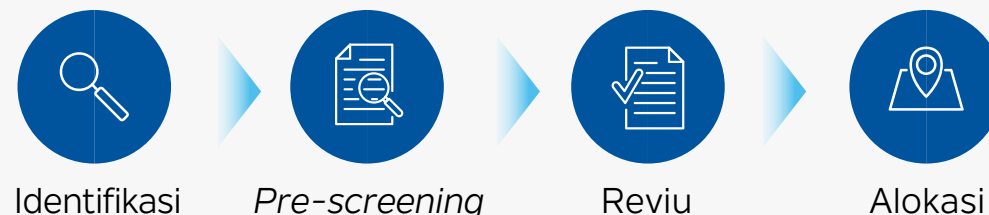
Kegiatan	
1. Energi Terbarukan	6. Pengelolaan Air & Limbah Air yang Berkelanjutan
2. Efisiensi Energi	7. Adaptasi Perubahan Iklim
3. Pencegahan & Pengendalian Polusi	8. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya & Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	9. Bangunan Berwawasan Lingkungan
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat & Air	10. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya

b. Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan Dan Sosial

Kegiatan pembiayaan sektor Mikro

1. Pembiayaan Mikro Kupedes
2. Pembiayaan Mikro KUR

Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek



Green Bond Phase I

Pengelolaan Dana

- Dana atas penerbitan akan dikelola secara *pooling* kemudian dialokasikan paling sedikit 70% pada KUBL;
- Pembuatan akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan;
- Aset yang dialokasikan sebagai tujuan pembiayaan dikelola secara aktif baik secara individual maupun portofolio;
- Apabila terdapat aset yang tidak relevan dengan kerangka atau dihentikan pembiayaannya, maka akan dialihkan ke aset lain; dan
- Dana yang tertunda realisasinya dapat ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pelaporan

Pelaporan Alokasi

BRI melaporkan alokasi penggunaan dana secara berkala 1 kali dalam 1 tahun paling lambat setahun setelah penerbitan dan setiap ada perubahan material KUBL disertai laporan hasil revidi oleh ahli lingkungan.

Pelaporan Dampak

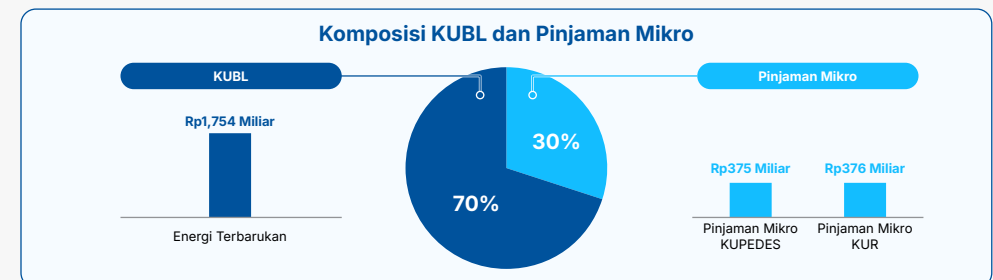
BRI menerbitkan laporan berkala atas dampak proyek/aset yang dibiayai sepanjang dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai revidi ahli lingkungan.

Laporan Alokasi

Pada periode pelaporan 31 Desember 2025, BRI telah mengalokasikan 100 % dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali beberapa proyek yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan BRI dan memiliki manfaat terhadap lingkungan maupun sosial.

Mengacu kepada ketentuan pada POJK 60/POJK.04/2017 dan sesuai dengan kerangka penerbitan, BRI melakukan proses seleksi dan evaluasi terhadap portofolio dan *pipeline* pembiayaan BRI yang berkaitan dengan sektor yang memenuhi syarat pada *Green Bond* kerangka, adapun detail alokasi sebagai berikut:

Aktivitas	Alokasi Dana (Rp milyar)	Persentase (%)	Jenis Pembiayaan
KUBL			
Energi terbarukan	1.754	70,03%	Refinancing
Kegiatan umum lainnya, misalnya sektor mikro, kesehatan dan sosial			
Pinjaman Mikro KUPEDES	375	14,98%	Refinancing
Pinjaman Mikro KUR	376	14,99%	Refinancing



Green Bond Phase I

Dampak

Mengacu *Green Bond framework* BRI, dampak lingkungan (yang sesuai berdasarkan sektor KUBL yang memenuhi syarat dan dampak sosial adalah sebagai berikut:

Kategori Hijau

Sektor yang Memenuhi Syarat	Kesesuaian dengan SDGs	% Aset yang Memenuhi Syarat	Jenis Proyek	Deskripsi Singkat & Indikator Dampak
Energi Terbarukan	 	100,00%	Hydro-energy Generation	Estimasi dampak lingkungan yang dihasilkan: - Energi terbarukan yang dihasilkan per tahun: 1.669.000 MWh - Emisi GRK yang terhindar per tahun: 1.614.223 tCO₂eq.

Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan dan Sosial

Sektor yang Memenuhi Syarat	Kesesuaian dengan SDGs	Perkiraan Manfaat Sosial
Penciptaan Lapangan Kerja	  	Menciptakan lapangan kerja segmen UMKM, dengan estimasi sebesar ± 8.949 pekerjaan baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran KUPEDS berdasarkan Sektor - Pertanian 39% - Perdagangan Retail 36% - Jasa 7% - Industri 5% - Perumahan 5% - Lainnya 3% - Perikanan 3% - Transportasi 2% - Konstruksi 0% - Pertambangan 0% Sebaran KUPEDS Berdasarkan Wilayah - Jawa 57% - Sumatra 19% - Sulawesi 10% - Kalimantan 7% - Bali, NTT, NTB 5% - Papua, Maluku 2%

Sektor yang Memenuhi Syarat	Kesesuaian dengan SDGs	Perkiraan Manfaat Sosial
Peningkatan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi	  	KUR yang disalurkan telah menjangkau 5.943 orang diseluruh wilayah Indonesia, 4.857 merupakan penerima akses pinjaman perbankan untuk pertama kalinya melalui fasilitas KUR, yang mencerminkan perluasan inklusi keuangan. Selain itu sebanyak 2.545 nasabah merasakan peningkatan asset bisnis setelah menerima KUR. Sebaran KUR Berdasarkan Sektor - Pertanian 43% - Perdagangan Retail 32% - Jasa 9% - Industri 7% - Perumahan 4% - Lainnya 2% - Perikanan 2% - Transportasi 1% - Konstruksi 0% - Pertambangan 0% Sebaran KUR Berdasarkan Wilayah - Jawa 57% - Sumatra 16% - Sulawesi 17% - Kalimantan 6% - Bali, NTT, NTB 5% - Papua, Maluku 2%

Kesimpulan

Laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab BRI sebagai pelopor dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia. BRI berkomitmen untuk terus menjaga terpenuhinya kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan berlaku terkait *green bond* untuk terus menjaga kepercayaan investor, regulator maupun publik pada umumnya kepada BRI sebagai lembaga keuangan berwawasan ESG.

Sesuai dengan *Green Bond framework* yang telah disusun BRI telah memperoleh hasil revidi dari ahli lingkungan yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 70% (realisasi: 70,03%) kegiatan yang dibiayai *Green Bond I* Bank BRI Tahap I Tahun 2022 telah memenuhi kriteria sebagai KUBL dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan baik melalui pengurangan emisi, pengelolaan sumber daya maupun energi terbarukan dan 29.97% digunakan untuk Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan Dan Sosial.

Lampiran I

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I TAHAP I

SDGs Center Universitas Diponegoro bertindak sebagai Pihak Ahli Lingkungan Eksternal untuk melakukan revidi atas pelaksanaan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Revidi dilakukan terhadap dokumen penerbitan obligasi, *Green Bond Framework*, *Impact Report*, serta dokumen pendukung lain pada periode pelaporan 2022–2025 melalui desk review dan penilaian kesesuaian terhadap POJK No. 60 Tahun 2017, POJK No. 51 Tahun 2017, ICMA *Green Bond Principles*, dan ASEAN *Green Bond Standards*. Berdasarkan pendekatan berbasis dokumen tersebut, penilaian difokuskan pada kesesuaian penggunaan dana dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), proses seleksi proyek, mekanisme pengelolaan dana, serta kualitas pelaporan penggunaan dana dan dampak lingkungan.

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Skor Akhir
1.	<i>Use of Proceeds</i>	3,16	35%	1,11
2.	<i>Project Evaluation & Selection</i>	3,46	25%	0,86
3.	<i>Management of Proceeds</i>	3,5	20%	0,7
4.	<i>Reporting</i>	2,9	20%	0,58
Total Skor Akhir				3,25
Predikat A – Sangat Baik				

Pada aspek penggunaan dana, 100% proceeds telah dialokasikan sesuai ketentuan *Green Bond Framework* BRI dan POJK No. 60 Tahun 2017, dengan komposisi 70,03% untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang seluruhnya berada pada kategori energi terbarukan, serta 29,97% untuk kegiatan umum lainnya, yaitu Pinjaman Mikro KUPEDES sebesar 14,98% dan Pinjaman Mikro KUR sebesar 14,99%. Seluruh alokasi dilakukan melalui skema *refinancing* atas portofolio pembiayaan yang telah ada. Pada aspek evaluasi dan seleksi proyek, BRI telah menerapkan tahapan identifikasi, *pre-screening*, *review*, dan *allocation* terhadap portofolio dan pipeline pembiayaan untuk memastikan kesesuaian proyek dengan *Green Bond Framework* dan ketentuan *green bond* yang berlaku. Pada aspek pengelolaan dana, seluruh *proceeds* telah teralokasi tanpa perubahan atas proyek yang telah ditetapkan, dengan komposisi penggunaan dana sebesar Rp1.754 miliar untuk KUBL kategori energi terbarukan, Rp375 miliar untuk Pinjaman Mikro KUPEDES, dan Rp376 miliar untuk Pinjaman Mikro KUR. Dari sisi pelaporan, BRI telah menyajikan informasi mengenai alokasi dana, kategori proyek, indikator dampak, dan transparansi kepada publik secara memadai.

Dari sisi dampak, pembiayaan pada proyek *Hydro-energy Generation*/PLTA menghasilkan produksi energi terbarukan sebesar 1.669.000 MWh per tahun dan emisi GRK terhindar sebesar 1.614.223 ton CO₂eq per tahun. Pada dimensi sosial, pembiayaan mikro melalui KUPEDES dan KUR berkontribusi terhadap ±8.949 lapangan kerja melalui KUPEDES, 5.943 penerima manfaat KUR, 4.857 nasabah yang memperoleh akses pembiayaan pertama kali, dan 2.545 nasabah yang mengalami peningkatan aset usaha. Pembiayaan KUPEDES terutama tersalurkan pada sektor pertanian (39%) dan perdagangan retail (36%), dengan distribusi wilayah terbesar di Jawa (57%), Sumatra (19%), dan Sulawesi (10%). Sementara itu, pembiayaan KUR didominasi oleh sektor perdagangan retail (43%), pertanian (32%), dan jasa (9%). Secara umum, obligasi ini berkontribusi terhadap pencapaian SDG 7, SDG 8, SDG 10, dan SDG 13.

Semarang, Maret 2026
 Mewakili Universitas Diponegoro,

Head of LPPM Diponegoro University



Prof. Dr-Ing. Suherman, S.T., M.T.

Chief of the SDGs Research Center Diponegoro University



Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.

Lampiran II

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

Aliran Dana

BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I. Bank BRI Tahap I Tahun 2023 untuk membiayai proyek KUBL sesuai dengan POJK No. 60/POJK.04/2017. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali (*refinancing*) beberapa proyek yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan BRI dan memiliki manfaat terhadap lingkungan maupun sosial, yaitu:

Aktivitas	Proyek	Persentase Alokasi Dana	Nilai (Rupiah)
KUBL			
Energi terbarukan	PLTA	70,03%	1.754.572.927.460
Kegiatan umum lainnya seperti pembiayaan di sektor mikro, kesehatan, sektor lainnya			
Kredit Mikro		29,97%	750.839.964.462

Manfaat Lingkungan dari Proyek yang Dibiayai

Semua proyek *Green Sector* memiliki dampak positif terhadap lingkungan, sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bank BRI. Indikator tersebut diperoleh melalui proses identifikasi dan perhitungan yang konsisten dan sesuai dengan best practice yang ada. Proyek yang dibiayai dengan penerbitan Green Bond BRI Tahap I Tahun 2023 telah sesuai dengan POJK No. 60/POJK.04/2017 serta berkontribusi pada pencapaian SDGs. Berikut adalah ringkasan manfaat lingkungan pada tahun 2023 dari proyek yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Green Bond Tahap II Tahun 2023 Bank BRI:

Indikator	PLTA
Energi Terbarukan yang dihasilkan	1.669.000 MWh
Emisi GRK yang dihindari	1.614.223 tCO ₂ eq/tahun

Green Bond Phase II

Pengantar

BRI memegang dedikasi penuh dalam strategi bisnis perusahaan, tidak hanya fokus pada pertumbuhan kinerja tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, kehidupan sosial kemasyarakatan, dan ekonomi nasional. BRI meyakini bahwa peningkatan penerapan keuangan berkelanjutan akan memberikan dampak positif yang masif terhadap perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat luas. Guna mendukung TPB, BRI terus mendorong program-program RAKB. Langkah ini sejalan dengan visi BRI 2026 untuk menjadi *"Becoming One of -or The- Most Profitable Banks In southeast Asia"*.

Sebagai bentuk implementasi dan komitmen BRI terhadap ekonomi berkelanjutan, BRI terus memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha yang memberikan dampak positif bagi lingkungan serta sektor usaha yang mendukung kesejahteraan sosial. BRI juga menghindari penyaluran pinjaman kepada sektor-sektor yang terindikasi terlibat dalam kegiatan *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, eksploitasi tenaga kerja dan anak, pelanggaran HAM, pencucian uang, merusak situs bersejarah, perdagangan tumbuhan dan hewan yang dilindungi, *illegal fishing*, serta bisnis lain yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Penerbitan obligasi menjadi alternatif sumber pendanaan atas penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh BRI, termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (*Green Bond*) I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang proceeds atas penerbitan tersebut digunakan untuk refinancing sektor usaha terkategori green dan social. Penerbitan *Green Bond* di tahun 2023 merupakan bagian dari PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (*Green Bond*) I Bank BRI dengan total limit sebesar Rp 15 Triliun.

Penerbitan Green Bond

Pada tahun 2023, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 dengan nilai emisi sebesar Rp 6 triliun dan mencatatkan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 2,63 kali.

Ringkasan Transaksi Obligasi

Nama Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

PUB Rp 6 Triliun

Seri	Tenor	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo	Kupon	Nilai	Status
A	370 Hari	17 Oktober 2023	27 Oktober 2024	6,10%	Rp 1,35 triliun	Mature
B	2 Tahun	17 Oktober 2023	17 Oktober 2025	6,35%	RP 4,15 triliun	Mature
C	3 Tahun	17 Oktober 2023	17 Oktober 2026	6,30%	Rp 500 miliar	Aktif
Rating	idAAA (Pefindo)					
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia					

Ringkasan Kerangka Green Bond Tahap II Tahun 2023

BRI merumuskan kerangka *Green Bond* sebelum penerbitan Tahap I pada Juli 2022. Dalam memastikan kesesuaian kerangka dengan regulasi maupun standar yang berlaku, BRI bekerja sama dengan SDGs Hub Universitas Indonesia terkait Opini Tenaga Ahli (SPO). Penerbitan *Green Bond* BRI dalam mata uang Rupiah ini dilaksanakan dengan mengacu pada POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*"Green Bond"*). Terdapat 4 fokus utama antara lain Penggunaan Dana, Proses Evaluasi & Pemilihan Proyek, Pengelolaan Dana dan Pelaporan.

Penggunaan Dana

Minimal 70% pembiayaan KUBL

Maksimal 30% pembiayaan kegiatan umum lainnya, misalnya sektor mikro, kesehatan dan sosial

a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)

Kegiatan

1. Energi Terbarukan
2. Efisiensi Energi
3. Pencegahan & Pengendalian Polusi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat & Air
6. Pengelolaan Air & Limbah Air yang Berkelanjutan
7. Adaptasi Perubahan Iklim
8. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya & Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi
9. Bangunan Berwawasan Lingkungan
10. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya

b. Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan Dan Sosial

Kegiatan pembiayaan sektor Mikro

1. Pembiayaan Mikro Kupedes
2. Pembiayaan Mikro KUR

Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek



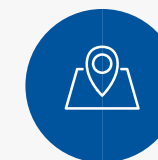
Identifikasi



Pre-screening



Reviu



Alokasi

Green Bond Phase II

Pengelolaan Dana

- Dana atas penerbitan akan dikelola secara pooling kemudian dialokasikan paling sedikit 70% pada KUBL.
- Pembuatan akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan.
- Aset yang dialokasikan sebagai tujuan pembiayaan dikelola secara aktif baik secara individual maupun portfolio.
- Apabila terdapat aset yang tidak relevan dengan framework atau dihentikan pembiayaannya, maka akan dialihkan ke aset lain.
- Dana yang tertunda realisasinya dapat ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pelaporan

Pelaporan Alokasi

BRI melaporkan alokasi penggunaan dana secara berkala 1 kali dalam 1 tahun paling lambat setahun setelah penerbitan dan setiap ada perubahan material KUBL disertai laporan hasil revidi oleh ahli lingkungan.

Pelaporan Dampak

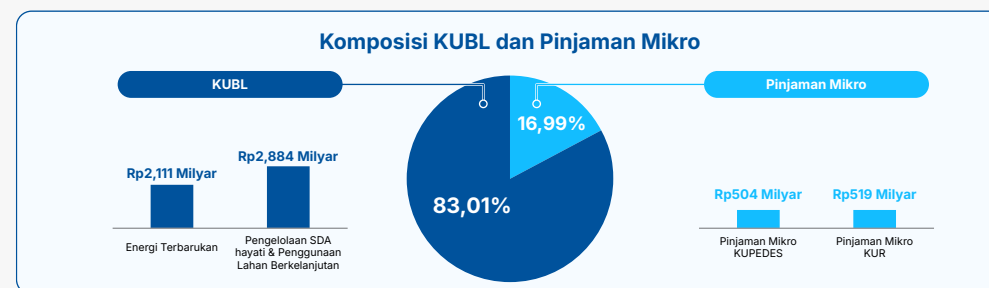
BRI menerbitkan laporan berkala atas dampak proyek/ aset yang dibiayai sepanjang dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai revidi ahli lingkungan.

Laporan Alokasi

Pada periode pelaporan 31 Desember 2025, BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali (*refinancing*) beberapa proyek yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan BRI dan memiliki manfaat terhadap lingkungan maupun sosial.

Mengacu kepada ketentuan POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan sesuai dengan kerangka kerja *Green Bond*, BRI melakukan proses seleksi dan evaluasi terhadap portofolio dan pipeline pembiayaan yang berkaitan dengan sektor yang memenuhi syarat sesuai dengan Kerangka *Green Bond* yang telah ditetapkan. 83,01% dana yang diperoleh digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) *green activities* sedangkan 16,99% dana yang diperoleh digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan dan Sosial. Adapun detail alokasi sebagai berikut:

Aktivitas	Alokasi Dana (Rp milyar)	Persentase (%)	Jenis Pembiayaan
KUBL			
Energi terbarukan	2.111	35,09%	<i>Refinancing</i>
Pengelolaan SDA hayati & Penggunaan Lahan Berkelanjutan	2.884	47,92%	<i>Refinancing</i>
Kegiatan umum lainnya, misalnya sektor mikro, kesehatan dan sosial			
Pinjaman Mikro KUPEDES	504	8,37%	<i>Refinancing</i>
Pinjaman Mikro KUR	519	8,62%	<i>Refinancing</i>



Alokasi untuk Sektor Mikro sebesar 16,99% atau Rp 1,022 triliun. *Project* yang dibiayai termasuk dalam kategori Pinjaman Mikro KUPEDES dan KUR.

Alokasi untuk KUBL sebesar 83,01% atau Rp 4,995 triliun. *Project* yang dibiayai termasuk dalam 2 kategori yaitu Energi Terbarukan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan

Green Bond Phase II

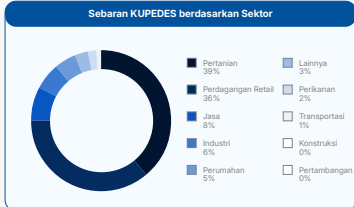
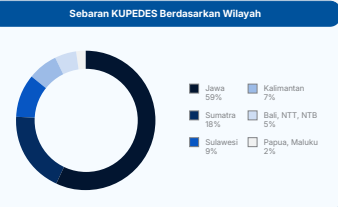
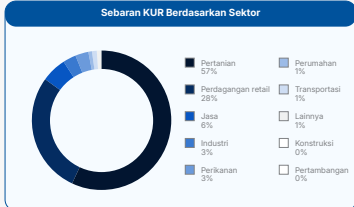
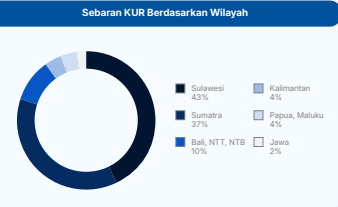
Dampak

Berdasarkan kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023, dampak lingkungan dan sosial yang sesuai berdasarkan sektor yang memenuhi syarat, yaitu:

KUBL

Sektor yang Memenuhi Syarat	Kesesuaian dengan SDGs	% Aset yang Memenuhi Syarat	Jenis Proyek	Deskripsi Singkat & Indikator Dampak
Energi terbarukan		42,27%	Hydro Power Plant	Estimasi dampak lingkungan yang dihasilkan: - Energi terbarukan yang dihasilkan per tahun: 1.134.272 MWh. - Emisi GRK yang terhindar per tahun: 1.097.045 tCO₂eq. Proyek yang dibiayai adalah sebanyak 1 proyek yang akan direncanakan beroperasi pada tahun 2025.
Pengelolaan sumber daya alam hayati & penggunaan lahan yang berkelanjutan		57,73%	Pembiayaan Investasi Lahan Kelapa Sawit dengan proses produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan	BRI telah membiayai proyek kebun kelapa sawit berkelanjutan yang mengadopsi praktik dan standar domestik maupun global terbaik dalam produksi minyak sawit yang bertanggung jawab yakni memiliki sertifikasi RSPO dan/atau ISPO

Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan Dan Sosial

Aktivitas	Kesesuaian dengan SDGs	Pengukuran Dampak
Pinjaman mikro Kupedes		Menciptakan lapangan pekerjaan segmen UMKM, estimasi sebesar ±4,000 pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran KUPEDS berdasarkan Sektor  Sebaran KUPEDS Berdasarkan Wilayah 
Pinjaman Mikro KUR	 	KUR yang disalurkan telah menjangkau 10.045 orang diseluruh wilayah Indonesia, 8.210 merupakan penerima akses pinjaman perbankan untuk pertama kalinya melalui fasilitas KUR, yang mencerminkan perluasan inklusi keuangan. Selain itu sebanyak 4.302 nasabah merasakan peningkatan asset bisnis setelah menerima KUR. Sebaran KUR Berdasarkan Sektor  Sebaran KUR Berdasarkan Wilayah 

Kesimpulan

Laporan dampak atas penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 menunjukkan komitmen dan realisasi atas penerapan keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan UNSDG khususnya poin 7, 8, 10, 12 dan 13. BRI terus mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait untuk turut serta mendukung dan memajukan perekonomian nasional dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 merupakan bagian dari PUB sebesar Rp 15 Triliun yang disrespon positif oleh investor yang ditandai dengan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 2,63 kali. BRI juga telah mendapatkan review eksternal dari ahli lingkungan yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 70% (realisasi: 83,01%) kegiatan yang dibiayai green bond telah memenuhi kriteria sebagai KUBL dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan serta sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut menegaskan kredibilitas Laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan kepatuhan serta komitmen BRI dalam memenuhi persyaratan *Green Bond*.

Lampiran I

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I TAHAP II

SDGs Center Universitas Diponegoro bertindak sebagai Pihak Ahli Lingkungan Eksternal yang ditunjuk untuk melakukan reviu atas pelaksanaan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Reviu dilakukan terhadap dokumen penerbitan obligasi, *Green Bond Framework*, *Impact Report*, serta dokumen pendukung lainnya pada periode pelaporan 2022–2025 melalui *desk review* dan penilaian kesesuaian terhadap POJK No. 60 Tahun 2017, POJK No. 51 Tahun 2017, ICMA *Green Bond Principles*, dan ASEAN *Green Bond Standards*. Berdasarkan pendekatan tersebut, penilaian difokuskan pada kesesuaian penggunaan dana dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), proses evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana hasil penerbitan obligasi, serta kualitas pelaporan penggunaan dana dan dampak lingkungan.

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Skor Akhir
1.	<i>Use of Proceeds</i>	3,20	35%	1,12
2.	<i>Project Evaluation & Selection</i>	3,46	25%	0,86
3.	<i>Management of Proceeds</i>	3,50	20%	0,70
4.	<i>Reporting</i>	2,92	20%	0,58
Total Skor Akhir				3,27
Predikat A – Sangat Baik				

Pada aspek penggunaan dana, hasil penilaian menunjukkan bahwa dana hasil penerbitan green bond telah dialokasikan 100%, dengan 83,01% diarahkan untuk kegiatan KUBL yang mencakup

energi terbarukan serta pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, sedangkan 16,99% lainnya dialokasikan untuk kegiatan lain yang mencakup sektor mikro, kesehatan, dan sosial. Pada aspek evaluasi dan seleksi proyek, BRI telah menerapkan tahapan identifikasi proyek, *pre-screening*, evaluasi, dan penetapan alokasi pembiayaan untuk memastikan bahwa proyek yang didanai memenuhi kriteria *green bond* sebagaimana ditetapkan dalam *framework* dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, pada aspek pengelolaan dana, hasil penerbitan obligasi dikelola melalui sistem internal bank yang memungkinkan pemantauan alokasi dana secara terstruktur, termasuk melalui pencatatan internal, pemantauan penggunaan dana, dan pengendalian internal untuk menjaga kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan green bond. Pada aspek pelaporan, BRI memperoleh skor tertinggi karena telah menyampaikan informasi yang relatif komprehensif mengenai alokasi dana, kategori proyek yang dibiayai, indikator dampak lingkungan, serta transparansi pelaporan kepada publik.

Dari sisi dampak, pembiayaan melalui *Green Bond* telah menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial yang terukur. Pada kategori energi terbarukan, pendanaan proyek *Hydro Power Plant* (PLTA) menghasilkan produksi energi terbarukan sebesar 1.134.272 MWh per tahun dan emisi GRK yang terhindar sebesar 1.097.045 ton CO₂eq per tahun. Pada kategori pengelolaan lahan berkelanjutan, pembiayaan mendukung proyek perkebunan sawit berkelanjutan yang telah memperoleh sertifikasi RSPO dan/atau ISPO, yang menjadi indikator penerapan praktik produksi berkelanjutan. Dari sisi sosial, pembiayaan mikro melalui program KUPeDES dan KUR berkontribusi terhadap penciptaan sekitar ±4.000 lapangan kerja melalui KUPeDES, menjangkau 10.045 penerima manfaat KUR, memberikan akses pembiayaan pertama kali kepada 8.210 nasabah, serta mendorong peningkatan aset usaha pada 4.302 nasabah. Secara umum, instrumen ini juga berkontribusi terhadap pencapaian SDG 7, SDG 8, SDG 10, SDG 12, dan SDG 13.

Semarang, Maret 2026
Mewakili Universitas Diponegoro,

Head of LPPM Diponegoro University



Prof. Dr-Ing. Suherman, S.T., M.T.

Chief of the SDGs Research Center Diponegoro University



Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.

Lampiran II

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

Aliran Dana

BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I. Bank BRI Tahap II Tahun 2023 untuk membiayai proyek KUBL sesuai dengan POJK No. 60/POJK.04/2017. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali (*refinancing*) beberapa proyek yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan BRI dan memiliki manfaat terhadap lingkungan maupun sosial, yaitu:

Aktivitas	Tipe Proyek	Persentase Alokasi Dana	Nilai Proyek (Rupiah)
KUBL		83,01%	4.994.932.321.101
Energi Terbarukan	PLTA	35,09%	2.111.412.477.351
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	Pembiayaan Investasi Lahan Kelapa Sawit dengan Proses Produksi Ramah Lingkungan dan BerkelanjutanM	47,92%	2.883.519.843.750
Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan dan Sosial			
Kredit Mikro		16,99%	1.006.822.822.556

Manfaat Lingkungan dari Proyek yang Dibiayai

Semua proyek KUBL memiliki dampak positif terhadap lingkungan, sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh BRI. Indikator tersebut diperoleh melalui proses identifikasi dan perhitungan yang konsisten dan sesuai dengan *best practice* yang ada. Proyek yang dibiayai dengan penerbitan *Green Bond* BRI Tahap II Tahun 2023 telah sesuai dengan POJK No. 60/POJK.04/2017 serta berkontribusi pada pencapaian SDGs. Berikut adalah ringkasan manfaat lingkungan pada tahun 2023 dari proyek yang dibiayai dari dana hasil penerbitan *Green Bond* Tahap II Tahun 2023 Bank BRI:

Indikator	PLTA	Pembiayaan Investasi Pada sektor kelapa sawit
Energi Terbarukan dihasilkan	1.134.272 MWh	N/A
Emisi GRK yang dihindari	1.097.045 tCO ₂ e / tahun	N/A
Memiliki sertifikasi lingkungan sesuai jenis industri yang dipersyaratkan untuk tujuan berkelanjutan	N/A	Memiliki sertifikasi ISPO atau RSPO

Green Bond Phase III

Pengantar

BRI memiliki komitmen penuh yang tercantum dalam strategi bisnis perusahaan, tidak hanya terhadap pertumbuhan kinerja, tetapi juga terhadap lingkungan, kehidupan sosial kemasyarakatan dan ekonomi nasional. BRI menyadari bahwa dengan terus meningkatkan penerapan keuangan berkelanjutan akan memberikan dampak luas pada perekonomian Indonesia, terlebihnya memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Implementasi programprogram Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) akan terus didorong untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs). Langkah ini sejalan dengan visi BRI 2026 untuk menjadi "Becoming One of or The Most Profitable Banks In southeast Asia".

Sebagai bentuk implementasi dan komitmen BRI terhadap ekonomi berkelanjutan, BRI terus memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha yang memberikan dampak positif bagi lingkungan (*green financing*) serta sektor usaha yang mendukung kesejahteraan sosial (*social financing*). BRI juga menghindari penyaluran pinjaman kepada sektor-sektor yang terindikasi terlibat dalam kegiatan *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, eksploitasi tenaga kerja dan anak, pelanggaran HAM, pencucian uang, perusakan situs bersejarah, perdagangan tumbuhan dan hewan yang dilindungi, illegal fishing, serta bisnis lain yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Penerbitan obligasi menjadi alternatif sumber pendanaan atas penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh BRI, termasuk *Green Bond* I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 yang proceeds atas penerbitan tersebut digunakan untuk refinancing sektor usaha terkategori green dan social. Penerbitan *Green Bond* di tahun 2023 merupakan bagian dari PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (*Green Bond*) I Bank BRI dengan total limit sebesar Rp 15 Triliun.

Penerbitan Green Bond

Pada tahun 2024, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 dengan nilai emisi sebesar Rp 4 triliun dan mencatatkan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 1,64 kali.

Ringkasan Transaksi Obligasi

Nama Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024

Nilai Rp 4 Triliun

Seri	Tenor	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo	Kupon	Nilai	Status
A	370 Hari	20 Maret 2024	30 Maret 2025	6,15%	Rp 1,23 triliun	Mature
B	2 Tahun	20 Maret 2024	20 Maret 2026	6,25%	RP 879 miliar	Aktif
C	3 Tahun	20 Maret 2024	20 Maret 2027	6,25%	Rp 382 miliar	Aktif
Rating	idAAA (Pefindo)					
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia					

Ringkasan Kerangka Kerja Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) Tahap III Tahun 2024 BRI

BRI telah merumuskan kerangka *Green Bond*, dalam memastikan kesesuaian kerangka dengan regulasi maupun standar yang berlaku, BRI bekerja sama dengan SDGs Hub Universitas Indonesia terkait Opini tenaga Ahli (SPO). Penerbitan *Green Bond* BRI dalam mata uang Rupiah ini dilaksanakan dengan mengacu pada POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan ("*Green Bond*"). Di dalam kerangka yang telah disusun terdapat 4 fokus utama antara lain Penggunaan Dana, Proses Evaluasi & Pemilihan Proyek, Pengelolaan Dana dan Pelaporan.

Penggunaan Dana

Minimal 70% pembiayaan KUBL

Maksimal 30% pembiayaan kegiatan umum lainnya, misalnya sektor mikro, kesehatan dan sosial

a. KUBL

Kegiatan

1. Energi Terbarukan
2. Efisiensi Energi
3. Pencegahan & Pengendalian Polusi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat & Air
6. Pengelolaan Air & Limbah Air yang Berkelanjutan
7. Adaptasi Perubahan Iklim
8. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya & Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi
9. Bangunan Berwawasan Lingkungan
10. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya

b. Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan Dan Sosial

Kegiatan pembiayaan sektor Mikro

1. Pembiayaan Mikro Kupedes
2. Pembiayaan Mikro KUR

Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek



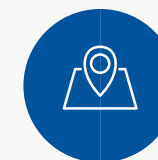
Identifikasi



Pre-screening



Reviu



Alokasi

Green Bond Phase III

Pengelolaan Dana

- Dana atas penerbitan akan dikelola secara pooling kemudian dialokasikan paling sedikit 70% pada KUBL
- Pembuatan akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan.
- Aset yang dialokasikan sebagai tujuan pembiayaan dikelola secara aktif baik secara individual maupun portfolio.
- Apabila terdapat aset yang tidak relevan dengan *framework* atau dihentikan pembiayaannya, maka akan dialihkan ke aset lain.
- Dana yang tertunda realisasinya dapat ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pelaporan

Pelaporan Alokasi

BRI melaporkan alokasi penggunaan dana secara berkala 1 kali dalam 1 tahun paling lambat setahun setelah penerbitan dan setiap ada perubahan material KUBL disertai laporan hasil revidi oleh ahli lingkungan.

Pelaporan Dampak

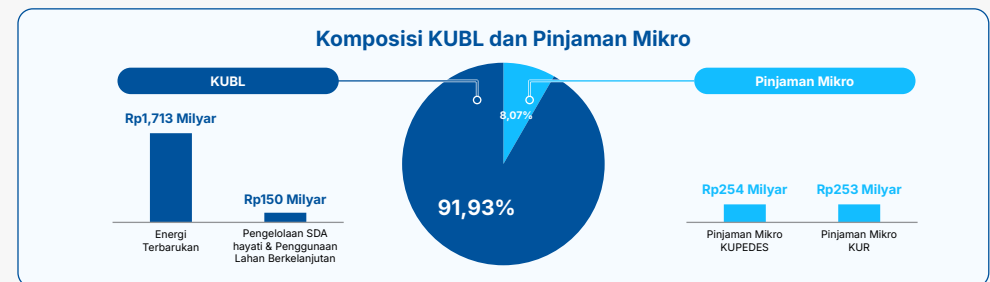
BRI menerbitkan laporan berkala atas dampak proyek/aset yang dibiayai sepanjang dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai revidi ahli lingkungan.

Laporan Alokasi

Pada periode pelaporan 31 Desember 2025, BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali (*refinancing*) beberapa proyek yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan BRI dan memiliki manfaat terhadap lingkungan maupun sosial.

Mengacu kepada ketentuan POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan sesuai dengan kerangka kerja *Green Bond*, BRI melakukan proses seleksi dan evaluasi terhadap portofolio dan *pipeline* pembiayaan yang berkaitan dengan sektor yang memenuhi syarat sesuai dengan kerangka *Green Bond* yang telah ditetapkan. 91,93% dana yang diperoleh digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) KUBL sedangkan 8,07% dana yang diperoleh digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan Dan Sosial. Adapun detail alokasi sebagai berikut:

Aktivitas	Alokasi Dana (Rp milyar)	Persentase (%)	Jenis Pembiayaan
KUBL			
Energi terbarukan	1.713	72,27%	<i>Refinancing</i>
Pengelolaan SDA hayati & Penggunaan Lahan Berkelanjutan	150	6,35%	<i>Refinancing</i>
Kegiatan umum lainnya, misalnya sektor mikro, kesehatan dan sosial			
Pinjaman Mikro KUPEDES	254	10,70%	<i>Refinancing</i>
Pinjaman Mikro KUR	253	10,68%	<i>Refinancing</i>



Alokasi untuk KUBS sebesar 21,38% atau Rp 0,507 triliun. *Project* yang dibiayai termasuk dalam kategori *Employment Generation* dan *Socioeconomic advancement and empowerment*.

Alokasi untuk KUBL sebesar 78,62% atau Rp 1,863 triliun. *Project* yang dibiayai termasuk dalam 2 kategori yaitu Energi Terbarukan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan

Green Bond Phase III

Dampak

Berdasarkan kerangka Green Bond Tahap III Tahun 2024, dampak lingkungan dan sosial yang sesuai berdasarkan sektor yang memenuhi syarat, yaitu:

KUBL

Sektor yang Memenuhi Syarat	Kesesuaian dengan SDGs	% Aset yang Memenuhi Syarat	Jenis Proyek	Deskripsi Singkat & Indikator Dampak
Energi Terbarukan	 	91,93%	Hydro Power Plant	Estimasi dampak lingkungan yang dihasilkan: - Energi terbarukan yang dihasilkan per tahun: 1.669.000 MWh dan 1.134.272 MWh. - Emisi GRK yang terhindar per tahun: 1.097.045 tCO2eq dan 1.614.223 tCO2eq. Proyek yang dibiayai adalah sebanyak 2 proyek yang akan direncanakan beroperasi pada tahun 2025.
Pengelolaan sumber daya alam hayati & penggunaan lahan yang berkelanjutan	 	8,07%	Pembiayaan Investasi Lahan Kelapa Sawit dengan proses produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan	BRI telah membiayai proyek kebun kelapa sawit berkelanjutan yang mengadopsi praktik dan standar domestik maupun global terbaik dalam produksi minyak sawit yang bertanggung jawab yakni memiliki sertifikasi RSPO dan/atau ISPO.

Kegiatan Umum Lainnya, Misalnya Sektor Mikro, Kesehatan Dan Sosial

Sektor yang Memenuhi Syarat

Pinjaman Mikro KUPEDES

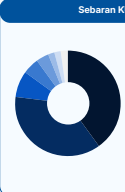


Kesesuaian dengan SDGs

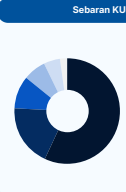
Perkiraan Manfaat Sosial

Menciptakan lapangan pekerjaan segmen UMKM, estimasi sebesar ±5.985 pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebaran KUPEDES berdasarkan Sektor



Sebaran KUPEDES Berdasarkan Wilayah

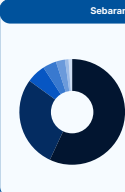


Socioeconomic advancement and empowerment (Kredit KUR)

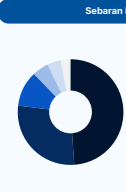



Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan telah menjangkau 5.526 orang diseluruh wilayah Indonesia, 4.516 merupakan penerima akses pinjaman perbankan untuk pertama kalinya melalui fasilitas KUR, yang mencerminkan perluasan inklusi keuangan. Selain itu sebanyak 2.367 nasabah merasakan peningkatan asset bisnis setelah menerima KUR.

Sebaran KUR Berdasarkan Sektor



Sebaran KUR Berdasarkan Wilayah



Kesimpulan

Laporan dampak atas penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 menunjukkan komitmen dan realisasi atas penerapan keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan UNSDG khususnya poin 7, 8, 10, 12 dan 13. BRI terus mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait untuk turut serta mendukung dan memajukan perekonomian nasional dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 merupakan bagian dari PUB sebesar Rp 15 Triliun yang direspon positif oleh investor yang ditandai dengan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) sebesar 1,64 kali. BRI juga telah mendapatkan review eksternal dari ahli lingkungan yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 70% (realisasi: 78,62%) kegiatan yang dibiayai *green bond* telah memenuhi kriteria sebagai KUBL dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan serta sesuai dengan *framework* yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut menegaskan kredibilitas Laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan kepatuhan serta komitmen BRI dalam memenuhi persyaratan *Green Bond*.

Lampiran I

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I TAHAP III

SDGs Center Universitas Diponegoro bertindak sebagai Pihak Ahli Lingkungan Eksternal yang ditunjuk untuk melakukan revidi atas pelaksanaan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2022 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Revidi dilakukan terhadap dokumen penerbitan obligasi, Green Bond Framework, Impact Report, serta dokumen pendukung lainnya pada periode pelaporan 2022–2025 melalui desk review dan penilaian kesesuaian terhadap POJK No. 60 Tahun 2017, POJK No. 51 Tahun 2017, ICMA Green Bond Principles, dan ASEAN Green Bond Standards. Berdasarkan pendekatan tersebut, penilaian difokuskan pada kesesuaian penggunaan dana dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), proses evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana hasil penerbitan obligasi, serta kualitas pelaporan penggunaan dana dan dampak lingkungan.

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Skor Akhir
1.	Use of Proceeds	3,20	35%	1,12
2.	Project Evaluation & Selection	3,46	25%	0,86
3.	Management of Proceeds	3,50	20%	0,70
4.	Reporting	2,92	20%	0,58
Total Skor Akhir				3,27
Predikat A – Sangat Baik				

Pada aspek penggunaan dana, hasil penilaian menunjukkan bahwa 100% dana hasil penerbitan obligasi telah dialokasikan, dengan 78,62% diarahkan untuk kegiatan KUBL yang seluruhnya berada

pada kategori energi terbarukan, sedangkan 21,38% dialokasikan untuk kegiatan umum lainnya, khususnya Pinjaman Mikro KUPeDES sebesar 10,78% dan Pinjaman Mikro KUR sebesar 10,68%. Seluruh alokasi tersebut dilakukan melalui skema refinancing terhadap portofolio pembiayaan yang telah ada. Pada aspek evaluasi dan seleksi proyek, BRI telah menerapkan tahapan identifikasi, pre-screening, review, dan allocation terhadap portofolio dan pipeline pembiayaan untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai sesuai dengan kategori pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Green Bond Framework dan POJK No. 60 Tahun 2017. Pada aspek pengelolaan dana, seluruh proceeds telah dialokasikan tanpa perubahan atas proyek pembiayaan yang telah ditetapkan, dengan komposisi penggunaan dana sebesar Rp1,863 miliar untuk KUBL kategori energi terbarukan, Rp254 miliar untuk Pinjaman Mikro KUPeDES, dan Rp253 miliar untuk Pinjaman Mikro KUR. Sementara itu, pada aspek pelaporan, BRI memperoleh skor tertinggi karena telah menyajikan informasi yang relatif komprehensif mengenai alokasi dana, kategori proyek yang dibiayai, indikator dampak lingkungan, serta transparansi pelaporan kepada publik.

Dari sisi dampak, pembiayaan melalui Green Bond menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial yang terukur. Pada kategori energi terbarukan, pendanaan proyek Hydro-energy Generation/PLTA menghasilkan produksi energi terbarukan sebesar 1.134.272 MWh dan 1.669.000 MWh per tahun, serta emisi GRK terhindar sebesar 1.097.045 tonCO₂e dan 1.614.223 tonCO₂eq per tahun. Pada dimensi sosial, pembiayaan mikro melalui program KUPeDES dan KUR berkontribusi terhadap penciptaan sekitar ±5.985 lapangan kerja melalui KUPeDES, menjangkau 5.526 penerima manfaat KUR, memberikan akses pembiayaan pertama kali kepada 4.516 nasabah, serta mendorong peningkatan aset usaha pada 2.367 nasabah. Pembiayaan KUPeDES terutama tersalurkan pada sektor pertanian (40%) dan perdagangan retail (37%), dengan distribusi wilayah terbesar di Jawa (57%), Sumatra (19%), dan Sulawesi (10%). Sementara itu, pembiayaan KUR didominasi oleh sektor pertanian (57%), perdagangan retail (28%), dan jasa (6%). Secara umum, obligasi ini berkontribusi terhadap pencapaian SDG 7, SDG 8, SDG 10, dan SDG 13.

Semarang, Maret 2026
Mewakili Universitas Diponegoro,

Head of LPPM Diponegoro University



Prof. Dr.-Ing. Suherman, S.T., M.T.

Chief of the SDGs Research Center Diponegoro University



Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.

Lampiran II

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

Aliran Dana

BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I. Bank BRI Tahap II Tahun 2023 untuk membiayai proyek KUBL sesuai dengan POJK 60. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali (*refinancing*) proyek yang sudah ada dalam portofolio BRI dan memiliki manfaat terhadap lingkungan maupun sosial, yaitu:

Aktivitas	Tipe Proyek	Persentase Alokasi Dana	Nilai Proyek (Rupiah)
KUBL			
Kategori Hijau		78,62%	1.863.165.684.938
Energi Terbarukan	PLTA	72,27%	1.712.786.881.079
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	Pembiayaan Investasi Lahan Kelapa Sawit dengan Proses Produksi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	6,35%	150.378.684.938
Kegiatan umum lainnya seperti pembiayaan di sektor mikro, kesehatan, sektor lainnya			
Kredit Mikro		21,38%	506.234.119.953

Manfaat Lingkungan dari Proyek yang Dibiayai

Semua proyek Green Sector memiliki dampak positif terhadap lingkungan, sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bank BRI. Indikator tersebut diperoleh melalui proses identifikasi dan perhitungan yang konsisten dan sesuai dengan best practice yang ada. Proyek yang dibiayai dengan penerbitan Green Bond BRI Tahap II Tahun 2023 telah sesuai dengan POJK No. 60/POJK.04/2017 serta berkontribusi pada pencapaian SDGs. Berikut adalah ringkasan manfaat lingkungan pada tahun 2023 dari proyek yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Green Bond Tahap II Tahun 2023 Bank BRI:

Indikator	PLTA	Pembiayaan Investasi Pada sektor kelapa sawit
Energi Terbarukan yang dihasilkan	1.134.272 MWh dan 1.669.000 MWh	N/A
Emisi GRK yang dapat dihindari	1.097.045 tCO ₂ e / tahun dan 1.614.223 tCO ₂ eq / tahun	N/A
Memiliki sertifikasi lingkungan sesuai jenis industri yang dipersyaratkan untuk tujuan berkelanjutan	N.A	Memiliki 2 sertifikasi ISPO atau RSPO

Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022

Pengantar

Sejak didirikan pada tahun 1895, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) telah menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia terutama di segmen UMKM. BRI terus berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan literasi keuangan, khususnya inklusi keuangan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi. Komitmen BRI tersebut selaras dengan visi BRI pada 2026 untuk menjadi *"Becoming One of -or The- Most Profitable Banks In southeast Asia"*. Strategi ini diwujudkan salah satunya melalui pemberian layanan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terdigitalisasi terutama di tiga daerah khusus 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) guna memastikan pemerataan akses keuangan dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk peran BRI dalam mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan, BRI meluncurkan kebijakan pembiayaan dengan mempertimbangkan LST. Dalam rangka mendorong Inklusi Finansial, BRI berupaya untuk mendekatkan layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. BRI saat ini telah memiliki 1.1 juta Agen BRILink yang tersebar di lebih dari 66 ribu desa. Fokus terhadap inklusi keuangan dan sumber pertumbuhan baru, BRI merampungkan holding Ultra Mikro (UMi) pada tahun 2021 yang tujuannya adalah memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat mikro dan ultra mikro di Indonesia. Holding ultra mikro dibentuk sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan terintegrasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Rincian Penerbitan

Pada tahun 2022, BRI menerbitkan MTN Bank BRI Tahun 2022 dengan nilai emisi sebesar Rp 5 triliun dalam 2 (dua) seri yaitu Seri A dan Seri B dan seluruh dana digunakan untuk penyaluran pembiayaan ke segmen mikro dan ultra mikro. Adapun saat ini seluruh seri MTN tersebut telah jatuh tempo.

Ringkasan Transaksi Obligasi

Nama Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022

Nilai Rp 5 Triliun

Seri	Tenor	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo	Kupon	Nilai	Status
A	2 Tahun	24 November 2022	24 November 2024	6,60%	Rp 2 Triliun	Mature
B	3 Tahun	24 November 2022	24 November 2025	6,98%	Rp 3 Triliun	Mature
Rating	idAAA (Pefindo)					
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia					

Ringkasan Kerangka Kerja

Sebagaimana tercantum pada Tujuan Penggunaan Dana dalam Memorandum Informasi Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022, dana dari penerbitan surat berharga ini digunakan untuk pembiayaan inklusif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan BI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam rupiah dan valuta asing.

Pelaporan

Alokasi Pelaporan

BRI melaporkan alokasi penggunaan dana secara berkala sekali dalam setahun paling lambat setahun setelah penerbitan disertai laporan hasil revidu oleh tenaga ahli eksternal yang kompeten di bidangnya.

Pelaporan Dampak

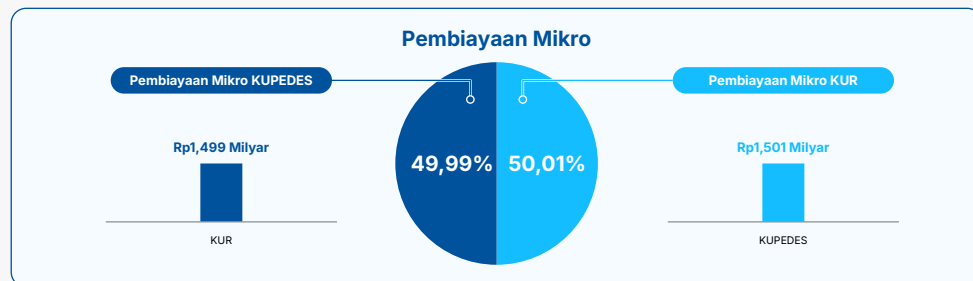
BRI menerbitkan laporan berkala atas dampak proyek/aset yang dibiayai sepanjang dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai revidu tenaga ahli eksternal yang kompeten di bidangnya.

Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022

Laporan Alokasi

Pada periode pelaporan 31 Desember 2025, BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan MTN Bank BRI Tahun 2022. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk pembiayaan Inklusif sebagaimana terkategori pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan BI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Proceeds sebesar Rp 5 triliun digunakan untuk penyaluran pembiayaan bank pada segmen bisnis mikro dan ultra mikro di bulan November 2023. Adapun per 31 Desember 2025, proceeds yang akan dilaporkan dalam *allocation report* adalah sebesar Rp 3 triliun sesuai dengan *outstanding* MTN yang masih memberikan impact pada tahun 2025..

Aktivitas Pembiayaan Inklusif	Jenis Pembiayaan	Alokasi Dana (Rp Miliar)	Persentase (%)
Pembiayaan Mikro KUPeDES	Pembiayaan Baru periode November 2022	1.501	50,01%
Pembiayaan Mikro KUR	Pembiayaan Baru periode November 2022	1.499	49,99%

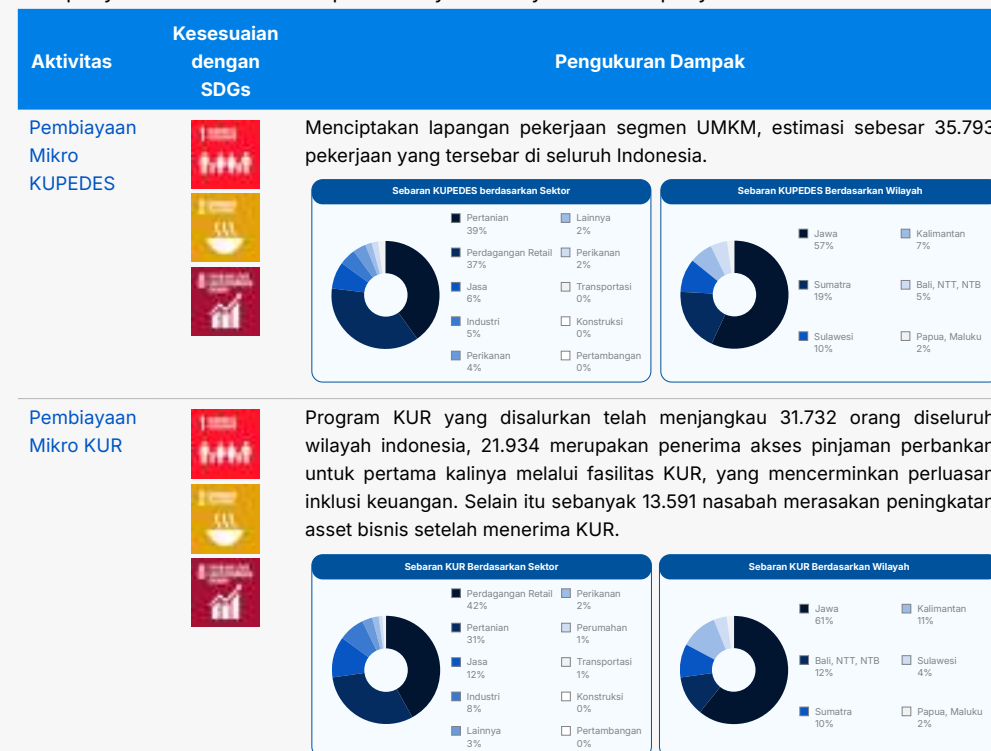


Dampak

Berdasarkan kategori pembiayaan inklusif yang tercantum dalam PBI 23 2021, PBI 24 2022 dan PBI21 2021, penerbitan Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022 memiliki dampak sosial berdasarkan sektor yang memenuhi syarat, yaitu:

Pembiayaan Inklusif

BRI bersama KPMG menyusun metodologi analisis dampak pada penciptaan lapangan pekerjaan atas penyaluran KUPeDES dan pemberdayaan Masyarakat atas penyaluran KUR.



Kesimpulan

Laporan MTN menunjukkan realisasi atas komitmen BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia yang sejalan dengan tujuan Pemerintah dan Regulator. BRI akan memperkuat kerjasama dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam proses alokasi, penggunaan dan monitoring dana hasil penerbitan MTN sehingga dapat terus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan maupun standar yang berlaku. Penerbitan Medium Term Notes merupakan salah satu usaha BRI untuk mewujudkan visi menjadi Champion of Financial Inclusion. BRI juga berhasil menarik minat investor terhadap surat berharga yang digunakan untuk tujuan inklusi keuangan. BRI telah memperoleh hasil revidi dari tenaga ahli eksternal (SDGs Center Universitas Diponegoro) yang menyatakan bahwa seluruh hasil penerbitan ini dipergunakan seluruhnya khusus untuk pembiayaan inklusif dan memiliki dampak sosial yang positif terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Lampiran I

MEDIUM TERM NOTES

SDGs Center Universitas Diponegoro bertindak sebagai Pihak Ahli Eksternal yang melakukan reviu atas pelaksanaan Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Reviu dilakukan terhadap dokumen penerbitan, laporan alokasi, laporan dampak, dan dokumen pendukung lainnya yang disediakan oleh BRI pada periode pelaporan sampai dengan 31 Desember 2025. Metodologi reviu dilakukan melalui *desk review* terhadap dokumen, penelaahan atas tujuan penggunaan dana, pola alokasi pembiayaan, pelaporan dampak, serta kesesuaiannya dengan kerangka pembiayaan inklusif yang dirujuk dalam dokumen penerbitan.

Evaluasi mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022, dan PADG Nomor 24/6/PADG/2022, yang menjadi dasar kategorisasi pembiayaan inklusif dalam dokumen MTN. Berdasarkan pendekatan tersebut, penilaian difokuskan pada kesesuaian penggunaan dana dengan pembiayaan inklusif, distribusi alokasi pada segmen mikro dan ultra mikro, mekanisme pelaporan alokasi dan dampak, serta relevansi dampak sosial yang dihasilkan dari penyaluran pembiayaan KUPeDES dan KUR.

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Skor Akhir
1.	<i>Use of Proceeds</i>	4,00	25%	1,00
2.	<i>Project Evaluation & Selection</i>	3,80	20%	0,76
3.	Mekanisme Penyaluran Pembiayaan	1,33	15%	0,20
4.	<i>Technical Assistance For MSMEs</i>	2,92	10%	0,40
5.	<i>Management of Fund</i>	3,80	15%	0,57
6.	<i>Reporting</i>	4,00	15%	0,60
Total Skor Akhir				3,27

Predikat **A – Sangat Baik**.

Dari sisi alokasi, dana terbagi hampir seimbang antara Pembiayaan Mikro KUPeDES sebesar Rp1.501 miliar (50,01%) dan Pembiayaan Mikro KUR sebesar Rp1.499 miliar (49,99%), yang keduanya dikategorikan sebagai pembiayaan baru periode November 2022. Pembiayaan KUPeDES terutama terserap pada sektor pertanian (39%) dan perdagangan retail (37%), sedangkan KUR didominasi oleh perdagangan retail (42%) dan pertanian (31%). Secara wilayah, penyaluran terbesar berada di Jawa, diikuti oleh Sumatra dan Sulawesi. Pelaporan dilakukan secara berkala melalui *allocation reporting* dan *impact reporting*, serta didukung metodologi pengukuran dampak yang disusun bersama KPMG.

Dari sisi dampak, pembiayaan Mikro KUPeDES diestimasi menciptakan 35.793 pekerjaan pada segmen UMKM, sedangkan Mikro KUR menjangkau 31.732 orang, dengan 21.934 nasabah memperoleh akses pinjaman bank untuk pertama kali dan 13.591 nasabah mengalami peningkatan aset bisnis. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa MTN Bank BRI Tahun 2022 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga memberikan dampak sosial positif melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pembiayaan, dan penguatan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Meski demikian, pelaporan ke depan masih dapat diperkuat, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara nilai emisi dan outstanding yang dilaporkan, serta dalam memperdalam baseline, asumsi, dan pemisahan antara output, outcome, dan impact.

Semarang, Maret 2026
 Mewakili Universitas Diponegoro,

Head of LPPM Diponegoro University



Prof. Dr.-Ing. Suherman, S.T., M.T.

Chief of the SDGs Research Center Diponegoro University



Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.

Lampiran II

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

Aliran Dana

BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan MTN. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali (*refinancing*) beberapa proyek yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan BRI dan memiliki manfaat terhadap sosial, yaitu:

Aktivitas	Tipe Proyek	Persentase Alokasi Dana	Nilai Proyek (Rupiah)
Penciptaan Lapangan Kerja (<i>Employment Generation</i>)	Pembiayaan Baru periode November 2022	50,01%	1.500.530.610.712
Peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi (<i>Socioeconomic advancement</i>)	Pembiayaan Baru periode November 2022	49,99%	1.500.219.852.011

Berdasarkan kategori pembiayaan inklusif yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan BI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penerbitan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 memiliki dampak sosial berdasarkan sektor yang memenuhi syarat, yaitu:

Sektor	Estimasi Manfaat Sosial dan Lingkungan
Penciptaan Lapangan Kerja	Menciptakan lapangan pekerjaan segmen UMKM, estimasi sebesar 16,594 pekerjaan yang tersebar pada berbagai penjurudi seluruh Indonesia.
Pengembangan usaha mikro <i>non-bankable</i>	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperuntukkan untuk mendukung pengembangan usaha Mikro <i>non-bankable</i> dan diperkirakan menciptakan lebih dari 20,257 pekerjaan di berbagai wilayah Indonesia.

Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2024

Pengantar

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) didirikan sejak tahun 1895 dan selalu menjadi salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia terutama di segmen UMKM. BRI terus berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam mensejahterakan masyarakat dengan mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan literasi keuangan dalam mencapai inklusi keuangan nasional. Dedikasi BRI pada segmen UMKM terefleksi pada visi BRI 2026 untuk menjadi "*Becoming One of -or The- Most Profitable Banks in Southeast Asia*".

Dalam mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan, BRI berkomitmen untuk mendukung finansial masyarakat melalui AgenBRI-Link yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terutama daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Peran AgenBRI-Link semakin signifikan dalam menyediakan akses dan layanan keuangan formal yang pada akhir Desember 2024 BRI telah memiliki 1,1 juta agen di lebih dari 66 ribu desa.

Untuk mendorong Inklusi Finansial dan meningkatkan integrasi pelayanan keuangan pada masyarakat, BRI mengembangkan hybrid bank atau perpaduan pengembangan digitalisasi di perbankan sambil terus menyediakan layanan konvensional untuk mendekatkan layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini semakin memperkuat holding Ultra Mikro yang dibentuk untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah terhadap produk perbankan yang berkesinambungan dan terintegrasi.

Bank BRI Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023

Pada tahun 2023, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 dengan nilai emisi sebesar Rp 500 Miliar dan seluruh *proceeds* digunakan untuk penyaluran pembiayaan ke segmen mikro dan ultra mikro.

Ringkasan Transaksi Obligasi

Nama Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023

Nilai Rp 500 Miliar

Seri	Tenor	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo	Kupon	Dana	Status
A	5 Tahun	6 Juli 2023	6 Juli 2028	6,45%	Rp 500 Miliar	Aktif
Rating	idAAA (Pefindo)					
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia					

Ringkasan Kerangka Kerja Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2024

Sesuai dengan tujuan penggunaan dana dalam Prospektus Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023, *proceeds* dari penerbitan surat berharga ini dipergunakan seluruhnya khusus untuk Pembiayaan Inklusif seperti pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/ atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam rupiah dan valuta asing.

Pelaporan

Alokasi Pelaporan

BRI melaporkan alokasi penggunaan dana secara berkala 1 kali dalam 1 tahun paling lambat setahun setelah penerbitan oleh tenaga ahli eksternal.

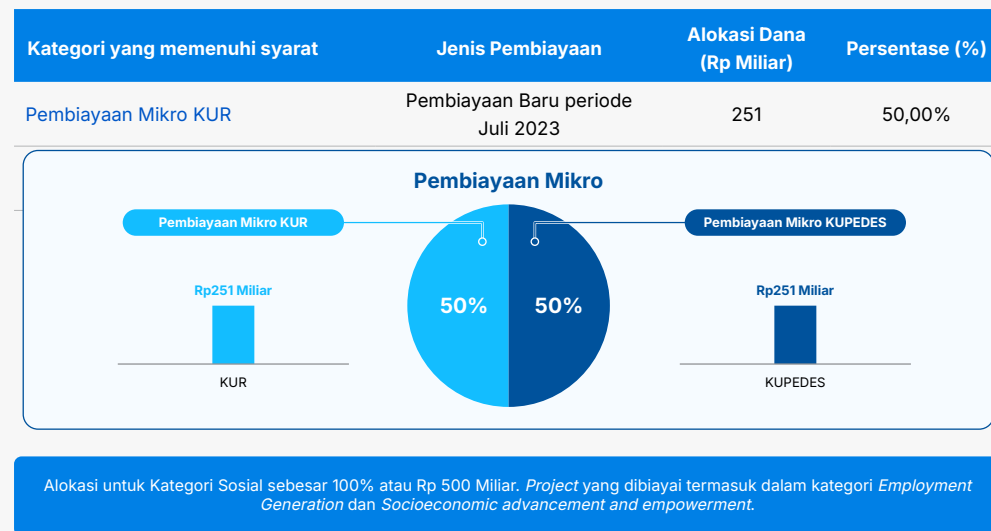
Impact Reporting

BRI menerbitkan laporan berkala atas dampak proyek/aset yang dibiayai sepanjang dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai revidasi tenaga ahli eksternal.

Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2024

Laporan Alokasi

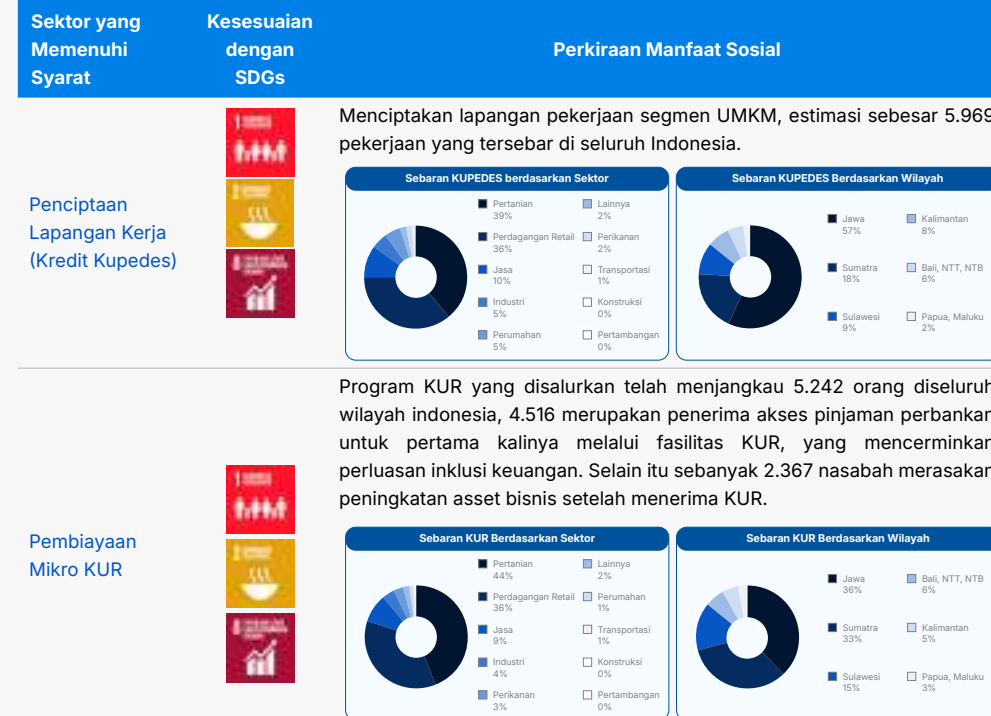
Pada periode pelaporan 31 Desember 2025, BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk pembiayaan Inklusif yang mengacu kepada ketentuan Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam Rupiah dan Valuta Asing. Adapun detail alokasi sebagai berikut:



Dampak

Berdasarkan kategori pembiayaan inklusif seperti pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021, penerbitan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 memiliki dampak sosial yang sesuai berdasarkan sektor yang memenuhi syarat, yaitu:

Pembiayaan Inklusif



Kesimpulan

Laporan Obligasi Subordinasi BRI tahun 2024 merupakan wujud komitmen BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia yang selaras dengan tujuan Pemerintah dan Regulator. BRI akan memperkuat kerjasama dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam proses alokasi, penggunaan dan monitoring dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi sehingga dapat terus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan maupun standar yang berlaku.

Penerbitan Obligasi Subordinasi selain merupakan kewajiban pemenuhan modal pelengkap BRI juga merupakan salah satu usaha BRI untuk mewujudkan visi menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion*. BRI juga berhasil menarik minat investor terhadap Obligasi Subordinasi BRI yang terlihat dari hasil *bookbuilding* yang *oversubscribe* sampai 1,77 kali. BRI telah memperoleh hasil revidu dari tenaga ahli eksternal (SDGs Universitas Diponegoro) yang menyatakan bahwa seluruh hasil penerbitan ini dipergunakan seluruhnya khusus untuk pembiayaan inklusif dan memiliki dampak sosial yang positif terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Lampiran I

SUBORDINASI IV TAHAP I

SDGs Center Universitas Diponegoro bertindak sebagai Pihak Ahli Eksternal yang ditunjuk untuk melakukan revidi atas pelaksanaan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI yang dalam dokumen disebut sebagai Tahun 2024, diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Revidi dilakukan terhadap dokumen penerbitan obligasi, *Impact Report*, serta dokumen pendukung lainnya yang disediakan oleh BRI untuk periode pelaporan 2023–2024. Metodologi revidi dilakukan melalui *desk review* terhadap dokumen, laporan alokasi dana, laporan dampak sosial, dan dokumen kebijakan internal yang relevan, serta melalui penilaian kesesuaian terhadap POJK No. 51 Tahun 2017, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), dan PADG Nomor 24/6/PADG/2022. Berdasarkan pendekatan tersebut, penilaian difokuskan pada kesesuaian penggunaan dana dengan kegiatan pembiayaan, alokasi portofolio kepada MSMEs, mekanisme penyaluran pembiayaan, dukungan terhadap MSMEs, pengelolaan dana, serta kualitas pelaporan penggunaan dana dan dampak sosial yang dihasilkan. Laporan dampak untuk sektor *Socioeconomic advancement and empowerment & Employment Generation* telah diselaraskan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Halaman 4 dan 5).

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Skor Akhir
1.	<i>Use of Proceeds</i>	4,00	25%	1,00
2.	<i>Project Evaluation & Selection</i>	4,00	20%	0,80
3.	Mekanisme Penyaluran Pembiayaan	1,33	15%	0
4.	<i>Technical Assistance For MSMEs</i>	4,00	10%	0,40
5.	<i>Management of Fund</i>	4,00	15%	0,60
6.	<i>Reporting</i>	4,00	15%	0,60
Total Skor Akhir				3,40
Predikat A – Sangat Baik .				

Pada aspek penggunaan dana, seluruh dana hasil penerbitan obligasi subordinasi sebesar Rp500 miliar telah dialokasikan 100% untuk pembiayaan inklusif yang secara khusus menyasar segmen mikro dan ultra mikro. Alokasi tersebut dibagi secara seimbang, yaitu 50% untuk Pembiayaan Mikro KUPEDES dan 50% untuk Pembiayaan Mikro KUR. Penggunaan dana ini dinilai selaras dengan tujuan dalam prospektus, yakni mendukung pembiayaan kepada UMKM, korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam kerangka pembiayaan inklusif. Dengan demikian, *proceeds* tidak digunakan untuk tujuan umum perusahaan, melainkan diarahkan pada aktivitas yang memiliki muatan sosial kuat, khususnya perluasan akses pembiayaan bagi kelompok usaha yang menjadi basis inklusi keuangan nasional. Seluruh alokasi juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu *employment generation* dan *socioeconomic advancement and empowerment*.

Pada aspek mekanisme penyaluran, dokumen menyebut adanya pembiayaan baru Juli 2023 untuk KUPEDES dan KUR, namun juga menjelaskan bahwa *proceeds* digunakan untuk *refinancing* atas portofolio yang telah ada. Karena itu, aspek ini memperoleh skor 0,00, yang menunjukkan bahwa penjelasan mekanisme penyaluran masih belum memadai dalam kerangka penilaian. Pada aspek dukungan terhadap MSMEs, BRI menekankan perluasan akses pembiayaan dan inklusi keuangan melalui ekosistem hybrid bank, AgenBRILink di lebih dari 66 ribu desa, dan penguatan *holding ultra* mikro. Pada aspek pengelolaan dana, 100% *proceeds* telah dialokasikan dan dapat ditelusuri, yakni Rp251.014.483.372 untuk KUPEDES dan Rp250.966.539.414 untuk KUR.

Semarang, Maret 2026
 Mewakili Universitas Diponegoro,

Head of LPPM Diponegoro University



Prof. Dr.-Ing. Suherman, S.T., M.T.

Chief of the SDGs Research Center Diponegoro University



Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.

Lampiran II

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

Aliran Dana

BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk pembiayaan Inklusif yang mengacu kepada ketentuan Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam Rupiah dan Valuta Asing. Adapun detail alokasi sebagai berikut:

Aktivitas	Tipe Proyek	Tipe Proyek	Nilai Proyek (Rupiah)
Employment Generation	KUPEDES	50,00%	251.014.483.372
Socioeconomic advancement	KUR	50,00%	250.966.539.414

Berdasarkan kategori pembiayaan inklusif yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan BI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penerbitan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 memiliki dampak sosial berdasarkan sektor yang memenuhi syarat, yaitu:

Proyek	Estimasi Manfaat Sosial dan Lingkungan
Employment Generation	Menciptakan lapangan pekerjaan segmen UMKM yang tersebar pada berbagai
Socioeconomic advancement	Memberikan akses pembiayaan pertama dan dampak peningkatan pada asset bisnis nasabah

Social Bond

Pengantar

BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada segmen mikro, kecil dan menengah, terus memperkuat kontribusinya bagi negeri. Melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, BRI berperan aktif mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, serta ketahanan social dan ekonomi. BRI berperan memberikan layanan terbaik dengan membina, memberdayakan, serta mengoptimalkan kompetensi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan mikro. Upaya ini sejalan dengan visi Bank BRI menjadi “Becoming One of -or The- Most Profitable Banks In southeast Asia”.

Sebagai agen Pembangunan, BRI berperan dalam menekan ketimpangan ekonomi melalui distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Selain itu, BRI mengambil peran dalam pemberdayaan komunitas dan penyediaan akses permodalan bagi segmen yang kurang terlayani, seperti pengembangan usaha mikro, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan infrastruktur dasar sosial demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara luas.

Seluruh aktivitas bisnis dan inisiatif strategis BRI dijalankan secara berkelanjutan, selaras dengan butir-butir UN SDG. Hal ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip ESG. Salah satu langkah konkretnya adalah penerbitan Social Bond sebagai sumber likuiditas bank. Social Bond ini merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pembiayaan berkelanjutan BRI guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh pelosok negeri.

Penerbitan Social Bond

Pada tahun 2025, BRI menerbitkan Social Bond Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dengan nilai emisi sebesar Rp 5 triliun dan seluruh proceeds digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek dengan kategori KUBS.

Ringkasan Transaksi Obligasi

Nama Medium Term Notes Bank BRI Tahun 2022

Nilai Rp 5 Triliun

Seri	Tenor	Tanggal Pencatatan	Jatuh Tempo	Kupon	Nilai	Status
A	2 Tahun	26 Juni 2025	26 Juni 2027	6,45%	Rp1.563 Miliar	Aktif
B	3 Tahun	26 Juni 2025	26 Juni 2027	6,55%	Rp2.110 Miliar	Aktif
C	5 Tahun	26 Juni 2025	26 Juni 2027	6,60 %	Rp1.326 Miliar	Aktif
Rating	idAAA (Pefindo)					
Pencatatan	Bursa Efek Indonesia					

Ringkasan Kerangka Kerja Obligasi Social Bond BRI Tahun 2025

Kerangka keuangan sosial BRI dirancang untuk mendukung kegiatan pembiayaan dan/atau penerbitan obligasi yang memberikan dampak positif pada aspek sosial. Kerangka ini mengidentifikasi kegiatan usaha berwawasan sosial yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup serta pengembangan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka keuangan sosial ini selaras dengan prinsip-prinsip keuangan sosial yang tertuang dalam:

- ICMA¹ Social Bond principles 2023
- LMA/APLMA/LSTA² Social Loan Principles 2023
- POJK Number 51 Year 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- POJK Nomor 18 Tahun 2023 Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Alokasi Penggunaan Dana

Kelompok sasaran mencakup, namun tidak terbatas pada, individu dan komunitas:

No	Sasaran	Keterangan
1	Hidup di bawah garis kemiskinan	Definisi di bawah garis kemiskinan merujuk pada BPS ³ .
2	Masyarakat yang putus sekolah (<i>undereducated</i>)	Individu dengan Pendidikan kurang dari 9 tahun ⁴ .
3	Masyarakat yang kurang memiliki akses ke barang dan jasa penting/kebutuhan pokok ⁵	Individu atau komunitas yang tidak memiliki akses memadai kebutuhan dan layanan dasar, terutama yang berperan penting dalam menjaga kualitas hidup yang layak. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh hambatan geografis, ekonomi, sosial, atau sistemik yang menghalangi memperoleh sumber daya yang diperlukan ⁶
4	Pengangguran	-
5	Perempuan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender	-
6	Kelompok rentan lain termasuk akibat bencana alam	Individu yang kondisinya dipengaruhi oleh faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kerentanan seseorang, komunitas, aset, atau sistem terhadap dampak bahaya, termasuk dalam kelompok sasaran "pengangguran"

¹ International Capital Markets Association

² Loan Market Association, the Asia Pacific Loan Market Association, and the Loan Syndications and Trading Association

³ <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

⁴ Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang “Wajib Belajar”

⁵ Merujuk pada individu yang termasuk dalam kategori rendah dan menengah (di bawah 70,00) berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/11/15/2033/indonesias-human-development-index-in-2023-reached-74-39--an-increase-of-0-62-points--0-84-percent--compared-to-previous-year--73-77--.html>

⁶ Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal.

Social Bond

Dana yang diperoleh dialokasikan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek sosial yang menyediakan atau mempromosikan satu atau lebih kategori berikut bagi kelompok sasaran yang memenuhi syarat. Namun, cakupan tidak terbatas pada daftar di bawah ini dan tidak disusun berdasarkan urutan tertentu.

No	Kategori	Deskripsi	Kegiatan	Sasaran
1	Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga	Kegiatan meliputi aktivitas air minum bersih, sistem pembuangan limbah, sanitasi, transportasi, dan infrastruktur energi.	Kegiatan meliputi pengembangan, produk, infrastruktur, dan peralatan untuk infrastruktur: a. Air minum bersih b. Saluran pembuangan c. Sanitasi d. Transportasi e. Energi	1, 2, 3, 5, 6
2	Akses terhadap layanan esensial	Kegiatan meliputi aktivitas kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan, perawatan kesehatan, pembiayaan, serta layanan keuangan.	Kegiatan meliputi pengembangan, produk, infrastruktur, dan peralatan yang mendukung akses ke layanan penting, seperti: a. Kesehatan b. Pendidikan c. Pelatihan kejuruan d. Perawatan kesehatan e. Pembiayaan dan layanan keuangan	1, 2, 3, 5, 6
3	Perumahan yang terjangkau	Kegiatan meliputi pengembangan rumah terjangkau atau kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Kegiatan meliputi Pengembangan perumahan terjangkau atau kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ⁷⁸⁹ .	1, 2, 3, 5, 6
4	Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro	Kegiatan meliputi penyediaan dan/atau promosi yang meliputi pembiayaan UMKM dan keuangan mikro ¹⁰ .	Kegiatan meliputi penyediaan dan/atau promosi untuk: a. Pembiayaan segmen kecil dan menengah b. Pembiayaan Mikro	1, 2, 3, 4, 5, 6
5	Ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan	Kegiatan meliputi akses fisik, sosial, dan ekonomi pada pangan dan cukup sesuai kebutuhan dan persyaratan gizi; pertanian tangguh; pengurangan residu dan limbah pangan; serta peningkatan produktivitas produsen skala kecil	Kegiatan meliputi produksi, pertanian, produk, infrastruktur, dan distribusi untuk mendukung: a. Ketahanan pangan, dan/atau b. Rantai pasok pangan	1, 2, 3, 4, 5, 6
6	Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi	Kegiatan meliputi akses dan kontrol terhadap aset, layanan, sumber daya, dan peluang; partisipasi serta integrasi yang adil, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan.	Kegiatan meliputi penyediaan dan/atau promosi yang memenuhi satu atau lebih kriteria: a. UMKM b. Usaha yang dipimpin perempuan c. Populasi lansia atau anak muda yang rentan	1, 2, 3, 4, 5

Social Bond

Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek

Proses evaluasi dan seleksi dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proyek yang didanai sejalan dengan Kriteria KUBS BRI serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memitigasi risiko dan memastikan bahwa setiap proyek memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan strategis sosial BRI. Tahapan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut:

- a. Unit bisnis terkait bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengusulkan KUBS yang akan dibiayai atau dibiayai kembali. Proses ini mencakup penilaian independen terhadap proyek berdasarkan kriteria kelayakan dan pengecualian, sebagai bagian dari prosedur evaluasi kredit; dan
- b. Unit kerja bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui pembiayaan atau pembiayaan kembali KUBS yang diajukan guna memastikan kesesuaiannya dengan kerangka kerja. Unit-unit tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:
 1. *Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division*
 2. *Asset & Liabilities Management Desk*
 3. *Treasury Business Division*
 4. *Enterprise Data Management & Analytics Division*
 5. *Environmental, Social and Governance Division*

Pelaporan

Pelaporan Alokasi

BRI melaporkan alokasi penggunaan dana secara berkala 1 kali dalam 1 tahun paling lambat setahun setelah penerbitan oleh tenaga ahli eksternal.

Impact Reporting

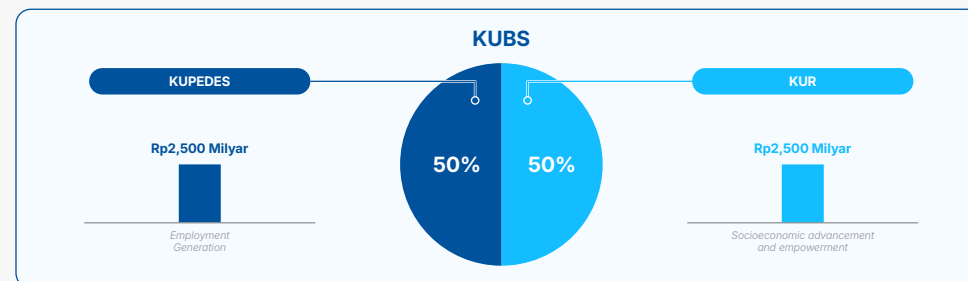
BRI menerbitkan laporan berkala atas dampak proyek/aset yang dibiayai sepanjang dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai reviu tenaga ahli eksternal.

Laporan Alokasi

Pada periode pelaporan 31 Desember 2025, BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan *Social Bond*. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk:

1. Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro
2. Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi

Social Project	Produk	Tipe Pembiayaan (Loan Type)	Alokasi Dana (Rp Miliar)	Persentase (%)
Socioeconomic advancement and empowerment	KUR	Refinancing	2.500	50,00%
Employment Generation	KUPEDES	Refinancing	2.500	50,00%



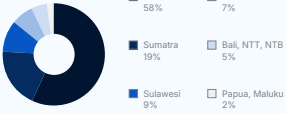
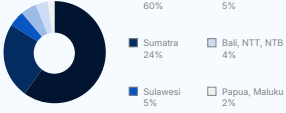
Alokasi untuk KUBS sebesar 100% atau Rp 5 Triliun. *Project* yang dibiayai termasuk dalam project *Employment Generation* dan *Socioeconomic advancement and empowerment*.

Dampak

Berdasarkan kategori pembiayaan inklusif seperti pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/ atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021, penerbitan *Social Bond* Bank BRI Tahun 2025 memiliki dampak sosial yang sesuai berdasarkan sektor yang memenuhi syarat, yaitu:

Social Bond

Pembiayaan Inklusif

Sektor yang Memenuhi Syarat	Kesesuaian dengan SDGs	Perkiraan Manfaat Sosial
Pembiayaan Mikro KUPEDES	  	Menciptakan lapangan pekerjaan segmen UMKM, estimasi sebesar 59.091 pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran KUPEDES berdasarkan Sektor  Sebaran KUPEDES Berdasarkan Wilayah 
Pembiayaan Mikro KUR	  	Program KUR yang disalurkan telah menjangkau 54.646 orang diseluruh wilayah Indonesia, 44.694 merupakan penerima akses pinjaman perbankan untuk pertama kalinya melalui fasilitas KUR, yang mencerminkan perluasan inklusi keuangan. Selain itu sebanyak 23.422 nasabah merasakan peningkatan asset bisnis setelah menerima KUR. Sebaran KUR Berdasarkan Sektor  Sebaran KUR Berdasarkan Wilayah 

Kesimpulan

Laporan Obligasi Subordinasi BRI tahun 2024 merupakan wujud komitmen BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia yang selaras dengan tujuan Pemerintah dan Regulator. BRI akan memperkuat kerjasama dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam proses alokasi, penggunaan dan monitoring dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi sehingga dapat terus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan maupun standar yang berlaku.

BRI juga berhasil menarik minat investor terhadap Obligasi Subordinasi BRI yang terlihat dari hasil bookbuilding yang oversubscribe sampai 1,77 kali. BRI telah memperoleh hasil revidi dari tenaga ahli eksternal (SDGs-Hub UNDIP) yang menyatakan bahwa seluruh hasil penerbitan ini dipergunakan seluruhnya khusus untuk pembiayaan inklusif dan memiliki dampak sosial yang positif terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Lampiran I

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL I TAHAP I

SDGs Center Universitas Diponegoro bertindak sebagai Pihak Ahli Sosial Eksternal yang ditunjuk untuk melakukan revidi atas pelaksanaan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Revidi dilakukan terhadap dokumen penerbitan obligasi, *Social Bond Framework*, *Impact Report*, serta dokumen pendukung lainnya yang disediakan oleh BRI untuk periode pelaporan 2022–2025. Penilaian dilakukan melalui *desk review* dan uji kesesuaian terhadap POJK No. 51 Tahun 2017, POJK No. 18 Tahun 2023, *ICMA Social Bond Principles*, *ASEAN Social Bond Standards*, serta *Social Loan Principles*. Berdasarkan pendekatan tersebut, evaluasi difokuskan pada kesesuaian penggunaan dana dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), proses evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana hasil penerbitan obligasi, serta kualitas pelaporan penggunaan dana dan dampak sosial yang dihasilkan.

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Skor Akhir
1.	<i>Use of Proceeds</i>	4,00	35%	1,40
2.	<i>Project Evaluation & Selection</i>	3,75	20%	0,94
3.	<i>Management of Proceeds</i>	3,63	20%	0,73
4.	<i>Reporting</i>	3,8	20%	0,76
Total Skor Akhir				3,82

Predikat **A – Sangat Baik**.

Pada aspek penggunaan dana, hasil revidi menunjukkan bahwa 100% dana hasil penerbitan obligasi telah dialokasikan, dengan komposisi 50% untuk kategori *socioeconomic advancement and empowerment*, khususnya pembiayaan sektor mikro melalui Pinjaman Mikro KUR, dan 50% untuk

kategori *employment generation*, khususnya pembiayaan sektor mikro melalui Pinjaman Mikro KUPeDES. Seluruh alokasi dilakukan melalui skema *refinancing* terhadap portofolio pembiayaan yang telah ada, dan secara substansi telah memenuhi ketentuan dalam *Social Bond Framework* BRI yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 70% dana digunakan untuk KUBS dan maksimal 30% untuk kegiatan umum lainnya. Pada aspek evaluasi dan pemilihan proyek, BRI telah menerapkan tahapan identifikasi, *pre-screening*, *review*, dan *allocation* terhadap portofolio maupun *pipeline* pembiayaan yang memenuhi syarat, untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai selaras dengan kategori pembiayaan berwawasan sosial. Sementara itu, pada aspek pengelolaan dana, *proceeds* dikelola melalui mekanisme internal bank yang memungkinkan pemantauan alokasi dana secara terstruktur, tanpa perubahan atas proyek pembiayaan yang telah ditetapkan. Komposisi alokasi tersebut tercermin pada pembiayaan Pinjaman Mikro KUR sebesar Rp2.500.185.024.921 dan Pinjaman Mikro KUPeDES sebesar Rp2.500.031.472.801. Pada aspek pelaporan, BRI juga telah menyampaikan informasi yang relatif komprehensif mengenai alokasi dana, kategori proyek yang dibiayai, indikator dampak sosial, serta transparansi pelaporan kepada publik.

Dari sisi dampak, pembiayaan melalui *Social Bond* menghasilkan manfaat sosial yang terukur pada dua kategori utama. Pada kategori *socioeconomic advancement and empowerment*, pembiayaan sektor mikro melalui Pinjaman Mikro KUR telah memberikan akses pinjaman perbankan pertama kali kepada 44.694 nasabah serta peningkatan akses bisnis bagi 23.422 nasabah. Pada kategori *employment generation*, pembiayaan mikro melalui program KUPeDES berkontribusi terhadap penciptaan 59.091 lapangan kerja pada segmen UMKM. Selain itu, pembiayaan Pinjaman Mikro KUR tersebar terutama pada sektor pertanian (43%), perdagangan retail (37%), dan jasa (8%), dengan distribusi wilayah terbesar di Jawa (60%), Sumatra (24%), Sulawesi (5%), dan Kalimantan (5%). Adapun pembiayaan KUPeDES didominasi oleh sektor pertanian (40%) dan perdagangan retail (36%). Secara umum, instrumen ini juga berkontribusi terhadap pencapaian SDG 1, SDG 2, dan SDG 8.

Semarang, Maret 2026
Mewakili Universitas Diponegoro,

Head of LPPM Diponegoro University



Prof. Dr.-Ing. Suherman, S.T., M.T.

Chief of the SDGs Research Center Diponegoro University



Prof. Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.

Lampiran II

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

Aliran Dana

BRI telah mengalokasikan 100% dana hasil penerbitan Social Bond. Dana yang diperoleh diperuntukkan untuk membiayai kembali (refinancing) beberapa proyek yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan BRI dan memiliki manfaat terhadap sosial, yaitu:

Aktivitas	Tipe Proyek	Tipe Proyek	Nilai Proyek (Rupiah)
Employment Generation	KUPEDES	50,00%	251.014.483.372
Socioeconomic advancement	KUR	50,00%	250.966.539.414

Indeks Standar Pelaporan

Indeks Isi Standar GRI 2021

Pernyataan Penggunaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah melaporkan sesuai dengan GRI Standar untuk periode 01 Januari - 31 Desember 2025

Penggunaan GRI 1 : GRI 1: Landasan 2021

Standar Sektor GRI : GRI G4 Jasa Keuangan

GRI Indeks	Pengungkapan-pengungkapan	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Yang Tidak Dicantumkan		Rujukan Standar Sektor GRI
				Alasan	Penjelasan	
Pengungkapan Umum						
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	A. Organisasi dan Praktik Pelaporan Mereka					
	2-1 Detail organisasi	14				
	2-2 Entitas yang tercakup dalam laporan keberlanjutan organisasi					
	2-3 Periode laporan, frekuensi, dan kontak	4-5				
	2-4 Informasi yang dinyatakan kembali	4				
	2-5 Penjaminan eksternal	5				
	B. Aktivitas dan Pekerja					
	2-6 Kegiatan, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya	14-16, 211				
	2-7 Pekerja	184, 228-230				
	2-8 Tenaga kerja yang bukan pekerja	184, 230				
	C. Tata Kelola					
	2-9 Tenaga kerja yang bukan pekerja	144-158,172				
	2-10 Nominasi dan seleksi pejabat tata kelola tertinggi	160, 170				
	2-11 Pejabat tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	144				
	2-12 Peran pejabat tata kelola tertinggi dalam memantau dampak manajemen	31, 41, 172				
	2-13 Delegasi tanggung jawab dalam mengelola dampak	172				
	2-14 Peran pejabat tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	172				
	2-15 Benturan kepentingan	160				
	2-16 Komunikasi terkait perhatian yang bersifat kritis	159				
	2-17 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	171, 175				
	2-18 Evaluasi kinerja pejabat tata kelola tertinggi	166, 175,				
	2-19 Kebijakan remunerasi	166,171,				
	2-20 Proses menentukan remunerasi	166, 171, 189				

GRI Indeks	Pengungkapan-pengungkapan	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Yang Tidak Dicantumkan		Rujukan Standar Sektor GRI
				Alasan	Penjelasan	
	2-21 Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	166, 189, 233				
	D. Strategi, kebijakan, dan praktik					
	2-22 Pernyataan pada pengembangan strategi keberlanjutan	6, 9				
	2-23 Komitmen kebijakan	25, 26, 190, 191, 193, 195, 207				
	2-24 Komitmen dalam menanamkan kebijakan	25, 172, 187, 190, 207,				
	2-25 Proses remediasi dampak negatif	128				
	2-26 Mekanisme pemberian nasihat dan meningkatkan perhatian	194, 208,				
	2-27 Kepatuhan dalam undang-undang dan peraturan	134				
	2-28 Keanggotaan asosiasi	19				
	E. Keterlibatan pemangku kepentingan					
	2-29 Pendekatan pada pelibatan pemangku kepentingan	31-32				
	2-30 Perjanjian perundingan kolektif	197, 232				
GRI 3: Topik Material 2021	3-1 Proses menentukan topik material	31,33-35				
	3-2 Daftar topik material	35				
	3-3 Manajemen topik material	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
Topik Material						
Perubahan Iklim						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				

GRI Indeks	Pengungkapan-pengungkapan	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Yang Tidak Dicantumkan		Rujukan Standar Sektor GRI
				Alasan	Penjelasan	
GRI 102: Perubahan Iklim 2025	102-1 Transition plan for climate change mitigation	47, 48				
	102-2 Climate change adaptation plan	51, 54, 58				
	102-3 Just transition	65				
	102-4 GHG emissions reduction targets and progress	69				
	102-5 Scope 1 GHG emissions	68				
	102-6 Scope 2 GHG emissions	68				
	102-7 Scope 3 GHG emissions	51				
	102-8 GHG emissions intensity	51				
	102-9 GHG removals in the value chain	277	N.A	Tidak relevan dengan proses bisnis BRI	Sebagai institusi keuangan, BRI tidak mengelola aset berbasis lahan maupun kolam penyimpanan karbon seperti hutan, lahan gambut, atau biomassa, yang menjadi basis perhitungan penghilangan GRK sebagaimana dimaksud dalam pengungkapan ini. Dengan demikian, tidak terdapat data penghilangan GRK, metodologi perhitungan, maupun dampak terkait yang perlu diuraikan lebih lanjut	
	102-10 Carbon credits	72				
Energi						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68, 77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 302: Energi 2016	302-1 Konsumsi energi dalam organisasi	77, 242				
	302-2 Konsumsi energi luar organisasi	77, 242				
	302-3 Intensitas energi	77, 242				
	302-4 Pengurangan Konsumsi energi	77, 242				
	302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	77				
Kinerja Ekonomi						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68, 77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				

GRI Indeks	Pengungkapan-pengungkapan	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Yang Tidak Dicantumkan		Rujukan Standar Sektor GRI
				Alasan	Penjelasan	
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	211, 212				
	201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	17				
	201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	197				
	201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	17				
Keberadaan Pasar						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1 Rasio standar upah pekerja entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	189, 232				
	202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	278		Seluruh anggota manajemen senior adalah warga negara Indonesia.		
Dampak Ekonomi Tidak Langsung						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	199				
	203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	200-205, 217				
Antikorupsi						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 205: Antikorupsi 2016	205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	136				
	205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	135				
	205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	134, 238-239				
Perilaku Antikompetitif						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 206: Perilaku antikompetitif 2016	206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	131, 134				
Pajak						

GRI Indeks	Pengungkapan-pengungkapan	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Yang Tidak Dicantumkan		Rujukan Standar Sektor GRI
				Alasan	Penjelasan	
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 207: Pajak 2019	207-1 Pendekatan terhadap pajak	132				
	207-2 Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak	132				
	207-3 Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak	132				
	207-4 Laporan per negara	213				
Ketenagakerjaan						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 401: Ketenagakerjaan 2016	401-1 Perekrutan pekerja baru dan pergantian pekerja	184, 231, 232, 235				
	401-2 Tunjangan yang diberikan pekerja purna waktu yang tidak diberikan kepada pekerja sementara atau paruh waktu	189, 190, 197				
	401-3 Cuti melahirkan	236				
Kesehatan dan Keselamatan Kerja						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	195-196				
	403-2 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	196, 198				
	403-3 Layanan kesehatan kerja	193				
	403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	196				
	403-5 Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	196				
	403-6 Promosi kesehatan kerja	193				
	403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	193				
	403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	195				
	403-9 Kecelakaan kerja	195-196				
	403-10 Penyakit akibat kerja	195-196				

GRI Indeks	Pengungkapan-pengungkapan	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Yang Tidak Dicantumkan		Rujukan Standar Sektor GRI
				Alasan	Penjelasan	
Pelatihan dan Pendidikan						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per pekerja	233				
	404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan program bantuan peralihan	186, 197, 234				
	404-3 Persentase pekerja yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	189				
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan pekerja	228				
	405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	189				
Antidiskriminasi						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 406: Antidiskriminasi 2016	406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	208				
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	197				
Pekerja Anak						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 408: Pekerja Anak 2016	407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	207-208				

GRI Indeks	Pengungkapan-pengungkapan	Halaman	Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Yang Tidak Dicantumkan		Rujukan Standar Sektor GRI
				Alasan	Penjelasan	
Kerja Paksa						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 409: Kerja Paksa 2016	409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	207-208				
Masyarakat Setempat						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan	199				
	413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	199				
Kebijakan Publik						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 415: Kebijakan Publik 2016	415-1 Kontribusi politik.	239				
Pemasaran dan Pelabelan						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	106				
	417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	282				
	417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	282				
Privasi Pelanggan						
GRI 3 Topik Material 2021	3-3 Pengungkapan manajemen topik	17, 44, 68,77, 113, 115, 121, 132, 183, 189, 197				
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	226-227				

Indeks GRI G4 Jasa Keuangan

GRI Standard	Indeks GRI G4	Pengungkapan	Halaman	Yang Tidak Dicantumkan			Rujukan Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
GRI G4 Financial Services	FS1	Kebijakan yang memuat komponen lingkungan dan sosial spesifik yang diterapkan pada lini bisnis.	25				
	FS2	Prosedur untuk menilai dan menyaring risiko lingkungan dan sosial pada lini bisnis.	61				
	FS3	Proses pemantauan atas implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial yang tercantum dalam perjanjian atau transaksi.	64				
	FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi pekerja dalam menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan serta sosial pada lini bisnis.	65, 187				
	FS5	Interaksi dengan klien/investee/mitra usaha terkait risiko dan peluang lingkungan dan sosial.	31				
	FS6	Persentase portofolio untuk setiap lini bisnis berdasarkan wilayah, skala usaha (misalnya mikro/UKM/besar), dan sektor.	29, 213-217				
	FS7	Nilai moneter produk dan jasa yang dirancang untuk memberikan manfaat sosial tertentu pada setiap lini bisnis, dirinci berdasarkan tujuan.	219				
	FS8	Nilai moneter produk dan jasa yang dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan tertentu pada setiap lini bisnis, dirinci berdasarkan tujuan.	218-219, 225				
	FS9	Cakupan dan frekuensi audit untuk menilai implementasi kebijakan lingkungan dan sosial serta prosedur penilaian risiko.	64				
	FS10	Persentase dan jumlah perusahaan dalam portofolio institusi yang telah diajak berinteraksi oleh organisasi pelapor terkait isu lingkungan atau sosial.	218				
	FS11	Persentase aset yang melalui proses penyaringan positif dan negatif terkait lingkungan atau sosial.	218				
	FS12	Kebijakan pemungutan suara yang diterapkan untuk isu lingkungan atau sosial atas saham yang hak suaranya dimiliki atau diberikan nasihat pemungutan suara oleh organisasi pelapor.	172				
	FS13	Titik layanan di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah atau wilayah yang kurang beruntung secara ekonomi, berdasarkan jenis.	93				
	FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat kurang mampu.	105				
	FS15	Kebijakan untuk perancangan dan penjualan produk serta jasa keuangan yang adil.	91				
	FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis penerima manfaat.	96				

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [OJK G.4]

Nomor Indeks	Nama Indeks	Halaman
A. Strategi Keberlanjutan		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	25
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
B.1	Aspek Ekonomi	17
B.1.a	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual	17
B.1.b	Pendapatan atau penjualan	17
B.1.c	Laba atau rugi bersih	17
B.1.d	Produk ramah lingkungan	17, 18, 19
B.1.e	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	18
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	18
B.2.a	Penggunaan energi	18
B.2.b	Pengurangan emisi yang dihasilkan	18
B.2.c	Pengurangan limbah dan efluen	18
B.2.d	Pelestarian keanekaragaman hayati	18
B.3	Aspek Sosial	18
C. Profil Perusahaan		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	14, 25
C.2	Alamat Perusahaan	14
C.3	Skala Usaha	14, 211
C.3.a	Total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban;	14
C.3.b	Jumlah pekerja	14, 228-230
C.3.b.1	Jumlah pekerja menurut jenis kelamin	228
C.3.b.2	Jumlah pekerja menurut jabatan	228
C.3.b.3	Jumlah pekerja menurut usia	228
C.3.b.4	Jumlah pekerja menurut pendidikan	230
C.3.b.5	Jumlah pekerja menurut status ketenagakerjaan	228
C.3.c	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham	14
C.3.d	Wilayah operasional	16
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	14-15
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	19
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	16
D. Penjelasan Direksi		
D.1	Penjelasan Direksi	6-8

Nomor Indeks	Nama Indeks	Halaman
D.1.a	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	7
D.1.b	Penerapan Keuangan Berkelanjutan	7
D.1.c	Strategi pencapaian target	8
E. Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	12, 13, 25, 29, 41, 170
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	173, 187
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	177 - 181
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	31 - 38
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	29
F. Kinerja Keberlanjutan		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	59, 176, 187, 191, 193
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	175, 211
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	17, 73, 219
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	241
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	76 - 78, 242
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	18, 77, 242
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	77, 242
F.8	Penggunaan Air	78, 242
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	76, 205
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	76, 205, 206, 219
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	70, 243-244
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	18, 68 - 78, 243 - 244
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	18, 76 - 78, 243
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	76, 78, 243
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)	76, 243
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan.	76
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen	81
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	182, 183, 184, 189, 190
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	182, 207
F.20	Upah Minimum Regional	182, 189, 190
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	190, 193, 194

Nomor Indeks	Nama Indeks	Halaman
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pekerja	185 - 187, 233 - 234
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	18, 20-22, 198 - 206, 247 - 275
F.24	Pengaduan Masyarakat	199, 226 - 227
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	18, 198 - 206, 241
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	64, 65, 73, 74, 75, 77, 78, 121
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	90, 118
F.28	Dampak Produk/Jasa	18, 20-22, 88, 247-275
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	88
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	18, 226
G. Lain-lain:		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	5, 293, 296
G.2	Lembar Umpan Balik	297
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	31,297
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017	284-286

Referensi Sustainability Accounting Standard Board (SASB)

Nomor Indeks	Nama Indeks	Halaman
Data Security		
FN-CB-230a.1.	Jumlah pelanggaran data, persentase pelanggaran data pribadi, jumlah pemilik akun yang terkena dampak	125, 227
FN-CB-230a.2.	Deskripsi pendekatan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko keamanan data	117, 121, 123
Financial Inclusion & Capacity Building		
FN-CB-240a.1.	(1) Jumlah dan (2) jumlah pinjaman yang diberikan yang memenuhi syarat untuk program-program yang dirancang untuk mempromosikan usaha kecil dan pengembangan masyarakat	217
FN-CB-240a.2.	(1) Jumlah dan (2) jumlah pinjaman yang telah jatuh tempo dan pinjaman yang tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat untuk program-program yang dirancang untuk mempromosikan usaha kecil dan pengembangan masyarakat	92, 100
FN-CB-240a.3	Jumlah rekening giro ritel tanpa biaya yang diberikan kepada nasabah yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau belum memiliki rekening bank	91
FN-CB-240a.4.	Jumlah peserta dalam inisiatif literasi keuangan untuk nasabah yang tidak memiliki rekening bank, kurang terlayani, atau kurang terlayani	98
Incorporation of Environmental, Social, and Governance Factors in Credit Analysis		
FN-CB-410a.2	Deskripsi pendekatan untuk memasukkan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam analisis kredit	207
Financed Emissions		
FN-CB-410b.1	Emisi bruto absolut yang dibiayai, dipilih berdasarkan (1) Cakupan 1, (2) Cakupan 2, dan (3) Cakupan 3	70-71

Nomor Indeks	Nama Indeks	Halaman
FN-CB-410b.2.	Eksposur bruto untuk setiap industri berdasarkan kelas aset	70, 244
FN-CB-410b.3	Persentase paparan bruto yang termasuk dalam perhitungan emisi yang dibiayai	71
FN-CB-410b.4	Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi yang dibiayai	68-69
Business Ethics		
FN-CB-510a.1	Jumlah total kerugian moneter sebagai akibat dari proses hukum yang terkait dengan penipuan, perdagangan orang dalam, antimonopoli, perilaku anti-persaingan, manipulasi pasar, malpraktek, atau undang-undang atau peraturan industri keuangan terkait lainnya	134
FN-CB-510a.2	Deskripsi kebijakan dan prosedur whistleblower	134
Systemic Risk Management		
FN-CB-550a.1	Skor Global Systemically Important Bank (G-SIB), berdasarkan kategori	212
FN-CB-550a.2	Uraian mengenai pendekatan untuk mengintegrasikan hasil stress test baik yang bersifat wajib maupun sukarela ke dalam perencanaan kecukupan modal, strategi jangka panjang perusahaan, dan aktivitas bisnis lainnya.	178

Referensi Sustainable Banking Assessment (SUSBA)

Indikator	Pengungkapan	Halaman
Tujuan	Strategi keberlanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan	25-31
	Partisipasi dalam inisiatif keuangan berkelanjutan	81-86
Kebijakan	Pernyataan publik tentang LST	7, 10
	Pernyataan publik tentang sektor-sektor tertentu	6-11
	Tanggung jawab atas risiko terkait iklim	44-59
Proses	Penilaian risiko LST dan persetujuan transaksi	60-67
	Pengawasan dan keterlibatan klien	31-32, 90-92, 198-199
	Proses pemantauan	90-92, 198-199
Masyarakat	Tanggungjawab kepada LST	81-86, 198-199
	Pelatihan staff lingkungan & sosial, serta evaluasi kinerja	59, 65, 81, 233-234
Produk	Integrasi LST dalam produk dan layanan	20, 81-86
	Penilaian risiko dan mitigasi LST pada tingkat portofolio	44-59
Portofolio	Pengungkapan eksposur risiko LST dan target	60-67, 71-72

Referensi Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Topik	Fokus Pengungkapan	Tanggapan BRI	Halaman
Tata Kelola			
(a) Pengawasan Dewan terhadap risiko-risiko terkait iklim	Proses dan frekuensi informasi		41
	Pengaruh terhadap perencanaan dan tujuan bisnis		42
	Bagaimana dewan menilai kemajuan terhadap tujuan		41
(b) Peran manajemen dalam menilai dan mengelola risiko terkait perubahan iklim	Tanggung jawab atas risiko terkait iklim		41-43
	Penjelasan tentang struktur organisasi		41-43
	Proses komunikasi		41-43
	Proses pemantauan		41-43
Strategy			
(a) Risiko terkait iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang	Risiko terkait iklim dalam jangka pendek, menengah dan panjang		44-46
	Risiko spesifik yang dapat bersifat material untuk setiap jangka waktu		44-46
	Proses untuk menentukan risiko material		50-59
(b) Dampak pada bisnis, strategi dan perencanaan	Dampak terhadap bisnis dan strategi		45,46,48
	Dampak pada perencanaan keuangan, waktu dan prioritas		45,46,48
	Bagaimana risiko diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi saat ini		59
	Penjelasan strategi terkait iklim		44,59
(c) Ketahanan strategi menggunakan skenario 2 derajat atau lebih rendah			57-58
Risk Management			
(a) Proses untuk menilai risiko terkait iklim	Proses manajemen risiko		60-62
	Persyaratan peraturan yang ada dan yang akan muncul		63-64
	Proses untuk menilai ukuran dan cakupan risiko		66-67
(b) Proses untuk mengelola risiko terkait iklim			60-62
(c) Integrasi proses risiko ke dalam manajemen risiko secara keseluruhan			64-65
Metrics and Targets			
(a) Metrik yang digunakan untuk menilai risiko terkait iklim			68-71
(b) Emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2			68
(c) Penjelasan target yang digunakan			69

Indeks IFRS

Indeks IFRS S1

Pengungkapan		Tanggapan BRI	Hal
Tata Kelola			
	Tanggung jawab terkait risiko dan peluang keberlanjutan, keterampilan		85
a) Pengawasan Direksi terhadap risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan	Proses dan frekuensi penyampaian informasi		85, 86
	Pengaruh terhadap perencanaan dan tujuan bisnis		90
	Cara Direksi mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan		109-111
b) Peran manajemen dalam menilai dan mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan	Tanggung jawab terkait risiko keberlanjutan		85
	Deskripsi struktur organisasi		85
	Proses komunikasi		85
	Proses pemantauan		85
Strategi			
a) Strategi untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan	Risiko dan peluang terkait keberlanjutan		87-89
	Dampak terhadap model bisnis dan rantai nilai		89-90
	Dampak terhadap strategi dan pengambilan keputusan		89-90
	Dampak terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas		87-88
	Ketahanan strategi dan model bisnis		90
b) Risiko dan peluang terkait keberlanjutan	Risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang secara wajar dapat diharapkan akan mempengaruhi prospek dan cakupan waktu		89
c) Model bisnis dan rantai nilai	Dampak saat ini dan yang diantisipasi dari risiko dan peluang terkait keberlanjutan terhadap model bisnis dan rantai nilai, serta di mana dampaknya terkonsentrasi		89
d) Strategi dan pengambilan keputusan	Menanggapi risiko dan peluang terkait keberlanjutan, kemajuan, dan trade-offs		89
e) Posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas	dampak dari risiko dan peluang terkait keberlanjutan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas serta dampak yang diantisipasi		89
f) Ketahanan	Penilaian kualitatif dan, jika berlaku, kuantitatif terhadap ketahanan strategi dan model bisnis terkait dengan risiko keberlanjutan yang dihadapi.		89
Manajemen Risiko			
a) Proses untuk menilai risiko terkait keberlanjutan	Proses manajemen risiko		104-108
	Persyaratan regulasi yang ada dan yang sedang berkembang		104-108
	Proses untuk menilai ukuran dan cakupan risiko		104-108
b) Proses untuk mengelola risiko terkait keberlanjutan			104-108
c) Integrasi proses risiko ke dalam manajemen risiko secara keseluruhan			104-108

Pengungkapan	Tanggapan BRI	Hal
Metrik dan Target		
a) Metrik yang digunakan untuk Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFR yang berlaku		109-111
b) Jelaskan target yang digunakan		109-111

Indeks IFRS S2

Pengungkapan	Tanggapan BRI	Hal
Tata Kelola		
a) Pengawasan Dewan Direksi terhadap risiko terkait iklim	Proses dan frekuensi penyampaian informasi	144 - 145
	Pengaruh terhadap perencanaan bisnis dan tujuan	146
	Bagaimana Direksi mengevaluasi kemajuan dibandingkan tujuan	146
b) Peran manajemen dalam menilai dan mengelola risiko terkait iklim	Tanggung jawab terkait risiko iklim	146
	Deskripsi struktur organisasi	146
	Proses komunikasi	146
	Proses pemantauan	146
Strategi		
a) Proses untuk menilai risiko terkait iklim	Deskripsi rentang waktu	147
	Risiko spesifik yang dapat menjadi material pada setiap rentang waktu	147
	Proses untuk menentukan risiko material	148
b) Dampak terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan and planning	Dampak terhadap bisnis dan strategi	148
	Dampak terhadap perencanaan keuangan, penentuan waktu, dan prioritas	148
	Uraian strategi terkait perubahan iklim	150-152
c) Ketangguhan strategi menggunakan dengan skenario 2 derajat atau lebih rendah		
Manajemen Risiko		
a) Proses untuk menilai risiko terkait iklim	Proses manajemen risiko	60-62
	Persyaratan regulasi yang ada dan yang sedang berkembang	60-62
	Proses untuk menilai ukuran dan cakupan risiko	60-62
b) Proses untuk mengelola risiko terkait iklim	Dampak terhadap bisnis dan strategi	64-65
c) Integrasi proses risiko ke dalam manajemen risiko secara keseluruhan	Dampak terhadap perencanaan keuangan, waktu, dan prioritas	64-65

Pengungkapan		Tanggapan BRI	Hal
Metrik dan Target			
a) Metrik yang digunakan untuk menilai risiko terkait iklim	Deskripsi mengenai cakupan waktu		68-71
	Risiko spesifik yang dapat bersifat material untuk setiap cakupan waktu		68-71
	Proses untuk menentukan risiko material		68-71
b) Emisi Lingkup 1 dan Lingkup 2			68
c) Jelaskan target yang digunakan			69

Indeks Pelaporan IDX

S-01 Kesenjangan Gender

Level Jabatan	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah Pegawai	Persentase pegawai (%)	Jumlah Pegawai	Persentase pegawai (%)
Entry-Level	45.161	93,15	35.321	96,86
Mid-Level	1.875	3,87	740	2,03
Senior-Level	1.351	2,79	374	1,03
Executive-Level *	96	0,20	31	0,09
Total Pegawai	48.483	100	36.466	100

*) termasuk pejabat setingkat Direksi

S-02 Jumlah Level Pegawai yang Dimiliki oleh Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur

Rentang usia (tahun)	Entry-Level		Mid-Level		Senior-Level		Executive-Level*		Jumlah Pegawai
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
18-25	4.339	9.033	0	0	0	0	0	0	13.372
25-35	18.143	13.817	723	405	36	11	0	0	33.135
35-45	18.532	9.847	931	293	925	252	19	4	30.803
45-55	4.123	2.609	220	41	383	109	74	26	7.585
>55	24	15	1	1	7	2	3	1	54

*) termasuk pejabat setingkat Direksi

Assurance



Independent Assurance Statement No. DECAR-IAS/026/III/2026

Provided by **Decar Verite Asia**

On selected disclosures within the scope of work, included in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2025 Sustainability Report.

To: **Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Stakeholders**

As an independent licensed provider of sustainability assurance services, Decar Verite Asia has been engaged by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") to provide independent assurance on the information reported in the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk's Sustainability Report 2025 ("the Sustainability Report") for the period beginning on 1st January 2025 and ending on 31st December 2025.

Objective

The objective of this assurance is to provide an independent opinion on BRI's qualitative and quantitative information within the scope of work, as well as their supporting management system, as stated in the Sustainability Report. The assurance work was conducted within the define scope and limitations; therefore, this statement is not intended to serve as a basis for interpreting the sustainability or overall performance of BRI.

Scope

Decar Verite Asia conducted a **Type 2** assurance engagement under AA1000AS v3 (2020) on selected topics disclosed in the Sustainability Report. The engagement involved: Assessing the adherence to the AA1000AP Standard (2018)

- Assessing the reliability and quality of selected sustainability performance of disclosed information
- Assessment of on selected topics disclosed in the Sustainability Report, covering the following areas:

- Green Financing**
- Inclusive Finance**
- Financed Emissions**
GRI 102-7: Scope 3 GHG Emissions
GRI 302: Energy

- Human Rights and Community Relations**
GRI 413: Local Communities
- Consumer Financial Protection**
- Privacy and Data Security**
GRI 418: Customer Privacy
- Human Capital Development**
GRI 404: Training and Education
- Risk and Crisis Management**
- Impacts of Climate Change**
GRI 102-1: Transition plan for climate change mitigation
GRI 102-2: Climate change adaptation plan
GRI 102-3: Just Transition
GRI 102-4: GHG emissions reduction targets and progress
- Operational Emissions Management**
GRI 102-5: Scope 1 GHG emissions
GRI 102-6: Scope 2 GHG emissions
GRI 102-7: Scope 3 GHG emissions
GRI 102-8: GHG emissions intensity
- Business Ethics**
GRI 2 part 3: Governance
GRI 205: Anti Corruption

The data and information within the selected disclosures, including but not limited to, commitment, initiatives, and performance, and KPIs were assured to a **Moderate Level** of

Assurance. The procedures included evaluating the selected disclosures and performing sample-based testing of supporting evidence to assess the adherence, reliability, and quality of the information against the defined criteria.

Reference and Criteria

Decar Verite Asia performed the assurance in accordance with the **AA1000 Assurance Standard v3 (2020)**. As required under type 2 assurance, the work carried out to evaluate the reliability and quality of specified sustainability performance and disclosed information, in addition to assessing adherence to the AA1000AP Standard (2018). Specific performance data and information were assessed refer to:

- Regulation of Indonesia Financial Service Authority:**
POJK No.51/2017 and SEOJK No.16/2021;
- GRI Standards 2021;**
- SASB Commercial Banks; and**
- IFRS Standard**

Responsibilities

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Preparing the data in accordance with generally accepted reporting practices. This responsibility also includes ensuring the accuracy and completeness of the information reported,



Assurance



implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation of the report, ensuring the performance data are fairly stated in accordance with applicable standards, as well as ensuring the data and information are not edited or amended in any way after assurance.

Decar Verite Asia

Evaluating the content of the Sustainability Report, assessing collected evidence on the agreed-upon subject matter and criteria, in accordance with the terms of reference agreed upon with BRI.

Methodology

The team undertook the following activities to render their opinion:

- Conducted an initial review of the material topics in the Sustainability Report to generate a list of evidence needed to ensure accuracy and credibility;
- Engaged with individuals responsible for managing the material topics;
- Evaluated the management systems to perform data collection, compilation, calculation, reporting, and validation;
- Verified the information and evidence as regards the references and criteria used;
- Communicated the recommendations to provide an opportunity for corrections;
- Reviewed the final content of the Sustainability Report;
- Prepared the statement letter and management letter, followed by the necessary approval as per Decar Verite Asia's assurance protocols.

Limitations

Decar Verite Asia planned and performed the work to obtain sufficient information to support a conclusion at a Moderate

Level of Assurance. The process included review of governance documents and relevant data, as well as limited recalculations using risk-based sampling to reduce, though not eliminate, the risk of error. Decar Verite Asia does not provide assurance on financial data as BRI has engaged other parties to audit the financial statements. The assurance for GHG emissions was conducted based on the results of the GHG verification conducted by an independent third party appointed by BRI.

Statement of Competency and Independence

Decar Verite Asia is an independent licensed provider of assurance services. Our team of experts possesses the technical expertise, competency, and extensive experience necessary to conduct assurance engagements on environmental, social, and various other topics in accordance with the AA1000 Assurance Standard. No member of the assurance team has a business relationship with BRI beyond this assignment. Decar Verite Asia conducted this assurance engagement independently and impartially with no conflicts of interest.

Adherence to AA1000 Accountability Principles Standard (2018)

Decar Verite Asia has concluded that the selected disclosures within the scope of assurance, as stated in the Sustainability Report, adhere to the AA1000 Accountability Principles Standard (2018).

Inclusivity

BRI has implemented processes to uphold the principle of Inclusivity by identifying internal and external stakeholders based on their level of influence and dependence on its operational and business activities. The interests and expectations of each stakeholder group have been identified and addressed through engagement methods and

frequencies appropriate to their characteristics and relevance. Stakeholder perspectives are integrated into BRI's materiality determination process. Through the distribution of online questionnaires, BRI gathers input to assess its impacts on society, the environment, and the economy, as well as potential risks to the organization. The results of this engagement are considered in determining material topics, demonstrating the implementation of inclusive stakeholder engagement practices.

Materiality

BRI has implemented a structured materiality determination process using a double materiality approach, encompassing both impact materiality and financial materiality. Internal and external stakeholder groups were involved in assessing and prioritizing relevant topics, alongside the engagement of subject-matter experts to ensure robust evaluation. BRI established defined thresholds to determine the level of significance of each topic. Based on this process, the identified material topics include business ethics, privacy & data security, and inclusive finance.

As part of BRI's commitment to climate-related disclosure in accordance with the IFRS S2 framework, Climate Risk, although not identified as a material topic, is still reported to address evolving global issues and respond to the increasing expectations of investors and regulators.

Responsiveness

BRI demonstrates responsiveness by managing material topics through defined strategies, measurable targets, and performance monitoring, with these targets embedded in Board-level KPIs. To advance financial inclusion and social financing, BRI provides accessible products such as Simpedes, Kupedes, and Kredit Usaha Rakyat, complemented by credit relaxation for customers affected by natural disasters. In addressing climate-related



Assurance



challenges, BRI integrates low-carbon transition risk management into its enterprise risk framework, conducts Climate Risk Stress Testing, develops climate risk-based financing, calculates Scope 1, Scope 2, and financed emissions, and obtains third-party verification for Scope 1 and Scope 2 emissions. These measures demonstrate BRI's efforts to respond proactively to evolving sustainability risks and stakeholder expectations.

Impact

BRI has established processes to identify, monitor, measure, evaluate, and manage its material impacts. As part of its sustainable finance commitment, BRI's sustainable loan portfolio reached 60.48% of total outstanding loans in 2025, comprising both social and green loans. In expanding financial access, BRI leverages digital platforms alongside approximately 1.19 million Agen BRILink agents, who serve as key channels in providing banking services to rural and remote areas with limited branch access. Moreover, BRI

manages its environmental impacts through a decarbonization strategy aligned with its Net Zero Emission (NZE) target by 2050. BRI has reduced its operational emissions (Scope 1 and Scope 2) through energy efficiency initiatives, installation of solar panels, and the gradual transition to environmentally friendly vehicles. These measures demonstrate BRI's systematic approach to managing and mitigating its significant impacts.

POJK No.51/2017 and SEOJK No.16/2021

The disclosure provided in the Sustainability Report align with the disclosure requirements outlined in POJK No.51/2017 and SEOJK No.16/2021.

Adherence to GRI Standards 2021

Decar Verite Asia confirms that the disclosures are in line with BRI's claim that the Sustainability Report has been

prepared in accordance with the GRI Standards. The disclosures of the management approach for material topics are, in general, fairly presented. The principles for achieving quality sustainability reporting have been applied, and supporting documents were adequately provided during the assurance process.

Conclusions

Based on the methodology applied and the evidence obtained, within the scope of this assurance engagement, nothing has come to our attention that causes us to believe that the selected disclosures in the Sustainability Report have been materially misstated. The selected disclosures in the Sustainability Report have been fairly prepared and presented, in all material respects, in alignment with the applicable criteria. The procedures performed reduced the risk of error, but do not reduce the risk to zero.

Bogor, 06th March 2026
Signed on behalf of Decar Verite Asia

Corey Perniada
Director
Decar Verite Asia



AA1000
Licensed Report
000 6671/3 2NFK8



Assurance

Greenhouse Gas Verification




VERIFIKASI GAS RUMAH KACA
OPINI PIHAK KETIGA

Lembar Opini No. GRK 0008-A/01.01.13-01
SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Gedung SUCOFINDO 61 Floor - J. KH. Guntur Amin Kav. 34 Jakarta 12780
 Phone: +62-21-1963666; Email: marketing_seri@sucofindo.co.id

PERNYATAAN PENJAMIN INDEPENDEN

Nama Organisasi Alamat Organisasi Ruang Lingkup Sektor Program/Mekanismen Standar Verifikasi Laporan Inventarisasi GRK Kriteria Verifikasi Laporan Inventarisasi GRK Periode Pelaporan & Periode Audit Ruang Lingkup Verifikasi	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jl. Sudirman Kav. 48 - 49, DKI Jakarta 10270 01.01.13 - General Voluntary ISO 14064:2019 Spesifikasi dengan Panduan untuk Verifikasi dan Validasi Pernyataan Gas Rumah Kaca ISO 14064:2018 - Spesifikasi dengan Panduan pada Tingkat Organisasi untuk Kuantifikasi dan Pelaporan Emisi dan Sempit Gas Rumah Kaca 1 Januari 2025 - 31 Desember 2025 Batasan organisasi adalah pengendalian operasional Aktivitas dengan mencakup Asset, Gedung & Perawatan, Kegiatan Operasional & Transportasi yang bertanggung di seluruh wilayah Indonesia Sumber emisi GRK mencakup pembakaran bahan bakar pada Diesel Generator, pembakaran bahan bakar pada Asset kendaraan (internal), penggunaan refrigerant pada pemrosesan pendingin dan ruang pendingin Jenis GRK yang dilaporkan mencakup CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
--	---

Laporan verifikasi terhadap Laporan Inventarisasi GRK dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. termasuk pernyataan keinsipulan dan opini verifikasi, merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari Verifikator SUCOFINDO ICS. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggungjawab atas penyajian dalam tingkat emisi GRK dalam Laporan Inventarisasi & Kuantifikasi Gas Rumah Kaca Tingkat Organisasi.

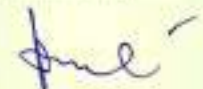
Proses verifikasi dilaksanakan oleh SUCOFINDO ICS dengan menggunakan acuan standar ISO 14064:2018, dengan tingkat jaminan terbatas (limited), ambang materialitas 5% dan kriteria verifikasi sesuai dengan ISO 14064:2018, pada periode pelaporan dari [01/01/2025] hingga [31/12/2025].

Data yang diperiksa selama verifikasi bersifat historis.

Berdasarkan tinjauan verifikasi yang dilakukan SUCOFINDO ICS, tidak ada bukti bahwa pernyataan GRK tidak benar secara material dan tidak menyajikan data dan informasi GRK yang wajar.

Kingkasan tingkat emisi GRK terverifikasi selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Sumber Emisi	Periode Pelaporan 2025
Kategori 1: Emisi langsung	114.104,00 tonCO ₂ e
Kategori 2: Emisi tidak langsung dari energi yang dibeli	330.093,00 tonCO ₂ e
Total	444.197,00 tonCO₂e


Agus Permedi
 Ketua Badan Pelaksana
 Chairman of Governing Board




Opini ini diterbitkan pada tanggal 10/02/2026


 5520508


 3 C1-2023 A

Lembar Umpan Balik ^[G.2] ^[G.3]

Laporan Keberlanjutan 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dan keberlanjutan. Perusahaan tidak mencatat adanya tanggapan terhadap Laporan Keberlanjutan tahun sebelumnya.

1. Laporan ini mudah dimengerti

☐ Tidak setuju ☐ Netral ☐ Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi aspek material Perusahaan, baik dari sisi positif dan negatif

☐ Tidak setuju ☐ Netral ☐ Setuju

3. Mohon berikan urutan pada tingkat topik material di bawah ini:
(nilai 1=paling prioritas s/d 7=kurang prioritas)

- Inklusi Keuangan dan Digitalisasi ()
- Tata Kelola Keberlanjutan ()
- Keamanan dan Privasi Data ()
- Investasi dan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab ()
- Manajemen Emisi dan Perubahan Iklim ()
- Manajemen SDM dan HAM ()
- Hubungan Masyarakat ()

4. Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini.

Nama Lengkap _____

Pekerjaan _____

Nama Lembaga/Perusahaan _____

Golongan Pemangku Kepentingan

☐ Investor ☐ Nasabah ☐ Pekerja ☐ Masyarakat ☐ Pemerintah ☐ Lainnya

Mohon kirimkan kembali lembar umpan balik kepada

Dhanny
Sekretaris Perusahaan

Gedung BRI I
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Phone : +6221 575 1966
Faksimili : +6221 570 0916

*Dalam laporan sebelumnya, BRI mencatat tidak adanya umpan balik yang diterima sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan ^[G.3]



PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Gedung BRI I
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia

T (62-21) 251 0244, 251 0254
F (62-21) 250 0065, 250 0077
W www.bri.co.id